PEMERINTAH KOTA TARAKAN

2021 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TARAKAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TARAKAN

WALI KOTA TARAKAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 470);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 11);

18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20);
21. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 40);
22. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Tarakan.
4. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Kebijakan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II
SISTEMATIKA RKPD KOTA TARAKAN TAHUN 2021

Pasal 2

Sistematika penyusunan RKPD Kota Tarakan Tahun 2021 sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan
BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
BAB V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
BAB VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
BAB VII. Penutup

Pasal 3

(1) RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi:
   a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah (Renja-PD), berupa program/kegiatan Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;

b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2021.

Pasal 4

RKPD Kota Tarakan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 22 Juli 2020

WALI KOTA TARAKAN,

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 22 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2020 NOMOR 232

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 30 TAHUN 2020 ii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xx

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-6
1.4 Maksud dan Tujuan I-8
1.5 Sistematika Dokumen RKPD I-9

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-2

2.1. Kondisi Umum Daerah II-2
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-2
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-16
2.1.3 Aspek Daya Saing II-35
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum II-55

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan serta Realisasi RPJMD II-179

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah II-182

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH III-2

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-2
3.1.1 Kondisi Ekonomi Tahun 2019 ..... III-3
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah III-21

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-26
3.2.1. Kinerja Pelaksanaan APBD III-29

3.3. Kerangka Pendanaan III-42
3.3.1 Proyeksi Pendapaatan Tahun 2021 ..... III-42
3.3.2 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2021 ..... III-45

3.3.3 Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Tahun 2020 ..... III-49
3.3.4 Penghitungan Kerangka Pendanaan III-50

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021 ..... IV-2
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-3
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan..... IV-9
4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional..... IV-9
4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Prov. Kaltara 2021 ..... IV-18
4.2.3. Isu Strategis Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2021 ……..... IV- 26
4.2.4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Tarakan 2021..... IV-30

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2021 ..... V-2
5.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2021 ..... V-2
5.2. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang Mendukung Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)..... V-2

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021 ..... VI-2

BAB VII PENUTUP VII-2

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1. Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian Lahan Kota Tarakan .. II-5

Tabel 2.2. Luas Wilayah Berdasarkan Kelas Kemiringan Lereng II-6

Tabel 2.3. Penyebaran Dan Luas Satuan Fisiografi II-7

Tabel 2.4. Luas DAS dan Panjang Sungai di Kota Tarakan II-8

Tabel 2.5. Penyebaran dan Luas Jenis Tanah Kota Tarakan II-9

Tabel 2.6. Luas Tanah Menurut Penggunaan Kota Tarakan (Ha) II-11

Tabel 2.7. Luas Wilayah Kawasan Lindung Berdasarkan Kecamatan Tahun 2012 ..... II-12

Tabel 2.8. Jumlah Penduduk Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-14

Tabel 2.9. Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan II-14

Tabel 2.10. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Tarakan Tahun 2019 ..... II-15

Tabel 2.11. Perkembangan PDRB Perkapita Kab/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2015-2019 ..... II-21

Tabel 2.12. Data Kemiskinan Kab/Kota di Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2015-2019 ..... II-22

Tabel 2.13. Statistik Kemiskinan Kota Tarakan 2015-2019 ..... II-31

Tabel 2.14. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Tarakan Tahun 2014-2019 ..... II-32

Tabel 2.15. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Sebulan di Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-37

Tabel 2.16. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di Kota Tarakan Tahun 2019 ..... II-37

Tabel 2.17. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Kota Tarakan Tahun 2019... II-38

Tabel 2.18. Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk di Kota Tarakan Tahun 2015-2017 ..... II-39

Tabel 2.19. Rekapitulasi Izin Dan Non Izin Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 10 tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu II-40
Tabel 2.20. Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-44
Tabel 2.21. Perkembangan Arus Lalu Lintas Penumpang di Bandara dan Pelabuhan Laut Kota Tarakan Tahun 2015-2019 (Orang) II-48
Tabel 2.22. Perkembangan Arus Bagasi di Bandar Udara Internasional Juwata Tarakan di Kota Tarakan Tahun 2015-2019 (Barang) II-48
Tabel 2.23. Jumlah Kantor Bank Menurut Kelompok Bank di Kota Tarakan Tahun 2013-2017 ..... II-50
Tabel 2.24. Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel II-51
Tabel 2.25. Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Sumber Air Minum Bersih Dan Sumber Air Minum Layak Kota Tarakan 2015-2019 ..... II-52
Tabel 2.26. Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Tarakan Tahun 2015-2019 .. II-54
Tabel 2.27. Angka Putus Sekolah (APtS) di Kota Tarakan Tahun 2014 - 2018 ..... II-59
Tabel 2.28. Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Di Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-66
Tabel 2.29. Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Di Kota TarakanTahun 2015 – 2019 ..... II-67
Tabel 2.30. Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota TarakanTahun 2015 – 2019 ..... II-68
Tabel 2.31. Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019 ..... II-69

Tabel 2.32. Rasio Puskesmas, Klinik, Pustu per Satuan Penduduk di Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019 ..... II-70
Tabel 2.33. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kota Tarakan Tahun 2013-2017 ..... II-70
Tabel 2.34. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-71
Tabel 2.35. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk di Kota Tarakan Tahun 2014 – 2018 ..... II-72
Tabel 2.36. Jumlah Komplikasi Kebidanan Yang Mendapat Penanganan Di Kota Tarakan Tahun 2013 – 2017 ..... II-73
Tabel 2.37. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Di Kota Tarakan Tahun 2013– 2018 ..... II-74
Tabel 2.38. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Di Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019 ..... II-74
Tabel 2.39. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Di Kota Tarakan Tahun 2013 – 2017 ..... II-75
Tabel 2.40. Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Di Kota Tarakan Tahun 2013 – 2017 ..... II-76
Tabel 2.41. Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita DBD Di Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019 ..... II-77
Tabel 2.42. Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Tarakan Tahun 2015– 2019 ..... II-78
Tabel 2.43. Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Tarakan Tahun 2015– 2019 ..... II-79
Tabel 2.44. Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019 ..... II-80
Tabel 2.45. Kondisi Jaringan Jalan Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-82
Tabel 2.46. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-83

Tabel 2.47. Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/ Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M) Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-84
Tabel 2.48. Rasio Fasilitas Pemakaman Umum per Satuan Penduduk..... II-87
Tabel 2.49. Rasio Bangunan ber-IMB di Kota Tarakan..... II-87
Tabel 2.50. PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Tarakan Tahun 2014-2018 ..... II-98
Tabel 2.51. Sarana Sosial di Kota Tarakan Tahun 2018-2018..... II-99
Tabel 2.52. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Tarakan Tahun 2014-2018..... II-100
Tabel 2.53. PMKS Yang Memperoleh Bantuan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Di Kota Tarakan Tahun 2014-2018..... II-101
Tabel 2.54. Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Kota Tarakan Tahun 2014-2018..... II-101
Tabel 2.55. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM)Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Tarakan Tahun 2014-2018 ..... II-102
Tabel 2.56. Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama MasaTanggap Darurat Kota Tarakan Tahun 2013- 2017 ..... II-103
Tabel 2.57. Persentase Korban Bencana Yang Dievaluasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Kota Tarakan Tahun 2014-2018..... II-103
Tabel 2.58. Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial Kota Tarakan Tahun 2014-2018..... II-104
Tabel 2.59. Angka Sengketa Pengusaha Kerja Per Tahun di Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-105
Tabel 2.60. Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) di Kota Tarakan Tahun 2015-2019..... II-106

Tabel 2.61. Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan Di Kota TarakanTahun 2015-2019 ..... II-107
Tabel 2.62. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Di Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-107
Tabel 2.63. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Di KotaTarakan Tahun 2013-2015 ..... II-108
Tabel 2.64. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Di Kota Tarakan Tahun 2015-2019 II-108
Tabel 2.65. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan di Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019 ..... II-109
Tabel 2.66. Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD Kota Tarakan Tahun 2013 – 2017 ..... II-110
Tabel 2.67. Rasio KDRT Di Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019 ..... II-111
Tabel 2.68. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019 ..... II-112
Tabel 2.69. Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019 ..... II-113
Tabel 2.70. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019 ..... II-113
Tabel 2.71. Ketersediaan Pangan Utama Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019 ..... II-114
Tabel 2.72. Sarana Prasarana Persampahan Kota Tarakan Tahun 2014-2019 ..... II-119
Tabel 2.73. Jumlah Penduduk Ber-KTP Di Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-120
Tabel 2.74. Kepemilikan Akte Kelahiran di Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-121
Tabel 2.75. Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-121
Tabel 2.76. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota Di Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-122

Tabel 2.77. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK di Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-122
Tabel 2.78. Jumlah PKK Aktif di Kota Tarakan Tahun 2014 – 2018 ..... II-123
Tabel 2.79. Jumlah Posyandu Aktif di Kota Tarakan Tahun 2015-2019.... II-124
Tabel 2.80. Jumlah Penduduk Kota Tarakan Tahun 2015-2019..... II-126
Tabel 2.81. Rata-Rata Jumlah Anak Per keluarga di Kota Tarakan Tahun 2013 – 2017 ..... II-127
Tabel 2.82. Ratio Akseptor KB di Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019..... II-127
Tabel 2.83. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun 2015-2019..... II-128
Tabel 2.84. Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Di KotaTarakan Tahun 2015 – 2019 ..... II-129
Tabel 2.85. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Di Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019 ..... II-130
Tabel 2.86. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB di Kota TarakanTahun 2015 – 2019 ..... II-130
Tabel 2.87. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKB) ber-KB di Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019 ..... II-131
Tabel 2.88. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKB) Ber-KB Di Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019..... II-132
Tabel 2.89. Cakupan Data Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Di Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019 ..... II-133
Tabel 2.90. Arus Penumpang Di Pelabuhan Laut Di Kota Tarakan Tahun 2015-2019 (orang)..... II-134
Tabel 2.91. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) II-143
Tabel 2.92. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Di Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-144
Tabel 2.93. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku KotaTarakan Tahun 2015 – 2019 ..... II-152

Tabel 2.94. Kunjungan Wisata di Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019 ..... II-155
Tabel 2.95. PAD Sektor Pariwisata di Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019. II-156
Tabel 2.96. Produksi Padi Dan Bahan Pangan Lokal Lainnya Kota TarakanTahun 2015 – 2019 ..... II-158
Tabel 2.97. Luas Panen Padi Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019 ..... II-159
Tabel 2.98. Jumlah Produksi Hasil Peternakan Kota Tarakan Tahun 2013-2017 ..... II-160
Tabel 2.99. Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota TarakanTahun 2015 – 2019 ..... II-165
Tabel 2.100. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kota Tarakan Tahun 2019 ..... II-167
Tabel 2.101. Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-179
Tabel 2.102. Rekapitulasi Tingkat Capaian Kinerja dan Predikat Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 Triwulan II II-180
Tabel 2.103. Rekapitulasi Tingkat Capaian Kinerja dan Predikat Anggaran Rentra SKPD Tahun 2020 Triwulan II II-181
Tabel 2.104. Faktor Penghambat dan Upaya-Upaya untuk Mencapai TargetPembangunan Daerah II-183
Tabel 3.1. Proyeksi Indikator Makro Ekonomi III-4
Tabel 3.2. Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai Investasi III-6
Tabel 3.3. Jumlah Nilai Investasi PMDN di Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... III-6
Tabel 3.4. Rekapitulasi Investasi PMDN Melalui OSS DPMPTSP Tahun 2019 ..... III-6
Tabel 3.5. Data Minat Investasi Tahun 2019 Berdasarkan Sektor Usaha Di Kota Tarakan Tahun 2019 ..... III-7
Tabel 3.6. **7** (tujuh) Sektor Kontribusi Terhadap Realisasi investasi Di Kota Tarakan Tahun 2019 ..... III-8
Tabel 3.7. Inflasi Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... III-11

Tabel 3.8. Capaian Menurunnya Tingkat Pengangguran RPJMD Tahun Kelima (2019) III-14
Tabel 3.9. Data Kemiskinan Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... III-21
Tabel 3.10. Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Nasional Tahun 2020-2021 ..... III-23
Tabel 3.11. Skala Interval otonomi Fiskal III-28
Tabel 3.12. Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... III-29
Tabel 3.13. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... III-34
Tabel 3.14. Realisasi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun 2015-2018 ..... III-38
Tabel 3.15. Rata-Rata Pertumbuhan APBD Kota Tarakan Tahun 2013-2018 ..... III-40
Tabel 3.16. Proyeksi Penerimaan Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 (dalam juta) III-45
Tabel 3.17. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 (dalam juta) III-46
Tabel 3.18. Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Kota Tarakan Tahun 2021 ..... III-49
Tabel 3.19. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 ..... III-50
Tabel 4.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tarakan 2019-2024 ..... IV-6
Tabel 4.2. Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2021 ..... IV-12
Tabel 4.3. Keterkaitan Prioritas Pembangunan (PP) Kalimantan Utara dengan Prioritas Pembangunan Nasional (PN) Tahun 2021 .. IV-22
Tabel 4.4. Sinergi Kebijakan Penanganan Covid-19 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 dan IV-24

Tabel 4.5. Prioritas Daerah dan Program Prioritas Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 ..... IV-28
Tabel 4.6. Sasaran dan Indikator Prioritas Pembangunan dan Target Tahun 2021 ..... IV-31
Tabel 4.7. Keterkaitan Prioritas Daerah Kota Tarakan terhadap Prioritas Nasional dan Provinsi Kaltara Tahun 2021 ..... IV-33
Tabel 5.1. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 ..... Lampiran-1
Tabel 5.2. Program, Kegiatan, Indikator Program dan Kegiatan sesuai Standar Pelayanan Dasar (SPM) Tahun 2021 ..... V-4
Tabel 5.3. Dukungan Program Perangkat Daerah Terhadap Prioritas Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 ..... V-17
Tabel 6.1. Indikator Kinerja Utama Kota Tarakan Tahun 2021 ..... VI-3
Tabel 6.2. Indikator Kinerja Kunci Kota Tarakan Tahun 2021 ..... VI-4

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	I-7
Gambar 2.1	Peta Administratif Kota Tarakan	II-3
Gambar 2.2	Persentase Luas Daratan Wilayah Per Kecamatan	II-5
Gambar 2.3	Peta Penggunaan Lahan Kota Tarakan	II-11
Gambar 2.4	Distribusi Penduduk Kota Tarakan Menurut Kecamatan Tahun 2019	II-15
Gambar 2.5	Pertumbuhan Penduduk Kota Tarakan Tahun 2015-2019 (jiwa)	II-16
Gambar 2.6	Pertumbuhan PDRB Kota Tarakan ADHK Kab/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2015-2019	II-18
Gambar 2.7	Indeks Gini/Gini Rasio Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2015-2019	II-19
Gambar 2.8	Laju Inflasi Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2015-2019	II-20
Gambar 2.9	Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2015-2019	II-23
Gambar 2.10	Rasio Kesenjangan Kemiskinan Kota Tarakan Tahun 2013-2016	II-24
Gambar 2.11	Perkembangan IPM Kab/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2015-2019	II-26
Gambar 2.12	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Tarakan Tahun 2015-2019 (Tahun)	II-27
Gambar 2.13	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Tarakan Tahun 2015-2019	II-28
Gambar 2.14	Angka Harapan Hidup Kota Tarakan Tahun 2013-2018	II-29
Gambar 2.15	Pengeluaran Perkapita Kota Tarakan Tahun 2015-2019 (Dalam Ribu)	II-30

Gambar 2.16 Tingkat Kesempatan Kerja Kota Tarakan Tahun 2014 - 2019 (%) II-33
Gambar 2.17 Tingkat Penganguran Terbuka Kota Tarakan Tahun 2013-2018 ..... II-34
Gambar 2.18 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Sebulan Di Kota Tarakan Tahun 2015-2019 (Rp.) II-36
Gambar 2.19 Pola Konsumsi Penduduk Kota Tarakan Tahun 2-19 (%) II-36
Gambar 2.20 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kota Tarakan Tahun 2013-2017 (Km) II-47
Gambar 2.21 Ketaatan Terhadap RTRW Kota Tarakan Tahun 2013-2017 ..... II-49
Gambar 2.22 Luas Wilayah Produktif (Ha) II-49
Gambar 2.23 Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Penerangan Listrik Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-53
Gambar 2.24 Persentase Anggota Rumah Tangga 5 Tahun Ke Atas Yang Menggunakan HP Kota Tarakan 2015-2019 ..... II-53
Gambar 2.25 Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan) di Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-55
Gambar 2.26 Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kota Tarakan Tahun 2014-2018 ..... II-57
Gambar 2.27 Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-57
Gambar 2.28 Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-58
Gambar 2.29 Angka Kelulusan di Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-60
Gambar 2.30 Angka Melanjutkan di Kota TarakanTahun 2015-2019 ..... II-60
Gambar 2.31 Jumlah SD/MI dan SMP/MTS dengan Kondisi Baik (%) II-61
Gambar 2.32 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-62

Gambar 2.33 Rasio Guru/Murid Sekolah SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-63
Gambar 2.34 Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-Rata Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-63
Gambar 2.35 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan dan Laki-Laki Kota Tarakan Tahun 2015-2017 ..... II-64
Gambar 2.36 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan dan Laki-Laki Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-65
Gambar 2.37 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-65
Gambar 2.38 Persentase Sempadan Sungai Terdapat Banguna Liar Kota Tarakan Tahun 2014-2018 ..... II-84
Gambar 2.39 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Kota Tarakan Tahun 2014-2018 ..... II-85
Gambar 2.40 Persentase Fasilitas Pengurangan Sampah Kota Tarakan Tahun 2014-2018 ..... II-86
Gambar 2.41 Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan terhadap Daratan Kota Tarakan Tahun 2014-2018 ..... II-88
Gambar 2.42 Ketaatan Terhadap RTRW Kota Tarakan Tahun 2014-2018 ..... II-88
Gambar 2.43 Rasio Rumah Layak Huni Kota Tarakan Tahun 2014-2018 ..... II-89
Gambar 2.44 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Tarakan Tahun 2014-2019 ..... II-90
Gambar 2.45 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau Kota Tarakan Tahun 2013-2017 ..... II-90
Gambar 2.46 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-92

Gambar 2.47 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-93
Gambar 2.48 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-94
Gambar 2.49 Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Manajemen Kebakaran Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-94
Gambar 2.50 Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-95
Gambar 2.51 Cakupan Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK Kota Tarakan Tahun 2015-2019..... II-96
Gambar 2.52 Persentase Penegakan PERDA Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-97
Gambar 2.53 Grafik PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Tarakan Tahun 2014-2018..... II-99
Gambar 2.54 Timbulan Sampah Kota Tarakan 2014 – 2018 (m3/hari) II-117
Gambar 2.55 Jumlah Sampah Yang Tertangani Di Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-118
Gambar 2.56 Grafik Jumlah Posyandu Aktif Di Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-125
Gambar 2.57 Perkembangan Arus Lalu Lintas Penumpang Bandara Juwata Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019..... II-134
Gambar 2.58 Rasio Ijin Trayek Kota Tarakan Tahun 2014-2016 ..... II-135
Gambar 2.59 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-135
Gambar 2.60 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Tarakan Tahun 2015-2019..... II-136
Gambar 2.61 Pemasangan Rambu-Rambu Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-137
Gambar 2.62 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kota Tarakan Tahun 2013-2017 ..... II-137

Gambar 2.63 Cakupan Layanan Telekomunikasi Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-138
Gambar 2.64 Persentase Anggota Rumah Tangga 5 Tahun Ke Atas Yang Menggunakan HP Kota Tarakan 2015-2019 ..... II-139
Gambar 2.65 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-140
Gambar 2.66 Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-141
Gambar 2.67 Persentase Koperasi Aktif Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-141
Gambar 2.68 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-143
Gambar 2.69 Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kota Tarakan Tahun 2014 – 2017 ..... II-146
Gambar 2.70 Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Kota Tarakan Tahun 2014 – 2017 (%) II-147
Gambar 2.71 Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi Kota Tarakan Tahun 2014 – 2017 ..... II-148
Gambar 2.72 Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu Kota Tarakan Tahun 2014 – 2017 ..... II-148
Gambar 2.73 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019 ..... II-149
Gambar 2.74 Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019 ..... II-150
Gambar 2.75 Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019 ..... II-150
Gambar 2.76 Persentase Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019 ..... II-151
Gambar 2.77 Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019 ..... II-151

Gambar 2.78 Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019 ..... II-153
Gambar 2.79 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kota Tarakan Tahun 2014-2017 ..... II-153
Gambar 2.80 Lama Kunjungan Wisata di Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019 ..... II-155
Gambar 2.81 Kontribusi Sektor Pertaniaan/Perkebunan Terhadap PDRB Kota Tarakan Tahun 2013 -2017 ..... II-157
Gambar 2.82 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha di Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019..... II-157
Gambar 2.83 Produktivitas Padi Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019..... II-159
Gambar 2.84 Cakupan Bina Kelompok Petani Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019 (%)..... II-160
Gambar 2.85 Ekspor Bersih Perdagangan Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019 ..... II-161
Gambar 2.86 Jumlah Pedagang/Usaha Informal Di Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019 ..... II-162
Gambar 2.87 Jumlah Kelompok Pengrajin Kota Tarakan Tahun 2015 – 2018 ..... II-163
Gambar 2.88 Pertumbuhan Industri Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019 (%)..... II-163
Gambar 2.89 Jumlah Produksi Ikan Tahun 2015 – 2019 (ton) II-164
Gambar 2.90 Konsumsi Ikan di Kota Tarakan Tahun 2015–2019(Ton) II-165
Gambar 2.91 Persentase SILPA terhadap APBD Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-167
Gambar 2.92 Persentase PAD terhadap Pendapatan Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-168
Gambar 2.93 Persentase Belanja Pendidikan Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-169

Gambar 2.94 Persentase Belanja Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-170
Gambar 2.95 Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan (Jam Pelajaran) II-171
Gambar 2.96 Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-171
Gambar 2.97 Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-172
Gambar 2.98 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-173
Gambar 2.99 Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-173
Gambar 2.100 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-174
Gambar 2.101 Prosentase Tindak Lanjut Temuan Kota Tarakan Tahun 2013-2017 ..... II-175
Gambar 2.102 Prosentase Pelanggaran Pegawai Kota Tarakan Tahun 2013-2017 ..... II-176
Gambar 2.103 Jumlah Temuan BPK Kota Tarakan Tahun 2015-2019 ..... II-177
Gambar 2.104 Rekapitulasi Tingkat Capaian Kinerja dan Predikat Anggaran Renja Tahun 2020 Triwulan II II-179
Gambar 2.105 Rekapitulasi Tingkat Capaian Kinerja dan Predikat Anggaran Renstra Tahun 2020 Triwulan II II-180
Gambar 3.1 Kontribusi Sektor Terhadap Realisasi PMDN di Kota Tarakan III-9
Gambar 3.2 Perbandingan Inflasi Tarakan dengan Nasional III-12
Gambar 3.3 Perkembangan Inflasi Kota Tarakan *Month to Month* Tahun 2018 dan 2019 ..... III-13
Gambar 3.4 Dokumentasi Kegiatan Informasi Bursa Tenaga Kerja (*Job Fair*) 2019 ..... III-17

Gambar 3.5 Pelatihan Barista III-18
Gambar 3.6 Pelatihan Pengelasan SMAW 3G III-19
Gambar 3.7 Dokumentasi Kegiatan Instalasi Bangunan Rumah Sederhana III-19
Gambar 3.8 Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Kota Tarakan Tahun 2015-2019 (dalam Miliar) III-30
Gambar 3.9 Perkembangan Proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kota Tarakan Tahun 2015-2019..... III-37
Gambar 4.1 Tema, Fokus dan Strategi Pembangunan Tahun 2021 ..... IV-13
Gambar 4.2 Major Project (MP) Yang Terkait Langsung dengan Fokus Pembangunan Tahun 2021 ..... IV-14
Gambar 4.3 Keterkaitan Fokus Pembangunan Provinsi Klaimantan Utara dengan Nasional Tahun 2021 ..... IV-22

PENDAHULUAN

1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) ini merupakan dokumen publik, sehingga pelibatan semua stakeholders dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan menjadi pengarusutamaan (mainstreaming) dalam proses penyusunan dokumen ini. Dengan prinsip tersebut, diharapkan dokumen RKPD ini harus dapat diakses oleh semua stakeholders baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Sebagai dokumen penjabaran tahun kedua dari RPJM Daerah yang mengacu pada RKP dan RKPD Provinsi pada tahun yang berkenaan, secara substansi dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja, dan Pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan dinamika, situasi, kondisi, dan kebutuhan terkini. Oleh karena itu dalam proses penyusunannya harus melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di Kota Tarakan.

RKPD tahun 2021 harus menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengacu pada prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan. Oleh karena itu rumusan RKPD Kota Tarakan tahun 2021 harus menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD Tahun 2021 termasuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2021. Selain itu, RKPD tahun 2021 juga menjadi acuan

dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), sebagai salah satu evaluasi pembangunan tahun 2021 yang akan dilaksanakan pada akhir periode pembangunan jangka menengah daerah.

Dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi pada tahun 2021, serta memperhatikan rancangan RPJMD Kota Tarakan 2019-2024, maka memiliki fokus/tema pembangunan RKPD Kota Tarakan ditahun 2021 yakni **"PEMANTAPAN PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH DAN SUMBERDAYA LOKAL YANG BERKUALITAS"**.

1.2. DASAR HUKUM

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2021, disusun atas dasar sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540)

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomr 470)
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 11)
24. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2012-2032;
26. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Pearturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 40)

28. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan pembangunan Daerah;

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1. Posisi dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran RPJMD yang berpedoman pada RPJP Daerah. RKPD tersebut menjadi pedoman bagi Perangkan Daerah (PD) dalam menyusun Renja PD, dimana Renja PD akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKPD.

RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Provinsi memuat rancangan kerangka Ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karenanya, substansi RKPD Tahun 2021 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di Kota Tarakan sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Gambar 1. 1
Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

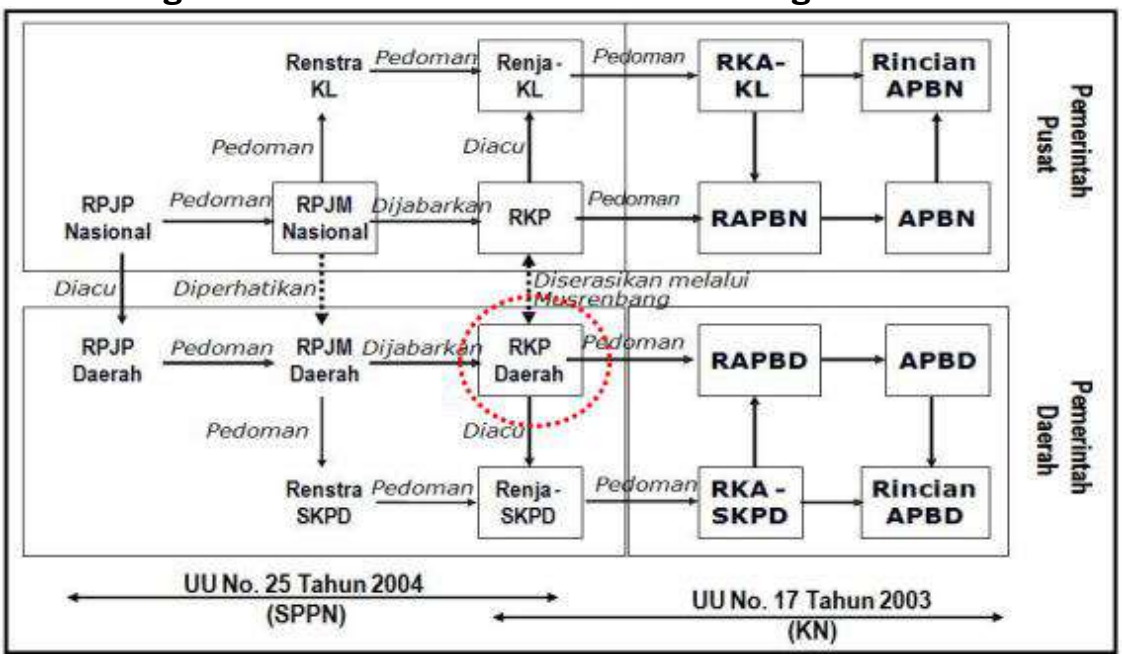

Mengacu pada gambar 1.1, hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya adalah sebagai berikut :

- RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKPD Nasional melalui mekanisme Musrenbang.
- RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang didalamnya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
- RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja PD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah.
- RKPD nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga pada Renja Perangkat Daerah.

Dalam menyusun RKPD Tahun 2021 harus mengacu dan berpedoman pada dokumen RKP Nasional, RKPD Provinsi Kalimantan Utara, RPJPD Kota Tarakan, dan RPJMD Kota Tarakan.

Selanjutnya dokumen RKPD Kota Tarakan Tahun 2021 menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen KUA PPAS Tahun 2021. Dokumen KUA dan PPAS tersebut merupakan dasar untuk penyusunan RKA SKPD serta penyusunan RAPBD Kota Tarakan

tahun 2021. Dengan demikian dokumen RKPD Kota Tarakan tahun 2021 menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dengan dokumen lainnya dan menjadi bagian dalam proses penyusunan APBD tahun 2021.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan RKPD Tahun 2021 adalah memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahun 2021 sebagai perwujudan pelaksanaan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2019-2024.Penyusunan RKPD Kota Tarakan Tahun 2021 ini bertujuan untuk:

1. Mensinkronkan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dan RKPD Provinsi Kaltara Tahun 2021;
2. Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan sebagai rujukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tarakan Tahun Anggaran 2021;
3. Oprerasionalisasi RPJMD periode (tahap) pertama dalam membangun pondasi awal pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah;
4. Menjawab permasalahan daerah berdasarkan kondisi terkini;
5. Merupakan landasan untuk menetapkan program dan kegiatan daerah, serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya; dan
6. Menyatukan tujuan kegiatan semua PD melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Tarakan tahun 2019-2024, sehingga RKPD ini bisa menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ),

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);

7. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Sistematika dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Tarakan Tahun 2021 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rumusan sebagai berikut:

BAB I. **Pendahuluan**; memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II. **Gambaran Umum Kondisi Daerah**; memuat kondisi umum daerah (aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah (permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah).

BAB III. **Kerangka Ekonomi Keuangan Daerah;** memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV. **Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah**; memuat pernyataan tujuan dan sasaran pembangunan yang termuat dalam RPJMD serta Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun rencana yang berpedoman pada RPJMD, RKP dan RKPD Provinsi pada tahun berkenaan.

BAB V. **Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**; mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI. **Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;** memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII. **Penutup;** berisi penutup dokumen RKPD**.**

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menunjukkan tidak hanya kondisi daerah berdasarkan gambaran aspek pembangunan saja, namun juga menunjukkan evaluasi kinerja RKPD tahun sebelumnya dan realisasi RPJMD pada tahap sebelumnya serta sistesis prioritas permasalahan dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan analisis kinerja perbidang urusan.

2.1. KONDISI UMUM DAERAH

Gambaran Umum kondisi Kota Tarakan memberikan gambaran awal tentang kondisi daerah dan capaian pembangunan Kota Tarakan secara umum saat ini. Gambaran umum menjadi pijakan awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui pemetaan secara objektif kondisi daerah dari aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah.

2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1.1 Karateristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah merupakan gambaran dasar dari kondisi geografis Kota Tarakan. Karakteristik lokasi dan wilayah akan menjelaskan berbagai hal terkait potret wilayah baik dari luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, hingga penggunaan lahan di seluruh wilayah Kota Tarakan.

a. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Kota Tarakan secara geografis terletak pada 3°14’30’’ Lintang Utara – 3°26’37’’ Lintang Utara dan 117°30’50’’ Bujur Timur – 117°40’12’’. Bujur Timur. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 23 Tahun 1999, maka Kota Tarakan yang sebelumnya terdiri dari 3 kecamatan dimekarkan menjadi 4 kecamatan dan 20 kelurahan. Keempat kecamatan tersebut adalah Tarakan Timur, Tarakan Tengah, Tarakan Barat dan Tarakan Utara. Disamping itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, status desa yang ada di Kota Tarakan seluruhnya berubah menjadi kelurahan. Undang-undang tersebut juga mengubah penyebutan “Kotamadya Tarakan” menjadi “Kota Tarakan”. Secara Administratif, Kota Tarakan memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pesisir pantai Kec. Bunyu,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Bunyu dan Laut Sulawesi,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pesisir pantai Kec. Tanjung Palas,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pesisir pantai Kec. Sesayap.

Gambar 2. 1
Peta Adminitratif Kota Tarakan

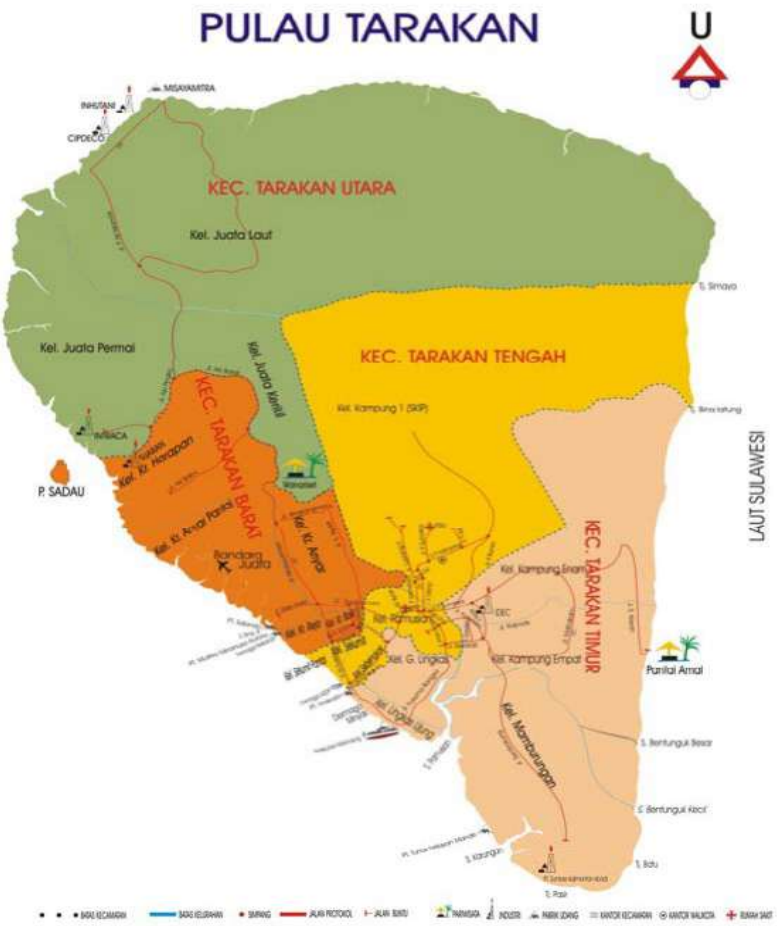

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka, 2018

Luas Wilayah

Kota Tarakan mempunyai luas 657,33 km2 dimana 38,2% nya atau 250,8 km2 berupa daratan dan sisanya sebanyak 61,8% atau 406,53 km2 berupa lautan. Letak Kota Tarakan teroisah dari pulau induk Kalimantan dimana

merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Kalimantan Utara.

Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 23 Tahun 1999, maka Kota Tarakan yang sebelumnya terdiri dari 3 kecamatan dimekarkan menjadi 4 kecamatan dan 18 kelurahan. Keempat kecamatan tersebut adalah Tarakan Timur dengan luas 58,01 atau sekitar 23,10 %, Tarakan Tengah dengan luas 55,54 km2 atau sekitar 22,10 %, Tarakan Barat dengan luas 27,89 km2 atau 11,12 % dan Tarakan Utara dengan luas 109,36 km2 atau sekitar 43,6 %. Disamping itu berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, status desa yang ada di Kota Tarakan seluruhnya berubah menjadi kelurahan. Undang-undang tersebut juga mengubah penyebutan “Kotamadya Tarakan” menjadi “Kota Tarakan”. Saat ini ada 20 kelurahan di Kota Tarakan. Daftar kecamatan beserta ke-20 kelurahan di Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

Kecamatan Tarakan Barat

1. Kelurahan Karang Balik
2. Kelurahan Karang Rejo
3. Kelurahan Karang Anyar
4. Kelurahan Karang Anyar Pantai
5. Kelurahan Karang Harapan

Kecamatan Tarakan Timur

1. Kelurahan Lingkas Ujung
2. Kelurahan Gunung Lingkas
3. Kelurahan Mamburungan
4. Kelurahan Kampung Empat
5. Kelurahan Kampung Enam
6. Kelurahan Mamburungan Timur
7. Kelurahan Pantai Amal

Kecamatan Tarakan Tengah

1. Kelurahan Selumit Pantai
2. Kelurahan Selumit
3. Kelurahan Sebengkok
4. Kelurahan Pamusian
5. Kelurahan Kampung Satu Skip

Kecamatan Tarakan Utara

1. Kelurahan Juata Permai
2. Kelurahan Juata Kerikil
3. Kelurahan Juata Laut

Gambar 2. 2
Persentase Luas Daratan Wilayah per Kecamatan

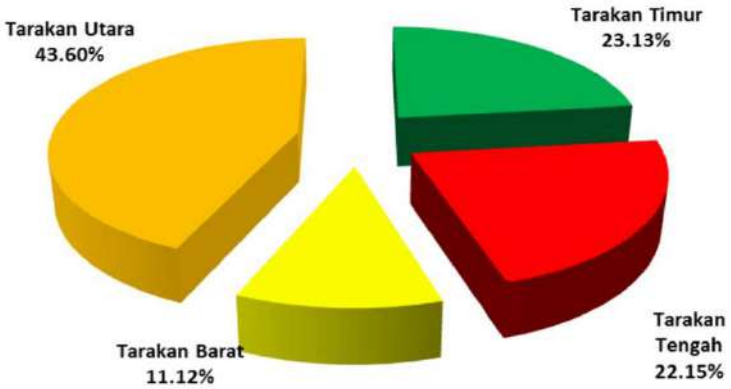

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka, 2018

b. Topografi

Kota Tarakan memiliki kondisi topografi datar hingga berbukit. Ketinggian Kota Tarakan dikasifikasikan dalam 4 kelas yaitu ketinggian 0-7 m dpl seluas 2.937 Ha (11,71% dari luas Kota Tarakan), ketinggian 7-25 m dpl seluas 8.940 Ha (35,65% dari Kota Tarakan), ketinggian 25-100 m dpl seluas 13.092 Ha (52,20% dari luas Kota Tarakan), dan sisanya merupakan daerah dengan kelas ketinggian 100,1-110 mdpl.

Tabel 2. 1
Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian Lahan Kota Tarakan

No	Ketinggian Lahan (m dpl)	Luas Kecamatan				**Jumlah**
		Tarakan Timur	Tarakan Tengah	Tarakan Barat	Tarakan Utara	
1	0 - 7	722	26	791	1.398	2.937
2	7,1 – 25	2.734	924	1.753	3.529	8.940
3	25,1 - 100	2.245	4.577	245	5.925	13.092
4	100,1 - 110	0	27	0	84	111
Jumlah / Total		**5.801**	**5.554**	**2.789**	**10.936**	**25.080**

Sumber: Tarakan Dalam Angka, 2018

Wilayah Tarakan didominasi daerah dataran dengan diselingi daerah bergelombang hingga berbukit di bagian tengah pulau. Distribusi terbesar merupakan daerah landai (0-2% dan 2,1 -15%) dengan jumlah 17.914 Ha (71,43%) yang sebagian besar berada pada Kecamatan Tarakan Utara (7767 Ha). Kemiringan lahan curam umumnya hanya berada pada kecamatan Tarakan Timur (322 Ha) dan Kecamatan Tarakan Utara (1.065 Ha).

Tabel 2. 2
Luas Wilayah Berdasarkan Kelas Kemiringan Lereng

No	Kelas Lereng (%)	Luas Kecamatan (Ha)				Jumlah (Ha)
		Tarakan Timur	Tarakan Tengah	Tarakan Barat	Tarakan Utara	
1	0 - 2	2.901	1.409	1.685	6.114	12.109
2	2,1 - 15	198	3.172	782	1.653	5.805
3	15 - 40	2.380	913	322	2.104	5.719
4	> 40	322	60	0	1.065	1.447
Jumlah / Total		**5.801**	**5.554**	**2.789**	**10.936**	**25.080**

Sumber: Tarakan Dalam Angka, 2018

c. Geologi

Sebagain besar Kota Tarakan terdiri dari unsur geologi berupa batu pasir kuarsa, batu lempung, batu lanau, batu bara, lignit, dan konglomerat yang mencapai 64% dari luas daratan di Kota Tarakan. Sedangkan sisanya adalah lumpur, lanau,, pasir, kerikil dan kerakal sekitar 36%.

Pulau Tarakan secara geologi terdiri 2 satuan besar, yaitu satuan wilayah perbukitan antariklim dan satuan wilayah dataran (terdiri atas dataran pantai, dataran banjir dan dataran sungai). Masing-masing satuan mempunyai karateristik geologi yang berbeda. Kondisi perbukitan di Pulau Tarakan merupakan sebuah iklim yang sumbernya memanjang dan lapisan tipis batubara berumur tersier yang berselang-seling atau dan lainnya. Dibagian dalam antariklim ditentukan cadangan minyak dan gas bumi, sebagain batuan lempung bersifat kedap air dan mengembang. Batuan tersebut menjadi mudah longsor pada kemiringan lereng agak besar dan mudah terkikis.

Fisiografi Kota Tarakan dibedakan menjadi lima satuan, yaitu: satuan pantai (beach); satuan rawa pasang surut (tidal swamp); satuan dataran alluvial (Alluvial plain); satuan dataran (plain); dan satuan perbukitan (hill). Daerah endapan pasir pantai (beach) merupakan daerah punggung pasir dengan luas 853 Ha (3,40%) di pantai pesisir timur Kota Tarakan yang berhadapan langsung dengan Selat Makasar. Daerah rawa pasang surut (tidal swamp) merupakan daerah yang masih dipengaruhi pasang surut air air laut serta ditumbuhi hutan mangrove dan nipah. Daerah ini terdapat pada sebagian besar pantai Kota Tarakan, terutama di bagian utara dengan luas 1.573 Ha. Adapun luas keseluruhan daerah rawa pasang surut ini adalah 3.325 Ha (13,26%).

Tabel 2. 3
Penyebaran Dan Luas Satuan Fisiografi

No	Satuan Fisiografi	Luas Wilayah (m^2)				Jumlah (Ha)
		Tarakan Timur	Tarakan Tengah	Tarakan Barat	Tarakan Utara	
1	Pantai (*Beach*)	-	188	652	13	853 (3,40%)
2	Rawa Pasang Surut (*Tidal Swamp*)	906	62	784	1.573	3.325 (13,26%)
3	Dataran Alluvial (*Alluvial Plain*)	777	1.203	1.270	4.648	7.898 (31,49%)
4	Dataran (*Plain*)	791	3.221	202	1.893	6.107 (24,35%)
5	Perbukitan (*Hill*)	315	880	2.893	2.809	6.897 (27,50%)
Jumlah		**2.789**	**5.554**	**5.801**	**10.936**	**25.080 (100%)**

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Tarakan, 2018

d. Hidrologi

Berdasarkan penelusuran (tracing) pada peta topografi, terdapat sekitar 73 buah sungai di wilayah Pulau Tarakan. Sungai-sungai tersebut membentang dari wilayah perbukitan di tengah-tengah Pulau Tarakan dan kemudian bermuara sungai dengan orde-1 ataupun berupa alur-alur kecil.

Sungai-sungai yang ada di wilayah Tarakan ini hampir tidak pernah kering sepanjang tahun, mengingat curah hujan yang cukup tinggi di Tarakan. Banyak aliran sungai tersebut yang melewati daerah perkotaan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai saluran pembuangan utama (primer) bagi aliran limpasan dan limbah domestik penduduk setempat.

Untuk daerah layanan sistem drainase dibagi berdasar daerah aliran sungai. Kota Tarakan dibagi menjadi 7 Daerah Aliran Sungai (DAS), karena dipengaruhi oleh 7 sungai besar, yaitu Sungai Pamusian, Sungai Melundung, Sungai Sebengkok, Sungai Selumit, Sungai Kampung Bugis, Sungai Magendala dan Sungai Sesanip.

Tabel 2. 4
Luas DAS dan Panjang Sungai di Kota Tarakan

No.	Nama Sungai	Luas DAS (KM^2)	Panjang Sungai (KM)
1.	Pamusian	16.032	6.550
2.	Melundung	2.186	1.900
3.	Sebengkok	1.367	1.700
4.	Selumit	1.866	1.200
5.	Kampung Bugis	4.329	4.500
6.	Sesanip	2.395	2.500
7.	Mandegala	5.139	5.100

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Tarakan, 2018

e. Iklim

Salah satu unsur iklim yang sangat penting dibandingkan unsur iklim lainnya adalah curah hujan, karena menurut keadaan yang sebenarnya hujan di suatu tempat dengan tempat lainnya dalam kurun waktu tertentu tidak mempunyai nilai yang sama.

Kota Tarakan yang beriklim tropis mempunyai musim yang hampir sama dengan wilayah Indonesia pada umumnya, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan April sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April sampai dengan bulan Oktober. Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselingi dengan musim peralihan pada bulan-bulan tertentu. Namun dalam tahun-tahun terakhir ini, keadaan musim di Kalimantan Utara termasuk Kota Tarakan kadang tida menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan dalam kenyataannya tidak turun hujan sama sekali, begitu juga sebaliknya. Suhu udara disuatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai.

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Secara umum, Kota Tarakan beriklim panas dengan suhu udara sepanjang tahun 2017 berkisar 27,470C, dengan rata-rata titik maksimal 31,220C dan rata rata titik minimal 24,620C. Selain itu, sebagai daerah beriklim tropis, Kota Tarakan mempunyai rata-rata kelembaban udara adalah 83,00% dengan rata-rata titik maksimal 98,00% dan rata-rata titik minimal 55,00 persen. Kondisi tekanan udara di Kota Tarakan pada tahun 2017 adalah 1.010,80 mb dengan kecepatan angin 5,00 knot dan penyinaran matahari mencapai 63,00 persen. Untuk kondisi hujan, rata-rata curah hujan di Kota Tarakan pada tahun 2017 adalah 330,00 mm3 dengan rata-rata jumlah hari hujan pada tahun 2017 adalah 24 hari.

f. Geomorfologi

Geomorphologi di Kota Tarakan antara lain bentukan asal Denudensi bukit terisolir; bentukan asal struktur terdiri dari undak struktur dan Perbukitan lipatan; bentukan asal merin yaitu pematang pantai, bentukan asal fluvial terdiri dari daratan bekas rawa, daratan rawa pantai, rawa belakang, daratan alluvial, daratan alluvial pantai, dan daratan rawa; bentukan asal fluvio-merin terdiri dari rawa nipah pasang surut dan rawa pasang surut.

g. Jenis Tanah

Sesuai dengan kondisi iklim di Kota Tarakan yang tergolong dalam tipe tropika humida, maka jenis-jenis tanah yang terdapat di daerah ini tergolong ke dalam tanah yang bereaksi asam. Jenis-jenis tanah yang terdapat di Kota Tarakan antara lain tanah alluvial, tanah latosal, tanah organosal, dan tanah padsolik.

Jenis tanah Kota Tarakan didominasi tanah latosol dengan luas 14.454 Ha atau 57,63% dari luas tanah Kota Tarakan yang tersebar di bagian tengah pulau dan meliputi 4 kecamatan. Jenis tanah lainnya adalah podsolik yang penyebarannya memanjang pada bagian barat laut-tenggara dengan luas 6.897 Ha (27,50%). Selain itu, terdapat pula tanah alluvial dengan luas 3.290 Ha (13,12%) dengan lokasi penyebaran di bagian barat, utara, dan selatan pulau. Jenis tanah dengan luasan terkecil adalah organosol yang penyebarannya berada di Kecamatan Tarakan Barat mulai dari perbatasan sebelah dalam tanah alluvial hingga tanah latosol di bagian tengah pulau.

Tabel 2. 5
Penyebaran dan Luas Jenis Tanah Kota Tarakan

No	Jenis Tanah	Luas Wilayah (m^2)				Jumlah (Ha)
		Tarakan Timur	Tarakan Tengah	Tarakan Barat	Tarakan Utara	
1	Alluvial	891	62	783	1.554	3.290 (13,12%)
2	Organosol (alluvial gambut)	439	-	-	-	439 (1,75%)
3	Latosol	1.145	4.613	2.124	6.572	14.454 (57,63%)
4	Podsolik	314	879	2.894	2.810	6.897 (27,50%)
Jumlah		**2.789**	**5.554**	**5.801**	**10.936**	**25.080 (100,00)**

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Tarakan, 2018

h. Penggunaan Lahan Eksisting

Secara spasial, penggunaan lahan eksisting Kota Tarakan terpusat di bagian barat dan tengah Kota Tarakan dengan sumbu perkembangan utara-selatan. Berkembangnya daerah ini terutama didukung oleh kemudahan aksesibilitas berupa pelabuhan, baik pelabuhan penumpang dan barang maupun pelabuhan minyak. Selain itu, sebagian besar penduduk di wilayah pantai barat ini memiliki ketergantungan yang besar terhadap keberadaan pelabuhan tersebut karena adanya keterkaitan aktivitas, sehingga perkembangan daerah ini memiliki sinergi yang kuat dengan aktivitas penduduk setempat. Kawasan Pantai Barat Tarakan juga merupakan pusat berbagai kegiatan ekonomi informal, pusat kegiatan perdagangan, dan perkantoran non pemerintahan. Permukiman penduduk di kawasan pantai barat telah berkembang sebagai perkampungan padat dan tidak terencana. Permukiman ini berkembang di atas tanah atau rawa pasang surut yang telah dikeringkan namun kurang ditunjang dengan penyediaan infrastruktur yang memadai.

Sebaliknya permukiman di kawasan tengah berkembang lebih terencana yang ditunjang oleh fasilitas sosial seperti rumah sakit, sekolah, lapangan terbuka, dan perkantoran pemerintahan. Meskipun demikian, pada perkembangannya tumbuh pula permukiman baru di pinggiran secara tidak terencana ke arah timur dan selatan, diantaranya telah merambah ke kaki perbukitan. Selain itu, perkembangan permukiman di kota Tarakan juga telah menyebar di ujung utara pulau dengan basis kegiatan perikanan dan industri pengolahan kayu. Kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi terletak di tengah pulau dengan tiga lokasi konsesi. Sedangkan kegiatan industri pengolahan kayu tersebar di pantai utara hingga selatan yang memiliki akses langsung ke laut pada masing-masing dermaga.

Gambar 2. 3
Peta Penggunaan Lahan Kota Tarakan

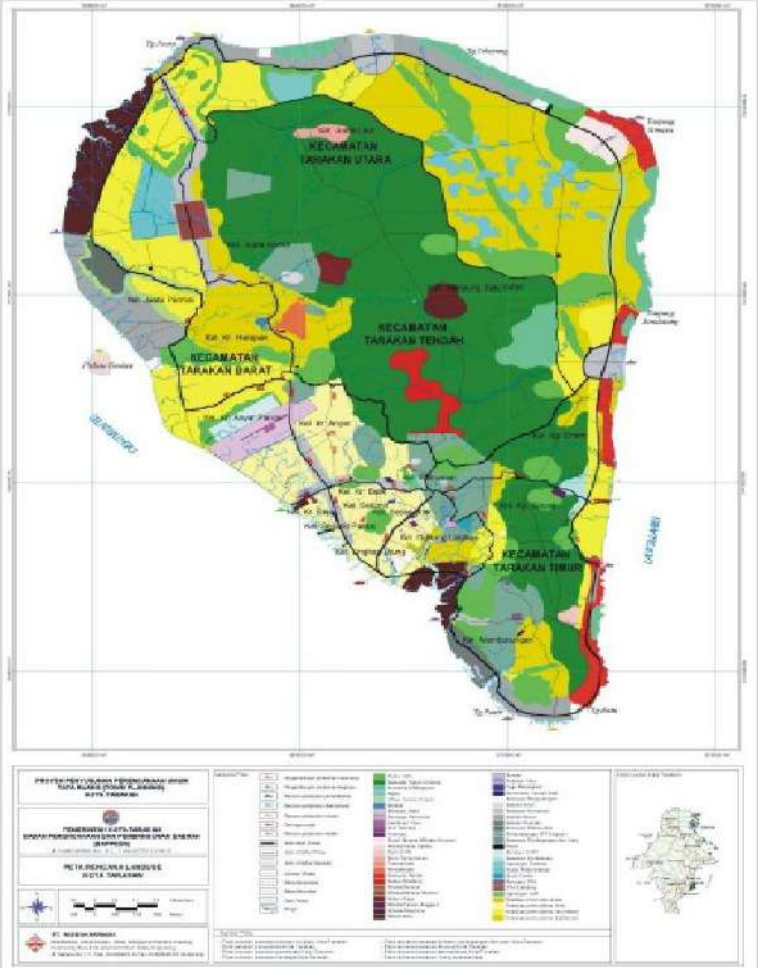

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Tarakan

Tabel 2. 6
Luas Tanah Menurut Penggunaan Kota Tarakan (Ha)

No	Penggunaan	Luas Wilayah (m^2)				Jumlah (Ha)
		Tarakan Timur	Tarakan Tengah	Tarakan Barat	Tarakan Utara	
1	Pemukiman	328	397	414	237	1.376
2	Semak/ladang/tegalan	2.565	1.496	1.391	2.522	7.974
3	Kebun campuran	123	9	5	35	172
4	Tambak / empang	269	0	531	281	1.081
5	Hutan lebat	382	1.669	0	1.243	3.294
6	Hutan belukar	1.602	1.886	147	4.962	8.597
7	Hutan rawa	81	69	0	849	999
8	Mangrove (bakau/nipah)	451	28	301	807	1.587
Jumlah		**801**	**5.554**	**2.789**	**10.936**	**25.080**

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Tarakan, 2018

i. Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

Alokasi kawasan lindung berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kota Tarakan seluas 11,742.99 Ha. Dari kawasan tersebut terdapat hutan lindung seluas 2.400 Ha Sk. Mentan No.175 /Kpts/UM/3/ 1979 yang kemudian dikembangkan dengan penambahan luasan sebesar 3.775 ha berasal dari sebagian HP seluas 1.479 ha dan APL seluas 2.981 ha (Perda No.3 Tahun 2006 tentang RTRW Kota Tarakan). Dengan demikian luas total Hutan Lindung Kota Tarakan adalah seluas 6.175 ha. Dan Kemudian seiring dengan waktu untuk menjaga kelestarian hutan bagi masyarakat Kota Tarakan, Pemerintah Kota Tarakan dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor : 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan 2012-2032 memperluas Kawasan Hutan Lindung menjadi 6,997 Ha.

Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kota Tarakan hingga Tahun 2012 telah melakukan pemagaran hutan lindung/pemasangan patok batas sepanjang ±43,55 km dan pada 2013 akan dilakukan pemagaran/Patok batas hutan lindung sepanjang ±3,4 Km, masih tersisa ±4,5 Km yang belum dilakukan pemagaran/ patok batas. Sehingga diharapkan seluruh hutan lindung yang ada di Kota Tarakan telah berpagar.

Tabel 2. 7

Luas Wilayah Kawasan Lindung Berdasarkan Kecamatan Tahun 2012

Kawasan Lindung	Kecamatan				Jumlah (Ha)
	Tarakan Barat	Tarakan Tengah	Tarakan Timur	Tarakan Utara	
Hutan Kota	93	45	1,972	280	**2,390**
Hutan Lindung	15	3,481	422	3,080	**6,997**
Hutan Mangrove	126	67	396	529	**1,119**
Kawasan Perlindungan Setempat	85	40	105	236	**466**
Sabuk Hijau		302	120	260	**683**
Stadion Olahraga		3			**3**
Sumber Air Baku	13			3	**16**
Taman Kota		1	0		**1**
TPU				67	**67**
JUMLAH	**332**	**3,939**	**3,016**	**4,455**	**11,742**

Sumber: Perda RTRW Kota Tarakan No. 04 Tahun 2012

Pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya di Kota Tarakan mencakup penetapan lokasi, luasan dan arahan pengembangan bagi kawasan-kawasan yang meliputi Kawasan Pemukiman, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Bandar Udara juwata, Kawasan Perkantoran,

Kawasan Pendidikan, Kawasan Industri dan Pergudangan, Kawasan Pariwisata, Kawasan Pertambangan, Kawasan Peternakan, Kawasan Perikanan, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dengan luasan 13,337.01 Ha atau 53,18 % dari total luas Kota Tarakan.

j. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana Kota Tarakan di klasifikasikan antara lain kawasan rawan longsor, kawasan rawan banjir/genangan, dan kawasan rawan genangan akibat kenaikan air laut.

1. Kawasan rawan longsor berada di Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Sebengkok, Kelurahan Pamusian, Kelurahan Kampung Empat, Kelurahan Pantai Amal, Kelurahan Kampung Enam, dan Kelurahan Mamburungan;
2. Kawasan rawan banjir/genangan, berada di Kecamatan Tarakan Timur meliputi Jalan Sungai Sesayap, Jalan Meranti, Jalan Akasia, Jalan Bengkirai, dan Jalan Tengkawang), Kecamatan Tarakan Tengah meliputi Jalan Sebengkok Tiram, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Sebengkok AL, dan Jalan Martadinata; Kecamatan Tarakan Barat meliputi Jalan Slamet Riyadi, Jalan Kenanga, Jalan Seroja, Jalan Anggrek, Jalan Matahari, dan Jalan Mulawarman; serta Kecamatan Tarakan Utara meliputi Jalan P. Aji Iskandar.
3. Kawasan rawan genangan akibat kenaikan muka air laut, curah hujan tinggi, dan gelombang badai yang terjadi pada saat bersamaan berada di kawasan pesisir di Kelurahan Juata Laut, Juata Permai, Karang Harapan, Karang Anyar Pantai, Karang Rejo, Selumit Pantai, Sebengkok, Lingkas Ujung, Mamburungan, Pantai Amal, dan Kampung Satu/Skip sebagai dampak perubahan iklim yang meliputi bahaya cuaca ekstrim, La Nina, dan gelombang badai.

2.1.1.2 Demografi

Kondisi demografis suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil proyeksi BPS, Penduduk Kota Tarakan tahun 2019 sebanyak 270.894 jiwa yang terdiri atas 141.613 jiwa penduduk laki-laki dan 129.281 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2018, penduduk Kota Tarakan mengalami pertumbuhan sebesar 3,4 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2019 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 109,54, yang berarti bahwa di

antara 100 penduduk perempuan, terdapat 109 sampai 110 penduduk laki-laki di Kota Tarakan tahun 2019.

Tabel 2. 8
Jumlah Penduduk Kota Tarakan Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	235.565	244.185	253.026	262.025	270.894
2.	Laki-Laki (Jiwa)	123.306	127.933	132.417	137.101	141.613
3.	Perempuan (Jiwa)	112.259	116.252	120.609	124.924	129.281
4.	Laju pertumbuhan penduduk (%)	3,67	3,66	3,62	3,56	3,4
4.	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km^2)	943,58	974	1.008,88	1.044,76	1.080,12

Sumber: BPS Kota Tarakan, 2020

Tabel 2. 9
Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (Km^2)		Jumlah Kelurahan	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km^2)
		Km^2	% Terhadap Luas			
1.	Tarakan Timur	58,01	23,13	7	60.203	1.037,38
2.	Tarakan Tengah	55,54	22,15	5	84.918	1.528,95
3.	Tarakan Barat	27,89	11,12	5	94.898	3.402,58
4.	Tarakan Utara	109,36	43,60	3	30.872	282,32
Jumlah 2019		**250,80**	**100**	**20**	**270.894**	**1.080,12**
2018		250,80	100	20	**262.025**	**1.044,76**
2017		250,80	100	20	253.026	1.008,88
2016		250,80	100	20	244.185	973,62
2015		250,80	100	20	235.565	939,25

Ket: Data Proyeksi Penduduk BPS Kota Tarakan (Back Casting)
Sumber: BPS Kota Tarakan, 2020

Kepadatan penduduk di Kota Tarakan tahun 2019 mencapai 1.080,12 jiwa/km2 dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4–5 orang. Kepadatan Penduduk di 4 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tarakan Barat dengan kepadatan sebesar 3.402,58 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Tarakan Utara sebesar 282,32 jiwa/Km2.

Penduduk terbanyak pada tahun 2019 berada di Kecamatan Tarakan Barat sebanyak 94.898 jiwa atau 35,03 persen, diikuti dengan Kecamatan Tarakan Tengah sebanyak 84.918 jiwa atau 31,35 persen, selanjutnya Kecamatan Tarakan Timur sebanyak 60.203 jiwa atau 22,22 persen. Kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Utara sebanyak 30.872 jiwa atau 11,40 persen dari total jumlah penduduk Kota Tarakan.

Kepadatan penduduk di Kota Tarakan terus meningkat, 939,25 jiwa per km^2 di tahun 2015 menjadi 973,62 jiwa per km^2 di tahun 2016, dan selanjutnya menjadi

1.008,88 jiwa per km^2 di tahun 2017, dan meningkat 1.044,76 jiwa per km^2 di tahun 2018 dan terus meningkat menjadi 1.080,12 jiwa per km^2 di tahun 2019.

Apabila ditinjau berdasarkan kelompok umur, maka penduduk Kota Tarakan tahun 2019 paling banyak berumur 0-4 tahun yaitu 28.290 jiwa, diikuti dengan kelompok umur 5-9 tahun sebanyak 26.302 jiwa.

Tabel 2. 10
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Tarakan Tahun 2019

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	14.377	13.913	28.290
5-9	13.411	12.891	26.302
10-14	11.444	11.222	22.666
15-19	11.470	11.069	22.539
20-24	11.567	11.259	22.826
25-29	13.081	12.040	25.121
30-34	13.321	11.577	24.898
35-39	12.302	10.723	23.025
40-44	10.692	8.804	19.496
45-49	8.725	7.515	16.240
50-54	7.327	6.315	13.642
55-59	5.614	4.848	10.462
60-64	3.843	3.098	6.941
65+	4.439	4.007	8.446
	141.613	**129.281**	**270.894**

Ket: Data Proyeksi Penduduk BPS Kota Tarakan (Back Casting)
Sumber: BPS Kota Tarakan 2020

Gambar 2. 4
Distribusi Penduduk Kota Tarakan Menurut Kecamatan Tahun 2019

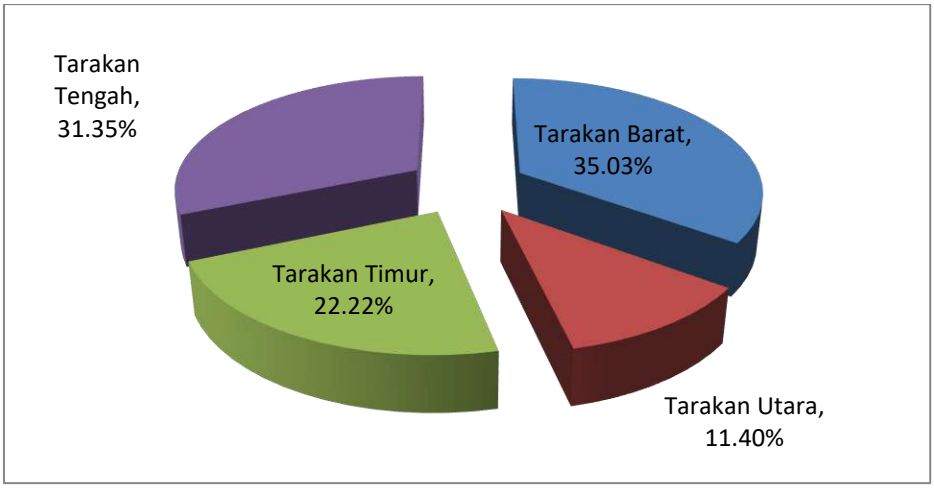

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka 2020

Gambar 2. 5
Pertumbuhan Penduduk Kota Tarakan Tahun 2015-2019 (jiwa)

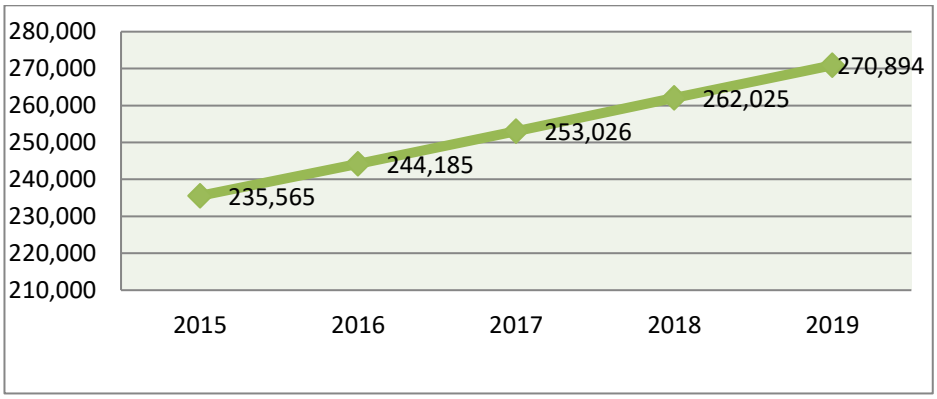

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka, 2020

2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kota Tarakan, ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini akan menjabarkan hasil pembangunan Kota Tarakan utamanya terkait bidang perekonomian wilayah. Fokus ini akan mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari pergerakan roda perekonomian (pembangunan perekonomian) Kota Tarakan. Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting adanya melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kota Tarakan antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, laju inflasi, pendapatan regional hingga tingkat kemakmuran masyarakat. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan

evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan Provinsi Kaltara dan nasional.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung menjadi salah satu tolok ukuran bagi kesejahteraan di setiap daerah. Indikator yang digunakan untuk melihat pertumbuhan perekonomian daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat dari sisi makro ekonomi. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi atau proses produksi yang tercipta di suatu daerah atau region dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau bukan.

Besaran PDRB suatu daerah dapat menggambarkan kemampuan atau potensi ekonomi dan kinerja ekonomi dari suatu daerah, baik dalam hal pengelolaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Perekonomian Kota Tarakan yang salah satunya diukur dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), selama periode 2015-2019 menunjukkan perkembangan yang meningkat. PDRB Kota Tarakan sangat dipengaruhi oleh jumlah produksi dan harga komoditi dari sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; dan kontruksi yang masih tetap menjadi sektor andalan karena memberikan kontribusi paling besar bagi perekonomian Kota Tarakan. Kontribusi PDRB oleh sektor sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; dan kontruksi; pada tahun 2019 mencapai 21.99%.

Seiring usaha peningkatan pembangunan di Kota Tarakan, Pertumbuhan Ekonomi Kota Tarakan memperlihatkan perkembangan selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, Pertumbuhan Ekonomi Kota Tarakan mencapai 7,69% yang merupakan nilai tertinggi bila dibandingkan dengan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional. Jika dilihat lagi secara series, secara umum semenjak tahun 2015 sampai 2019, Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tarakan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian masyarakat Kota Tarakan secara umum terus mengalami peningkatan.

Gambar 2. 6
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Kab/Kota di Kalimantan Utara
Tahun 2015-2019

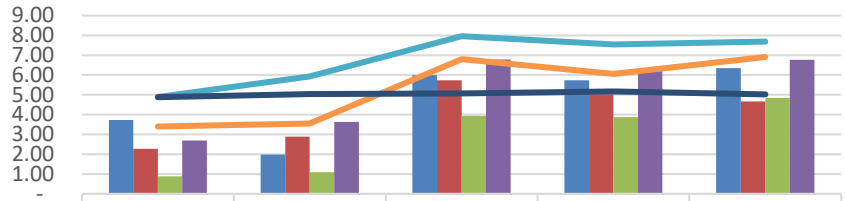

	2015	2016	2017	2018	2019
Malinau	3.73	1.99	5.99	5.74	6.34
Bulungan	2.27	2.89	5.74	5.02	4.67
Tana Tidung	0.88	1.10	3.94	3.88	4.84
Nunukan	2.69	3.63	6.79	6.33	6.77
Tarakan	4.89	5.93	7.96	7.55	7.69
Kalimantan Utara	3.40	3.55	6.80	6.05	6.91
Indonesia	4.88	5.03	5.07	5.17	5.02

Malinau Bulungan Tana Tidung Nunukan
Tarakan Kalimantan Utara Indonesia

Sumber: PDRB Kota Tarakan Berdasarkan Lapangan Usaha, 2020

b. Gini Rasio

Indeks Gini atau koefisien gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Secara umum, indeks gini Kota Tarakan berfluktuatif. Indeks gini Kota Tarakan pada tahun 2017 adalah 0,3, meningkat dari tahun sebelumnya. Perubahan angka gini rasio mengindikasikan adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk yang digunakan untuk melihat apakah pemerataan pengeluaran penduduk semakin baik atau semakin buruk. Secara umum, selama periode 2015-2017 ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga di Kota Tarakan berada pada tingkat ketimpangan rendah karena nilai indeks gini rasionya berkisar antara 0,265 hingga 0,32. Bila dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional, Indeks Gini Kota Tarakan lebih rendah dibandingkan keduanya. Hal ini berarti pemerataan di Kota Tarakan lebih baik jika dibandingkan pemerataan di Provinsi Kalimantan Utara dan secara nasional. Mulai tahun 2018, BPS hanya menyediakan data Indeks Gini sampai pada tingkat Propinsi, sehingga nilai Indeks Gini Kabupaten/Kota tidak tersedia mulai tahun 2018.

Gambar 2. 7
Indeks Gini/Gini Rasio Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2015-2019

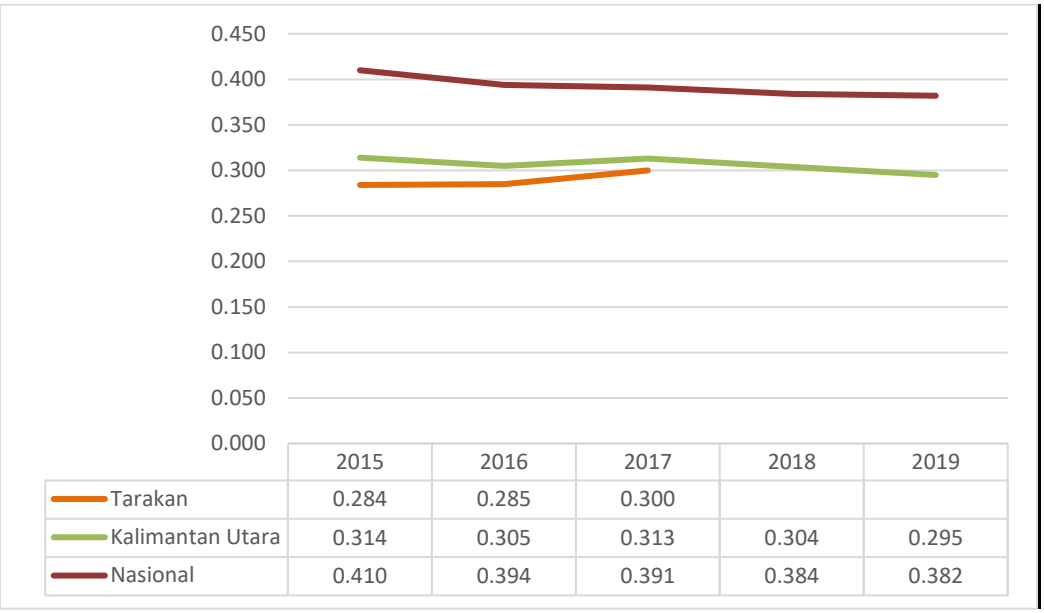

	2015	2016	2017	2018	2019
Tarakan	0.284	0.285	0.300		
Kalimantan Utara	0.314	0.305	0.313	0.304	0.295
Nasional	0.410	0.394	0.391	0.384	0.382

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2020

c. Laju Inflasi

Inflasi menjadi salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu daerah, karena dapat menggambarkan naik turunnya harga. Keadaan ekonomi yang makin stabil ditunjukkan oleh perkembangan laju inflasi yang kecil. Inflasi yang tinggi berarti juga terjadinya perubahan harga yang tajam dan akan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Secara umum, dalam kurun waktu 2015-2019, laju inflasi di Kota Tarakan mengalami pelambatan. Pada tahun 2019, laju inflasi Kota Tarakan sebesar 1,47, melambat dari tahun sebelumnya sebesar 5. Kondisi ini menunjukkan bahwa harga barang dan jasa di Kota Tarakan mengalami penurunan. Turunnya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan naiknya nilai maya uang.

Selama tahun 2019, inflasi bulanan tertinggi di Kota Tarakan terjadi di bulan Desember yaitu 1,09% dan mengalami deflasi tertinggi pada bulan Agustus yaitu 0,92%. Inflasi di Kota Tarakan dipengaruhi oleh kenaikan harga pada kelompok transportasi dan komunikasi sebesar 4,56%, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 1,22%, kelompok sandang sebesar 0,78%, kelompok kesehatan sebesar 0,38%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,36%, kelompok bahan makanan sebesar 0,06%. Sedangkan kelompok Pendidikan, rekreasi dan olahraga mengalami penurunan harga sebesar -0,02%.

Dibandingkan dengan inflasi nasional tahun 2019, maka inflasi Kota Tarakan lebih rendah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi nasional pada tahun kalender 2019 sebesar 2,72%. Rendahnya inflasi di 2019 disebabkan harga-harga barang bergejolak yang relatif terkendali. Contohnya, harga beras yang umumnya menjadi penyebab tingginya inflasi cenderung terkendali tahun ini. Selain itu juga kenaikan harga BBM dan tarif tiket pesawat yang juga milai merangkak naik di akhir 2018 menjadi penyebab inflasi yang cenderung lebih tinggi dibanding 2019.

Bila dibandingkan dengan target kinerja pemerintah Kota Tarakan tahun 2019 yaitu tingkat inflasi 5-7%, maka dengan realisasi tingkat inflasi 1,47% di tahun 2019, maka capaian kinerja pemerintah Kota Tarakan tahun 2019 mencapai 170,60%.

Gambar 2. 8

Laju Inflasi Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2015-2019

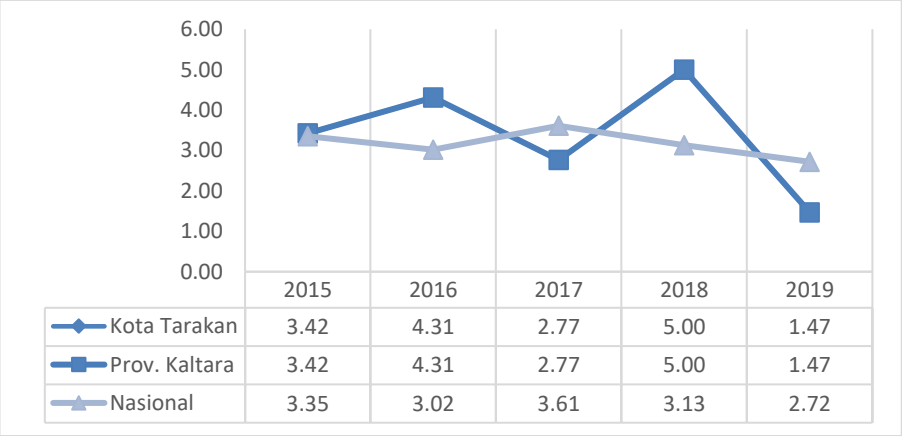

	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Tarakan	3.42	4.31	2.77	5.00	1.47
Prov. Kaltara	3.42	4.31	2.77	5.00	1.47
Nasional	3.35	3.02	3.61	3.13	2.72

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2020

d. PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kota Tarakan atas dasar harga berlaku sejak tahun 2015 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita tercatat sebesar 92,65 juta rupiah. Secara nominal terus

mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 133,96 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 2. 11
Perkembangan PDRB Perkapita Kab/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2015-2019
(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian		2015	2016	2017	2018	2019
PDRB Per Kapita (ADHB)	Kota Tarakan	92.65	99.87	110.68	120.85	133.96
	Kab. Malinau	89.28	90.41	101.41	107.56	117.79
	Kab. Bulungan	100.29	102.88	112.43	120.67	128.51
	Kab. Tana Tidung	180.91	179.16	189.51	192.88	200.01
	Kab. Nunukan	87.37	88.96	103.63	112.10	121.09
	Provinsi Kaltara	96.15	99.11	111.32	120.11	131.30
	Nasional	45.12	47.94	51.89	55.99	59.07
PDRB Per Kapita (ADHK)	Kota Tarakan	71.30	72.86	75.91	78.83	82.12
	Kab. Malinau	83.22	81.59	83.19	84.66	86.73
	Kab. Bulungan	75.10	75.43	77.86	79.94	81.76
	Kab. Tana Tidung	147.87	139.28	135.61	131.40	128.07
	Kab. Nunukan	71.12	70.56	72.27	73.72	75.58
	Provinsi Kaltara	76.82	76.64	78.92	80.73	83.31
	Nasional	35.16	36.47	37.85	39.34	40.84
Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK 2010)	Kota Tarakan		2.19	4.19	3.85	4.17
	Kab. Malinau		(1.96)	1.96	1.77	2.45
	Kab. Bulungan		0.44	3.22	2.67	2.28
	Kab. Tana Tidung		(5.81)	(2.63)	(3.10)	(2.53)
	Kab. Nunukan		(0.78)	2.43	2.01	2.52
	Provinsi Kaltara		(0.24)	2.98	2.30	3.19
	Nasional		3.72	3.79	3.93	3.83

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2020

Bila dibandingkan dengan Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, pada tahun 2019 Kota Tarakan

berada di urutan teratas. Begitu juga bila dibandingkan dengan Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional, Kota Tarakan berada di atas Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK Provinsi Kalimantan Utara dan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tingkat kemakmuran penduduk di Kota Tarakan cukup baik.

e. Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan merupakan langkah lanjutan dari analisis kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan. Melalui indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada dibawah garis kemiskinan. Menurut BPS, penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dapat diategorikan menjadi dua, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM). Terdapat perbedaan dalam penentuan garis kemiskinan perkotaan dan perdesaan. GKM ditetapkan sebesar 2.100 kkalori per kapita per hari, sedangkan GKNM yaitu untuk sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Tabel 2. 12
Data Kemiskinan Kab/Kota di Kalimantan Utara dan Nasional Tahun 2015-2019

Indikator		Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Penduduk Miskin Kota Tarakan	Kota Tarakan	%	5,11	5,17	6,32	6,15	6,00
	Kab. Malinau		7.26	7.15	8.06	7.68	6.96
	Kab. Bulungan		8.50	8.99	9.93	9.44	8.78
	Kab. Tana Tidung		6.35	6.11	6.63	5.08	4.72
	Kab. Nunukan		5.61	5.25	6.22	6.71	6.11
	Provinsi Kaltara		6,32	6,99	6,96	6,86	6,49
	Nasional		11.22	10.86	10.64	9.82	9.41
Jumlah Penduduk Miskin Kota Tarakan	Kota Tarakan	Ribu Jiwa	11.91	12.52	15.84	15.97	16.11
	Kab. Malinau		5.63	5.71	6.69	6.63	6.23
	Kab. Bulungan		10.93	11.85	13.40	13.03	12.4

Indikator		Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
	Kab. Tana Tidung		1.38	1.41	1.64	1.34	1.34
	Kab. Nunukan		9.84	9.63	11.91	13.38	12.69
	Provinsi Kaltara		39.69	41.12	49.47	50.35	48.78
	Nasional		28,590.00	28,010.00	27,770.00	25,950.00	25,144.72
Garis Kemiskinan Kota Tarakan	Kota Tarakan	Rp/ Kapita/ Bulan	485,447	519,774	572,213	613,593	654,308
	Kab. Malinau		473,906	516,247	528,287	539,742	585,654
	Kab. Bulungan		352,063	383,642	398,397	413,294	448,548
	Kab. Tana Tidung		326,201	354,012	366,856	376,876	406,949
	Kab. Nunukan		327,515	351,479	377,736	403,045	430,630
	Provinsi Kaltara		475,620	513,614	552,040	586,049	651,416
	Nasional		330,776	354,386	374,478	401,220	425,250

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, 2020

Garis kemiskinan Kota Tarakan yang ditetapkan semakin meningkat per tahunnya. Pada tahun 2015, garis kemiskinan Kota Tarakan setara Rp. 485.447/kapita/bulan, sedangkan pada tahun 2016 setara Rp 519.774/kapita/bulan, meningkat lagi menjadi Rp 654.308/kapita/bulan pada tahun 2019. Kota Tarakan memiliki garis kemiskinan yang lebih tinggi baik dibandingkan dengan empat kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Utara, maupun dibandingkan dengan garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional.

Gambar 2. 9
Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota di Kalimantan Utara Tahun 2015-2019

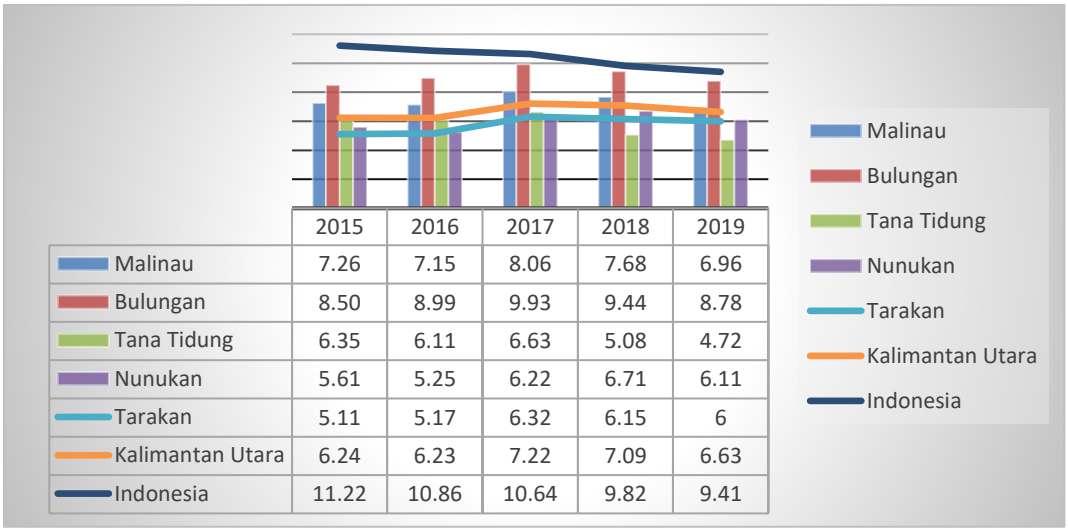

	2015	2016	2017	2018	2019
Malinau	7.26	7.15	8.06	7.68	6.96
Bulungan	8.50	8.99	9.93	9.44	8.78
Tana Tidung	6.35	6.11	6.63	5.08	4.72
Nunukan	5.61	5.25	6.22	6.71	6.11
Tarakan	5.11	5.17	6.32	6.15	6
Kalimantan Utara	6.24	6.23	7.22	7.09	6.63
Indonesia	11.22	10.86	10.64	9.82	9.41

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Selama rentang tahun 2015–2019, persentase penduduk dibawah garis kemiskinan di Kota Tarakan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015, penduduk miskin sebesar 5,11 persen, mengalami peningkatan menjadi 5,17 persen pada tahun 2016 dan 6,32 persen pada tahun 2017. Dan pada tahun 2018 menurun menjadi 6,15 persen, kemudian menurun lagi menjadi 6,00 persen pada tahun 2019.

Bila dibandingkan dengan persentase penduduk dibawah garis kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara, pada tahun 2019 Kota Tarakan berada di urutan kedua terendah setelah Kabupaten Tana Tidung. Begitu juga bila dibandingkan dengan persentase penduduk dibawah garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional, Kota Tarakan berada di di bawah Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional.

Bila dibandingkan dengan target kinerja pemerintah Kota Tarakan tahun 2019 yaitu persentase penduduk miskin 6-7%, maka dengan realisasi persentase penduduk miskin 6% di tahun 2019, maka capaian kinerja pemerintah Kota Tarakan tahun 2019 mencapai 100%.

f. Rasio Kesenjangan Kemiskinan

Rasio kesenjangan kemiskinan adalah jumlah rasio antara selisih pendapatan orang miskin dengan garis kemiskinan terhadap garis kemiskinan itu sendiri, dibagi dengan jumlah penduduk. indikator ini digunakan untuk mengukur defisit kemiskinan sehingga dapat diketahui besar dana per kapita yang diperlukan untuk mengangkat penduduk miskin ke garis kemiskinan.

Gambar 2. 10
Rasio Kesenjangan Kemiskinan Kota Tarakan 2013-2016

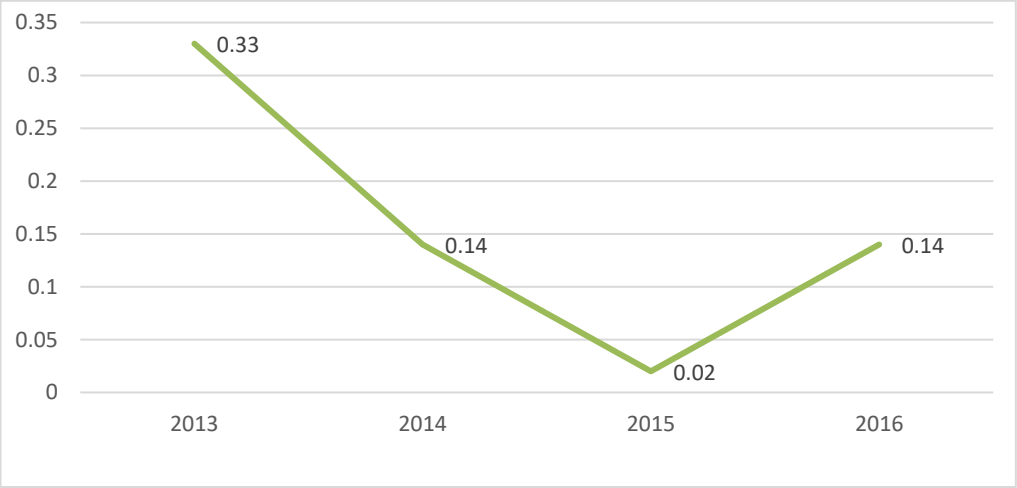

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial dalam analisis hasil pembangunan Kota Tarakan dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek pembangunan manusia dan kemiskinan. Namun dari aspek-aspek tersebut terdapat aspek utama sekaligus *ultimate impact* dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat yakni melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Dengan menggabungkan tiga komponen dasar yakni kesehatan, pendidikan dan ekonomi, menjadikan IPM sebagai salah satu indeks acuan pembangunan suatu daerah untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

a. Indeks Pembangunan Manusia

Mengutip isi Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Dimensi panjang umur dan sehat diukur melalui Angka Harapan Hidup. Dimensi pengetahuan diukur melalui Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Dimensi kehidupan yang layak diukur melalui Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan.

Pembangunan Manusia di Kota Tarakan terus mengalami perbaikan, terlihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia yang terus meningkat dari tahun 2015 – 2019. IPM Kota Tarakan naik 1,39 poin dalam jangka waktu lima tahun dari tahun 2015. Capaian peningkatan IPM ini menunjukkan indikasi positif bahwa kualitas manusia di Kota Tarakan yang dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi juga semakin baik. Berdasarkan skala internasional, capaian IPM dikategorikan menjadi kategori sangat tinggi (IPM ≥ 80), kategori tinggi (70 ≤ IPM < 80), kategori sedang 60 ≤ IPM < 70), dan kategori rendah (IPM < 60). Sejak tahun 2015, IPM Kota Tarakan telah mencapai kategori tinggi dengan angka 74,70. Angka ini terus meningkat hingga di tahun 2019 mencapai 76,09. Meski belum ada perubahan level pada capaian IPM, namun angka IPM yang terus meningkat menunjukkan adanya peningkatan pencapaian kualitas sumber daya manusia Kota Tarakan.

Bila dibandingkan dengan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, IPM Kota Tarakan berada di urutan teratas. Begitu juga bila dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Utara dan IPM Nasional, IPM Kota Tarakan berasa di atas IPM Provinsi Kalimantan Utara dan IPM Nasional. Hal ini

menunjukkan bahwa kinerja perekonomian, kualitas hidup dan pendidikan penduduk di Kota Tarakan lebih baik bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kalimantan Utara.

Gambar 2. 11
Perkembangan IPM Kota Tarakan Tahun 2015-2019

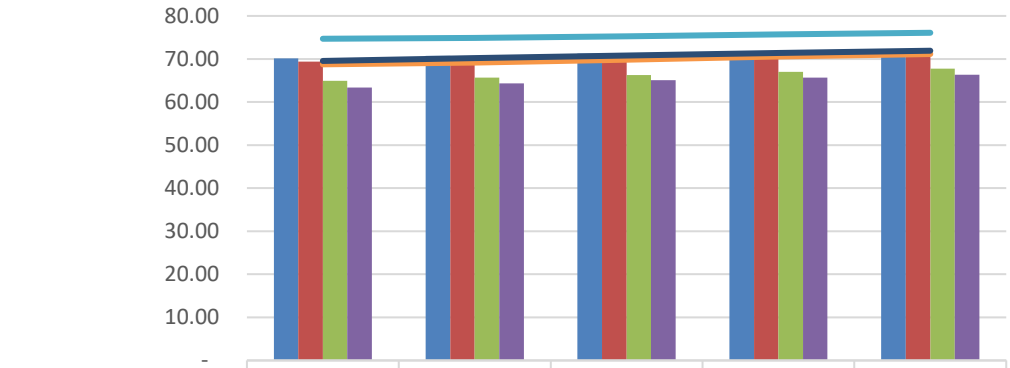

	2015	2016	2017	2018	2019
Malinau	70.15	70.71	71.23	71.74	72.06
Bulungan	69.37	69.88	70.74	71.23	71.66
Tana Tidung	64.92	65.64	66.26	67.05	67.79
Nunukan	63.35	64.35	65.10	65.67	66.32
Tarakan	74.70	74.88	75.27	75.69	76.09
Kalimantan Utara	68.76	69.20	69.84	70.56	71.15
Indonesia	69.55	70.18	70.81	71.39	71.92

Malinau Bulungan Tana Tidung Nunukan
Tarakan Kalimantan Utara Indonesia

Sumber: BPS Kota Tarakan, 2020

1. Pendidikan

Pendidikan dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia dari segi ilmu pengetahuan. Indikator pendidikan yang menjadi unsur pembentuk IPM yakni harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun, proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan ini mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

Gambar 2. 12

Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Tarakan Tahun 2015-2019 (tahun)

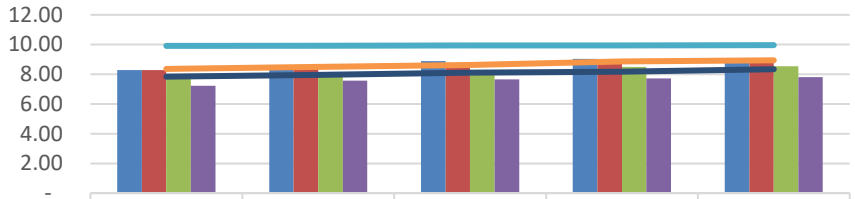

	2015	2016	2017	2018	2019
Malinau	8.29	8.56	8.88	9.04	9.05
Bulungan	8.29	8.43	8.75	8.92	8.93
Tana Tidung	7.85	8.11	8.23	8.49	8.53
Nunukan	7.22	7.57	7.65	7.73	7.81
Tarakan	9.91	9.92	9.93	9.94	9.96
Kalimantan Utara	8.36	8.49	8.62	8.87	8.94
Indonesia	7.84	7.95	8.10	8.17	8.34

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka, 2020

Dari gambar di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu 2015-2019, angka rata-rata lama sekolah di Kota Tarakan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2019, angka rata-rata lama sekolah Kota Tarakan sebesar 9,96 dan merupakan angka tertinggi dalam kurun waktu 2015-2019. Sedangkan angka rendah sebesar 9,91 pada tahun 2015. Itu artinya ditahun 2019 rata-rata pendidikan terakhir penduduk Kota Tarakan sedang menempuh jenjang pendidikan SMA kelas I.

Selain Rata-rata Lama Sekolah (RLS), indikator lain yang memperlihatkan kualitas pendidikan suatu wilayah adalah harapan lama sekolah. Indikator Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang menggantikan indikator sebelumnya yaitu Angka Melek Huruf yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh).

Sementara capaian Harapan Lama Sekolah (HLS)/Expected Years of Schooling (EYS) meningkat dari 13,41 tahun pada tahun 2015 menjadi 13,73 tahun pada tahun 2019. Angka ini mempresentasikan bahwa lama sekolah yang diharapkan dapat dicapai oleh penduduk Kota Tarakan lahir ditahun 2019 akan

dapat mengenyam Pendidikan selama 13 sampai dengan 14 tahun atau setara dengan Diploma II. Hal ini menunjukkan bahwa minat belajar masyarakat Kota Tarakan cukup tinggi hingga jenjang paska Sekolah Menengah Atas.

Gambar 2. 13
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Tarakan Tahun 2015-2019

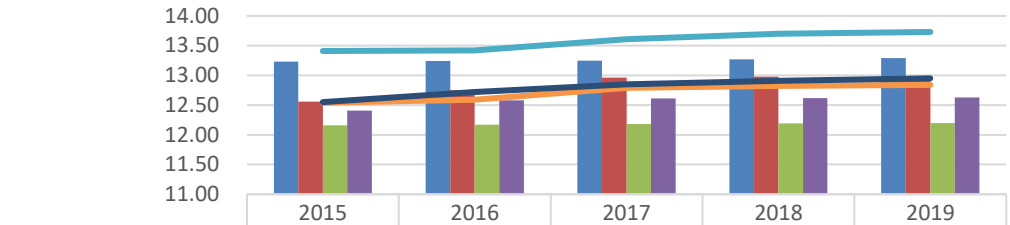

	2015	2016	2017	2018	2019
Malinau	13.23	13.24	13.25	13.27	13.29
Bulungan	12.56	12.75	12.96	12.98	12.99
Tana Tidung	12.16	12.17	12.18	12.19	12.20
Nunukan	12.41	12.58	12.61	12.62	12.63
Tarakan	13.41	13.42	13.61	13.70	13.73
Kalimantan Utara	12.54	12.59	12.79	12.82	12.84
Indonesia	12.55	12.72	12.85	12.91	12.95

Malinau Bulungan Tana Tidung Nunukan
Tarakan Kalimantan Utara Indonesia

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka, 2020

Berdasarkan data statistik, Kota Tarakan merupakan wilayah yang memiliki angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah paling tinggi di Provinsi Kalimantan Utara apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di sekitarnya. Angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Kota Tarakan juga berada di atas angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan penduduk di Kota Tarakan lebih baik bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kalimantan Utara dan secara nasional.

Bila dibandingkan dengan target kinerja pemerintah Kota Tarakan tahun 2019 yaitu angka rata-rata lama sekolah 10 tahun, maka dengan realisasi angka rata-rata lama sekolah 9,96 tahun di tahun 2019, maka capaian kinerja pemerintah Kota Tarakan tahun 2019 mencapai 99,60%.

2. Kesehatan

Komponen yang menyusun IPM terkait Derajat Kesehatan yang dinilai melalui indikator Angka Harapan Hidup. Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Tarakan yang merepresentasikan aspek kesehatan terus meningkat sejak selama 5 tahun terakhir. Semakin meningkatnya AHH di Kota Tarakan mengindikasikan bahwa derajat kesehatan masyarakat di Kota ini semakin

membaik karena AHH merupakan salah satu tolok ukur derajat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2019, Angka Harapan Hidup mencapai 73,92 tahun yang mengindikasikan bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2019 memiliki harapan untuk hidup hingga usia 73-74 tahun. Angka ini dipengaruhi oleh beberapa variabel yang diidentifikasi sangat erat kaitannya dengan masalah kesehatan penduduk. Agar tercipta derajat kesehatan yang lebih baik, maka beberapa variabel yang memiliki hubungan terhadap angka harapan hidup perlu lebih diperhatikan, seperti persentase penolong persalinan medis, jumlah dokter, persentase angka kesakitan, keadaan lingkungan perumahan dan penyediaan air bersih.

Berdasarkan data statistik, Kota Tarakan merupakan wilayah yang memiliki angka harapan hidup paling tinggi di Provinsi Kalimantan Utara apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di sekitarnya. Angka harapan hidup Kota Tarakan juga berada di atas angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan penduduk di Kota Tarakan lebih baik bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kalimantan Utara dan secara nasional.

Bila dibandingkan dengan target kinerja pemerintah Kota Tarakan tahun 2019 yaitu angka harapan hidup 73 tahun, maka dengan realisasi angka harapan hidup 73,92 tahun di tahun 2019, maka capaian kinerja pemerintah Kota Tarakan tahun 2019 mencapai 101,26%.

Gambar 2. 14
Angka Harapan Hidup Kota Tarakan Tahun 2013-2018

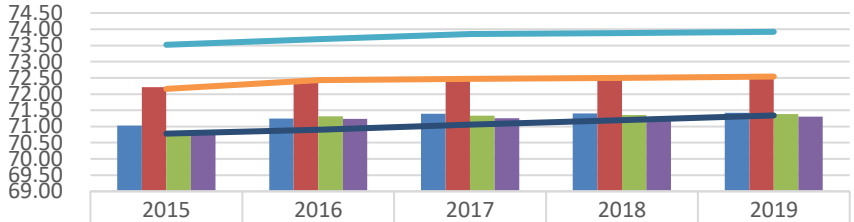

	2015	2016	2017	2018	2019
Malinau	71.03	71.24	71.39	71.40	71.42
Bulungan	72.21	72.36	72.51	72.55	72.60
Tana Tidung	70.81	71.31	71.33	71.35	71.38
Nunukan	70.83	71.23	71.25	71.27	71.30
Tarakan	73.52	73.69	73.85	73.88	73.92
Kalimantan Utara	72.16	72.43	72.47	72.50	72.54
Indonesia	70.78	70.90	71.06	71.20	71.34

Malinau Bulungan Tana Tidung Nunukan
Tarakan Kalimantan Utara Indonesia

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka, 2020

3. Standar Hidup Layak

Komponen ketiga yang merupakan komponen terakhir ialah derajat standar hidup layak yang dinilai melalui indikator paritas daya beli (Purchasing Power Parity-PPP). Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh penduduk dan sensitifitasnya terhadap perubahan kondisi perekonomian.

Gambar 2. 15
Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan Kota Tarakan Tahun 2015-2019 (dalam ribu)

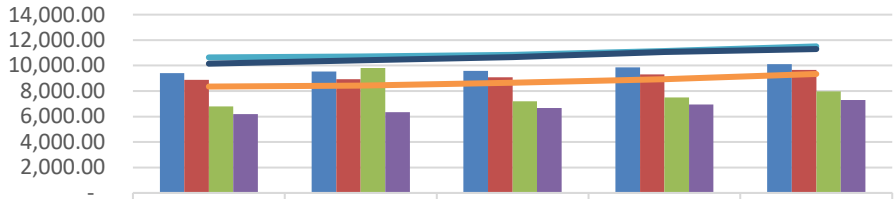

	2015	2016	2017	2018	2019
Malinau	9,415.13	9,529.00	9,586.00	9,853.00	10,121.00
Bulungan	8,876.92	8,933.00	9,094.00	9,310.00	9,648.00
Tana Tidung	6,807.14	9,819.00	7,207.00	7,511.00	7,981.00
Nunukan	6,198.54	6,333.00	6,680.00	6,956.00	7,290.00
Tarakan	10,642.46	10,715.00	10,841.00	11,153.00	11,509.00
Kalimantan Utara	8,353.97	8,434.00	8,643.00	8,943.00	9,343.00
Indonesia	10,150.00	10,420.00	10,664.00	11,059.00	11,299.00

Malinau Bulungan Tana Tidung Nunukan
Tarakan Kalimantan Utara Indonesia

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka, 2020

Pengeluaran perkapita penduduk Kota Tarakan terus meningkat dari 10,642 juta rupiah pada tahun 2015 menjadi 11,509 juta rupiah pada tahun 2019. Peningkatan pengeluaran masyarakat tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan.

Berdasarkan data statistik, Kota Tarakan merupakan wilayah yang memiliki pengeluaran perkapita paling tinggi di Provinsi Kalimantan Utara apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di sekitarnya. Pengeluaran perkapita yang disesuaikan Kota Tarakan juga berada di atas pengeluaran perkapita yang disesuaikan Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kesejahteraan penduduk di Kota Tarakan lebih baik bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kalimantan Utara dan secara nasional.

Bila dibandingkan dengan target kinerja pemerintah Kota Tarakan tahun 2019 yaitu pengeluaran perkapita perbulan Rp 665.000,00 maka dengan realisasi pengeluaran perkapita perbulan Rp 959.083,33 di tahun 2019, maka capaian kinerja pemerintah Kota Tarakan tahun 2019 mencapai 144,22%.

Secara keseluruhan, terlihat bahwa secara komponen, rata-rata seluruh

komponen pembentuk IPM di Kota Tarakan meningkat secara perlahan, hal ini tentu memberikan dampak pada angka IPM yang terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun yang mengindikasikan pula keberhasilan pembangunan manusia di Kota Tarakan.

b. Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan tersebut.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Pada periode tahun 2018- 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Tarakan turun dari 0,99 pada tahun 2018 menjadi 0,70 pada tahun 2019. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Tarakan cenderung semakin mendekati garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan pada periode yang sama, yaitu dari 0,29 menjadi 0,16. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kota Tarakan pada tahun 2019 semakin menyempit dibandingkan tahun 2018.

Tabel 2. 13
Statistik Kemiskinan Kota Tarakan 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,23	0,67	1,45	0,99	0,70
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,02	0,14	0,50	0,29	0,16

Sumber: BPS Kota Tarakan, 2020

c. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi sosial ekonomi. Salah satu sasaran dalam pembangunan adalah diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang seimbang dan memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya.

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan tingkat Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tabel 2. 14

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Tarakan Tahun 2017-2019

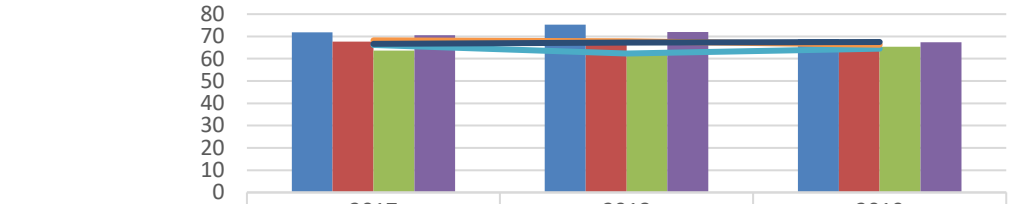

	2017	2018	2019
Malinau	71.88	75.29	68.86
Bulungan	67.61	68.84	66.66
Tana Tidung	63.72	62.98	65.38
Nunukan	70.51	71.95	67.36
Tarakan	66.18	62.34	64.53
Kalimantan Utara	68.24	67.81	66.28
Indonesia	66.67	67.26	67.49

Malinau Bulungan Tana Tidung Nunukan Tarakan Kalimantan Utara Indonesia

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, 2020

Dari gambar di atas, diketahui tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Tarakan tahun 2019 mencapai 64,53 %. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 2,19 poin jika dibandingkan dengan tahun 2018. TPAK Kota Tarakan mengalami fluktuasi dalam tiga tahun terakhir dimana pada tahun 2018 mengalami penurunan hingga sebesar 62,34% dan meningkat Kembali pada tahun 2019.

Berdasarkan data statistik, pada tahun 2019 Kota Tarakan merupakan wilayah yang memiliki TPAK paling rendah di Provinsi Kalimantan Utara apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di sekitarnya. TPAK Kota Tarakan juga berada di bawah TPAK Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa selain mengindikasi rendahnya penduduk usia kerja yang memasuki pasar kerja, tetapi juga mengindikasi fenomena positif di bidang Pendidikan. Program pemerintah tentang pendidikan dasar 9 tahun yang mewajibkan penduduk usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan secara

langsung mengurangi jumlah pekerja anak. Program Pendidikan dasar ini juga memberikan motivasi kepada masyarakat untuk menlanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

2. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Tingkat Kesempatan Kerja merupakan peluang seorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. TKK menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja. Peluang seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja untuk bisa terserap dalam pasar kerja atau dapat bekerja. Semakin besar angka TKK, semakin baik pula kondisi ketenagakerjaan dalam suatu wilayah.

Gambar 2. 16

Tingkat Kesempatan Kerja Kota Tarakan Tahun 2017-2019 (%)

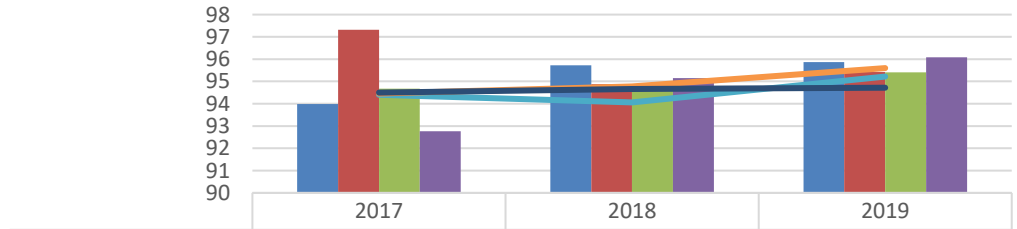

	2017	2018	2019
Malinau	93.99	95.72	95.87
Bulungan	97.32	94.88	95.43
Tana Tidung	94.68	94.76	95.41
Nunukan	92.76	95.15	96.09
Tarakan	94.41	94.06	95.22
Kalimantan Utara	94.46	94.78	95.6
Indonesia	94.5	94.66	94.72

Malinau Bulungan Tana Tidung Nunukan Tarakan Kalimantan Utara Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, 2020

Dari gambar di atas, diketahui tingkat kesempatan kerja di Kota Tarakan meningkat setiap tahunnya. Dari 94,41% ditahun 2017 menjadi 95,22% ditahun 2019. Meningkatnya tingkat kesempatan kerja mengindikasikan bahwa pembangunan Kota Tarakan selama ini cukup memberikan kesempatan kerja bagi penduduk terutama usia kerja.

Berdasarkan data statistik, pada tahun 2019 Kota Tarakan merupakan wilayah yang memiliki TKK paling rendah di Provinsi Kalimantan Utara apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di sekitarnya. TKK Kota Tarakan juga lebih rendah daripada TKK Provinsi Kalimantan Utara, tetapi lebih tinggi dari TKK Nasional. Meskipun demikian, tingkat pengangguran terbuka di Kota Tarakan

mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 TKK Kota telah mencapai 95,22% dari 94,06% ditahun 2018. Hal ini mengindikasi bahwa kesempatan kerja di Kota Tarakan semakin baik.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Gambar 2. 17
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tarakan Tahun 2017-2019

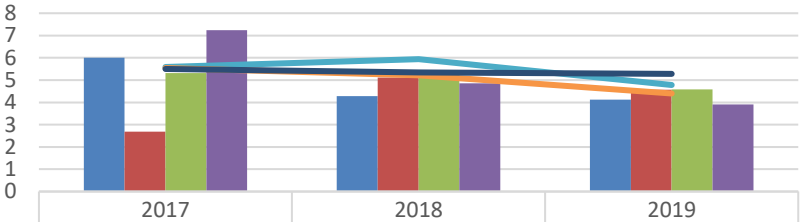

	2017	2018	2019
Malinau	6.01	4.28	4.13
Bulungan	2.68	5.12	4.57
Tana Tidung	5.32	5.24	4.59
Nunukan	7.24	4.85	3.91
Tarakan	5.59	5.94	4.78
Kalimantan Utara	5.54	5.22	4.4
Indonesia	5.5	5.34	5.28

Malinau Bulungan Tana Tidung Nunukan
Tarakan Kalimantan Utara Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, 2020

Berdasarkan data statistik, pada tahun 2019 Kota Tarakan merupakan wilayah yang memiliki TPT paling tinggi di Provinsi Kalimantan Utara apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di sekitarnya. TPT Kota Tarakan juga berada di atas TPT Provinsi Kalimantan Utara, tetapi lebih rendah dari TPT Nasional. Meskipun demikian, tingkat pengangguran terbuka di Kota Tarakan mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 TPT Kota telah mencapai 4,78% dari 5,94% ditahun 2018. Hal ini mengindikasi bahwa penyerapan Angkatan kerja di pasar tenaga kerja semakin baik.

Bila dibandingkan dengan target kinerja pemerintah Kota Tarakan tahun 2019 yaitu tingkat pengangguran terbuka 6-7%, maka dengan realisasi tingkat pengangguran terbuka 4,78% di tahun 2019, maka capaian kinerja pemerintah Kota Tarakan tahun 2019 mencapai 120,33%.

2.1.2.3 Fokus Seni dan Budaya

Fokus seni budaya dan olahraga bertujuan untuk melihat aspek kesejahteraan masayarakat dari segi seni budaya dan olahraga. Fokus seni budaya dan olahraga memberikan gambaran dan analisis di bidang kebudayaan serta pemuda dan olahraga.

Jumlah gedung olahraga di kota Tarakan tahun 2014-2018 tidak mengalami peningkatan, yaitu berjumlah 12 gedung olahraga, yang terdiri dari 4 gedung milik pemerintah dan 8 gedung milik swasta.

Gedung olahraga milik pemerintah, diantaranya : Stadion Datu Adil yang berkapasitas 15.000 orang, gedung Tennis Indoor Telaga Keramat yang berkapasitas 2.000 orang, gedung Tennis Outdoor di Kawasan Sport Centre yang berkapasitas 3.500 orang dan gedung Olahraga Wisma Patra yang berkapasitas 300 orang.

2.1.3. ASPEK DAYA SAING

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing *(competitivness)* merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran tentang kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumberdaya manusia.

2.1.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kota Tarakan memiliki posisi yang strategis bagi Provinsi Kalimantan Utara yaitu sebagai penggerak pertumbuhan wilayah utara di Provinsi Kalimantan Utara dan merupakan kota transit perdagangan antara Indonesia-Malaysia-Philipina.

Kemampuan ekonomi Kota Tarakan dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi Kota Tarakan harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah.

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Pengeluaran rata-rata perkapita merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Dalam kurun waktu 2015-2019,

pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kota Tarakan meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2019, pengeluaran konsumsi per kapita mencapai Rp.1.609.732,- meningkat 1,19% dari tahun sebelumnya.

Gambar 2. 18
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Sebulan di Kota Tarakan Tahun 2015-2019 (Rp)

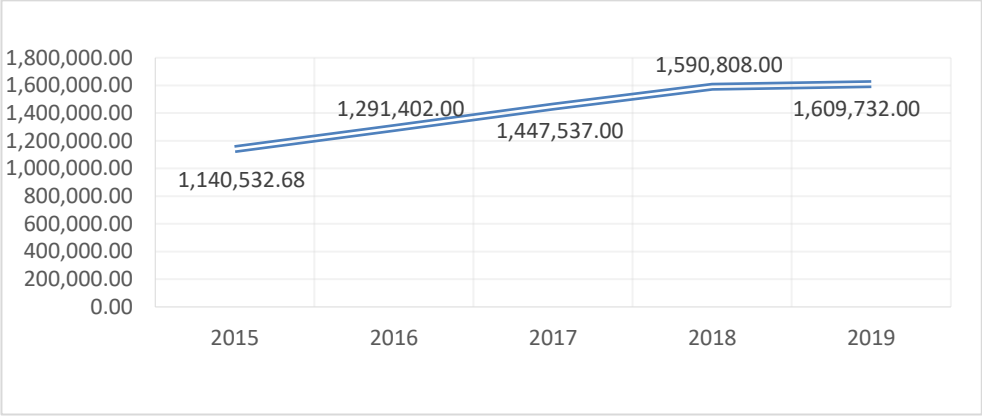

Sumber: Statistik Kesejahteraan Kota Tarakan, 2019

Pada tahun 2019, 40% penduduk berpendapatan rendah, proporsi pengeluaran untuk makanan lebih besar daripada non makanan. Sedangkan pada 40% penduduk berpendapatan menengah dan 20% penduduk berpendapatan tertinggi, proporsi pengeluaran untuk non makanan lebih besar dibanding makanan.

Gambar 2. 19
Pola Konsumsi Penduduk Kota Tarakan Tahun 2019 (%)

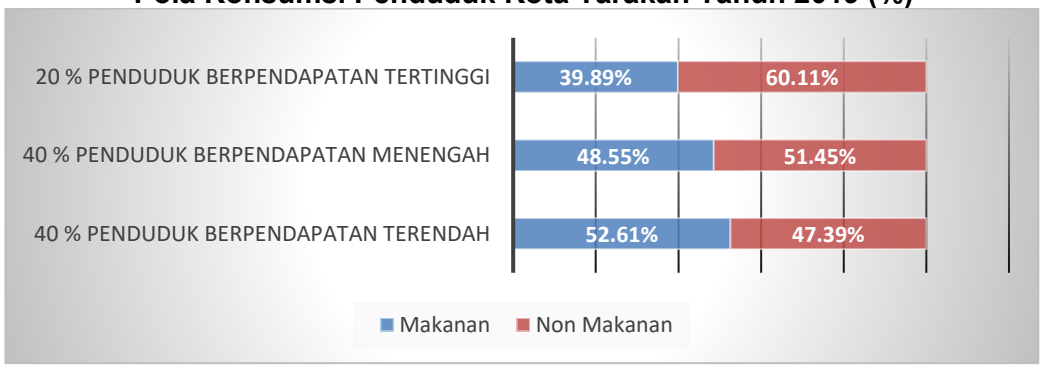

Sumber: Statistik Kesejahteraan Kota Tarakan, 2019

b. Persentase pengeluaran konsumsi bukan makanan perkapita

Pengeluaran konsumsi penduduk Kota Tarakan dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran konsumsi untuk makanan dan bukan makanan. Pada tahun 2019, prosentase pengeluaran konsumsi bukan makanan per kapita adalah 53,72%, menurun dari tahun sebelumnya yaitu 55,05%. Dalam kurun waktu 2015-2019. Meskipun nilainya menurun, akan tetapi makin besar proporsi pengeluaran non

makanan penduduk suatu wilayah menunjukkan makin tinggi tingkat kesejahteraan wilayah tersebut. Pada tahun 2019, total pengeluaran konsumsi per kapita sebesar Rp. 1.609.732,- dengan pengeluaran konsumsi untuk makanan sebesar Rp. 744.926,- dan non pangan sebesar Rp.864.808,-.

Tabel 2. 15
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Sebulan di Kota Tarakan Tahun 2015-2019

Tahun	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Sebulan				Total
	Makanan(Rp)	%	Bukan Makanan(Rp)	%	
2015	524.262	45,97	616.271	54,03	1.140.533
2016	591.315	45,79	700.087	54,21	1.291.402
2017	710.079	49,05	737.458	50,95	1.447.537
2018	715.001	44,95	875.807	55,05	1.590.808
2019	744.926	46,28	864.806	53,72	1.609.732

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka

Dirinci menurut kelompok bukan makanan, 54,96 persen dari pengeluaran rata-rata per kapita sebulan di Kota Tarakan Tahun 2019 adalah pengeluaran rata-rata untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga (Rp. 475.299,-); 25,37 persen adalah aneka barang dan jasa (Rp. 219.401,-) dan 7,18 persen adalah pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk kelompok barang yang tahan lama (Rp. 62.120,-). Sedangkan dirinci menurut kelompok makanan, 38,60 persen dari pengeluaran rata-rata per kapita sebulan di Kota Tarakan Tahun 2019 adalah pengeluaran rata-rata untuk makanan dan minuman jadi (Rp. 287.546,-); 12,21% adalah ikan/udang/cumi/kerang (Rp. 90.942,-); dan 9,50 persen adalah pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk kelompok rokok dan tembakau (Rp. 70.764,-).

Tabel 2. 16
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di Kota Tarakan Tahun 2019

Kelompok Bukan Makanan	Pengeluaran (Rp)	%
Perumahandan fasilitas rumah tangga	475.299	54,96
Aneka barang dan jasa	219.401	25,37
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	49.678	5,74
Barang yang tahan lama	62.120	7,18
Pajak, pungutan, dan asuransi	52.792	6,10
Keperluan pesta dan upacara / kenduri	5.516	0,64

Sumber : Statistik Kesejahteraan Kota Tarakan, 2019

Tabel 2. 17
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Kota Tarakan Tahun 2019

Kelompok Makanan	Pengeluaran (Rp)	%
Padi-padian	69.403	9,32
Umbi-umbian	5.342	0,72
Ikan/Uang/Cumi/Kerang	90.942	12,21
Daging	33.599	4,51
Telur dan Susu	44.580	5,98
Sayur-sayuran	42.750	5,74
Kacang-kacangan	13.022	1,75
Buah-buahan	35.811	4,81
Minyak dan Kelapa	12.464	1,67
Bahan Minuman	17.025	2,29
Bumbu-bumbuan	12.009	1,61
Konsumsi Lainnya	9.670	1,30
Makanan dan Minuman Jadi	287.546	38,60
Rokok dan Tembakau	70.764	9,50

Sumber : Statistik Kesejahteraan Kota Tarakan, 2019

2.1.3.2 Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pertumbuhan ekonomi, situasi politik, keamanan hingga kemudahan perijinan dalam mendirikan maupun pengembangan usaha.

Iklim investasi adalah semua kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa datang, yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi. Tiga faktor utama dalam iklim investasi mencakup:

- Kondisi ekonomi makro-termasuk stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, dan stabilitas sosial dan politik.
- Kepemerintahan dan kelembagaan, termasuk kejelasan dan efektifitas peraturan, perpajakan, sistem hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan trampil.
- Infrastruktur-mencakup antara lain sarana transportasi, telekomunikasi, listrik, dan air.

Selain tiga faktor diatas terdapat variabel lain yang juga mempengaruhi iklim berinvestasi diantaranya:

a. Angka Kriminalitas

Tingkat kriminalitas termasuk variabel yang penting untuk diperhatikan dalam mewujudkan kesejahteraan penduduk. Kriminalitas menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, di sisi lain kriminalitas dapat menjadi indikator tidak sejahteranya masyarakat. Jadi terdapat hubungan timbal balik (*reciprocal)* antara variabel kesejahteraan dengan variabel kriminalitas. Angka kriminalitas yang relatif tinggi dapat mengganggu terciptanya stabilitas keamanan, sehingga angka krminalitas harus ditekan dengan mengaktifkan banyak pihak terkait dan kelembagaan sosial di masyarakat.

Tabel 2. 18
Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk di Kota Tarakan
Tahun 2015-2017

Indikator	Satuan	2015	2016	2017
Jumlah Tindak Kriminal	Kasus	245	221	279
Jumlah Penduduk	Jiwa	235.565	244.185	253.026
Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk	Kasus	10,40	9,05	11,03

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka, 2018

Dari tabel di atas, diketahui angka kriminalitas di Kota Tarakan pada tahun 2017 sebesar 11,03, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 9,05. Angka kriminalitas ini perlu ditekan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif atau pencegahan.

b. Lama Proses Perijinan

Peningkatan kinerja pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik semakin meningkat, salah satunya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Tarakan. Pentingnya pelayanan perizinan satu pintu menjadi pintu masuk bagi investor-investor yang akan memacu tumbuhnya investasi sehingga banyak menciptakan peluang kerja, meningkatnya income per kapita dan pendapatan asli daerah Kota Tarakan. Untuk itulah sistem informasi pelayanan perizinan yang progresif menjadi sangat penting dalam mendukung pengembangan investasi daerah dan pertumbuhan ekonomi. DPMPTSP Kota Tarakan telah meningkatkan kemudahan pelayanan dengan menerapkan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (online) sejak tahun 2011. Perizinan PMA merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan, sementara kewenangan pemerintah daerah adalah perizinan PMDN lintas kabupaten/kota. Dari 105 jenis perizinan dan non

perizinan yang telah didelegasikan kewenangannya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan, selama tahun 2019.

Tabel 2. 19
REKAPITULASI IZIN DAN NON IZIN BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 10 TAHUN 2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	IZIN	WAKTU PENYELESAIAN (HARI)
1	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal	14
2	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	14
3	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	14
4	Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional	14
5	Izin Praktik Apoteker	14
6	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	14
7	Izin Praktik Bidan	14
8	Izin Kerja Bidan	14
9	Izin Praktik Dokter (Faskes)	14
10	Izin Praktik Dokter (Mandiri)	14
11	Izin Praktik Fisioterapis	14
12	Izin Kerja Fisioterapis	5
13	Izin Praktik Tenaga Gizi	14
14	Izin Kerja Tenaga Gizi	14
15	Izin Praktik Okupasi Terapis	14
16	Izin Kerja Okupasi Terapis	14
17	Izin Praktik Perawat	14
18	Izin Kerja Perawat	14
19	Izin Kerja Radiografer	14
20	Izin Kerja Optometris	14
21	Izin Kerja Refraksionis Optisien	14
22	Izin Praktik Terapis Wicara	20
23	Izin Kerja Terapis Wicara	20
24	Izin Apotek	20
25	Izin Optik	20
26	Izin Toko Alat Kesehatan	20
27	Izin Toko Obat	14
28	Izin Operasional Pemberantasan Hama	14
29	Izin Mendirikan Rumah Sakit	30
30	Izin Operasional Rumah Sakit	45
31	Izin Operasional Klinik	30
32	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium	14
33	Izin Praktik Ortotesis Prostetis	14
34	Izin Kerja Ortotesis Prostetis	5
35	Izin Praktik Penata Anastesi	14
36	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	14
37	Izin Praktik Elektromedis	14
38	Izin Kerja Tenaga Sanitarian	5
39	Izin Kerja Perekam Medis	5
40	Izin Praktik Psikologis Klinik	14
41	Izin Penyehat Tradisional	14
42	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus	45
43	Izin Tukang Gigi	14

NO	IZIN	WAKTU PENYELESAIAN (HARI)
44	Izin Praktik Tenaga Akupuntur	14
45	Izin Penyelenggaraan Puskesmas	14
46	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisonal	14
47	Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah	14
48	Izin Mendirikan Bangunan	12
49	Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional	10
50	Izin Penyelenggaraan Reklame	5
51	Izin Pembuangan Air Limbah	25
52	Izin Penataan dan Pemotongan Bukit	7
53	Izin Pemrosesan Akhir Sampah	5
54	Izin Pengolahan Sampah	5
55	Izin Pengangkutan Sampah	5
56	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk Jasa	45
57	Izin Lingkungan	60
58	Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan	7
59	Izin Penyelenggaraan Parkir	5
60	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	7
61	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	3
62	Pendaftaran Usaha Pertenakan	14
63	Izin Pengusahaan Sarang Walet	7
64	Izin Usaha Penyedia Sarana Produksi Pertanian (*Phoultry Shop*)	14
65	Izin Usaha Obat Hewan (Toko atau Depo)	14
66	Izin Usaha Penjualan Daging	7
67	Izin Produksi Pupuk	10
68	Izin Usaha Pemotongan Hewan atau Unggas	14
69	Izin Praktik Dokter Hewan Bersama	3
70	Izin Praktik Hewan Mandiri	5
71	Izin Praktik Dokter Hewan	3
72	Izin Klinik Hewan	7
73	Izin Usaha Perikanan	5
74	Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil	2
75	Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil	2
76	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	7
77	Izin Usaha Pedagangan	3
78	Tanda Daftar Gudang	5
79	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat	5
80	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba	3
81	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi	7
82	Izin Pembukaan Kantor Pembantu Koperasi	7
83	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi	7
84	Izin Koperasi Simpan Pinjam	30
85	Izin Usaha Industri	5
86	Izin Perluasan (Industri)	5
87	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	5
88	Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	5
89	Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja	5
90	Izin Lokasi	22
91	Surat Terdaftar Penyehat Tradisonal	14
92	Rekomendasi SPA	14
93	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum	25
94	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga	24

NO	IZIN	WAKTU PENYELESAIAN (HARI)
95	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Pangan	14
96	Surat Keterangan Laik Sehat Hotel	14
97	Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	14
98	Sertifikat Laik Fungsi	14
99	Surat Rekomendasi Peruntukan Lahan	5
100	Surat Informasi Tata Ruang	5
101	Rekomendasi Menara Telekomunikasi	4
102	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	3
103	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	5
104	Kartu Pengawas Kendaraan	2
105	Notifikasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	5

Sumber: Bidang Prizinan dan Non perizinan DPMPTSP 2019

c. Jumlah Dan Macam Pajak Dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD adalah pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Hak-hak daerah tersebut sebagaimana di maksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hasil PDRD merupakan sebagian sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah Otonom (daerah) yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan PERDA Kota Tarakan nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah pada Bab II pasal 2, terdapat 11 jenis pajak di Kota Tarakan yaitu: 1) Pajak Hotel, 2) Pajak Restoran, 3) Pajak Hiburan, 4) Pajak Reklame, 5) Pajak Penerangan Jalan, 6) Pajak Parkir, 7) Pajak Air Tanah, 9) Pajak Sarang Burung Walet, 9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan 11) Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan.

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Retribusi menurut UU no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

kepentingan pribadi atau badan. Secara umum, retribusi dikelompokkan menjadi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Berdasarkan PERDA Kota Tarakan nomor 1 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, terdapat 11 jenis retribusi jasa umum di Kota Tarakan yaitu : 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan, 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, 3) Retribusi Pergantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, 4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, 5) Retribusi Pelayanan Pasar, 6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, 7) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, 8) Retribusi Pelayanan Pendidikan, 9) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, 10) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan 11) Retribusi Kelayakan.Retribusi Pergantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sejak tahun 2015 sudah tidak ada, dikarenakan sudah menggunakan e-KTP. Sedangkan Retribusi Kelayakan Kapal sejak tahun 2016 sudah diambil alih oleh KSOP.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Berdasarkan PERDA Kota Tarakan nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, terdapat 7 retribusi jasa usaha di Kota Tarakan yaitu: 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, 2) Retribusi Terminal, 3) Retribusi Tempat khusus Parkir, 4) Retribusi Rumah Potong Hewan, 5) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan (sejak Nopember 2018-diambil alih oleh Propinsi Kaltara), 6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, dan 7) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sejak Nopember 2018 diambil alih oleh Propinsi Kaltara.

Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang. penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Berdasarkan PERDA Kota Tarakan nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, terdapat 4 retribusi perizinan tertentu yaitu: 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, 3) Retribusi izin trayek, 4) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Tabel 2. 20
Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tarakan
Tahun 2015-2019

PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	2015	2016	2017	2018	2019
PAJAK DAERAH					
Pajak Hotel	5.446.392.484	6.170.627.646	7.030.509.965	7.588.802.274,29	7.116.708.377,90
Pajak Restoran	4.975.443.960	4.814.433.639	6.071.371.964	6.506.540.925,60	7.643.466.015,00
Pajak Hiburan	316.785.607	480.474.630	475.576.267	394.995.252,60	374.240.064,65
Pajak Reklame	1.636.331.068	1.334.396.304	1.684.262.990	2.617.704.454,25	3.350.818.767,40
Pajak Penerangan Jalan	12.671.782.990	7.046.729.003	5.103.500.369	6.915.447.815,00	6.573.637.854,00
Pajak Parkir	407.316.200	329.792.800	111.546.000	110.000.000,00	100.000.000,00
Pajak Air Tanah	165.691.017	203.939.455	3.679.115	388.255.235,89	404.752.739,71
Pajak Sarang Burung Walet	-	1.950.000	1.050.000	31.830.000,00	53.703.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	34.644.000	205.215.459	394.920.659		
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	5.380.855.639	6.977.921.693	10.365.204.011	9.461.368.242,00	10.015.307.128,00
Bea Perolehan 44a katas tanah dan Bangunan	4.734.011.694	7.165.570.667	9.367.471.698	10.759.414.575,00	12.449.854.972,46
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C				681.894.794,40	42.292.538,00
Total Pendapatan Pajak Daerah	**35.769.254.658**	**34.731.051.295**	**40.609.093.038**	**45.456.253.569,03**	**48.124.781.457,12**
Retribusi Jasa Umum					
Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.348.674.000	2.372.455.500	1.750.979.700	951.475.000,00	2.024.006.967,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	490.370.000	467.730.000	19.350.000	277.060.000,00	174.900.000,00
Retribusi Pergantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	-	-	- -		
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	264.298.329	438.511.000	448.060.000	349.785.000,00	380.270.000,00

PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	2015	2016	2017	2018	2019
Retribusi Pelayanan Pasar	85.000.000	-	536.867.000	481.500.000,00	420.925.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	219.798.100	277.920.900	241.387.200	190.180.700,00	212.255.900,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	26.550.000	25.529.000	32.982.000	31.875.000,00	15.595.000,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan	-	-	- -		
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	11.600.000	9.600.000	18.000.000	12.400.000,00	13.600.000,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	188.379.574	36.625.000	-	
Retribusi Kelayakan Kapal	-	-	-		
Jumlah Retribusi Umum	**3.446.290.429**	**3.780.125.974**	**3.084.250.900**	**2.294.275.700,00**	**3.241.552.867,00**
Retribusi Jasa Usaha					
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	149.091.100	1.377.752.828	909.299.500	3.365.094.844,00	3.157.493.150,00
Retribusi Terminal	-	-	172.625.254	399.840.000,00	375.490.000,00
Retribusi tempat Khusus Parkir	-	46.105.000	23.900.000	-	
Retribusi Rumah Potong Hewan	48.000.000	50.850.000	49.175.000	53.075.000,00	48.785.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.547.131.275	4.440.036.005	5.032.912.749	4.327.127.634,00	175.453.710,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	279.450.000	350.975.000	413.798.000	636.415.000,00	380.627.500,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah	-	-	7.900.000	14.080.000,00	64.080.000,00
Retribusi Tempat Pariwisata				467.320.000,00	155.094.000,00
Jumlah Retribusi Jasa Usaha	**2.023.672.375**	**6.265.718.833**	**6.609.610.503**	**9.262.952.478,00**	**4.357.023.360,00**

PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	2015	2016	2017	2018	2019
Retribusi Perizinan Tertentu					
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.208.048.400	1.135.954.100	1.225.441.000	1.669.258.375,00	1.828.716.390,63
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	50.000.000	50.000.000	50.000.000	125.000.000,00	100.000.000,00
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	569.171.659	810.627.166	914.195.200	38.174.168,00	
Retribusi Izin Trayek	9.300.000	750.000	3.500.000	12.000.000,00	1.050.000,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	961.151.885	-	-	-	
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	-	-	81.345.600	120.327.600,00	-
Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu	**2.797.671.943**	**1.997.331.266**	**2.274.481.800**	**1.964.760.143,00**	**1.929.766.390,63**
Total Retribusi Daerah	**8.267.634.747**	**12.043.176.073**	**11.968.343.203**	**13.521.988.321,00**	**9.528.342.617,63**
REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	**44.036.889.405,12**	**46.774.227.368,77**	**52.577.436.240,59**	**58.978.241.890,03**	**57.653.124.074,75**

Sumber: BPKAD Kota Tarakan, 2020

2.1.3.3 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan merupakan perbandingan antara panjang jalan secara keseluruhan dengan jumlah kendaraan yang terdapat di suatu daerah. Secara umum, kondisi rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Tarakan jika dilihat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan pembangunan ruas jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengimbangi jumlah kendaraan yang masuk.

Gambar 2. 20
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kota Tarakan Tahun 2013-2017 (km)

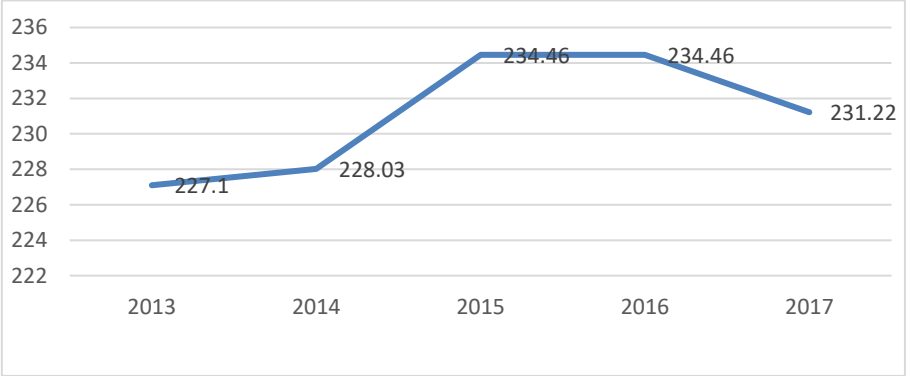

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan, 2018

Dari tabel di atas diketahui bahwa dalam kurun waktu 2013-2017, rasio tertinggi pada tahun 2015 dan 2016 sebesar 234,46 dan rasio terendah pada tahun 2013 sebesar 227,1. Pada tahun 2017 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan sebesar 231,22, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 234,46.

b. Jumlah Orang/Barang Melalui Bandara dan Dermaga

Prasarana (infrastruktur) transportasi merupakan komponen berbentuk fasilitas fisik yang bersifat tetap dan bersifat mengantarkan perpindahan dari asal ke tujuan, seperti bandar udara dan pelabuhan. Di Kota Tarakan terdapat 1 bandar udara yaitu Bandar Udara Internasional Juwata**.** Arus penumpang dalam kurun waktu tahun 2015-2019 cenderung menurun. Begitu pula arus bagasi di Bandara Internasional Juwata dalam kurun waktu 2015-2019 cenderung menurun dengan jumlah barang tertinggi pada tahun 2017 yaitu 8.181.604 kg barang yang dibongkar dan 7.654.288 kg barang dimuat.

Pelabuhan laut juga menjadi jalur transportasi di Kota Tarakan, karena menjadi pintu masuk dari beberapa provinsi dan kabupaten/kota lainnya. Dalam kurun waktu 2015-2019 jumlah arus penumpang mengalami kenaikan hal ini disebabkan oleh banyaknya arus penumpang dari dan ke ibu kota provinsi Tanjung selor. Dengan

beroperasinya pelabuhan ferry yang berada di juata laut yang melayani pelayaran ke Sulawesi maka jumlah arus penumpang cenderung meningkat pada tahun 2015–2019 dari 4.183 menjadi 16.881 penumpang. Arus penumpang di pelabuhan laut Malundung mengalami penurunan dari tahun ke tahun namun tidak terlalu signifikan, dimana tahun 2013 terdapat 123.884 penumpang dan menurun 112.704 penumpang pada tahun 2017. Hal ini dimungkinkan adanya peralihan penumpang dengan menggunakan transportasi udara.

Tabel 2. 21
Perkembangan Arus Lalu Lintas Penumpang di Bandara dan Pelabuhan Laut Kota Tarakan Tahun 2015-2019 (orang)

Tahun	Tengkayu Satu	Pelabuhan Juata Laut	Pelabuhan Malundung	Bandara Juwata
2015	-	4.183	128.383	1.259.321
2016	837.585	-	115.636	1.105.985
2017	976.702	13.198	112.704	1.044.761
2018	967.352	20.826	Data Belum Tersedia	1.030.847
2019	987.315	16.881	Data Belum Tersedia	468.104

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tarakan, 2020

Tabel 2. 22
Perkembangan Arus Bagasi di Bandar Udara Internasional Juwata Tarakan di Kota Tarakan Tahun 2015-2019 (barang)

Arus Lintas Bagasi	2015	2016	2017	2018	2019
Bongkar	4.030.022	4.727.629	8.181.604	4.764.415	1.154.293
Muat	7.189.718	4.759.880	7.654.288	7.791.883	1.259.121

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka 2018 dan Dinas Perhubungan 2020

c. Ketaatan terhadap RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan rencana pembangunan jangka panjang. RTRW Kota Tarakan ditetapkan pada tahun 2012 sehingga perhitungan ketaatan terhadap RTRW Kota Tarakan telah dapat dilakukan dari tahun 2013. Jika kita lihat hasil perhitungan terkait ketaatan terhadap rencana dalam RTRW Kota maka dalam kurun waktu 2013-2018, ketaatan terhadap RTRW di Kota Tarakan mengalami peningkatan yang signifikan yakni dari 35% pada tahun 2013 hingga mencapai 72% ketaatan pada tahun 2018.

Gambar 2. 21

Ketaatan Terhadap RTRW Kota Tarakan Tahun 2013-2017

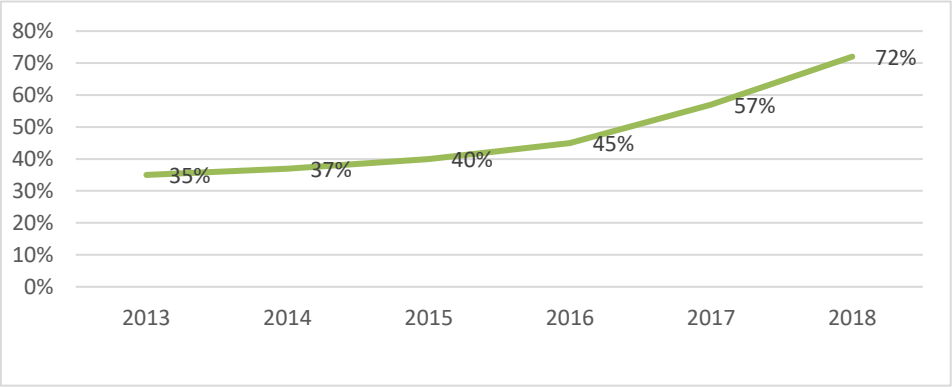

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan, 2020

d. Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif dalam hal ini sangat menyesuaikan dengan kondisi rencana penggunaan lahan yang terdapat di dalam RTRW Kota Tarakan. Sehingga setelah pelaksanaan rencana pembangunan dalam RTRW Kota Tarakan maka diperoleh perkembangan luas wilayah produktif sebagaimana gambar di bawah.

Gambar 2. 22
Luas Wilayah Produktif (Ha)

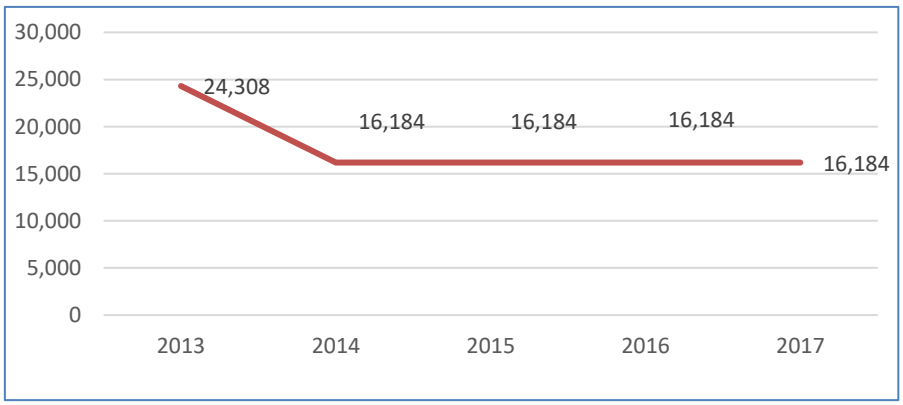

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan, 2018

e. Jenis Dan Jumlah Bank Dan Cabang

Bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dalam kurun waktu 2015-2019, perkembangan jumlah kantor bank di Kota Tarakan mengalami peningkatan.

Secara umum, bank dapat dikelompokkan menjadi bank umum pemerintah dan

bank umum swasta. Di Kota Tarakan, dalam kurun waktu 2015-2019, jumlah bank umum pemerintah lebih banyak dibandingkan bank umum swasta. BRI merupakan bank umum pemerintah dengan jumlah kantor paling banyak. Tercatat pada tahun 2019, jumlah kantor bank BRI yang ada di Kota Tarakan sejumlah 9 kantor.

Tabel 2. 23
Jumlah Kantor Bank Menurut Kelompok Bank di Kota Tarakan
Tahun 2015-2019

Kelompok Bank	2015	2016	2017	2018	2019
Bank Umum Pemerintah					
BNI 46	2	2	4	4	3
BRI	10	10	9	9	9
Bank Mandiri	2	3	3	3	3
BPD Kalimantan Timur-Utara	4	6	6	6	7
Bank Tabungan Negara	1	1	1	1	1
Bank Umum Swasta					
Bank Danamon Indonesia	2	2	2	2	2
Bank Niaga	1	1	1	1	1
Bank Central Asia	1	1	1	1	1
Bank MNC	1	1	1	1	1
Bank Muamalat	1	1	1	1	1
Bank CIMB NIaga	1	1	1	1	1
Bank Maybank Indonesia	1	1	1	1	2
Bank Tabungan Pensiun Nasional	1	1	1	1	1
Bank Mandiri Syariah	1	1	1	1	1
Total	**31**	**32**	**34**	**33**	**33**

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka, 2020

f. Jenis, Kelas, Dan Jumlah Restoran

Restoran adalah istilah umum untuk menyebut usaha gastronomi yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan itu serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya. Umumnya restoran menyajikan makanan di tempat, tetapi ada juga restoran yang menyediakan layanan *takeout dinning* dan *delivery service* untuk melayani konsumennya. Pada tahun 2019, jumlah Restoran/Rumah Makan yang terdapat di Kota Tarakan sebesar 156 buah, meningkat 39,3% dari tahun sebelumnya sebesar 112 buah.

g. Jenis, Kelas, Dan Jumlah Penginapan/Hotel

Penginapan atau hotel merupakan salah satu kebutuhan penunjang dalam kegiatan pariwisata di suatu wilayah, termasuk di Kota Tarakan. Usaha penyediaan akomodasi merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat

berupa hotel, villa, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan caravan dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

Perkembangan fasilitas akomodasi di Kota Tarakan cukup signifikan terutama fasilitas penginapan tinggal. Hal ini dikarenakan Kota Tarakan menjadi wilayah transit utama bagi seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Utara mengingat keberadaan Bandara Juata Tarakan sebagai bandara internasional. Selama 5 tahun terakhir, jumlah ketersediaan akomodasi bertambah hingga 10 unit.

Secara umum, hotel terdiri dari hotel berbintang dan hotel non bintang (melati dan akomodasi lainnya). Dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019, jumlah hotel non bintang jauh lebih banyak dibandingkan hotel berbintang. Pada tahun 2019, jumlah hotel non bintang berjumlah 38 hotel dibandingkan hotel berbintang yang hanya 8 hotel.

Tabel 2. 24
Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel

Jenis Akomodasi	2015	2016	2017	2018	2019
Bintang 5	0	0	0	0	0
Bintang 4	1	1	1	1	1
Bintang 3	0	0	0	0	0
Bintang 2	4	1	1	1	4
Bintang 1	3	3	3	3	3
Melati	34	34	34	35	32
Akomodasi lainnya		6	6	6	6
Total	**41**	**45**	**45**	**46**	**46**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2020

h. Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan penggunaan air semakin tinggi. Kebutuhan terhadap kuantitas juga kualitas air pun turut meningkat. Penyediaan air bersih di Indonesia dijamin dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Lebih lanjut lagi, kebijakan tersebut dipertegas dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemenuhan air bersih bagi masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagai bagian dari pelayanan publik yang harus mereka lakukan.

Dalam kurun waktu 2015-2019, persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum bersih terus meningkat. Sumber air minum bersih terdiri dari air kemasan, air isi ulang, leding, dan (sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air

terlindung) dengan jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat ≥10m. Pada tahun 2015, persentase tangga yang menggunakan air minum bersih sebesar 77,63%, meningkat menjadi 94,14% pada tahun 2019.

Selain sumber air minum bersih, rumah tangga di Kota Tarakan juga menggunakan sumber air minum layak. Sumber air minum layak terdiri dari leding, air hujan, dan (sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung) dengan jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat ≥ 10 m. Secara umum, persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak berfluktuatif. Pada tahun 2015, persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak sebesar 99,04%, menurun sebesar 98,13% pada tahun 2019.

Pada tahun 2018, terdapat penambahan klasifikasi akses air layak yang merupakan sumber air minum yang terdiri dari leding, air hujan, dan (sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung) dengan jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/ Tinja Terdekat ≥ 10 m dan sumber air minum kemasan/isi ulang dimana sumber air cuci/masak/mandi/dll menggunakan (sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat ≥10m. Pada tahun 2018 sendiri, persentase rumah tangga yang menggunakan akses air layak sebesar 96,40% sedangkan sumber air minum layak hanya sekitar 11,10%.

Tabel 2. 25
Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Sumber Air Minum Bersih Dan Sumber Air Minum Layak Kota Tarakan 2015-2019

Karakteristik Air Bersih	2015	2016	2017	2018	2019
Sumber Air Minum Bersih	77,63	85,40	90,88	92,45	94,14
Sumber Air Minum Layak	99,04	96,66	97,20	11,10	98,13
Akses Air layak	-	-	-	96,40	

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Tarakan, 2018 dan Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara, 2019

i. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik

Listrik merupakan salah satu kebutuhan utama di Kota Tarakan. Salah satu manfaat listrik adalah sebagai sumber penerangan. Secara umum, untuk fasilitas sumber penerangan, rumah tangga menggunakan sumber penerangan yang berasal dari listrik dari PLN dan non PLN. Dalam kurun waktu 2015-2019, persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik meningkat setiap tahunnya, mulai dari 99,39% pada tahun 2015 hingga 99,72% pada tahun 2019.

Gambar 2. 23
Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Penerangan Listrik
Kota Tarakan 2015-2019

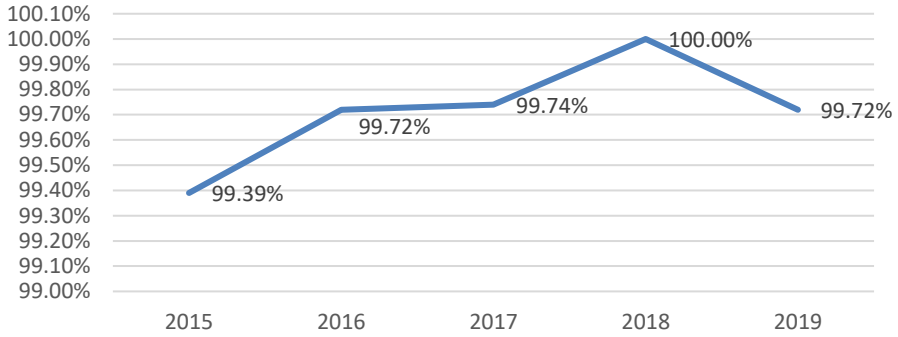

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Tarakan, 2018 dan Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara, 2019

j. Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon

Telepon seluler (HP) merupakan perangkat telekomunikasi yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon kabel, namun dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungan dengan jaringan telekomunikasi kabel. Di era globalisasi, HP sangat penting untuk memperlancar hubungan dengan orang lain untuk kepentingan seseorang yang mendadak maupun tidak. Dalam kurun waktu 2015-2019, persentase penduduk yang menggunakan hp/telepon meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, persentase penduduk yang menggunakan hp/telepon sebesar 90,13%, meningkat dari tahun 2015 sebesar 71,67%.

Gambar 2. 24
Persentase Anggota Rumah Tangga 5 Tahun Ke Atas Yang Menggunakan HP
Kota Tarakan 2015-2019

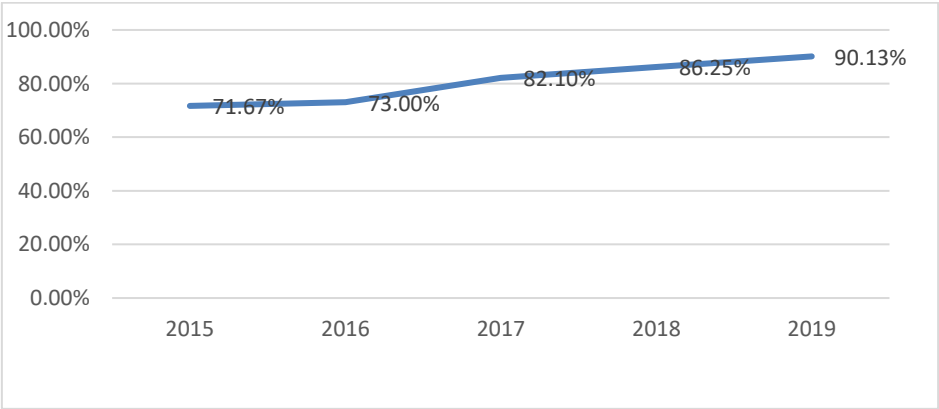

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Tarakan, 2015-2019

2.1.3.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan merupakan pondasi awal dan sebagai tujuan akhir dari pembangunan daerah. Namun untuk mencapai pembangunan yang diinginkan, tidak hanya kuantitas penduduk saja yang dibutuhkan, melainkan sumber daya manusia berkualitaslah yang menjadi harapan utama penyokong pembangunan suatu daerah.

- **Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)**

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Rasio lulusan S1/S2/S3 didapatkan dari perbandingan antara jumlah lulusan S1/S2/S3 terhadap jumlah penduduk, dikalikan sepuluh ribu.

Secara umum, dalam kurun waktu 2015-2019, jumlah lulusan S1/S2/S3 di Kota Tarakan mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, jumlah lulusan S1/S2/S3 mencapai 10.816 orang, meningkat 0,56% dari tahun sebelumnya sejumlah 10.754 orang. Sedangkan rasio lulusan S1/S2/S3 tahun 2019 mencapai 440,06, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 415,21.

Tabel 2. 26
Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Tarakan Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Lulusan S1/S2/S3	Jumlah Penduduk	Rasio lulusan S1/S2/S3
2015	9.125	231.741	393,76
2016	9.226	246.496	374,29
2017	10.003	252.464	396,21
2018	10.754	259.001	415,21
2019	10.816	245.784	440,06

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, 2016-2020

- **Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)**

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15 - 64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif.

Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio

ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Secara umum, rasio ketergantungan di Kota Tarakan relatif menurun, walaupun pernah mengalami peningkatan pada tahun 2019. Rasio ketergantungan di Kota Tarakan berkisar antara 46,57 – 47,81. Pada tahun 2018, rasio ketergantungan di Kota Tarakan sebesar 46,57 dan merupakan angka terendah dalam kurun waktu 2015-2019.

Gambar 2. 25
Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan) di Kota Tarakan Tahun 2015-2019

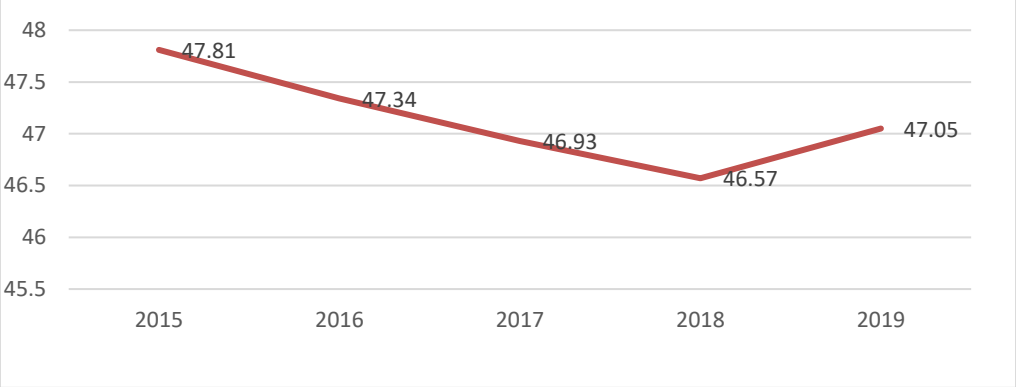

Sumber : Kota Tarakan Dalam Angka, 2018 dan Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara, 2019

2.1.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pada bagian aspek pelayanan umum akan dijelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tarakan, baik pada urusan pelayanan wajib dasar dan non dasar, urusan pilihan serta penunjang urusan. Berikut penjabaran aspek pelayanan umum sebagai bagian dari hasil pembangunan daerah selama ini.

2.1.3.1 Pelayanan Urusan Wajib Dasar

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah karena berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap kebutuhan masyarakat. Secara umum, penyelenggaraan pelayanan dasar Kota Tarakan memang sudah mulai ada perbaikan, namun masih perlu adanya peningkatan terutama sarana prasarana penunjang kebutuhan dasar kehidupan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, aksesibilitas wilayah, penyediaan perumahan yang layak,

ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat hingga sosial. Berikut indikator kinerja hasil pembangunan daerah yang merupakan gambaran pelayanan urusan wajib dasar pemerintah kabupaten hingga saat ini.

a. Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia dari aspek kecerdasan, akhlak, serta keterampilan. Kemajuan pendidikan bisa dilihat dari berapa indikator antara lain:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembangunan Berkelanjutan, pada tahun 2030 menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan pra-sekolah dasar yang berkualitas sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini menggambarkan penduduk usia 4-6 Tahun yang mendapatkan pendidikan di TK/RA/Penitipan Anak. Pada tahun 2019 jumlah PAUD di Kota Tarakan sebesar 119 unit.

2. Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar (APK) merupakan ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk pada setiap tahunnya pada seluruh jenjang pendidikan. APK digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Secara umum, APK di Kota Tarakan dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan yaitu SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.

Secara umum, nilai APK cenderung berfluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2018, APK SD/MI sebesar 104,05 menurun dari tahun sebelumnya sebesar 104,72. APK SMP/Mts sebesar 91,09 menurun dari tahun sebelumnya sebesar 95,98. Sedangkan APK SMA/SMK/MA sebesar 110,38 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 96,82

Gambar 2. 26
Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kota Tarakan Tahun 2014-2018

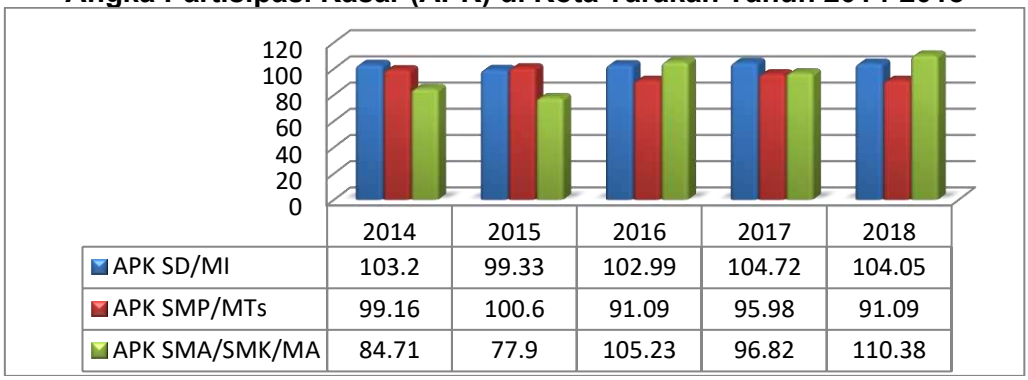

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka, 2018

3. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perhitungan daya serap pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah baik itu pada jenjang SD dan sederajat, SMP dan sederajat serta SMA dan sederajat setiap tahun. angka partisipasi murni digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. APM di Kota Tarakan dikelompokkan berdasar tingkat pendidikan yaitu SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.

Gambar 2. 27
Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Tarakan Tahun 2015-2019

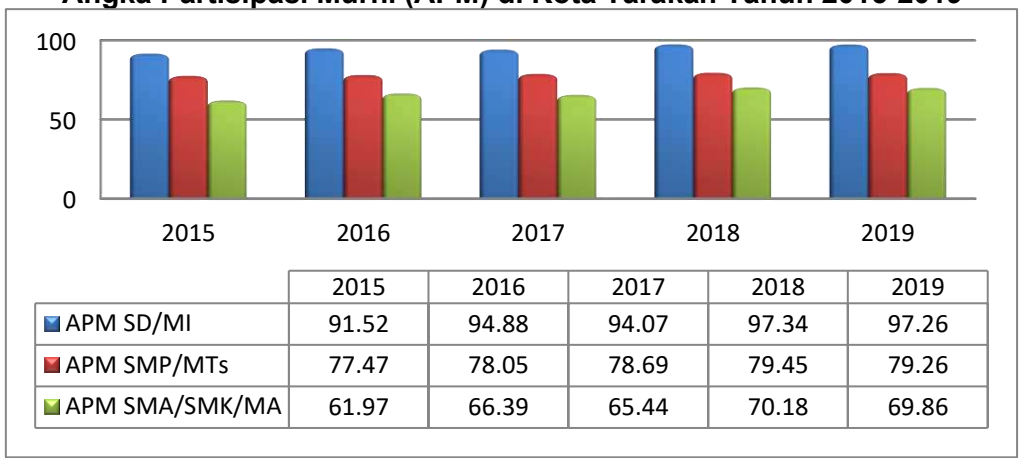

Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka, 2018 dan Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara, 2019

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI merupakan perhitungan Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah pada jenjang SD/MI. Dalam kurun waktu 2015-2019, APM SD/MI/Paket A di Kota Tarakan berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2015 APM SD/MI sebesar 91,52 meningkat pada tahun 2019 sebesar 97,26.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs merupakan perhitungan jumlah

penduduk usia 13-15 yang bersekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs. Dalam kurun waktu 2015-2019, APM SMP/MTs di Kota Tarakan berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2019, APM SMP/MTs sebesar 79,26 meningkat dari tahun 2015 yaitu sebesar 77,47.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA merupakan perhitungan jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA. Dalam kurun waktu 2015-2019, APM SD/MI di Kota Tarakan berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2019, APM SMA/SMK/MA sebesar 69,86 meningkat dari tahun 2015 yaitu sebesar 61,97.

4. Angka Partisipasi Sekolah

Merupakan rasio daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. APS menggambarkan penduduk usia sekolah yang bersekolah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

Gambar 2. 28
Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Tarakan Tahun 2015-2019

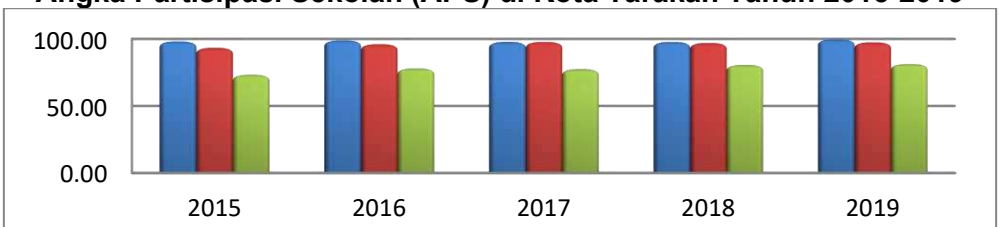

	2015	2016	2017	2018	2019
APS 7-12	98.13	98.88	97.81	97.76	99.63
APS 13-15	93.38	96.03	97.71	97.00	97.43
APS 16-18	73.26	78.04	77.53	80.68	81.27

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional – BPS, 2018 dan Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara, 2019

Dari gambar di atas, dalam kurun waktu 2015-2019, APS Kota Tarakan berfluktuatif baik APS 7-12, APS 13-15 dan APS 16-18. APS 7-12 tertinggi pada tahun 2019 sebesar 99,63 dan terendah pada tahun 2018 sebesar 97,76. APS 13-15 tertinggi pada tahun 2017 sebesar 97,71 dan terendah pada tahun 2015 sebesar 93,38. APS 16-18 tertinggi pada tahun 2019 sebesar 81,27 dan terendah pada tahun 2015 sebesar 73,26.

5. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah merupakan proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka putus sekolah digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing tingkat pendidikan. Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik.

Tabel 2. 27
Angka Putus Sekolah (APtS) di Kota Tarakan Tahun 2014-2018

Tahun	APts SD/Sederajat	APts SMP/Sederajat	APts SMA/Sederajat
2015	0.09	0.72	1.48
2016	0.08	0.05	0.13
2017	0.21	0.01	n/a
2018	0.23	0.40	n/a

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, 2018

Dari gambar di atas, dapat diketahui bahwa secara umum APtS di Kota Tarakan pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. APtS SD/Sederajat pada tahun 2018 sebesar 0,23, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 0,21. APtS SMP/Sederajat pada tahun 2018 sebesar 0,40, meningkat dari tahun sebelumnya 0,01. APtS SMA/Sederajat pada tahun 2016 sebesar 0,13, menurun dari tahun sebelumnya 1,48. Hal ini menunjukkan perlu perhatian khusus atas peningkatan angka putus sekolah SD dan SMP yang cenderung meningkat.

6. Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah presentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka kelulusan digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan disekolah serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah.

Gambar 2. 29
Angka Kelulusan di Kota Tarakan Tahun 2015-2019

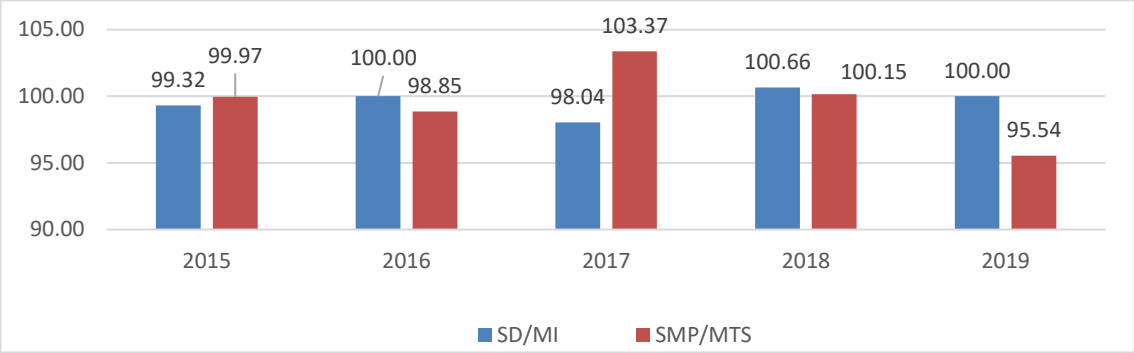

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tarakan, 2020

Dari gambar di atas, dapat diketahui secara umum angka kelulusan SD/MI tinggi, bahkan pada tahun 2018, angka kelulusan mencapai 100,66%. Sedangkan angka kelulusan SMP/MTS mengalami penurunan. Pada tahun 2017 angka kelulusan mencapai 103,37% dan pada tahun 2018 mencapai 100,15%, kemudian menurun pada tahun 2019 menjadi 95,54%.

7. Angka Melanjutkan (AM)

Angka melanjutkan pendidikan adalah persentase siswa yang melanjutkan pendidikan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka melanjutkan pendidikan dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Gambar 2. 30
Angka Melanjutkan di Kota Tarakan Tahun 2015-2019

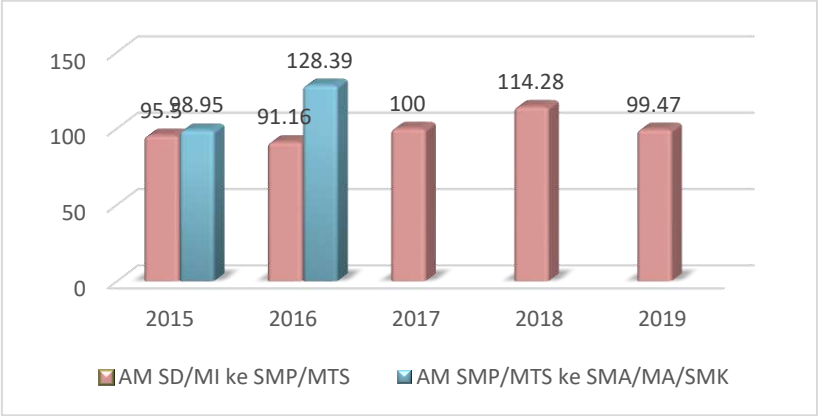

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tarakan, 2020

Dari gambar di atas, dapat diketahui secara umum pada tahun 2015-2018 angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTS berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat, namun menurun pada tahun 2019 menjadi 99.47%. Pada tahun 2016 angka melanjutkan

SMP/MTS ke SMA/MA/SMK mencapai 128,39, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 98,95%.

8. Fasilitas Pendidikan

Kondisi fasilitas pendidikan berupa bangunan sekolah dan fasilitas penunjang pendidikan mulai dari PAUD, SD hingga SMP di Kota Tarakan pada umumnya dalam kondisi baik. Pada tahun 2018, bangunan SD di Kota Tarakan sejumlah 64 gedung sekolah terdiri dari 47 SD Negeri dan 17 SD Swasta. Secara umum, sebagian besar mempunyai kondisi bangunan baik, sedangkan lainnya merupakan bangunan lama yang belum dapat dibangun disebabkan oleh kondisi lahan dan belum tersedianya anggaran untuk merehabilitasi bangunan. Sedangkan bangunan SMP di Kota Tarakan sejumlah 26 unit, terdiri dari 12 SMP Negeri dan 14 SMP/MI Swasta. Secara umum, sebagian besar bangunan SMP/MI di Kota Tarakan dalam kondisi baik karena merupakan bangunan baru.

Gambar 2. 31
Jumlah SD/MI dan SMP/MTS dengan Kondisi Baik (%)

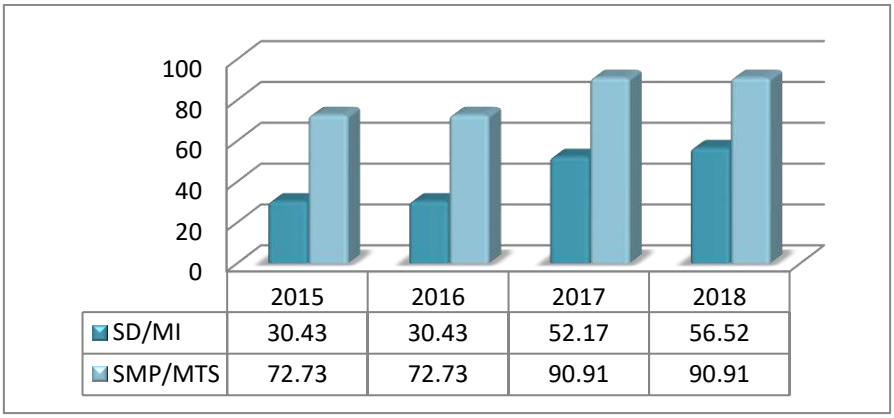

	2015	2016	2017	2018
SD/MI	30.43	30.43	52.17	56.52
SMP/MTS	72.73	72.73	90.91	90.91

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tarakan, 2018

9. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah dapat menunjukkan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Rasio ketersediaan sekolah ini dihitung untuk tiap 10.000 penduduk.

Gambar 2. 32
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Tarakan Tahun 2015-2019

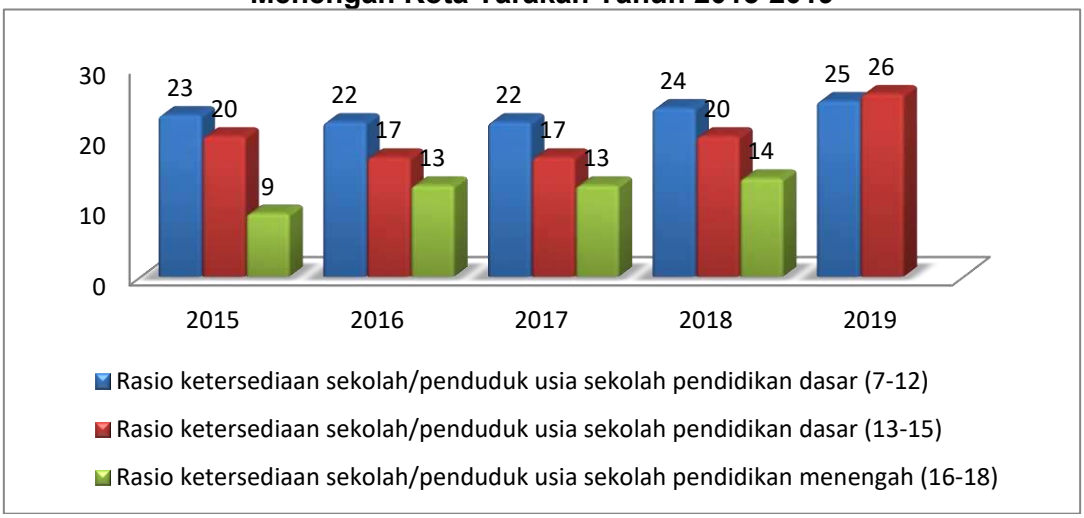

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tarakan, 2020

Dari gambar di atas diketahui bahwa dalam kurun waktu 2015-2019, rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar dan menengah meningkat. Pada tahun 2019, rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar untuk usia 7-12 tahun sebesar 25, meningkat dari tahun 2015 sebesar 23. Rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar untuk usia 13-15 tahun pada tahun 2019 sebesar 26, meningkat dari tahun 2015 sebesar 20 dan rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah untuk usia 16-18 tahun pada tahun 2018 sebesar 14, meningkat dari tahun 2015 sebesar 9.

10. Rasio Guru/Murid Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA

Rasio guru/murid merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan baik tidaknya mutu pendidikan. Sehingga setiap daerah atau bahkan negara, ingin selalu memperoleh rasio yang ideal untuk mendukung perkembangan pendidikannya. Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2008 tentang Guru, pemerintah telah mengatur tentang rasio perbandingan untuk pelayanan guru terhadap siswa pada satuan pendidikan. Dalam pasal 17 telah disebutkan, untuk jenjang SD/SMP/SMA perbandingan guru terhadap siswa adalah 1 : 20, sedangkan untuk MI/MTs/MA perbandingan guru terhadap siswa adalah 1 : 15. Hal ini menjadi kemudian dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Gambar 2. 33
Rasio Guru/Murid Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA
Kota Tarakan Tahun 2015-2019

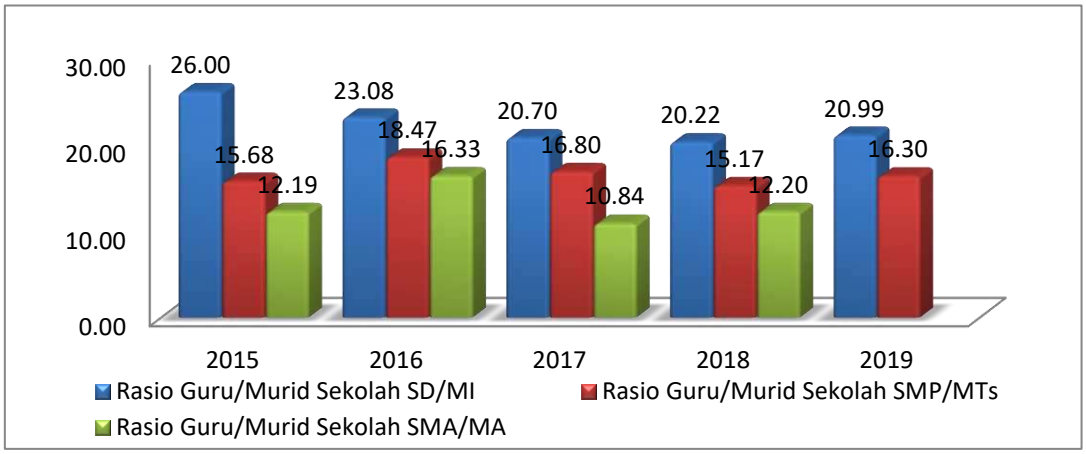

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tarakan, 2020

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui dalam kurun waktu 2015-2019, rasio guru SD/MI mengalami penurunan. Pada tahun 2019, rasio guru SD/MI sebesar 20,99, menurun dari tahun 2015 sebesar 26,00. Hal ini menunjukkan rasio guru/murid sekolah SD/MI di Kota Tarakan sudah mendekati rasio ideal. Sedangkan rasio guru/murid SMP/MTS dan SMA/MA dalam kurun 2015-2019 berfluktuatif dengan rasio tertinggi pada tahun 2016 sebesar 18,47 dan 16,33. Walaupun demikian, rasio ini termasuk ideal.

Gambar 2. 34
Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-Rata Kota Tarakan
Tahun 2015-2019

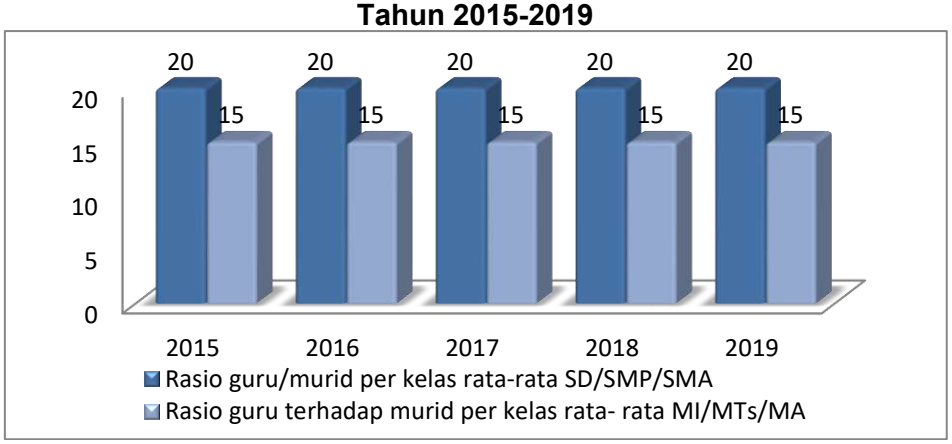

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tarakan, 2020

11. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan Dan Laki-Laki

Angka melek huruf (AMH) merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh

mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Angka melek huruf berkisar antara 0-100. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran.

Dari data analisa, diketahui bahwa AMH penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki Kota Tarakan tahun 2015-2017 terkategori tinggi, bahkan pada tahun 2015 dan 2017, angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki Kota Tarakan mencapai 100. Dalam kurun waktu 2015-2017, AMH penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki Kota Tarakan juga lebih tinggi dibandingkan dengan AMH penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki Kalimantan Utara.

Gambar 2. 35

Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan Dan Laki-Laki Kota Tarakan Tahun 2015-2017

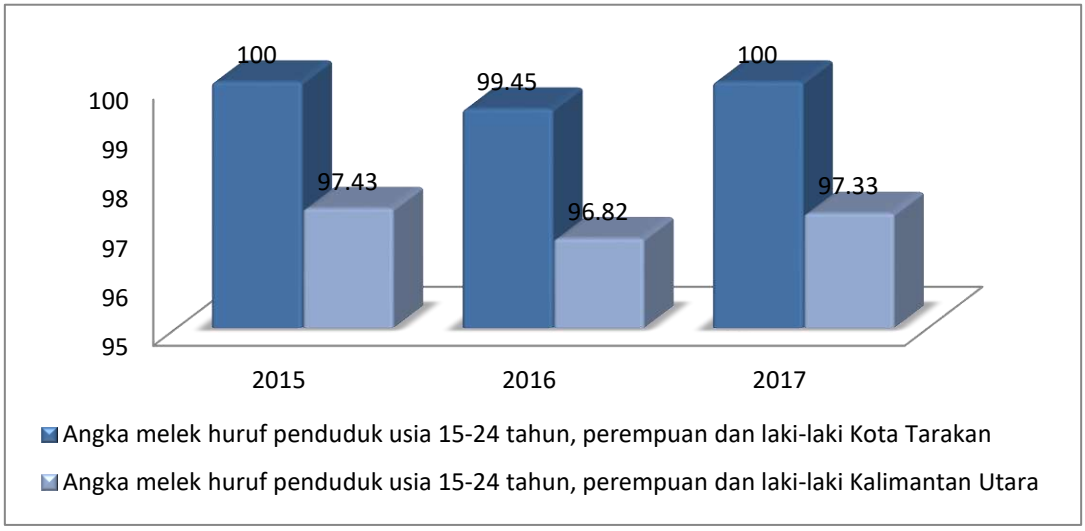

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tarakan, BPS, 2018

12. Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) merupakan perbandingan antara jumlah capaian kinerja penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf se Kabupaten dan Kota terhadap jumlah seluruh penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf se –Kabupaten dan Kota di kali 100%. Secara umum, dalam kurun waktu 2015-2017, penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) berfluktuatif. Pada tahun 2017-2019, persentase penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) sebesar 97,42%.

Gambar 2. 36
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan Dan Laki-Laki Kota Tarakan Tahun 2015-2019

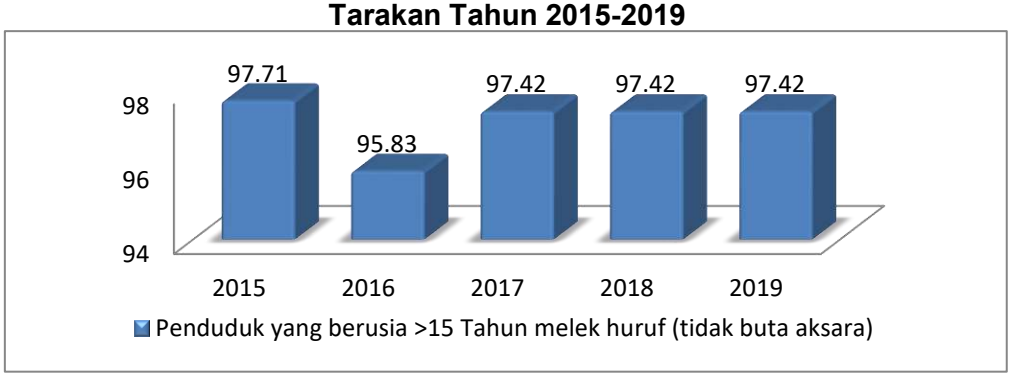

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tarakan, BPS, 2020

13. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Guru sebagai tenaga pendidik yang berhubungan langsung dengan peserta didik harus memiliki keahlian khusus atau kualifikasi khusus di bidang akademik. Dengan kompetensi yang dimilikinya guru dapat menjalankan tugas dengan baik untuk mencerdaskan peserta didik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007, guru harus memiliki kualifikasi akademik minimum diploma 4 (D4) atau sarjana (S1). Secara umum, dalam kurun waktu 2015-2017, persentase guru yang memenuhi kualifikasi diploma 4 (D4) atau sarjana (S1) mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, persentase guru yang memenuhi kualifikasi diploma 4 (D4) atau sarjana (S1) untuk guru SD/MI sebesar 89.78% dan untuk guru SMP/MTS sebesar 86,75% meningkat dari tahun 2015 untuk guru SD/MI sebesar 64,69% dan guru SMP/MTS sebesar 52,52%.

Gambar 2. 37
Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kota Tarakan Tahun 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	64.69	74.7	88.34	88.73	89.78
Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	52.52	93.13	95.88	92.1	86.75
Guru SMA/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	51.47	95.22	69.32	96.78	

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tarakan, 2020

b. Urusan Kesehatan

Perkembangan bidang kesehatan suatu daerah menjadi salah satu tujuan pokok pemerintah daerah dalam menyejahterakan masyarakatnya dalam kerangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani. Terkait dengan hal tersebut, bidang kesehatan sendiri juga menjadi salah satu indikator dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah dari segi fasilitas, sarana prasarana, pemerataan kesehatan, hingga tingkat kesehatan penduduk suatu wilayah.

1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Penyebab kematian bayi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu karena faktor endogen (faktor dari dalam) dan eksogen (faktor dari luar). Faktor endogen merupakan faktor- faktor yang dibawa bayi sejak lahir yang diperoleh pada saat konsepsi atau selama kehamilan. Faktor eksogen merupakan faktor-faktor yang diakibatkan oleh pengaruh lingkungan luar. AKB dapat menjadi salah satu indikator penting dalam merepresentasikan kondisi kesehatan masyarakat, baik berkaitan berkaitan dengan kondisi lingkungan tempat menunjukkan AKB di Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019. tinggal, sarana dan prasarana kesehatan, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Tabel 2. 28
Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup di Kota Tarakan Tahun 2015 - 2019

INDIKATOR	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah kematian bayi (umur <1 tahun)	Orang	17	5	2	5	30
Jumlah kelahiran hidup	Orang	4.184	3.920	4.184	4.385	4.691
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1.000 kelahiran hidup	4,06	1,28	0,48	1,14	6,40

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2020

Berdasarkan tabel di atas, angka kematian bayi di Kota Tarakan tahun 2015 - 2019 berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat, pada tahun 2015 mencapai 4,06 per 1.000 kelahiran hidup dimana ada 17 kasus bayi meninggal. Pada Tahun 2019 jumlah kasus kematian bayi meningkat menjadi 30 kasus atau 6,40 per 1.000 kelahiran hidup. Kejadian kematian bayi pada tahun 2019 disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya disebabkan karena BBLR < 1500 gram yang menyebabkan 12 kejadian kematian bayi, ter-jadinya asfiksia/gagal nafas yang menyebabkan kematian pada 10 bayi. Penyebab lainnya yaitu terjadinya sepsis pada 1 kematian bayi, kelainan bawaan (jantung) pada 2 kematian bayi, dan disebabkan oleh kejadian pneumonia pada 1 bayi, DBD 1, Diare 1, ISPA 1 dan 1 aspirasi.

2. Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Berdasarkan pengertiannya angka kematian balita sendiri memiliki arti bahwa suatu kejadian atau kematian anak yang berusia antara 0-4 tahun.

Kematian yang terjadi pada balita sendiri sebenarnya memiliki banyak faktor penyebabnya antara lain karena kurangnya gizi, sanitasi yang tidak sehat, penyakit menular, kecelakaan dan lain-lain. Kurangnya gizi yang terjadi pada balita bisa juga disebabkan oleh berbagai macam alasan atau faktor. Salah satunya ialah kemiskinan yang terjadi pada orang tuanya. Tentu saja hal tersebut seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak.

Mengingat pentingnya peranan gizi terhadap tumbuh kembang balita itu sendiri, orang tua dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Akan tetapi banyak diantara para orang tua yang masih belum mengenal dengan betul seperti apa gizi yang seharusnya diberikan kepada anak mereka. Gizi balita yang kurang dipenuhi orang tua tadi juga bisa dilandasi oleh faktor pendidikan dari orang tua balita tersebut. Tentu saja hal ini bukan masalah yang sepele bagi kehidupan si balita.

Balita yang kurang gizi akan mengalami keterbelakangan serta gangguan-ganguan fisik serta psikologisnya. Hal tersebut dapat dilihat pada segi postur dan berat badan pada balita. Balita yang mengalami kurang gizi akan terlihat kurus dan memiliki berat badan yang kurang normal. Balita yang bermasalah pada gizinya akan mengalami keterlambatan penaikkan berat badan selama 3 bulan terakhir. Ukuran tinggi badan serta lingkar badan pada balita akan menjadi indikator pelengkap dari status balita kurang gizi.

Tabel 2. 29
Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Di Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019

INDIKATOR	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah kematian balita (umur <5 tahun)	Orang	15	11	0	2	3
Jumlah kelahiran hidup	Orang	4.184	3.920	4.184	4.395	4.700
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	per 1.000 kelahiran hidup	3,59	2,81	0,00	0,46	0,64

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2020

Berdasarkan tabel di atas, Angka Kematian Balita di Kota Tarakan secara umum bersifat fluktuatif. Angka Kematian Balita tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 3,59 per 1.000 penduduk atau terdapat 15 kasus balita meninggal baik yang disebabkan penyakit menular, penyakit tidak menular, dan lainnya. Sedangkan angka kematian

balita terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 0. Sedangkan angka kematian balita pada tahun 2019 meningkat menjadi 0,64.

3. Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan angka yang dihitung berdasarkan kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. Indikator AKI dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4), dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Tabel 2. 30
Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Tarakan
Tahun 2015 – 2019

INDIKATOR	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah ibu hamil yang meninggal krn hamil, bersalin dan nifas	Orang	4	4	3	7	5
Jumlah kelahiran hidup	Orang	4.184	3.920	4.184	4.385	4.691
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	per 1.000 kelahiran hidup	95,60	102,04	71,70	159,64	106,59

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2020

Berdasarkan tabel di atas, angka kematian ibu melahirkan di Kota Tarakan tahun 2015 - 2019 bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun, dengan kecenderungan menurun kasus ibu kematian ibu melahirkan. Pada tahun 2015 jumlah AKI yaitu 95,60 per 100.000 kematian hidup, meningkat pada tahun 2015 menjadi 102,04 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2017, perkembangan yang baik ditunjukkan dengan penurunan AKI yang signifikan, menjadi 71,70 per 100.000 kelahiran hidup. Akan tetapi, peningkatan AKI kembali terjadi pada tahun 2018 menjadi 159,64 per 100.000 kelahiran hidup, yang menunjukkan kondisi derajat kesehatan terutama ibu melahirkan yang menurundan sekaligus menjadi AKI yang tertinggi dalam periode 2015-2019. Pada tahun 2019, terdapat penurunan positif, yaitu AKI menurun menjadi 106,59 per 100.000 kelahiran hidup.

Angka kematian ibu yang cenderung mengalami peningkatan dapat disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya ibu hamil tidak pernah ANC rutin di Puskesmas, pemeriksaan kehamilan diduga hanya dilakukan pada saat menjelang melahirkan saja sehingga meningkatkan risiko bagi ibu dan bayi. Selain itu, adanya penyakit menular juga menyebabkan menurunnya kesehatan ibu, serta Program Perencanaan Pertolongan dan Penanganan Komplikasi (P4K) yang digerakkan oleh kader belum optimal sehingga masih memungkinkan adanya ibu hamil yang tidak terpantau kesehatannya.

Jumlah kematian ibu melahirkan menurun cukup drastis dibandingkan tahun

sebelumnya, hal ini dipengaruhi adanya manual rujukan untuk periksa kehamilan maupun melahirkan, selain itu juga terdapat dukungan biaya dari Pemerintah Kota Tarakan untuk pelayanan kesehatan serta kemudahan akses ke Puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya, kemungkinan disebabkan tidak disiplinnya ibu dalam memeriksakan kesehatan selama kehamilan, sehingga terdapat penyakit-penyakit penyerta yang tidak terdeteksi selama kehamilan berlangsung dan menyebabkan semakin meningkatnya resiko kematian.

4. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, sehingga diharapkan strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Pembentukan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai. Posyandu di Kota Tarakan dibedakan menjadi 4 macam, yaitu posyandu pratama, madya, purnama, dan mandiri. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Hal tersebut ditujukan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Tabel 2. 31
Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kota Tarakan
Tahun 2015 - 2019

INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah posyandu	151	177	148	148	147
Jumlah balita	15.934	16.440	16.225	25.248	20.719
Rasio posyandu per satuan balita	**9,47**	**10,76**	**9,12**	**5,86**	**7,09**

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2020

Berdasarkan Tabel di atas, rasio posyandu per satuan balita di Kota Tarakan cenderung mengalami penurunan, terutama pada tahun 2018. Pada tahun 2018, rasio posyandu per satuan balita sebesar 5,86, yang artinya setiap 1.000 balita dilayani oleh 5 posyandu. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 7,09 yang artinya setiap 1.000 balita dilayani oleh 7 posyandu.

5. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Puskesmas, poliklinik dan Puskesmas Pembantu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

terutama saat ini dimana Puskesmas menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

Rasio sarana kesehatan seperti Puskesmas, dan poliklinik terhadap jumlah penduduk dan sebarannya di masing-masing kecamatan memberikan data tentang tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Indikator rasio puskesmas per 100.000 penduduk adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas.

Tabel 2. 32
Rasio Puskesmas, Klinik, Pustu per Satuan Penduduk di Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019

INDIKATOR	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah puskesmas	Unit	7	7	7	7	6
Jumlah poliklinik	Unit	2	4	4	4	8
Jumlah pustu	Unit	2	2	2	2	2
Jumlah penduduk	Jiwa	231.741	246.496	247.663	259.001	245.784
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	**Per 100.000 Jiwa**	**4,75**	**5,27**	**5,25**	**5,02**	**6,51**

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2020

6. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga medis profesional serta sarana kedokteran yang permanen, dan asuhan keperawatan yang berkesinambungan. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, sehingga rumah sakit memiliki peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Tabel 2. 33
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kota Tarakan Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah rumah sakit	Unit	3	3	3	3	3
Jumlah penduduk	Jiwa	231.741	246.496	247.663	259.001	245.784
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	**Per 1.000 penduduk**	**0,013**	**0,012**	**0,012**	**0,010**	**0,010**

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2020

Berdasarkan tabel di atas, data rasio rumah sakit per satuan penduduk menunjukkan tingkat cakupan pelayanan kesehatan berupa rumah sakit terhadap jumlah

penduduk di wilayah tertentu. Berdasarkan data di atas, rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Tarakan dalam periode tahun 2015 –2019 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2015, rasio rumah sakit sebesar 0,013, berarti bahwa untuk setiap 1.000 penduduk dilayani 0,013 rumah sakit, atau setiap 1.000.000 penduduk dilayani 13 rumah sakit, atau setiap 1 rumah sakit mampu melayani 76.923 jiwa. Pada tahun 2019, rasio rumah sakit sebesar 0,010, berarti bahwa untuk setiap 1.000 penduduk dilayani 0,010 rumah sakit, atau setiap 1.000.000 penduduk dilayani 10 rumah sakit, atau setiap 1 rumah sakit mampu melayani 100.000 jiwa.

7. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Dokter umum dan dokter spesialis yang dimaksud merupakan dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di Kota Tarakan, baik berstatus PNS maupun bukan. Keberhasilan pelayanan kesehatan di Kota Tarakan tidak terlepas dari peran tenaga medis dokter. Jumlah dokter dihitung berdasarkan Surat Izin Praktik (SIP) dokter di Kota Tarakan.

Berdasarkan data rasio praktik dokter (baik dokter umum maupun spesialis) per satuan penduduk di Kota Tarakan dalam kurun waktu 2015 – 2019 cenderung berfluktuatif.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 81/Menkes/SK/I/2004, rasio dokter dalam suatu provinsi dapat ditetapkan dengan perbandingan 1: 5000 sampai 1: 2.500 (satu dokter melayani 2.500 – 5.000 penduduk). Berdasarkan hal tersebut, rasio dokter di Kota Tarakan telah memenuhi perbandingan tersebut.

Tabel 2. 34
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kota Tarakan
Tahun 2015-2019

INDIKATOR	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah dokter umum	Orang	67	55	85	90	81
Jumlah dokter spesialist	Orang	31	35	67	67	55
Jumlah dokter gigi	Orang	13	18	13	11	23
Jumlah dokter gigi spesialist	Orang	6	3	6	6	3
Jumlah penduduk	Jiwa	231,741	246,496	247,663	259.001	245.784
Rasio Dokter per satuan penduduk	**Per 1.000 Penduduk**	**0,50**	**0,45**	**0,69**	**0,67**	**0,66**

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2020

8. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu jenis tenaga kesehatan adalah tenaga medis. Tenaga medis merupakanurusan pendidikan tenaga dokter baik dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi. Dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis yang dimaksud adalah dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di suatu wilayah baik berstatus PNS maupun bukan.

Tabel 2. 35
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk di Kota Tarakan
Tahun 2014 - 2018

INDIKATOR	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Tenaga kebidanan	Orang	100	96	89	114	108
Jumlah Tenaga keperawatan	Orang	471	428	483	529	529
Jumlah Tenaga kefarmasian	Orang	51	72	67	71	71
Jumlah Tenaga kesehatan lainnya	Orang	120	167	168	163	163
Jumlah penduduk	Jiwa	210,239	231,741	246,496	247,663	259,001
Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	**Per 1.000 Penduduk**	**3.52**	**3.29**	**3.27**	**3.54**	**3.36**

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2018

Berdasarkan tabel di atas, rasio tenaga medis di Kota Tarakan memiliki angka yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2018, rasio tenaga medis sebesar 3.36 per 1.000 penduduk, artinya setiap 10.000 penduduk penduduk ditangani oleh 3 tenaga medis (yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi).

9. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Komplikasi kebidanan merupakan kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. Komplikasi dalam kehamilan meliputi abortus, hyperemesis gravidarum, perdarahan per vaginam, hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), kehamilan lewat waktu, ketuban pecah. Komplikasi dalam persalinan meliputi kelainan letak/presentasi janin, partus macet/distosia, hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), perdarahan pasca persalinan, infeksi berat/sepsis, kontraksi dini/persalinan premature, kehamilan ganda. Komplikasi dalam nifas meliputi hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), infeksi nifas,

perdarahan nifas.

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK). Penanganan definitif adalah penanganan/pemberian tindakan terakhir untuk menyelesaikan permasalah setiap kasus komplikasi kebidanan. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada bumil, bulin, dan bufas dengan komplikasi.

Tabel 2. 36
Jumlah Komplikasi Kebidanan Yang Mendapat Penanganan Di Kota Tarakan Tahun 2013 – 2017

INDIKATOR	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan	Orang	616	451	404	236	254
Jumlah ibu hamil dengan komplikasi kebidanan	Orang	1,054	1,101	1,085	1.085	1.094
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	**Persen**	**58,44**	**40,96**	**37,23**	**21,75**	**23,22**

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2020

Berdasarkan Tabel di atas, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Tarakan dalam periode tahun 2015– 2019 menunjukkan kecenderungan menurun. Cakupan komplikasi kebidanan paling tinggi yaitu pada tahun 2015, sebesar 58,44 persen, sedangkan paling rendah pada tahun 2018, sebesar 21,75 persen. Semakin besar persentase menunjukkan bahwa semakin besar penanganan yang diberikan kepada ibu dengan komplikasi kebidanan. Jumlah penanganan komplikasi kebidanan paling banyak yaitu pada tahun 2015, sebesar 616 orang, sedangkan paling sedikit pada tahun 2018, sebesar 236 orang. Dengan demikian, semakin besar terselesaikannya (penanganan) komplikasi kebidanan menunjukkan semakin baik kualitas dan kuantitas bidan dalam menangani masalah kebidanan

10. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter atau bidan dianggap lebih baik daripada yang ditolong dukun atau lainnya karena dapat menggambarkan tingkat kemajuan pelayanan kesehatan, terutama pada saat kelahiran. Data penolong

kelahiran merupakan salah satu indikator kesehatan terutama yang berhubungan dengan tingkat kesehatan ibu dan anak maupun pelayanan kesehatan secara umum. Proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih atau cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan merupakan perbandingan antara persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya dengan jumlah persalinan seluruhnya yang dinyatakan dalam persentase. Dengan indikator ini dapat diperkirakan proporsi persalinan yang ditangani tenaga kesehatan dan ini menggambarkan kemampuan manajemen program KIA dalam pertolongan persalinan sesuai standar.

Tabel 2. 37
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Di Kota Tarakan
Tahun 2013– 2018

INDIKATOR	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Ibu Bersalin	Orang	4.193	5.031	5.254	5.178	5.177
Jumlah Ibu Bersalin yang ditolong tenaga kesehatan	Orang	4.699	4.280	3.926	4.229	4.385
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	**Persen**	**112,07**	**85,07**	**74,72**	**81,67**	**84,70**

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2018

11. Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) merupakan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0 – 11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur, dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak. Imunisasi memberikan konstribusi besar dalam meningkatkan *Human Development Index* terkait dengan angka harapan hidup. Selain itu, juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan. Semakin besar persentase maka semakin besar pula cakupan desa/ kelurahan *Universal Child Immunization*.

Tabel 2. 38
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Di Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019

INDIKATOR	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah kelurahan UCI	Unit	20	20	20	17	19
Jumlah kelurahan	Unit	20	20	20	20	20
Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)	persen	100	100	100	85	95

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2020

Berdasarkan tabel di atas, cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization (UCI*) di Kota Tarakan dalam periode tahun 2015– 2017 telah mencapai 100 persen, berarti bahwa seluruh kelurahan di Kota Tarakan (20 kelurahan) termasuk dalam UCI. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 85 % dan kemudian meningkat lagi menjadi 95% di tahun 2019. Perlu dilakukan upaya peningkatan untuk mendapatkan cakupan desa/ kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) secara menyeluruh (100 persen) setiap tahunnya.

12. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Jumlah Balita Gizi Baik Peranan ibu sangat penting dalam mendukung upaya mengatasi masalah gizi, terutama pada asupan gizi keluarga, mulai dari penyiapan makanan, pemilihan bahan makanan, sampai menu makanan. Ibu yang memiliki status gizi baik akan melahirkan anak yang bergizi baik. Anak yang bergizi baik menjadi aset dan investasi bangsa masa depan.

Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan merupakan perbandingan antara jumlah balita gizi buruk (berdasarkan kriteria berat badan per umur) yang mendapat perawatan dibagi jumlah seluruh balita gizi buruk (berdasarkan kriteria berat badan per umur) yang ditemukan. Semakin besar persentase cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan menunjukkan semakin baik pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, baik prasarana maupun saran kesehatan. Perkembangan cakupan balita gizi buruk di Kota Tarakan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 39
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Di Kota Tarakan Tahun 2013 – 2017

INDIKATOR	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan disarana pelayanan kesehatan	Anak	36	24	27	20	16
Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan	Anak	36	24	27	20	16
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2020

Berdasarkan tabel di atas, kasus balita gizi buruk yang ditemukan di Kota Tarakan dalam kurun waktu 2015 – 2019 seluruhnya telah mendapatkan perawatan (100 persen). Jika dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal sebesar 100 persen, maka cakupan

balita gizi buruk di Kota Tarakan sudah mampu mencapainya. Pada tahun 2019, jumlah balita gizi buruk yang ditemukan sebesar 16 anak, yang seluruhnya mendapatkan perawatan. Beberapa upaya untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan masyarakat telah dilakukan antara lain melalui Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Reproduksi, Perbaikan Gizi Masyarakat dan PMT (Pemberian Makanan Tambahan), Pemulihan Ibu Hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis) dan PMT Balita Gizi Buruk dan Kurang, serta Peningkatan Pembinaan terhadap Posyandu.

13. Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA adalah jumlah penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati di suatu wilayah kerja selama satu tahun dibanding dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA dalam kurun waktu yang sama. Penemuan TBC BTA adalah penemuan pasien baru melalui pemeriksaan dahak sewaktu pagi dan sewaktu (SPS) dan diobati di unit pelayanan kesehatan dalam suatu wilayah kerja pada waktu tertentu. Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA di Kota Tarakan dalam periode tahun 2013– 2017 mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2015 mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut disebabkan jumlah penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati semakin besar, sedangkan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA semakin berkurang. Pada tahun 2016, mengalami penurunan disbanding 2015 dimana cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA sebesar 48,01 persen, yang berarti bahwa jumlah penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati besar sementara perkiraan penemuan penderita TBC BTA + kecil. Rendahnya penemuan kasus TB BTA + disebabkan karena:

- Kurangnya kerjasama lintas program dan lintas sector
- Peran jejaring ekternal belum berfungsi dan berjalan optimal
- Aktrif promotif belum berfungsi dan berjalan optimal
- Diagnosa TB dengan pemeriksaan dahak di laboraturium hanya dengan menggunakan foto Thorax
- Masih ada Kasus TB BTA + yang diobati di RSUD Tarakan tidak dilaporkan

Tabel 2. 40
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Di Kota Tarakan Tahun 2013 – 2017

INDIKATOR	SATUAN	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati	Orang	197	203	218	491	253
Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+)	Orang	418	440	349	236	536

INDIKATOR	SATUAN	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	**Persen**	**47.13**	**46.14**	**62.46**	**48.01**	**47.20**

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2018

14. Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama satu tahun dan jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama.

Berdasarkan tabel di atas, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kota Tarakan dalam kurun waktu 2015 – 2019 telah mencapai 100 persen, berarti seluruh penderita penyakit DBD yang ditemukan sudah ditangani. Meskipun secara penanganan sudah 100%, masalah DBD ini harus menjadi perhatian. Jika dilihat dari jumlah penderita DBD yang ada, terjadi fluktuasi peningkatan dan penurunan dalam lima tahun terakhir. Jumlah penderita DBD yang ditemukan dan diobati paling banyak pada tahun 2019, sebanyak 741 jiwa.

Tabel 2. 41
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita DBD
Di Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019

INDIKATOR	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP	Jiwa	474	545	140	124	741
Jumlah penderita DBD yang ditemukan	Jiwa	474	545	140	124	741
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2020

Diperlukan upaya pemberantasan DBD untuk mengurangi kasus penderita DBD. Upaya yang harus dilakukan antara lain peningkatan kegiatan surveilans penyakit dan surveilans vector, diagnosis dini dan pengobatan dini, serta peningkatan upaya pemberantasan vektor penular penyakit DBD. Metode yang tepat guna untuk mencegah DBD adalah Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui 3M plus (Menguras, Menutup dan Mengubur) plus menabur larvasida, penyebaran ikan pada tempat penampungan air serta kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mencegah/memberantas nyamuk Aedes berkembang biak.

15. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi merupakan cakupan bayi yang mendapatkan pelayanan minimal 4 kali, yaitu 1 kali pada umur 29 hari sampai 2 bulan, 1 kali pada umur 3 sampai 5 bulan, 1 kali pada umur 6-8 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Dengan indikator ini dapat diketahui efektivitas, *continuum of care* dan kualitas pelayanan kesehatan bayi. Semakin besar persentase kunjungan bayi menunjukkan semakin efektif, serta semakin baik continuum of care dan kualitas pelayanan kesehatan bayi.

Data cakupan kunjungan bayi di Kota Tarakan mengalami fluktuasi setiap tahunnya, cakupan kunjungan bayi paling tinggi pada tahun 2018, sebesar 104,59 persen sedangkan paling rendah pada tahun 2015 sebesar 49,37 persen. Sementara itu, rata-rata jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar.

Tabel 2. 42
Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019

INDIKATOR	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Bayi	2.365	2.600	3.049	4.584	3.828
Jumlah seluruh bayi lahir hidup	Bayi	4.790	5.004	4.931	4.383	4.700
Cakupan kunjungan bayi	**Persen**	49,37	51,96	61,83	104,59	81,45

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2020

Jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar memiliki kecenderungan meningkat, begitu pula dengan jumlah bayi lahir.

16. Cakupan Puskesmas

Puskesmas merupakan suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Cakupan puskesmas dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah puskesmas dan jumlah seluruh kecamatan di Kota Tarakan. Semakin besar persentase cakupan puskesmas maka semakin baik pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

Tabel 2. 43
Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019

INDIKATOR	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah puskesmas	Unit	7	7	7	7	6
Jumlah kecamatan	Unit	4	4	4	4	4
Cakupan Puskesmas	**Persen**	**175%**	**175%**	**175%**	**175%**	**150%**

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2020

Berdasarkan Tabel di atas, cakupan puskesmas di Kota Tarakan dalam periode tahun 2015 – 2018 menunjukkan perkembangan yang tetap dengan cakupan puskesmas mencapai 175 persen. Namun pada tahun 2019 cakupan puskesmas mengalami penurunan menjadi 150 persen. Hal tersebut dikarenakan 1 Puskesmas di Kota Tarakan, yaitu Puskesmas Juata Laut di gabung dengan Puskesmas Juata Permai sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Tarakan Nomor 060.1/HK-IV/104/2019 tentang Penggabungan unit pelaksana teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Juata Laut dengan unit pelaksana teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Juata Permai pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Tarakan. Penggabungan ini disebabkan karena bangunan puskemas Juata Laut dihibahkan kepada Polda Kaltara untuk dijadikan Rumah Sakit Bhayangkara. Untuk penyelenggaraan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kelurahan Juata Laut dialihkan ke Puskesmas Juata Juata Permai yang lokasinya dapat di akses dan tidak jauh dari Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara.

Seluruh kecamatan sudah tersedia puskesmas, dimana Kecamatan Tarakan Barat terdiri dari 1 Puskesmas, Kecamatan Tarakan Tengah ada 1 Puskesmas, Kecamatan Tarakan Utara 1 Puskesmas sedangkan Kecamatan Tarakan Timur ada 3 Puskesmas karena di Kecamatan Tarakan Timur ada 7 Kelurahan. Tersedianya puskesmas di setiap kecamatan memberikan kemudahan akses terhadap layanan kesehatan terdekat dan terjangkau bagi masyarakat.

17. Cakupan Puskesmas Pembantu

Puskesmas pembantu merupakan unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. Cakupan puskesmas pembantu dihitung berdasarkan perbandingan jumlah puskesmas pembantu dibagi jumlah seluruh kelurahan yang ada di Kota. Cakupan puskesmas pembantu di Kota Tarakan disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2. 44
Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019

INDIKATOR	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah pembantu puskesmas	Unit	2	2	2	2	2
Jumlah seluruh desa/kelurahan	Unit	20	20	20	20	20
Cakupan pembantu puskesmas	**Persen**	**10%**	**10%**	**10%**	**10%**	**10%**

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2020

Berdasarkan Tabel di atas, cakupan puskesmas pembantu di Kota Tarakan dalam periode tahun 2015 – 2019 menunjukkan perkembangan yang tetap dengan cakupan puskesmas mencapai 10 persen. Hal tersebut karena Kota Tarakan memiliki wilayah yang mudah di jangkau menuju Puskesmas. Adapun Puskesmas pembantu berada di wilayah Kelurahan Mamburungan Timur Kecamatan Tarakan Timur dan Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat.

18. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Jumlah sasaran penduduk lanjut usia berusia 60 tahun ke atas pada tahun 2019 yaitu sebanyak 15.463 jiwa. Salah satu standar pemeriksaan kesehatan pada lansia yaitu diwajibkan dilakukan pemeriksaan laboratorium lengkap. Cakupan jumlah penduduk lansia berusia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar pada tahun 2019 yaitu sebesar 1.485 orang dengan persentase yang masih sangat rendah yaitu 9,60%. Rendahnya persentase ini disebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan reagen yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium secara lengkap.

19. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Untuk Pelayanan Usia Pendidikan Dasar, targetnya pada tahun 2019 adalah 4.585. Sedangkan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar hanya 4.163 sehingga berpengaruh pada capaian kinerja Pelayanan Usia Pendidikan Dasar yaitu : 90,80% dari target 100%. Indikator ini merupakan salah satu SPM Bidang Kesehatan. Rendahnya capaian disebabkan masih ada Puskesmas yang belum menyelesaikan kegiatan Penjaringan di sekolah yang disebabkan padatnya jadwal kegiatan di lapangan. Hal ini sudah ditindaklanjuti dengan melanjutkan kegiatan penjaringan ke sekolah sebelum tahun ajaran baru dimulai.

20. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan usia produktif dinilai dari persentase orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar 25,07% masih jauh dari target 100%. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan alat dan BHP skrining kesehatan.

21. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya. Pada tahun 2019 jumlah penderita hipertensi di Kota Tarakan adalah 11.012 orang dan semuanya mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar.

22. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya. Pada tahun 2019 jumlah penderita diabetes melitus di Kota Tarakan adalah 3.394 orang dan semuanya mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar sesuai standar.

23. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Jumlah ODGJ tahun 2019 ditargetkan 252 jiwa. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pe-layanan kesehatan jiwa sesuai standar tahun 2019 berada di angka 232 jiwa. Hal ini dikarenakan tidak semua pasien jiwa rutin untuk berkunjung ke Puskesmas. Terkait itu puskesmas dituntut untuk lebih aktif dan rutin melaksanakan kunjungan rumah (home visit) pasien jiwa dan melakukan update data ODGJ berat dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan.

24. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV

Pemeriksaan HIV standar pada tahun 2019 diberikan kepada kelompok berisiko yang telah ditetapkan jumlahnya pada awal tahun berjalan. Kelompok berisiko ini yang kemudian menjadi dasar pemeriksaan HIV diberikan. Pada tahun 2019 jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV adalah 6.634 orang dan semuanya mendapatkan

pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Pekerjaan Umum

- **Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik**

Di Kota Tarakan terdapat tiga kelas jalan yaitu kelas IIIa, IIIb, dan IIIc yang merupakan tanggung jawab atau wewenang dari pemerintah Kota Tarakan. Jalan merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian suatu daerah. Untuk meningkatkan usaha pembangunan dituntut pula peningkatan pembangunan jalan guna memudahkan akses dan mobilitas penduduk serta memperlancar lalu lintas barang dari suatu tempat ke tempat yang lain.

Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting khususnya untuk transportasi darat. Untuk mendukung transportasi darat, pemerintah daerah telah membangun jalan sepanjang:

Tabel 2. 45
Kondisi Jaringan Jalan Kota Tarakan Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	78,50	79,00	71,97	54,54	67,11
Panjang jalan dalam kondisi baik	184,05	185,22	166,42	153,08	156,14
Panjang jalan seluruhnya	**234,46**	**234,46**	**231,22**	**280,65**	**232,65**

Sumber: DPUTR Kota Tarakan, 2020

Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik Kota Tarakan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terlihat dan tercatat dengan trend turun. Hal ini dapat terlihat bahwa pada tahun 2015 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik terdapat 78,50%, tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 54,54%, kemudian naik kembali menjadi 67,11% dan pada tahun 2019.

Kondisi yang ditampilkan pada data tersebut memperlihatkan trend perkembangan yang negatif. Data tersebut memberikan gambaran bahwa kurangnya upaya untuk pemeliharaan dan perbaikan pada jalan kota untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jalan. Trend perkembangan negative ini harus segera diatasi untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pada warga Kota Tarakan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan jalan kota sebagai aksesibilitas utama.

- **Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk (Meter/ Penduduk)**

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dapat memberikan perbandingan kapasitas jalan terhadap jumlah penduduk. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat kebutuhan panjang jalan berbanding dengan pertumbuhan penduduk. Proporsi rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kota Tarakan dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2. 46
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kota Tarakan
Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Panjang Jalan (km)	234,46	234,46	231,22	280,65	232,65
Jumlah Penduduk	235.565	244.195	256.714	262.025	270.894
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	**0,001**	**0,001**	**0,001**	**0,001**	**0,001**

Sumber: DPUTR Kota Tarakan, 2018

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kota Tarakan relatif tidak mengalami perkembangan yang berarti. Rasio tersebut tidak mengalami perubahan dari tahun 2015 sampai dengan 2019 yakni 0,001.

- **Persentase Kawasan Pemukiman Yang Yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4**

Kawasan permukiman yang dimaksud dalam hal ini adalah kawasan permukiman yang memiliki lebar jalan lingkungan masih di bawah 2 meter. Berdasarkan data eksisting yag diperoleh maka pada tahun 2017 terdapat 177.000 kelompok kawasan permukiman di Kota Tarakan. Sedangkan kawasan permukiman yang masih memiliki lebar jalan di bawah 2 meter terdapat 40.000 kawasan. Berdasarkan data eksisting tersebut maka diketahui bahwa persentase kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 (empat) di Kota Tarakan adalah sebesar 22,6%.

- **Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/ Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M)**

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase dengan lebar minimal 1,5 meter di Kota Tarakan terus mengalami penambahan. Pada tahun 2015 panjang jalan dengan kondisi tersebut mencapai 1.612 meter dan terus berkembang hingga tahun 2019 mencapai 4.440 meter. Permasalahan yang terjadi adalah panjang jalan tersebut secara proporsional masih sangat rendah persentase terhadap panjang jalan seluruhnya di Kota Tarakan. Berikut perkembangan persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase dengan lebar 1,5 meter:

Tabel 2. 47
Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M) Kota Tarakan Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Panjang jalan dengan trotoar dan drainase lebar 1,5m (m)	1.612	1.655	1.797	4.440	4.440
Panjang jalan seluruhnya (m)	234.460	234.460	231.219	280.650	232.560
Persentase	**0,69%**	**0,71%**	**0,78%**	**1,58%**	**1,91%**

Sumber: DPUPR Kota Tarakan, 2020

- **Persentase Sempadan Sungai Yang Dipakai Bangunan Liar**

Sempadan sungai merupakan kawasan yang seharusnya tidak terdapat bangunan liar. Kawasan sempadan sungai dapat dimanfaatkan untuk pemeliharaan dan kontrol terhadap sungai misalnya dengan membangun jalan inspeksi. Kondisi bangunan liar yang terdapat di kawasan sempadan sungai tentunya akan menghambat proses pemeliharaan dan control terhadap jaringan sungai dimaksud. Kondisi ini seringkali menyebabkan terjadinya banjir dari luapan air sungai. Kawasan sempadan sungai di Kota Tarakan sebagian juga masih terdapat bangunan liar. Berikut adalah persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar di Kota Tarakan.

Gambar 2. 38
Persentase Sempadan Sungai Terdapat Bangunan Liar Kota Tarakan Tahun 2014-2018

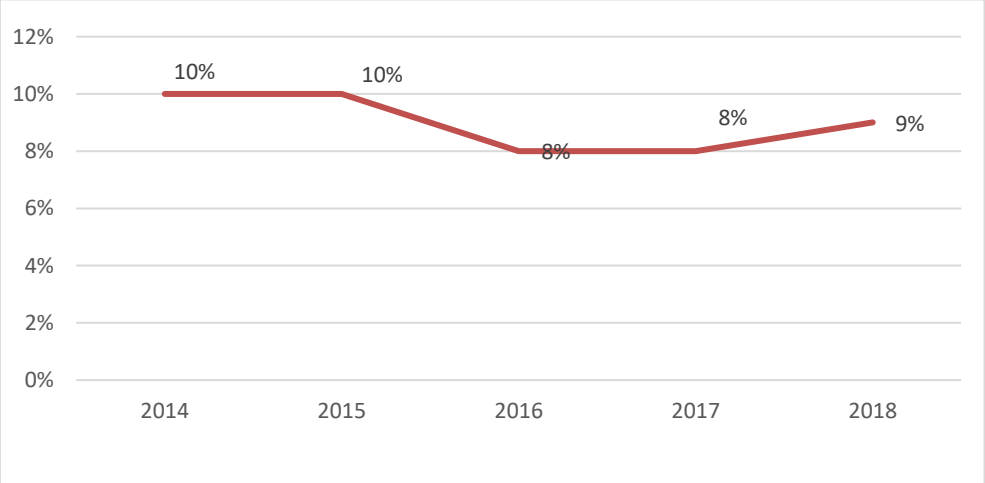

Sumber: DPKPP Kota Tarakan, 2018

Melalui berbagi upaya baik yang bersifat persuasif maupun penegakkan dan penguatan hokum melalui perda maka trend pemanfaatan sempadan sungai untuk bangunan liar di Kota Tarakan cenderung menurun.

- **Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat**

Drainase di Kota Tarakan merupakan salah satu sarana yang penting dalam rangka untuk pengendalian banjir. Kota Tarakan merupakan salah satu daerah rawan genangan air ketika terjadi hujan deras dan air pasang. Drainase dalam kondisi baik atau saluran air tidak terseumbat di Kota Tarakan dapat dikatakan dalam kondisi baik dari sisi persentasenya. Permasalahan yang ada adalah kapasitas drainase yang ada masih kurang untuk menampung volume air ketika terjadi hujan deras dan pasang air laut secara bersamaan. Berikut kondisi persentase drainase dalam kondisi baik di Kota Tarakan dari tahun 2014 sampai dengan 2018.

Gambar 2. 39
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Kota Tarakan
Tahun 2014-2018

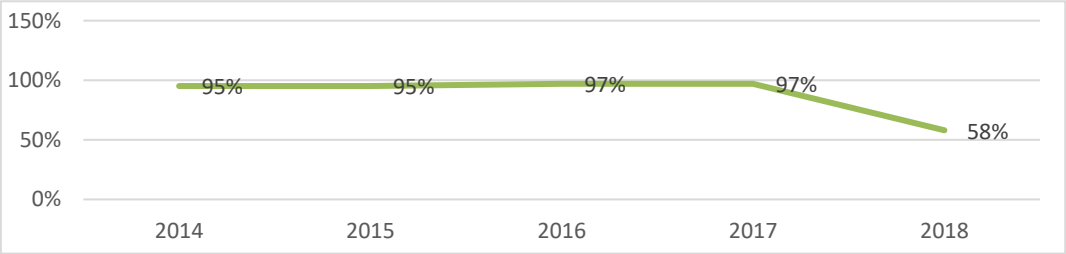

Sumber: DPKPP Kota Tarakan, 2018

- **Persentase Penduduk Berakses Air Minum**

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tarakan saat ini mempunyai 4 (empat) lokasi instalasi yaitu instalasi Kampung Bugis, instalasi Persemaian, instalasi Kampung Satu, dan instalasi Juata Laut. Berkaitan dengan hal tersebut, air merupakan suatu kekayaan alam yang menjadi kebutuhan manusia secara hakiki. Keadaan prasarana air bersih tampaknya semakin dibutuhkan masyarakat terutama daerah perkotaan. Hal ini disebabkan sumber-sumber air di daerah perkotaan sudah banyak tercemar baik oleh limbah industri maupun limbah rumah tangga. Aksesibilitas air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan adalah 48,97%, meningkat di tahun 2015 menjadi 49,13% dan meningkat lagi di tahun 2016 sebesar 53,59%. Selanjutnya pada tahun 2017 persentase akses air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan adalah 57,6% dan meningkat di tahun 2018 menjadi 60,64%. Dan meningkat lagi di tahun 2019 menjadi 74,05%.

Sebenarnya, sistem PDAM Kota Tarakan pada umumnya berada dalam kondisi operasional yang baik. Namun perlu diketahui bahwa pemeliharaan terhadap beberapa

pompa kurang memadai sehingga mengurangi kapasitas dan membatasi sambungan baru yang potensial pada daerah-daerah tertentu merupakan solusi terbaik saat ini.

- **Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah Di Perkotaan**

Fasilitas pengurangan sampah di kawasan perkotaan sangat penting untuk disediakan. Hal tersebut dikarenakan kawasan perkotaan merupakan produsen sampah yang paling besar. Dalam rangka upaya untuk mengurangi beban pengolahan sampah di TPA maka fasilitas pengurangan sampah ini dipandang penting. Saat ini Pemerintah Kota Tarakan telah menyediakan beberapa fasilitas pengurangan sampah di kawasan perkotaan. Pada tahun 2014 penyediaan fasilitas pengurangan sampah tersebut telah mencapai 42,5%. Namun pada tahun 2016 persentase tersebut menurun menjadi 40,93%. Namun pada tahun 2018 meningkat menjadi 60,64%. Trend persentase penyediaan fasilitas pengurangan sampah di Kota Tarakan dapat dilihat pada table berikut ini:

Gambar 2. 40
Persentase Fasilitas Pengurangan Sampah Kota Tarakan
Tahun 2014-2018

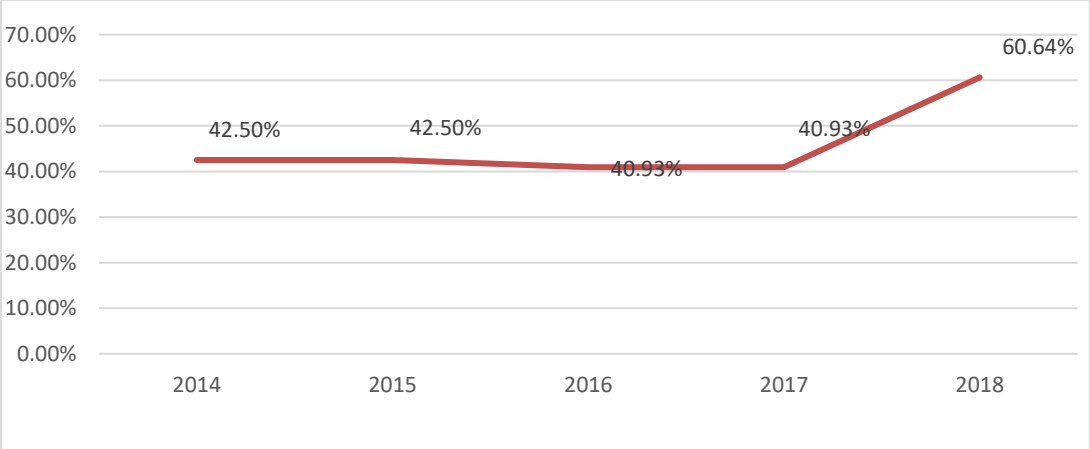

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, 2018

- **Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk**

Tempat pemakaman umum merupakan salah satu fasilitas yang harus disediakan oleh suatu kota. Tempat pemakaman umum di Kota Tarakan tersebar di empat kecamatan yang ada. Rasio perbandingan tempat pemakaman umum per satuan penduduk di Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 48
Rasio Fasilitas Pemakaman Umum per Satuan Penduduk

Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018
Rasio	1 : 3	1 : 3	1 : 3	1 : 3	1 : 3

Sumber: DPKPP Kota Tarakan, 2018

Berdasarkan data di atas tampak bahwa pada tahun 2014 rasio fasilitas tempat pemakaman umum persatuan penduduk adalah 1 : 3, artinya dalam setiap seribu penduduk tersedia tempat pemakaman umum berkapasitas 333 orang. Kondisi ini berkembang hingga pada tahun 2018.

2) Penataan Ruang

- **Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan**

IMB merupakan salah satu instrument bagi pemerintah daerah untuk dapat mengarahkan dan mengontrol pembangunan di wilayahnya. Melalui kebijakan IMB ini maka evaluasi dan pemanfaatan ruang dapat disesuaikan RTRW kota. Pemerintah Kota Tarakan telah memberikan berbagai program untuk mempermudah pelayanan proses pengurusan IMB. Upaya perbaikan dan kemudahan pelayanan ini nampaknya telah memberikan hasil maksimal jika kita lihat dari rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan yang mulai meningkat dari tahun 2015 sebesar 0,020 menjadi 0,400 pada tahun 2019. Berikut adalah data terkait rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kota Tarakan.

Tabel 2. 49
Rasio Bangunan ber-IMB di Kota Tarakan

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Bangunan	44.369	44.369	44.369	51.944	51.944
Jumlah Bangunan ber-IMB	877	733	639	19.670	20.560
Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan	0,020	0,017	0,014	0,379	0,396

Sumber: DPUTR Kota Tarakan, 2020

- **Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan**

Tutupan lahan merupakan hal yang penting dalam suatu perencanaan kawasan. Tutupan lahan berupa tegakan pepohonan menjadi hal yang penting menjaga kesimbangan lahan terbangun dan lahan tidak terbangun di suatu kawasan. Salah satu metode untuk menghitung dan menganalisa luas kawasan tertutup pepohonan di suatu daerah adalah dengan memanfaatkan citra satelit. Berdasarkan telaahan terhadap

pemotretan citra satelit maka rasio tersebut di Kota Tarakan dari tahun 2014 hingga tahun 2018 cenderung tetap yaitu 20% kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 55%.

Gambar 2. 41
Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan terhadap Daratan Kota Tarakan Tahun 2014-2018

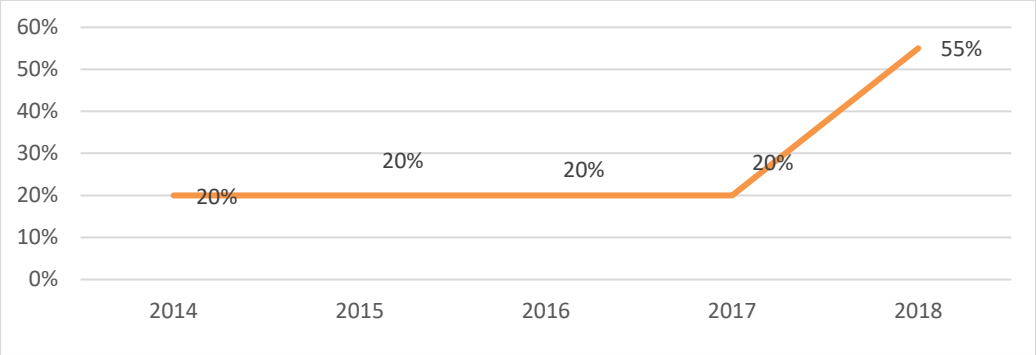

Sumber: DPUTR Kota Tarakan, 2018

- **Ketaatan terhadap RTRW**

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan rencana pembangunan jangka panjang. RTRW Kota Tarakan di tetapkan pada tahun 2012 sehingga perhitungan ketaatan terhadap RTRW Kota Tarakan telah dapat dilakukan dari tahun 2013. Jika kita lihat hasil perhitungan terkait ketaatan terhadap rencana dalam RTRW Kota maka terdapat perkembangan yang signifikan yakni dari 37% pada tahun 2014 sampai mencapai 60% ketaatan pada tahun 2018. Berikut perkembangan ketaatan realisasi pembangunan di Kota Tarakan terhadap perencanaan dalam RTRW Kota Tarakan 2012-2032.

Gambar 2. 42

Ketaatan Terhadap RTRW Kota Tarakan Tahun 2014-2018

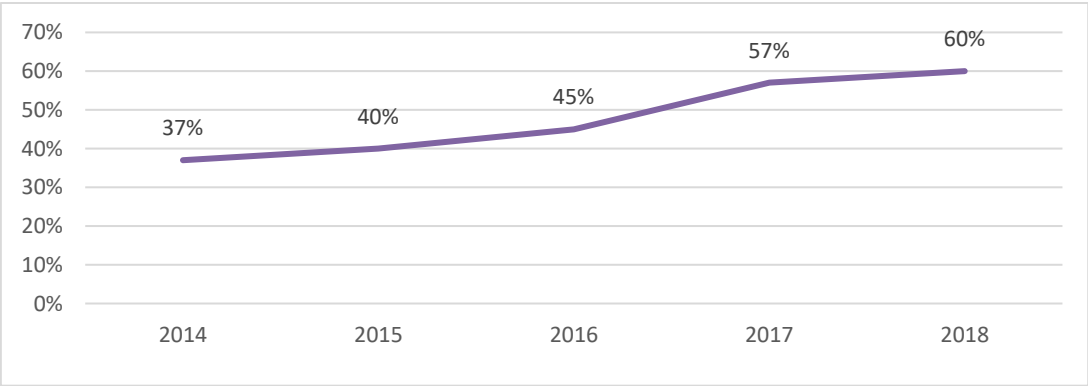

Sumber: DPUTR Kota Tarakan, 2018

3) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- **Rasio Rumah Layak Huni**

Rasio rumah layak huni merupakan nilai perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk secara keseluruhan di suatu daerah. Kondisi rasio rumah layak huni di Kota Tarakan cenderung mengalami peningkatan. Hal tersebut seiring dengan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tarakan dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Baik melalui perbaikan rumah tidak layak huni maupun peningkatan cakupan ketersediaan rumah layak huni. Rasio rumah layak huni tahun 2014 sampai tahun 2018 di Kota Tarakan adalah sebagaimana tampak pada table berikut:

Gambar 2. 43
Rasio Rumah Layak Huni Kota Tarakan Tahun 2014-2018

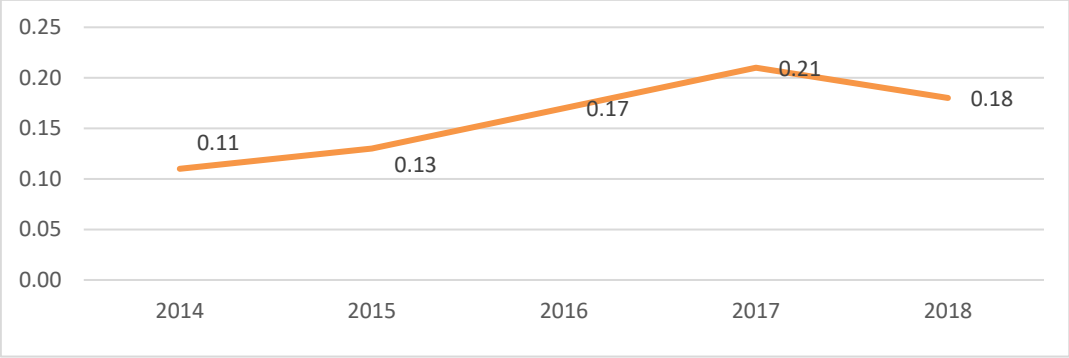

Sumber: DPKPP Kota Tarakan 2018

- **Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni**

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi guna menjamin kehidupan masyarakat. Kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dapat ditingkatkan dengan jalan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni. Pemerintah Kota Tarakan dalam rangka upaya untuk peningkatan cakupan ketersediaan rumah layak huni telah melakukan beberapa program misalnya rehab rumah tidak layak huni, pembangunan dan penyediaan perumahan bagi PNS serta mendorong sektor swasta dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat Kota Tarakan. Kondisi saat ini cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kota Tarakan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 cakupan pelayanan tersebut telah mencapai 78,20% dari kebutuhan. Upaya pemenuhan yang terus dilakukan meningkatkan cakupan tersebut menjadi 81,65% pada tahun 2018 seperti yang ditunjukkan pada data berikut:

Gambar 2. 44
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Tarakan
Tahun 2014-2018

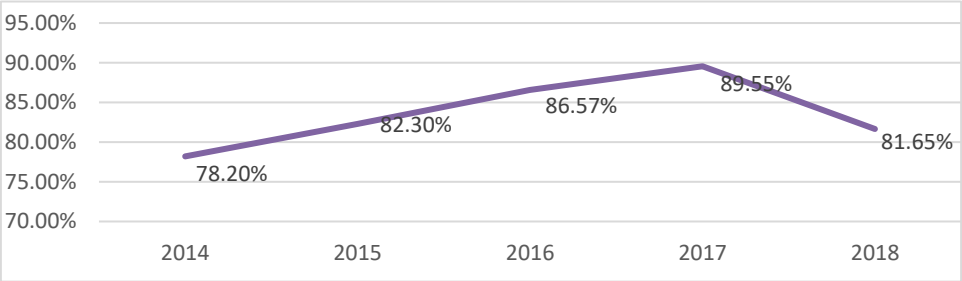

Sumber: DPKPP Kota Tarakan 2018

- **Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau**

Cakupan ketersediaan rumah pada data sebelumnya menunjukkan angka yang cukup tinggi. Hal tersebut kita tinjau dari ketersediaan rumah layak huni yang ada. Permasalahan yang ada adalah daya beli masyarakat utamanya MBR tidak mampu menjangkau harga yang ditawarkan untuk sebuah ruamah layak huni. Sehingga di Kota Tarakan masih banyak MBR yang belum memiliki rumah layak huni. Mereka sebagian besar bermukim di daerah permukiman atas laut kawasan pesisir pantai Kota Tarakan. Kondisi ini menyebabkan masih terdapatnya kawasan permukiman kumuh yang relatif luas di Kota Tarakan. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk menyediakan perumahan layak huni yang terjangkau bagi MBR. Salah satunya melalui program pembangunan perumahan PNS, rumah bersubsidi yang dapat dimiliki melalui KPR bersubsidi dari lembaga yang ditunjuk pemerintah pusat. Dilihat dari cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau untuk Kota Tarakan masih sangat rendah dengan trend yang fluktuatif. Berikut data perkembangan cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau di Kota Tarakan.

Gambar 2. 45
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau
Kota Tarakan Tahun 2013-2017

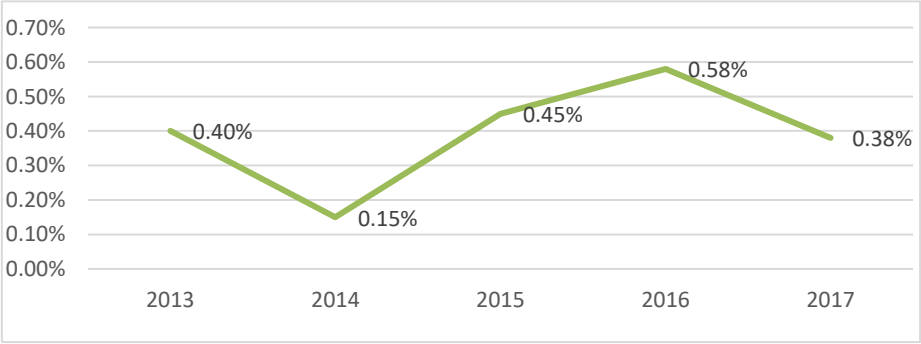

Sumber: DPKPP Kota Tarakan 2018

- **Persentase Pemukiman Yang Tertata**

Data yang diperoleh untuk permukiman yang tertata adalah data pada tahun 2017 saja. Data time series yang diharapkan dapat menunjukkan trend tidak diperoleh. Pada tahun 2017 menunjukkan bahwa luas permukiman yang tertata di Kota Tarakan adalah 50% dari total keseluruhan luas permukiman.

Kondisi permukiman yang tumbuh secara sporadis menyebabkan masyarakat membangun hunian sesuai keinginan mereka. Aturan hokum terkait IMB sebenarnya merupakan instrument yang dapat digunakan untuk mengatur tumbuhnya bangunan dan hunian masyarakat. Namun melihat rendahnya nilai rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan maka dapat kita simpulkan bahwa aturan ini belum dapat maksimal dijalankan di lapangan. Perlunya upaya untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih intensif di Kota Tarakan sehingga pertumbuhan permukiman yang ada dapat tertata dengan baik.

- **Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan PSU**

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman serta didukung dengan PSU di Kota Tarakan saat ini telah mencapai 70% di tahun 2017. Angka ini sebenarnya sudah cukup tinggi namun mengingat sinergitas dengan program dari Pemerintah Pusat maka cakupan tersebut sangat perlu untuk ditingkatkan. PSU merupakan salah satu indicator yang digunakan untuk menilai tingkat kekumuhan suatu lingkungan permukiman. Keberadaan PSU yang sesuai dengan standar merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan yang bebas kumuh serta memberi keamanan, kenyamanan dan lingkungan sehat bagi masyarakat. Sehingga sangat penting untuk memperhatikan cakupan lingkungan yang sehat dana man serta dilengkapi dengan PSU guna tercapainya Indonesia bebas kumuh.

4) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Aspek Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat merupakan faktor penting dalam menciptakan rasa aman, damai, dan tentram dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mewujudkan suasana yang kondusif dalam segala aktifitas pembangunan daerah. Keberhasilan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain:

- **Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)**

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan

Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Petugas Linmas di Kota Tarakan berjumlah 20 orang yang penempatannya di masing-masing kelurahan.

Gambar 2. 46
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
Kota Tarakan Tahun 2015-2019

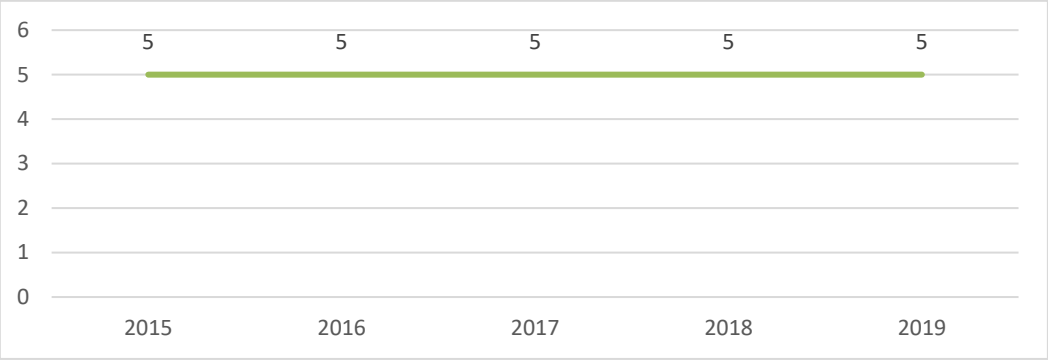

Sumber: Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kota Tarakan, 2020

- **Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)**

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota Tarakan adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram, serta menjaga keindahan.

Gambar 2. 47
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota Tarakan Tahun 2015-2019

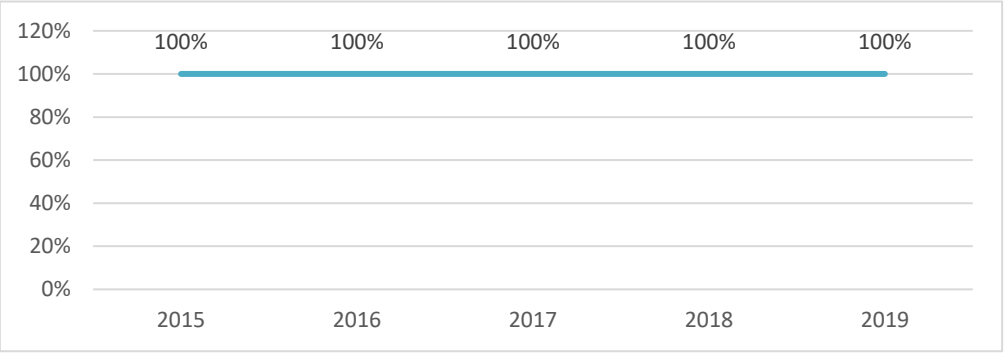

Sumber: Kantor Satpol PP dan PMK Kota Tarakan, 2020

Berdasarkan tabel diatas tergambar bahwa pelanggaran K3 yang terjadi di Kota Tarakan dapat ditangani dengan baik oleh Petugas dari Satpol PP baik melalui penangangan lewat pembinaan maupun dengan cara Tipiring. Untuk tahun 2019 terdapat 220 kasus pelanggaran K3 dimana semua kasus diselesaiakan lewat pembinaan.

- **Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota**

Bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa. Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas wilayah yang terproteksi dari bencana kebakaran.

Untuk memberikan proteksi terhadap bencana kebakaran, menurut Kepmeneg PU No.11/KPTS/2000 tentang ketentuan teknis manajemen kebakaran perkotaan, suatu kota perlu membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran dimana jumlah minimal WMK untuk suatu daerah tergantung luas darah tersebut dengan minimal satu WMK. Daerah layanan WMK ditentukan oleh waktu tanggap dengan ketentuan tidak lebih dari 15 (lima belas) menit. Berdasarkan ketentuan ini bahwa daerah layanan dalam setiap WMK tidak boleh melebihi radius 7,5 km. Diluar daerah tersebut dikategorikan sebagai daerah tidak terlindungi (unprotected area). Daerah yang sudah terbangun harus mendapat perlindungan oleh mobil kebakaran yang pos terdekatnya berada dalam jarak 2,5 km dan berjarak 3,5 km dari sektor.

Gambar 2. 48
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Tarakan
Tahun 2015-2019

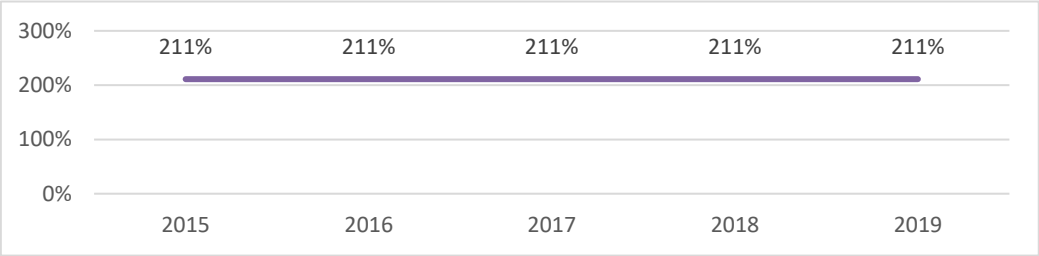

Sumber: Kantor Satpol PP dan PMK Kota Tarakan, 2020

Berdasarkan tabel diatas, Kota Tarakan dengan luas wilayah 250,8 km2 terdapat 3 WMK yaitu Sektor Kampung I sebagai Markas Komando, Sektor Karang Balik (Wilayah Barat) dan Sektor Juata (Wilayah Utara) dimana jangkauan pelayanannya pada radius 7,5 km sehingga jangkauan luas WMK adalah 3 WMK x 176.26 /250,8 km2. Jika dilakukan perhitungan maka cakupan pelayanan bencana kebakaran adalah sebesar 211%.

- **Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)**

Respond time (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Gambar 2. 49
Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Manajemen Kebakaran Kota Tarakan
Tahun 2015-2019

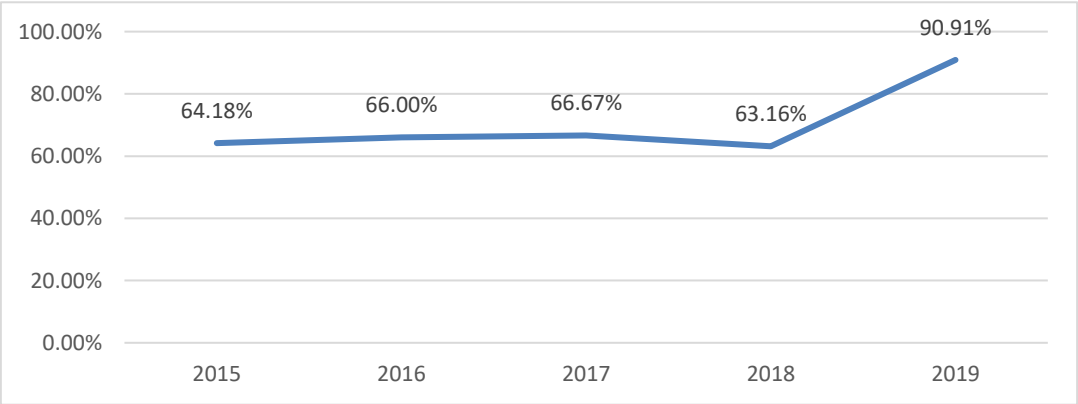

Sumber: Kantor Satpol PP dan PMK Kota Tarakan, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat kita jelaskan bahwa tingkat waktu tanggap daerah layanan manajemen kebakaran untuk Kota Tarakan mengalami kenaikan dimana tahun 2018 dengan jumlah kasus kebakaran sebanyak 38 kasus dan jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit sebanyak 24 kasus sehingga diperoleh diperoleh tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK Tahun 2018 adalah 63,16% dan tingkat waktu tanggap ini meningkat di tahun 2019 menjadi 90,91% dengan jumlah kasus kejadian kebakaran sebanyak 121 kasus dan yang tertangani yang dapat ditangani dalam waktu kurang dari 15 menit sebanyak 110 kasus. Beberapa kendala yang dihadapi oleh Satgas PMK Kota Tarakan untuk waktu tanggap adalah kondisi jalan menuju lokasi kejadian kebakaran, kemacetan, listrik yang belum padam dan SDM.

- **Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi**

Aparatur pemadam kebakaran adalah satuan petugas pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi sebagai aparat Dinas yang membidangi Pemadam Kebakaran dengan keahlian untuk melakukan inspeksi proteksi kebakaran, investigasi penyebab kebakaran, pemadaman api dan penyelamatan korban jiwa serta asset harta benda. Satuan petugas pemadam kebakaran ini memiliki peranan penting dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran.

Dalam rangka pembinaan petugas pemadam kebakaran dalam pelaksanaan tugasnya secara tepat guna, tepat sasaran dan tepat tindakan di lapangan, perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemadam di daerah dengan cara standarisasi kualifikasi aparatur pemadam kebakaran sesuai aturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah.

Gambar 2. 50
Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi Kota Tarakan Tahun 2015-2019

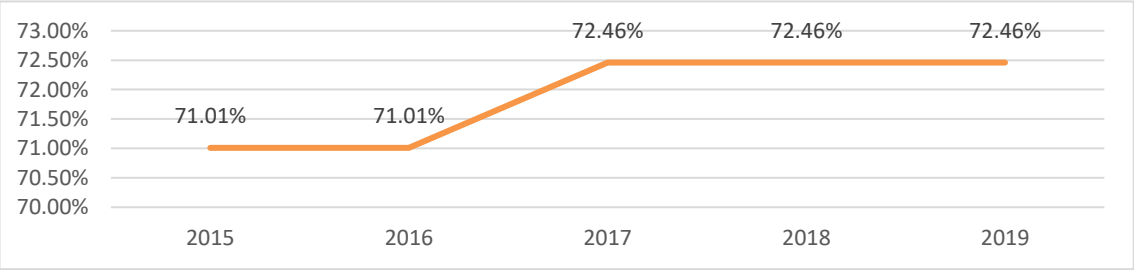

Sumber: Kantor Satpol PP dan PMK Kota Tarakan, 2020

Jumlah Satgas Damkar Kota Tarakan pada tahun 2013 s/d 2019 berjumlah 69 orang terdiri dari 32 PNS dan 37 tenaga kontrak. Selain itu terdapat 29 kelompok Balakar yang tersebar dibeberapa wilayah kelurahan di Kota Tarakan. Satgas Damkar yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan berupa Diklat Damkar 1 pada tahun 2013 dan 2014 berjumlah 47 orang dan tahun 2015 dan 2016 jumlah aparatur yang telah bersetifikasi sebanyak 49 orang. Untuk tahun 2017-2019 jumlah aparatur yang bersertifikat berjumlah 50 orang. Untuk Diklat Damkar 2 baru diikuti oleh 4 orang PNS sedangkan Diklat Inspektur Tk.1 baru 1 orang PNS yang mengikuti diklat tersebut.

- **Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000 - 5000 Liter Pada WMK**

Mobil pemadam kebakaran dan/atau mesin pemadam kebakaran adalah salah satu sarana pemadam kebakaran yang digunakan oleh satuan tugas pemadam kebakaran, Satlakar, Balakar atau sebutan lainnya untuk memenuhi waktu tanggap darurat kebakaran yang cepat dan tepat dalam pengurangan resiko kebakaran.

Mobil pemadam kebakaran dan/atau mesin pemadam kebakaran sebagai identitas bentuk kepedulian pemerintah daerah memberi perlindungan dari bahaya kebakaran terhadap seluruh asset yang berada di lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran.

Jumlah mobil dan/atau mesin pemadam kebakaran diatas 3000-5000 Liter pada WMK adalah cakupan mobil dan/atau mesin pemadam kebakaran yang disediakan pemerintah daerah yang layak pakai untuk mendukung tindakan waktu tanggap darurat kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran dan/atau WMK.

Gambar 2. 51
Cakupan Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK Kota Tarakan Tahun 2015-2019

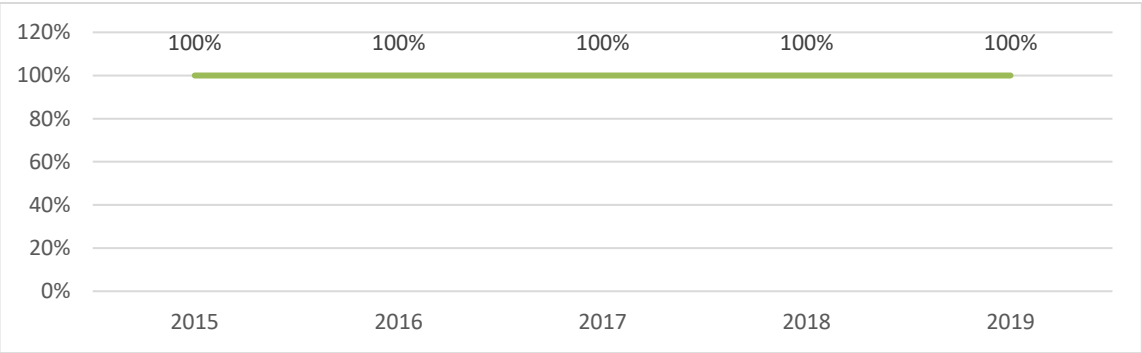

Sumber: Kantor Satpol PP dan PMK Kota Tarakan, 2020

Berdasarkan tabel di atas jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000liter ada 6unit yang tersebar di Mako PMK 3unit, 2 unit disektor utara dan 1 unit di sektor barat. Untuk mobil pemadam kebakaran 10.000 liter ada 1 unit berada di Mako PMK.

Jumlah mobil pemadam kebakaran pada WMK pada dasarnya sudah memenuhi SPM tetapi tidak diimbangi dengan kondisi mobil yang sering mengalami kerusakan dikarenakan faktor usia kendaraan tersebut dimana terdapat 1 unit mobil pemadam kebakaran 5000 liter yang pengadaannya tahun 2001, 1 unit tahun 2007, 3 unit tahun 2008 dan 1 unit pengadaan tahun 2009.

- **Persentase Penegakan PERDA**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas Pokok melaksanakan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masayarakat, dan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP berwenang:

- Melakukan tindakan penertiban nonyudisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- Melakukan tindakan penyelidikan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah, dapat berkoordinasi dengan TNI, Polri, Kejaksaan, dan pengadilan yang berada di daerah provinsi/kabupaten/kota," bunyi Pasal 8 ayat (2) PP ini.

PP ini juga menegaskan, penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada oleh Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur dan kode etik.

Gambar 2. 52
Persentase Penegakan PERDA Kota Tarakan Tahun 2015-2019

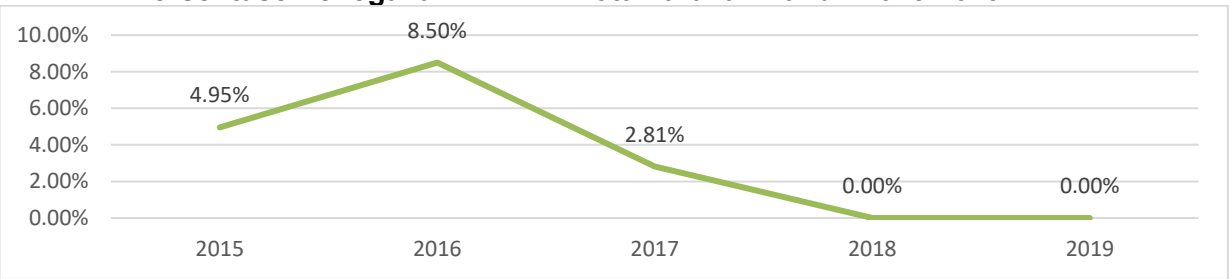

Sumber: Kantor Satpol PP dan PMK Kota Tarakan, 2020

Berdasarkan tabel diatas penegakan PERDA yang dilakukan oleh Aparat Pol PP dimana jumlah penyelesaian pelanggaran PERDA yang terjadi melalui penyidangan

(Tipiring) mengalami penurunan dari tahun 2015 terdapat 30 kasus Tipiring dengan jumlah kasus sebanyak 606 kasus, namun di tahun 2016 terjadi penurunan jumlah kasus yaitu 200 kasus dengan 17 kasus yang diproses lewat penyidangan (tipiring) . Di tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah kasus pelanggaran PERDA yaitu 427 kasus dengan penyelesaian secara tipiring ada 12 kasus. Pada tahun 2018 dan 2019 terjadi 121 dan 220 kasus pelanggaran PERDA dengan tidak ada kasus yang diselesaikan dengan tipiring (kasus diselesaikan dengan pembinaan).

5) Urusan Sosial

Urusan sosial erat kaitannya dengan masyarakat PMKS, korban bencana maupun masyarakat lainnya yang rentan dan mempunyai keterbatasan dalam hidupnya. Keberhasilan pembangunan urusan sosial dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain:

- **Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial**

Yang termasuk sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa permasalahan permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketuhanan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ ketertinggalan dan bencana alam maupun bencana sosial. PMKS yang memperoleh bantuan adalah proporsi jumlah PMKS yang memperoleh bantuan terhadap jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan.

Tabel 2. 50
PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Tarakan
Tahun 2014-2018

Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
PMKS yang diberikan bantuan	Jiwa	6.600	5.703	5.992	2.557	4.977
Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	Jiwa	7.752	8.254	8.223	7.753	6.703
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	**Persen**	**85,14**	**69,09**	**72,87**	**32,98**	**74,25**

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, 2018

Pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa, perkembangan jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial kurun waktu 2014-2018 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 85,14% dan mengalami

penurunan yang cukup signifikan di tahun 2017 menjadi 32,98%. Tetapi meningkat menjadi 74,25% di tahun 2018.

Gambar 2. 53
Grafik PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Tarakan Tahun 2014-2018

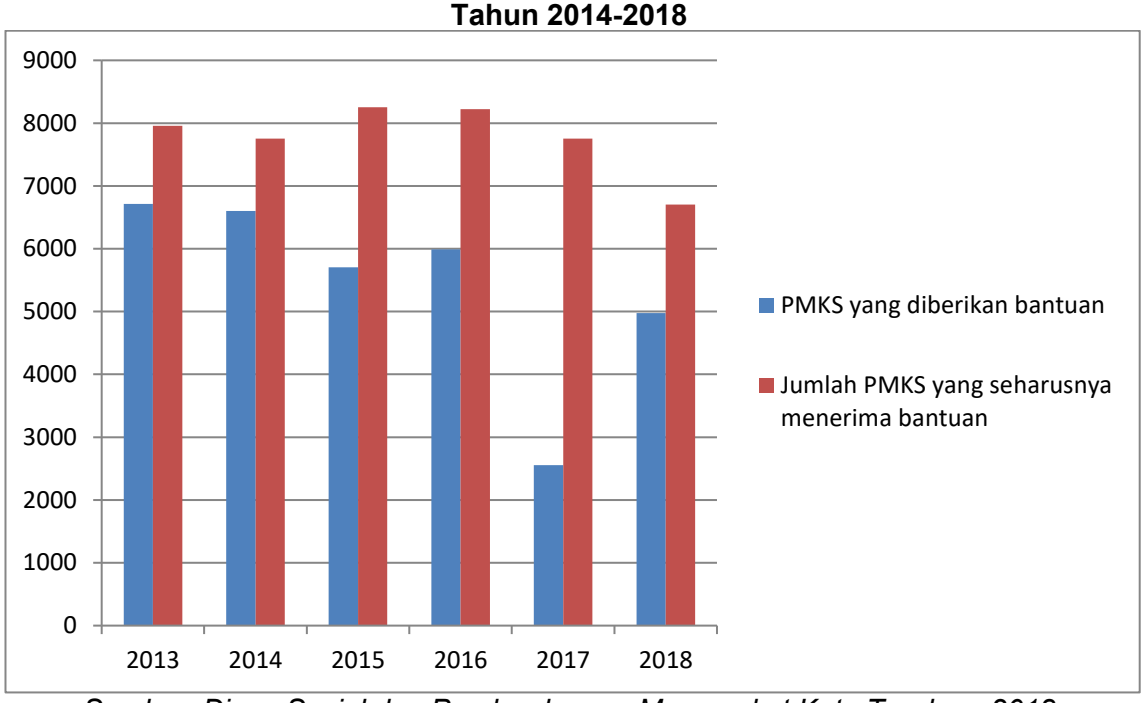

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, 2018

- **Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Rehabilitasi**

Penyediaan fasilitas sosial ditujukan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung. Penyediaan fasilitas tersebut diberikan oleh pemerintah, melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan juga Yayasan yang dikelola oleh Masyarakat. Data sarana sosial yang tersedia di Kota Tarakan disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2. 51
Sarana Sosial di Kota Tarakan Tahun 2014-2018

Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
Panti Asuhan	Unit	11	11	11	11	11
Panti Jompo	Unit	1	1	1	1	1
Panti Rehabilitasi	Unit	1	1	1	1	1
Rumah Singgah	Unit					
Sarana Sosial Lainnya	Unit					
Jumlah Seluruh Sarana Sosial	**Unit**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, 2018

Dapat dilihat dalam Tabel di atas, bahwa dalam kurun waktu 2014-2018 jumlah sarana sosial di Kota Tarakan tidak mengalami perubahan, yaitu 13 Unit. Berdasarkan data diatas, sarana sosial yang tersedia di Kota Tarakan terdiri dari panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi. Sementara untuk rumah singgah sampai saat ini belum tersedia di Kota Tarakan. Tersedianya sarana sosial ini diharapkan dapat membantu bagi orang-orang yang kurang beruntung untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

- **Persentase PMKS Yang Tertangani**

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan persentase jumlah PMKS yang ditangani terhadap jumlah PMKS yang ada. Data menunjukkan bahwa, persentase PMKS yang tertangani pada tahun 2014-2018 fluktuasi cenderung meningkat. Pada tahun 2014 persentasi PMKS yang ditangani sebesar 1,61% dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 1,87% dan di tahun 2017 turun menjadi 0,95% seiring dengan menurunnya jumlah anggaran yg tersedia. Kemudian meningkat menjadi 1,98% di tahun 2018.

Tabel 2. 52
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Tarakan tahun 2014-2018

Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah PMKS yang tertangani	Jiwa	125	154	98	74	133
Jumlah PMKS yang ada	Jiwa	7.752	8.254	8.223	7.753	6.703
Persentase PMKS yang tertangani	**Persen**	**1,61**	**1,87**	**1,19**	**0,95**	**1,98**

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, 2018

- **Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar**

Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar merupakan perbandingan jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial selama 1 tahun terhadap jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memeperoleh bantuan sosial dikali 100. Dalam kurun waktu tahun 2014-2018, Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar berfluktuatif. Pada tahun 2018, persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar mencapai 74,25%, meningkat dari tahun sebenlumnya 32,98%. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial pada tahun 2018.

Tabel 2. 53
PMKS Yang Memperoleh Bantuan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Di Kota Tarakan Tahun 2014-2018

Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial selama 1 tahun	Jiwa	101	145	97	2.557	4.977
Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memeperoleh bantuan sosial	Jiwa	7.752	8.254	8.223	7.753	6.703
Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	**Persen**	**1,30**	**1,76**	**1,18**	**32,98**	**74,25**

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, 2018

- **Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya**

Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya merupakan perbandingan jumlah PMKS dalam 1 tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis terhadap jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis dikali 100. Pada tahun 2018, Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya sebesar 3,91%, meningkat dibandingkan tahun 2014 yang hanya sebesar 0,26%.

Tabel 2. 54
Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Kota Tarakan Tahun 2014-2018

Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Jiwa	20	-	-	280	262
Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Jiwa	7.752	8.254	8.223	7.753	6.703

Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persen	0,26	0,00	0,00	3,61	3,91

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, 2018

- **Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial**

Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial merupakan perbandingan jumlah WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial terhadap jumlah WKBSM yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dikali 100. Dalam kurun waktu tahun 2014-2018, persentase WKSBM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Tarakan mencapai 100% setiap tahunnya.

Tabel 2. 55
Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Tarakan Tahun 2014-2018

Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Unit	156	156	156	156	156
Jumlah WKBSM yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Unit	156	156	156	156	156
Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, 2018

- **Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat**

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat adalah perbandingan jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat terhadap jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dikali 100. Pada tahun 2017 dan 2018, persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat mencapai 100%.

Tabel 2. 56
Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kota Tarakan Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Jiwa	-	-	-	14	139
Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Jiwa	-	-	-	14	139
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	-	-	-	100	100

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, 2018

- **Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Mengunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap**

Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap merupakan perbandingan Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap terhadap Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dikali 100. Pada tahun 2014, persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap mencapai 100%.

Tabel 2. 57
Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Kota Tarakan Tahun 2014-2018

Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jiwa	74	-	-	-	-

Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jiwa	74	-	-	-	-
Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	100	-	-	-	-

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, 2018

- **Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial**

Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial merupakan perbandingan jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial terhadap jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dikali 100. Dalam kurun waktu 2014-2018, persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial berfluktuatif dengan persentase tertinggi pada tahun 2018 sebesar 38,03% dan terendah pada tahun 2014 sebesar 5,07%.

Tabel 2. 58
Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial
Kota Tarakan Tahun 2014-2018

Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Jiwa	25	27	27	47	181
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial	Jiwa	493	487	495	500	476
Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	Persen	5,07	5,54	5,45	9,40	38,03

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, 2018

2.1.3.2 Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar merupakan urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan pemerintah non dasar ini

secara umum sudah mengalami peningkatan tetapi masih perlu adanya peningkatan terutama yang terkait dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

a. Urusan Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dalam bidang ini dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang secara otomatis berdampak pada *income* rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam bidang ketenagakerjaan dimana semakin menurun tingkat pengangguran dapat mengindikasikan peningkatan kesejahteraan manusia. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kualitas/kuantitas tenaga kerja antara lain tergambar dari:

1) Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun (Perseribu)

Hubungan antara pengusaha dan pekerja merupakan sebuah simbiosis mutualisme dimana kedua pihak memiliki peranannya masing-masing dan hanya akan mencapai keuntungan seperti yang diinginkan apabila kerjsama antar kedua pihak terjaga dengan baik. Oleh karena itu, berbagai kasus sengketa antara yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, baik karena perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, maupun perselisihan pemutusan hubungan kerja akan memberikan efek buruk terhadap kinerja perindustrian.

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun merupakan perbandingan antara jumlah sengketa pengusaha pekerja yang terjadi terhadap jumlah perusahaan yang ada dikalikan dengan seribu. Dalam kurun waktu 2015-2019, angka sengketa pengusaha-pekerja tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu 17,14 dan yang terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu 1,43. Walaupun demikian, angka sengketa masih dibawah 20%. Rendahnya angka sengketa mengindikasikan bahwa komunikasi dan kebijakan yang diterapkan di dalam perusahaan mampu mengakomodasi kepentingan antara pengusaha dan juga pekerja. Selain itu, juga mencerminkan bahwa kegiatan industri yang ada cukup kondusif dan mampu menjadi nilai plus bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Kota Tarakan.

Tabel 2. 59
Angka Sengketa Pengusaha Kerja Per Tahun di Kota Tarakan
Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Sengketa	Jumlah Perusahaan	Angka Sengketa
2015	1	700	1,43
2016	5	700	7,14
2017	2	700	2,86

Tahun	Jumlah Sengketa	Jumlah Perusahaan	Angka Sengketa
2018	6	700	8,57
2019	12	700	17,14

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tarakan, 2020

2) Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)

Sengketa antara Pengusaha dan Pekerja dapat diselesaikan dengan cara damai tanpa harus menempuh proses litigasi, dan akhir dari penyesaian secara *win-win solution* atas suatu perselisihan hubungan industrial dibentuklah Perjanjian Bersama. Perjanjian Bersama adalah persetujuan yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Perjanjian Bersama pada dasarnya dibentuk sebagai perjanjian atas kesesuaian kehendak para pihak karena adanya perselisihan atau semata-mata demi terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dalam perusahaan dengan memperhatikan kepentingan masing-masing pihak.

Besaran Kasus yang diselesaikan dengan PB merupakan prosentase dari perbandingan jumlah kasus yang diselesaikan dengan PB terhadap jumlah kasus yang dicatatkan. Dalam kurun waktu 2015-2019, besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian bersama paling tinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 100%. Dari 6 kasus yang tercatat, semua kasus diselesaikan dengan perjanjian bersama. Sedangkan pada tahun 2019 dengan 12 kasus yang tercatat, 9 kasus diselesaikan dengan perjanjian bersama.

Tabel 2. 60
Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) di Kota Tarakan Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Kasus yang Diselesaikan dengan PB	Jumlah Kasus yang Dicatatkan	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan PB (%)
2015	0	1	0,00
2016	2	5	40,00
2017	0	2	0,00
2018	6	6	100,00
2019	9	12	75,00

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tarakan, 2020

3) Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah persentasi jumlah pencari kerja yang mendaftarkan dan tercatat pada dinas kabupaten/kota yang menangani bidang ketenagakerjaan dan jumlah pencari kerja yang diterima bekerja oleh pemberi kerja dalam hal ini perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaannya

pada dinas kabupaten/kota. Dalam kurun waktu 2015-2019, besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan terlihat fluktuatif. Hal ini dikarenakan penyesuaian permintaan tenaga kerja yang ada dengan keterampilan/latar belakang pendidikan pencari kerja yang mendaftar.

Pada tahun 2019, besaran pencari kerja yang ditempatkan mencapai 36,38%. Dari 1.894 orang pencari kerja yang terdaftar, pekerja yang ditempatkan sebesar 689 orang.

Tabel 2. 61
Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan Di Kota Tarakan Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan %
2015	810	2.429	33,35
2016	613	2.922	20,98
2017	1.074	3.159	34,00
2018	1.197	1.986	60,27
2019	689	1.894	36,38

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tarakan, 2020

4) Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja sedangkan besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan adalah persentasi jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam waktu satu sampai lima tahun secara kumulatif dibandingkan dengan jumlah orang yang mendaftar pelatihan.

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun 2019 sebesar 55,29%, menurun 16,74% dari tahun sebelumnya sebesar 72,03%. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah pendaftar peserta pelatihan lebih besar daripada peningkatan jumlah kuota peserta pelatihan.

Tabel 2. 62
Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Di Kota Tarakan Tahun 2015-2019

Tahun	Tenaga kerja yang dilatih	Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)
2015	208	217	95,85
2016	224	313	71,57
2017	240	305	78,69
2018	672	933	72,03
2019	1024	1852	55,29

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tarakan, 2020

5) Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Pelatihan kewirausahaan adalah pelatihan yang membekali peserta secara bertahap agar memiliki kompetensi kewirausahaan dan bisnis, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja bagi dirinya sendiri maupun orang lain sesuai tuntutan pembangunan. Secara umum, dalam kurun waktu 2015-2019, jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan tetap yaitu 20 orang. Namun, pada tahun 2018 tidak dilaksanakan pelatihan kewirausahaan. Secara umum, dalam kurun waktu 2015-2019, besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan kurang dari 50% setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena masih kurang optimalnya sarana dan prasarana pelatihan yang ada di LLK sehingga belum bisa mengimbangi jumlah pendaftar pelatihan yang semakin meningkat.

Tabel 2. 63
Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Di Kota Tarakan Tahun 2015-2019

Tahun	Tenaga kerja yang dilatih	Jumlah Pendaftar kewirausahaan	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)
2015	20	43	46.51
2016	20	55	36.36
2017	20	47	42.55
2018	0	0	-
2019	20	51	39.22

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tarakan, 2020

6) Rasio Lulusan S1/S2/S3

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Rasio lulusan S1/S2/S3 didapatkan dari perbandingan antara jumlah lulusan S1/S2/S3 terhadap jumlah penduduk, dikalikan sepuluh ribu.

Secara umum, dalam kurun waktu 2015-2019, jumlah lulusan S1/S2/S3 di Kota Tarakan mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, jumlah lulusan S1/S2/S3 mencapai 10.816 orang, meningkat 0,58% dari tahun sebelumnya sejumlah 10.754 orang. Sedangkan rasio lulusan S1/S2/S3 mencapai 440,06, yang juga merupakan rasio tertinggi dalam kurun waktu 2015-2019.

Tabel 2. 64
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Di Kota Tarakan Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Lulusan S1/S2/S3	Jumlah Penduduk	Rasio lulusan S1/S2/S3
2015	9.125	231.741	393,76
2016	9.226	246.496	374,29

Tahun	Jumlah Lulusan S1/S2/S3	Jumlah Penduduk	Rasio lulusan S1/S2/S3
2017	10.003	252.464	396,21
2018	10.754	259.001	415,21
2019	10.816	245.784	440,06

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, 2016-2020

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan anak masih menjadi perhatian pemerintah daerah Kota Tarakan dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender. Kesetaraan dan keadilan gender dapat terjadi apabila porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

1) Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase partisipasi perempuan di Lembaga pemerintahan adalah dengan membandingkan dari jumlah pekerja perempuan di pemerintah dengan jumlah seluruh pekerjaan perempuan. Jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintahan didapat dari BKPP, dan jumlah seluruh pekerja perempuan didapat dari penjumlahan data dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak dan Keluarga Berencana. Data prosentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintahan di Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 65
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan di Kota Tarakan Tahun 2015 - 2019

INDIKATOR	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Pekerja perempuan di lembaga Pemerintah	Orang	2.005	1.766	1.734		2.529
Jumlah pekerja perempuan	Orang	na	na	37.894	38.302	36.477
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen			4,58		6,93

Sumber: BPPPAPPKB Kota Tarakan, 2020

Berdasarkan tabel di atas, persentase partisipasi perempuan di Lembaga pemerintahan di Kota Tarakan dalam kurun waktu 2015–2019 sangat kecil, dimana data yang tersedia di tahun 2017 sebesar 4,58%. Namun untuk jumlah pekerja perempuan di Lembaga pemerintahan mengalami peningkatan dari 2.005 jiwa di tahun 2015 menjadi 2.529 jiwa di tahun 2019. Persentase perempuan yang bekerja dilembaga pemerintah masih terbilang cukup rendah, melihat kemungkinan yang akan terjadi dimasa mendatang, penurunan ini disebabkan karena sejak Tahun 2015 tidak ada penerimaan

CPNS dan kebijakan pemerintah usia batas pensuin PNS menjadi 58 tahun sehingga di tahun 2015 banyak yang memasuki usia pensiun.

2) Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPR

Peningkatan partisipasi perempuan di DPR merupakan bagian integral dari upaya untuk mewujudkan kualitas demokrasi yang berkeadilan gender guna mempercepat terwujudnya kesetaraan gender di bidang politik dan pengambilan keputusan. Salah satu upaya untuk meningkatkan peran perempuan sudah dilakukan dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin peningkatan keterwakilan perempuan di kursi DPR. Peraturan ini dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang di dalamnya juga mengatur pemilu tahun 2009 dimana UU No. 2 Tahun 2008 memuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Data prosentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintahan di Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 66
Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD Kota Tarakan Tahun 2013 - 2017

INDIKATOR	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	Orang	1	1	1	1	3
Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	Orang	25	25	25	25	30
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	4%	4%	4%	4%	10%

Sumber: BPPPAPPKB Kota Tarakan, 2020

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa persentase partisipasi perempuan di DPRD Kota Tarakan dalam kurun waktu 2015 – 2019 semakin meningkat dimana periode Tahun 2014 – 2019 sebanyak 4 % atau 1 orang keterwakilan perampuan. Pada periode 2019 – 2024 keterwakilan perempuan meningkat menjadi 10 % atau 3 orang yang duduk di kursi DPRD. Ada beberapa factor hambatan di balik rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD yaitu faktor budaya dan faktor prosedural.

3) Rasio KDRT

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara

fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besarrasio KDRT di Kota Tarakan. Rasio KDRT dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah KDRT dengan jumlah rumah tangga. Berikut ini merupakan rasio KDRT di Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019.

Tabel 2. 67
Rasio KDRT Di Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019

INDIKATOR	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah KDRT	Orang	54	49	60	45	44
Jumlah rumah tangga	Orang	71.034	79.469	85.466	79.734	77.276
Rasio KDRT	Persen	0.08%	0.06%	0.07%	0,06	0,06

Sumber: BPPPAPPKB Kota Tarakan, 2020

Berdasarkan Tabel di atas diketahui bahwa rasio KDRT di Kota Tarakan dalam kurun waktu 2015 – 2019 cenderung menurun dimana pada Tahun 2015 ditemukan 54 kasus KDRT. Jumlah kasus ini semakin menurun hingga mencapai 44 kasus di tahun 2019. Pada kurun waktu 2015 – 2019 terjadi penurunan rasio KDRT hal tersebut mengindikasikan adanya kondisi yang sedikit demi sedikit membaik dengan berkurangnya kasus KDRT.

Terjadinya kasus KDRT disebabkan karena beberapa faktor diantaranya : 1) budaya bahwa isteri bergantung pada suami, khususnya ekonomi; 2) Kepribadian dan kondisi psikologis suami yang tidak stabil; 3) laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat dan 4) pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik isteri, kepatuhan isteri pada suami, penghormatan posisi suami sehingga terjadi persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai isteri, serta kondisi ini disebabkan suami menggunakan narkoba, miras sehingga kecendrungan suami lebih keras.

4) Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan pada perempuan dan anak sama halnya dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan merupakan proporsi.

Tabel 2. 68
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019

INDIKATOR	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	Orang	54	49	63	45	44
Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	Orang	54	49	63	45	44
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BPPPAPPKB Kota Tarakan, 2020

Berdasarkan tabel di atas, penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Tarakan dalam kurun waktu 2015 – 2019 telah terselesaikan semuanya (100 persen). Kesadaran masyarakat untuk melaporkan semakin tinggi sehingga jumlah kasus pengaduan semakin menurun, bukan banyak. Namun untuk masa yang akan datang diharapkan jumlah kasus pengaduan semakin menurun, bukan karena hanya sedikit kasusyang dilaporkan, tapi memang benar-benar berkurang jumlah kasusnya

5) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembanguan Gender {IPG} adalah penghitungan ukuran pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur Pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Tarakan dalam kurun waktu 2015 – 2019 meningkat. Pada tahun 2019 IPG kota Tarakan sebesar 92,16. Angka ini cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat Provinsi dengan IPG sebesar 87,00 dan Nasional dengan IPG sebesar 91,07. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kota Tarakan telah memperhatikan kebutuhan dasar perempuan seperti kesehatan, pemdidikan serta partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan masyarakat.

Tabel 2. 69
Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Tarakan
Tahun 2015 – 2019

INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,61	na	91,23	92,28	92,16

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2020

6) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. IPG dan IDG diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan keadilan gender. IDG dibentuk berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; dan sumbangan pendapatan; Berikut ini merupakan data IDG Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019.

Tabel 2. 70
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Tarakan
Tahun 2015 – 2019

INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	50,65	na	51,33	52,00	Data belum tersedia

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2020

IDG di Kota Taralan dalam kurun waktu 2015- 2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 IDG Kota Tarakan mencapai 50,65 dan mengalami peningkatan hingga mencapai 52 pada tahun 2018, artinya persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan di Kota Tarakan semakin tinggi.

Rencana-rencana pemberdayaan masyarakat, keberhasilan permberdayaan jangan hanya dinilai dari keterserapan dana, namun hendaknya diikuti dengan monitoring dan konsultasi. Para penerima dana hibah dikumpulkan secara berkala dan diminta untu memberikan laporan pencapaian hasil, mengkonsultasikan kesulitan dan hambatan. Dengan demikian anggaran pemberdayaan dapat tepat sasaran.

c. Urusan Pangan

Ketahanan pangan merupakan kondisi dimana suatu wilayah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan menyeluruh. Beras masih merupakan bahan pokok pangan bagi sebagian besar masyarakat di Kota Tarakan. Ketersediaan pangan di Kota Tarakan selain dari produksi lokal juga berasal dari daerah lain di sekitar seperti Malinau, Bulungan maupun Makasar dan Surabaya.

Ketersediaan pangan berhubungan dengan suplai pangan melalui kebutuhan, produksi, dan luas panen. Ketersediaan pangan utama berupa beras di Kota Tarakan pada tahun 2015 – 2019 berfluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan 16,73%. Ketersediaan pangan utama tertinggi pada tahun 2018 sebesar 11.175 ton atau 42,65 kg/jiwa sedangkan yang terendah adalah pada tahun 2017 sebesar 5.187,7 ton atau 20,50 kg/jiwa. Dengan ketersediaan pangan utama tersebut, maka ketersediaan energi (kkal/kapita/hari) dan ketersediaan protein (gram/kapita/hari) yang dihasilkan selama tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 71
Ketersediaan Pangan Utama Kota Tarakan Tahun 2015 - 2019

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019*	Pertumbuhan Rata-Rata/ Tahun (%)
1	Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama	Kg	8.726.200	6.819.700	5.187.700	11.175.000	10.870.000	16,73
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	235.565	244.185	253.026	262.025	270.894	3,56
3	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/jiwa	37,04	27,93	20,50	42,65	40,13	12,73
4	Ketersediaan energi per kapita per hari	kkal/per kapita/ hari	36,54	27,55	20,22	42,06	39,58	12,73
5	Ketersediaan protein per kapita per hari	gram/ kapita/ hari	690,13	520,31	381,97	794,55	747,56	12,73

Sumber: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan, BPS Kota Tarakan, diolah Bappeda 2020

d. Urusan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan salah satu unsur yang diutamakan dalam pelaksanaan pembangunan yang dinamis atau bisa disebut pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu dalam setiap pelakasanaan pembangunan harus memperhatikan daya dukung lingkungannya. Keberhasilan pembangunan bidang lingkungan hidup dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain:

- **Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota**

RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) adalah dokumen perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu yang menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJP/M) dan merupakan bagian yang integral dalam pembangunan daerah. RPPLH sebaiknya disusun oleh pemerintah kabupaten/kota. Tujuan adanya RPPLH sebagai pedoman dalam menjaga kelestarian lingkungan agar bisa dimanfaatkan hingga ke generasi berikutnya yang berintegrasi dengan pembangunan Daerah.

Namun dokumen RPPLH Kota Tarakan dari tahun 2013–2017 belum tersusun. Hal ini dikarenakan, peraturan baru dan belum terkoordinasi dengan baik. Dokumen RPPLH meskipun belum tersusun namun sudah terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah. Dokumen perencanaan daerah sudah memuat tentang pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.

- **Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air**

Indeks kualitas air berhubungan dengan kualitas air sebagai kebutuhan manusia yang paling utama. Indeks kualita air atau mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 115 tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air).

Pengukuran status mutu air di Kota Tarakan dilakukan di 9 titik di 4 sungai antara lain: Sungai Karang Anyar, Sungai Semunti, Sungai Persemaian, Sungai Binalatung. Metode yang digunakan storet yaitu membandingkan data kualitas air dengan baku mutu yang disesuaikan dengan peruntukannya. Berdasarkan pengambilan sampel dan pengukuran yang dilakukan di peroleh hasil dari Tahun 2015–2019. Tahun 2015 indeks kualitas air 48,89, tahun 2016 hasil perhitungannya 45,56, tahun 2017 nilai indeks kualitas air 43,75, tahun 2018 nilai indeks kualitas air 43,75 dan tahun 2019 nilai indeks kualitas air 60,00. Berdasarkan Indeks CWQI angka (45-64) menunjukkan kualitas air yang marginal/berada diambang batas terbawah, sedangkan angka 43 menunjukkan kualitas yang buruk. Indeks kualitas air Tarakan pada tahun 2019 menunjukkan kualitas air yang marginal/berada diambang batas terbawah, sehingga diperlukan pengolahan.

- **Hasil Pengukuruan Indeks Kualitas Udara**

Indeks kualitas udara merupakan suatu nilai yang menjelaskan dan menginformasikan kondisi dan perubahan kualitas udara suatu daerah. Dalam rangka pemantauan kualitas udara dengan metode passive sampler untuk perhitungan Indeks

Kualitas Udara Tahun 2011–2019. Lokasi sampling ada 4 lokasi pada masing masing kab/kota: a) Daerah padat transportasi (jalan utama yg lalu lintasnya padat) b) Daerah/kawasan Industri (bukan industrinya) c) Pemukiman padat penduduk (*urban background*) d) Kawasan komersil (perkantoran, perdagangan yang tidak terpengaruh langsung transportasi). Hasil pengukuran indeks kualitas udara di kota Tarakan pada tahun 2016 adalah 86,14 , pada tahun 2017 adalah 96,96, pada tahun 2018 adalah 92,07 dan pada tahun 2019 adalah 94,02. Hal ini menunjukkan kualitas udara Kota Tarakan dalam kondisi baik.

- **Penghargaan Lingkungan Hidup**

Penghargaan lingkungan hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di suatu daerah. Adipura, Adiwiyata, Kalpataru merupakan beberapa penghargaan di bidang lingkungan yang pernah di dapat oleh Kota Tarakan. Tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 mengalami kenaikan jumlah perolehan penghargaan namun mengalami penurunan pada tahun berikutnya yaitu hanya 8 penghargaan yang didapatkan sampai akhir tahun 2017 hanya 11 penghargaan dibidang lingkungan.

- **Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH Yang Di Terbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha Dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota.**

Salah satu kinerja pengelolaan lingkungan hidup adalah penanganan terhadap pengaduan masyarakat beripa izin lingkungan, izin PPLH, izin lokasi dan lainnya. Selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, pengaduan masyarakat ditangani 100 % oleh dinas terkait. Diharapkan dengan pelayanan penuh tidak ada ijin lingkungan yang tidak terselesaikan.

- **Timbulan Sampah Yang Ditangani**

Timbulan sampah adalah volume sampah yang dihasilkan dalam satuan waktu. Timbulan sampah perlu untuk diketahui pertahunnya digunakan sebagai dasar pengelolaan sampah di Kawasan kelurahan maupun kota. Timbulan sampah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Gambar 2. 54
Timbulan Sampah Kota Tarakan 2014 – 2018 (m3/hari)

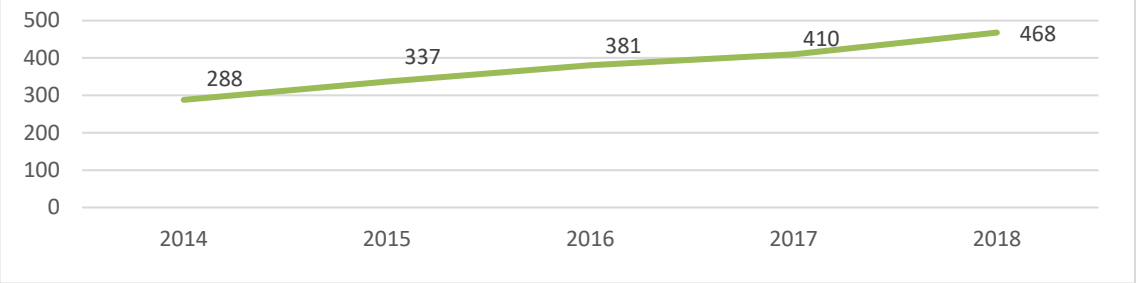

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui timbulan sampah yang ditangani mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014, timbulan sampah yang tertangani yang masuk TPA adalah 2881 m3/hari, meningkat setiap tahunnyahingga pada tahun 2018 mencapai 468 m3/hari. Peningkatan timbulan sampah di Kota Tarakan dipengaruhi oleh : 1) peningkatan atau penambahan jumlah penduduk dan pertumbuhannya, 2) cara hidup dan mobilitas penduduk yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan kota, 3) Kota Tarakan sebagai kota transit sehingga semakin banyak pendatang yang juga mempengaruhi timbulan sampah, dan 4) cara penanganan makanannya terutama setiap bulan puasa atau ada perayaan hari besar yang menyebabkan timbulan sampah semakin meningkat dibandingkan hari biasa.

- **Persentase Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melalui 3R**

Pengelolaan sampah di Kota Tarakan terus dilakukan perbaikan sehingga timbulan sampah yang dihasilkan tidak langsung masuk ke TPA. Timbulan sampah dapat diolah dulu di sumber sampah dengan sistem 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Pengelolaan sampah dengan sistem 3R sedang gencar dilaksanakan di Kota Tarakan. Pengurangan jumlah sampah dengan sistem 3R pada tahun 2013 hanya sebesar 5% dan diusahakan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dengan dibangunnya depo 3R di beberapa kelurahan dan pengembangan sekolah Taling, diharapkan pengelolaan sampah 3R terus mengalami peningkatan sehingga jumlah sampah yang ditangani melalui 3R mengalami peningkatan. Peningkatan ditunjukkan dengan 7% penanganan sampah dengan 3R pada tahun 2017. Dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan 2%. Meskipun peningkatan masih tergolong rendah, namun system 3R sudah mampu mempengaruhi perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat terhadap pengelolaan sampah.

- **Cakupan Area Pelayanan Persampahan Menujukkan Pelayanan Persampahan Dan Kawasan Yang Terlayani Pengangkutan Sampah.**

Pengangkutan sampah dan pengelolaan sampah pada tahun 2013 sudah mencapai 70% dari seluruh Kawasan Kota Tarakan dan terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015, capaian area pelayanan sebesar 78% meningkat menjadi 85% pada tahun 2017. Dan meningkat lagi pada tahun 2018 dan 2019 menjadi 90% dan 95%. Dengan 95% cakupan pelayanan menunjukkan bahwa pelayanan persampahan sudah hampir mencakup seluruh wilayah dan masyarakat Kota Tarakan.

- **Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani**

Jumlah sampah yang tertangani setiap hari terukur berdasarkan sampah yang masuk ke TPA. Pencatatan dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak sampah yang masuk ke TPA. Dengan 12 truk sampah yang beroperasi sampah yang masuk ke TPA setiap harinya mengalami kenaikan.

Gambar 2. 55
Jumlah Sampah Yang Tertangani Di Kota Tarakan
Tahun 2015-2019

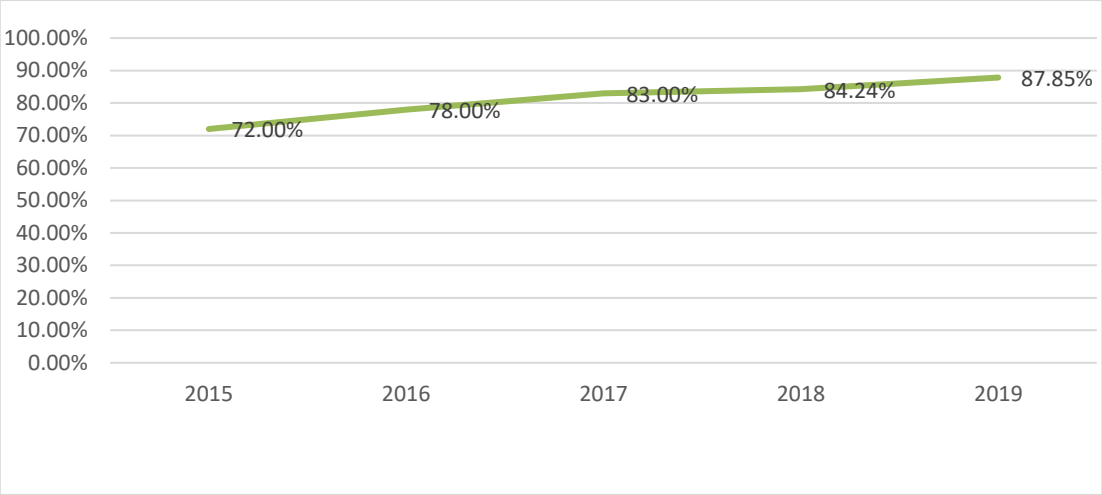

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, 2020

Dari tabel di atas, dapat diketahui persentase jumlah sampah yang tertangani mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015, sampah kota yang tertangani sebesar 72% dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada akhir tahun 2019 sebanyak 87,85% sampah kota yang terlayani. Jumlah sampah yang tertangani dapat menunjukkan kinerja pemerintah yang semakin baik, dengan tertangani semua sampah kota.

- **Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kota Tarakan**

Sarana dan prasarana persampahan yang terdata merupakan sarana dan prasarana yang ada di fasilitas umum dan fasilitas khusus. Sedangkan untuk fasilitas di permukiman disediakan oleh masyarakan secara swadaya. TPS di Kota Tarakan ditunjukkan dengan data dibawah.

Tabel 2. 72
Sarana Prasarana Persampahan Kota Tarakan Tahun 2015-2019

Sarana Prasarana Persampahan	2015	2016	2017	2018	2019
TPS Drum	56	-	-	-	-
TPS Beton	150	-	-	-	-
TPS Plat	60	-	-	-	-
TPS Fiber 120L	100	-	30	-	-
TPS Fiber 660L	108	-	15	7	7
TPS Container	25	-	17	20	20
Transfer Depo	7	-	17	17	19
TPS 3R/depo pengelolaan sampah	5	5	5	8	9

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, 2020

Mulai tahun 2016, jumlah TPS baik drum, beton, plat ditiadakan dan dimusnahkan. Pemerintah Kota Tarakan mengeluarkan kebijakan tidak ada TPS di jalan protokol maupun di permukiman. Pengurangan jumlah TPS digantikan dengan keberadaan transfer depo dan depo pengelolaan sampah. Depo pengelolaan sampah sudah terdapat di 9 kelurahan di Kota Tarakan sehingga diharapkan dengan adanya pengelolaan sampah di sumber sampah, sampah yang terbuang ke TPA berkurang. TPA Kota Tarakan dengan luasan 8 Ha yang berada di Kelurahan Karang Harapan sudah hampir penuh sehingga perlu adanya penambahan jumlah TPA di Kota Tarakan.

- Persentase Izin Pengelolaan Sampah Oleh Swasta Yang Diterbitkan Dan Persentase Pengelolaan Sampah Oleh Swasta Yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Pengelolaan sampah di Kota Tarakan dijalankan oleh Pemerintah Kota Tarakan, bukan pihak swasta. Pada tahun 2013 – 2017, pengelolaan sampah Kota Tarakan dilakukan oleh KSM dan swadaya masyarakat sehingga tidak ada ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk swasta dalam hal pengelolaan sampah. Dalam Peraturan Daerah, pihak swasta, dalam hal ini toko, hotel, supermarket, restoran mengelola sampahnya sendiri, dan sampai saat ini terpantau mereka mematuhi peraturan daerah yang berlaku.

e. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan baik pusat maupun daerah. Untuk itu tata administrasi kependudukan dan catatan sipil harus berkualitas. Keberhasilan tata administrasi kependudukan dan catatan sipil setidaknya tergambar dari beberapa indikator antara lain:

- Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar kepemilikan KTP per satuan penduduk Kota Tarakan. Cara untuk mencari rasio ini menurut Lampiran 1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah dengan membagi jumlah penduduk usia >17 tahun yang memiliki KTP dengan jumlah penduduk usia>17 tahun atau telah menikah (wajib KTP). Jumlah penduduk usia >17 tahun yang ber KTP yang disajikan dalam table dibawah ini adalah jumlah e-KTP yang dicetak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Tabel 2. 73
Jumlah Penduduk Ber-KTP Di Kota Tarakan Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah penduduk usia > 17 tahun yang ber KTP	Jiwa	88.818	99.964	172.790	178.504	171.066
Jumlah penduduk usia > 17 tahun atau telah menikah	Jiwa	167.183	168.131	172.833	174.216	163.269
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Persen	53,13	59,46	99,98	97,59	95,44

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, 2020

Dapat dilihat dari table di atas diketahui bahwa rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk dari tahun 2015-2019 berfluktuatif. Pada tahun 2019, rasio penduduk ber-KTP adalah 95,44% menurun dari tahun 2018 sebesar 97,59. Hal ini disebabkan karena tahun 2019 ada pemutakhiran data basic kependudukan sehingga data yang ganda dan tidak aktif dibekuakan untuk sementara. Akan tetapi secara umum rasio penduduk ber-KTP pada tahun 2017-2019 tergolong dalam kondisi yang baik karena sudah hampir mencapai angka 100%.

- **Kepemilikan Akte Kelahiran**

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran. Kepemilikan akte lahir menunjukkan bahwa kelahirannya telah dicatat dalam data kependudukan. Kepemilikan akte kelahiran tidak hanya penting bagi bayi yang baru lahir akan tetapi bagi orang dewasa. Manfaat memiliki akte kelahiran adalah kemudahan dalam mengakses pelayanan publik yang bersifat formal ataupun menjadi syarat untuk pembuatan surat keterangan diri penduduk. Cara menghitung

kepemilikan akta kelahiran adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran terhadap jumlah penduduk.

Tabel 2. 74
Kepemilikan Akte Kelahiran di Kota Tarakan Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran	Jiwa	111.452	117.344	124.012	132.498	136.091
Jumlah penduduk	Jiwa	246.496	247.663	252.464	259.001	245.784
Kepemilikan akta kelahiran	Persen	45,21	47,38	49,12	51,16	55,37

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2020

Berdasarkan Tabel di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu 2015-2019, kepemilikan akte kelahiran penduduk di Kota Tarakan menunjukan peningkatan baik dari jumlah kepemilikan maupun rasio terhadap jumlah penduduk. Pada tahun 2019, kepemilikan akta kelahiran mencapai 55,37%, meningkat dari tahun sebelumnya 51,16%.

- **Rasio Pasangan Berakte Nikah**

Indikator ini bertujuan untuk mihat seberapa besar persentase penduduk menikah yang memiliki akte. Akte nikah merupakan bukti pernikahan suami istri yang sah diakui oleh negara dan agama. Kepemilikan akte nikah memudahkan dalam administrasi dan identifikasi kependudukan. Rasio pasangan berakte nikah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pasangan berakte nikah dengan jumlah seluruh pasangan nikah.

Tabel 2. 75
Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kota Tarakan tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah pasangan nikah berakte nikah	Jiwa	51.976	53.658	56.856	61.088	65.646
Jumlah keseluruhan pasangan nikah	Jiwa	105.406	105.309	106.714	109.272	107.429
Rasio pasangan berakte nikah	Persen	49,31	50,95	53,28	55,90	61,11

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2020

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa rasio pasangan berakte nikah di Kota Tarakan dalam kurun waktu 2015-2019 mengalami peningkatan. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan jumlah pasangan menikah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, rasio pasangan berakte nikah sebesar 61,11%, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 55,90%.

- **Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi**

Indikator ini bertujuan untuk melihat apakah Kota Tarakan memiliki database kependudukan pada skala kota. Data mengenai ketersediaan database kependudukan skala kota berdasarkan informasi dari instansi terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan sudah tersedia. Peng*update*-an database kependudukan di Kota Tarakan dilakukan secara rutin melalui program SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Melalui program tersebut, database kependudukan di Kota Tarakan dapat dilihat secara berkala.

Tabel 2. 76
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota Di Kota Tarakan Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Ketersediaan data base kependudukan skala Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2020

- **Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK**

Indikator ini bertujuan untuk melihat apakah KTP yang diterbitkan sudah berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan). Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan telah menerapkan program e-KTP dan penerapan KTP berbasis NIK. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, penerapan KTP Nasional berbasis NIK telah dilaksanakan mulai tahun 2009.

Tabel 2. 77
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK di Kota Tarakan Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2020

f. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Ukuran kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya serta mengoptimalkan sumberdaya alam dan manusia setempat sebaik mungkin. Upaya yang harus dilakukan adalah menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.

- **Persentase PKK Aktif**

PKK atau yang biasa dikenal sebagai Pembinaan Kesejahteraan Keluarga merupakan wadah kegiatan untuk kaum wanita dengan tujuan untuk mengembangkan kreativitas. Tujuan PKK adalah untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera seperti tujuan awal pergerakan PKK adalah keluarga yang mampu menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah serta mamu berperan dalam masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Keaktifan PKK untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga merupakan sebuah kekuatan mendasar pada setiap keluarga. Pembangunan terkecil dilakukan oleh PKK di rumah tangganya masing-masing. Untuk itu peran PKK menjadi sangat strategis untuk merealisasikan visi dan misi pemerintah pada skup yang paling kecil. Pemantauan kegiatan PKK menjadi sangat penting untuk mengetahui usaha-usaha aktif di tingkat akar rumput dalam merealisasikan program pembangunan.

Monitoring terhadap kegiatan PKK dilakukan untuk melihat peran serta dalam mencapai tujuan pembangunan. Tabel informasi di bawah ini menunjukkan bahwa kegiatan PKK di Kota Tarakan muncul di tiap-tiap jenjang administrasi, mulai dari RT, Kelurahan, Kecamatan hingga Kota. Keaktifan PKK sebenarnya dapat membantu ibu-ibu untuk meningkatkan kreativas di berbagai bidang, yang mungkin dapat dikembangkan untuk membantu ekonomi keluarga.

Tabel 2. 78
Jumlah PKK Aktif di Kota Tarakan Tahun 2014 – 2018

Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah TP PKK Kota	Kelompok	1	1	1	1	1
Jumlah TP PKK Kecamatan	Kelompok	4	4	4	4	4
Jumlah TP PKK Kelurahan	Kelompok	20	20	20	20	20
Jumlah Kel PKK RT	Kelompok	444	444	444	444	444
Jumlah PKK Aktif se-Kota Tarakan	**Kelompok**	**469**	**469**	**469**	**469**	**469**

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, 2018

Pada Tabel di atas diketahui bahwa organisasi PKK secara terstruktur memiliki ikatan integral mulai dari kelompok terkecil yaitu PKK RT, PKK Kelurahan, PKK Kecamatan dan PKK Kota. Pada organisasi PKK ini sesungguhnya terjadi integrasi antara pemerintah yang secara struktural menjadi pengatur dengan institusi terbawah sebagai pembentuk suatu pemerintahan, yaitu unsur keluarga. Sebenarnya jika mampu memaknai secara lebih hakiki kekuatan PKK ini maka suatu daerah akan berkembang.

Namun sayangnya untuk mencapai pemaknaan hakiki tersebut masih butuh kesungguh-sungguhan pemerintah dan para Pembina PKK untuk menggali hakikat organisasi ini.

- **Persentase Posyandu Aktif**

Posyandu merupakan wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing petugas terkait. Tujuan posyandu antara lain: 1) Menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, 2) Membudayakan NKBS, 3) Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera dan 4) Berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera. Capaian kinerja posyandu aktif sejak tahun 2015 hingga 2019 sudah sangat baik yaitu 100%, namun dari sisi jumlah posyandu cenderung menurun.

Tabel 2. 79
Jumlah Posyandu Aktif di Kota Tarakan tahun 2015-2018

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Posyandu Aktif	Unit	151	177	148	148	147
Jumlah Posyandu	Unit	151	177	148	148	147
Persentase Posyandu Aktif	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dalam kurun waktu 2015-2019, jumlah posyandu aktif di Kota Tarakan mengalami penurunan. Pada tahun 2016, jumlah posyandu di Kota Tarakan sejumlah 177 unit, meningkat dari tahun sebelumnya sejumlah 151 unit. Namun, pada tahun 2019, jumlah posyandu menurun menjadi 147 unit yang dikarenakan terjadi beberapa penggabungan posyandu. Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2015-2019, semua posyandu yang ada di Kota Tarakan merupakan posyandu aktif.

Gambar 2. 56
Grafik Jumlah Posyandu Aktif Di Kota Tarakan Tahun 2015-2019

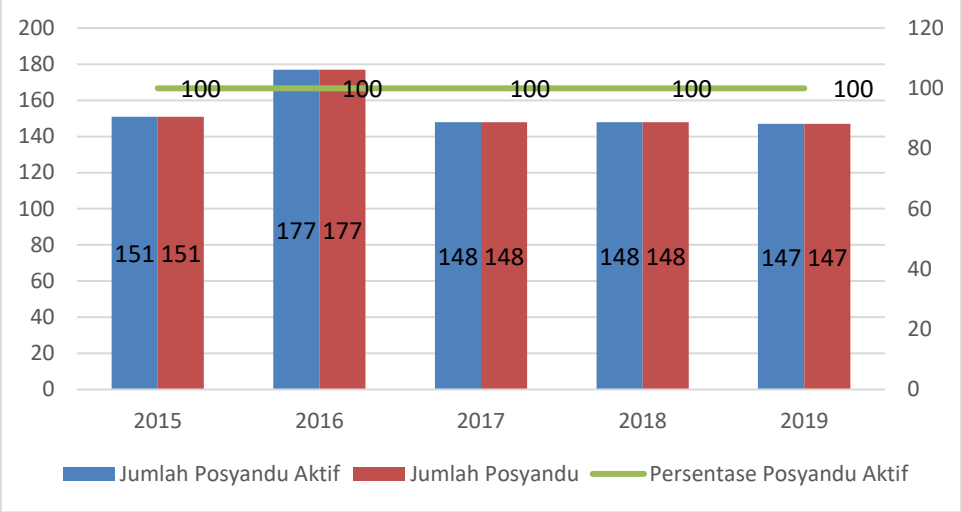

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, 2018

g. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian kependudukan dan keluarga berencana merupakan faktor penting dalam pembangunan khususnya berkaitan dengan keterbatasan sumberdaya. Untuk itu jumlah penduduk perlu dikendalikan dan dikelola secara baik. Ada beberapa indikator yang menggambarkan keberhasilan dalam pengelolaan kependudukan antara lain:

- **Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)**

Berdasarkan hasil proyeksi BPS, secara umum dalam kurun waktu 2015-2019, laju pertumbuhan penduduk berfluktuatif dengan kecenderungan menurun. Penduduk Kota Tarakan tahun 2019 sebanyak 270.894 jiwa yang terdiri atas 141.613 jiwa penduduk laki-laki dan 129.281 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2017, penduduk Kota Tarakan mengalami pertumbuhan sebesar 3,4 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2019 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 109,54, yang berarti bahwa di antara 100 penduduk perempuan, terdapat 109 sampai 110 penduduk laki-laki di Kota Tarakan tahun 2019.

Tabel 2. 80
Jumlah Penduduk Kota Tarakan Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	235.565	244.185	253.026	262.025	270.894
2.	Laki-Laki (Jiwa)	123.306	127.933	132.417	137.101	141.613
3.	Perempuan (Jiwa)	112.259	116.252	120.609	124.924	129.281
4.	Laju pertumbuhan penduduk (%)	3,67	3,66	3,62	3,56	3,4
4.	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km^2)	943,58	974	1.008,88	1.044,76	1.080,12

Sumber: BPS Kota Tarakan, 2020

- **Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB**

Kampung KB merupakan salah satu “senjata pamungkas” baru pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan, terutama di wilayah-wilayah yang jarang “terlihat” oleh pandangan pemerintah. Kampung KB, kedepannya akan menjadi ikon program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Kehadiran Kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Prinsipnya Program KKBPK mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan melaksanakan delapan fungsi keluarga. Penerapan fungsi keluarga ini membantu keluarga lebih bahagia dan sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Kampung KB dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada Tanggal 14 Januari 2016 sehingga kampung KB di Kota Tarakan baru dilaksanakan pada Tanggal 29 Maret 2016 dibentuk pada 1 Kelurahan yaitu Kelurahan Juata Laut sementara untuk kegiatan bersama satuan perangkat daerah dan satuan kerja lainnya dilaksanakan mulai tahun 2017 dengan jumlah 23.81% atau ada 10 Organisasi perangkat daerah yang telah mendukung program Kampung KB dari 42 OPD yang ada di Kota Tarakan.

- **Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga**

Rata-rata jumlah anak per keluarga dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah anak dan jumlah keluarga. Definisi anak dan keluarga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas} tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan keluarga unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami istri dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah samping dengan derajat ketiga. Dari definisi

tersebut didapat bahwa yag dimaksud dengan anak adalah penduduk berusia 0-17 tahun. Berikut merupakan data rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Tarakan.

Tabel 2. 81
Rata-Rata Jumlah Anak Per keluarga di Kota Tarakan
Tahun 2013 – 2017

INDIKATOR	SATUAN	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah anak	Anak	37,262	na	42,502	42,529	45,606
Jumlah keluarga	Keluarga	82,815	na	71,034	79,469	85,466
Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak	0.45	na	0.60	0.54	0.53

Sumber : BPPPAPPKB, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2018

Berdasarkan Tabel di atas diketahui bahwa data jumlah penduduk dengan usia 0-17 tahun menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan. Sedangkan untuk jumlah keluarga menggunakan data jumlah kartu keluarga yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan. Dari pendataan dari Tahun 2013 – 2017 cenderung menunjukkan bahwa dalam satu keluarga masih memiliki jumlah anak yang sama, yaitu satu anak per keluarga. Jumlah ini sudah memenuhi {tidak melebihi} target program keluarga berencana dengan jumlah anak tidak lebih dari dua orang.

- **Ratio Akseptor KB**

Akseptor KB adalah pasangan usia subur di mana salah seorang menggunakan salah satu cara/alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan, baik melalui program maupun non program. Sasaran program KB dibagi menjadi 2 yaitu sasaran langsung dan sasaran tidak langsung, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Sasaran langsungnya adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. Sedangkan sasaran tidak langsungnya adalah pelaksana dan pengelola KB, dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera. Adapun jenis–jenis aseptor KB meliputi Akseptor KB baru, Akseptor KB Lama, Akseptor KB Aktif dan Akseptor KB aktif kembali. Berikut merupakan data ratio akseptor KB di Kota Tarakan.

Tabel 2. 82
Ratio Akseptor KB di Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019

INDIKATOR	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah akseptor KB	Jiwa	21,057	22,080	22,814	23,354	23,816
Jumlah PUS	Jiwa	38,470	38,209	41,118	34,055	34,407
Ratio Akseptor KB	Persen	54.74	57.79	55.48	68.58	69.22

Sumber: BPPAPPKB Kota Tarakan, 2020

Berdasarkan tabel di atas, Ratio Akseptor KB di Kota Tarakan dalam kurun waktu 2015 – 2019 menunjukkan peningkatan dari 54,74% di tahun 2015 menjadi 69,22% di tahun 2019. Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk salah satu caranya adalah melalui program KB dimana Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

- **Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49**

Peserta KB aktif merupakan pasangan usia subur (PUS) yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Cakupan peserta KB aktif dilihat berdasarkan proposal jumlah peserta program KB aktif terhadap pasangan usia subur. Dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu cara yag digunakan adalah melalui program KB, Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat partisipasi KB (Akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Tabel 2. 83
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49
Tahun 2015 – 2019

INDIKATOR	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah peserta KB aktif	Jiwa	21,057	22,085	32,343	23,354	23,816
Jumlah PUS	Jiwa	38,470	38,209	41,118	34,055	34,407
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persen	54.74	57.80	78.66	68.58	69.22

Sumber: BPPAPPKB Kota Tarakan, 2020

Berdasarkan Tabel di atas, angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi pasangan usia subur sepanjang tahun 2015–2019 meningkat hingga 69,22 persen. Meningkatnya jumlah peserta KB aktif menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam program keluarga berencana. Di masa yang akan datang diharapkan jumlah penduduk dapat ditekan dan tidak terjadi lagi ledakan jumlah penduduk yang berdampak bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

- **Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)**

Secara harfiah makna unmet need adalah kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kondisi ini mengisyaratkan keinginan pasangan usia subur (PUS) terhadap suatu jenis

alat kontrasepsi yang tidak tersedia sehingga mereka mengambil keputusan tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi Cakupan PUS yang ingin ber – KB (Unmet need). dapat dipahami dalam dua perspektif yaitu dari sisi penyediaan layanan dan dari sisi klien.

Tabel 2. 84
Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Di Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019

INDIKATOR	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	Jiwa	12,112	9,387	8,853	7,020	6,982
Jumlah PUS	Jiwa	38,470	38,209	41,118	34,055	34,407
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	31.48	24.57	21.53	20.61	20.29

Sumber: BPPAPPKB Kota Tarakan, 2020

Berdasarkan Tabel di atas, cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) bagi pasangan usia subur sepanjang tahun 2015–2019 menurun hingga 20,29 persen. Angka ini menunjukan bahwa tingkat PUS yang ingin ber-KB meningkat dan ini merupakan keberhasilan pemerintah Kota Tarakan mendorong pasangan usia subur untuk melaksanakan program KB, namun ada 20,29% Pasangan usia subur belum ber KB hal ini disebabkan karena pasangan usia subur yang tinggal di kawasan / daerah pesisir dan tinggal di daerah pertambakan sehingga pmerintah sebagai penyedia layanan bertanggung jawab dan berupaya menyediakan alat kontrasepsi yang di butuhkan masyarakat sebagai klien.

- **Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**

Metode KB Jangka Panjang (MKJP) adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda kehamilan, serta menghentikan kesuburan, yang digunakan dengan jangka panjang, yang meliputi IUD (alat kontrasepsi dalam rahim), implan dan kontrasepsi mantap. Adapun jenis-jenis MKJP adalah Kontrasepsi dalam rahim (AKDR)/IUD, alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK)/Implan/Susuk, tubektomi (pada Perempuan) dan Vasektomi (pada Laki-Laki).

Tabel 2. 85
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Di Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019

INDIKATOR	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah aseptor KB yang menggunakan MKJP	Jiwa	2,550	3,207	3,239	632	608
Jumlah aseptor KB	Jiwa	21,057	22,080	22,814	23,354	23,816
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	12.11	14.52	14.20	2.71	2.55

Sumber: BPPPAPPKB Kota Tarakan, 2020

Berdasarkan tabel di atas penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) bagi pasangan usia subur di Kota Tarakan semangkin, dimana tahun 2015 – 2017 berada di angka 12-14 persen kemudian di Tahun 2018 – 2019 menurun menjadi 2 persen. Untuk itu Pemerintah sangat mengharapkan pelayanan KB di arahkan lebih banyak ke alat kontrasepsi MKJP yang tingkat efektivitasnya sangat tinggi.

- **Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB**

Bina Keluarga Balita (BKB) adalah upaya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lainnya dengan anak balita. Kelompok BKB umumnya terdiri dari keluarga muda dengan anggota yang mempunyai anak batita atau anak balita. Untuk memberdayakan keluarga Batita (Bawah Usia Tiga Tahun) dan keluarga Balita (Bawah Usia Lima Tahun), seluruh jajaran pembangunan diarahkan agar setiap keluarga memberi prioritas yang tinggi terhadap kesehatan dan pertumbuhan anak balitanya dan sebagai gerakan bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk memelihara kesehatan, hantaran tumbuh kembang anaknya, deteksi dini kelainan atau kecacatan dan akhirnya menyiapkan anak balitanya siap sekolah bersama anak-anak lain. Berikut merupakan data Bina keluarga balita (BKB).

Tabel 2. 86
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB di Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019

INDIKATOR	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	Anggota	510	575	628	661	981
Jumlah anggota kelompok BKB	Anggota	597	653	714	1,541	2,217

INDIKATOR	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	85.43	88.06	87.96	42.89	44.25

Sumber : BPPPAPPKB Kota Tarakan, 2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dalam kurun waktu 2015 – 2019 cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber KB menurun dimana di tahunn 2015 cakupan anggota bina keluarga balita ber-KB 85,43 % menurun menjadi 44,25% di tahun 2019 , langkah-langkah pemerintah untuk membina anggota bina keluarga sebagai berikut : Melakukan analisis kemampuan, kondisi dan potensi wilayah, Menyusun rencana kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita ber-KB yang dituangkan dalam RPJMD, Menyusun rencana kerja SKPD-KB yang meliputi , Melakukan analisa data keluarga Balita setiap tahun, Melatih kader BKB, Membentuk dan mengembangkan kelompok BKB, Menyediakan sarana, prasarana dan materi pembinaan kegiatan kelompok BKB, Operasional Kelompok Kegiatan (POKTAN) BKB, Membina kader BKB, Temu kreativitas kader BKB;

- **Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB**

Program Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah kegiatan bersama yang dilakukan oleh kader dengan orangtua atau anggota keluarga lainnya yang mempunyai anak dan remaja. Sasaran langsung, adalah setiap keluarga yang memiliki anak usia 7-21 tahun. Adapu sasaran tidak langsung yaitu Perorangan, yaitu pendidik/ guru, pemuka agama, pemuka adat, pimpinan arganisasi profesi, organisasi social kemasyarakatan, pemuda/ wanita, para ahli dari berbagai bidang ilmu yang terkaitInstitusi/ lembaga pemerintah dan non pemerintah, seperti organisasi wanita, sekolah, dan LSOM, Pengelola/ pelaksana Pokja. Berikut merupakan data Bina keluarga remaja (BKB) dalam Tabel berikut.

Tabel 2. 87
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB di Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019

INDIKATOR	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	Anggota	51	56	61	30	155
Jumlah anggota kelompok BKR	Anggota	77	84	92	83	409
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	66.23	66.67	66.30	36.14	37.90

Sumber: BPPPAPPKB Kota Tarakan, 2020

Berdasarkan tabel di atas bahwa cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber KB sepanjang tahun 2015 – 2019 cenderung menurun dimana angka di tahun 2015 berada di angka 66,23 Persen dan di tahun 2019 berada di angka 37,90 persen. Oleh

Karena itu pemerintah perlu menerapkan Nilai-nilai moral sebagai dasar dari norma yang dianut keluarga perlu diberikan kepada remaja, penerapannya dilaksanakan melalui 8 fungsi keluarga, agar remaja berprilaku baik sesuai dengan norma-norma dalam keluarga maupun masyarakat.

- **Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB**

BKL adalah kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Adapun tujuan Bina Keluarga Lanjut Usia (BKL), untuk meningkatkan kesejahteraan lansia melalui kepedulian dan peran keluarga dalam mewujudkan lansia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, produktif dan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Berikut merupakan data Bina keluarga remaja (BKB) dalam Tabel berikut:

Tabel 2. 88
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKB) Ber-KB Di Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019

INDIKATOR	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	Anggota	94	103	113	99	148
Jumlah anggota kelompok BKL	Anggota	199	214	234	457	632
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	47.24	48.13	48.29	21.66	23.42

Sumber: BPPPAPPKB Kota Tarakan, 2020

Berdasarkan tabel di atas bahwa cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB menunjukan penurunan setiap tahunnya, dimana Tahun 2015 sebesar 47,24% menurun menjadi 23,42% di tahun 2019. Hal ini menunjukan bahwa peran Pemerintah Kota Tarakan aktif memberdayakan lansia melalui program senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis dan program keagamaan melalui selawat rutin di setiap lingkungannya.

- **Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa**

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK -Remaja) adalah suatu wadah kegiatan program PKBR yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dankonseling tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja serta kegiatan – kegiatan penunjang lainnya. Tujuan umum dari PIK Remaja adalah untuk memberikan informasi PKBR, Pendewasaan Usia Perkawianan, Keterampilan Hidup (Life Skills), pelayanan konseling dan rujukan PKBR. Disamping itu,

juga dikembangkan kegiatan - kegiatan lain yang khas dan sesuai minat dan kebutuhan remaja untuk mencapai Tegar Remaja dalam rangka tegar Keluarga guna mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera. Berikut merupakan data Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa dalam Tabel di atas.

Tabel 2. 89
Cakupan Data Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Di Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019

INDIKATOR	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah PIK R/M	Anggota	16	17	20	19	17
Jumlah Kecamatan	Kecamatan	4	4	4	4	4
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen	400	425	500	475	425

Sumber: BPPPAPPKB Kota Tarakan, 2020

Berdasarkan tabel di atas bahwa cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa cenderung meningkat, hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Tarakan bersama BKKBN Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan program GenRe di kalangan Renaja dan Mahasiswa baik di tingkat di tingkat sekolah maupun tingkat perguruan tinggi di Kota Tarakan. Tahun 2013 ada 125 persen pembentukan PIK R/M atau ada 5 kelompok dan sampai tahun 2017 pembentukan PIK R/M sudah membentuk 20 kelompok di 4 (empat) kecamatan.

h. Urusan Perhubungan

Perhubungan merupakan aspek penting dalam pembangunan. Semakin baik perhubungan suatu daerah, maka semakin baik pula konektifitas daerah dalam banyak aspek yang kemudian akan merangsang penguatan ekonomi daerah.

Sebagai pintu gerbang utama Provinsi Kalimantan Utara sekaligus wilayah transit, maka bidang perhubungan di Kota Tarakan menjadi salah satu pondasi vital dalam merencanakan pembangunan daerah. Titik tolak perhubungan di Kota Tarakan adalah transportasi udara dimana Kota Tarakan merupakan satu-satunya wilayah di Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki bandar udara berstatus bandara internasional dan pelabuhan.

i. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Transportasi umum dalah layanan angkutan penumpang oleh sistem perjalanan kelompok yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum, biasanya dikelola sesuai jadwal, dioperasikan pada rute yang ditetapkan, dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanan. Sebagian besar sistem transportasi umum berjalan di sepanjang rute tetap dengan titik pemberhentian dengan jadwal yang telah diatur sebelumnya. Angkutan umum terdiri dari angkutan umum dalam kota dan antar kota. Angkutan dalam

kota antara lain angkutan kota, taxi, ojek dan bis. Angkutan umum antar kota terdiri dari pesawat, speed, kapal dan ferry.

Arus lalu lintas pesawat di bandar udara Juwata Tarakan dalam kurun waktu tahun 2015-2019 cenderung menurun. Arus penumpang pada tahun 2015 sebanyak 1.259.321 penumpang. Arus penumpang mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya, yang datang maupun yang pergi. Pada tahun 2019 arus penumpang sebanyak 468.104 penumpang.

Gambar 2. 57
Perkembangan Arus Lalu Lintas Penumpang Bandara Juwata Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019

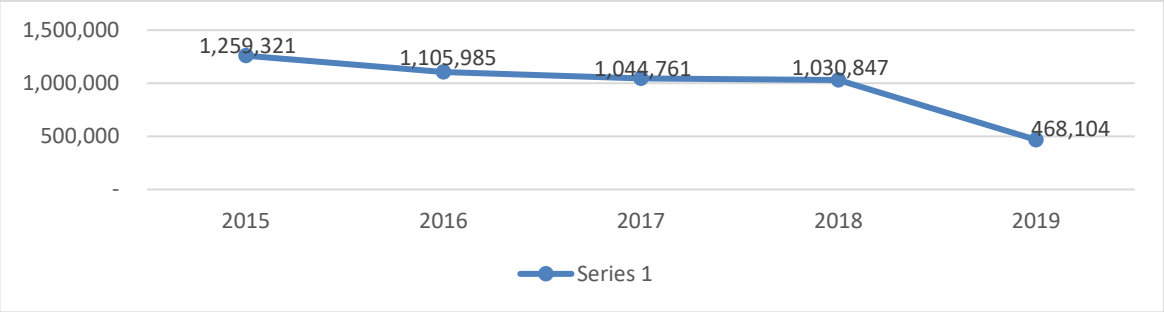

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tarakan, 2020

Pelabuhan laut juga menjadi jalur transportasi di Kota Tarakan, karena menjadi pintu masuk dari beberapa provinsi dan kabupaten/kota lainnya. Dalam kurun waktu 2015-2019 jumlah arus penumpang mengalami kenaikan hal ini disebabkan oleh banyaknya arus penumpang dari dan ke ibu kota provinsi Tanjung selor. Dengan beroperasinya pelabuhan ferry yang berada di juata laut yang melayani pelayaran ke Sulawesi maka jumlah arus penumpang cenderung meningkat pada tahun 2015–2019 dari 4.183 menjadi 16.881 penumpang. Arus penumpang di pelabuhan laut Malundung mengalami penurunan dari tahun ke tahun namun tidak terlalu signifikan, dimana tahun 2013 terdapat 123.884 penumpang dan menurun 112.704 penumpang pada tahun 2017. Hal ini dimungkinkan adanya peralihan penumpang dengan menggunakan transportasi udara.

Tabel 2. 90
Arus Penumpang Di Pelabuhan Laut Di Kota Tarakan Tahun 2015-2019 (orang)

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
Speed Boat (Tengkayu Satu)	-	837.585	976.702	967.352	987.315
Kapal Ferry (Pelabuhan Juata Laut)	4.183	-	13.198	20.826	16.881
Kapal Laut (Pelabuhan Malundung)	128.383	115.636	112.704	Data Belum Tersedia	Data Belum TErsedia

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tarakan, 2020

j. Rasio Ijin Trayek

Rasio ijin trayek ijin trayek angkutan kota menunjukkan jumlah transportasi umum terhadap jumlah penduduk. Rasio ijin trayek di kota Tarakan selalu mengalami penurunan dari tahun 2014 – 2016, dari 6,94 % menjadi 1,08 %. Angkutan umum di Kota Tarakan memang terhitung sedikit, dikarenakan saat ini banyak masyarakat yang memiliki transportasi pribadi

Gambar 2. 58
Rasio Ijin Trayek Kota Tarakan Tahun 2014-2016

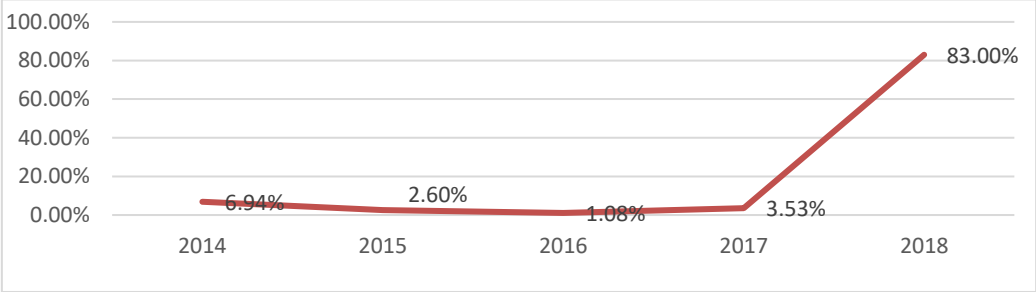

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tarakan, 2020

k. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah Uji KIR angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Uji KIR angkutan umum dilakukan bebrapa pengujian dan dilakukan setiap tahun. Pengujian dilakukan untuk control terhadap angkutan umum, agar penumpang merasa nyaman atas pelayanan angkutan umum.

Gambar 2. 59
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kota Tarakan Tahun 2015-2019

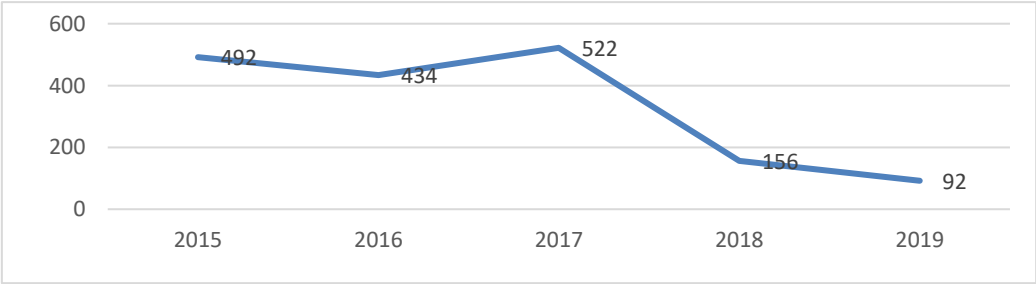

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tarakan, 2020

Setiap tahunnya angkutan yang melakukan uji KIR cenderung menurun. Sekitar 492 angkutan umum pada tahun 2015 dan mengalami penurunan yang begitu besar pada tahun 2019 yakni 92 angkutan umum. Hal ini dapat disebabkan karena semakin berkurangnya angkutan umum yang beroperasi di Kota Tarakan.

l. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Kota Tarakan merupakan pintu gerbang sekaligus merupakan simpul distribusi barang dan orang bagi wilayah Kalimantan Utara. Oleh karena itu, sarana dan prasarana transportasi Kota Tarakan untuk menghubungkan wilayah ini dengan daerah luar pelabuhan laut terus dikembangkan. Fasilitas tersebut terdiri dari bandara Internasional Juata, Pelabuhan Malundung, Pelabuhan Tengkayu I sampai III, dan Pelabuhan Ferry Juata Laut. Upaya perpanjangan landasan pacu Bandara Juata sedang ditingkatkan dari 1.850 meter menjadi 2.500 meter. Diharapkan nantinya bandara ini akan mampu didarati pesawat Boeing 737 seri 400 dan 500, atau Airbus seri A-320. Di sisi lain, pengembangan Pelabuhan Malundung ditingkatkan dengan pembangunan dermaga 130x25 meter persegi dan 340x10 meter persegi lengkap dengan aksesoris dermaga yang diperlukan.

m. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Kepemilikan KIR angkutan umum merupakan pengendalian terhadap angkutan umum yang dapat beroperasi. Setiap tahunnya kepemilikan pemilik angkutan umum yang melakukan uji KIR mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Dari 29,58 persen sampai 10,71 persen pada tahun 2019. Penurunan kepemilikan uji KIR ini dimungkinkan bukan karena ketidaktaatan pemilik angkutan umum, namun dikarenakan berkurangnya jumlah angkutan umum yang beroperasi di Kota Tarakan.

Gambar 2. 60
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum
Kota Tarakan Tahun 2015-2019

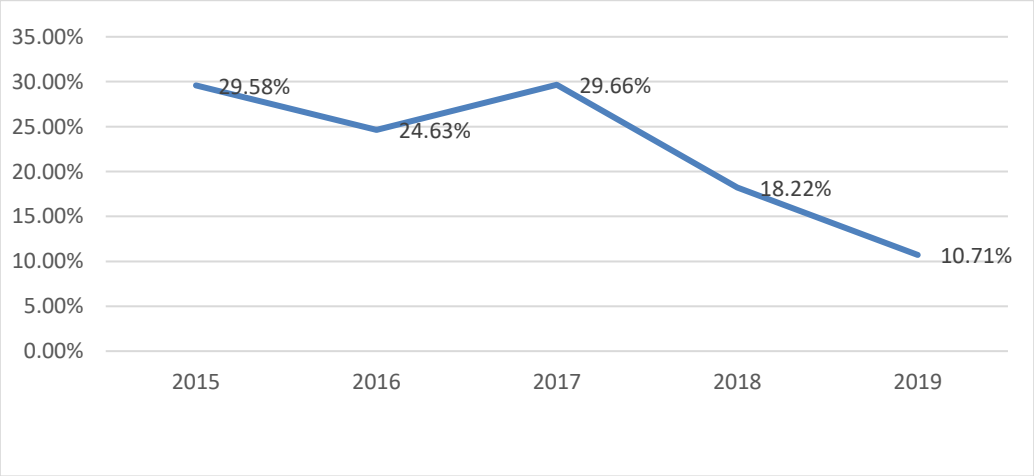

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tarakan, 2020

n. Pemasangan Rambu-Rambu

Rambu-rambu lalu lintas diperlukan untuk pengaturan ketertiban berkendara oleh pengguna jalan di Kota Tarakan. Pemasangan rambu lalu lintas sebagai petunjuk di

beberapa jalan kota Tarakan. Pada tahun 2015 terpasang 114 unit, 75 unit ditahun 2016 dan semakin menurun di tahun 2017 sebanyak 60 unit. Pada tahun 2018 tidak ada pemasangan rambu lalu lintas dan pada tahun 2019 terpasang 16 unit rambu lalu lintas. Penurunan pemasangan rambu ini dikarenakan, kekurangaan pendanaan pada kegiatan pemasangan rambu lalu lintas ini. Namun hal ini tidak mengurangi ketaatan masyarakat dalam berkendara.

Gambar 2. 61
Pemasangan Rambu-Rambu Kota Tarakan Tahun 2015-2019

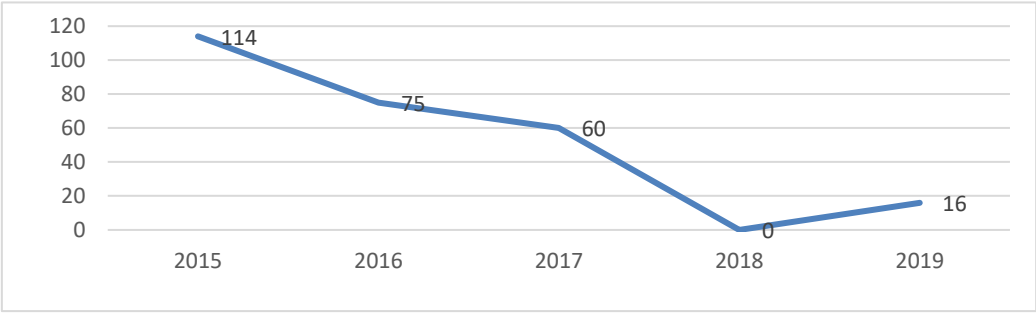

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tarakan, 2020

- **Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan**

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan merupakan perbandingan antara panjang jalan secara keseluruhan dengan jumlah kendaraan yang terdapat di suatu daerah. Kondisi rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Tarakan jika dilihat dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan. Hal tersebut dikarenakan pembangunan ruas jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengimbangi jumlah kendaraan yang masuk.

Gambar 2. 62
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kota Tarakan Tahun 2013-2017

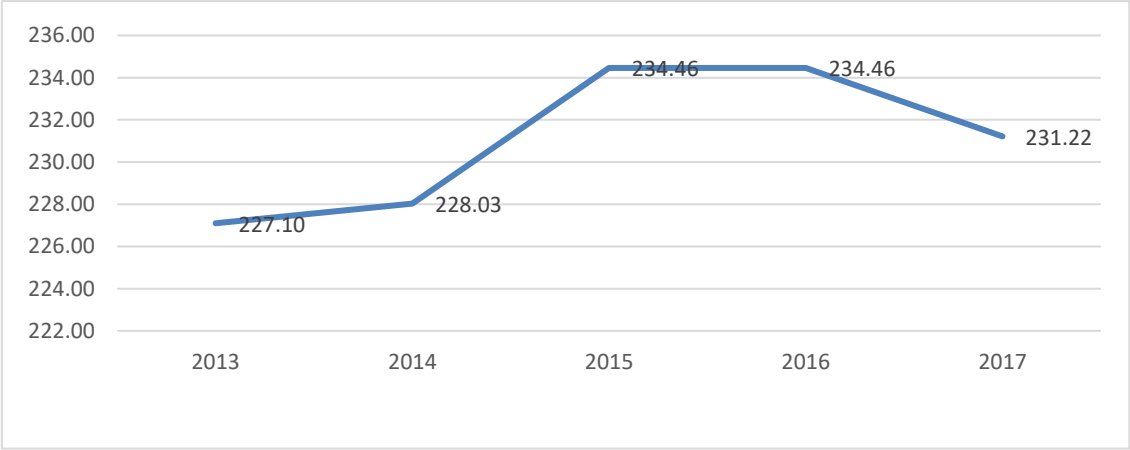

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tarakan, 2018

o. Urusan Komunikasi dan Informatika

Kebutuhan komunikasi dan informasi menjadi kebutuhan utama masyarakat pada era globalisasi ini. Hal ini membuat masyarakat mengandalkan teknologi dan informasi dalam kesehariannya dalam berbagai aktifitasnya termasuk dalam pembangunan.

p. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Ketersediaan jaringan telekomunikasi yang andal menjadi faktor utama pendukung pengembangan ekonomi dan pendidikan di daerah. Terlebih lagi, saat ini, pelaksanaan kegiatan administrasi dan transaksi keuangan telah bergeser ke arah digitalisasi upaya pemerataan layanan telekomunikasi di Kota Tarakan tidak mendapatkan masalah yang berarti. Kesiapan infrastruktur pendukungnya jauh lebih mudah diperoleh.

Kualitas jaringan layanan telekomunikasi juga perlu ditingkatkan dengan melakukan peningkatan kualitas jaringan internet *broadband* dan *refarming* spektrum frekuensi radio. Tujuannya untuk mengatasi tingkat kepadatan jaringan *mobile* yang terlalu padat, mengingat jika menginginkan layanan data yang berkualitas baik maka ukuran *bandwith* harus memadai.

Gambar 2. 63
Cakupan Layanan Telekomunikasi Kota Tarakan Tahun 2015-2019

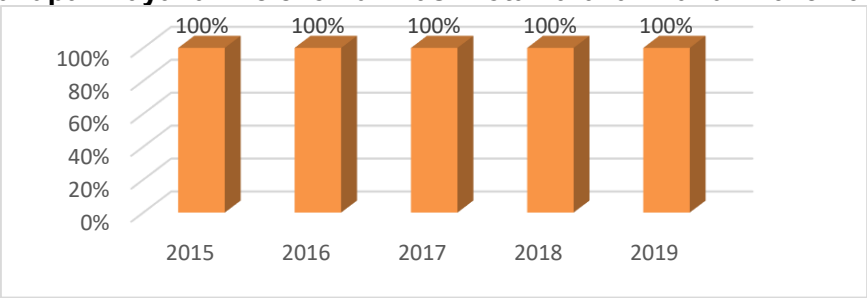

Sumber: DKISP Kota Tarakan, 2020

Untuk Kota Tarakan layanan telekomunikasi telah dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tahun 2013 tercatat ada 78 BTS di Kota tarakan yang terdiri dari Telkomsel (31 BTS), Indosat (18 BTS), XL (8 BTS), Flexi (5BTS), Protelindo (8 BTS), Sosulindo (8 BTS) dan di tahun 2014 PT.Tower Bersama membangun 11 BTS. BTS berfungsi menjembatani perangkat komunikasi pengguna dengan jaringan menuju jaringan lain sehingga layanan telekomunikasi kita menjadi lancar.

q. Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon

Telepon seluler (HP) merupakan perangkat telekomunikasi yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon kabel, namun dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungan dengan jaringan telekomunikasi kabel. Di era globalisasi, HP sangat penting untuk memperlancar hubungan dengan orang lain untuk

kepentingan seseorang yang mendadak maupun tidak.

Gambar 2. 64
Persentase Anggota Rumah Tangga 5 Tahun Ke Atas Yang Menggunakan HP Kota Tarakan 2015-2019

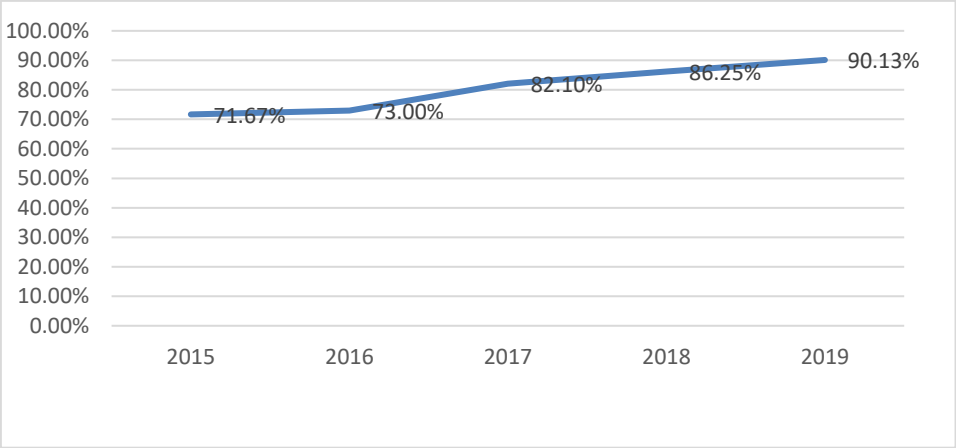

Sumber: Statistik Kesejahteraan Kota Tarakan, 2015-2020

Berdasarkan tabel di atas, dalam kurun waktu 2015-2018, persentase penduduk yang menggunakan hp/telepon meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, persentase penduduk yang menggunakan hp/telepon sebesar 90,13%, meningkat dari tahun 2015 sebesar 71,67%. Sebagai salah satu produk perkembangan teknologi, telepon/HP memiliki banyak manfaat diantaranya mempercepat laju komunikasi dan informasi, dapat menyimpan banyak file dan pesan, dapat digunakan sebagai bahan hiburan dan sebagai media diskusi karena banyak media chat atau pesan yang menyediakan diskusi grup.

- **Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet**

Proporsi rumah tangga dengan akses internet merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhapat internet terhadap jumlah rumah tangga secara keseluruhan, dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan masyarakat terhadap teknologi terutama untuk mengakses komunikasi dan informasi yang dapat bermanfaat dalam mendukung upaya pembangunan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang memiliki akses internet, maka semakin banyak rumah tangga yang memanfaatkan teknologi informasi dalam hal ini akses internet di kehidupan sehari-hari.

Gambar 2. 65
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Kota Tarakan Tahun 2015-2019

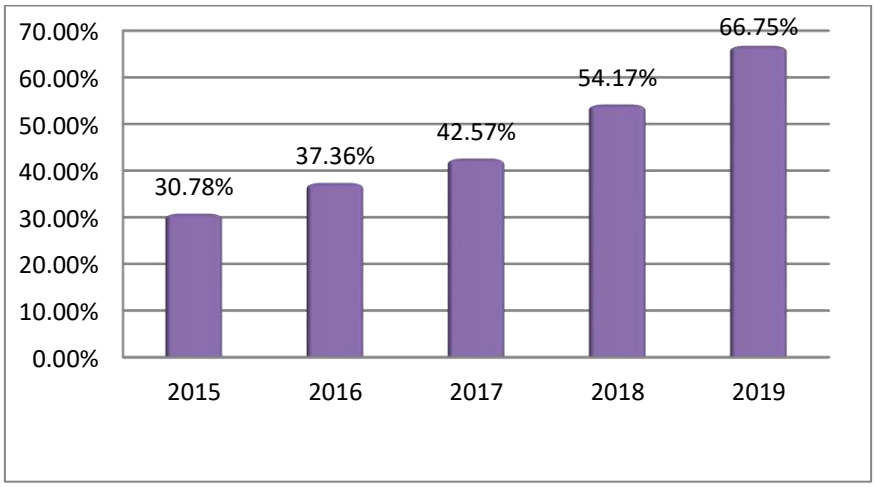

Sumber: Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tarakan, 2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa proporsi rumah tangga di Kota Tarakan dengan penggunaan akses internet dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Internet sudah menjadi kebutuhan dasar di masyarakat Kota Tarakan. Saat ini perkembangan teknologi informasi berkembang tanpa batas. Dewasa ini dunia Internet begitu populer dikalangan masyarakat. Memang adanya teknologi internet banyak merubah cara kerja hampir disemua bidang kehidupan. hampir setiap detik kita disibukan untuk berselancar menggunakan jaringan Internet baik itu untuk mencari informasi, komunikasi atau sekedar untuk hiburan.

- **Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi**

Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Hampir di setiap rumah tangga di Kota Tarakan memiliki komputer pribadi baik itu bentuk PC, Laptop atau Notebook. Berdasarkan tabel dibawah terlihat bahwa dari tahun 2015-2017 terjadi peningkatan atas penggunaan komputer pribadi pada rumah tangga di Kota Tarakan kemudian menurun pada tahun 2015-2019.

Gambar 2. 66
Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi
Kota Tarakan Tahun 2015-2019

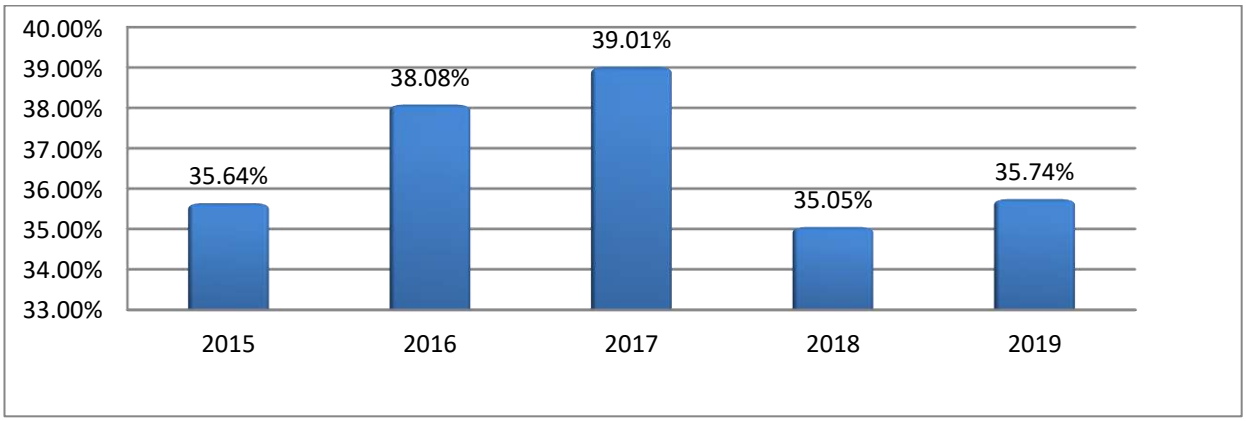

Sumber: DKISP Kota Tarakan, 2020

- **Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

Salah satu penunjang perekonomian masyarakat, dalam perekonomian mikro (usaha kecil menengah) adalah koperasi yang merupakan wadah kegiatan produktif masyarakat dalam perekonomian rakyat. Untuk itu, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi mikro maka kapasitas koperasi perlu dibangun.

- **Persentase Koperasi Aktif**

Koperasi merupakan salah satu sarana perekonomian yang difungsikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kalangan menengah ke bawah. Pentingnya fungsi koperasi ditunjukkan melalui peranannya dalam mendukung usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha kecil mikro menengah atau informal sebagai bentuk perekonomian rakyat yang mampu bertahan ketika usaha formal tidak mampu memenuhi lapangan perkerjaan. Persentase koperasi aktif di Kota Tarakan selama tahun 2015-2019 cenderung fluktuatif. Persentase koperasi aktif yang paling tinggi ialah pada tahun 2018 yaitu sebesar 61,54%, sedangkan pada tahun 2019 turun menjadi 54,31%.

Gambar 2. 67
Persentase Koperasi Aktif Kota Tarakan Tahun 2015-2019

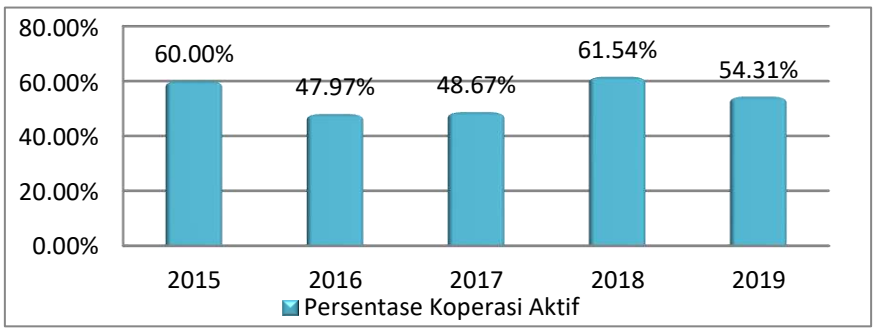

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Tarakan, 2020

- **Persentase Usaha Mikro dan Kecil**

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan usaha informal yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak ada hubungannya dengan usaha pada level di atasnya (bukan berupa cabang). Keberadaan UMKM membuka kesempatan kerja yang lebih besar bagi masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Perbedaan usaha mikro dan usaha kecil dengan usaha menengah hanya terletak pada nilai aset dan omzetnya. Usaha mikro dan kecil juga merupakan salah satu sektor usaha dalam perekonomian yang potensial, oleh karena itu sektor ini perlu diperhatikan dan dikembangkan.

Jumlah usaha kecil dan mikro di Kota Tarakan berkembang pesat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 usaha mikro dan kecil sejumlah 2.110 unit, kemudian meningkat menjadi 3.154 unit pada tahun 2016, lalu meningkat menjadi 5.728 unit pada tahun 2017, kemudian terus meningkat menjadi 5.566 unit pada tahun 2018 bahkan terus bertambah mencapai 6.577 unit pada tahun 2019.

r. Urusan Penanaman Modal

Geliat pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh besarnya perkembangan investasi disuatu daerah. Untuk itu berbagai cara perlu dilakukan untuk menarik investasi masuk.

- **Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)**

Penanaman modal merupakan salah satu sumber biaya pembangunan yang potensial di suatu wilayah. Dengan adanya penanaman modal berskala nasional, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri diharapkan mampu memaksimalkan potensi-potensi perekonomian wilayah dan mampu menstimulasi perkembangan pada sektor-sektor lainnya.

Secara umum, dalam kurun waktu 2015-2019, jumlah investor berskala nasional cenderung meningkat. Pada tahun 2016, terjadi peningkatan jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) yang sangat besar, hal ini dikarenakan pada tahun 2016, pihak kontraktor yang melaksanakan PL untuk kegiatan pemerintah dikategorikan sebagai investor sedangkan untuk tahun-tahun lainnya, kontraktor yang melaksanakan PL tidak dikategorikan sebagai investor. Pada tahun 2019 juga terjadi lonjakan peningkatan jumlah investor hal ini disebabkan adanya aplikasi OSS yang menyebabkan realisasi dihitung mulai awal lagi (investor baru dan lama mendaftar ulang memlalui aplikasi OSS)

Gambar 2. 68
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kota Tarakan Tahun 2015-2019

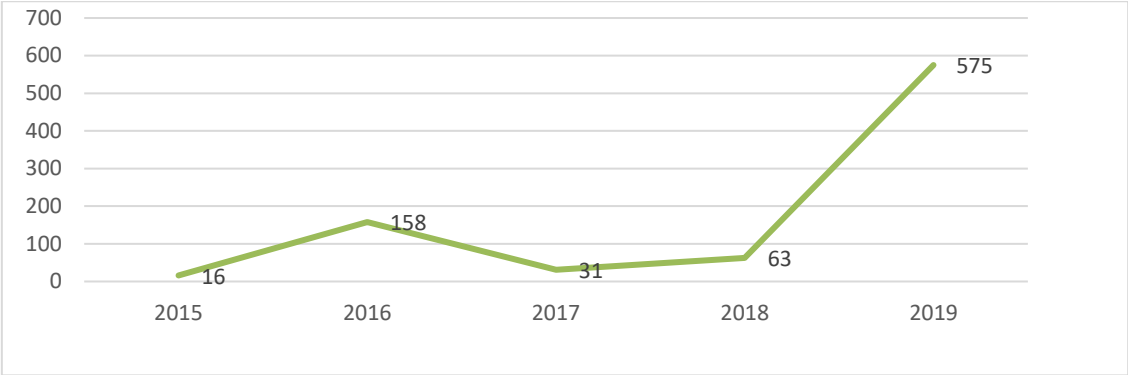

Sumber : DPMPTSP Kota Tarakan, 2020

- **Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)**

Dalam kurun waktu tahun 2015-2019, perkembangan nilai investasi berskala nasional meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) meningkat 297,48% dari tahun 2018, yaitu sebesar Rp 714.513.744.160, hal ini juga dikarenakan jumlah investor meningkat signifikan dari 63 investor pada tahun 2018 menjadi 575 investor pada tahun 2019. Pada tahun 2016, nilai Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) sangat besar, hal ini dikarenakan pada tahun 2016, nilai kegiatan PL untuk kegiatan pemerintah dikategorikan sebagai investasi, sedangkan untuk tahun-tahun lainnya, PL tidak dikategorikan sebagai investasi.

Tabel 2. 91
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Tahun	Nilai Investasi (Rp.)	Kenaikan/Penurunan (Rp.)	Kenaikan/Penurunan (%)
2015	65.300.019.102	3.230.595.471	5,20
2016	1.009.866.899.005	944.566.879.903	1.446,50
2017	49.878.705.043	-959.991.193.962	-95,06
2018	179.309.346.960	129.430.641.917	259,49
2019	714.513.744.160	535.204.397.200	297,48

Sumber : DPMPTSP Kota Tarakan, 2020

- **Rasio Daya Serap Tenaga Kerja**

Pertumbuhan jumlah perusahaan maupun nilai investasi PMA dan PMDN diharapkan memberikan efek yang positif terhadap perekonomian penduduk. Salah satu efek positif tersebut dapat dilihat dari segi peningkatan rasio daya serap tenaga kerja. Rasio daya serap tenaga kerja merupakan perbandingan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN terhadap jumlah seluruh PMA/PMDN.

Rasio daya serap tenaga kerja pada perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencerminkan besar kecilnya

daya tampung proyek investasi PMA/PMDN dalam menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Semakin besar rasio daya serap PMA/PMDN semakin besar pula jumlah tenaga kerja suatu daerah yang dapat terserap pada perusahaan tersebut.

Pada tahun 2019, rasio daya serap tenaga kerja adalah 8, dimana rata-rata jumlah tenaga kerja yang terserap untuk setiap PMA/PMDN yang ada di Kota Tarakan adalah 8 tenaga kerja. Capaian ini cenderung menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Dibandingkan tahun 2015, jumlah PMA/PMDN pada tahun 2017 meningkat yaitu sebesar 23 PMA/PMDN. Namun, jumlah tenaga kerja yang terserap justru menurun sehingga rasio daya serap tenaga kerja pun menurun.

Tabel 2. 92
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Di Kota Tarakan Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja Bekerja Pada Perusahaan PMA/PMDN	Jumlah Seluruh PMA/PMDN	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
2015	382	16	24
2016	1713	158	11
2017	289	31	9
2018	647	63	10
2019	4.526	575	8

Sumber : DPMPTSP Kota Tarakan, 2020

s. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Kepemudaan dan olahraga merupakan bagian dari urusan pembangunan yang mengedepankan kreativitas generasi penerus bangsa. Oleh karena itu aspek pemuda dan olah raga tidak boleh dikesampingkan dalam pembangunan.

- **Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif**

Organisasi kepemudaan adalah lembaga yang menghimpun segenap potensi anak muda baik mahasiswa maupun anak sekolah yang masuk kategori pemuda bahkan mereka yang tidak menjadi anak terdidik. Pada tahun 2019, persentase organisasi pemuda yang aktif di Kota Tarakan sebesar 50%. Hal ini menunjukkan setengah dari semua organisasi pemuda yang ada di Kota Tarakan adalah aktif.

- **Persentase Wirausaha Muda**

Wirausaha merupakan salah satu sektor bisnis yang penting, bersama dengan korporasi, koperasi, serta finansial dan perbankan. Saat ini yang digerakkan untuk menjadi wirausaha adalah yang usianya masih cukup muda, dengan alasan anak muda memiliki banyak inovasi dan tidak takut untuk mencoba hal-hal baru. Pada tahun 2017-

2019 persentase wirausaha muda mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua wirausaha di Kota Tarakan adalah wirausaha muda.

- **Cakupan Pembinaan Olahraga**

Dalam pembinaan olahraga, Pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan penyandang dana pembinaan olahraga prestasi, sedangkan KONI sebagai pihak yang menjalankan pembinaan olahraga tersebut. Hal ini tertuang dalam Perpres Nomor 22 Tahun 2010 mengenai Program Satlak Prima. Cakupan pembinaan olahraga merupakan perbandingan jumlah cabang olahraga yang dibina terhadap jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar dikali 100%. Pada Tahun 2019, cakupan pembinaan di Kota Tarakan mencapai 50%.

- **Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi**

Sertifikasi bagi pelatih menjadi penting karena tanpa sertifikasi resmi dari badan organisasi olahraga yang bersangkutan atau Kemenpora RI, pelatih bisa terkendala untuk membina para atletnya yang tampil di kejuaraan resmi level nasional atau internasional. Cakupan pelatih yang bersertifikasi merupakan perbandingan jumlah pelatih bersertifikasi terhadap jumlah seluruh pelatih, dikali 100%. Pada tahun 2019, cakupan pelatih yang bersertifikasi di Kota Tarakan sudah mencapai 50%. Hal ini menunjukkan separuh dari seluruh pelatih di Kota Tarakan sudah bersertifikasi.

- **Jumlah Atlet Berprestasi**

Jumlah atlet berprestasi merupakan jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun. Pada tahun 2019, terdapat 30 atlet berprestasi di Kota Tarakan.

- **Jumlah Prestasi Olahraga**

Jumlah prestasi olahraga merupakan jumlah prestasi cabang olah raga yang dimenangkan dalam satu tahun. Pada tahun 2019, terdapat 10 prestasi cabang olah raga yang dimenangkan.

t. Urusan Statistik

Di Kota Tarakan terdapat instansi vertikal yang khusus menangani penyediaan data dan informasi pembangunan, yakni Badan Pusat Statistik Kota Tarakan. Setiap tahun, Badan Pusat Statistik Kota Tarakan mempublikasikan buku Kota Tarakan Dalam Angka dalam upaya perwujudan pembangunan daerah.

u. Urusan Kebudayaan

Kebudayaan adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Kebudayaan Kota Tarakan cukup beranekaragam terutama kebudayaan Tidung yang masih terjaga samapai sekarang. Program budaya yang dilaksanakan untuk mendukung khususnya sektor pariwisata.

- **Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya**

Penyelenggaraan festival seni berupa penyelenggaraan festival budaya Irau Tengkayu dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali. Festival budaya Irau Tengkayu diselenggarakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Tarakan. Dalam kurun waktu 2015-2018, festival budaya ini telah diselenggarakan 2 kali kegiatan.

Gambar 2. 69
Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kota Tarakan Tahun 2014 – 2017

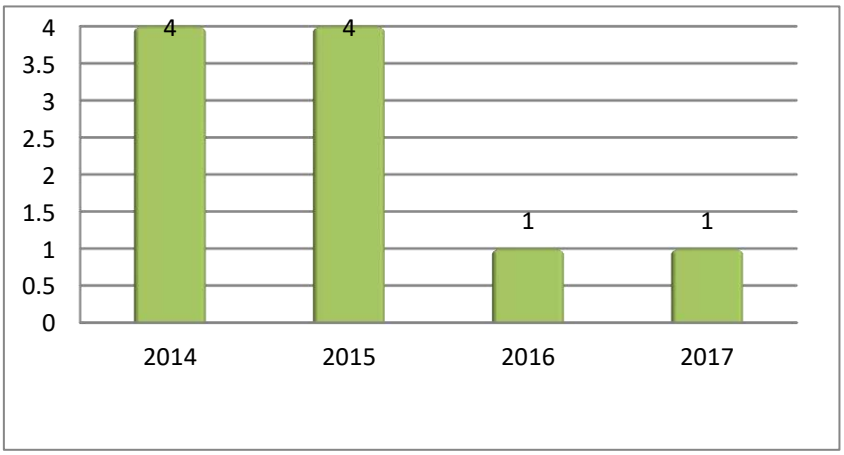

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, 2018

- **Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan**

Cagar Budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Kota Tarakan memiliki beragam peninggalan Cagar Budaya yang merefleksikan perjalanan panjang sejarah Kota Tarakan hingga terbentuk seperti sekarang. Cagar Budaya tersebut menjadi bukti fase perkembangan kota mulai dari masuknya Islam, tinggalan masa

kolonial Belanda, Jepang, dan juga tinggalan budaya yang terkait dengan Australia. Cagar Budaya adalah warisan budaya yang perlu dilestarikan sebab merupakan saksi fisik tumbuh dan berkembangnya Kota Tarakan. Pelestarian Cagar Budaya pada dasarnya tidak hanya sekedar melestarikan fisik bendanya, namun juga melestarikan nilai yang dikandung oleh Cagar Budaya tersebut. Kota Tarakan memiliki 32 situs dan kawasan cagar budaya yang sampai saat masih dilestarikan dengan baik. Walaupun demikian, jumlah ini hanya 9,5% dari total jumlah situs dan kawasan cagar budaya yang ada.

Gambar 2. 70
Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Kota Tarakan Tahun 2014 – 2017 (%)

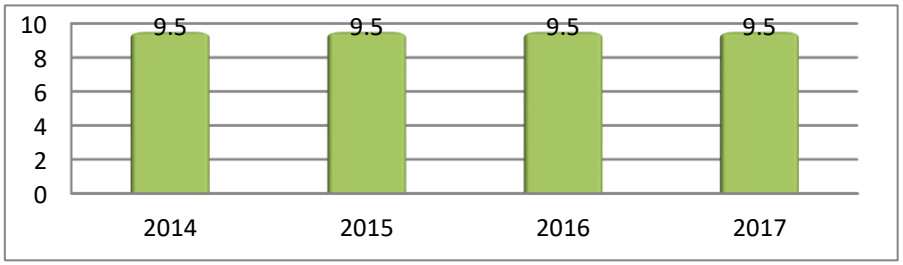

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, 2018

- **Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi**

Karya budaya merupakan sesuatu yang muncul akibat beberapa faktor seperti letak geografis, kebutuhan, hingga kepercayaan. Karya-karya budaya masa silam tidak semuanya tanggap zaman dalam artian mempunyai daya guna untuk memecahkan masalah-masalah kekinian. Karena itu ia patut ditepis mana yang tanggap dan mana yang sudah kedaluarsa. Untuk menilai kedaluarsa tidaknya suatu hasil budaya, tentu yang jadi ukurannya adalah kemampuan nilainya menjawab tantangan hari ini.

Revitalisasi karya budaya adalah kegiatan yang memungkinkan karya budaya lokal mampu menjawab tantangan jaman. Langkah ini merupakan tindak lanjut langkah pelestarian berupa inventarisasi karya budaya. Dalam kurun waktu 2014-2017, jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017, jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi sejumlah 40 karya budaya, meningkat dari tahun sebelumnya ejumlah 33 karya budaya.

Gambar 2. 71
Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi
Kota Tarakan Tahun 2014 – 2017

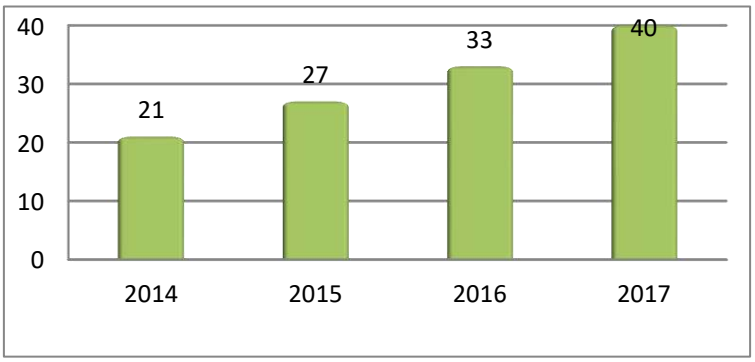

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, 2018

- **Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu**

Pada dasarnya pengelolaan cagar budaya harus dilakukan secara terpadu dan lintas sektoral. Secara internal, pengelolaan cagar budaya menggunakan konsep *"three in one"* yaitu konsep penelitian yang berwawasan pelestarian dan pemanfaatan, konsep pelestarian yang berwawasan pemanfaatan dan penelitian, serta konsep pemanfaatan yang berwawasan penelitian dan pelestarian. Sedangkan secara eksternal, ketiga lembaga pengelola cagar budaya arus memperhatikan kepentingan masyarakat yang akan dikelola oleh sektor-sektor lain yang terkait, seperti misalnya sektor pendidikan, pariwisata dan ekonomi kreatif, agama dan sebagainya. Oleh karena itu pengelolaan situs cagar budaya secara terpadu merupakan keniscayaan. Dalam kurun waktu 2014-2017, jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu di Kota Tarakan adalah sebesar 47 cagar budaya.

Gambar 2. 72
Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu
Kota Tarakan Tahun 2014 – 2017

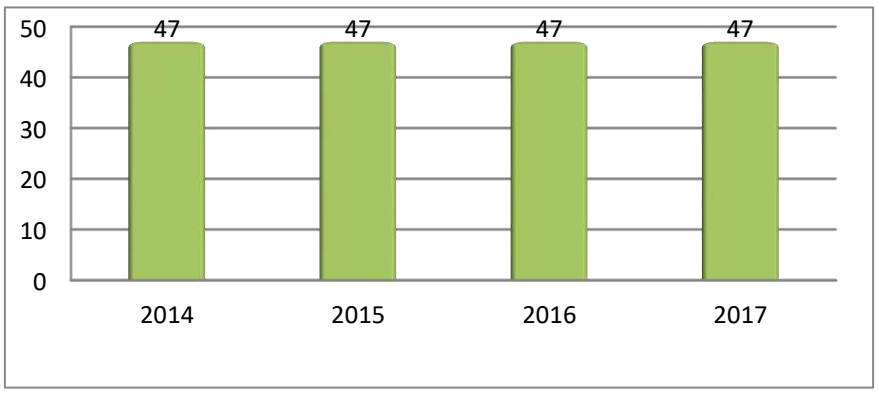

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, 2018

v. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

Perpustakaan memiliki peran sebagai penyebarluasan data dan informasi dari berbagai bidang keilmuan kepada masyarakat. Dengan kata lain, perpustakaan mempunyai peran dalam mencerdaskan masyarakat melalui bahan pustakanya. Semakin banyak masyarakat yang mengakses bahan pustaka maka semakin baik pula kinerja perpustakaan tersebut. Sedangkan Kearsipan berperan dalam mengelola arsip penting daerah.

- **Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun**

Perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Dalam kurun waktu tahun 2015-2019, jumlah pengunjung perpustakaan cenderung menurun. Pada tahun 2015, jumlah pengunjung perpustakaan mencapai 18.084 orang, meningkat secara signifikan pada tahun 2016 sebesar 23.497 orang. Pada tahun 2017 dan 2018 jumlah pengunjung masing-masing sebesar 22.772 orang dan 23.254 orang. Kemudian menurun pada tahun 2019 menjadi sebesar 13.659 orang.

Gambar 2. 73
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun
Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019

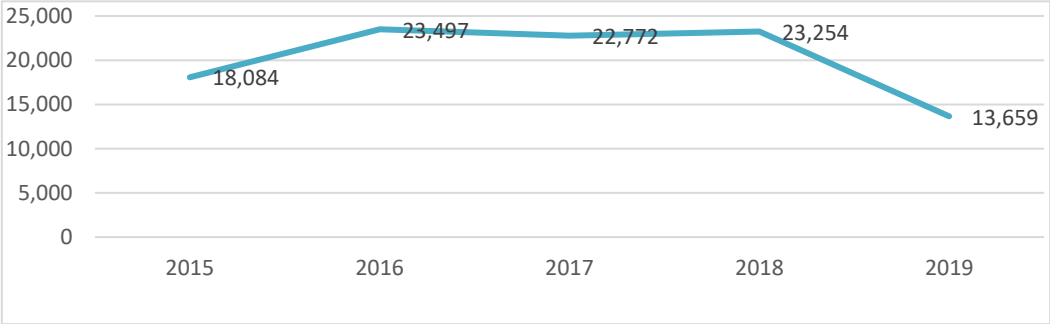

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Tarakan, 2020

- **Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah**

Selain dukungan sarana dan prasarana yang baik, jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan juga dapat menarik minat baca masyarakat dan kunjungan ke perpustakaan. Dalam kurun waktu tahun 2015-2019, jumlah koleksi buku mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, jumlah koleksi buku yang ada di Perpustakaan Daerah Kota Tarakan mencapai 44.241 buah, meningkat dari tahun 2015 sebesar 40.379 buku. Dengan meningkatnya jumlah koleksi buku diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan bahan bacaan yang diperlukan.

Gambar 2. 74
Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah
Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019

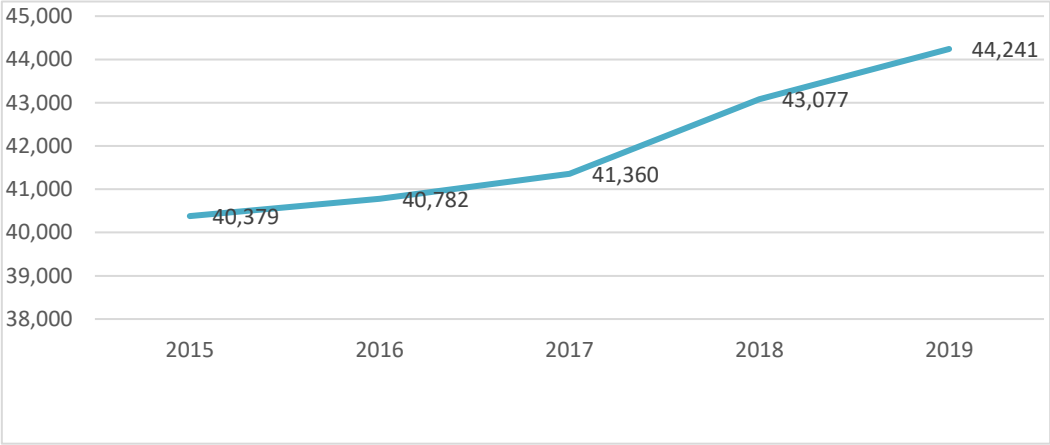

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Tarakan, 2020

- **Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk**

Rasio perpustakaan per satuan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah perpustakaan yang ada terhadap jumlah penduduk dikali 1000. Jumlah perpustakaan yang ada di Kota Tarakan pada tahun 2019 adalah 148 perpustakaan yang tersebar di sekolah-sekolah semua jenjang dan juga Taman Bacaan Masyarakat, sehingga bagi masyarakat sangat memudahkan untuk memperoleh layanan perpustakaan melalui perpustakaan maupun Taman Bacaan yang ada di wilayahnya. Dalam kurun tahun 2015-2019, rasio perpustakaan per satuan penduduk mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Gambar 2. 75
Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk
Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019

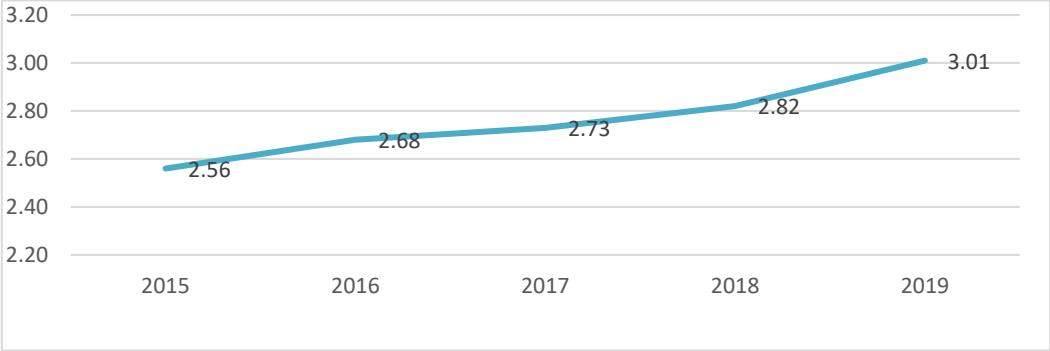

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Tarakan, 2020

- **Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun**

Jumlah pengunjung perpustakaan setiap tahun mengalami peningkatan, namun jumlah tersebut belum melebihi 50% dari jumlah penduduk yang ada di Kota Tarakan. Hal ini menandakan minat baca masyarakat masih kurang.

Gambar 2. 76
Persentase Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun
Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019

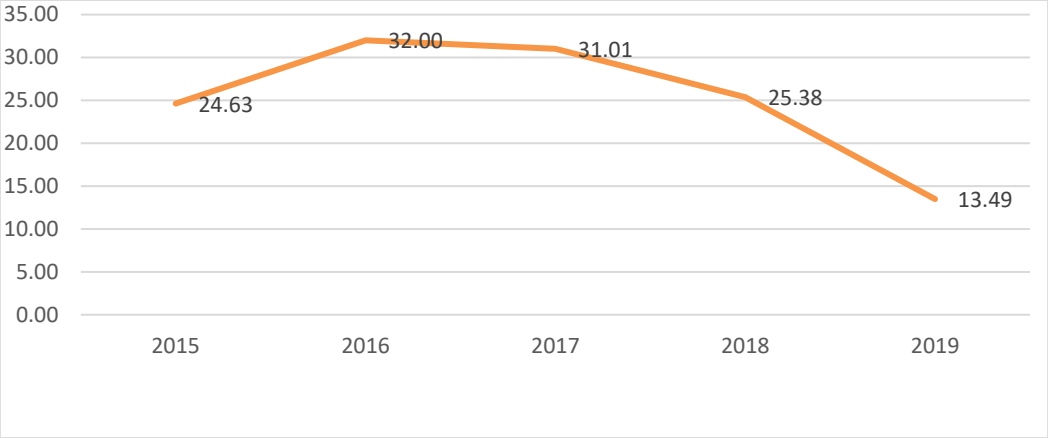

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Tarakan, 2020

- **Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan**

Koleksi judul buku yang ada diperpustakaan hingga tahun 2019 sebanyak 13.903 judul buku. Koleksi buku ini masih kurang memenuhi kebutuhan akan bahan bacaan bagi masyarakat terutama bagi mahasiswa di Kota Tarakan. Kedepannya jumlah koleksi buku ini akan terus ditambah.

Gambar 2. 77
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan
Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019

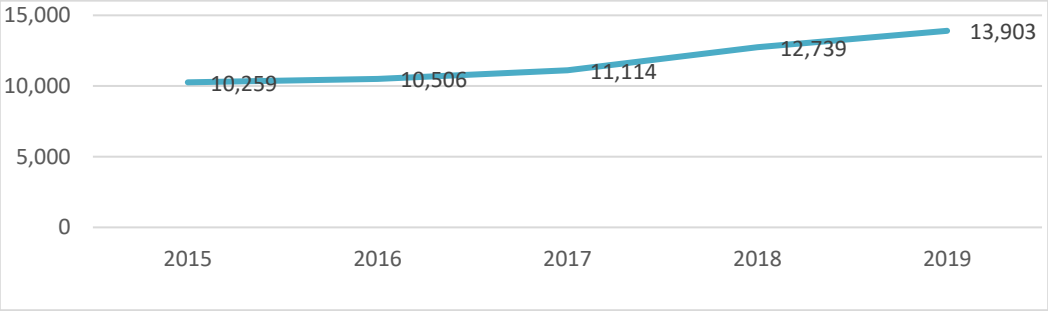

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Tarakan, 2020

- **Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat**

Pustakawan merupakan seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan termasuk membantu orang menemukan buku, majalah, dan informasi lain. Pada tahun 2015-2016, perpustakaan daerah memiliki 2 orang pustakawan yang mengelola buku-buku koleksi perpustakaan daerah. Namun pada tahun 2017, dua orang pustakawan tersebut dilantik menjadi pejabat struktural sehingga tidak ada lagi pustakawan.

Tabel 2. 93
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019

Tahun	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku
2015	2
2016	2
2017	-
2018	-
2019	-

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Tarakan, 2020

- **Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku**

Pengelolaan arsip secara baku sangat penting dilakukan agar dokumen yang ada terjamin keamanannya dan memudahkan apabila suatu saat membutuhkan arsip dokumen. Pada umumnya organisasi perangkat daerah sudah mulai melakukan pengelolaan arsip dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Mulai dari pencatatan dan penyimpanan arsip yang tertata dengan rapi. Selain itu pengelola kearsipan juga mendata dan menyimpan arsip-arsip yang berhubungan dengan sejarah dan budaya asli daerah dan sejarah NKRI. Secara umum, dalam kurun waktu 2015-2019, persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku mencapai 34,38%, meningkat secara signifikan dari tahun 2015 yang hanya 15,69%.

Gambar 2. 78
Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019

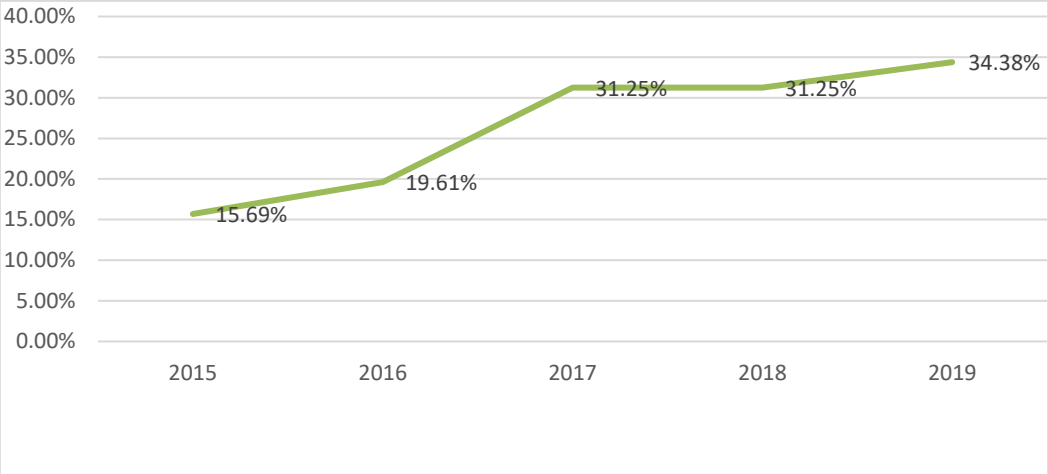

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Tarakan, 2020

- **Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan**

Peningkatan SDM pengelola kearsipan senantiasa dilaksanakan rutin pada setiap tahunnya karena belum semua SKPD dan Desa menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Dalam rangka pengelolaan arsip secara baku pemerintah daerah melakukan pembinaan secara intensif melalui sosialisasi, penyuluhan, dan monitoring kearsipan di lingkungan pemerintahan. Pada tahun 2017, jumlah pengelola kearsipan yang ada di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (DAPD) sebanyak 3 orang, namun pada tahun 2018-2019 tidak ada pengelola kearsipan yang menangani pengelolaan arsip-arsip yang disimpan di depo arsip.

Gambar 2. 79
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kota Tarakan Tahun 2014 – 2017

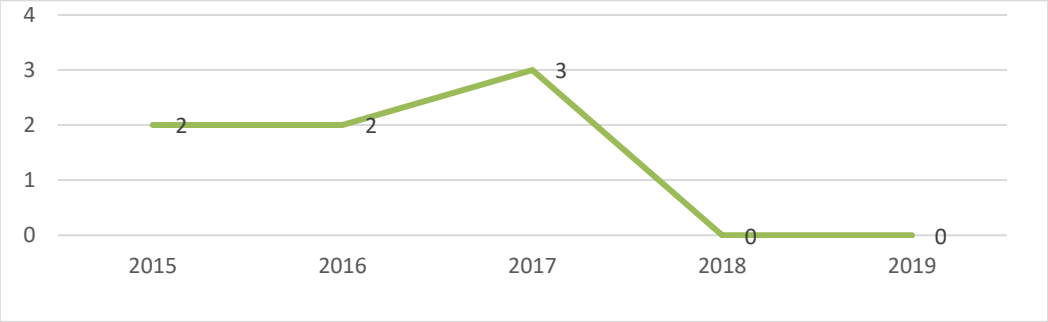

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Tarakan, 2020

2.1.3.3 Pelayanan Urusan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Berikut analisis singkat potensi yang dimiliki oleh Kota Tarakan.

a. Urusan Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor potensial yang perlu dikembangkan bagi perekonomian Kota Tarakan. Pembangunan sektor pariwisata diarahkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata, meningkatkan waktu kunjung wisatawan yang akhirnya meningkatkan PAD Kota Tarakan.

- **Kunjungan Wisata**

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Kunjungan wisata merupakan perbandingan antara jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Tarakan dan target jumlah wisatawan yang direncanakan,

Secara umum, capaian kunjungan wisata ke Kota Tarakan dalam kurun waktu 2015-2019 berfluktuatif. Pada tahun 2019, jumlah wisatawan yang berkunjung di Kota Tarakan sebesar 231.417 wisatawan, menurun 3,14% dari tahun sebelumnya sebesar 238.915 wisatawan atau 99,54% dari jumlah wisatawan yang ditargetkan yaitu sebesar 232.495.

Jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung di Kota Tarakan masih didominasi oleh wisatawan nusantara. Pada tahun 2019, wisatawan nusantara yang berkunjung ke Tarakan sebesar 224.210 wisatawan atau sebesar 96,89% dari keseluruhan wisatawan yang berkunjung ke Kota Tarakan. Walaupun demikian, jumlah ini menurun 3,26% dari tahun sebelumnya. Dalam kurun waktu 2015-2019, rata-rata pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan nusantara sebesar 2,18%.

Wisatawan mancanegara yang berkunjung di Kota Tarakan pada tahun 2019 sebesar 7.207 wisatawan, meningkat 0,8 % dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 7.150 wisatawan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tersebut, promosi wisata Kota Tarakan telah berhasil membuat wisatawan mancanegara untuk mengunjungi Kota Tarakan. Jumlah wisatawan ini meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung di Kota Tarakan mencapai 2.634 wisatawan dan pada tahun 2019 mencapai 7.207 merupakan jumlah tertinggi dalam kurun waktu tahun 2015-2019. Dalam kurun waktu

2015-2019, rata-rata pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar -30,29%.

Tabel 2. 94
Kunjungan Wisata di Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata/ Tahun(%)
1	Kunjungan Wisman	2.634	2.263	2.628	7.150	7.207	30,29 %
2	Kunjungan Wisnus	193.538	204.316	199.821	231.765	224.210	2,18 %
Jumlah		196.172	206.579	202.449	238.915	231.417	2,54 %
Target Daerah		229.156	246.343	283.294	232.495	232.495	2,31 %
Kunjungan Wisata (%)		85,61	83,86	71,46	102,76	99,54	

Sumber :Dinas Pariwisata Kota Tarakan, 2020

- **Lama Kunjungan Wisata**

Lama kunjungan wisata (lama tinggal wisatawan) berkaitan dengan durasi wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata. Lama tinggal wisatawan merupakan sebuah variabel kunci untuk setiap daerah tujuan wisata karena berpengaruh terhadap keseluruhan pengeluaran wisatawan. Semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah yang dituju, maka akan semakin banyak pula uang yang akan dibelanjakan oleh wisatawan di daerah tujuan wisata tersebut. Paling sedikit, hanya untuk keperluan makan dan minum serta penginapan selama di daerah yang mereka kunjungi.

Lama kunjungan wisata cenderung menurun dalam kurun waktu 2015-2019. Pada tahun 2017, lama kunjungan wisatawan mencapai 1,74 hari yang merupakan lama kunjungan wisata terlama dalam kurun waktu 2015-2019, Sedangkan yang terendah pada tahun 2019 sebesar 1,07 hari. Walaupun demikian, secara umum, lama kunjungan wisata di Kota Tarakan masih termasuk rendah dimana wisatawan berkunjung ke Kota Tarakan hanya kurang dari 2 hari.

Gambar 2. 80
Lama Kunjungan Wisata di Kota Tarakan Tahun 2015-2019

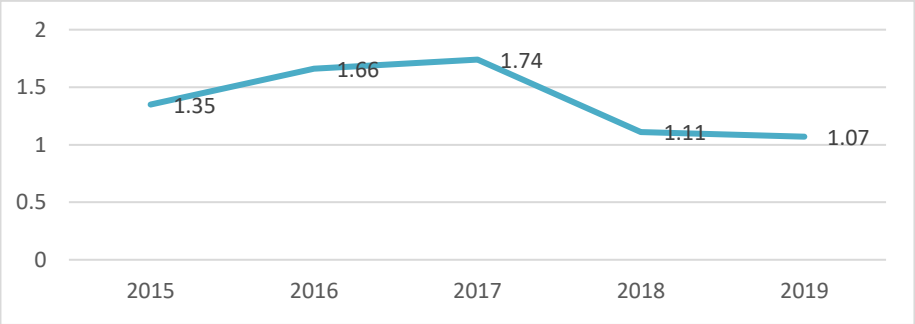

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Tarakan, 2020

- **PAD Sektor Pariwisata**

Di era otonomi daerah, setiap daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli suatu daerah (PAD). Pengembangan bidang pariwisata merupakan suatu hal yang sangat perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, mengingat banyak sekali keuntungan atau manfaat yang bisa diambil dari kegiatan pariwisata, antara lain dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat serta memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2015-2019, kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kota Tarakan cenderung meningkat. Pada tahun 2019, PAD sektor pariwisata sebesar Rp. 15.232.895.457,55 meningkat 2,58% dari tahun sebelumnya dan merupakan PAD Sektor Pariwisata tertinggi dalam kurun waktu tahun 2015-2019. Pada tahun 2019, kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap PAD Daerah sebesar 20.81%, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 5,74%. Selain meningkatnya PAD sektor pariwisata, menurunnya total PAD Kota Tarakan berpengaruh terhadap meningkatnya kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kota Tarakan.

Tabel 2. 95
PAD Sektor Pariwisata di Kota Tarakan Tahun 2015-2019

Tahun	PAD Sektor Pariwisata (Rp.)	Total PAD (Rp.)	%
2015	8.919.202.031,00	76.462.510.136,88	11,66
2016	11.816.510.914,00	62.198.512.278,56	19,00
2017	13.729.958.196,32	67.092.417.030,24	20,46
2018	14.850.108.452,49	98.571.841.371,00	15,07
2019	15.232.895.457,55	73.200.748.456,82	20,81

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Tarakan, 2020

b. Urusan Pertanian

Sektor pertanian disini terdiri atas pertanian, perkebunan, hortikultura dan peternakan. Sektor pertanian pada dasarnya bukan merupakan komoditi utama pembentuk pertumbuhan ekonomi di Kota Tarakan, namun kontribusi harus terus ditingkatkan setiap tahunnya.

- **Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB**

Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian wilayah dapat dilihat berdasarkan kontribusi PDRB sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB total. Kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB cenderung menurun dari tahun 2013–2017 dengan pertumbuhan rata-rata negatif sebesar -5,94 persen per tahun. Nilai PDRB sektor pertanian cenderung naik pada kurun waktu tahun 2014–2017. Pada tahun 2017, nilai PDRB sektor pertanian yaitu 31,34 miliar rupiah. Sektor pertanian di Kota Tarakan merupakan sektor minoritas dan perkembangannya kalah cepat dengan sektor-sektor basis di daerah perkotaan.

Gambar 2. 81
Kontribusi Sektor Pertaniaan/Perkebunan Terhadap PDRB
Kota Tarakan Tahun 2013 -2017

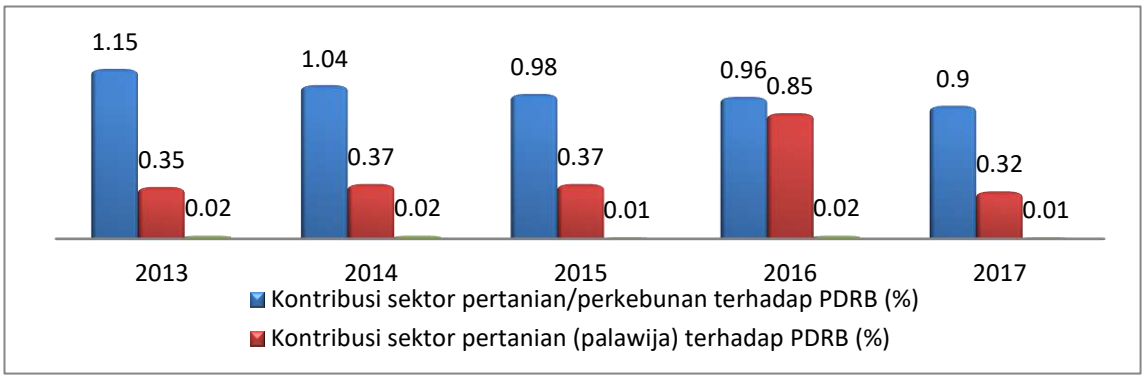

Sumber: PDRB, BPS Kota Tarakan 2018

- **Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB**

Sub sektor perkebunan merupakan sub sektor dengan kontribusi terendah kedua setelah sub sektor kehutanan. Nilai PDRB sektor ini cenderung stabil dengan pertumbuhan rata-rata negatif sebesar -15,91 persen per tahun dari tahun 2013– 2017. Sementara itu, jika ditinjau dari pertumbuhan tahunannya, sub sektor perkebunan cenderung tidak mengalami pertumbuhan (stabil). Pada tahun 2013-2014 dan 2016 kontribusi sub sektor perkebunan adalah sebesar 0,02 persen dari sektor pertanian/perkebunan dan pada tahun 2015 maupun 2017 kontribusinya turun menjadi 0,01 persen.

Gambar 2. 82
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha di Kota Tarakan
Tahun 2015 – 2019

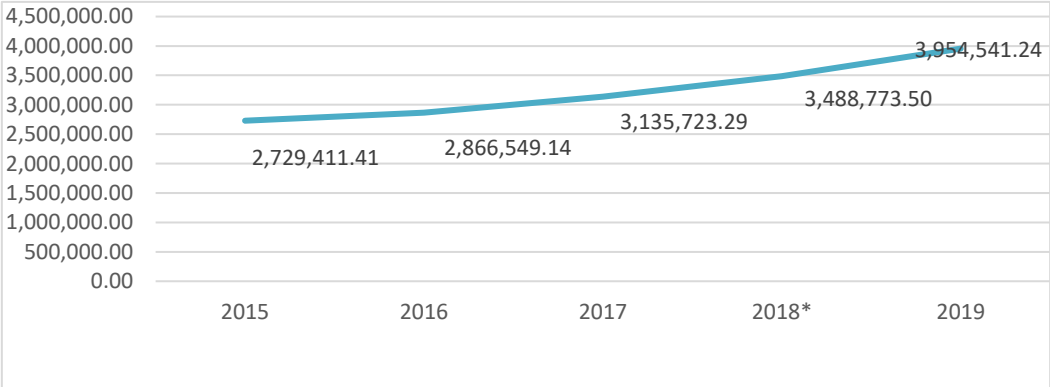

Keterangan: (*) Angka Sementara (**) Angka Sangat Sementara
Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Tarakan Tahun 2015-2019

Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Pada tahun 2019 atas dasar harga berlaku mencapai 3,95 triliun rupiah atau sebesar 10,90 persen. Kontribusi kategori ini dalam lima tahun terakhir juga masih lumayan dominan terhadap perekonomian Kota Tarakan dimana pada tahun 2015 tercatat sebesar 12,51

persen. Pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing berkontribusi sebesar 11,75 persen dan 11,20 persen, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 11,02 persen. Pertumbuhan ekonomi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berfluktuatif dengan kecenderungan menurun selama 5 (lima) tahun terakhir. Dimana pada tahun 2015 tercatat sebesar 8,70 persen, menurun menjadi 3,62 persen pada tahun 2016 dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 6,17 persen dan tahun 2018 menjadi 6,96 persen. Sedangkan dalam satu tahun terakhir mengalami penurunan yaitu 5,88 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2019, Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) di Kota Tarakan adalah 36,29 triliun rupiah dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB ADHK 2010) adalah 22,24 triliun rupiah. Laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 di Kota Tarakan pada tahun 2019 adalah 7,69 persen. Laju pertumbuhan tertinggi bila dilihat menurut lapangan usaha di Kota Tarakan tahun 2019 adalah sektor konstruksi (13,25 persen), diikuti oleh jasa Kesehatan dan kegiatan sosial (11,02 persen) serta pendidikan (9,98 persen).

- **Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar**

Analisis produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal di suatu daerah bertujuan untuk mengukur kemampuan daerah tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Nilai produktivitas ditentukan oleh jumlah panen serta luas lahan yang ada. Jika dilihat dari produksinya, padi bukan merupakan jenis tanaman utama di Kota Tarakan sedangkan produksi bahan pangan utama palawija (ubi kayu, ubi jalar dan jagung) cenderung lebih besar dari padi, sementara sayuran dan buah-buahan lokal cukup berlimpah dan mampu mencukupi kebutuhan penduduk kota Tarakan.

Apabila dilihat dari perkembangan produksi tanaman padi selama tahun 2015–2019, diketahui bahwa produksinya cenderung menurun dari tahun ke tahun, berbanding terbalik dengan perkembangan palawija, meskipun megalami penurunan dari tahun 2015 hingga 2018, namun pada tahun 2019 meningkat sebesar 392,08 % dari tahun 2018.

Tabel 2. 96
Produksi Padi Dan Bahan Pangan Lokal Lainnya Kota Tarakan
Tahun 2015 – 2019

No	Jenis Tanaman	Produksi (ton)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Padi	457,8	413,8 413,8	309,6	286,2	118,8
2	Palawija	13.051,4	7.545	6.892,5	5.919	29.126,4
3	Sayuran	27.630,8	32.414,1	31.206,0	31.796,2	31.351
4	Buah-buahan	18.619,3	19.030,7	17.904,2	21.827,8	23.153
5	Biofarmaka	1.209,74	1.656	1.735,5	1.394,2	1.338

Sumber: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan, 2020

Sejak tahun 2015-2019 penurunan produksi padi tersebut terjadi seiring dengan penurunan hasil panen serta luasan panen. Penurunan luas lahan pertanian di daerah perkotaan umumnya disebabkan adanya alih fungsi lahan pertanian ke fungsi lain yang dianggap memberikan nilai ekonomi lebih tinggi. Sedangkan penurunan hasil panen lebih diakibatkan kualitas lahan yang menurun karena pengaruh lingkungan maupun alam. Baik hasil panen maupun luasan panen menunjukkan pertumbuhan yang negatif setiap tahunnya.

Tabel 2. 97
Luas Panen Padi Kota Tarakan Tahun 2015- 2019

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Padi	70	63	50	54	33
2	Palawija	521	201	186	161	188
3	Sayuran	1.765	2.070	1.934	1.922	1.948
5	Biofarmaka	29,70	32,36	34,18	32,44	31,64
		Luas Panen (Pohon/Rumpun)				
4	Buah-buahan	392.766	406.308	431.442	571.934	575.995

Sumber: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan, 2020

Gambar 2. 83
Produktivitas Padi Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019

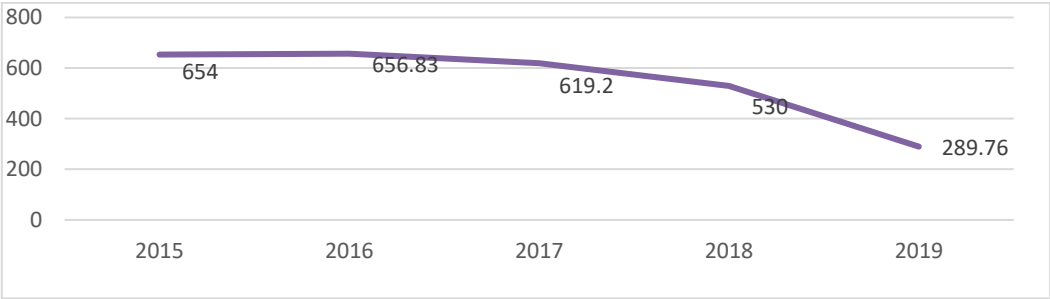

Sumber: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan, 2020

- **Cakupan Bina Kelompok Petani**

Kelompok tani merupakan sebuah bagian penting dalam dinamika kegiatan pertanian di Kota Tarakan. Karena sektor pertanian di kota ini relatif sangat kecil, baik dilihat dari skala kegiatan maupun kontribusinya terhadap PDRB, maka diperlukan adanya koordinasi untuk mempermudah pengarahan dan pengembangan sektor ini. Salah satu langkah yang tepat adalah dengan pembentukan dan pembinaan kelompok-kelompok tani. Seluruh kelompok tani di Kota Tarakan secara umum mendapat pembinaan dari pemerintah daerah, misalnya dalam bentuk penyuluhan dan kegiatan pembinaan lainnya.

Gambar 2. 84
Cakupan Bina Kelompok Petani Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019 (%)

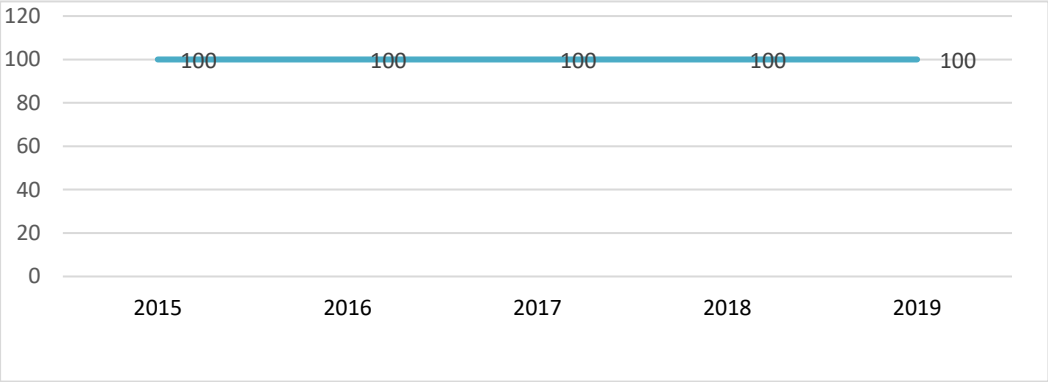

Sumber: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan,2020

- **Jumlah Produksi Hasil Peternakan**

Produksi hasil peternakan meliputi daging sapi, babi, kambing, ayam dan itik. Daging merupakan sumber protein hhhewani yang berguna untuk pembentukan sel, termasuk otot, otak, dan butiran darah merah, pemeliharaan sel dan jaringan tubuh, pembentukan antibodi dan pertahanan tubuh, pembentuk hormon dan mempertahankan hormon.

Tabel 2. 98
Jumlah Produksi Hasil Peternakan Kota Tarakan Tahun 2015-2017

No	Produksi Ternak	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Produksi Sapi (daging)	Ton	250,8	268,75	271,5	269,38	302,05
2	Produksi babi (daging)	Ton	120,85	113,95	112,75	107,66	110,97
3	Produksi Kambing (daging)	Ton	23,85	10,77	12,76	15,29	68,48
4	Produksi Ayam Ras (daging)	Ton	6.054,45	6.042,06	6.107,26	6.450,44	7.087,24
5	Produksi Ayam Buras (daging)	Ton	709,951	826,91	785,56	781,26	640,92
6	Produksi Itik (daging)	Ton	18,3	3,73	4,20	4,56	1,83

Sumber: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui, dalam kurun waktu tahun 2015-2019, produksi daging di Kota Tarakan berfluktuasi. Produksi daging di Kota Tarakan paling besar berasal dari daging ayam ras. Pada tahun 2019, produksi daging ayam ras sebesar 7.087,24 ton. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6.450,44 ton.

c. Urusan Perdagangan

Kota Tarakan terkenal sebagai pusat perdagangan di Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini dikarenakan Kota Tarakan merupakan pintu gerbang perdagangan dari wilayah

utara kalimantan. Oleh karena itu perdagangan merupakan salah satu sektor yang mempunyai andil dalam memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan perekonomian Kota Tarakan.

- **Ekspor Bersih Perdagangan**

Ekspor bersih perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu wilayah. Dari tahun 2015 – 2018, nilai ekspor bersih perdagangan di Kota Tarakan menunjukkan tren menurun. Nilai ekspor di Kota Tarakan pada tahun 2015 adalah sebesar $ 1,499 juta, turun menjadi $ 1,040 juta di tahun 2019. Nilai ekspor bersih perdagangan di Kota Tarakan agar dapat meningkat perlu diadakan intervensi secara intensif dari pemerintah daerah terhadap pelaku usaha terutama difokuskan untuk mengembangkan pelaku usaha UKM agar dapat menghasilkan barang berkualitas dan berdaya saing hingga mampu diekspor.

Gambar 2. 85
Ekspor Bersih Perdagangan Kota Tarakan Tahun 2015 – 2019

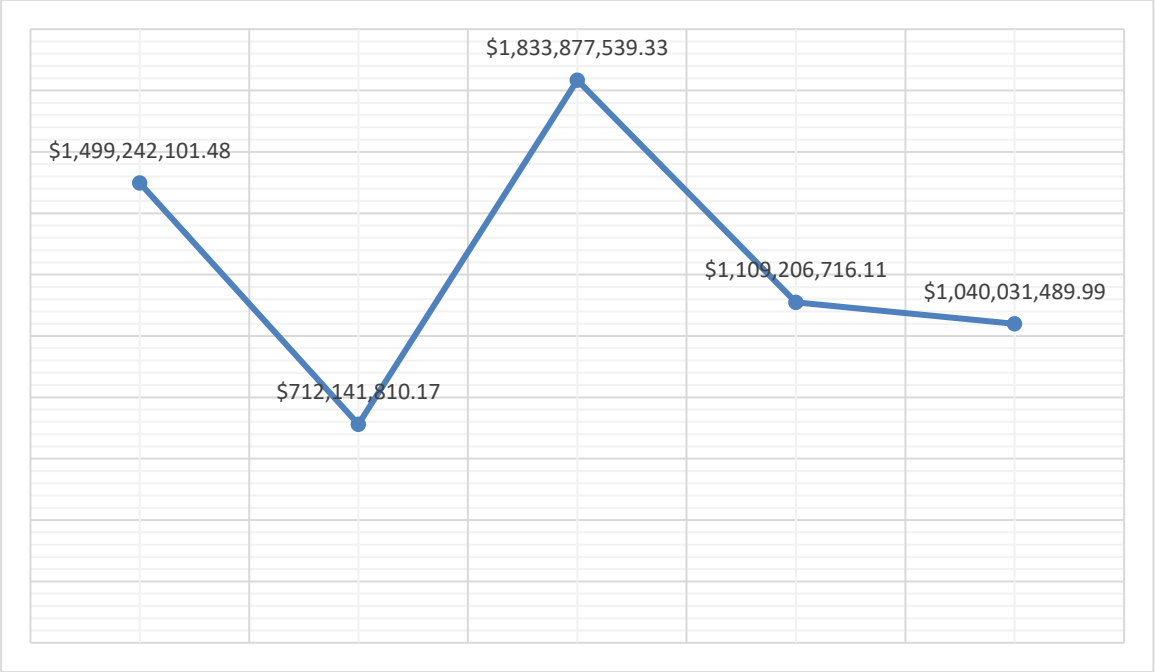

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi UMKM Kota Tarakan, 2020

- **Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal**

Sektor informal merupakan salah satu solusi efektif penyediaan lapangan kerja bagi negara-negara dengan jumlah penduduk yang besar. Melalui sektor informal, *gap* yang timbul dari permintaan dan penawaran tenaga kerja dapat diperkecil. Selain itu, sektor informal juga memiliki keunggulan dalam imunitas terhadap krisis perekonomian. Salah satu pelaku usaha informal di Kota Tarakan adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Dari tahun 2017 – 2019, jumlah Pedagang di Pasar Tradisional di Kota Tarakan tidak

terjadi perubahan. Pada tahun 2017-2019 tercatat jumlah Pedagang di Pasar Boom Panjang sebanyak 739 Pedagang, di Pasar Gusher sebanyak 163 Pedagang, di Pasar THM sebanyak 219 Pedagang, di Pasar Sebengkok sebanyak 40 Pedagang, di Pasar Buah sebanyak 30 Pedagang dan di Pasar Lingkas sebanyak 88 Pedagang.

Gambar 2. 86
Jumlah Pedagang/Usaha Informal Di Kota Tarakan
Tahun 2017 – 2019

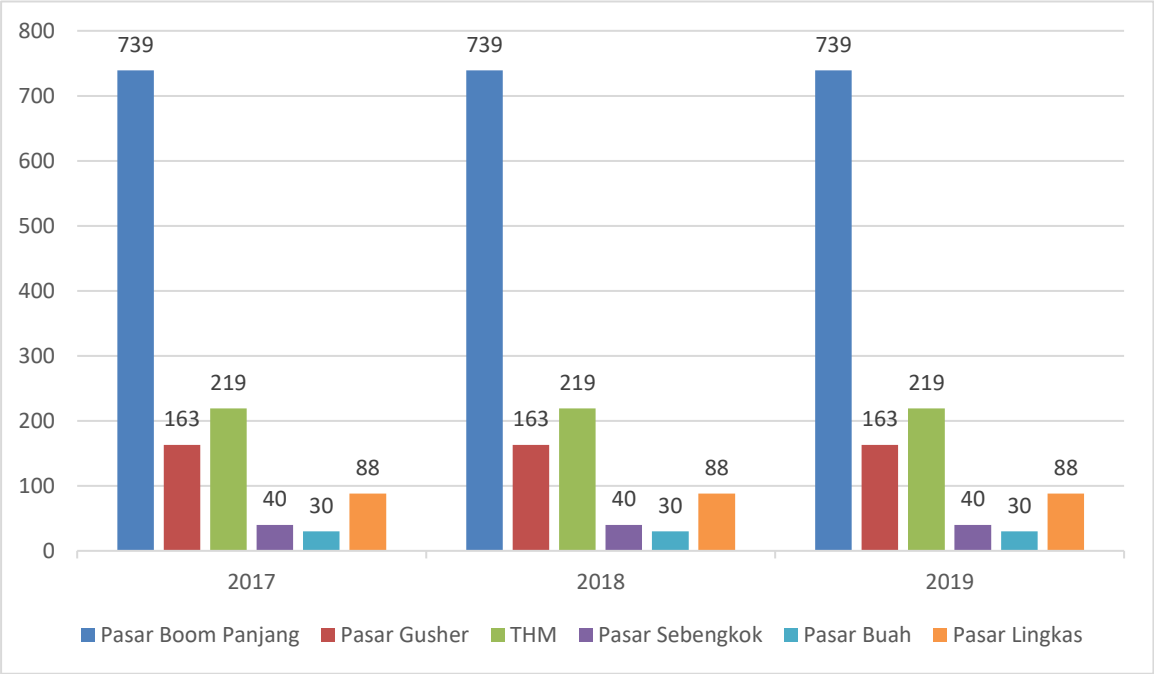

Sumber: UPT Pasar, 2020

d. Urusan Perindustrian

Sektor industri juga menjadi andalan ekonomi Kota Tarakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu sektor industri di berbagai skala perlu dikembangkan.

- **Cakupan Bina Kelompok Pengrajin**

Konsep industri kerajinan merupakan aktivitas yang berbasis kreativitas yang mana nantinya berpengaruh terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya serta sektor industri kerajinan ini juga yang mampu menyerap tenaga kerja yang sangat tinggi. Pengrajin adalah orang yang pekerjaannya membuat barang-barang kerajinan atau orang yang mempunyai keterampilan berkaitan dengan pembuatan barang kerajinan tertentu. Barang-barang tersebut pada umumnya tidak dibuat dengan mesin, tetapi dengan tangan. Di Kota Tarakan, dalam kurun waktu tahun 2015-2019, jumlah kelompok pengrajin meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata peningkatan sebesar 28,66%. Pada tahun 2019, terdapat 22 kelompok pengrajin meningkat dari tahun 2015 sebesar 9 kelompok.

Gambar 2. 87
Jumlah Kelompok Pengrajin Kota Tarakan Tahun 2015-2018

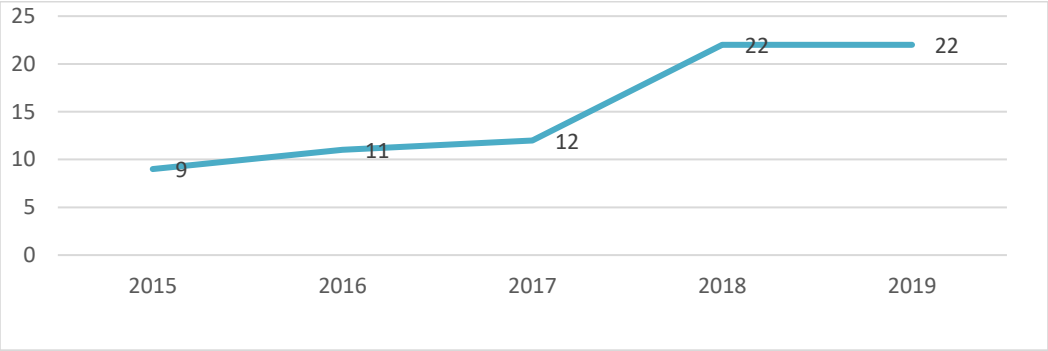

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2020

- **Pertumbuhan Industri**

Industri adalah seluruh bentuk dari kegiatan ekonomi yang mengelolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri, sehingga dapat menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk juga jasa industri. Secara umum, pertumbuhan industri di Kota Tarakan pada tahun 2015-2019 mengalami penurunan dengan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 0,55%. Walaupun demikian, jumlah industri meningkat setiap tahunnya. Jumlah industri ini merupakan industri yang mempunyai omzet lebih dari 3 Milyar sehingga IUMK tidak termasuk.

Gambar 2. 88
Pertumbuhan Industri Kota Tarakan Tahun 2015-2019 (%)

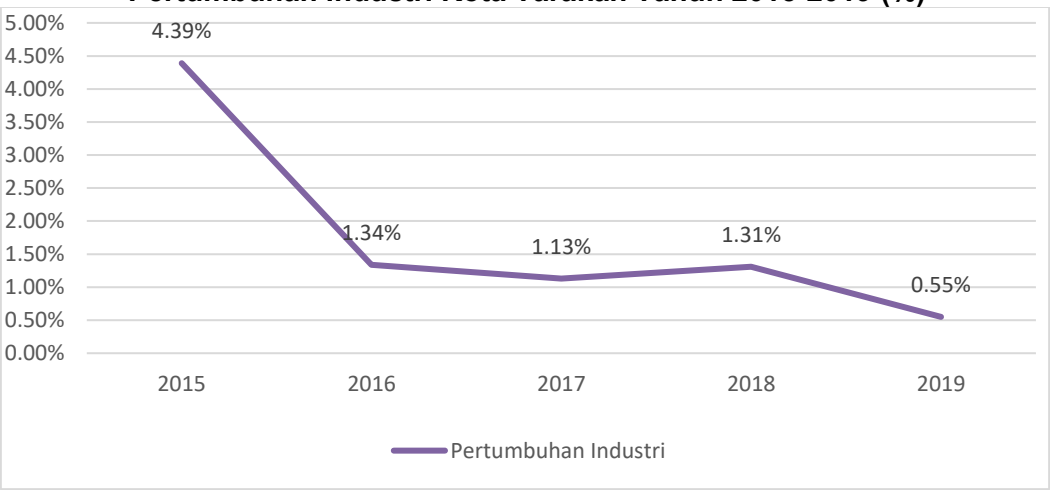

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2020

e. Urusan Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu komoditas utama yang dikembangkan oleh Kota Tarakan. Hal ini dikarenakan struktur daerah Kota Tarakan

yang sesuai untuk mengembangkan usaha perikanan dan kelautan. Oleh karena itu potensi subsektor perikanan dan kelautan mempunyai prospek sangat bagus untuk dikembangkan.

- **Jumlah Produksi Ikan**

Produksi ikan mencakup semua hasil penangkapan/budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Jumlah produksi ikan di Kota Tarakan pada tahun 2015-2016 meningkat. Pada tahun 2016, jumlah produksi kan di Kota Tarakan mencapai 15.744,44 ton, meningkat secara signifikan dari tahun 2015 sebesar 10.926 ton. Namun pada tahun 2017, jumlah produksi ikan menurun menjadi 10.835,49 ton. Kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 19.993,09 ton dan meningkat lagi pada tahun 2019 menjadi 23.517,89 ton.

Gambar 2. 89
Jumlah Produksi Ikan Tahun 2015-2019 (ton)

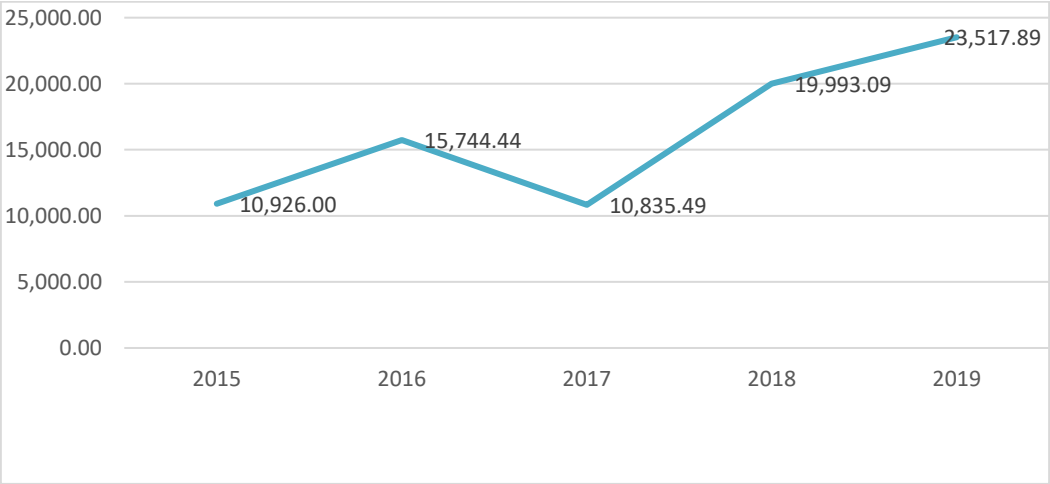

Sumber: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan,2020

- **Jumlah Konsumsi Ikan**

Konsumsi ikan merupakan salah satu indikator yang mampu menunjukkan kemampuan penduduk untuk mengonsumsi ikan. Selain itu konsumsi ikan menunjukkan pula kemampuan daerah untuk menyediakan ikan untuk penduduknya. Kota Tarakan memperoleh pasokan ikan dari hasil tangkapan nelayan dan juga hasil budidaya ikan yang ada di Kota Tarakan. Konsumsi ikan di Kota Tarakan pada tahun 2015-2019 terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,28 persen per tahun.

Gambar 2. 90
Konsumsi Ikan di Kota Tarakan Tahun 2015-2019 (ton)

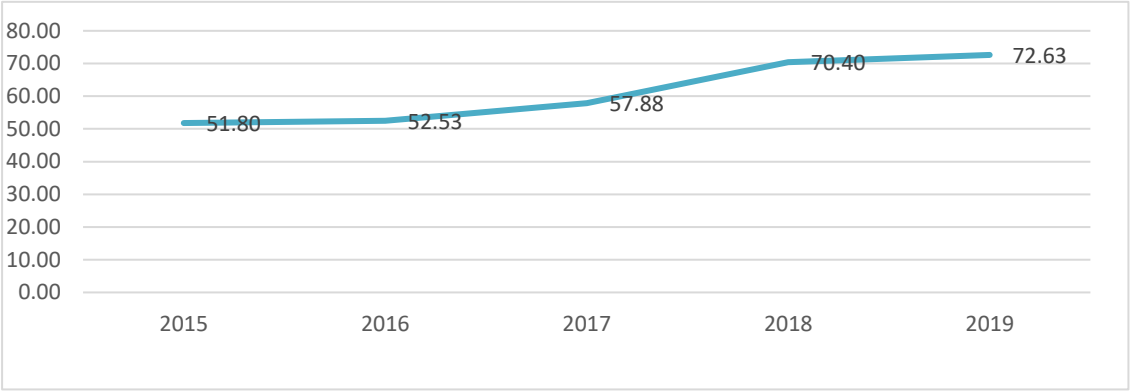

Sumber : Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan, 2020

- **Cakupan Bina Kelompok Nelayan**

Salah satu indikator perkembangan kinerja penyelenggaraaan pemerintah adalah cakupan bina kelompok nelayan maupun kelompok pembudidaya perikanan (POKDAKAN). Cakupan bina kelompok nelayan digunakan untuk melihat berapa persen jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan Pemda terhadap jumlah kelompok nelayan setiap tahunnya.

Tabel 2. 99
Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Tarakan
Tahun 2015-2019

No	Variabel	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah POKDAKAN yang mendapatkan bantuan pemda	Kelompok	5	14	21	0	4
2	Jumlah POKDAKAN	Kelompok	46	56	79	91	98
3	Cakupan bina POKDAKAN	persen	10,87	25	51,90	0	4,08

Sumber: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan, 2020

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa cakupan bina POKDAKAN di Kota Tarakan dalam kurun waktu 2015-2019 berfluktuatif dengan cakupan bina POKDAKAN tertinggi pada tahun 2017 sebesar 51,90%. Pada tahun 2018, tidak ada POKDAKAN yang mendapatkan bantuan PEMDA berupa bantuan alat tangkap, GPS, life safety untuk nelayan, bantuan bibit dan pakan untuk pembudidaya ikan maupun pelatihan. Walaupun demikian, pembinaan tetap dilaksanakan oleh PEMDA kepada POKDAKAN berupa penyuluhan, pendampingan akses permodalan, pengecekan kualitas air dan kesehatan ikan serta pendampingan akses bantuan.

- **Nilai Tukar Nelayan**

Nilai tukar nelayan (NTN) merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan (IT) dan indeks harga yang dibayar nelayan (IB). IT adalah indeks pergerakan harga paket komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan dibandingkan dengan tahun dasar. IB adalah indeks pergerakan harga paket komoditas yang dikeluarkan oleh nelayan termasuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi dan penambahan barang modal dibandingkan dengan tahun dasar. NTN menjadi proxy indikator kesejahteraan bagi nelayan. NTN>100 berarti bahwa harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya, artinya pendapatan nelayan naik lebih besar dari pengeluarannya atau surplus. NTN=100 memiliki arti bahwa kenaikan harga produksi sama dengan kenaikan harga konsumsi sehingga nelayan mengalami impas. NTN<100 berarti bahwa kenaikan harga produksi lebih rendah dari kenaikan harga konsumsi, pendapatan nelayan turun lebih kecil dari pengeluarannya sehingga nelayan mengalami defisit. Pada tahun 2016 Nilai Tukar Nelayan adalah 102,00, kemudian tahun 2017 NTN naik 2% dari tahun sebelumnya menjadi 104,04.

2.1.3.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Unsur penunjang dibentuk membantu kepala daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah antara lain perencanaan, pengawasan, kepegawaian, keuangan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan.

a. Keuangan

Peran penunjang urusan keuangan berkaitan dengan kemampuan penganggaran pembangunan daerah. Keberhasilan peran penunjang urusan keuangan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain:

- **Opini BPK terhadap Laporan Keuangan**

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni :1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), 2) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan 4) Efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Opini WTP diberikan dengan kriteria sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan

laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) yang telah diberlakukan Pemerintah sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010. Sedangkan **opini WDP** diberikan dengan kriteria sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

Tabel 2. 100
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kota Tarakan Tahun 2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkot Tarakan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mendapat penilaian WDP. Namun pada tahun 2019 Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkot Tarakan mendapatkan penilaian WTP.

- **Persentase SILPA terhadap APBD**

SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

Gambar 2. 91
Persentase SILPA terhadap APBD Kota Tarakan Tahun 2015-2019

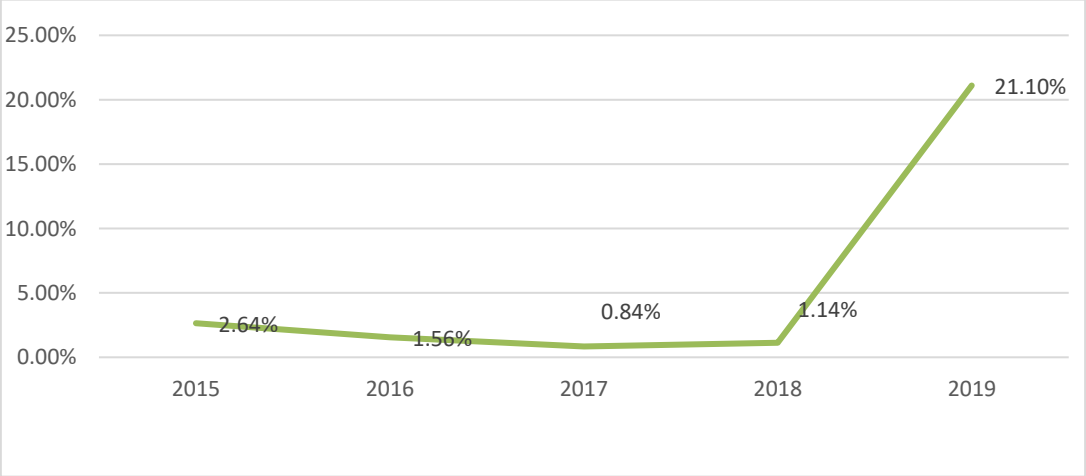

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tarakan, 2020

Berdasarkan gambar di atas, secara umum persentase SILPA terhadap APBD Kota Tarakan mengalami penurunan tiap tahunnya. Pada tahun 2017, persentase SILPA terhadap APBD Kota Tarakan sebesar 0,84%, menurun dari tahun sebelumnya 1,56%. Hal ini berarti SILPA tahun sebelumnya digunakan untuk menutupi defisit anggaran pada tahun berikutnya dan angkanya setiap tahun semakin menurun karena untuk menutupi defisit anggaran yang semakin besar.

- **Persentase PAD terhadap Pendapatan**

Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Pendapatan asli daerah adalah bagian dari pendapatan daerah yang berumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah bersangkutan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 2. 92
Persentase PAD terhadap Pendapatan Kota Tarakan
Tahun 2015-2019

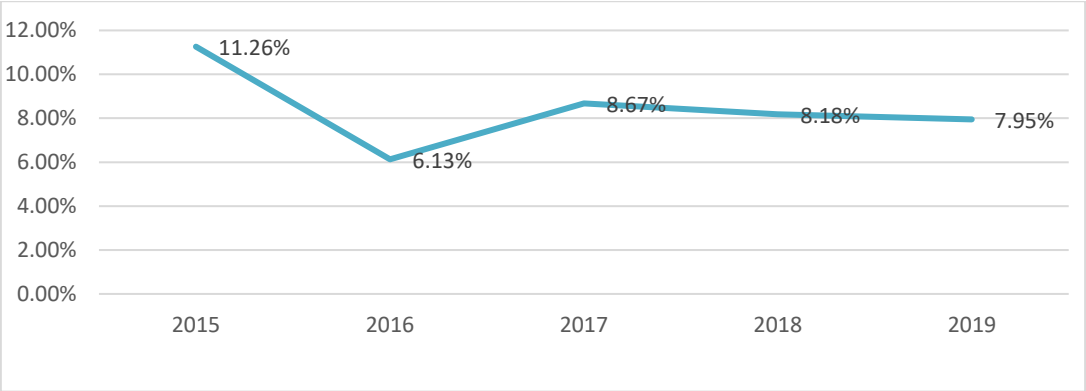

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tarakan, 2020

Berdasarkan gambar di atas, persentase PAD terhadap pendapatan secara umum berfluktuatif. Dalam kurun waktu 2015-2019, persentase PAD tertinggi pada tahun 2015 sebesar 11,26% dan terendah pada tahun 2016 sebesar 6,13%. Jika dilihat dari total pendapatan yang ada kontribusi PAD Kota Tarakan hanya menyumbang sedikit saja artinya sumber pembiayaan pembangunan masih sangat tergantung dengan dana-dana dari pusat seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak/non pajak dan dana transfer.

- **Persentase Belanja Pendidikan**

Pendidikan adalah variabel yang menentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa, sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dapat menjamin terselenggaranya pendidikan dengan mutu/kualitas yang baik. Berdasarkan UU Nomor

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diamanatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Bentuk keseriusan pemerintah dan DPR dalam bidang pendidikan tertuang dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke 4 mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-VI/2008, Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Alokasi anggaran diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan lebih spesifik dituangkan dalam pasal 49 UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 yaitu Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Gambar 2. 93
Persentase Belanja Pendidikan Kota Tarakan
Tahun 2015-2019

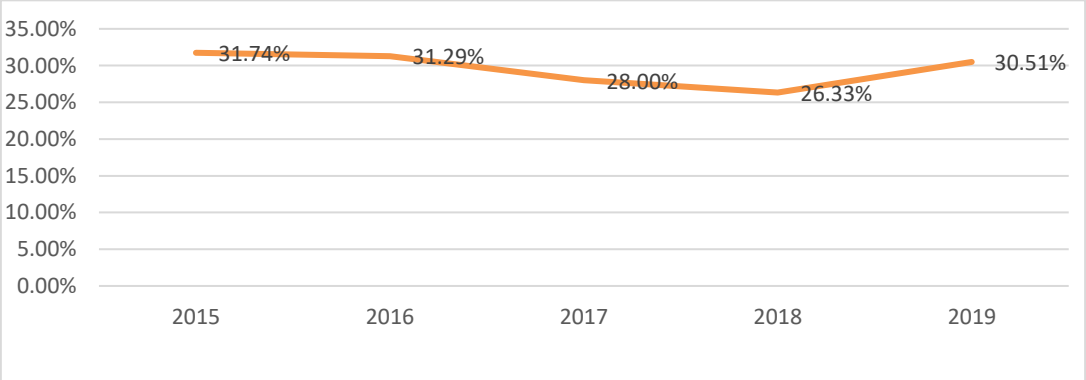

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tarakan, 2020

Berdasarkan gambar di atas, persentase belanja pendidikan secara umum berfluktuatif. Walaupun demikian, dalam kurun waktu 2015-2019, Pemerintah Kota Tarakan telah mengalokasikan anggaran minimal 20% dari APBD untuk dana pendidikan, dengan persentase belanja pendidikan tertinggi pada tahun 2015 sebesar 31,74% dan terendah pada tahun 2018 sebesar 26,33%.

- **Persentase Belanja Kesehatan (10%)**

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan penting bagi manusia, dan juga merupakan salah satu komponen untuk menghitung indeks pembangunan manusia (IPM) selain pendidikan dan tingkat pendapatan perkapita. Dalam Undang-undang

nomor 36 tahun 2009 diamanatkan untuk mengalokasikan 10% dana APBD untuk kesehatan.

Persentase belanja kesehatan secara umum berfluktuatif. Persentase belanja kesehatan tertinggi pada tahun 2016 dan 2019 sebesar 12% dan terendah pada tahun 2015 dan 2018 sebesar 10%.

Gambar 2. 94
Persentase Belanja Kesehatan Kota Tarakan
Tahun 2015-2019

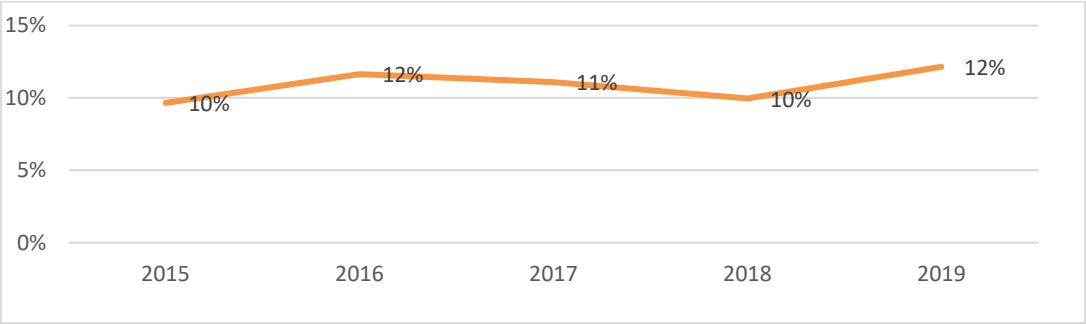

Sumber: Diolah bidang PKSDM Bappeda Kota Tarakan, 2020

b. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Peran penunjang urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan kemampuan penyediaan SDM yang berkualitas. Keberhasilan peran penunjang urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain:

- **Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan**

Pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai upaya dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Oleh karena itu untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam pengembangan pegawai diperlukan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan analisa jabatan agar pegawai mengetahui tujuan pendidikan dan pelatihan yang dijalankannya. Diklat bertujuan : 1) Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi; 2) Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan; 3) Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat; dan 4) Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik. Pada tahun 2019, rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan adalah 266 jam.

Gambar 2. 95
Rata- Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan (Jam Pelajaran)

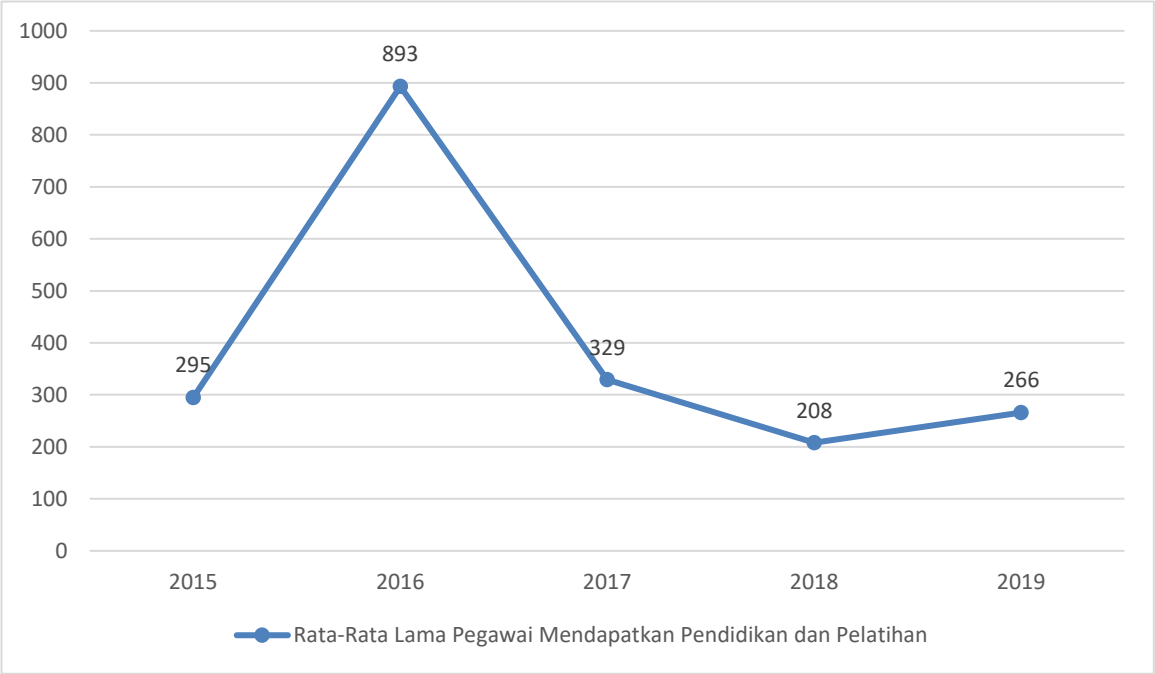

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tarakan, 2020

- **Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal**

Diklat Formal adalah diklat yang dilaksanakan secara resmi oleh suatu organisasi. Diklat formal bisa dikatakan diklat fungsional, dimana diklat ini merupakan diklat wajib oleh para calon dan pejabat fungsional tertentu seperti diklat auditor atau diklat profesi guru.

Gambar 2. 96
Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal Kota Tarakan Tahun 2015-2019

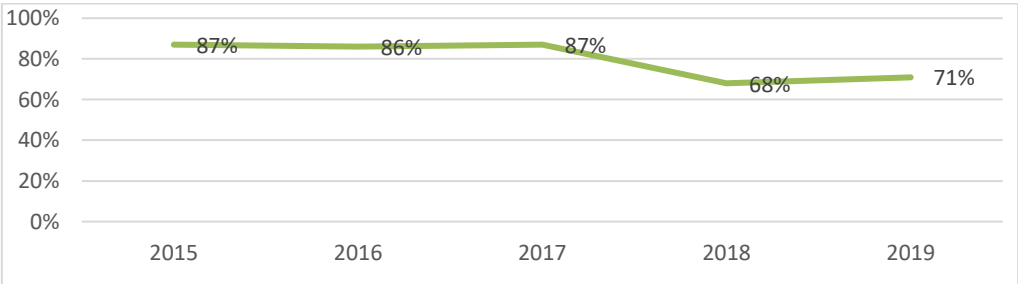

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tarakan, 2020

- **Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural**

Diklat Struktural/Penjenjangan adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur yang sesuai dengan jenjang. Diklat Struktural terdiri dari: 1) Diklatpim Tingkat IV, yaitu Diklat struktural untuk jabatan struktural eselon IV; 2) Diklatpim Tingkat III, yaitu Diklat struktural untuk jabatan struktural eselon III; 3) Diklatpim Tingkat II, adalah Diklat Struktural untuk jabatan struktural eselon II; dan (4) Diklatpim Tingkat I, adalah Diklat Struktural untuk jabatan struktural eselon I. Peserta Diklatpim adalah PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural.

Gambar 2. 97
Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Kota Tarakan Tahun 2015-2019

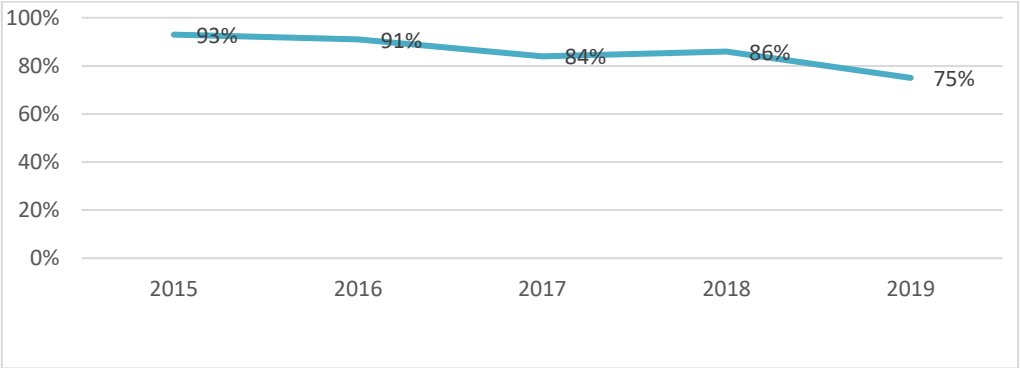

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tarakan, 2020

Berdasarkan gambar di atas, dalam kurun waktu 2015-2019 persentase pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural di Kota Tarakan berfluktuatif dengan kecenderungan menurun dengan persentase tertinggi pada tahun 2015 sebesar 93% dan terendah pada tahun 2019 sebesar 75%. Diklat Struktural belum dapat dilaksanakan kepada semua ASN/PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural, sehingga masih ada ASN/PNS yang diangkat atau telah menduduki jabatan struktural belum pernah memperoleh Diklat Struktural yang dipersyaratkan untuk jabatan struktural tersebut. Padahal, menurut ketentuan PP No. 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, disebutkan bahwa diklat struktural merupakan salah satu persyaratan untuk mengangkat PNS dalam jabatan struktural.

- **Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah**

Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Jabatan Pimpinan Tinggi berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah. Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian

kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Gambar 2. 98
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2015-2019

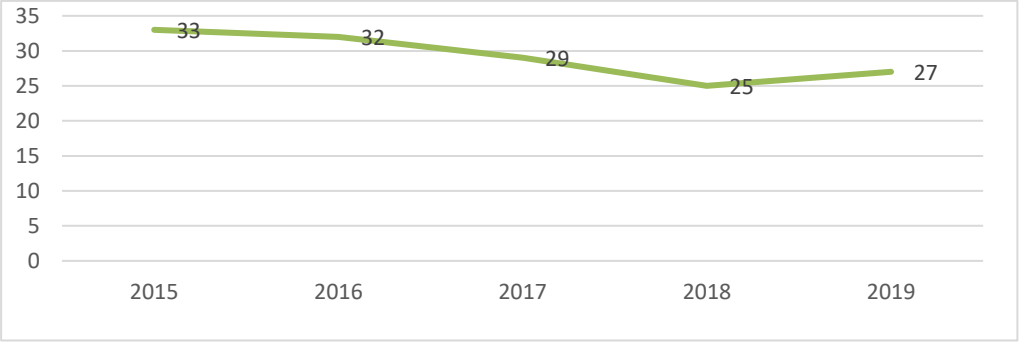

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tarakan, 2020

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa jumlah jabatan pimpinan tinggi di instansi Pemkot Tarakan dalam kurun waktu 2015-2019 berfluktuatif dengan jumlah terbanyak pada tahun 2015 sebesar 33 orang. Pada tahun 2019 jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi Pemkot Tarakan sebesar 27 orang, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 25 orang.

- **Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah**

Dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, jabatan PNS terdiri dari Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional Dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Masih dalam PP ini, jenjang Jabatan Administrasi dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.

Gambar 2. 99
Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2015-2019

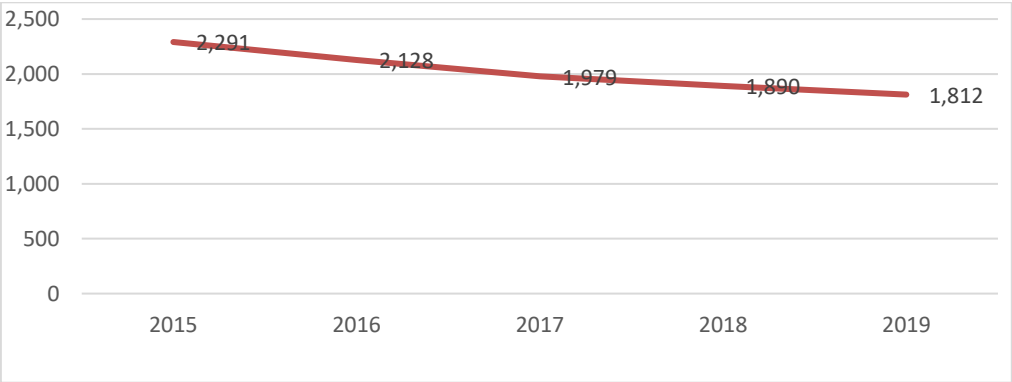

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tarakan, 2020

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu 2015-2019, jumlah jabatan administrasi pada instansi Pemerintah Kota Tarakan menurun. Pada tahun 2015, jumlah jabatan administrasi di instansi Pemkot Tarakan sejumlah 2.291 pegawai, namun pada tahun 2019, jumlah ini menurun menjadi 1.812 pegawai.

- **Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah**

Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional dikelompokkan berdasarkan pengangkatan dan angka kredit yakni jabatan fungsional tertentu (JFT) dan jabatan fungsional umum (JFU). Pada jabatan fungsional tertentu/khusus, pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit, sedangkan jabatan fungsional umum tidak diisyaratkan dengan angka kredit.

Gambar 2. 100
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2015-2019

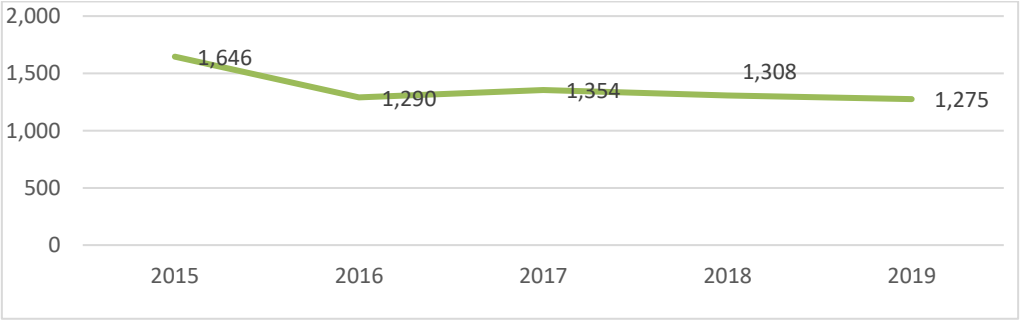

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tarakan, 2020

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu 2015-2019, jumlah JFT pada instansi pemerintah Kota Tarakan berfluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2015, jumlah JFT di instansi Pemerintah Kota Tarakan mencapai 1.646 pegawai, namun jumlah ini menurun menjadi 1.275 pegawai pada tahun 2019.

c. Pengawasan

Peran penunjang urusan pengawasan berkaitan dengan control pelaksanaan pembangunan agar tetap sasaran dan tidak menyimpang. Keberhasilan peran penunjang urusan pengawasan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain:

- **Persentase Tindak Lanjut Temuan**

Setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerbitkan ragam rekomendasi yang berisi saran perbaikan atas berbagai temuan audit, termasuk yang berpotensi merugikan keuangan negara. Hasil rekomendasi BPK tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

Untuk menjamin pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK secara efektif, cepat dan tepat, maka perlu pemahaman isi Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) dan ketentuan mengenai tindak lanjut atas rekomendasi BPK. LHP BPK utamanya memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan, yaitu berupa kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan/ atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan ini dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, atau ketidakefektifan.

Permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara dan kekurangan penerimaan merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial. Sedangkan penyimpangan administrasi dan permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang tidak berdampak finansial. Permasalahan-permasalahan yang mengandung indikasi unsur pidana nantinya akan disampaikan kepada instansi yang berwenang secara terpisah.

Gambar 2. 101
Persentase Tindak Lanjut Temuan Kota Tarakan Tahun 2013-2017

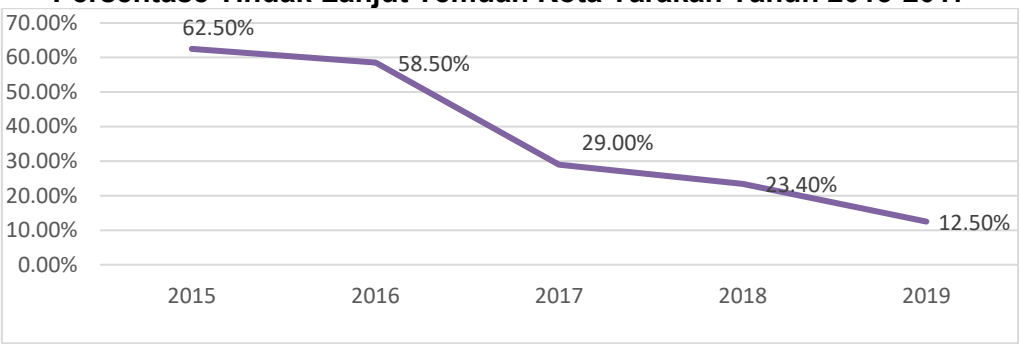

Sumber: Inspektorat Kota Tarakan, 2020

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa dari tahun 2015 hingga tahun 2019 terjadi penurunan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI/APIP dimana target rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh SKPD tidak tercapai dari target yang ditetapkan. Penyebab yang mempengaruhi penilaian indikator ketidakberhasilan atas sasaran yang telah ditetapkan adalah kurangnya sumber daya aparatur pengawasan pada Inspektorat Kota Tarakan serta kurangnya komitmen Kepala SKPD untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.

- **Persentase Pelanggaran Pegawai**

Usaha dalam mencapai tujuan nasional diperlukan adanya pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi, mempunyai kesadaran tinggi akan akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat. Salah satu indikasi rendahnya kualitas Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut adalah adanya pelanggaran disiplin yang banyak dilakukan oleh Pegawai Negeri. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Gambar 2. 102
Prosentase Pelanggaran Pegawai Kota Tarakan Tahun 2013-2017

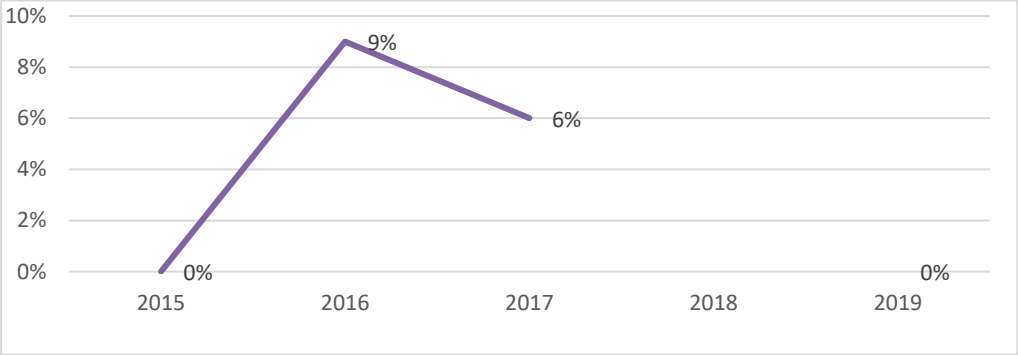

Sumber: Inspektorat Kota Tarakan, 2018

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2015 tidak ditemukan adanya kasus pelanggaran oleh PNS namun di tahun 2016 terjadi pelanggaran atas 3 PNS dari 3.450 PNS dan tahun 2017 terjadi pelanggaran atas 2 PNS dari 3.362 PNS. Pada tahun 2018 terjadi pelanggaran atas 3 PNS dari xxxxxx PNS dan pada tahun 2019 tidak ditemukan adanya kasus pelanggaran oleh PNS.

- **Jumlah Temuan BPK**

BPK merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Temuan BPK kemudian dilaporkan dalam Laporan Ikhitsar Hasil Pemeriksaan.

Gambar 2. 103
Jumlah Temuan BPK Kota Tarakan Tahun 2015-2019

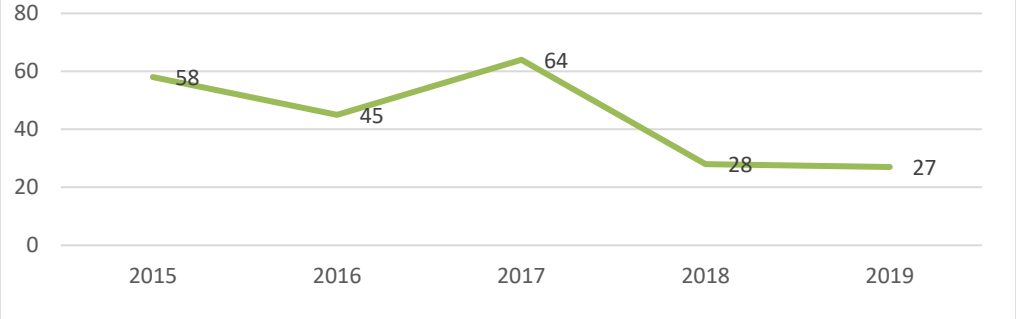

Sumber: Inspektorat Kota Tarakan, 2020

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa jumlah temuan BPK sesuai Rekomendasi dalam kurun waktu 2015-2019 berfluktuatif dengan kecenderungan menurun, dengan temuan paling sedikit pada tahun 2019 sejumlah 27 temuan dan temuan terbanyak pada tahun 2017 sejumlah 64 temuan. Jumlah temuan BPK ini dipengaruhi oleh : 1) Adanya perubahan aturan dalam penyusunan LKPD yaitu dari sistem basis kas ke basis akrual yang menyebabkan laporan yang harus disesuaikan; 2) Adanya beberapa asset yang belum tercatat dengan baik; 3) Kurangnya aparatur di beberapa OPD yang paham tentang pengadaan barang/jasa.

d. Sekretariat Dewan

Peran penunjang urusan Sekretariat Dewan berkaitan dengan aspek penganggaran, regulasi, dan aspirasi masyarakat. Keberhasilan peran penunjang urusan Sekretariat Dewan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain:

- **Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota Tarakan**

Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, DPR memiliki beberapa unit-unit kerja yang biasa disebut dengan alat-alat kelengkapan. Alat-alat kelengkapan DPR tersebut ada yang bersifat tetap dan ada yang sementara. Yang dimaksud dengan tetap adalah unit kerja yang terus menerus ada selama masa kerja DPR berlangsung, yakni selama lima tahun. Keanggotannya juga tidak berubah dari awal sampai akhir, kecuali ada pemberhentian. Sedangkan yang sementara bersifat sebaliknya, hanya dibentuk untuk kebutuhan dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Begitu juga dengan keanggotannya, berganti-ganti untuk masa waktu sementara. Alat-alat kelengkapan lembaga ini diatur dalam Tata Tertib DPR RI.

Alat kelengkapan DPRD terdiri atas Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna seperti panitia khusus yang bersifat tidak tetap. Jika dikaitkan dengan fungsi legislasi, tidak semua alat kelengkapan tersebut terlibat secara langsung. Alat-alat kelengkapan yang terlibat secaralangsung antara lain adalah komisi, badan musyawarah dan kemungkinan alat kelengkapan lain yang dibentuk khusus menangi masalah legislasi, misalnya Panitia Legislasi.

Badan Anggaran merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD, dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Pasal 54 ayat (1) " Badan Anggaran memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan APBD sebelum Peraturan Kepala Daerah Tentang RKPD ditetapkan". Pokok-pokok Pikiran DPRD merupakan dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal RKPD disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.

Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Dalam penyusunan RKPD pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran oleh BAPPEDA dengan berkordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Jika kita mengacu pada fungsi dewan sebagai fungsi legislasi, komisi dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan membahas rancangan peraturan daerah bersama denganpemerintah daerah, baik terhadap rancangan Perda usul inisiatif Dewan maupun usul inisiatif Pemerintah Daerah. Untuk menunjang perancangan dan pembahasan Perda tersebut, komisi dapat melakukan kunjungan kerja dalam rangka mencari dan menjaring aspirasi masyarakat yang terkait dengan substansi materi rancangan Perda yang akan dibahas. Selain itu Komisi juga dapat melakukan rapat kerja dan dengar pendapat untuk melakukan pengayaan materi terhadap Rancangan Perda yang dibahas.

Tabel 2. 101

Tabel 2. 101
Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota Tarakan Tahun 2015-2019

Tahun	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD
2015	Ada
2016	Ada
2017	Ada
2018	Ada
2019	Ada

Sumber: Sekretariat Dewan Kota Tarakan, 2020

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun 2020 Triwulan II menunjukkan rata-rata kinerja program dan kegiatan RKPD tahun 2020 berperdikat **SANGAT TINGGI** dengan skor 38% dengan capaian pagu sebesar 20% dengan Predikat **RENDAH**.

Jika dilihat lebih rinci masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka OPD yang kinerja RKPD tahun 2020 sampai dengan TRiwulan II SANGAT TINGGI ada 18 dengan skor diatas 30,32%. Sedangkan OPD yang kinerja RKPD nya tergolong **SANGAT RENDAH** ada 5 (lima) OPD dengan skor kurang dari 17%.

Secara lebih rinci rekapitulasi kinerja program/kegiatan RKPD asing-masing OPD dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 102
Rekapitulasi Tingkat Capaian Kinerja dan Predikat Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 Triwulan II

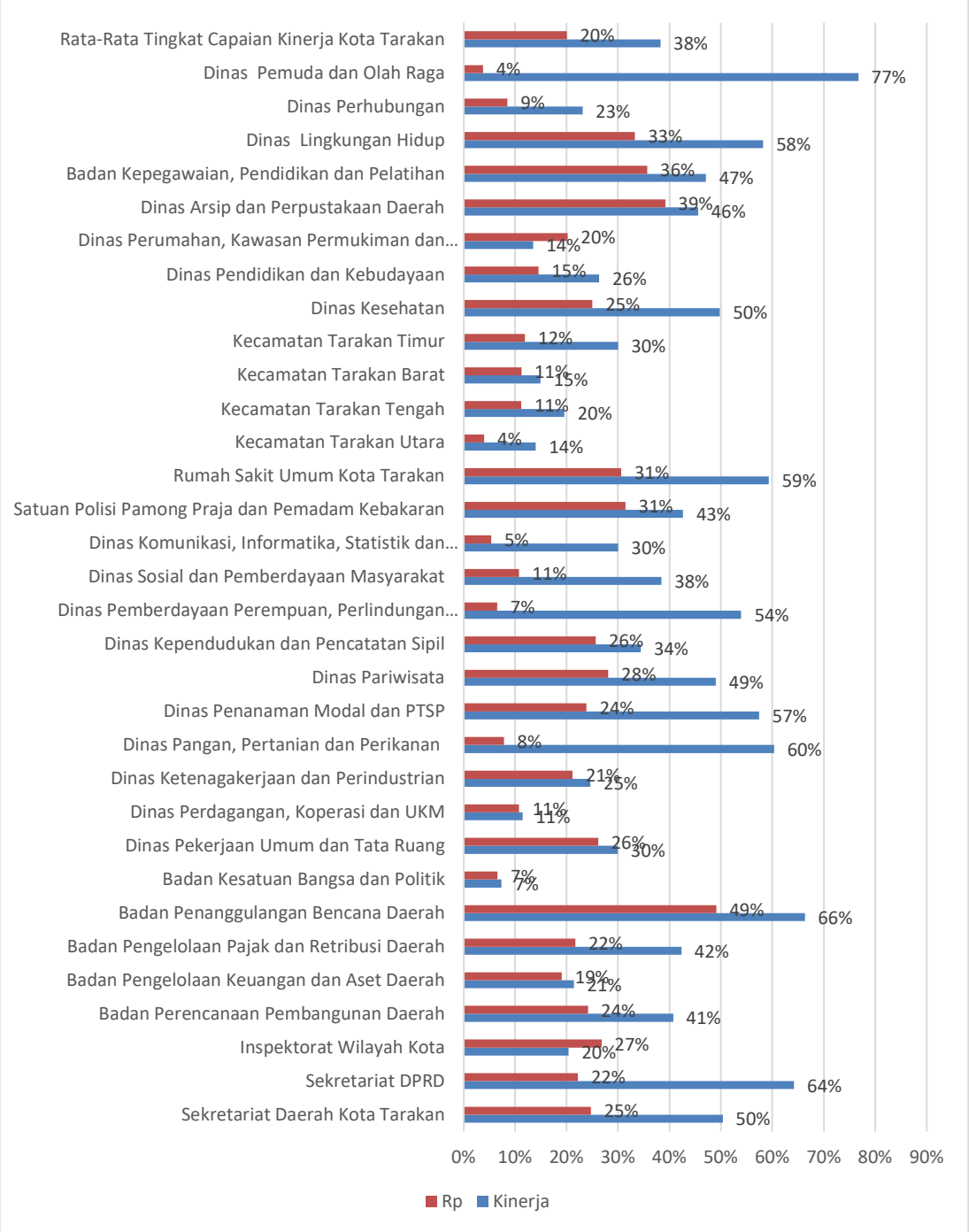

Sumber : BAPPEDA Kota Tarakan, 2020

Gambar 2. 103
Rekapitulasi Tingkat Capaian Kinerja dan Predikat Anggaran Renstra SKPD Tahun 2020 Triwulan II

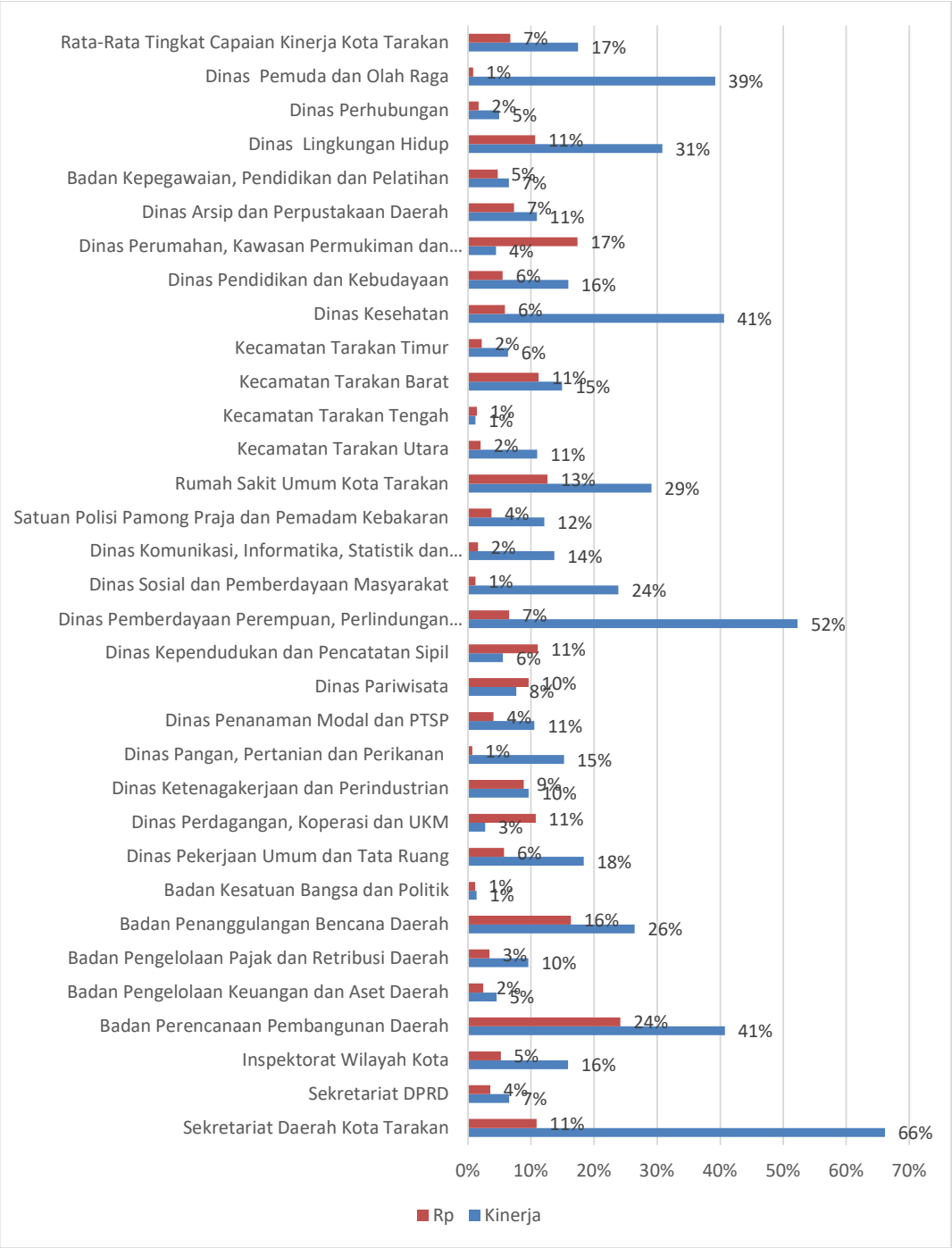

Sumber : BAPPEDA Kota Tarakan, 2020

Keterangan:

ST	=	Sangat Tinggi	(30,33% - 100%)
T	=	Tinggi	(25,33% - 30,32%)
S	=	Sedang	(22,00% - 25,32%)
R	=	Rendah	(17,00% - 21,99%)
SR	=	Sangat Rendah	(0,00% - 16,99%)

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan analisa evaluasi hasil capaian pembangunan dalam kerangka sasaran implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tarakan untuk tahun pertama, yaitu tahun 2020, secara umum dapat diasumsikan memiliki pencapaian yang masih **RENDAH** dengan skor 17% pada berbagai sektor maupun bidang pembangunan daerah. Adapun secara umum kendala permasalahan pembangunan daerah di Kota Tarakan disebabkan oleh tiga hal utama antara lain:

1. Kondisi keuangan daerah yang belum stabil

   Kondisi keuangan daerah Kota Tarakan dalam beberapa tahun terakhir (2015-2018) masih tidak stabil. Hal ini disebabkan oleh banyaknya hutang pemerintah akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang belum bisa terbayarkan yang berakibat pada meningkatnya beban keuangan daerah Kota Tarakan untuk membayarkannya ditahun berikutnya. Menumpuknya beban hutang tersebut menyebabkan kapasitas belanja publik menjadi berkurang drastis sehingga harus ada pengurangan, rasionalisasi, realokasi, dan penggeseran anggaran belanja langsung dari suatu kegiatan ke kegiatan lain yang berhutang. Hasilnya banyak target-target kinerja dari output hingga impact yang tidak tercapai.
2. Hasil evaluasi capaian pembangunan pada tahun pertama RPJMD 2019-2024 (Tahun 2020) belum maksimal karena baru menggambarkan pencapaian sampai dengan Triwulan II.
3. Berdasarkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang percepatan penyesuaian APDB Tahun 2020 dalam rangka penanganan COVID-19, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (recofusing), perubahan alokasi dan penggunaan APBD yang akhirnya berdampak terhadap pencapaian target beberapa program kegiatan.
4. Faktor lainnya

   Faktor lainnya disini yang dimaksud ialah faktor teknis penghambat lainnya yang masih muncul dalam upaya mencapai target pembangunan yang perlu segera diselesaikan anta lai

Tabel 2. 104
Faktor Penghambat dan Upaya-Upaya untuk Mencapai Target Pembangunan Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH/BIRO	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAK LANJUT PELAKSANAAN RKPD PERIODE BERIKUTNYA
1	Dinas Kesehatan	● Adanya wabah Covid-19 yang berpengaruh terhadap kegiatan terkait pelayanan masyarakat yg merupakan indikator kinerja dinas kesehatan ● Capaian SPM Bidang Kesehatanyaitu Skrining tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal ● Nilai IKM masih proses survei di beberapa puskesmas ● Refocusing anggaran ● Sebagian besar kegiatan pengadaan menggunakan alokasi Dana DAK sehingga memerlukan waktu pencairan yang lebih lama	-	● Melakukan penjadwalan ulang kegiatan - kegiatan yang terdampak covid-19 terutama cakupan SPM dan layanan masyarakat ● Melakukan monitoring dan koordinasi terhadap progress realisasi fisik dan keuangan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksna Teknis kegiatan ● Melakukan koordinasi dengan tim survei di tingkat puskesmas untuk segera melakukan survei dan penjadwalan pelaksanaan survei menjadi 2 kali setahun
2	Dinas Komunikasi dan Informasi	Komitmen yang tinggi Walikota Tarakan terhadap pengembangan Smart City sesuai visi Kota Tarakan 2019-2024	● Proses pengajuan penerbitan SPD harus melalui Telaahan Staf hingga ke Walikota; ● Adanya rasionalisasi belanja barang dan jasa sebesar 50% sesuai Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan nomor 119/2813/SJ dan nomor 177/KMK.07/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD tahun 2020 dalam rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.	Intens melakukan koordinasi dengan PPTK terhadap limit waktu dalam proses pembayaran kegiatan, sehingga pengajuan permohonan SPD lebih cepat dan Pembayaran dapat diselesaikan tepat waktu.

NO	PERANGKAT DAERAH/BIRO	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAK LANJUT PELAKSANAAN RKPD PERIODE BERIKUTNYA
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	● Strategi/upaya untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil khususnya untuk peristiwa kelahiran, baik melalui pelayanan rutin di kantor, pelayanan jemput bola, maupun pemutakhiran data dengan menggunakan Sistem Aplikasi dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). ● Upaya-upaya inovasi pelayanan dokumen kependudukan dan kreasi pelayanan secara online yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. ● Anggaran yang tersedia di DPA. ● PPTK melaksanakan setiap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, baik jadwal pelaksanaan kegiatan dan dokumen pertanggungjawabannya ● Dukungan sumberdaya aparatur serta terjalin nya koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan yang baik dengan OPD maupun instansi terkait lainnya.	● Adanya Pergeseran Anggaran sehingga harus mengurangi anggaran yang sudah direncanakan di awal anggaran. ● Keterlambatan dalam proses pencairan dana/anggaran sehingga ada beberapa kegiatan sudah terealisasi secara fisik tetapi realisasi keuangan masih rendah. ● Sarana dan prasarana masih belum memadai, ● Khusus Dana Alokasi Khusus pada tahun 2020 ini Dana DAK Non Fisik ini turunnya secara bertahap sehingga harus menunggu realisasi keuangan 50% setelah itu anggaran tahap ke 2 akan diusulkan lagi.	● Meningkatkan kordinasi internal dan eksternal sumberdaya terhadap kegiatan yang ada. ● Peningkatan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun OPD terkait guna kelancaran pelaksanaan kegiatan/program ● Peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana sesuai standart guna percepatan pelayanan ● Peningkatan pengetahuan dan pemahaman aparatur terkait perencanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan untuk dapat menyusun laporan evaluasi Renja dengan baik sesuai Permendagri 86 tahun 2017.
4	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	● Ketersediaan Program/Kegiatan ● Adanya Perencanaan Program Kegiatan ● PPTK melaksanakan setiap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai jadwal pelaksanaan. ● Dukungan sumberdaya aparatur yang memahami tugas dan fungsinya.	● Jaringan SIMDA kurang mendukung sehingga keterlambatan dalam proses penginputan. ● Adanya kegiatan yang terealisasi 70-88 % namun realisasi keuangan masih rendah. ● Kondisi pandemi covid-19 yang berakibat pada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya belum bisa	● Melakukan koordinasi guna peningkatan jaringan yang lebih lancar/high. ● Peningkatan pelaporan SPJ dari PPTK agar sesuai dengan kegiatan fisik yang dilakukan terhadap laporan konsolidasi dengan meningkatkan kordinasi internal dan eksternal sumberdaya terhadap kegiatan

NO	PERANGKAT DAERAH/BIRO	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAK LANJUT PELAKSANAAN RKPD PERIODE BERIKUTNYA
			maksimal dan ditangguhkan untuk sementara waktu.	● Identifikasi hambatan yang menyebabkan keterlambatan pengadministrasian maupun SPJ guna akselerasi pelaksanaan kegiatan. ● Membuat rencana kegiatan dengan membatasi jumlah orang dan waktu pelaksanaan lebih singkat serta menerapkan standart protokol kesehatan. ● Peningkatan pengetahuan dan pemahaman aparatur terkait perencanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan untuk dapat menyusun laporan evaluasi Renja dengan baik sesuai Permendagri 86 tahun 2017.
5	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tarakan	Program Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan yang disusun	● Kondisi pandemik covid-19 membuat pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pengumpulan orang banyak untuk sementara ditangguhkan. ● Rasionalisasi terhadap anggaran kegiatan yang belum dilaksanakan ditujukan untuk penanganan dampak covid-19 (Bansos). ● Belum adanya petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) tentang pelaksanaan kegiatan terkait pengumpulan orang banyak.	● Menerapkan standar protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan selama kondisi pandemik. covid-19. ● Mengembangkan serta mengoptimalkan sistem online (media sosial) dalam kegiatan yang melibatkan masyarakat umum. ● Membuat rencana kegiatan dengan membatasi jumlah orang (peserta) dan waktu pelaksanaan yang lebih singkat. ● Melakukan koordinasi dengan kementerian Ketenagakerjaan RI terkait petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dalam program kegiatan yang bersumber dari dana APBN.
6	Kecamatan Tarakan Timur	● Ketersediaan Program/Kegiatan. ● Adanya perencanaan program kegiatan. ● Ketersediaan SPD Anggaran. ● Sebagian besar PPTK melaksanakan setiap kegiatan yang menjadi	● Adanya peraturan yang cepat berubah. ● Terdapat PPTK yang belum dapat maksimal melaksanakan kegiatan karena mendapat tugas tambahan dalam Penanganan Covid-19.	● Peningkatan pengetahuan dan pemahaman aparatur terkait perencanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan, untuk dapat menyusun laporan evaluasi Renja PD dengan baik sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017.

NO	PERANGKAT DAERAH/BIRO	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAK LANJUT PELAKSANAAN RKPD PERIODE BERIKUTNYA
		tanggungjawabnya, baik pelaksanaan maupun dokumen pertanggungjawabannya.		● Peningkatan koordinasi internal OPD agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara maksimal.
7	Dinas Perhubungan	● Masih terdapat celah Pungutan liar yang bisa dilakukan oleh Jukir ● Hasil setoran retribusi parkir tepi jalan umum masih belum optimal ● Belum ada data pendukung untuk menghitung potensi titik parkir ● Penjualan Kartu E-Parkir berlangganan belum optimal ● Dengan ditetapkannya Akreditasi C pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor maka perlu melengkapi Alat Uji Kedalaman Alur Ban, Speedometer Tester, dan Side Slip Tester, namun anggaran tersebutdi Refocusing		● Sosialisasi kepada masyarakat tentang pengawasan perparkiran ● Perlu adanya anggaran penagawasan perpakiran ● Survey terhadap potensi Ttitik Parkir ● Membuka lebih banyak tempat penjualan Kartu E-Parkir ● Pengembalian anggaran refocusing
8	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	● Dalam Menentukan jumlah dan harga kebutuhan pangan dalam situasi pandemi covid-19 susah untuk diprediksi ● Pengembalian dana DAK melalui Peraturan Presiden baru diterbitkan bulan Juni ● Adanya aturan yang mewajibkan setiap kegiatan lelang fisik harus menganggarkan K3		● Pemantauan harga dan stok pangan secara intensif untuk membuat neraca kebutuhan pangan ● Percepatan lelang ● Memasukkan K3 dalam perhitungan RAB

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

3

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Tahun 2021 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2021. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Tarakan baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2021. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi Tahun 2021 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah terindentifikasi di Kota Tarakan.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan tahun 2021 merupakan tahun kedua dari RPJMD Kota Tarakan periode 2019-2024. Tema Pembangunan Daerah Kota Tarakan untuk tahun 2021 mempedomani 3 kebijakan pembangunan yaitu: Arah Kebijakan

RPJPD Kota Tarakan tahap ke V (2020-2025), Kebijakan Provinsi tahun 2021, dan Kebijakan Nasional tahun 2021. Dengan memperhatikan tiga dasar kebijakan tersebut maka Tema Pembangunan Daerah Kota Tarakan tahun 2021 ialah ”PEMANTAPAN PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH DAN SUMBERDAYA LOKAL YANG BERKUALITAS”. RKPD tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang sangat strategis yang menjadi pondasi dasar dalam pembangunan lima tahunan. Oleh karena itu rumusan kebijakan ekonomian dan keuangan daerah harus berkualitas dan tepat sasaran untuk optimalisasi dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Kebijakan perekonomian sebagai penunjang utama pelaksanaan pembangunan daerah sangat menentukan tingkat efektivitas maupun efisiensi penggunaan anggaran pembangunan dan menjadi titik poin penting bagi evaluasi pendanaan setiap program dan kegiatan pembangunan daerah. Sejauh mana optimalisasi capaian pembangunan daerah dengan ”besaran anggaran” yang telah direncanakan akan menentukan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan pada periode pembangunan berikutnya. Oleh karena itu paradigma penggunaan anggaran harus digeser dari yang bersifat money follow functions menjadi money follow programs yang didasarkan pada dasar kinerja yang dikenal dengan performance based budgeting.

Berbagai kelemahan dan kekurangan pada pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya akan menjadi pembelajaran berharga jika evaluasi dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Pembelajaran tersebut akan menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih akuntabel, sehingga diharapkan terjadi akselerasi capaian pembangunan untuk mewujudkan target kinerja pembangunan Kota Tarakan. Hasil dari pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya ini akan menunjukkan hasil-hasil yang dirumuskan dalam monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Positif ataupun negatif phasil

pembangunan tersebut akan menjadi tolok ukur pelaksanaan pembangunan pada periode ini apakah perlu dilakukan penyempurnaan program dan kegiatan maupun penggantian program dan kegiatan yang lebih baik.

Melihat arah kebijakan perekonomian wilayah, analisis ekonomi terutama ekonomi makro diperlukan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan di setiap tahapan pembangunan daerah. Dengan kata lain, analisis ekonomi merupakan salah satu dasar dari kegiatan perencanaan dalam memutuskan arah kebijakan ekonomi suatu daerah. Analisis ekonomi dilakukan dengan cara menilai sejauh mana perkembangan asumsi dasar ekonomi makro nasional Tahun 2021 dan kebijakan dibidang ekonomi Provinsi Kaltara maupun kota Tarakan 2021.

Tabel 3.1.

Proyeksi Indikator Makro Ekonomi

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Target 2020	Target 2021
1.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	7,69	4.39 – 6.69	7,30
2.	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,0	6.09-6,46	5,7
3.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,09	76,49	77,48
4.	Tingat Pengangguran Terbuka	Persen	4,78	6,5	5,79

3.1.1. Kondisi Ekonomi Tahun 2019

Tabel 3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perekonomian Kota Tarakan berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Tahun 2019 mencapai Rp 36,29 triliun dan atas dasar harga konstan Tahun 2010 mencapai Rp 22,24 triliun.

Ekonomi Kota Tarakan Tahun 2019 tumbuh 7,69 persen meningkat dibanding Tahun 2018 sebesar 7,55 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha

Konstruksi 13,25 persen, secara berurutan . Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 11,02 persen, Jasa Pendidikan 9,98 persen dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,81 persen.

2. Investasi di Kota Tarakan

Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah penanaman modal (investasi). Kegiatan investasi akan mendorong terjadinya transformasi potensi sumber daya ekonomi pada Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi nilai tambah yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahwa tujuan akhir pembangunan adalah mensejahterakan masyarakat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan akan mengambil peran dan memberikan konstribusi pada perekonomian daerah dengan mengupayakan peningkatan realisasi investasi. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Meningkatnya nilai investasi di Kota Tarakan, yaitu: Penambahan nilai realisasi Investasi PMDN.

Penanaman Modal adalah merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh daerah sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 2014. Sebagai salah satu urusan wajib yang memberikan pelayanan kepada masyarakat (public services), pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai salah satu bentuk kepastian hukum kepada para penanam modal baik dalam negeri maupun asing yang akan berinvestasi di Indonesia. Kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk lebih mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya secara maksimal dan efisien, sehingga mampu memberdayakan potensi yang ada pada masing-masing daerah guna mencapai kemandirian perekonomian yang akhirnya dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Capaian realisasi indikator sasaran strategis kedua, dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.2.
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai Investasi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1.	**Persentase realisasi Investasi PMDN**	%	525.000.000,00	714.513.744.160,00	136,09%
Rata – Rata Capaian Kinerja				**136,09% Sangat Baik**	

Sumber : DPMPTSP Kota Tarakan

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator kinerja pada sasaran strategis kedua yang ditetapkan, rata-rata capaian kinerjanya sebesar 136,09% dengan kategori *"sangat baik"*

Tabel 3.3.
Jumlah Nilai Investasi PMDN di Kota Tarakan
Tahun 2015 – 2019

NO.	TAHUN	TARGET	NILAI INVESTASI (Rp)	KENAIKAN/PENURUNAN (Rp)
1	2015	50.000.000,00	65.300.019.102,00	3.230.595.471,00
2	2016	50.000.000,00	1.009.866.899.005,00	944.566.879.903,00
3	2017	50.000.000,00	49.878.705.043,00	-959.991.193.962,00
4	2018	525.000.000,00	179.309.346.960,00	129.430.641.917,00
5	2019	525.000.000,00	714.513.744.160,00	535.204.397.200,00

Sumber : DPMPTSP Kota Tarakan

Tabel 3.4.
Rekapitulasi Investasi PMDN Melalui OSS
DPMPTSP Tahun 2019

NO.	BULAN	NOMOR INDUK BERUSAHA		REALISASI INVESTASI	
		JUMLAH	NILAI INVESTASI	JUMLAH	NILAI INVESTASI
1	JANUARI	85	141.333.629.600	25	80.319.263.600,000
2	FEBRUARI	54	82.102.185.500	7	7.939.567.000
3	MARET	88	231.168.741.659	37	179.450.069.659
4	APRIL	74	83.078.542.798	50	29.490.015.555
5	MEI	86	134.168.091.343	54	51.283.667.553
6	JUNI	46	61.716.266.000	28	48.111.990.000
7	JULI	90	92.367.066.194	50	52.872.135.194
8	AGUSTUS	93	90.551.513.580	63	54.289.023.576

NO.	BULAN	NOMOR INDUK BERUSAHA		REALISASI INVESTASI	
		JUMLAH	NILAI INVESTASI	JUMLAH	NILAI INVESTASI
9	SEPTEMBER	97	938.690.679.064	79	52.465.679.064
10	OKTOBER	111	246.160.267.350	70	54.469.423.000
11	NOVEMBER	98	124.505.994.138	72	54.662.379.959
12	DESEMBER	66	64.655.544.102	40	49.160.530.000
	TOTAL	**988**	**2.290.498.521.328**	**575**	**714.513.744.160**

Sumber : Bidang Penanaman Modal DPMPTSP 2019

Berdasarkan data Tabel 3.24, komposisi jumlah pelaku usaha yang berinvestasi di Kota Tarakan pada tahun 2019 berjumlah 575 investor. Sedangkan, nilai investasi diperoleh dari nilai proyek investasi yang dimulai di tahun 2019 baik oleh pelaku usaha baru maupun lama. Rincian jumlah investor baru serta nilai minat investasi berdasarkan sektor usaha dapat dilihat pada Tabel 3.25.

Tabel 3.5.
Data Minat Investasi Tahun 2019 Berdasarkan Sektor Usaha Di Kota Tarakan Tahun 2019

NO.	SEKTOR	JUMLAH USAHA	JUMLAH REALISASI (Rp)	%
I.	**SEKTOR PRIMER**			-
1	Tanaman Pangan & Perkebunan	-		-
2	Pertanian	7	2.745.000.000	0,38
3	Kehutanan	1		-
4	Perikanan	19	3.365.530.000	0,47
5	Pertambangan	3		0,01
II.	**SEKTOR SEKUNDER**			
1	Industri Makanan	13	215.834.348.259	30,21
2	Industri Tekstil	5	885.000.000	0,12
3	Industri Barang dari kulit & alas kaki	-	-	
4	Industri Kayu	1	70.000.000	0,01
5	Industri Kertas, Barang dari kertas dan Percetakan	6	2.723.943.666	0,38
6	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	-	-	
7	Industri Karet, Barang dari karet dan Plastik			
8	Industri Mineral Non Logam	2	1.300.000.000	0,18
9	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	7	761.429.600	0,11
10	Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam	-	-	
11	Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	2	250.000.000	0,03
12	Industri Lainnya	3	435.000.000	0,06

NO.	SEKTOR	JUMLAH USAHA	JUMLAH REALISASI (Rp)	%
III.	SEKTOR TERSIER			-
1	Listrik, gas & air	9	883.000.000	0,12
2	Konstruksi	25	46.599.000.000	6,52
3	Perdagangan & reparasi	542	329.730.002.635	46,15
4	Pariwisata (Hotel & restoran)	38	37.555.308.000	5,26
5	Transportasi, gudang & komunikasi	32	26.438.000.000	3,70
6	Perumahan, kawasan industri & kantor	13	13.840.000.000	1,94
7	Jasa lainnya	53	30.998.182.000	4,34
JUMLAH		**781**	**714.513.744.160,-**	

Sumber : Bidang Penanaman Modal DPMPTSP 2019

Dari tabel 3.25 dapat dilihat melalui 3 (tiga) sektor minat pengusaha berinvestasi di Kota Tarakan yaitu pada (1) sektor Primer ada 5 sektor yang di dominasi oleh sektor Perikanan dengan 19 badan usaha 0,47% atau Rp.3.365.530.000,- ; (2) sektor sekunder terdapat 12 sektor yang di dominasi oleh industri makanan dengan jumlah 13 badan usaha 30,21 % atau Rp. 215.834.348.259,- ; (3) sektor tersier terdapat 7 sektor, terdapat 543 badan usaha yang mendominasi pada usaha perdagangan dan reparasi 46,15 % atau Rp.329.730.002.635,- . Secara keseluruhan dari 3 (tiga) sektor tersebut ada 781 jumlah badan usaha.

Tabel 3.6.
7 (tujuh) Sektor Kontribusi Terhadap Realisasi investasi Di Kota Tarakan Tahun 2019

NO	SEKTOR	JUMLAH	JUMLAH	%
1	Perdagangan & reparasi	542	329.730.002.635	46,15
2	Industri Makanan	13	215.834.348.259	30,21
3	Konstruksi	25	46.599.000.000	6,52
4	Pariwisata (Hotel & restoran)	38	37.555.308.000	5,26
5	Jasa lainnya	53	30.998.182.000	4,34
6	Transportasi, gudang & komunikasi	32	26.438.000.000	3,70
7	Perumahan, kawasan industri & kantor	13	13.840.000.000	1,94

7 (tujuh) Sektor Kontribusi terhadap Realisasi investasi PMDN di Kota berdasarkan sektor usaha didominasi oleh perdagangan dan reparasi sebesar 46,15 % (Rp. 329.730.002.635); Industri Makanan sebesar 30,21% (Rp. 215.834.348.259); Konstruksi 6,52 % (Rp.46.599.000.000); Pariwisata (Hotel&restoran) 5,26 (Rp.37.555.308.000), Jasa lainnya 4,34 % (Rp.30.998.182.000); Transportasi, gudang dan Perumahan 3,70% (Rp. 26.438.000.000); Perumahan , kawasan Industri & Kantor 1,90 % (Rp.840.000.000), kontribusi sektor usaha terhadap realisasi PMDN ditunjukkan oleh grafik 3.5 berikut :

Gambar 3.1.
Kontribusi Sektor Terhadap Realisasi PMDN di Kota Tarakan

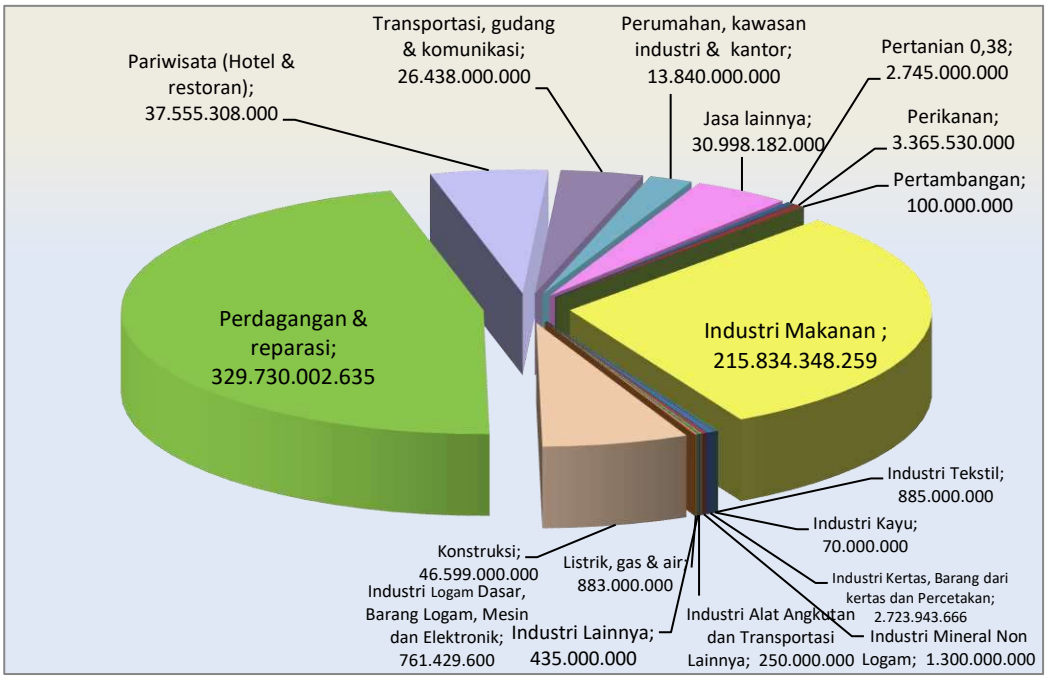

Pencapaian sasaran kedua ini juga tidak terlepas dari komitmen Kepala Daerah, investor, dan seluruh lapisan masyarakat Kota Tarakan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kota Tarakan akan terus bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi Kota Tarakan.

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang kedua ini, telah dilaksanakan memalui penguatan pelayanan perizinan melalui

aplikasi OSS dan didukung dengan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

Daya saing penanaman modal sampai saat ini masih rendah dan akan menemui berbagai tantangan internal serta persaingan lingkungan eksternal yang tendensinya kian menguat. Perlu dilakukan upaya-upaya dalam peningkatan daya saing penanaman modal. Peningkatan investasi akan terlihat apabila didukung dengan faktor-faktor yang mempengaruhi investasi baik faktor diluar maupun didalam negeri terutama faktor keamanan, politik dan kepastian hukum.

3. Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara dimana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu panjang (kontinu) yang disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Pada umumnya inflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Inflasi adalah gejala ekonomi yang tidak mungkin dihilangkan secara tuntas. Berbagai upaya yang dilakukan biasanya hanya sebatas pengendalian inflasi saja.

Bank Indonesia sesuai amanat undang-undang memiliki tujuan untuk mencapai kestabilan nilai rupiah termasuk laju inflasi, akan tetapi pada kenyataannya laju inflasi tidaklah sepenuhnya di bawah kendali BI. Inflasi pada sisi permintaan *(demand-pull inflation)* yang dikaitkan dengan ketersediaan uang beredar di masyarakat dapat dipengaruhi melalui kebijakan moneter BI. Namun ditinjau dari sisi penawaran, pergerakan inflasi sangat dipengaruhi oleh sisi produksi dan distribusi. Peningkatan biaya-biaya produksi yang membebani produsen *(cost-push inflation)* pada akhirnya dapat memicu kenaikan harga barang dan jasa di tingkat konsumen. Selanjutnya gangguan-gangguan pada distribusi barang juga menjadi penyumbang kenaikan harga-harga barang dan jasa. Selain itu, persoalan

pasokan bahan makanan terutama bahan makanan pokok sangat tergantung kepada keberhasilan panen serta pengaruh cuaca.

Mengingat keterbatasan BI di sisi penawaran, Pemerintah Daerah mempunyai peranan yang penting serta strategis dalam turut mengendalikan laju inflasi. Dikatakan penting karena Pemda mempunyai kapasitas untuk mengendalikan inflasi di daerah antara lain dengan menjaga rantai pasokan distribusi barang/jasa. Sementara itu, peran strategis Pemda dalam mengendalikan laju inflasi akan tercermin dari tingkat kesejahteraan masayakat yang relatif lebih baik. Seperti diketahui bahwa laju inflasi berdampak menggerogoti nilai uang yang dipegang masyarakat sehingga inflasi yang tinggi membuat daya beli masyarakat menjadi turun dan kesejahteraannya menjadi berkurang.

Kota Tarakan memiliki posisi yang strategis sebagai kota transit, namun hal tersebut jika tidak ditopang dengan sarana perekonomian akan berakibat pada tingginya biaya distribusi arus barang di kota Tarakan. Sehingga, ketika terjadi keterlambatan pasokan menyebabkan tingginya harga barang sesuai dengan hukum permintaan, oleh karena itu, Pemerintah Kota Tarakan menjadikan inflasi sebagai salah satu sasaran strategis dalam RPJMD.

Untuk mengetahui capaian kinerja pada RPJMD 2014-2019 sampai pada tahun kelima (2019), dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7
Inflasi Kota Tarakan Tahun 2015-2019

No	Tahun	Inflasi	
		Target RPJMD	Realisasi
1.	2015	3,42	3,42
2.	2016	3,41	4,31
3.	2017	6,57	2,77
4.	2018	6,27	5,00
5.	2019	5-7	1,47

Sumber : Bagian Perekonomian 2019

Inflasi Kota Tarakan di tahun 2019 adalah sebesar 1,47 lebih rendah dibandingkan dengan inflasi 4 (empat) tahun terakhir yakni

tahun 2015 sebesar 3,42, tahun 2016 sebesar 4,31, tahun 2017 sebesar 2,77 dan tahun 2018 sebesar 5,00. Hal tersebut merupakan prestasi dari TPID Kota Tarakan, karena di tinjau dari letak geografis, Kota Tarakan merupakan wilayah kepulauan yang memiliki ketergantungan tinggi pada daerah lainnya. Ketersediaan stok bahan makanan merupakan tugas pokok pemerintah daerah dalam rangka menjaga stabilitas harga. Dan ditahun 2019 pemerintah Kota Tarakan berhasil menjaga ketersediaan stok bahan makanan, ditunjukkan dengan harga yang stabil dan dapat menekan laju inflasi yang cukup signifikan yaitu dari tahun 2018 sebesar 5,00 menjadi 1,47 di tahun 2019.

Inflasi Kota Tarakan juga berada dibawah target inflasi nasional tahun 2019 sebesar 3,5±1 serta merupakan prestasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang berhasil menekan angka inflasi dibawah target RPJMD Kota Tarakan sebesar 5-7, sehingga mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi dengan baik, serta menjaga daya beli masyarakat. Hal tersebut tampak pada grafik di bawah ini:

Gambar 3.2.
Perbandingan Inflasi Tarakan dengan Nasional

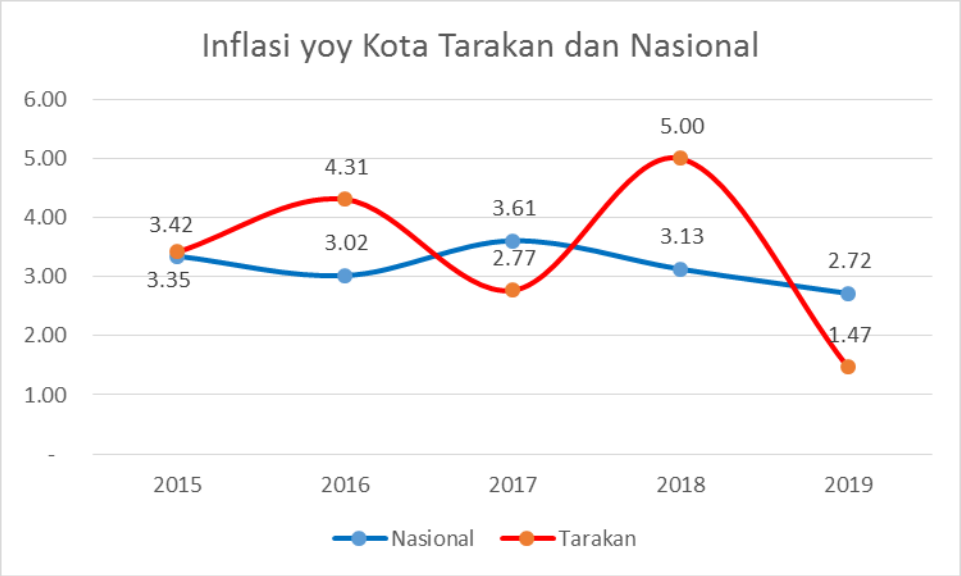

Jika dilihat perbandingan inflasi month to month, Pada tahun

2018 Infasi Kota Tarakan *month to month* mengalami fluktuasi dengan lonjakan yang cukup signifikan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dengan andil inflasi sebesar 2,71% terjadi di bulan Juni. Sedangkan, ditahun 2019 perkembangan inflasi bulanan sangat terkendali dengan adanya peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Tarakan yang dapat menekan laju inflasi pada angka 0,53%. Hal tersebut tampak pada grafik dibawah ini:

Gambar 3.3.
Perkembangan Inflasi Kota Tarakan *Month to Month* tahun 2018 dan 2019

4. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase dari jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja berumur 15 tahun atau lebih yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sehingga angkatan kerja merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan. untuk itu, pertumbuhan penduduk secara langsung berpengaruh pada perkembangan ketenagakerjaan dimana bertambahnya penduduk usia kerja yang sekaligus akan meningkatkan jumlah angkatan kerja, jika tidak diimbangi dengan penambahan kesempatan kerja, maka akan menimbulkan permasalahan dalam pembangunan yaitu meningkatnya jumlah pengangguran.

Dalam Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan: “untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa” Selanjutnya secara kongkrit tertuang pada pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Hal ini berarti secara konstitusional negara berkewajiban menyediakan kesempatan kerja yang cukup, produktif dan renumeratif yang secara gamblang ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (3) yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja" 10 Jaminan terhadap hak atas pekerjaan juga ditegaskan di dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan: “Setiap warga negara sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. Selanjutnya kebijakan pemerintah dalam pembangunan ketenagakerjaan secara pokok tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Untuk mengetahui capaian kinerja dari Menurunnya Tingkat Pengangguran dengan indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka, maka dapat dinilai dari matrik berikut ini :

Tabel 3.8
Capaian Menurunnya Tingkat Pengangguran RPJMD Tahun Kelima (2019)

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian kinerja tahun 2018 (%)	Tahun 2019		Capaian kinerja tahun 2019 (%)	Tahun 2019		Capaian kinerja tahun 2019 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target Akhir RPJMD	Realisasi	
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,89	5,94	113,79	6-7	4,78	120,33	6-7	4,78	120,33

Sumber : BPS Kota Tarakan, 2019

Berdasarkan tabel 3.7 dapat diketahui bahwa realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2019 tercapai 4,78 % dengan

capaian kinerja 120,33 % dengan kategori sangat tinggi demikian pula dengan tahun sebelumnya yang mencapai 5,94% dengan capaian kinerja 113,79% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tarakan pada tahun 2019 turun 1,16 poin dibanding tahun sebelumnya. TPT Kota Tarakan tahun 2019 mencapai 4,78 persen atau sebanyak 6.008 orang, mengalami penurunan dibandingkan TPT tahun 2018 yaitu 5,94 persen atau sebanyak 6.947 orang. Capaian tahun 2019 ini merupakan capaian tahun kelima dan telah melebihi target akhir RPJMD Kota Tarakan 2014-2019.

Jika dibandingkan dengan target dan capaian nasional, maka terget sasaran menurunnya tingkat pengangguran dengan indikator tingkat pengangguran terbuka di tahun 2019 dengan capaian 4,78 % maka capaian sasaran ini lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka nasional yaitu 5,29 %.

Hal ini disebabkan karena upaya Pemerintah Kota Tarakan bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun lintas sektoral seperti Perbankan dan Dunia Usaha dalam rangka mengatasi permasalahan pengangguran di Kota Tarakan. Beberapa langkah strategis yang telah dilakukan Pemerintah Kota Tarakan adalah menciptakan situasi kondusif yang memberikan ruang bagi tumbuhnya investasi swasta untuk menciptakan lapangan kerja. Selain itu, pemerintah juga mencanangkan program-program peningkatan kualitas sumberdaya manusia seperti peningkatan keahlian tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan, pengembangan kewirausahaan, maupun program padat karya yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesempatan berusaha. Disisi lain, Pemerintah Kota Tarakan berperan dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis antara pemberi kerja dan pekerja itu sendiri.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian pada tahun 2019 diantaranya Program Peningkatan

Kesempatan Kerja dan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja yang selanjutnya diimplementasikan melalui kegiatan Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja, Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja, Pelatihan dan Pendidikan Ketrampilan bagi Pencari Kerja.

Dalam Kegiatan Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja dilakukan *Job Canvassing* yaitu suatu kegiatan dimana Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian berkunjung ke perusahaan-perusahan yang ada di Kota Tarakan, untuk mengetahui bagaimana spesifikasi, berapa kebutuhan, dan apa yang di perlukan perusahaan. Laporan lowongan kerja ini akan direkapitulasi oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian untuk kemudian diumumkan dan ditawarkan kepada pencari kerja yang terdaftar, pencari kerja yang memenuhi kualifikasi sebagaimana dibutuhkan oleh perusahaan. Sehingga pencari kerja bisa secara langsung mendaftar pada perusahaan. Dan melalui kegiatan Penyebarlusan Informasi BursaTenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian menyelenggarakan kegiatan Pameran Bursa Kerja (*Job Fair*) 2019 yang mempertemukan pelaku usaha/perusahaan dan para pencari kerja di suatu tempat yang ditentukan, dimana para pencari kerja dapat memperoleh informasi cepat secara lengkap langsung dari perusahaan yang membutuhkannya, karena selama ini para pencari kerja kurang mendapatkan informasi / mengetahui lowongan pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan, demikian juga sebaliknya perusahaan akan memperoleh tenaga kerja yang dibutuhkan secara cepat dan akurat sesuai syarat dan ketentuan. Pada *Job Fair* Tahun 2019, turut berpartisipasi 9 perusahaan dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia sebanyak 42 jabatan.

Gambar 3.4
Dokumentasi Kegiatan Informasi Bursa Tenaga Kerja (*Job Fair*) 2019

Keseriusan pemerintah dalam mengatasi persoalan pengangguran ini, juga dapat dilihat dari diselenggarakannya pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi bagi masyarakat, dalam upaya meningkatkan keterampilan SDM yang berkualitas dan berdayasaing. Selain itu, juga tersedia pelatihan kewirausahaan bagi para pemilik usaha mikro dengan tujuan pelatihan tersebut dapat meningkatkan mutu produksinya dan dapat menambah/membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran di Kota Tarakan.

Gambar 3.5
Pelatihan Barista

Gambar 3.3
Pelatihan Menjahit Pakaian

Gambar 3.6
Pelatihan Pengelasan SMAW 3G

Gambar 3.7
Dokumentasi kegiatan Pelatihan Instalasi Bangunan Rumah Sederhana

Persentase tenaga kerja yang terlatih tahun 2019 adalah 55% atau sebanyak 1.024 orang dari 1.852 orang pendaftar pelatihan. Pencapaian

tersebut ditunjang oleh dana APBN yang dianggarkan melalui UPT. Lembaga Latihan Kerja (LLK) Kota Tarakan. Selain itu, UPT. LLK Kota Tarakan menjalin bentuk kerja sama dengan perusahaan yang juga ikut mempengaruhi tingkat penempatan tenaga kerja, seperti pencari kerja yang dilatih oleh UPT. Lembaga Latihan Kerja akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ada di perusahaan/pengguna jasa.

Pada tahun 2019 jumlah penduduk bekerja berusaha sendiri (berwirausaha) mengalami peningkatan sebesar 20,21 % atau sebanyak 24.185 orang dibandingkan dari tahun sebelumnya yaitu 17,10% atau sebanyak18.810 orang. Dan sektor jasa merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja sebanyak 43.079 orang (51,77%) pekerja, sementara sektor industri / manufaktur menyerap 21,202 orang (25,48%) pekerja. Sedangkan persentase pertumbuhan unit IKM dan jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor IKM pada tahun 2019 mengalami lonjakan yang sangat tinggi (71,83%) bila dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya (66,09%). Hal ini disebabkan oleh diakomodasinya usaha industri yang mendapatkan legalitas usaha (izin usaha) melalui Izin Usaha Mikro Kecil (yang diterbitkan oleh kecamatan) ke dalam data direktori perusahaan industri. Melihat kecenderungan peningkatan pengurusan perizinan oleh masyarakat dunia usaha baik di kecamatan (IUMK) maupun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

5. Kemiskinan

Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan merupakan langkah lanjutan dari analisis kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan. Melalui indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada dibawah garis kemiskinan. Menurut BPS, penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dapat diategorikan

menjadi dua, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM). Terdapat perbedaan dalam penentuan garis kemiskinan perkotaan dan perdesaan. GKM ditetapkan sebesar 2.100 kkalori per kapita per hari, sedangkan GKNM yaitu untuk sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Tabel 3.9
Data Kemiskinan Kota Tarakan Tahun 2015-2019

Indikator	Sat	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Penduduk Miskin Kota Tarakan	%	5,11	5,17	6,32	6,15	6,00
Jumlah Penduduk Miskin Kota Tarakan	Jiwa	11.910	12.520	15.840	15.970	16.110
Garis Kemiskinan Kota Tarakan	Rp	485.447	519.774	572.213	613.593	654.308

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2019

Garis kemiskinan Kota Tarakan yang ditetapkan semakin meningkat per tahunnya. Pada tahun 2015, garis kemiskinan Kota Tarakan setara Rp.485.447/kapita/bulan, sedangkan pada tahun 2019 setara Rp.654.308/kapita/bulan. Kota Tarakan memiliki garis kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan tingkat Provinsi Kalimantan Utara.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

3.1.2.1 Perkembangan dan Tantangan Perekonomian Global

Pertumbuhan ekonomi global pada Tahun 2020 dan 2021 sedikit membaik dibandingkan Tahun 2019 yang kinerjanya melemah. Data *World Bank* memprediksi diprediksi tumbuh 2,5 persen, naik tipis dari Tahun 2019 sebesar 2,4 persen. Pertumbuhan seiring pulihnya perekonomian yang diharapkan terjadi pada beberapa negara berkembang yang mengalami kesulitan di Tahun 2019.

Kondisi ekonomi global yang masih menghadapi ketidakpastian, perkiraan penurunan pertumbuhan ekonomi global serta penurunan volume perdagangan dunia diperkirakan akan mengakibatkan

ekspor Indonesia mengalami penurunan. Hal ini meimbulkan pesimisme dari berbagai kalangan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen pada Tahun 2019. Pernyataan tersebut setidaknya dikemukakan oleh Bank Dunia (World Bank) dan Dana Moneter Internasional (IMF). Mereka menilai sulit mencapai target pertumbuhan 5,3%. Lembaga pemeringkat global, seperti Fitch dan S&P memprediksi perekonomian Indonesia tahun depan hanya akan mencapai 5,2%. Bahkan, proyeksi Moody's hanya 4,8%, lebih rendah dari Tahun 2018. Indonesia dianggap masih rentan terhadap sentimen eksternal. Namun demikian, kondisi tersebut tidak membuat pemerintah pesimistis terhadap target pertumbuhan ekonomi di Tahun 2021. Khusus untuk Indonesia, Bank Dunia (World Bank) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia menguat menjadi 5,1 persen pada Tahun 2020 serta 5,2 persen untuk Tahun 2021 dan 2022.

Sesuai dengan Rancangan Awal RKP Tahun 2021, perekonomian Indonesia pada Tahun 2021 masih akan dihadapkan pada berbagai tantangan dan risiko, baik dari global maupun domestik. Tantangan ekonomi global yang utama adalah kondisi ketidakpastian di tingkat global yang harus dihadapi, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi dunia yang masih relatif rendah, sebesar 3,3 dan 3,4 persen pada Tahun 2020 dan 2021. Masih relatif lambatnya pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan menyebabkan stagnannya pertumbuhan volume perdagangan dunia dan harga komoditas internasional pada Tahun 2020.
2. Meningkatkanya tensi geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Di prediksi bisa menimbulkan perang.
3. Ketidakpastian perang dagang yang dapat mendorong investasi yang lebih rendah, gangguan pada supply chain, dan lambatnya pertumbuhan produktivitas pada tingkat global. Eskalasi perang dagang, terutama antara China dan AS, dikhawatirkan dapat memperburuk perlambatan pertumbuhan ekonomi China.

4. Harga komoditas ekspor utama yang stagnan. Harga minyak kelapa sawit akan dipengaruhi pasokan yang masih berlebih di pasar dunia.

3.1.2.2 Perkembangan dan Tantangan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan sebesar 3,5 dan 3,7 persen per tahun, sepanjang Tahun 2020-2024. Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia diperkirakan juga akan cenderung menurun, di antaranya adalah batu bara dan minyak kelapa sawit, seiring dengan beralihnya permintaan dunia ke produk yang lain. Selain itu, risiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain perang dagang, perlambatan ekonomi China, dan risiko geopolitik di Timur Tengah.

Secara keseluruhan dasar asumsi makro nasional tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.9.

Tabel 3.10
Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Nasional
Tahun 2020-2021

No	Indikator	2020	2021
1	Pertumbuhan Ekonomi (%,yoy)	5,3%	4,5 – 5,5 %
2	Inflasi (%,yoy)	2,5-4,5%	2-4%
3	Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	5,4 %	6,67 – 9,56%
4	Nilai Tukar (Rp/US$)	15.000	14.900-15.300
5	Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel)	70	40 - 50
6	Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	775	677rb – 737rb
7	Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.250	1.083-1.173

Sumber: RKP , 2021

3.1.2.3 Tantangan dan Prospek Kota Tarakan

Mencermati respon pemerintah terhadap tantangan global dan nasional. Perkembangan perekonomian global diwarnai ketidakpastian yang besar dan tantangan yang dihadapi, pemerintah merasa penting mengarahkan kebijakan untuk mengoptimalkan berbagai potensi domestik dalam rangka memperkuat ketahanan perekonomian Kota Tarakan. sektor domestik, perlu terus dibangun industri pengolahan yang terintegrasi antar pelaku usaha (usaha

besar, usaha kecil dan koperasi). Sektor Perdagangan, Sektor Kontruksi, Properti sektor transportasi dan pergudangan.

Prosepek berkutnya adalah terkait belanja infrastruktur. Proyek infrastruktur yang akan dikembangkan adalah: (1) Jalan, (2) Bandara, (3) Pelabuhan laut, Arah belanja tersebut disertai dengan reformasi fiskal,institusional, dan regulasi, bahkan Pemerintah Pusat akan melakukan relokasi belanja subsidi dan infrastruktur pada Tahun 2021 mendatang. Pemerintah Kota Tarakan akan terus memacu pembangunan infrastruktur dalam 5 (lima) tahun kedepan guna melanjutkan tren pertumbuhan ekonomi yang melaju di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Infrasruktur dinilai menjadi prasyarat bagi peningkatan daya saing Kota Tarakani dengan jumlah penduduk saat ini sudah mendekato angka 300.000 jiwa .

Pada Tahun 2019, Kota Tarakan mencetak pertumbuhan ekonomi 7,69 persen atau melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang ada di level 5,2 persen, hal ini merupakan dampak dari keberadaan infrastruktur sehingga bisa memacu roda perekonomian, ditopang oleh sektor pengolahan dan perdagangan.Pemerintah Pusat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan telah mencanangkan berbagai kegiatan strategis yang tersebar di seluruh Indonesia yang disebut dengan Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Hal ini diawali dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Mencermati perkembangan perekonomian global dan domestik selama lima tahun terakhir, perekonomian nasional ke depan diperkirakan akan melambat dan penuh ketidakpastian yang dapat sewaktu-waktu mengoreksi ke bawah pertumbuhan ekonomi namun masih menunjukkan optimisme dalam jangka menengah. Sampai

dengan akhir tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Imdonesia diproyeksikan sebesar 5,0-5,4 persen.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global yang kurang menguntungkan. Ekspor diperkirakan belum membaik seiring permintaan global dan harga komoditas yang menurun meskipun beberapa produk ekspor manufaktur tetap tumbuh positif. Beberapa risiko yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi global antara lain kebijakan perdagangan yang semakin protektif dan berujung pada perang dagang menjadi salah satu risiko terbesar yang dihadapi oleh perekonomian dunia. Merebaknya wabah virus Corona (Covid 19) yang menyebabkan melemahnya kunjungan wisatawan sebagai imbas dari ditutupnya jalur penerbangan untuk wisatawan dari negara yang terpapar virus Corona.

Perkembangan dan kondisi perekonomian global ini secara langsung akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Tren perkembangan yang positif perekonomian domestik masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain: (i) adanya supply constrains karena daya dukung infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai memerlukan terobosan-terobosan untuk mendorong produktivitas; (ii) masih kurang kuatnya daya saing ekonomi membutuhkan efisiensi sistem logistik dan birokrasi; (iii) permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan yang perlu dientaskan melalui kebijakan afirmasi dalam mewujudkan ketahanan energi dan ketahanan pangan serta penciptaan lapangan kerja; dan (iv) isu-isu terkait dinamika ketenagakerjaan dan skill gap antara tenaga kerja yang tersedia dengan pasar tenaga kerja membutuhkan penguatan kuantitas dan kualitas pendidikan vokasional. Pada tahun 2021, perekonomian Indonesia diharapkan dapat terus tumbuh pada kisaran 4,5% hingga 5,5% persen secara bertahap meningkat per tahun, yang didukung oleh kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Upaya mendorong pertumbuhan perekonomian nasional ke depan membutuhkan kerja bersama dari

seluruh komponen bangsa, khususnya dalam upaya meningkatkan investasi serta menjaga tingkat konsumsi masyarakat. Upaya peningkatan kinerja investasi sebagai salah satu kunci pendorong pertumbuhan ekonomi nasional perlu disertai dengan upaya menjaga dan meningkatkan tingkat keyakinan masyarakat dan investor melalui peningkatan stabilitas politik dan keamanan, serta kepastian hukum dan kebijakan.

Pemerintah bersama dengan otoritas moneter dan Pemerintah daerah akan semakin memperkuat koordinasi kebijakan sebagai bentuk komitmen untuk mengendalikan laju inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil dalam rangka mendukung stabilitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemenuhan tersebut diantaranya dengan melanjutkan pelaksanaan program-program perbaikan dan peningkatan infrastruktur sehingga dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi nasional, menjamin kelancaran distribusi antarwilayah serta mendorong terjaganya pasokan barang serta monitoring pergerakan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat. Di sisi permintaan, Pemerintah akan selalu berupaya menjaga tingkat konsumsi masyarakat, diantaranya melalui kebijakan stabilisasi harga dan bantuan sosial dalam rangka menjaga daya beli masyarakat. Dalam jangka menengah, inflasi telah ditetapkan dalam tren menurun dan rendah dalam rangka mendukung pencapaian akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi pencapaian ini dilakukan sesuai dengan koridor inflation targeting framework agar dapat menjangkar ekspektasi inflasi masyarakat pada level yang relatif rendah. Melalui serangkaian kebijakan tersebut, Pemerintah menargetkan inflasi pada tahun 2021 dapat bergerak stabil dan menurun pada

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah lebih menjelaskan indikasi ketersediaan sumber daya keuangan dalam rangka penganggaran daerah pada tahun anggaran 2021 yang akan datang. Arah kebijakan

keuangan daerah mengacu pada azas umum dalam pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang lebih lanjut diatur pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang diubah dalam Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Analisis kinerja keuangan masa lalu pada dasarnya dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan daerah yang sudah dilaksanakan dimasa lalu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya. Kemudian dari analisis kinerja beberapa tahun ke belakang, akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dijadikan sebagai acuan analisis proyeksi kemampuan keuangan kedepan. Analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah.

Sebagai tahap awal dalam menganalisis kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu perlu diketahui kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kesinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai DOFD menunjukkan semakin kuat kemandirian pembiayaan pembangunan. Adapun klasifikasi DOFD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Skala interval Otonomi Fiskal

No	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Sedang
4	30,01-40,00	Cukup
5	40,01-50,00	Baik
6	>50	Sangat Baik

Sumber: Wulandari, 2001

Kondisi kemandirian keuangan daerah Kota Tarakan dalam 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2015-2019 berfluktuasi namun trennya cenderung menurun. Tren DOFD Kota Tarakan tahun 2015 ke tahun 2019 menurun dari 11,26 % menjadi 6,13% ditahun 2016. Diikuti tahun berikutnya meningkat hingga mencapai 8,18% ditahun 2018. Peningkatan DOFD dari tahun 2015 ke tahun 2019 bukan disebabkan oleh peningkatan PAD, namun justru lebih disebabkan adanya efek berdirinyaa Provinsi Kaltara sebagai daerah otonomi baru sehingga dengan begitu menghilangkan sumber penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dari Provinsi Kalimantan Timur maupun Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya yang terakhir diterima ditahun 2014. Hilangnya sumber tersebut menyebabkan penurunan pendapatan daerah yang sangat signifikan. Penurunan pendapatan ditahun 2015 tersebut membuat rasio PAD semakin besar. Oleh karena itu besarnya rasio DOFD ditahun 2016 relatif bukan bersifat positif.

Kondisi keuangan daerah Kota Tarakan pasca tahun 2015 mempunyai tantangan yang cukup besar, selain dengan hilangnya sumber Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dari Provinsi Kalimantan Timur serta Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, dengan adanya Undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kemudian berdampak hilagnya sumber-sumber PAD karena adanya pelimpahan wewenang. Hal tersebut berdampak sumber-sumber PAD tahun 2016 hampir seluruhnya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 kecuali sumber hasil retribusi daerah. Dengan melihat kondisi tersebut kemudian Pemerintah Kota Tarakan mulai memanfaatkan dan

mengenjot potensi-potensi PAD untuk meningkatkan penerimaan daerah. Usaha tersebut relatif berhasil yang terlihat dengan meningkatnya PAD dari tahun 2016 yang sebesar Rp. 62,198 miliar menjadi Rp. 72,401 miliar ditahun 2018.

Meskipun trendnya semakin meningkat khususnya dari tahun 2016 ke tahun 2018, namun DOFD tersebut terbilang masih rendah. Berdasarkan klasifikasi, rata-rata DOFD Kota Tarakan dari tahun 2015 hingga 2019 hanya mencapai 8,22% yang masih masuk kategori sangat kurang karena masih dibawah 10%. Adapun DOFD tertingi ditahun 2015 yang sebesar 11,26% masuk kategori kurang.

Dengan melihat kondisi tersebut, maka Pemerintah Kota Tarakan harus semakin lebih kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber keuangan daerahnya sehingga penerimaannya tidak tergantung kepada pemerintah pusat maupun provinsi.

Perkembangan DOFD Kota Tarakan periode tahun 2013-2019, dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.12

Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kota Tarakan Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Persentase (%)
1	2015	76.462.510.137,00	678.822.211.761,00	11,26
2	2016	62.198.512.279,00	1.014.484.790.553,00	6,13
3	2017	67.092.417.030,00	774.265.955.603,00	8,67
4	2018	72.401.576.596,80	885.538.700.521,69	8,18
5	2019	73.230.451.032,82	920.721.653.011,36	7,95
Rata-Rata		**70.277.093.415,12**	**854.766.662.290,01**	**8,22**

3.2.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kota Tarakan dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalahsetiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Perkembangan pendapatan dan belanja daerah Kota Tarakan mengalami tren meningkat dimana pendapatan daerah pada tahun 2015 sebesar Rp. 678,82 milyar menjadi Rp. 1.014,48 triliun pada tahun 2016, lalu mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar Rp. 774,27 miliyar. Penurunan pendapatan ini juga berdampak pada peningkatan kemampuan belanja daerah dari Rp. 861,40 milyar pada tahun 2015 menjadi Rp. 763,79 miliar pada tahun 2019. Begitu juga dengan dengan pembiayaan (netto) daerah yang juga mengalami tren menurun akibat penurunan SiLPA yang sangat signifikan.

Gambar 3.8
Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Kota Tarakan Tahun 2015-2019 (dalam Miliar)

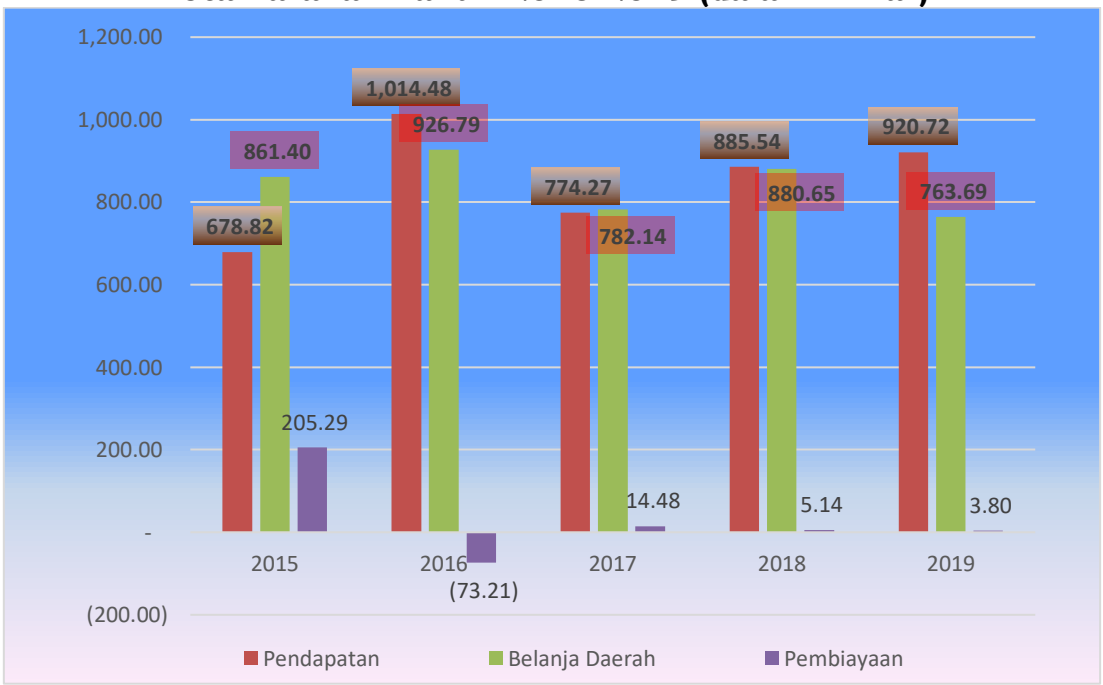

Sumber: BPKAD & BPPRD Kota Tarakan, 2019 (diolah)

a. Pendapatan Daerah

Sumber daerah pendapatan daerah terdiri atas:

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
(2) Dana Perimbangan yang meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
(3) Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, Pendapatan Lainnya.

Pendapatan daerah Kota Tarakan dalam 5 (lima) tahun terakhir (2015-2019) mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 1,13% pertahun. Jika dilihat dari komponen Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 2015-2019 terlihat bahwa semua sumber pendapatan mengalami penurunan dimana rata-rata penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2,99%, rata-rata penurunan Dana Perimbangan sebesar 0,28% dan rata-rata penurunan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 0,49%. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa penurunan komponen-komponen pendapatan daerah tersebut disebabkan karena dua hal utama yaitu: Pertama, terpisahnya Kota Tarakan dari Provinsi Kalimantan Timur yang berdampak pada hilangnya sumber-sumber penerimaan dari Provinsi Kalimantan Timur; Kedua, Adanya pelimpahan kewenangan suatu urusan ke Provinsi yang berdampak pada berkurangnya sumber-sumber PAD.

Jika dibandingkan dengan komponen Pendapatan Daerah lainnya, PAD merupakan komponen yang mengalami rata-rata penurunan yang terendah. Meskipun terbilang tingkat penurunannya terendah dibanding yang lain, namun tetap saja masih kategori negatif jadi kedepan harus masih perlu ditingkatkan. Jika dilihat lebih detil, sumber PAD yang mengalami tren menurun ialah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (-8,89%) dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (-19,05%). Adapun

sumber PAD yang mengalami pertumbuhan positif ialah Pendapatan Pajak Daerah (8,96%) dan Hasil Retribusi Daerah (5,72%). Dari hal tersebut terlihat bahwa Pemerintah Kota Tarakan sedang berupaya untuk terus meningkatkan kemadindirian keuangan daerah dengan menggenjot dua sumber PAD tersebut.

Untuk dana perimbangan secara agregat dari tahun 2015-2019 mengalami rata-rata penurunan sebesar 0,28%. Untuk komponen dana perimbangan yang mengalami peningkatan ialah Dana Alokasi Umum sebesar 13,04% pertahun dan Dana Alokasi Khusus sebesar 279,33% pertahun. Meskipun kedua komponen dana perimbangan tersebut mengalami peningkatan, namun ternyata secara agregat nilai dana perimbangan mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor penentu penurunan dana perimbangan tersebut ialah akibat menurunnya sumber penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak. Setidaknya penurunan nilai Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak ialah dari Rp. 273,930 miliar ditahun 2013 menjadi Rp. 236,549 miliar.

Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah secara agregat dari tahun 2015-2018 juga mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 0,49% pertahun. Adapun komponen dari lain-lain pendapatan daerah yang sah dimana Pendapatan Hibah pada tahun 2015-2018 tidak ada pendapatan, tahun 2019 menerima Pendapatan Hibah Sebesar Rp. 30,30 miliar , Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya mengalami rata-rata penurunan sebesar 5,23% pertahun hal ini disebabkan pada tahun 2014 nilai Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dari Rp. 101,49 miliar menjadi Rp. 40,9 miliar pada tahun 2015 atau mengalami penurunan sebesar 59,6% sehingga mempengaruhi rata pertumbuhan selama 5 tahun. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 84,3% dan pada tahun 2017 – 2019 tidak ada penerimaan. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya mengalami rata-rata

penurunan sebesar 20,37% pertahun, dan Pendapatan Lainnya mengalami rata-rata penurunan sebesar -0,4%.

Secara lebih rinci rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kota Tarakan Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3.13
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tarakan Tahun 2015-2019

URAIAN	REALISASI					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2015	2016	2017	2018	2019	
PENDAPATAN	**678,822,211,760.97**	**1,014,484,790,552.96**	**774,265,955,603.07**	**885,538,700,521.69**	**920,670,594,573.36**	**-1.13**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**76,462,510,136.88**	**62,198,512,278.56**	**67,092,417,030.24**	**72,401,576,596.92**	**73,179,392,594.82**	**-2.99**
Pendapatan Pajak Daerah	35,769,254,654.09	34,731,051,295.35	40,609,093,037.59	45,456,253,569.03	48,692,782,662.12	8.96
Hasil Retribusi Daerah	8,267,634,747.03	12,043,176,073.42	11,968,343,203.00	13,521,988,321.00	9,528,342,617.63	5.72
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,714,028,637.43	4,626,503,005.52	6,067,486,106.57	5,456,435,066.89	5,142,188,576.95	-8.89
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	25,711,592,098.33	10,797,781,904.27	8,447,494,683.08	7,966,899,640.00	9,816,078,738.12	-19.05
DANA PERIMBANGAN	**491,424,389,795.00**	**701,347,008,325.00**	**585,786,873,282.00**	**721,237,211,961.00**	**762,714,696,575.00**	**0.28**
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	273,930,658,795.00	255,402,084,965.00	138,370,519,529.00	182,678,993,462.00	236,549,108,153.00	-11.44
Dana Alokasi Umum	208.879.172.000	336,447,029,000.00	346,753,157,000.00	380,969,519,000.00	409,970,995,000.00	13.04
Dana Alokasi Khusus	8,614,559,000.00	109,497,894,360.00	100,663,196,753.00	157,588,699,499.00	116,194,593,422.00	279.33
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**110,935,311,829.09**	**250,939,269,949.40**	**121,386,665,290.83**	**91,899,911,963.89**	**84,776,505,403.54**	**-0.49**
Pendapatan Hibah	-	-	-	-	30,305,098,862.80	
Dana Darurat	-	-	-	-	-	
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	40,959,645,829.09	50,948,442,205.40	44,371,045,290.83	46,280,590,552.00	54,471,406,540.74	-5.23
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	31,797,166,000.00	5,000,000,000.00	-	-	-	
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	38,178,500,000.00	160,773,500,000.00	50,412,000,000.00	13,332,550,000.00	-	20.37
Pendapatan Lainnya	-	34,217,327,744.00	26,603,620,000.00	32,286,771,411.88	-	-0,4

Sumber: BPKAD & BPPRD Kota Tarakan, 2019 (diolah)

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib. urusan pilihan. dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu belanja dareah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir tahun 2015-2019 realisasi belanja daerah terus mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan mencapai 11,47% pertahun dari Rp. 861,39 triliun ditahun 2015 menurun menjadi Rp. 763.69 miliar ditahun 2019. Penurunan belanja tersebut seirama dengan penurunan pendapatan daerah pada kurun waktu yang sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Jika dilihat lebih rinci, Belanja Tidak Langsung (BTL) pada kurun waktu tersebut juga mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan mencapai 4,23% pertahun dari Rp.476.36 miliar ditahun 2015 menjadi Rp.372.17 miliar ditahun 2019. Penurunan nilai BTL tiap tahunnya sebenarnya justru bernilai positif. Artinya ada penekanan pada post-post tertentu dalam BTL. Dengan kondisi pendapatan daerah Kota Tarakan yang semakin menurun maka mau tidak mau Belanja Daerah harus ditekan. Adapun post di BTL yang telah berhasil ditekan dalam kurun waktu tersebut ialah Belanja Hibah dimana belanja hibah tahun 2015 sebesar Rp.35,03 miliar diturunkan menjadi RP.14.37 miliar ditahun 2019. Begitu pula dengan belanja pegawai yang mengalami penurunan dari Rp.476.36 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp.372.17 miliar pada tahun 2019.

Seperti halnya Belanja Tidak Langsung (BTL), Belanja Langsung (BL) juga mengalami penurunan sebesar 12,16% pertahun. Hal ini tentunya akan berdampak pada kualitas dan kuantitas belanja publik. Untuk itu maka Pemerintah Kota Tarakan akan mengefektifkan dan memprioritaskan belanja langsung yang sifatnya strategis.

Jika dilihat rasionya, proporsi BL terhadap total belanja dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Rasio BL ditahun 2015 sebesar 44,7% dan terus meningkat hingga mencapai 51,27% ditahun 2019. Adapun untuk proporsi BTL relatif mengalami penurunan dari 55,3% ditahun 2015 menjadi 48,73% ditahun 2019. Peningkatan rasio BTL terbesar terjadi ditahun 2015. Hal tersebut disebabkan karena ditahun 2015 selain pendaptan daerah yang menurun drastis juga adanya penerimaan pegawai sehingga meningatkan nilai belanja pegawai.

Peningkatan rasio BL pada dasarnya menunjukkan semakin tingginya kualitas belanja publik. Untuk itu sejak tahun 2015 Pemerintah Kota Tarakan berusaha meningkatkan kembali rasio BL. Hasilnya tahun 2015-2019 rasionya meningkat menjadi lebih dari 50%.

Gambar 3.9
Perkembangan Proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kota Tarakan Tahun 2015-2019

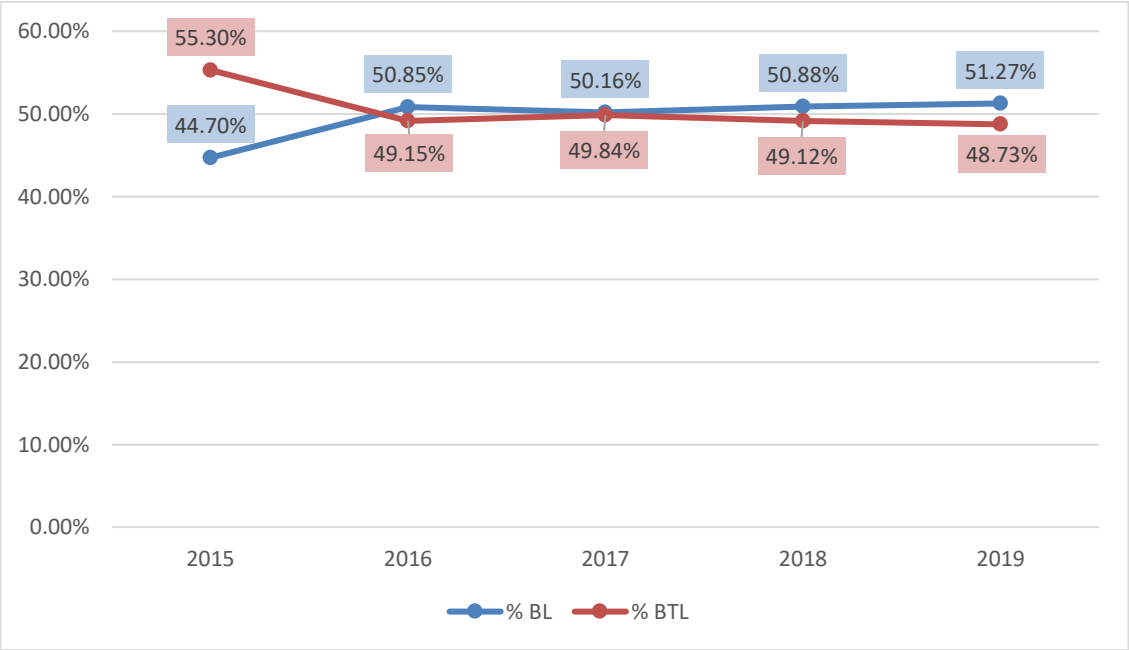

Sumber: BPKAD Kota Tarakan, 2019 (diolah)

Proporsi realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.14
Realisasi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun 2015-2019

No	URAIAN	REALISASI					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	
2	**BELANJA**	**861,395,298,675.45**	**926,791,967,871.06**	**782,139,143,811.88**	**880,654,610,999.49**	**763,693,529,822.31**	**-11.47**
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**476,369,133,491.83**	**455,541,369,499.87**	**389,803,232,424.32**	**432,542,255,785.50**	**372,176,863,278.77**	**-4.23**
2.1.1	Belanja Pegawai	433,021,094,119.83	433,373,403,999.87	370,939,737,777.32	395,845,858,819.50	353,538,817,595.77	-2.71
2.1.3	Belanja Subsidi	1,625,984,735.00	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	35,039,758,003.00	18,613,487,901.00	15,934,544,972.00	34,269,957,229.00	14,337,714,647.00	-7.26
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5,569,423,040.00	2,581,684,005.00	2,027,550,820.00	1,651,782,865.00	3,101,738,642.00	0.58
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	-	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	898,793,594.00	898,793,594.00	898,785,855.00	774,656,872.00	898,768,224.00	12.61
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	214,080,000.00	74,000,000.00	2,613,000.00	-	299,824,170.00	#DIV/0!
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	**385,026,165,183.62**	**471,250,598,371.19**	**392,335,911,387.56**	**448,112,355,213.99**	**391,516,666,543.54**	**-12.16**
2.2.1	Belanja Pegawai	17,683,505,275.00	15,682,689,633.00	8,083,149,251.86	128,200,000.00	1,237,756,500.00	136.06
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	238,623,353,335.82	219,092,325,746.21	209,049,140,239.79	192,566,449,523.99	225,042,639,592.43	-6.02
2.2.3	Belanja Modal	128,719,306,572.80	236,475,582,991.98	175,203,621,895.91	255,417,705,690.00	165,236,270,451.11	-3.34
	SURPLUS/DEFISIT	**(182,573,086,914.48)**	**87,692,822,681.90**	**(7,873,188,208.81)**	**4,884,089,522.20**	**156,977,064,751.05**	**530.21**

Sumber: BPKAD Kota Tarakan, 2019 (diolah)

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dengan kata lain pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Dalam lima tahun terakhir dari tahun 2015-2019 perkembangan pembiayaan daerah trennya relatif menurun. Meskipun menurun namun nilainya relatif masih mengalami surplus. Dengan kata lain nilai penerimaan pembiayaan lebih besar ketimbang pengeluaran pembiayaan. Nilai pembiayaan (netto) daerah sebesar Rp. 205,29 miliar, pada tahun 2015, sebesar (-73,21) miliar, tahun 2016 sebesar Rp. 14,48 miliar, tahun 2017, sebesar Rp. 5,14 miliar dan tahun 2018, sebesar Rp. 4 miliar pada tahun 2019.

Seluruh penerimaan pembiayaan daerah di Kota Tarakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah khususnya ditahun 2018 dan untuk Pembayaran Pokok Utang di tahun 2013 sebesar Rp. 5,14 miliar dan ditahun 2016 sebesar Rp. 95,93 miliar digunakan untuk Pembayaran Pokok Utang.

Secara lebih rinci, perkembangan Pembiayaan Daerah dan rata-rata pertumbuhan APBD Kota Tarakan tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.14.

Tabel 3.15
Rata-Rata Pertumbuhan APBD Kota Tarakan Tahun 2015-2019

No	URAIAN	REALISASI					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	**PENDAPATAN**	**678,822,211,760.97**	**1,014,484,790,552.96**	**774,265,955,603.07**	**885,538,700,521.69**	**920,670,594,573.36**	-1.1
1.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**76,462,510,136.88**	**62,198,512,278.56**	**67,092,417,030.24**	**72,401,576,596.92**	**73,179,392,594.82**	-3.0
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	35,769,254,654.09	34,731,051,295.35	40,609,093,037.59	45,456,253,569.03	48,692,782,662.12	9.0
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	8,267,634,747.03	12,043,176,073.42	11,968,343,203.00	13,521,988,321.00	9,528,342,617.63	5.7
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,714,028,637.43	4,626,503,005.52	6,067,486,106.57	5,456,435,066.89	5,142,188,576.95	-8.9
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	25,711,592,098.33	10,797,781,904.27	8,447,494,683.08	7,966,899,640.00	9,816,078,738.12	-19.1
1.2.	**DANA PERIMBANGAN**	**491,424,389,795.00**	**701,347,008,325.00**	**585,786,873,282.00**	**721,237,211,961.00**	**762,714,696,575.00**	0.3
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	273,930,658,795.00	255,402,084,965.00	138,370,519,529.00	182,678,993,462.00	236,549,108,153.00	-11.4
1.2.2	Dana Alokasi Umum	208,879,172,000.00	336,447,029,000.00	346,753,157,000.00	380,969,519,000.00	409,970,995,000.00	13.0
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	8,614,559,000.00	109,497,894,360.00	100,663,196,753.00	157,588,699,499.00	116,194,593,422.00	279.3
1.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**110,935,311,829.09**	**250,939,269,949.40**	**121,386,665,290.83**	**91,899,911,963.89**	**84,776,505,403.54**	-0.5
1.3.1	Pendapatan Hibah					30,305,098,862.80	
1.3.2	Dana Darurat						
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	40,959,645,829.09	50,948,442,205.40	44,371,045,290.83	46,280,590,552.00	54,471,406,540.74	-5.2
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	31,797,166,000.00	5,000,000,000.00				
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	38,178,500,000.00	160,773,500,000.00	50,412,000,000.00	13,332,550,000.00		20.4
1.3.6	Pendapatan Lainnya		34,217,327,744.00	26,603,620,000.00	32,286,771,411.88		
2	**BELANJA**	**861,395,298,675.45**	**926,791,967,871.06**	**782,139,143,811.88**	**880,654,610,999.49**	**763,693,529,822.31**	-11.5
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**476,369,133,491.83**	**455,541,369,499.87**	**389,803,232,424.32**	**432,542,255,785.50**	**372,176,863,278.77**	-4.2

No	URAIAN	REALISASI					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	
2.1.1	Belanja Pegawai	433,021,094,119.83	433,373,403,999.87	370,939,737,777.32	395,845,858,819.50	353,538,817,595.77	-2.7
2.1.3	Belanja Subsidi	1,625,984,735.00	-				
2.1.4	Belanja Hibah	35,039,758,003.00	18,613,487,901.00	15,934,544,972.00	34,269,957,229.00	14,337,714,647.00	-7.3
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5,569,423,040.00	2,581,684,005.00	2,027,550,820.00	1,651,782,865.00	3,101,738,642.00	0.6
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa						
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	898,793,594.00	898,793,594.00	898,785,855.00	774,656,872.00	898,768,224.00	12.6
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	214,080,000.00	74,000,000.00	2,613,000.00		299,824,170.00	
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	**385,026,165,183.62**	**471,250,598,371.19**	**392,335,911,387.56**	**448,112,355,213.99**	**391,516,666,543.54**	-12.2
2.2.1	Belanja Pegawai	17,683,505,275.00	15,682,689,633.00	8,083,149,251.86	128,200,000.00	1,237,756,500.00	136.1
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	238,623,353,335.82	219,092,325,746.21	209,049,140,239.79	192,566,449,523.99	225,042,639,592.43	-6.0
2.2.3	Belanja Modal	128,719,306,572.80	236,475,582,991.98	175,203,621,895.91	255,417,705,690.00	165,236,270,451.11	-3.3
	SURPLUS/DEFISIT	**(182,573,086,914.48)**	**87,692,822,681.90**	**(7,873,188,208.81)**	**4,884,089,522.20**	**156,977,064,751.05**	530.2
3	**PEMBIAYAAN**	**205,290,476,824.46**	**(73,207,996,616.02)**	**14,484,826,065.88**	**5,139,401,857.07**	**4,024,491,379.27**	
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**205,290,476,824.46**	**22,717,389,909.98**	**14,484,826,065.88**	**6,589,401,857.07**	**10,023,491,379.27**	

Sumber: BPKAD & BPPRD Kota Tarakan, 2019 (diolah)

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Pada bagian kerangka pendaaan memberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan, belanja, dan Proyeksi belanja wajib dan mengikat yang kemudian akan dihitung seberapa besar kapasitas riil daerah untuk pendanaan indikatif pada tahun 2021.

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah dapat dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

a. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu dengan menstandarkan data outlier atau ekstrem;
b. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
c. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
d. Kebijakan dibidang keuangan negara.

Dalam proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kota Tarakan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan angka rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2013 hingga 2018 (APBD) yang disesuaikan dengan menstandarkan data-data outlier yang sifatnya dapat membiaskan proyeksi. Hal ini dilakukan agar proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kota Tarakan ini tidak bias dan mendekati proyeksi yang logis dengan melihat target-target pendapatan yang mampu dicapai.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan Tahun 2021

Perhitungan proyeksi pendapatan ke depan (2020) dapat dihitung dengan melihat capaian kinerja dan pertumbuhan pendapatan daerah Tahun 20134-2019. Sebagai upaya tindak lanjut perlu dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah Kota Tarakan, antara lain sebagai berikut:

1. Diadakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang Pajak Daerah secara intensif dan berkesinambungan kepada masyarakat dengan dilanjutkan upaya penegakan hukum;

2. Peningkatan pelaksanaan online system dalam akurasi data Wajib Pajak khususnya terhadap pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan dampak terhadap pelayanan kepada masyarakat
3. Peningkatan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah penghasil terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pemungutan Retribusi.
4. Penyelenggaraan e-parking

Dalam memproyeksi pendapatan, proyeksi lebih difokuskan pada penerimaan yang bersumber dari daerah sendiri. Adapun penerimaan yang sifatnya eksternal dan bersumber dari luar baik itu dari dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah cenderung ditarget relatif tetap. Seluruh proyeksi menggunakan tahun dasar target APBD tahun 2019.

Penerimaan PAD ditargetkan naik ± 6% dari tahun dasar 2019. Adapun pendapatan pajak daerah ditargetkan naik ± 5-6% dari tahun dasar 2019. Target ini ditentukan dengan asumsi bahwa seluruh potensi-potensi pajak yang hilang dapat dapat dipungut. Selain itu dengan adanya potensi investasi yang cukup besar dengan adanya sistem OSS yang memudahkan proses perizinan, maka efek turunan dari investasi tersebut sedikit banyak akan meningkatkan potensi pendapatan pajak daerah yang bisa dipungut. Dengan mendasarkan hal tersebut maka pendapatan pajak daerah ditargetkan sebesar Rp. 115,275 miliar ditahun 2020. Untuk penerimaan PAD dari hasil retribusi daerah ditargetkan naik cukup signifikan yaitu ± 16,45% dari tahun dasar 2019. Hal didasarkan bahwa dalam beberapa waktu terakhir retribusi yang didapat sangat kurang maksimal. Hal ini dsebabkan terutama oleh tidak terawasinya pungutan retribusi, skema pungutan yang kurang menguntungkan Kota Tarakan, serta banyak titik-titik potensi pungutan retribusi yang belum termanfaatkan. Oleh karena itu hasil retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp. 14,72 miliar ditahun. Untuk lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditargetkan meningkat

dengan rata-rata peningkatan ± 4% dari tahun dasar 2019. Adapun target nilai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditahun 2020 sebesar Rp. 35,663 miliar. Untuk PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan proyeksikan tetap seperti target tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 6 miliar.

Proyeksi Dana Perimbangan baik itu Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak maupun Dana Alokasi Umum ditarget sedikit meningkat. Sedangkan target DAK ditargetkan tetap. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak diproyeksikan tumbuh 5% dari tahun dasar 2019. Peningkatan tersebut disebabkan adanya dana kurang salur ditahun 2019 yang kemudian akan dicairkan ditahun 2020. Hal ini menyebabkan nilai ditahun 2020 diproyeksikan meningkat cukup drastis. Adapun proyeksi nilai Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak ditahun 2020 sebesar Rp. 229,62 miliar.

Nilai Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan juga akan meningkat 1% pertahun. Proyeksi peningkatan DAU berdasarkan asumsi bahwa akan ada peningkatan gaji ASN yang kemudian akan meningkatkan nilai penerimaan DAU didaerah. Adapun proyeksi nilai DAU ditahun 2020 sebesar Rp. 410,51 miliar.

Proyeksi pendapatan daerah lainnya yaitu Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada dasarnya juga flat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sumber penerimaan yang sifatnya ekternal cenderung akan diproyeksikan tetap. Namun pada post pendapatan hibah ditargetkan menurun 16,41% dibandingkan tahun dasar 2019. Target ini didasarkan bahwa penerimaan daerah dari pendapatan hibah berpotensi menurun dibandingkan target 2019 dimana target 2019 sebesar Rp. 36,57 miliar menjadi Rp. 30,57 miliar ditahun 2020. Hal ini yang menyebabkan secara agregat lain-lain pendapatan daerah yang sah menurun 5,33% dibandingkan target tahun 2019. Oleh karena itu proyeksi lain-lain pendapatan daerah yang sah ditahun 2020 sebesar Rp. 106,487 miliar.

Secara lebih rinci perkiraan penerimaan Kota Tarakan dalam tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16
Proyeksi Penerimaan Daerah Kota Tarakan Tahun 2021
(dalam juta)

No	URAIAN	Target	Rata-Rata Proyeksi Pertumbuhan (%)	PROYEKSI
		2020		2021
1	**PENDAPATAN**	**988.710**		**1.037.747**
1.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**115.275**		**132.305**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	58.890		68.645
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	14.722		19.989
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.000		6.500
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	35.663		37.171
1.2.	**DANA PERIMBANGAN**	**766.948**		**798.955**
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	229.622		241.103
1.2.2	Dana Alokasi Umum	410.518		431.044
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	126.808		126.808
1.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**106.487**		**106.487**
1.3.1	Pendapatan Hibah	30.570		30.570
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	61.430		61.430
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	14.487		14.487
1.3.6	Pendapatan Lainnya			

Sumber: *BPKAD dan BPPRD, 2019 (diolah)*

3.3.2. Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2021

Proyeksi belanja perlu untuk dihitung berdasarkan tren pertumbuhan komponen belanja langsung maupun belanja tidak langsung dari tahun 2015-2018. Dalam menyusun proyeksi ini yang menjadi pertimbangan juga ialah bagaimana meningkatkan proporsi belanja langsung dalam total belanja keseluruhan.

Dalam melakukan proyeksi belanja, maka yang harus dihitung diawal ialah proyeksi besaran belanja tidak langsung (BTL) sedangkan besaran belanja langsung (BL) nantinya akan mengikuti berdasarkan kapasitas riil yang ada. Berdasarkan hasil analisis, proyeksi BTL tahun 2021 ditargetkan naik ± 2%-3% dari tahun dasar 2020. Hal ini didasarkan oleh adanya kenaikan belanja pegawai yang diproyeksi tumbuh 2-3% untuk megakomodir rencana kenaikan gaji ASN. Sedangkan komponen BTL lainnya ditargetkan tetap atau

pertumbuhannya 0% dari tahun dasar 2020. Hal ini dilakukan untuk lebih meningkatkan rasio anggaran daerah untuk belanja langsung (BL). Berdasarkan beberapa asumsi tersebut maka besaran BTL pada tahun 2021 mencapai Rp. 490,01 miliar. Dengan mempertimbangkan potensi penerimaan dan proyeksi belanja wajib mengikat dari tahun 2021, maka besaran belanja langsung besarnya diproyeksi sama dengan besaran kapasitas riil yang ada. Selain itu proyeksi surplus/defisit belanja juga telah memperhatikan nilai defisit riil pembiayaan. Adapun proyeksi belanja langsung tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp. 543,07 miliar. Dengan alokasi belanja langsung tersebut maka rasio BL tersebut sebesar 52,57% terhadap total belanja daerah. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kota Tarakan memprioritaskan belanja publik untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun proyeksi total belanja di tahun 2021 sebesar Rp. 1.033,08 miliar.

Adapun keseluruhan proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kota Tarakan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.17.

Tabel 3.17
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 (dalam juta)

No	URAIAN	TARGET	Rata-Rata Proyeksi Pertumbuhan (%)	PROYEKSI
		2020		2021
1	**PENDAPATAN**	**988.710**	**27,31%**	**1.258.742**
1.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**115.275**	**23,29%**	**142.124**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	58.890	16,56%	68.645
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	14.722	76,53%	25.989
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.000	70,98%	10.259
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	35.663	4,40%	37.231
1.2.	**DANA PERIMBANGAN**	**766.948**	**28,99%**	**989.255**
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	229.622	28,31%	294.634

No	URAIAN	TARGET	Rata-Rata Proyeksi Pertumbuhan (%)	PROYEKSI
		2020		2021
1.2.2	Dana Alokasi Umum	410.518	21,40%	498.354
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	126.808	54,77%	196.267
1.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**106.487**	**19,60%**	**127.363**
1.3.1	Pendapatan Hibah	30.570	23,86%	37.863
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	61.430	45,69%	89.500
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	14.487	-100,00%	0
1.3.6	Pendapatan Lainnya			
2	**BELANJA**	**1.075.618**	**-3,95%**	**1.033.079**
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**478.553**	**2,39%**	**490.014**
2.1.1	Belanja Pegawai	458.413	2,50%	469.874
2.1.3	Belanja Subsidi	0		
2.1.4	Belanja Hibah	19.640	0,00%	19.640
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa			
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	500	0,00%	500
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	**597.065**	**-9,04%**	**543.065**
2.2.1	Belanja Pegawai	8.287	0,00%	8.287
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	315.653	0,00%	315.653
2.2.3	Belanja Modal	273.125	-19,77%	219.125
	SURPLUS/DEFISIT	**-67.832**	**-432,68%**	**225.663**
3	**PEMBIAYAAN**			
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**160.781**	**-100,00%**	**0**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	160.781	-100,00%	0
	dst...			
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**16.000**	**0,00%**	**16.000**
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16.000	0,00%	16.000
3.2.2	Pengembalian Sisa Dana Transfer			

No	URAIAN	TARGET	Rata-Rata Proyeksi Pertumbuhan (%)	PROYEKSI
		2020		2021
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
	PEMBIAYAAN NETTO	**144.781**	**-111,05%**	**-16.000**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN	**0**	**0,00%**	**0**
	JUMLAH TOTAL APBD	**1.168.567**	**7,72%**	**1.258.742,27**

Sumber: *BPKAD dan BPPRD, 2020 (diolah BAPPEDA)*

3.3.3. Proyeksi Belanja Wajib Mengikat Tahun 2021

APBD sebagai instrumen kebijakan mempunyai posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pelaksanaan pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Belanja wajib dan mengikat merupakan pendanaan wajib yang harus dibayarkan pemerintah selama periode pembangunan untuk membiayai belanja tidak langsung, belanja langsung, maupun pembiayaan pengeluaran lainnya. Berdasarkan hasil proyeksi, belanja wajib dan mengikat Kota Tarakan tahun 2021 diprediksi mencapai Rp. 506,01 milyar dimana nilai terbesar berasal dari pengeluaran untuk belanja gaji dan tunjangan yang mencapai 469,87 milyar, atau mencapai 92,86%. Proyeksi belanja wajib dan mengikat Kota Tarakan tahun 2021 secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 3.18
Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Kota Tarakan Tahun 2021

NO	URAIAN	PROYEKSI 2021
A	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**490.014.000.000**
1	Belanja Pegawai	469.874.000.000
2	Belanja Subsidi	
3	Belanja Hibah	19.640.000.000
4	Belanja Bantuan Sosial	
5	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	
7	Belanja Tidak Terduga	500.000.000
B	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**16.000.000.000**
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16.000.000.000
2	Pengembalian Sisa Dana Transfer	0
3	Pembayaran Pokok Utang	0
	TOTAL PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT (A+B)	**506.014.000.000**

Sumber: *BPKAD Kota Tarakan, 2019 (diolah BAPPEDA)*

3.3.4. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan pada tahun 2021. Adapun kapasitas riil yang disusun akan diklasifikasikan menjadi 3 jenis yaitu: 1) kapasitas riil dengan DAK dan Bankeu; 2021 kapasitas riil tanpa DAK; 3) kapasitas riil tanpa DAK dan Bankeu. Olah karena itu nantinya pagu program di BAB 5 juga akan dipilah berdasarkan klasifikasikan tersebut.

Kapasitas Riil keuangan daerah dari tahun 2021 diproyeksi sebesar 752,73 miliar. Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah tersebut didasarkan pada asumsi dimana target penerimaan pendapatan mencapai 1.258,74 miliar dan proyeksi pengeluaran belanja wajib dan mengikat sebesar 506,01 milyar. Adapun kapasitas

riil tanpa DAK tahun 2021 sebesar Rp. 556,46 miliar, sedangkan kapasitas riil tanpa DAK dan Bankeu sebesar Rp. 556,46 miliar.

Secara lebih rinci kapasitas riil keuangan daerah keuangan daerah Kota Tarakan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Daerah
Kota Tarakan Tahun 2021

NO	URAIAN	PROYEKSI 2021
1	Pendapatan	1.258.742.270.569
2	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	
	Total Penerimaan	**1.258.742.270.569**
	Dikurangi:	
3	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama*	506.014.000.000
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**752.728.270.569**
	Kapasitas Riil (tanpa DAK)	**556.461.270.569**
	Kapasitas Riil (tanpa DAK+Bankeu)	**556.461.270.569**

Sumber: *BPKAD dan BPPRD, 2019 (diolah BAPPEDA)*

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021

Berdasarkan rancangan RPJMD Kota Tarakan tahun 2019-2024, RKPD tahun 2021 merupakan tahun kedua pembangunan jangka menengah daerah RKPD tahun 2021 mempunyai peranan penting dalam perwujudan dan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Oleh karena itu segala kebijakan yang akan dilaksanakan harus mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, dalam merumuskan dokumen perencanaan pembangunan harus memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lain yang berkorelasi dan relevan. Oleh karena itu, dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 ini perlu adanya berbagai pemahaman dan kajian tentang dokumen perencanaan pembangunan, baik nasional, Provinsi Kalimantan Utara maupun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Tarakan itu sendiri. Hal ini mencerminkan sebuah integrasi antara dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah dengan provinsi maupun nasional. Oleh karena itu, dalam RKPD Tahun 2021 ini akan merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan Rancangan RPJMD Kota Tarakan tahun 2019-2024 yang yang telah dirumuskan untuk dapat berkontribusi bagi pencapaian target pembangunan nasional dan Provinsi Kaltara ditahun 2021.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Visi Pembangungan jangka menengah Kota Tarakan 2019-2024 ialah **"Terwujudnya Tarakan Sebagai Kota Maju dan Sejahtera Melalui Smart City"**. Pernyataan visi Kota Tarakan 2019-2024 memiliki makna sebagai berikut:

Maju: Mengandung pengertian seiring dengan pertambahan waktu, Kota Tarakan harus terus maju dan bertambah baik disemua lini kehidupan. Masyarakat harus mampu menjadi pelopor dalam proses pembangunan daerah sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek bukan obyek pembangunan. Maju merupakan cara pandang untuk berprestasi dan memiliki keunggulan. Masyarakat harus selalu berada paling depan dengan mengambil berbagai peran, prakarsa dan terobosan untuk meningkatkan proses pembangunan di daerah dengan tetap mengacu pada upaya menggali nilai-nilai dan jati diri masyarakat Tarakan sebagai karateristik yang khas dengan kearifan lokalnya.

Sejahtera: Mengandung makna keselamatan seutuhnya. Sejahtera berarti hidup makmur, aman, penuh dengan keselamatan, ketenteraman dan kebahagiaan. Sejahtera, sangat erat maknanya dengan keberhasilan meraih cita-cita. Oleh karena itu, kondisi masyarakat daerah merupakan penentu dari kesejahteraan. Masyarakat yang akan menentukan arah pergerakan bersama, bukan pemerintah. Namun, pemerintah memiliki begitu banyak akses untuk bisa mengelola modal bersama dan jaringan kerja sehingga kedudukannya dalam menciptakan kesejahteraan umum tak bisa digantikan. Disisi lain, masyarakat yang terkelola dengan baik senantiasa akan menghasilkan pemerintahan yang kuat pula.

Smart City: Dimaknai sebagai sebuah konsep perencanaan kota dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang akan membuat

hidup yang lebih mudah dan sehat dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi. Pengertian smart city secara umum dapat dilihat dari cara menyelesaikan masalah dari tiga aspek utama kota: fisik, sosial dan ekonomi. Sebuah kota dapat dikatakan smart bila bias memecahkan masalah dari ketiga aspek tersebut dengan menggunakan teknologi dan sumber daya yang ada pada kota tersebut secara efisien dan efektif. Ada 6 (enam) indicator utama smart city (Boyd Cohen) menuju masyarakat maju dan sejahtera antara lain: *Smart Living* atau hidup yang cerdas, *Smart Governance* atau Pemerintahan yang cerdas, *Smart Economy* atau Ekonomi cerdas, *Smart Mobility* atau Mobilitas cerdas, *Smart Environment* atau Lingkungan cerdas, dan *Smart People* atau Masyarakat cerdas.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan enam misi pembangunan jangka menengah Kota Tarakan 2019-2024, yaitu:

1. Meningkatkan sumberdaya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efesien yang berbasis pada system penganggaran yang pro-rakyat.
3. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang cepat, mudah, murah, adil, dan transparan.
4. Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentinganrakyat (ekonomi pro rakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata dan pertanian dalam arti luas.
5. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam melalui peningkatan nilai tambah yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, kreatif dan inovatif berbasiskan ilmu pengetahuan.

6. Meningkatkan pembangunan akhlak dan moral sesuai kearifan local serta mewujudkan kepastian hukum dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Untuk melaksanakan visi dan misi tersebut, dalam rancangan RPJMD Kota Tarakan 2019-2024 ditetapkan tujuan sasaran pembangunan. Setidaknya terdapat 6 tujuan dan 18 sasaran pembangunan jangka menengah Kota Tarakan 2019-2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tarakan 2019-2024

VISI: TERWUJUDNYA TARAKAN SEBAGAI KOTA MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI SMART CITY

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
MISI 1: Meningkatkan sumberdaya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdayasaing			
1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	IPM	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Harapan lama Sekolah
			Rata-Rata Lama Sekolah
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran Perkapita masyarakat
MISI 2: Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Profesional, Efektif dan Efisien Yang Berbasis Pada Sistem Penganggaran Yang Pro Rakyat			
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK
			Nilai SAKIP
		Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif dan Efisien	Indeks Profesionalitas ASN
		Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)
MISI 3: Meningkatkan dan Memperepat Pembangunan InfrastrukturPublik yang Cepat, Mudah, Murah, Adil dan Transparan.			
3. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas	IKLI	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau
		Meningkatnya pelayanan air bersih	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
		Meningkatkan aksesibilitas perkotaan	Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap
			Ratio Volume kendaraan per kapasitas Jalan
		Menurunnya luas kawasan kumuh	Persentase Luas Kawasan Kumuh
		Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk MBR	Persentase perumahan DP 0% untuk MBR yang terbangun
MISI 4: Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (Ekonomi Pro Rakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata dan pertanian dalam arti luas.			
4. Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Indeks Gini	Menurunnya kemiskinan	Angka Kemiskinan
		Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah.	Laju Pertumbuhan Ekonomi
		Terkendalinya inflasi daerah	Tingkat Inflasi
MISI 5: Meningkatkan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui Peningkatan Nilai Tambah yang Berwawasan Lingkungan dengan Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna, Kreatif dan Inovatif berdasarkan Ilmu Pengetahuan.			
5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	Menurunnya pencemaran lingkungan	Indeks Kualitas Air
			Indeks Kualitas Udara
			Indeks Tutupan Lahan
			Persentase sampah yang dikelola
	Indeks kebencanaan	Meningkatnya penanganan Kebencanaan Yang Efektif	Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran
			Persentase Pelayanan Bencana Longsor

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
			Persentase Luas Genangan Banjir
MISI 6: Meningkatkan Pembangunan Akhlak dan Moral Sesuai Kearifan Lokal serta Mewujudkan Kepastian Hukum dan Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa			
6. Meningkatnya kerukunan, ketentraman dan ketertiban di masyarakat	Indeks toleransi (kedamaian, menghargai perbedaan, dan kesadaran)	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota	Persentase pelanggaran keamanan, ketertiban, ketentraman dan kenyamanan (K3) yang tertangani

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

4.2.1. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Berdasarkan rancangan teknokratik RPJMN tahun 2020-2024 pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Arah pembangunan tersebut setidaknya terdiri dari 3 kata kunci yaitu; 1) struktur ekonomi yang kokoh; 2) keunggulan kompetitif wilayah; 3) SDM berkualitas.

A. Pengembangan Wilayah Kalimantan dalam Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024

Berdasarkan Rancanngan Teknokratik RPJMN tahun 2020-2024, maka arah besar "Pembangunan Wilayah Kalimantan" adalah***:***

1. Mendorong kerjasama antar daerah dan terbentuk serta beroperasinya kelembagaan regional pada kawasan metropolitan (Banjarbakula), KEK Maloy Batuta, Trans Kalimantan, KI Landak, KI Batulicin dan KI Jorong;
2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar melalui peningkatan koordinasi perencanaan dan prioritas anggaran pada: SPM bidang pendidikan baik pendidikan dasar dan menengah dan SPM bidang kesehatan (gizi buruk dan pelayanan kesehatan bayi);
3. Meningkatkan kualitas belanja dengan meningkatkan belanja langsung dan mengurangi belanja pegawai;
4. Meningkatkan proporsi belanja pelayanan dasar (Kesehatan dan Pendidikan) minimal 30 persen terhadap total belanja daerah tanpa belanja pegawai;
5. Meningkatkan kualitas ASN terutama kompetensi sesuai bidang pertambangan dan industri manufaktur;
6. Memperbaiki distribusi ASN bidang pelayanan dasar kesehatan (tenaga medis) dan Pendidikan (tenaga guru dan pendidik);

7. Mendorong kolaborasi multi pihak (pemerintah, pelaku usaha, masyarakat dan komunitas), antara lain melalui kewirausahaan, dan keterkaitan aktivitas ekonomi terutama di perdesaan non tertinggal;
8. Meningkatkan iklim investasi melalui pengurangan perda (aturan) yang berimplikasi pada ekonomi berbiaya tinggi serta meningkatkan kinerja penyelenggaraan PTSP dan OSS;
9. Meningkatkan pelaksanaan good governance di level pemerintahan daerah (Opini keuangan BPK, Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah);
10. Meningkatkan sinergi pusat dan daerah terutama dalam aspek perencanaan dan penganggaran;
11. Mendorong tercipta dan dilaksanakannya inovasi daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah.

Adapun prioritas pembangunan wilayah Kalimantan antara lain:

a. Hilirisasi Perkebunan sawit, sertapertambangan nikel dan batubara
b. Pembangunan jalur rel kereta api Kalimantan
c. Pengembangan kawasan industri terpadu pelabuhan Kijing
d. Pengembangan kawasan Perbatasan
e. Pembangunan kawasan perdesaan dan kawasan pariwisata

B. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021

Pembangunan suatu negara identik dengan persoalan pemerataan capaian pembangunan secara optimal dan berkualitas. Permasalahan inilah yang menjadi salah satu dasar bagi setiap pengambil kebijakan di pemerintah pusat dalam merumuskan berbagai kebijakan dan penyempurnaan kebijakan agar dalam pembangunan selalu mengalami peningkatan capaian kinerja.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan memalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*,yang disusun secara *holistik-tematik*, integratif dan spasial.

Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan yang di tetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mendiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokok berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tema pembangunan nasional Tahun 2021 dalam RKP Tahun 2021 mengalami penyesuaian. Tema RKP 2021 sebelum pandemik Covid-19 adalah "Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas". Setelah itu, tema pembangunan Tahun 2021 dirumuskan kembali dengan mengadaptasi dan merespon wabah Covid-19 dan proses pemulihannya sehingga menjadi :

"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial"

dengan fokus pembangunan pada :

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sesuai dengan visi Presiden 2020-2024 "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" dan tema RKP tersebut diatas maka sasaran pembangunan tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan industri

dan pembangunan pariwisata dengan indikator pembangunan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2
Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2021

Indikator Pembangunan	Target 2021
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5 - 5,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	7,5 – 8,2
Tingkat Kemiskinan (%)	9,2 – 9,7
Rasio Gini (Indeks)	0,377 – 0,379
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,78 – 72,90
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) "menuju target 29% di 2030 (Paris Agreement)	23,55 – 24,14
Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (%)	3,41 – 4,26
Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%)	3,35 – 4,21
Kontribusi PDB Pariwisata (%)	4,20

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas (diolah),2020

Mengacu pada tema, fokus dan sasaran pembangunan tahun 2021, maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2021 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), *health security* dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan dimasa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana nonalam.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) seperti gambar 4.3.

Gambar 4.1

Tema, Fokus dan Strategi Pembangunan Tahun 2021

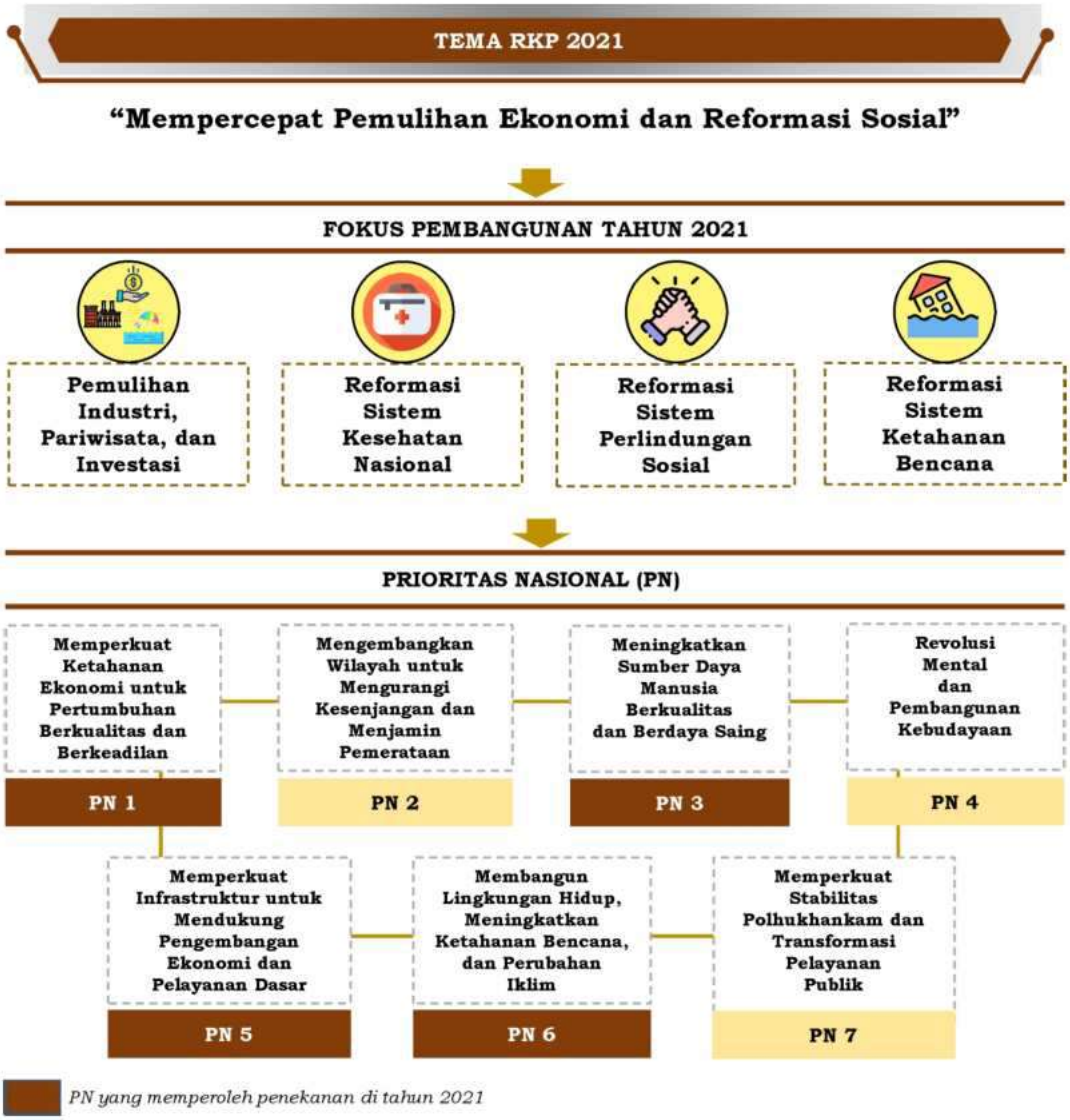

Sumber : Rancangan Awal RKP Tahun 2021, Bappenas

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan tahun 2021, terdapat Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yang terkait langsung dengan fokus pembangunan tahun 2021 antara lain (1) Industri 4.0 di lima Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi; (2) Sepuluh Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung dan Morotai; (3) 9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 Smelter; (4) Pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri

4.0; (5) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu; (6) Penguatan Sistem Kesehatan Nasional; (7) Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh; (8) Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana (Gambar 4.2).

Gambar 4.2
***Major Project* (MP) Yang Terkait Langsung dengan Fokus Pembangunan Tahun 2021**

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2020

Keterangan : *) *Major Project* baru yang diusulkan pada tahun 2021

Dalam rangka menjaga kesinambungan antara RKP dan RPJMN 2020-2024, maka PN dalam RKP 2021 merupakan Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dengan penekanan terhadap PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk

Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, PN 3. Meningkatkan SDM berkualitas dan Berdaya Saing, PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dan PN 6. Membangunan Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik

PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi COVID-19. Pelaksanaannya diantaranya melalui: menjalankan Program Ketersediaan Akses dan Kualitas Pangan; Penguatan penyediaan energi yang terjangkau; penguatan daya saing industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor; pemulihan pariwisata nasional dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata; dan penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan investasi serta efisiensi distribusi dan perdagangan.

PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi, perdagangan dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata wilayah timur, dengan tetap menjaga daya saing sektor

perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat.

PN 3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2021 diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial; peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan ***health security***; peningkatan pemerataan layanan berkualitas; penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual; peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif; serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19.

PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 melalui perluasan pusat-pusat gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu; pembangunan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan; peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran; serta pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat.

PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan pascapandemi Covid-19 yaitu pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman; peningkatan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; peningkatan layanan keselamatan dan keamana transportasi; peningkatan ketahanan infrastruktur; optimalitasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi; peningkatan konektivitas wilayah; pengembangan angkutan umum massal di enam kota metropolitan; peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik; pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; serta optimalisasi strategi investasi badan usaha dan pengembangan metode-metode peningkatan kualitas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan proyek infrastruktur.

PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap dampak bencana nonalam seperti pandemi Covid-19, serta perubahan iklim tahun 2021, diarahkan untuk: penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi tektonik dan vulkanik, bencana hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana nonalam (focus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi penyakit); serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK, dengan fokus penurunan emisi GRK pada sektor lahan, industri, dan energi.

PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik

Kebijakan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik tahun 2021 diarahkan untuk mendukung pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 dalam upaya mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan *(law and order).* Kebijakan ini diantaranya dilaksanakan melalui: penguatan perlindungan WNI di luar negeri; intensifikasi kerjasama pembangunan internasional; penguatan sinergitas, sinkronisasi, dan pemerataan informasi berkeadilan; pemulihan kinerja pelayanan publik; serta peningkatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) penanggulangan bencana serta kontingensi dalam rangka pemulihan pascapandemi Covid-19.

4.2.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021

Tahapan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun periode 2016-2021 memasuki tahun kelima yaitu tahun terakhir. Dalam rangka mencapai visi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara periode 2016-2021, maka ditetapkan tema atau focus pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 :

MEWUJUDKAN MASYARAKAT KALIMANTAN UTARA YANG MANDIRI, AMAN DAN DAMAI

Tema ini menjadi dasar bagi pelaksanaan pembangunan Tahun 2021 yang diarahkan untuk mencapai 17 prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021. Prioritas pembangunan ini merupakan prioritas dalam RPJMD yang akan diwujudkan pada akhir periode yaitu tahun 2021. Adapun **17 prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021**, meliputi :

1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan kemandrian PMKS
2. Peningkatan kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja.

3. Peningkatan pelayanan pendidikan.
4. Peningkatan pelayanan kesehatan.
5. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
6. Percepatan pembangunan desa secara terpadu.
7. Pembangunan ekonomi berkelanjutan.
8. Pengembangan usaha kecil koperasi dan industri kecil dan menengah (IKM).
9. Peningkatan ketahanan pangan daerah.
10. Peningkatan daya Tarik berinvestasi.
11. Peningkatan pelayanan infrastrukturwilayah yang terintegrasi dengan tata ruang.
12. Peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.
13. Peningkatan pencegahan dan penanganan gangguan keamanan dan kebencanaan terpadu.
14. Fasilitasi perwujudan wilayah perbatasan yang tertib dan tentram.
15. Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pembangunan yang terpadu.
16. Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu.
17. Peningkatan sistem pelayanan prima.

Ketujuh belas prioritas pembangunan tersebut pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan Tahun 2021 yang diambil dan dikaitkan dengan strategi dan arah kebijakan, yang selanjutnya dijabarkan dalam program pembangunan daerah Tahun 2021. Prioritas pembangunan Tahun 2021 merupakan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021. Hal ini sesuai dengan pengertian strategi yang diamanatkan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah untuk mencapai sasaran.

Prioritas pembangunan yang diuraikan diatas disarikan menjadi 5 (lima) fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021. Penentuan fokus pembangunan mempertimbangkan isu pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021. Kelima fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021, meliputi:

1. **Pembangunan Manusia**

   Pembangunan manusia di Kalimantan Utara diarahkan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan kemandirian PMKS; peningkatan kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja; peningkatan pelayanan pendidikan; peningkatan pelayanan kesehatan; dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

2. **Pembangunan Ekonomi**

   Pembangunan ekonomi diarahkan untuk pencapaian prioritas pembangunan ekonomi berkelanjutan; pengembangan usaha kecil, koperasi, dan industri kecil dan menengah (IKM); peningkatan ketahanan pangan daerah; peningkatan daya tarik berinvestasi; dan peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

3. **Pembangunan Kewilayahan**

   Pembangunan kewilayah diarahkan untuk percepatan pembangunan desa secara terpadu; dan fasilitasi perwujudan wilayah perbatasan yang tertib dan tenteram.

4. **Pembangunan Infrastruktur**

   Pembangunan infrastruktur diprioritaskan untuk peningkatan pelayanan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dengan tata ruang.

5. **Pembangunan Keamanan, Ketertiban dan Tata Kelola Pemerintahan**

   Fokus ini meliputi prioritas pembangunan: reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah; penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu; peningkatan system pelayanan yang prima; dan peningkatan pencegahan dan penanganan gangguan keamanan dan kebencanaan secara terpadu.

Pelaksanaan 5 (lima) fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 beserta 17 prioritasnya ditujukan untuk mendorong terwujudnya target-target sasaran pembangunan. Pembangunan Tahun 2021 menjadi sangat penting bagi Provinsi Kalimantan Utara sebab merupakan tahun terakhir periode RPJMD Tahun 2016-2021. Untuk itu penyusunan RKPD Tahun 2021 harus disusun dengan memperhatikan evaluasi hasil RKPD tahun sebelumnya dan kondisi terkini, termasuk permasalahan pembangunan daerah.

Dokumen RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Mempedomani RKP dalam penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dengan prioritas pembangunan daerah. Sehubungan dengan itu, fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 selain untuk mewujudkan prioritas pembangunan daerah, juga untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Fokus pembangunan manusia Kalimantan Utara akan mendukung pelaksanaan fokus reformasi sistem kesehatan nasional dan fokus reformasi system jaring pengaman sosial. Sementara fokus pembangunan ekonomi Kalimantan Utara akan mendukung fokus nasional pemulihan industri, pariwisata, dan investasi. Selanjutnya, fokus pembangunan kewilayahan akan mendukung nasional untuk pelaksanaan fokus reformasi sistem ketahanan bencana. Fokus pembangunan infrastruktur dapat mendukung fokus nasional untuk pemulihan industri, pariwisata, dan investasi. Sedangkan fokus pembangunan keamanan, ketertiban dan tata kelola pemerintahan di Kalimantan Utara dapat bersinergi dengan focus pembangunan nasional pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; dan fokus reformasi sistem ketahanan bencana. Kondisi ini disajikan dalam bentuk grafis sebagai berikut:

Gambar 4.3
Keterkaitan Fokus Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara dengan Nasional Tahun 2021

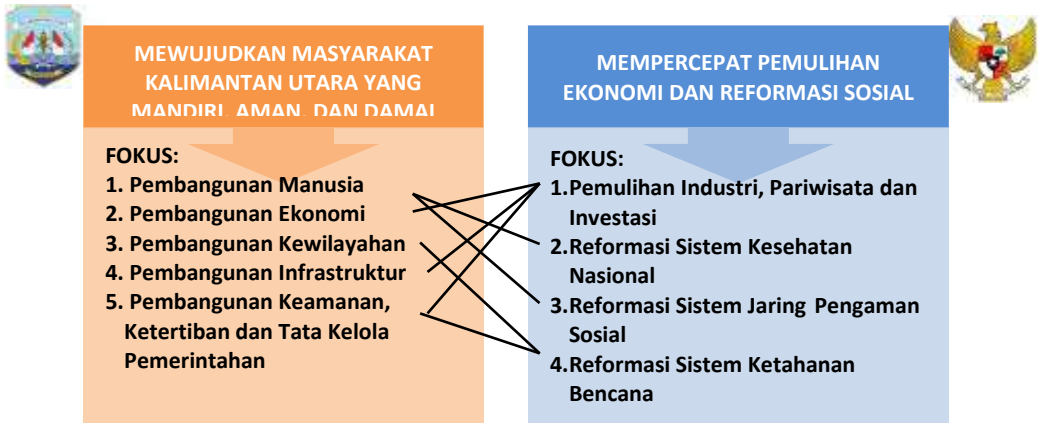

Sumber: RKPD Provinsi Kaltara 2021

Lebih rinci mengenai keterkaitan antara prioritas nasional (PN) Tahun 2021 dengan prioritas pembangunan Kalimantan Utara Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Keterkaitan Prioritas Pembangunan (PP) Kalimantan Utara dengan Prioritas Pembangunan Nasional (PN) Tahun 2021

Prioritas Nasional 2021		Prioritas Kalimantan Utara 2021	
PN1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP7	Pembangunan ekonomi berkelanjutan.
		PP8	Pengembangan usaha kecil, koperasi, dan industri kecil dan menengah (IKM).
		PP9	Peningkatan ketahanan pangan daerah
		PP10	Peningkatan daya tarik berinvestasi
PN2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PP6	Percepatan pembangunan desa secara terpadu.
PN3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	PP1	Percepatan penanggulangan kemiskinan dan kemandirian PMKS
		PP2	Peningkatan kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja.

Prioritas Nasional 2021		Prioritas Kalimantan Utara 2021	
		PP3	Peningkatan pelayanan pendidikan
		PP4	Peningkatan pelayanan kesehatan.
		PP5	Pengarusutamaan gender dalam pembangunan
PN4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		
PN5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP11	Peningkatan pelayanan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dengan tata ruang.
PN6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP12	Peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.
		PP13	Peningkatan pencegahan dan penanganan gangguan keamanan dan kebencanaan secara terpadu.
PN7	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Transformasi Pelayanan Publik	PP14	Fasilitasi perwujudan wilayah perbatasan yang tertib dan tenteram.
		PP15	Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah.
		PP16	Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu.
		PP17	Peningkatan sistem pelayanan yang prima

Sumber: RKPD Provinsi Kalimantan Utara 2021, hasil analisis, 2020

Salah satu prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 yaitu percepatan penanganan Covid-19 dan berlanjut ke Tahun 2021 untuk pemulihan pasca pandemi Covid_19. Kebijakan pemerintah ini didukung oleh kebijakan pembangunan di provinsi Kalimantan Utara.

Gambar 4.4
Dampak Pandemi Covid-19 dan Respon Kebijakannya

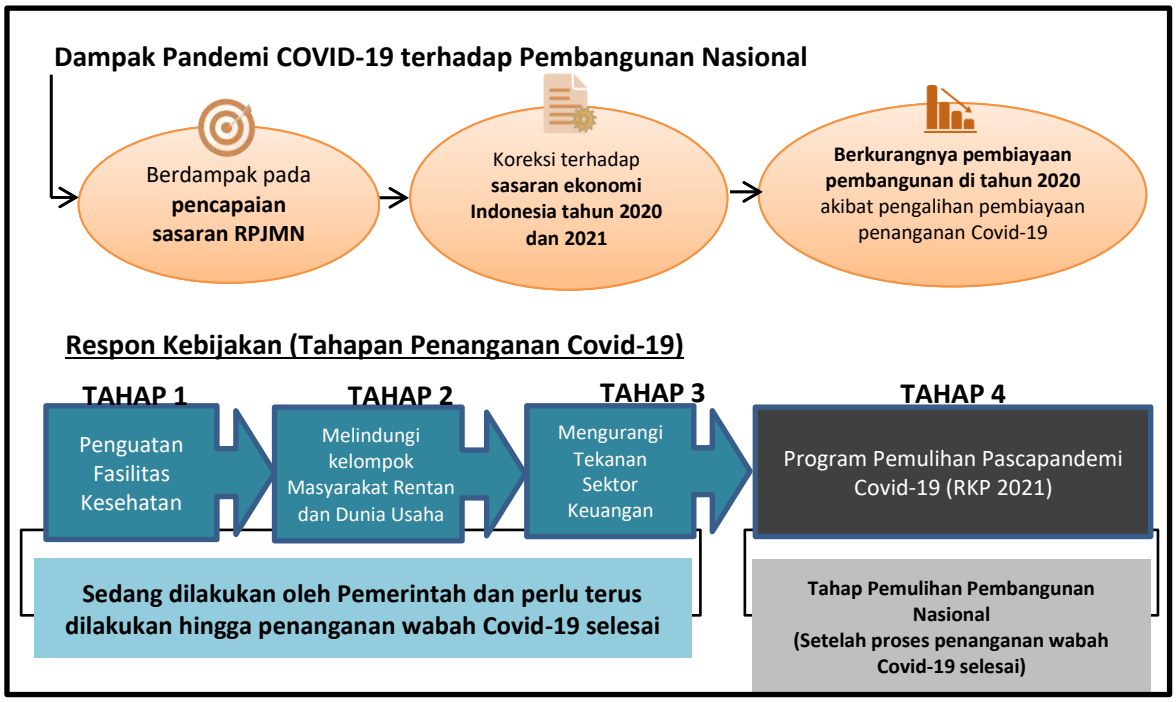

Tahapan-tahapan yang telah dirancang oleh Pemerintah sebagaimana terdapat pada gambar di atas, akan didukung oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara melalui strategi dana rah kebijakan. Adapun dukungan tersebut dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.4
Sinergi Kebijakan Penanganan Covid-19 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 dan 2021

PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH KALIMANTAN UTARA	
Tahapan Penanganan Covid-19	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Tahap 1. Penguatan Fasilitas Kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan
Tahap 2. Melindungi Kelompok Masyarakat Rentan dan Dunia Usaha	1. Pengembangan usaha kecil, koperasi, dan industri kecil dan menengah (IKM)	a. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi usaha kecil dan koperasi
		b. Memberdayakan industri kecil dan menengah berbasis sumberdaya lokal
		c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku tertib terhadap hukum dan regulasi
		d. Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan bencana

PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH KALIMANTAN UTARA	
Tahapan Penanganan Covid-19	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
	2. Peningkatan sistem pelayanan yang prima	Meningkatkan kualitas dan transparansi pelayanan
Tahap 3. Mengurangi Tekanan Sektor Keuangan	1. Peningkatan pencegahan dan penanganan gangguan keamanan dan kebencanaan secara terpadu	Meningkatkan upaya pencegahan, pengamanan dan penanganan pasca gangguan keamanan wilayah
	2. Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah
Tahap 4. Program Pemulihan Pascapandemi Covid-19 (RKP 2021)	1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan kemandirian PMKS	Meningkatkan kualitas penanganan dan pembinaan PMKS
	2. Peningkatan kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja	a. Meningkatkan lapangan kerja dan informasi kerja
		b. Meningkatkan mutu tenaga kerja
	3. Pembangunan ekonomi berkelanjutan	a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian
		b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM dan kapasitas kelembagaan pertanian
		c. Meningkatkan produksi perikanan budidaya dan tangkap serta hasil laut lainnya.
		d. Meningkatkan pengelolaan pesisir, pulau-pulau kecil dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
		e. Meningkatkan pengelolaan pariwisata secara terpadu
		f. Meningkatkan pengelolaan pertambangan secara berkelanjutan
		g. Meningkatkan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan
		h. Meningkatkan perdagangan yang mengutamakan pemasaran produk usaha kecil, koperasi dan IKM
	4. Peningkatan ketahanan pangan daerah	Meningkatkan pemenuhan pangan masyarakat
	5. Peningkatan daya tarik berinvestasi	Mengembangkan sistem perijinan yang cepat dan transparan.
	6. Peningkatan pelayanan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dengan tata ruang	a. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan penyediaan energi
		b. Membangun dan mengembangkan sarana prasarana fisik utama transportasi darat, laut dan transportasi darat, laut dan udara
		c. Meningkatkan pelayanan jasa dan jaringan komunikasi dan informatika

4.2.3. ISU STRATEGIS PEMERINTAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021

Isu strategis pembangunan Kota Tarakan Tahun 2021 sama dengan isu stratgis yang termuat dalam RPJMD Kota Tarakan 2019-2024, namun terdapat penambahan isu baru yaitu penanggulangan pandemic Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya. Isu ini sanya strategis dan mendesak untuk diangkat dalam perencanaan pembangunan Tahun 2021 sebagai kelanjutan dari proses penanganan Covid-19 yang belum dapat dipastikan kapan akan berakhir.

Isu strategis merupakan permasalahan utama yang disepakati menjadi dasar perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Tarakan sejak tahun 2019 karena memiliki dampak yang signifikan bagi daerah dan masyarakat.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu kebijakan internasional dan kebijakan nasional, penalaahan kebijakan pembangunan daerah, serta permasalahan pembangunan yang ada ,maka isu strategis Kota Tarakan sebagai berikut:

1. **Percepatan Penanganan Covid-19, Dampak Yang Ditimbulkannya Dan Pemulihan Kondisi Daerah Pasca Pandemi**

   Pandemi Covid_19 telah ditetapkan sebagai bencana nonalam melanda 34 provinsi di Indonesia. Sejak pertama kali diumumkan masuknya Covid-19 ke Indonesia pada 2 Maret 2020, memberi dampak yang besar bagi kondisi dalam negeri. Berbagai kebijakan telah diterapkan antara lain *social distancing, work from home (WFH),* pembatasan social berskala besar (PSBB), pembatasan jalur transportasi, penggunaan masker dan lain sebagainya. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan persebaran virus dan mempercepat penanganan Covid-19.

   Namun disisi lain kebijakan tersebut membatasi berbagai aktivitas kehidupan masyarakat dan pembangunan. Sehingga berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia termasuk di Kota Tarakan.

Pandemi yang telah memasuki bulan ketiga di Indonesia telah terlihat berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi dan pengangguran di Indonesia dan secara khusus Kalimantan Utara. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, ekonomi Kalimantan Utara triwulan I Tahun 2020 terhadap triwulan I Tahun 2019 tumbuh 5,01 persen (y-on-y), melambat disbanding capaian triwulan I Tahun 2019 sebesar 7,13 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 9,86 persen. Dari sisi Pengeluaran dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh 11,55 persen. Lebih lanjut, Ekonomi Kalimantan Utara triwulan I Tahun 2020 terhadap triwulan IV Tahun 2019 terkontraksi sebesar 1,38 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, penurunan disebabkan oleh kontraksi yang terjadi pada beberapa lapangan usaha. Sementara dari sisi pengeluaran, penurunan disebabkan antara lain oleh kontraksi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 2,76 persen. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Utara pada Februari 2020 mencapai 5,65 persen atau sebanyak 20.867 orang, mengalami peningkatan bila dibandingkan TPT pada Agustus 2019 yang tercatatat sebesar 4,40 persen atau sebanyak 15.380 orang. Namun bila TPT pada Februari 2020 yang mencapai 5,65 persen dibandingkan dengan TPT Februari 2019, maka mengalami penurunan. TPT Februari 2019 sebesar 5,80 persen (20.681 orang). Pada bulan Februari 2020, penduduk umumnya bekerja pada lapangan usaha Pertanian (A) sebesar 30,44 persen, berikutnya adalah perdagangan (G) sebesar 15,80 persen dan Administrasi Pemerintah (O) sebesar 10,42 persen.

Dengan kondisi tersebut menuntut adanya upaya dan strategi yang tepat untuk penanganan dampak negative Covid-19 dan pemulihan Kembali kondisi perekonomian, keuangan, social dan fisik akan berlangsung sepanjang Tahun 2021.

2. **Sumber Daya Manusia Belum Kompetitif**

Penyiapan sumber daya manusia yang berdaya saing mutlak dilakukan dimana ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan prasyarat guna mengahadapi tantangan global.

Rendahnya daya saing sumber daya manusia Kota Tarakan terkait dengan relatif rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan. Rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan penduduk ini akan menjadi salah satu penghambat bagi berkembangnya sebuah daerah, mengingat penduduk merupakan sumber daya manusia yang potensial sebagai pelaku aktif untuk menggerakkan pembangunan.

3. **Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah**

Optimalisasi pelayanan publik dalam rangka memperpendek rentang kendali (span of control) pemerintahan menjadi peran yang sesungguhnya yang harus menjadi pedoman utama, agar tujuan efisien dan efektif sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang pada akhirnya diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. **Belum Optimalnya Pelayanan Infrastruktur Wilayah**

Rendahnya aksesibilitas, konektivitas antar wilayah dan keterbatasan ketersediaan infrastruktur mengakibatkan ketertinggalan suatu daerah. Jaringan transportasi yang meliputi jaringan jalan (infrastruktur transportasi) dan layanan transportasi memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan jaringan jalan mampu membuka isolasi wilayah sehingga berbagai potensi yang ada di wilayah tersebut dapat di manfaatkan dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat

setempat. Pengangkutan orang dan barang diperlukan agar pergerakan orang dan barang tersebut dapat cepat aman dan ekonomis. Oleh karena itu ketersediaan layanan transportasi menjadi penting untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, mendorong pergerakan orang dan barang, mendukung distribusi berbagai hasil pembangunan yang dapat diwujudkan. Layanan transportasi dapat membangkitkan peluang-peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi.

5. Tingkat Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah Belum Optimal

Kesenjangan wilayah dan ketidakmerataan ruang kegiatan ekonomi berpotensi mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran. Jika dilihat dari pencapaian pembangunan yang diukur dari indicator makro, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan persentase tingkat pengangguran, dan Indeks Gini selama kurun waktu 2014-2019 laju pembangunan di Kota Tarakan sudah melebihi sasaran pembangunan nasional yang disyaratkan dalam RPJMN 2015-2019. Akan tetapi jika dilihat dari perkembangan wilayah menurut capaian indikator makro tersebut, terlihat masih terdapat kesenjangan wilayah. Hal ini mengakibatkan relatif tingginya tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di Kota Tarakan. Masih rendahnya pemerataan kesejahteraan akibat kemiskinan di Kota Tarakan dapat disebabkan oleh banyak faktor antara lain tidak meratanya distribusi kegiatan ekonomi, belum optimalnya pengendalian harga barang kebutuhan pokok masyarakat, belum optimalnya pengembangan usaha di sektor produktif bagi masyarakat, adanya keterbatasan kesempatan kerja atau belum optimalnya perluasan kesempatan kerja, kualitas tenaga kerja yang tidak sesuai dengan permintaan lapangan kerja yang tersedia.

6. **Belum Optimalnya Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup**

   Penurunan daya dukung lingkungan akibat perubahan tata guna lahan untuk pembangunan yang tidak ramah lingkungan seperti kerusakan infrastruktur jalan, kebisingan aktifitas industri, kualitas udara yang menurun, banyak terjadi genangan air, meningkatnya sedimentasi dan pencemaran air sungai, menjadi sebuah keniscayaan. Untuk itu pemerintah daerah perlu menekan terjadinya kerusakan lingkungan sebagai dampak dari pembangunan di Kota Tarakan.

   Selain itu, pemerintah juga perlu tetap memperhatikan tersedianya kebutuhan akan energi dan air di masa depan, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk sebagai akibat terciptanya kegiatan-kegiatan ekonomi.

7. **Potensi Meningkatnya Kerawanan dan Gangguan Ketertiban Umum**

   Kota Tarakan merupakan kota pulau yang terletak di Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Oleh sebab itu masih sering dan banyak terjadi kegiatan illegal seperti perdagangan ilegal, human traffikcing, TKI ilegal hingga penyelundupan narkoba dan obat-obatan terlarang. Kegiatan ilegal khususnya perdagangan barang lintas batas disebabkan antara lain oleh faktor harga dan tingkat aksesibilitas. Selain itu, kegiatan pencurian ikan (illegal fishing) yang semakin meningkat di wilayah perairan Indonesia oleh kapal asing, termasuk di wilayah perairan provinsi ini yang sangat merugikan para nelayan lokal.

4.2.4. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA TARAKAN TAHUN 2021

RKPD Kota Tarakan tahun 2021 tidak berdiri sendiri namun juga harus terintegrasi dengan kebijakan pembangunan provinsi maupun

nasional. Oleh karena itu dalam menentukan prioritas pembangunan daerah Kota Tarakan harus mempedomani prioritas provinsi maupun nasional.

Tema pembangunan Kota Tarakan pada tahun 2021 pelaksanaan RPJMD Kota Tarakan tahun 2019-2024 adalah:

"PEMANTAPAN PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH DAN SUMBERDAYA LOKAL YANG BERKUALITAS"

Tema pembangunan tersebut mempunyai makna bahwa fokus pembangunan Kota Tarakan tahun 2021 adalah untuk memantapkan pembangunan dan pengembangan perekonomian baik itu ekonomi daerah maupun ekonomi masyarakatnya. Selain itu dalam melakukan pembangunan ekonomi tersebut harus dibarengi dengan pengembangan sumberdaya lokal atau berbasis pada sumberdaya lokal. Dimensi sumberdaya lokal yang dimaksud disini ialah dimensi sumberdaya manusia / masyarakatnya, sumberdaya lingkungannya, sumberdaya fisik infrastrukturnya, sumberdaya pemerintahannya, dan sumberdaya potensi ekonomi lokal.

Dalam mencapai target sasaran pembangunan jangka menengah Kota Tarakan 2019-2024, ditahun 2021 terdapat 14 (Empatbelas) Strategi Pembangunan dan 43 (empatpuluhtiga) prioritas daerah Kota Tarakan yaitu:

1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
   - Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak
   - Peningkatan Jaminan Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular
   - Pemenuhan Kebutuhan Obat
   - Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Pelayanan Kesehatan Yang Terpadu, Berkualitas dan Berstandar
   - Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan dan Lingkungan Permukiman Masyarakat
   - Peningkatan partisipasi KB masyarakat

2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Masyarakat Secara Merata, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
   - Pemerataan Sarana dan Prasarana pendidikan serta Peningkatan Partisipasi Pendidikan Masyarakat Khususnya yang Tidak Mampu
   - Optimalisasi Pendidikan Non-Formal
   - Pemenuhan tenaga pendidikan yang berkualitas
   - Pengembangan Minat Baca Masyarakat
3) Pemberdayaan Ekonomi Mikro Masyarakat, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
   - Peningkatan Kesejahteran Buruh
   - Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
   - Peningkatan Kesempatan dan kemudahan usaha mikro
4) Reformasi birokrasi dan tata Kelola pemerintahan, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
   - Peningkatan Kualitas Pengelolaat Aset dan Pengendalian Internal Pemerintah
   - Peningkatan Kualitas Pengadaan barang dan Jasa
   - Peningkatan tertib administrasi pertanahan dalam pembangunan
   - Peningkatan kualitas dan efektifitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
   - Peningkatan Profesionalisme ASN
   - Peningkatan Kualitas Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi
5) Peningkatan ruang terbuka hijau dengan arah kebijakan sebagai berikut :
   - Pengembangan dan pembangunan ruang terbuka hijau
6) Pemenuhan air bersih masyarakat dengan arah kebijakan sebagai berikut :
   - Peningkatan kapasitas tampungan air baku
   - Perluasan dan pemerataan jaringan air bersih skala local dan regional
7) Peningkatan Interkoneksi Wilayah, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Jalan Darat dan Jembatan

8) Pengembangan pemukiman dan rehabilitasi Kawasan kumuh dengan arah kebijakan sebagai berikut :
   - Pengembangan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
   - Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Kumuh
   - Penyediaan sanitasi layak
9) Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin, dengan arah kebijakan:
   - Perbaikan Layanan Dasar Masyarakat Miskin Yang Tepat Sasaran
10) Peningkatan Kualitas sumber daya dan penyerapan tenaga kerja lokal, dengan arah kebijakan:
   - Perluasan Lapangan Kerja
   - Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
11) Penguatan Potensi Unggulan Ekonomi Lokal, dengan arah kebijakan:
   - Pengembangan dan Pembangunan Pertanian dalam Arti Luas
   - Pembangunan dan Pengembangan Sektor Industri
   - Peningkatan Perdagangan Barang dan Jasa Berbasis Sumber Daya Lokal
   - Peningkatan Pengelolaan Potensi dan Destinasi Wisata
   - Peningkatan Kemudahan Investasi
   - Optimalisasi Pengelolaan Sumber-sumber PAD Potensial melalui BUMD
12) Menjaga Stabilitas Harga dan Distribusi Barang, dengan arah kebijakan:
   - Pengendalian Inflasi

13) Pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
   - Pengendalian pencemaran air
   - Pengendalian pencemaran udara

- Perlindungan tutupan lahan
- Peningkatan pengelolaan sampah

14) Mengurangi resiko bencana, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
    - Peningkatan kualitas mitigasi dan penanggulangan bencana kebakaran.
    - Peningkatan kualitas mitigasi dan penanggulangan bencana longsor.
    - Peningkatan kualitas mitigasi dan penanggulangan bencana banjir.

Secara keseluruhan Prioritas Daerah Kota Tarakan tahun 2021 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.4
Prioritas Daerah dan Program Prioritas Daerah
Kota Tarakan Tahun 2021

PRIORITAS RKPD	PROGRAM	OPD
STRATEGI : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT		
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	DINKES
	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	DINKES
Peningkatan Jaminan Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	DINKES
Pemenuhan Kebutuhan Obat	Program obat dan perbekalan Kesehatan	DINKES
Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Pelayanan Kesehatan Yang Terpadu, Berkualitas dan Berstandar	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	RSUD
	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	RSUD

PRIORITAS RKPD	PROGRAM	OPD
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	DINKES
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	DINKES
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	DINKES
Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan dan Lingkungan Permukiman Masyarakat	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	DINKES
	Program pengembangan lingkungan sehat	DINKES
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINKES
	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	DPPPAPPKB
	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	DPPPAPPKB
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	DPPPAPPKB
Peningkatan Partisipasi KB Masyarakat	Program Pelayanan Kontrasepsi	DPPPAPPKB
STRATEGI : PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT SECARA MERATA		
Pemerataan Sarana dan Prasarana pendidikan serta Peningkatan Partisipasi Pendidikan Masyarakat Khususnya yang Tidak Mampu	Program wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	DISDIKBUD
Optimalisasi Pendidikan Non-Formal	Program pendidikan non formal	DISDIKBUD
Pemenuhan tenaga pendidikan yang Berkualitas	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	DISDIKBUD
	Program Administrasi Perkantoran	DISDIKBUD
	Program Manajemen Pelayanan Kependidikan	DISDIKBUD

PRIORITAS RKPD	PROGRAM	OPD
Pengembangan Minat Baca Masyarakat	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	DAPD
STRATEGI : PEMBERDAYAAN EKONOMI MIKRO MASYARAKAT		
Peningkatan Kesejahteran Buruh	Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	DINAKERIN
Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	KECAMATAN
	Program Pembangunan Kelurahan	KECAMATAN
Peningkatan Kesempatan dan Kemudahan Usaha Mikro	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	DISDAGKOP
	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	DISDAGKOP
	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	DISDAGKOP
STRATEGI : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN		
Peningkatan Kualitas Pengelolaat Aset dan Pengendalian Internal Pemerintah	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	INSPEKTORAT
	Program peningkatan akuntabilitas pengelolaan asset daerah	BPKAD
Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa	Program penguatan kelembagaan iorganisasi perangkat daerah	SETDA
Peningkatan tertib administrasi pertanahan dalam pembangunan	Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	DPKPP
Peningkatan kualitas dan efektifitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Program perencanaan pembangunan daerah	BAPPEDA
	Program peningkatan sistem pengendalian intern pemerintah dan kesadaran penyelenggaraan negara	INSPEKTORAT
	Program peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan Keuangan	SETDA

PRIORITAS RKPD	PROGRAM	OPD
Peningkatan profesionalisme ASN	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	BKPP
Peningkatan kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	DISKOMINFO
	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	DISKOMINFO
	Program Kerjasama informasi dan media massa	DISKOMINFO
STRATEGI : PENINGKATAN RUANG TERBUKA HIJAU		
Pengembangan dan Pembangunan Ruang Terbuka Kota	Program pengelolaan ruang terbuka hijau	DPUTR
	Program pelayanan administrasi perkantoran	DPUTR
STRATEGI : PEMENUHAN AIR BERSIH MASYARAKAT		
Peningkatan Kapasitas Tampungan Air Baku	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	DPUTR
Perluasan dan Pemerataan Jaringan Air Bersih Skala Lokal dan Regional	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	DPUTR
STRATEGI : PENINGKATAN INTERKONEKSI WILAYAH		
Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan darat dan jembatan	Program pembangunan jalan dan jembatan	DPUTR
	Program peningkatan jalan dan jembatan	DPUTR
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	DPUTR
STRATEGI : PENGEMBANGAN PEMUKIMAN DAN REHABILITASI KAWASAN KUMUH		
Pengembangan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Program pengembangan perumahan	DPKPP
Peningkatan jalan lingkungan Kawasan kumuh	Program peningkatan jalan lingkungan perkotaan	DPKPP
Penyediaan sanitasi layak	Program pengembangan saluran drainase/gorong-gorong	DPKPP

PRIORITAS RKPD	PROGRAM	OPD
STRATEGI : PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MISKIN		
Perbaikan Layanan Dasar Masyarakat Miskin Yang Tepat Sasaran	Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (kat) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) lainnya	DINAS SOSIAL
	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	DINAS SOSIAL
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	DINKES
	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	DINAS SOSIAL
STRATEGI : PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA LOKAL		
Perluasan Lapangan Kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	DINAKERIN
Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	DINAKERIN
STRATEGI : PENGUATAN POTENSI UNGGULAN EKONOMI LOKAL		
Pengembangan dan Pembangunan Pertanian dalam Arti Luas	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	DPPP
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	DPPP
	Program pengembangan budidaya perikanan	DPPP
	Program pengembangan perikanan tangkap	DPPP
	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	DPPP
Pembangunan dan Pengembangan Sektor Industri	Program Penataan struktur industry	DINAKERIN
	Program pengembangan industri kecil dan menengah	DINAKERIN
Peningkatan Perdagangan Barang dan Jasa Berbasis Sumber Daya Lokal	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	DISDAGKOP UMKM
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	DISDAGKOP UMKM

PRIORITAS RKPD	PROGRAM	OPD
	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	DISDAGKOP UMKM
	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.	DISDAGKOP UMKM
Peningkatan Pengelolaan Potensi dan Destinasi Wisata	Program pengembangan pemasaran pariwisata	DINAS PARIWISATA
	Program pengembangan destinasi pariwisata	DINAS PARIWISATA
	Program Pengembangan Nilai Budaya	DISDIKBUD
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	DISDIKBUD
Peningkatan Kemudahan Investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	DPMPTSP
	Program peningkatan pelayanan dan administrasi perizinan	DPMPTSP
Optimalisasi Pengelolaan Sumber-sumber PAD Potensial melalui BUMD	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPPRD
STRATEGI : MENJAGA STABILITAS HARGA DAN DISTRIBUSI BARANG		
Pengendalian Inflasi	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	DP3
STRATEGI : PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN		
Pengendalian pencemaran air	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	DLH
Pengendalian pencemaran udara	Program peningkatan pengendalian polusi	DLH
Pengendalian kualitas tutupan lahan	Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	DLH
Peningkatan pengelolaan sampah	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	DLH
STRATEGI : MENGURANGI RESIKO BENCANA		
Peningkatan kualitas mitigasi dan penanggulangan bencana kebakaran	Program pencegahan dan pesiapsiagaan penanggulangan bencana	SATPOLPP DAN PMK
	Program tanggap darurat logistik dan penanggulangan bencana	SATPOLPP DAN PMK

PRIORITAS RKPD	PROGRAM	OPD
	Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	BPBD
Peningkatan kualitas mitigasi dan penanggulangan bencana longsor	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	DLH
	Program pembangunan turap/talud/bronjong	DPUTR
Peningkatan kualitas mitigasi dan penanggulangan banjir	Program pengendalian banjir	DPUTR

Dari prioritas tersebut untuk mencapai 17 (Tujuhbelas) sasaran pembangunan dan indikator sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dengan indikator sasaran Usia Harapan Hidup;
2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan dengan indikator sasaran Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah;
3. Meningkatnya daya beli masyarakat dengan indikator sasaran pengeluaran perkapita masyarakat;
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan dengan indikator sasaran Opini BPK dan Nilai SAKIP;
5. Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien dengan indikator sasaran Indeks Profesionalisme ASN;
6. Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat;
7. Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau dengan indikator sasaran Persentase ruang terbuka hijau;
8. Meningkatnya pelayanan air bersih dengan indikator sasaran Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih;
9. Meningkatnya aksessibiltas perkotaan dengan indikator sasaran persentase panjang jalan dengan kondisi mantap dan rasio volume kendaraan per kapasitas jalan;

10. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk MBR dengan indikator sasaran Persentase perumahan DP 0% untuk MBR yang terbangun;
11. Menurunnya luas Kawasan kumuh dengan indikator sasaran persentase luas Kawasan kumuh;
12. Menurunnya kemiskinan dengan indikator sasaran Angka Kemiskinan;
13. Menurunnya pengangguran dengan indikator sasaran Tingkat pengangguran terbuka
14. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dengan indikator sasaran Laju Pertumbuhan Ekonomi;
15. Terkendalinya inflasi daerah dengan indikator sasaran Tingkat Inflasi.
16. Menurunnya pencemaran lingkungan dengan indikator sasaran indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks tutupan lahan dan persentase sampah yang dikelola;
17. Meningkatnya penanganan kebencanaan yang efektif dengan indikator sasaran persentase pelayanan bencana kebakaran, persentase bencana longsor dan persentase luas genangan banjir.

Dari sasaran dan indikator sasaran tersebut, target dan realisasi yang dicapai dari tahun 2019 serta target tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Sasaran dan Indikator Prioritas Pembangunan dan Target Tahun 2021

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021	Indikator Sasaran	Tahun 2019		Target 2020	Target 2021
				Target	Realisasi		
1	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	73	73,92	74,18	74,29

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021	Indikator Sasaran	Tahun 2019		Target 2020	Target 2021
				Target	Realisasi		
2	Peningkatan Jaminan Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
3	Pemenuhan Kebutuhan Obat						
4	Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Pelayanan Kesehatan Yang Terpadu, Berkualitas dan Berstandar						
5	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan dan Lingkungan Permukiman Masyarakat						
6	Peningkatan partisipasi KB masyarakat						
7	Pemerataan Sarana dan Prasarna pendidikan serta Peningkatan Partisipasi Pendidikan Masyarakat Khususnya yang Tidak Mampu	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	99.25 (Angka Melek Huruf)	97,99	13,85	13,93
8	Optimalisasi Pendidikan Non-Formal		Rata-rata lama sekolah	10	9,96	9,96	9,97
9	Pemenuhan tenaga pendidikan yang berkualitas						
10	Pengembangan Minat Baca Masyarakat						
11	Peningkatan Kesejahteran Buruh	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita masyarakat	665.000	1.609.732	1.700.000	1.800.000
12	Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat						
13	Peningkatan Kesempatan dan kemudahan usaha mikro						
14	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset dan Pengendalian Internal Pemerintah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
15	Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa						
16	Peningkatam tertib administrasi						

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021	Indikator Sasaran	Tahun 2019		Target 2020	Target 2021
				Target	Realisasi		
	pertanahan dalam pembangunan						
17	Peningkatan kualitas dan efektifitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		Nilai SAKIP	60,	62,39	62,00	64,00
18	Peningkatan profesionalisme ASN	Terwujudnya birokrasi yang efektif dan Efisien	Indeks Profesionalitas ASN	N/A	73	73	75
19	Peningkatan kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi	Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	77,59	77,59	79,59	80,59
20	Pengembangan dan Pembangunan Ruang Terbuka Kota	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	Persentase ruang terbuka hijau	46,54	46,54	46,54	46,62
21	Peningkatan Kapasitas Tampungan Air Baku	Meningkatnya pelayanan air bersih	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih	60,64	60,64	67,51	74,38
22	Perluasan dan Pemerataan Jaringan Air Bersih Skala Lokal dan Regional						
23	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan darat dan jembatan	Meningkatnya aksesibilitas perkotaan	Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap	54,42	54,42	57,54	60,65
			Rasio volume kendaraan per kapasitas jalan	0,57	0,59	0,57	0,55
24	Pengembangan Perumahan untuk Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk MBR	Persentase perumahan DP 0% untuk MBR yang terbangun	0	0	10	35
25	Peningkatan jalan lingkungan Kawasan kumuh	Menurunnya luas kawasan kumuh	Persentase luas Kawasan kumuh	52,59	52,59	47,33	28,92
26	Penyediaan sanitasi layak						
27	Pengendalian pencemaran air	Menurunnya pencemaran lingkungan	Indeks Kualitas air	43,75	43,75	44,00	44,25
28	Pengendalian pencemaran udara		Indeks kualitas udara	85	85	87	89
29	Perlindungan kualitas tutupan lahan		Indeks tutupan lahan	55,29	55,29	55,50	55,75

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021	Indikator Sasaran	Tahun 2019		Target 2020	Target 2021
				Target	Realisasi		
30	Peningkatan pengelolaan sampah		Persentase sampah yang dikelola	78,80	78,80	79,50	81,00
31	Peningkatan kualitas mitigasi dan penanggulangan bencana kebakaran	Meningkatnya penanganan kebencanaan yang efektif	Persentase pelayanan bencana kebakaran	100	100	100	100
32	Peningkatan kualitas mitigasi dan penanggulangan bencana longsor		Persentase pelayanan bencana longsor	69,60	69,60	87,00	89,00
33	Peningkatan kualitas mitigasi dan penanggulangan banjir		Persentase luas genangan banjir	0,230	0,230	0,229	0,228
34	Perbaikan Layanan Dasar Masyarakat Miskin Yang Tepat Sasaran	Menurunnya Kemiskinan	Angka Kemiskinan	6-7	6	5,85	5,7
35	Perluasan Lapangan Kerja	Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	6-7	4,78	5,84	5,79
36	Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja						
37	Pengembangan dan Pembangunan Pertanian dalam Arti Luas						
38	Pembangunan dan Pengembangan Sektor Industri	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6-7	7,69	7	7,23
39	Peningkatan Perdagangan Barang dan Jasa Berbasis Sumber Daya Lokal						
40	Peningkatan Pengelolaan Potensi dan Destinasi Wisata						
41	Peningkatan Kemudahan Investasi						
42	Optimalisasi Pengelolaan Sumber-sumber PAD Potensial						
43	Pengendalian Inflasi	Terkendalinya Inflasi Daerah	Tingkat Inflasi	5-7	1,47	4	3,7

Adapun keterkaitan Prioritas Daerah Kota Tarakan terhadap Prioritas Nasional dan Provinsi Kaltara tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4

Keterkaitan Prioritas Daerah Kota Tarakan terhadap Prioritas Nasional dan Provinsi Kaltara Tahun 2021

NASIONAL	PROVINSI	KOTA TARAKAN			
Prioritas Nasional	**Prioritas Provinsi Kaltara**	**Strategi**	**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas**	**OPD**
Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	Pemberdayaan Ekonomi Mikro Masyarakat	Peningkatan Kesejahteran Buruh	Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	DINAKERIN
			Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	KECAMATAN
				Program Pembangunan Kelurahan	KECAMATAN
	Pengembangan Usaha Kecil, Koperasi dan IKM		Peningkatan Kesempatan dan kemudahan usaha mikro	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	DISDAGKOP DAN UMKM
				Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	DISDAGKOP DAN UMKM
				Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	DISDAGKOP DAN UMKM
	Peningkatan Ketahanan Pangan daerah	Menjaga Stabilitas Harga dan Distribusi Barang	Pengendalian Inflasi	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	DP3

NASIONAL	PROVINSI	KOTA TARAKAN			
Prioritas Nasional	**Prioritas Provinsi Kaltara**	**Strategi**	**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas**	**OPD**
	Peningkatan Daya Tarik Investasi	Penguatan Potensi Unggulan Ekonomi Lokal	Peningkatan Kemudahan Berinvestasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	DPMPTSP
				Program peningkatan pelayanan dan administrasi perizinan	DPMPTSP
			Pengembangan dan Pembangunan pertanian dalam arti luas	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	DP3
				Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	DP3
				Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	DP3
				Program pengembangan budidaya perikanan	DP3
				Program pengembangan perikanan tangkap	DP3
				Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	DP3
			Pembangunan dan Pembangunan Sektor Industri	Program penataan struktur industri	DINAKERIN
				Program pengembangan industri kecil dan menengah	DINAKERIN

NASIONAL	PROVINSI	KOTA TARAKAN			
Prioritas Nasional	**Prioritas Provinsi Kaltara**	**Strategi**	**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas**	**OPD**
			Peningkatan perdagangan barang dan jasa berbasis sumberdaya lokal	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	DISDAGKOP UMKM
				Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	DISDAGKOP UMKM
				Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.	DISDAGKOP UMKM
			Peningkatan pengelolaan potensi dan destinasi wisata	Program pengembangan pemasaran pariwisata	DISPAR
				Program pengembangan destinasi pariwisata	DISPAR
				Program Pengembangan Nilai Budaya	DISDIKBUD
				Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	DISDIKBUD
			Optimalisasi Pengelolaan Sumber-Sumber PAD Potensial	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPPRD
SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Kualitas Kerja	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin	Perluasan lapangan kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	DINAKERIN
			Peningkatan kualitas tenaga kerja	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	DINAKERIN

NASIONAL	PROVINSI	KOTA TARAKAN			
Prioritas Nasional	**Prioritas Provinsi Kaltara**	**Strategi**	**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas**	**OPD**
	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Kemandirian PMKS		Perbaikan Layanan Dasar Masyarakat Miskin Yang Tepat Sasaran	Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpenci (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	DINSOS PM
				Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan soaial	DINSOS PM
				Program kemitraan peningkatan pelayanan Kesehatan	DINKES
				Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	DINSOS PM
	Peningkatan Pelayanan Pendidikan	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Secara Merata	Pemerataan Sarana dan Prasarna pendidikan serta Peningkatan Partisipasi Pendidikan Masyarakat Khususnya yang Tidak Mampu	Program wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	DISDIKBUD
			Optimalisasi Pendidikan Non-Formal	Program pendidikan non formal	DISDIKBUD
				Program pendidikan anak usia dini	DISDIKBUD

NASIONAL	PROVINSI	KOTA TARAKAN			
Prioritas Nasional	**Prioritas Provinsi Kaltara**	**Strategi**	**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas**	**OPD**
			Pemenuhan tenaga pendidikan yang berkualitas	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	DISDIKBUD
				Program Administrasi Perkantoran	DISDIKBUD
				Program Manajemen Pelayanan Kependidikan	DISDIKBUD
			Pengembangan Minat Baca Masyarakat	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	DAPD
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES
				Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	DINKES
				Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	DINKES
			Peningkatan Jaminan Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	DINKES
			Pemenuhan Kebutuhan Obat	Program obat dan perbekalan Kesehatan	DINKES

NASIONAL	PROVINSI	KOTA TARAKAN			
Prioritas Nasional	**Prioritas Provinsi Kaltara**	**Strategi**	**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas**	**OPD**
			Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Pelayanan Kesehatan Yang Terpadu, Berkualitas dan Berstandar	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	RSUD
				Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	RSUD
				Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	DINKES
				Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	DINKES
				Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	DINKES

NASIONAL	PROVINSI	KOTA TARAKAN			
Prioritas Nasional	**Prioritas Provinsi Kaltara**	**Strategi**	**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas**	**OPD**
			Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan dan Lingkungan Permukiman masyarakat	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	DINKES
				Program pengembangan lingkungan sehat	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINKES
				Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	DPPPAPPKB
				Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	DPPPAPPKB
				Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	DPPPAPPKB
			Peningkatan Partisipasi KB Masyarakat	Program Pelayanan Kontrasepsi	DINKES

NASIONAL	PROVINSI	KOTA TARAKAN			
Prioritas Nasional	**Prioritas Provinsi Kaltara**	**Strategi**	**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas**	**OPD**
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan pelayanan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dengan tata ruang.	Peningkatan ruang terbuka hijau	Pengembangan dan pembangunan ruang terbuka kota	Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	DPUTR
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DPUTR
		Pemenuhan air bersih masyarakat	Peningkatan Kapasitas Tampungan Air Baku	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	DPUTR
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	DPUTR
				Program Penyediaan dan pengolahan air baku	DPUTR
		Peningkatan interkoneksi wilayah	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan darat dan jembatan	Program pembangunan jalan dan jembatan	DPUTR
				Program peningkatan jalan dan jembatan	DPUTR
				Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	DPUTR

NASIONAL	PROVINSI	KOTA TARAKAN			
Prioritas Nasional	**Prioritas Provinsi Kaltara**	**Strategi**	**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas**	**OPD**
		Pengembangan pemukiman dan rehabilitasi Kawasan kumuh	Pengembangan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Program pengembangan perumahan	DPKPP
			Peningkatan jalan lingkungan Kawasan kumuh	Program peningkatan jalan lingkungan perkotaan	DPKPP
			Penyediaan sanitasi layak	Program pengembangan saluran drainase/gorong-gorong	DPKPP
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.	Pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan	Pengendalian pencemaran air	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	DLH
			Pengendalian pencemaran udara	Program peningkatan pengendalian polusi	DLH
			Perlindungan kualitas tutupan lahan	Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	DLH
			Peningkatan pengelolaan sampah	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	DLH
		Mengurangi resiko bencana	Peningkatan kualitas mitigasi dan	Program pencegahan dan pesiapsiagaan penanggulangan bencana	SATPOLPP DAN PMK

NASIONAL	PROVINSI	KOTA TARAKAN			
Prioritas Nasional	**Prioritas Provinsi Kaltara**	**Strategi**	**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas**	**OPD**
			penanggulangan bencana kebakaran	Program tanggap darurat logistik dan penanggulangan bencana	SATPOLPP DAN PMK
				Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	BPBD
			Peningkatan kualitas mitigasi dan penanggulangan bencana longsor	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	DLH
				Program pembangunan turap/talud/bronjong	DPUTR
			Peningkatan kualitas mitigasi dan penanggulangan banjir	Program pengendalian banjir	DPUTR
Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Reformasi birokrasi dan tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan asset dan pengendalian internal pemerintah	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	INSPEKTORAT
				Program peningkatan akuntabilitas pengelolaan asset daerah	

NASIONAL	PROVINSI	KOTA TARAKAN			
Prioritas Nasional	**Prioritas Provinsi Kaltara**	**Strategi**	**Prioritas Daerah**	**Program Prioritas**	**OPD**
			Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa	Program penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah	SETDA
	Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu.		Peningkatan kualitas dan efektifitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Program perencanaan pembangunan daerah	BAPPEDA
				Program peningkatan sistem pengemdalian intern pemerintah dan kesadaran penyelenggaraan negara	INSPEKTORAT
				Program peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan Keuangan	SETDA
			Peningkatan profesionalisme ASN	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	BKPP
			Peningkatan kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	DISKOMINFO
				Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	DISKOMINFO

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2021

5

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2021

5.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2021

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2021 mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas Kota Tarakan yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD sebagaimana telah dianalisis pada bab – bab sebelumnya. Rencana program dan kegiatan prioritas yang disusun juga telah mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat yang melalui proses panjang dimulai dari Rembuk RT hingga Musyawarah Pembangunan Daerah tingkat Kota, serta mempedomani prioritas Nasional dan Provinsi Kaltara.

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab IV, bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi sesuai dengan isu aktual dan kondisi umum yang dihadapi, maka agenda pada tahun 2021 memiliki dua puluh satu (21) prioritas pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, prioritas pembangunan daerah tersebut dijabarkan ke dalam program dan kegiatan serta pagu indikatifnya masing-masing Perangkat Daerah dalam tabel 5.1 (terlampir).

5.2 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Yang Mendukung Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pemerintah daerah diamanatkan untuk menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

Rencana pemenuhan pelayanan dasar ditetapkan dalam dokumen

perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Sehubungan dengan amanat tersebut, maka RKPD Tahun 2021 Pemerintah Kota Tarakan dialokasikan anggaran untuk penerapan 6 (enam) bidang SPM. Hal ini disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.2
Program, Kegiatan, Indikator Program dan Kegiatan sesuai Standar Pelayanan Dasar (SPM) Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	PAGU	PERANGKAT DAERAH
BIDANG PENDIDIKAN						
1	**Pendidikan Anak Usia Dini**	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	**APM PAUD**	**26,.9**	**230.000.000**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
		Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Jumlah tenaga Guru PAUD yang mendapat pelatihan	60 orang	150.000.000	
		Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 OP	50.000.000	
		Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	Jumlah koordinasi kerjasama bidang PAUD	3 koordinasi	30.000.000	
2	**Pendidikan Dasar**	**Program Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun**	**APK SD/MI**	**90,63**	**44.684.550.000**	
			APK SMP/MTs	**73,38**		
		Pembangunan gedung sekolah	Jumlah gedung sekolah yang dibangun	3 sekolah	25.045.000.000	
		Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Jumlah toilet yang dibangun	1 paket	10.000.000	
		Pengadaan mebeluer sekolah	Jumlah meubeler	200 unit	170.000.000	
		Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	renovasi pagar sekolah SDN 019 Tarakan	1 paket	50.000.000	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah siswa yang megikuti lomba O2SN	50 siswa	200.000.000	
		Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Lomba Penelitian Siswa Nasional (LPSN)	50 siswa	50.000.000	
		Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP	Jumlah sekolah Negeri yang mendapatkan dana BOP	65 sekolah	15.273.500.000	
		Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa dan tenaga pendidik dibidang olahraga, seni dan budaya	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Gala Siswa Indonesia (GSI)	75 siswa	262.500.000	
		Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa dan tenaga pendidik dibidang olahraga, seni dan budaya	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)	75 siswa	157.500.000	
		Penyelenggaraan ujian akhir sekolah SD/MI	Jumlah sekolah yang mengikuti ujian sekolah dan nasional tingkat SD/MI, SMP/MTs	95 Sekolah	383.250.000	
		Pelaksanaan pendidikan berwawasan kesehatan dan lingkungan	Jumlah sekolah yang melaksanakan usaha kesehatan sekolah (UKS)	100 sekolah negeri/swasta jenjang PAUD/TK/RA/ SD/MI/SMP/MTs	50.000.000	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Penyediaan beasiswa prestasi	Jumlah Siswa yang mendapat Beasiswa Prestasi Siswa	3852 orang untuk 2 jenjang	2.032.800.000	
		Penyediaan beasiswa transisi	Jumlah Siswa yang mendapat Beasiswa Siswa tidak mampu	1000 siswa	1.000.000.000	
3	**Pendidikan Non Formal**	**Program Pendidikan Non Formal**	**Persentase siswa yang mengikuti pendidikan kesetaraan**	**98,34**	**470.000.000**	
		Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	Jumlah tenaga pendidik non formal yang mengikuti pelatihan	50 orang tenaga pendidik non formal	120.000.000	
		Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat, pelatihan, Bimtek dan Sosialisasi di luar daerah	1 keg	250.000.000	
		Penyelenggaraan ujian pendidikan non formal	Jumlah siswa yang mengikuti Ujian Nasional Berbasis Sekolah (UASBN) Paket A dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Paket A, B dan C	650 warga belajar	100.000.000	
BIDANG KESEHATAN						
1	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar**	**Program upaya kesehatan masyarakat**	**Persentase Puskesmas, Jaringan, dan Jejaringnya Mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP**	**100**	**4.040.890.000**	**DINAS KESEHATAN**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	Jumlah UPT yang melaksanakan kalibrasi, maintenance dan perbaikan alat kesehatan	7 UPT	300.000.000	
		Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	Jumlah calon jamaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji	220 Orang	380.000.000	
		Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	Jumlah kelurahan yang mengalami KLB dilakukan PE < 24 jam	6 Kelurahan	34.000.000	
		Peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah nominasi tenaga kesehatan teladan yang dinilai berdasarkan 9 kategori	27 Orang	300.000.000	
		Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Jumlah petugas layanan kegawatdaruratan yang mendapatkan pengetahuan BHD	30 Orang	228.290.000	
		penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	Jumlah UPT yang dilayani dalam pelaksanaan penyimpanan, penerimaan dan pendistribusian obat vaksin	7 UPT	50.000.000	
			pengadaan alat kesehatan (dacin,timbangan bayi digital, sarung timbang, microtoice, timbangan injak) (Kel Kr Anyar Pantai)	14 posyandu balita se Kelurahan Karang Anyar Pantai	1.647.000.000	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Pelayanan kesehatan masyarakat di Mamburungan	Nilai indeks kepuasan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Mamburungan	75	8.600.000	
			Pembinaan Posyandu (Kel Kr Harapan)	1 Kegiatan	8.600.000	
		Pelayanan kesehatan masyarakat di Gunung Lingkas	Skrining kesehatan masyarakat usia produktif (Kel Gn-Lingkas)	100	8.600.000	
		Pelayanan Kesehatan masyarakat di Pantai Amal	Nilai indeks kepuasan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Pantai Amal	75	8.600.000	
		Pelayanan kesehatan masyarakat di Karang Rejo	Penyuluhan Gizi (Stunting) (Kel Kr-Anyar-Pantai)	se- Kelurahan Karang Anyar Pantai	8.600.000	
		Pelayanan kesehatan masyarakat di Sebengkok	Nilai indeks kepuasan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Sebengkok	75	8.600.000	
		Operasional laboratorium kesehatan daerah	Jumlah sampel yang dilakukan pemeriksaan (kesmas dan klinik) laboratorium kesehatan	immunologi 1.100 patologi 21.000 mikrobiologi 7.500 kimia 1.700 narkoba 1.200	100.000.000	
2	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	Persentase orang usia produktif (15-59 tahun) yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	200.000.000	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	PAGU	PERANGKAT DAERAH
3	**Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**		Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	200.000.000	
4	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)**		Persentase penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	400.000.000	
5	**Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)**		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	50.000.000	
			Jumlah posbindu PTM yang melakukan posbindu PTM	20 Kelurahan	100.000.000	
6	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**	**Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar**	**90%**	**200.000.000**	
7	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**	Pelayanan kesehatan dan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	200.000.000	
8	**Pelayanan Kesehatan Balita**	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**	**Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar**	**7%**	100.000.000	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase kunjungan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	100.000.000	
9	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**	**Persentase warga negara berusia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**7%**	**100.000.000**	
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Persentase kunjungan warga negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100.000.000	
10	**Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)**	**Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular**	**Persentase penderita penyakit menular yang tertangani sesuai standar**	**100**	**460.840.000**	
11	**Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko HIV**	Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk	Jumlah titik fogging fokus	90 Fokus	135.840.000	
		Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100.000.000	
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100.000.000	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	PAGU	PERANGKAT DAERAH
			Persentase orang penderita malaria mendapatkan pelayanan malaria sesuai standar	100%	50.000.000	
			Persentase orang penderita kusta mendapatkan pelayanan kusta sesuai standar	100%	50.000.000	
12	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**	Peningkatan Imunisasi	Jumlah bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap	4.600 jiwa	25.000.000	
BIDANG PEKERJAAN UMUM						
1	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah**	**Prosentase Cakupan layanan penyediaan jaringan air minum**	**74,38%**	**16.177.679.000**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	panjang Pipa distribusi (meter)	14500 meter	8.677.679.000	
			Kapasitas Produksi (Liter /detik),	90 liter/detik	7.500.000.000	
2	**Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**persentase penduduk yang terlayani sanitasi**	**75,18 %**	**811.250.000**	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan air limbah yang terbangun dan terpelihara	4 Unit IPAL	**811.250.000**	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	PAGU	PERANGKAT DAERAH
BIDANG PERUMAHAN						
1	**Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Prosentase Rumah akibat bencana yang direhabilitasi**	**100%**	20.000.000	**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN**
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah akibat bencana yang direhabilitasi	2 Unit	20.000.000	
2	**Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Cakupan ketersediaan rumah layak huni**	**100%**	**1.088.091.000**	
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH yang terfasilitasi (DAK)	87 unit	1.088.091.000	
BIDANG TRANTIBUMLINMAS						
1	**Pelayanan pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat**	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	**Persentase penegakan PERDA**	**100%**	**257.500.000**	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**
		Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah Perda yang di razia	12 Perda	207.500.000	
		Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah pelaksanaan razia	8 kali razia	50.000.000	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	PAGU	PERANGKAT DAERAH
2	**Pelayanan penyelamatan**	**Program pencegahan dan pesiapsiagaan penanggulangan bencana**	**Persentase layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar) dalam tingkat waktu tanggap**	**100**	**160.000.000**	
		Pencegahan peringatan dini dan pengendalian bencana	Jumlah sosialisasi mitigasi kebakaran	6 kegiatan	100.000.000	
		Penyuluhan dan pengembangan SDM dalam pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Jumlah Kegiatan Penyuluhan	12 Penyuluhan	40.000.000	
		Monitoring mitigasi bencana	Jumlah kelompok BALAKAR yang mengikuti pelatihan penanggulangan kebakaran dan jumlah pemeriksaan alat pemadam kebakaran	2 jenis kegiatan	20.000.000	
3	**Pelayanan evakuasi korban kebakaran**	**Program tanggap darurat logistik dan penanggulangan bencana**	**Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap**	**100**	**7.110.950.000**	
		Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual tanggap darurat bencana	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	
		Koordinasi pencegahan dan penanggulangan bencana	Jumlah pegawai melaksanakan Perjalanan dinas luar dan dalam Daerah	10 OP	103.850.000	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Pengadaan sarana dan prasarana tanggap darurat dan logistik penanggulangan bencana	Jumlah kasus kebakaran	2 Kegiatan	101.000.000	
		Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran	11 kegiatan	6.806.100.000	
BIDANG SOSIAL						
1	**Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti**	**Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial**	**Persentase Partisipasi PMKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan Pelatihan dalam menunjang pelaksanaan Kesejahteraan Sosial**	**100%**	**5.000.000**	**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
		Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	jumlah orang terlantar anak berhadapan hukum dan anak putus sekolah yang mendapatkan pembinaan	120 org	5.000.000	
		Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	jumlah peserta pelatihan keterampilan bagi anak jalanan,anak cacat dan anak nakal	15 org	50.000.000	
		Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	jumlah rapat koordinasi nasional dan konsultasi bidang sosial penanganan PMKS	12 KALI	100.000.000	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	PAGU	PERANGKAT DAERAH
2	**Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota**	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terlayani	**100%**	100.000.000	
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100%	100.000.000	
3	**Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.**	**Program Rehabilitasi Sosial**	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti yang Terlayani**	**100%**	**345.000.000**	
4	**Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti**	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	persentase penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1	50.000.000	
5	**Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti**	Rehabilitasi Sosial Bagi Lanjut Usia	persentase penyandang lansia terlantar di luar panti yang terpenihi kebutuhan dasarnya	100%	110.000.000	
		Rehabilitasi Sosial Anak	persentase anak di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	35.000.000	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	PAGU	PERANGKAT DAERAH
		Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	persentase gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	150.000.000	

5.3. Dukungan Program Pembangunan Daerah Terhadap Program Prioritas Provinsi Kalimantan Utara

Dalam rangka pencapaian prioritas Provinsi Kalimantan Utara, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan beberapa program prioritas tahun 2021. Hal tersebut membutuhkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara. Adapun dukungan Pemerintah Kota Tarakan terhadap prioritas provinsi Tahun 2021 disajikan pada Tabel 6.2. Dukungan program perangkat daerah Kota Tarakan untuk setiap prioritas provinsi Tahun 2021 disertai dengan penganggaran disajikan pada table berikut :

Tabel 5.3

Dukungan Program Perangkat Daerah Terhadap Prioritas Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021

PRIORITAS KALIMANTAN UTARA 2021	PROGRAM PERANGKAT DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021		
	Program	**Anggaran**	**Perangkat Daerah**
Pembangunan ekonomi berkelanjutan.	Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	41.780.000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Pengembangan usaha kecil, koperasi, dan industri kecil dan menengah (IKM).	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	2.616.000.000	Kecamatan Tarakan Tengah
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	2.827.500.000	Kecamatan Tarakan Barat
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	2.358.300.000	Kecamatan Tarakan Timur
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1.087.500.000	Kecamatan Tarakan Utara
	Program Pembangunan Kelurahan	1.225.000.000	Kecamatan Tarakan Tengah
	Program Pembangunan Kelurahan	1.225.000.000	Kecamatan Tarakan Barat
	Program Pembangunan Kelurahan	1.715.000.000	Kecamatan Tarakan Timur
	Program Pembangunan Kelurahan	245.000.000	Kecamatan Tarakan Utara
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	50.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi dan

PRIORITAS KALIMANTAN UTARA 2021	PROGRAM PERANGKAT DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021		
	Program	**Anggaran**	**Perangkat Daerah**
			UMKM
	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	1.328.750.000	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM
	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	263.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM
Peningkatan ketahanan pangan daerah	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	625.000.000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Peningkatan daya tarik berinvestasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	265.200.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program peningkatan pelayanan dan administrasi perizinan	242.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	1.137.300.000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	461.500.000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Program pengembangan budidaya perikanan	445.000.000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Program pengembangan perikanan tangkap	1.503.850.000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	225.000.000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Program penataan struktur industri	-	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Program pengembangan industri kecil dan menengah	150.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	-	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1.275.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM

PRIORITAS KALIMANTAN UTARA 2021	PROGRAM PERANGKAT DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021		
	Program	**Anggaran**	**Perangkat Daerah**
	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.	486.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM
	Program pengembangan pemasaran pariwisata	550.000.000	Dinas Pariwisata
	Program pengembangan destinasi pariwisata	1.000.000.000	Dinas Pariwisata
	Program Pengembangan Nilai Budaya	180.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	225.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.661.500.000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Percepatan pembangunan desa secara terpadu.			
Percepatan penanggulangan kemiskinan dan kemandirian PMKS	Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpenci (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	488.120.600	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan soaial	155.000.000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Program Rehabilitasi Sosial	345.000.000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	7.495.948.000	Dinas Kesehatan
Peningkatan pelayanan pendidikan	Program wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	44.684.550.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program pendidikan non formal	470.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program pendidikan anak usia dini	230.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	600.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	270.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Peningkatan pelayanan kesehatan.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	4.040.890.000	Dinas Kesehatan

PRIORITAS KALIMANTAN UTARA 2021	PROGRAM PERANGKAT DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021		
	Program	**Anggaran**	**Perangkat Daerah**
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	200.000.000	Dinas Kesehatan
	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	100.000.000	Dinas Kesehatan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	460.840.000	Dinas Kesehatan
	Program obat dan perbekalan kesehatan	594.700.000	Dinas Kesehatan
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	6.600.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	400.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	500.000.000	Dinas Kesehatan
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	320.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	200.000.000	Dinas Kesehatan
	Program pengembangan lingkungan sehat	-	DINKES
Pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	148.656.500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA
	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	3.000.000	
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	46.300.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK &

PRIORITAS KALIMANTAN UTARA 2021	PROGRAM PERANGKAT DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021		
	Program	**Anggaran**	**Perangkat Daerah**
			KELUARGA BERENCANA
Peningkatan pelayanan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dengan tata ruang.	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	21.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program pengembangan perumahan	505.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	200.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Program lingkungan sehat perumahan	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Program pemberdayaan komunitas perumahan	150.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Program peningkatan jalan lingkungan perkotaan	29.990.990.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Program pembangunan jalan dan jembatan	2.493.552.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program pembangunan turap/talud/brojong	560.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	39.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	4.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	4.078.385.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	836.984.500	Dinas Lingkungan Hidup

PRIORITAS KALIMANTAN UTARA 2021	PROGRAM PERANGKAT DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021		
	Program	**Anggaran**	**Perangkat Daerah**
	Program pengelolaan ruang terbuka hijau	2.100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	126.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Program penyediaan dan pengolahan air baku	7.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	5.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Peningkatan pencegahan dan penanganan gangguan keamanan dan kebencanaan secara terpadu.	Program pengendalian banjir	38.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program pencegahan dan pesiapsiagaan penanggulangan bencana	364.160.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program tanggap darurat logistik dan penanggulangan bencana	366.827.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	413.200.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Fasilitasi perwujudan wilayah perbatasan yang tertib dan tenteram.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	100.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	200.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program pendidikan politik masyarakat	175.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	100.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	422.000.000	Sekretariat Daerah
	Program peningkatan akuntabilitas pengelolaan aset daerah	920.600.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	100.000.000	Inspektorat
	Program peningkatan sistem pengendalian internal pemerintah dan kesadaran	281.350.000	Inspektorat

PRIORITAS KALIMANTAN UTARA 2021	PROGRAM PERANGKAT DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021		
	Program	**Anggaran**	**Perangkat Daerah**
	penyelenggaraan negara		
Penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terpadu.	Program perencanaan pembangunan daerah	1.200.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pengembangan Perencanaan dan Anggaran	1.960.900.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Program Pengembangan Perencanaan dan Anggaran	150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pengembangan Data/Informasi	275.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	250.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program perencanaan Sosial Budaya	450.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program perencanaan pembangunan ekonomi	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	300.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peningkatan sistem pelayanan yang prima	Program penataan administrasi kependudukan	398.990.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

6

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada bab ini akan disajikan penjabaran mengenai Indikator Kinerja Daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing. Indikator Kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan (*outcome*) atau kompositnya (*impact).*

Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Hal ini karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret organisasi di masa kini maupun masa mendatang. Oleh karena itu penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ini secara lugas bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kota Tarakan tahun 2021. Capaian IKU Pemerintah Kota Tarakan pada periode ini dimulai dari tahun 2020 yang sedang berjalan sehingga yang disajikan adalah target yang akan dicapai tahun 2020 dan 2021.

Secara rinci, penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kota Tarakan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 6.1 dan tabel 6.2 berikut:

Tabel 6. 1
Indikator Kinerja Utama Kota Tarakan Tahun 2021

No	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal	TARGET	
				2020	2021
TUJUAN					
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75,27*	76,93	77,48
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	56,09	57	58
3	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	78	78,5	79
4	Indeks Gini	Indeks	0,3	0,3	0,3
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	N/A	64	65
6	Indeks Toleransi	Indeks	5,23	5,25	5,3
SASARAN					
1	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	73,85*	74,18	74,29
2	Angka Harapan Lama sekolah	Tahun	13,61*	13,85	13,93
3	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,93*	9,96	9,97
4	Pengeluaran Perkapita Masyarakat	Rupiah/Bulan	1.590.808	1.700.000	1.800.000
5	Opini BPK	Opini	WDP	WTP	WTP
6	Nilai SAKIP	Nalai/Predikat	60,12/B	62,00/B	64,00/B
7	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	N/A	73	75
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	77,59*	79,59	80,59
9	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Persen	46,54	46,54	46,62
10	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih	Persen	60,64	67,51	74,38
11	Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap	Persen	54,42	57,54	60,65
12	Rasio volume kendaraan per kapasitas jalan	Rasio	0,59	0,57	0,55
13	Persentase perumahan DP 0% untuk MBR yang terbangun	Persen	0	10	35
14	Persentase Kawasan Kumuh	Persen	52,59	47,33	28,92
15	Angka Kemiskinan	Persen	6,15	5,85	5,7
16	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,94	5,84	5,79
17	Pertumbuhan ekonomi	Angka	6	7	7,3
18	Tingkat Inflasi	Angka	5	4	3,7

No	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal	TARGET	
				2020	2021
19	Indeks Kualitas Air	Indeks	43,75	44	44,25
20	Indeks Kualitas Udara	Indeks	85	87	89
21	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	55,29	55,5	55,75
22	Persentase sampah yang dikelola	Persen	78,8	79,5	81
23	Persentase pelayanan bencana kebakaran	Persen	100	100	100
24	Persentase pelayanan bencana longsor	Persen	69,6	87	89
25	Persentase Luas genangan banjir	Persen	0,23	0,229	0,228
26	Persentase pelanggaran K3 yang tertangani	Persen	100	100	100

Tabel 6. 2
Indikator Kinerja Kunci Kota Tarakan Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD tahun 2018	Target	
				2020	2021
1	2	3	4	5	6
	I. Aspek Kesejahteraan Masyarakat				
I	**Fokus Kesejahteraan dan pemerataan Ekonomi**				
01.01	Pertumbuhan PDRB	Angka	6	7	7,3
01.02	Laju Inflasi	Angka	5	4	3,7
01.03	Indeks Gini	Indeks	0,3	0,3	0,3
01.06	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	%	93,85	94,15	94,3
01.05	Tingkat pengangguran	%	5,94	5,84	5,7
II	**Fakus Kesejahteraan Sosial**				
02.01	Angka Melek Aksara	%	99,84	100	100
02.02	Angka harapan lama sekolah	tahun	13,61	13,85	13,93
02.03	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	9,93*	9,96	9,97
02.04	Angka Partisipasi Kasar SD	%	92,05	96,65	100
02.05	Angka Partisipasi Kasar SMP	%	81,85	85,94	90,24
02.06	Angka Partisipasi Murni SD	%	85,63	87,34	89,09

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD tahun 2018	Target	
				2020	2021
02.07	Angka Partisipasi Murni SMP	%	68,38	71,8	75,39
02.08	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 KH	6	6	6
02.09	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 KH	159	150	140
02.10	Angka harapan hidup	Tahun	73,85*	74,18	74,29
02.11	Persentase balita gizi buruk	%	0,07	0,07	0,06
02.13	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,27*	76,93	77,48
III	**Fakus Seni Budaya dan Olahragal**				
03.01	Persentase kegiatan kebudayaan yang difasilitasi	%	100	100	100
03.02	Jumlah Gedung Olahraga	unit	12	13	13
	II. Aspek Palayanan Umum				
I	**Pelayanan Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar**				
A.	**Pendidikan**				
01.01	Angka Partisipasi Sekolah PAUD Usia 5-6 tahun	%	25,94	49,29	49,49
01.02	Angka Partisipasi Sekolah SD Usia 7-12	%	89,91	92,61	94,46
01.03	Angka Partisipasi Sekolah SMP Usia 13-15	%	90,15	91,05	95,6
B	**Kesehatan**				
02.01	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	79,98	100	100
02.02	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	85,94	100	100
02.03	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	81,2	100	100
02.04	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	28	100	100
02.05	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	92,6	100	100
02.06	Persentase orang usia 15 - 59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan	%	34,5	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD tahun 2018	Target	
				2020	2021
	sesuai standar				
02.07	Persentase orang usia 60 Tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	45,9	100	100
02.08	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	11,94	100	100
02.09	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	15,05	100	100
02.10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100
02.11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100
02.12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100
02.13	Rasio posyandu per satuan balita (per 1.000)	Per 1000 balita	6	6	6
02.14	Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	Per 1000 KH	6	6	6
02.15	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 1.000)	Per 1000 penduduk	0,01	0,01	0,01
02.16	Rasio dokter per satuan penduduk (per 100.000)	Per 100.000 penduduk	34	35	37
2.17	Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk (per 100.000)	Per 100.000 penduduk	11	11	11
2.18	Persentase kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	85	100	100
2.19	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100
C	**Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**				

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD tahun 2018	Target	
				2020	2021
3.1	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah Panjang Jalan	%	60,64	67,1	70,33
3.3	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	54,42	57,54	60,65
D	**Perumahan Rakyat dan Pemukiman**				
4.1	Persentase Jumlah rumah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	n/a	100	100
4.2	Persentase rumah tangga yang difasilitasi rumah layak huni yang terkena relokasi program pemerintah	%	n/a	100	100
4.3	Persentase Lingkungan pemukiman kumuh	%	00.48	00.43	00.26
4.4	Persentase permukiman layak huni	%	92	93	94
E	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**				
5.1	Persentase penyelesaian dokumen informasi rawan bencana sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	n/a	100	100
5.2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	n/a	100	100
5.3	Persentase penyelesaian dokumen rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi	%	n/a	100	100
5.4	Persentase jumlah aparatur dan warga negara dikawasan rawan bencana yang ikut pelatihan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	n/a	100	100
5.5	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam waktu tanggap	%	57,89	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD tahun 2018	Target	
				2020	2021
5.6	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran oleh Balakar dan masyarakat dalam waktu tanggap	%	57,89	100	100
F	**Sosial**				
6.1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, anak terlantar, usia lanjut terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	%	100	100	100
6.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana di Kota Tarakan	%	100	100	100
II	**Pelayanan Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar**				
A	**Tenaga Kerja**				
01.01	Tingkat Kesempatan Kerja	%	58,97	59,07	59,37
01.02	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,94	5,84	5,79
B	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				
2.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,28	92,29	92,3
2.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	51,33*	51,53	51,73
2.3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan daerah	%	52,06	52,06	52,06
2.4	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100
C	**Pangan**				
3.1.	Ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan di daerah	%	100	100	100
3.2	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Skor	86,9	88,3	89,7
D	**Pertanahan**				

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD tahun 2018	Target	
				2020	2021
4.1	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	42.86	50	51
E	**Lingkungan Hidup**				
5.1	Persentase penanganan sampah	%	88.03.00	88,5	88,7
5.2	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
F	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				
6.1	Persentase masyarakat memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	74,54	79,19	83,84
6.2	Persentase bayi memiliki Akte Kelahiran	%	91,05	91,25	93
G	**Pemberdayaan Masyarakat**				
7.1	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100
7.2	Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100
H	**Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**				
8.1	Persentase Aseptor KB aktif	%	68,5	69,1	69,7
	Persentase Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan	%	100	100	100
I	**Perhubungan**				
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	20.825	21.037	21.252
9.2	Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum	%	69,1	75,1	81,2
9.3	Persentase Pemasangan Rambu-rambu yang direncanakan	%	78,09	82,45	86,81
J	**Komunikasi dan Informatika**				
10.1	Website milik pemerintah daerah	Ada/tidak	Tidak Ada	Ada	Ada
K	**Koperasi Usaha Kecil Menengah**				
11.1	Persentase koperasi aktif	%	64	66	67
11.2	Persentase UMKM aktif	%	n/a	60	61
L	**Penanaman Modal**				

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD tahun 2018	Target	
				2020	2021
12.1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar	179,301	288	318
12.2	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (OSS)	%	100	100	100
M	**Kepemudaan dan Olahraga**				
13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	%	80	85	87
13.2	Persentase Cabor yang aktif	%	75	80	82
N	**Statistik**				
14.1	Buku "Tarakan Dalam Angka"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada
O	**Kebudayaan**				
15.1	Persentase benda, situs, kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	100	100	100
P	**Perpustakaan**				
16.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	23.254	24.570	25.240
Q	**Kearsipan**				
17.1	Persentase dokumen/arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	%	100	100	100
III	**Urusan Pilihan**				
A	**Pertanian**				
01.01	Produksi pertanian	Ton	67.995,40	70.035	70.715
01.02	Produksi peternakan (daging)	Ton	7.497,53	7.750	8.000
01.03	Produksi telur	Ton	n/a	2.801	2.802,25
01.04	Pengeringan	Ton	22.039,83	22.055	22.065
01.05	Ebi	Ton	87,29	200	215
01.06	Pembekuan	Ton	17.647,23	17.660	17.675
B	**Pariwisata**				
02.01	Kunjungan wisatawan	Orang	235.893	260.072	273.076

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD tahun 2018	Target	
				2020	2021
02.02	Lama kunjungan wisatawan	Hari	n/a	2	2
C	**Perdagangan**				
03.01	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	21,17*	21,22	21,27
D	**Perindustrian**				
04.01	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	12,68*	12,78	12,88
04.02	Persentase pertumbuhan usaha kecil dan menengah	%	6	10	11
IV	**Urusan Penunjang**				
01.01	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada
01.02	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada
01.03	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada
01.04	Persentase Konsistensi RPJMD dengan RKPD	%	100	100	100
01.05	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda	Opini	WDP	WTP	WTP
	III. Aspek Daya Saing				
I	**Kemampuan Ekonomi Daerah**				
01.01	Pertumbuhan ekonomi	%	6	7	7,3
01.02	Pengeluaran konsumsi per kapita	Rp	1.590.808	1.700.000	1.800.000
II	**Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**				
02.01	Persentase Jalan kondisi baik	%	54,42	57,54	60,65
02.02	Jumlah bank	Unit	35	35	36
02.03	Jumlah restoran	Unit	11	12	13
02.04	Jumlah penginapan/hotel/ guest house	Unit	44	45	46
02.05	Persentase RT dengan akses air bersih	%	60,64	67,1	70,33
III	**SDM**				
03.01	IPM	Indeks	75,27*	76,93	77,48

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD tahun 2018	Target	
				2020	2021
03.02	Rasio ketergantungan (dependency ratio)	%	31,94	31,74	31,54

PENUTUP

7

BAB VII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 memiliki makna strategis dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD Kota Tarakan 2019-2024. Selain itu sebagai wujud integrasi dan sinkronisasi pembangunan daerah dan nasional, perumusan RKPD Kota Tarakan Tahun 2021 telah memperhatikan, menyinkronkan, dan mengimplementasikan kebijakan nasional berupa agenda prioritas nasional tahun 2021 serta prioritas Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021. Untuk itu RKPD Tahun 2021 harus menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan Kota Tarakan tahun 2021. Seluruh pemangku kepentingan khususnya penyelenggaran pemerintah daerah wajib memedomani setiap kebijakan yang dirumuskan dalam RKPD Tahun 2021, terutama program dan kegiatan untuk OPD/Instansi terkait, agar memberikan sumbangsih positif dalam pencapaian target pembangunan daerah baik tahunan maupun lima tahunan.

Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan RKPD 2021 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subyek pelaksana pembangunan lainnya, antara lain:

1. RKPDKota Tarakan Tahun 2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat daerah Kota Tarakan Tahun 2021. Seluruh OPD/Instansi di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan, utamanya program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021

tanpa terkecuali dengan tetap menjaga konsistensi, integrasi, dan sinergitas dalam penuntasan seluruh program dan kegiatan pembangunan jangka menengah periode tahun 2019-2024.

2. RKPD tahun 2021 menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2021 serta Rancangan APBD tahun 2021.
3. Setiap OPD/ Instansi harus membuat Rencana Kerja (Renja) yang dapat menggambarkan keterkaitan program dan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2021 sesuai dengan sumber anggaran (APBD, APBN/ sumber dana lainnya) dalam rangka menjaga sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas pelaksanaan setiap kebijakan maupun program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Tarakan.
4. Setiap OPD/ Instansi wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di RKPD Kota Tarakan Tahun 2021 melalui upaya evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Upaya pengendalian dan pengawasan ini akan mampu mengakselerasi dan mengoptimalkan capaian positif kinerja pembangunan daerah.
5. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif dalam pembangunan, baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Tarakan.
6. Wali Kota, melalui Bappeda Kota Tarakan, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada setiap perangkat daerah Kota Tarakan secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2021.
7. Setiap kepala OPD/Instansi pada akhir tahun 2021 wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja

Perangkat Daerah Tahun 2021 setiap Triwulan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Bappeda.

8. Kepala Bappeda melakukan evaluasi hasil RKPD Tahun 2021 dan melaporkannya kepada Wali Kota setiap Triwulan berdasarkan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021, dan hasil evaluasi tahunan tersebut akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2021. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen hingga masa pelaksanaannya. Selama realisasi pelaksanaan RKPD Kota Tarakan tahun 2021, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kota Tarakan.

WALI KOTA TARAKAN,

dr. H. KHAIRUL, M.Kes.

LAMPIRAN

TABEL 5.1
PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
	TOTAL BELANJA			**690,072,848,151**	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
	BELANJA LANGSUNG			**690,072,848,151**	
1	**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**			**80,732,503,309**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
	Belanja Tidak Langsung				
	Belanja Langsung			**80,732,503,309**	
1.	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran**	**100**	**31,154,953,309**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai, benda- benda pos dan biaya pengiriman dokumen	12 bulan	1,577,625	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 bulan	309,942,855	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kendaraan dinas/operasional	PKB Roda 2 (57 unit), Roda 4 (11 unit), Bus (2 unit)	30,000,000	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah ASN/Non ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	12 bulan	700,000,000	
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	180,000,000	
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	12 unit barang	17,000,000	
7	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	12 bulan	70,000,000	
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penggandaan dan barang cetakan yang tersedia	12 bulan	28,000,000	
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 bulan	5,000,000	
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6 unit	40,000,000	
11	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan Makan Minum Tamu	12 bulan	10,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
12	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10 OP	50,000,000	
13	Pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Jumlah pembayaran honorarium PNS dan Non PNS, pihak ke tiga, gaji honor, insentif PNS dan Non PNS	12 bulan	28,713,432,829	
14	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS	Jumlah Pegawai non PNS yang menerima jasa jaminan kesehatan	1000 orang	1,000,000,000	
2.	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**593,000,000**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah penyediaan perlengkapan UPT Balai Adat	2 Paket	150,000,000	
2	Pengadaan mebeleur	Jumlah set meja kursi yang diadakan	12 unit	10,000,000	
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor Disdikbud Kota Tarakan	1 keg	100,000,000	
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan Gedung UPT Balai Adat	3 paket	100,000,000	
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah BBM Solar/Minyak Pelumas yang diadakan	4 unit Bus 12 bulan	148,000,000	
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Suku cadang / Service 4 unit bus yang diadakan	12 bulan	60,000,000	
7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan Kantor yang dipelihara	1 tahun	25,000,000	
3	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Persentase ASN yang disiplin**	**100**	**352,500,000**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100 stel	352,500,000	
4	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu**	**100**	**7,500,000**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja	15 dokumen	5,000,000	
2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan	1 dokumen	2,500,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
5	**Program pendidikan anak usia dini**	**APM PAUD**	**26.94**	**230,000,000**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	Pembangunan sarana dan prasarana bermain	Pengadaan Kelengkapan Taman Bermain TK Pembina 3 (Paving)	1 paket	0	
2	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Jumlah tenaga Guru PAUD yang mendapat pelatihan	60 orang	150,000,000	
3	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 OP	50,000,000	
4	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	Jumlah koordinasi kerjasama bidang PAUD	3 koordinasi	30,000,000	
6	**Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun**	**APK/APM SD/MI**	**90.63**	**44,684,550,000**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
		APK/APM SMP/Mts	**73.38**		
1	Pembangunan gedung sekolah	Pembuatan pintu semua ruang kelas	12 buah	20,000,000	
2	Pembangunan gedung sekolah	pembangunan gedung sekolah SDN 035	1 unit	0	
3	Pembangunan gedung sekolah	Pembangunan Gedung SMP 9 Tarakan	6 Lantai	0	
4	Pembangunan gedung sekolah	Panggung kegiatan siswa SD Al Irsyad	1 paket	0	
5	Pembangunan gedung sekolah	Pemasangan paving lapangan SD Al Irsyad	168 m2	0	
6	Pembangunan gedung sekolah	Pembangunan Musholla dan Ruang Pertemuan SMP Negeri 2 Tarakan	1 Paket	0	
7	Pembangunan gedung sekolah	Pembuatan WC 3 Pintu SDN 011 Tarakan	3 Pintu Wc	25,000,000	
8	Pembangunan gedung sekolah	Pembuatan Pagar Samping Kanan SDN 011 Tarakan	25 Meter	0	
9	Pembangunan gedung sekolah	jumlah gedung sekolah yang di bangun	3 sekolah	25,000,000,000	
10	Penambahan ruang kelas sekolah	Pembangunan kelanjutan ruang kelas baru	3 Ruang kelas	0	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
11	Penambahan ruang kelas sekolah	penambahan ruang kelas SDN 019 Tarakan	1 paket	0	
12	Penambahan ruang kelas sekolah	Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap Ke2 SDN 043	56 m x 10 m x 3Lantai	0	
13	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Perbaikan Sarana Olahraga Lapangan Sepak Bola SMPN 8 Tarakan	1 Kegiatan	0	
14	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	REHAB PAGAR DAN HALAMAN DEPAN SEKOLAH TK PEMBINA	1 PAKET	0	
15	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Renovasi drainase dan perbaikan paving halaman sekolah	Meningkatnya kualitas drainase dan halaman parkir	0	
16	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Pembuatan Green House dan Hidrponik Program Adiwiyata SMP Negeri 2 Tarakan	2 Unit	0	
17	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Pematangan Lahan SDN 043	34 m x 43 m x 1,5 m	0	
18	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	REHAB MCK SEKOLAH	1 PAKET	0	
19	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	PEMBUATAN DRAINASE DI LINGKUNGAN SEKOLAH	15 M X 1 M	0	
20	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Tempat Penampungan air SMPN 12 Tarakan	1 paket	10,000,000	
21	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	pembangunan toilet siswa dan guru	4 buah	0	
22	Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa	Kit IPA	1 Set	0	
23	Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa	Pengadaan LCD Proyektor	12 unit	0	
24	Pengadaan mebeluer sekolah	Pengadaan Kursi dan Meja SDN 042	200	170,000,000	
25	Pengadaan mebeluer sekolah	Pengadaan Kursi Siswa (3 kelas) Pengadaan Meja Guru & meja satpam	84 bh 7 bh	0	
26	Pengadaan mebeluer sekolah	Pengadaan kursi guru chitose	25 buah	0	
27	Pengadaan mebeluer sekolah	Pengadaan Laptop	10 Unit	0	
28	Pengadaan mebeluer sekolah	Pengadaan meja dan kursi siswa	60 buah	0	
29	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	Jumlah pemeliharaan bangunan sekolah	10 pintu ruang kelas	0	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
30	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	PEMASANGAN PLAT DEKER DRAINASE DEPAN SEKOLAH	63,05 M X 1 M	0	
31	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	PERBAIKAN GERBANG SEKOLAH	1 PAKET	0	
32	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Rehab aula SMPN 5	1	0	
33	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Mushollah SDN 012	1	0	
34	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Rehap Pagar SEkolah SDN 043	250 m x 2 m	0	
35	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	renovasi pagar sekolah SDN 019 Tarakan	1 paket	50,000,000	
36	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Pengecatan gedung sekolah SDN 019 Tarakan	1 paket	0	
37	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Pengecatan gedung sekolah SDN 003 Tarakan	1 paket	0	
38	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah siswa yang megikuti lomba O2SN	50 siswa	200,000,000	
39	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Lomba Penelitian Siswa Nasional (LPSN)	50 siswa	50,000,000	
40	Penyelenggaraan ujian akhir sekolah SD/MI	Jumlah sekolah yang mengikuti ujian sekolah dan nasional tingkat SD/MI, SMP/MTs	95 Sekolah	383,250,000	
41	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Jumlah sekolah Negeri yang mendapatkan dana BOP	65 sekolah	15,273,500,000	
42	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa dan tenaga pendidik dibidang olahraga, seni dan budaya	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Gala Siswa Indonesia (GSI)	75 siswa	262,500,000	
43	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa dan tenaga pendidik dibidang olahraga, seni dan budaya	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)	75 siswa	157,500,000	
44	Pelaksanaan pendidikan berwawasan kesehatan dan lingkungan	Jumlah sekolah yang melaksanakan usaha kesehatan sekolah (UKS)	100 sekolah negeri/swasta jenjang PAUD/TK/RA/ SD/MI/SMP/MTs	50,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
45	Penyediaan beasiswa prestasi	Jumlah Siswa yang mendapat Beasiswa Prestasi Siswa	3852 orang untuk 2 jenjang	2,032,800,000	
46	Penyediaan beasiswa transisi	Jumlah Siswa yang mendapat Beasiswa Siswa tidak mampu	1000 siswa	1,000,000,000	
7	**Program pendidikan non formal**	**Persentase siswa yang mengikuti pendidikan kesetaraan**	**98.34**	**470,000,000**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	Jumlah tenaga pendidik non formal yang mengikuti pelatihan	50 orang tenaga pendidik non formal	120,000,000	
2	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat, pelatihan, Bimtek dan Sosialisasi di luar daerah	1 keg	250,000,000	
3	Penyelenggaraan ujian pendidikan non formal	Jumlah siswa yang mengikuti Ujian Nasional Berbasis Sekolah (UASBN) Paket A dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Paket A, B dan C	650 warga belajar	100,000,000	
8	**Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan**	**Persentase pendidik yang berkualifikasi S-1/D-4**	**93**	**600,000,000**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Pelatihan Budidaya Tanaman Hidroponik SMP Negeri 2 Tarakan	1 Kegiatan	0	
2	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah Kepala sekolah yang mengikuti pelatihan (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Kepala SD/SMP)	46 Kepala Sekolah	400,000,000	
3	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Pemetaan, Analisis dan Pengembangan Sekolah Mutu Pendidikan	94 Sekolah	50,000,000	
4	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Jumlah angka kredit fungsional guru	2 tahap	150,000,000	
9	**Program manajemen pelayanan pendidikan**	**Persentase Sekolah yang menerapkan PPDB berbasis IT**	**100**	**360,000,000**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
1	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Persentase Sekolah yang menerapkan PPDB Online	59 sekolah	360,000,000	
10	**Program pengembangan nilai budaya**	**Persentase adat budaya daerah yang dilestarikan**	**100**	**180,000,000**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	jumlah gedung balai adat yang dilestarikan	12 bulan	50,000,000	
2	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah Tenaga Bidang Kesejarahan yang ditingkatkan kompetensinya	10 orang (peningkatan kompetensi tenaga bidang kesejahteraan)	50,000,000	
3	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Jumlah seniman yang difasilitasi dalam program Gerakan Seniman masuk sekolah	21 orang	80,000,000	
11	**Program pengelolaan kekayaan budaya**	**Persentase kekayaan budaya yang dikelola dengan baik**	**100**	**225,000,000**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	jumlah sanggar seni budaya yang aktif	1 event	0	
2	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	jumlah museum yang terpelihara	12 bulan	100,000,000	
3	Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Jumlah Tenaga Bidang Kesejarahan yang ditingkatkan kompetensinya	50 orang	50,000,000	
4	Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	1 paket	75,000,000	
12	**Program pengelolaan keragaman budaya**	**Persentase pagelaran seni budaya yang diikuti**	**100**	**1,875,000,000**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah kegiatan seni rupa yang dipamerkan	12 Karya seni	0	
2	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah penyelenggaraan festival yang diadakan	6 kegiatan	125,000,000	
3	Iraw tengkayu dan pesta rakyat Kota Tarakan	Jumlah kegiatan seni budaya daerah yang diselenggarakan	1 event budaya	1,600,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
4	Partisipasi event seni budaya nasional dan internasional	Jumlah kegiatan seni budaya yang diikuti	2 tim penari	150,000,000	
2	**KESEHATAN**			**31,908,050,585**	**Dinas Kesehatan**
	Belanja Tidak Langsung				
	Belanja Langsung			**31,908,050,585**	
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100**	**7,191,413,221**	**Dinas Kesehatan**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan jumlah paket pengiriman yang tersedia	Matrai (295 lembar), Pranko (50 lembar) dan Paket Pengiriman (50 paket)	8,181,600	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan pembayaran jasa komunikasi sumber daya air, dan listrik di Dinas Kesehatan dan UPT	12 bulan	1,052,982,386	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajak kendaraannya terbayarkan	40 unit	35,342,160	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	30 orang	220,806,000	
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat kebersihan, bahan pembersih dan jasa kebersihan kantor yang tersedia	2675 jenis peralatan dan 36 tenaga	600,452,596	
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	100 unit	50,000,000	
7	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	1575 Jenis	78,484,664	
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100 jenis cetakan; 40953 Lembar	18,887,700	
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah peralatan dan komponen listrik yang tersedia	61 jenis	4,846,115	
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	26 unit	100,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
11	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan ruamh tangga yang tersedia	0	0	
12	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	0	0	
13	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	5 Kegiatan	50,000,000	
14	Pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Jumlah tenaga pendukung penyelenggaraan adminsitrasi pemerintahan yang tersedia	164 orang	4,696,430,000	
15	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS	Jumlah tenaga kontrak yang mendapatkan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan	164 orang	275,000,000	
2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**527,313,750**	**Dinas Kesehatan**
1	Pembangunan rumah dinas	Jumlah pembangunan rumah dinas	0	0	
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan kanopi parkir motor	1 paket	100,000,000	
3	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan meubelair	0	0	
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pembelian BBM kendaraan dan pemeliharaan kendaraan	37560 Liter dan 32 unit kendaraan	395,813,750	
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	51 Jenis	31,500,000	
6	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	0	0	
3	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**			**87,000,000**	**Dinas Kesehatan**
1	Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	290 Stell	87,000,000	
4	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat dan Bimtek**	**0**	**-**	**Dinas Kesehatan**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0		
2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	0		
3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0		
4	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	0		
5	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu**	**100**	**5,000,000**	**Dinas Kesehatan**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja	1 Dokumen	5,000,000	
6	**Program obat dan perbekalan kesehatan**	**Persentase pemenuhan ketersediaan dan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan**	**100**	**594,700,000**	**Dinas Kesehatan**
1	Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan	Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan	100%	594,700,000	
7	**Program upaya kesehatan masyarakat**	**Persentase Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan yang dilaksanakan**	**100**	**13,895,835,614**	**Dinas Kesehatan**
1	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	Jumlah UPT yang melaksanakan kalibrasi, maintenance dan perbaikan alat kesehatan	7 UPT	300,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
2	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	Jumlah calon jamaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji	200 Orang	34,000,000	
3	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	Jumlah kelurahan yang mengalami KLB dilakukan PE < 24 jam	6 Kelurahan	380,000,000	
		Jumlah Kegiatan Surveilans Epidemiologi	240 Kegiatan		
4	Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	Jumlah UPT yang tersedia alat kesehatan dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan	0	0	
5	Peningkatan kesehatan masyarakat	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	400,000,000	
		Jumlah pelayanan UKM yang dilaksanakan oleh puskesmas	3 Pelayanan		
		Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar level 1	6 Puskesmas		
		Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan olahraga	6 Puskesmas		
		Jumlah Lembaga Kesehatan non Pemerintah yang mendapatkan bantuan	1 Lembaga		
		Jumlah Puskesmas yang melakukan pendataan dan input data PISPK	6 Puskesmas		
6	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Jumlah petugas layanan kegawatdaruratan yang mendapatkan pengetahuan BHD	30 Orang	228,290,000	
7	penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	Jumlah UPT yang dilayani dalam pelaksanaan penyimpanan, penerimaan dan pendistribusian obat vaksin	7 UPT	50,000,000	
8	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	Jumlah TTU, DAM dan sampel rumah dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan	4137 Lokasi	50,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
		Jumlah TPM dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan	1776 TPM		
9	Pembinaan dan fasilitasi pelayanan Posyandu	Jumlah kader posyandu yang dibina	915 Kader	1,647,000,000	
10	Pelayanan kesehatan masyarakat di Mamburungan	Nilai indeks kepuasan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Mamburungan	75	825,598,034	
11	Pelayanan kesehatan masyarakat di Juata Permai	Nilai indeks kepuasan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Juata	75	1,312,203,795	
12	Pelayanan kesehatan masyarakat di Gunung Lingkas	Nilai indeks kepuasan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Gunung Lingkas	75	1,879,000,000	
13	Pelayanan Kesehatan masyarakat di Pantai Amal	Nilai indeks kepuasan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Pantai Amal	75	277,960,835	
14	Pelayanan kesehatan masyarakat di Karang Rejo	Nilai indeks kepuasan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Karang Rejo	75	4,678,777,623	
15	Pelayanan kesehatan masyarakat di Sebengkok	Nilai indeks kepuasan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Sebengkok	75	783,005,327	
16	Operasional laboratorium kesehatan daerah	Jumlah sampel yang dilakukan pemeriksaan (kesmas dan klinik) laboratorium kesehatan	immunologi 1.100 patologi 21.000 mikrobiologi 7.500 kimia 1.700 narkoba 1.200	100,000,000	
17	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	Persentase orang usia produktif (15-59 tahun) yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	200,000,000	
		Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	200,000,000	
		Persentase penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	400,000,000	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	50,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
		Jumlah posbindu PTM yang melakukan posbindu PTM	20 Kelurahan	100,000,000	
8	**Program pengawasan obat dan makanan**	**Persentase cakupan kegiatan pengawasan obat dan makanan**	**100**	**105,000,000**	**Dinas Kesehatan**
1	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	Jumlah masyarakat dan pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi tentang obat dan makanan	200 Orang	50,000,000	
2	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Jumlah pengelola IRTP yang mendapatkan SPP-IRTP	160 IRTP	55,000,000	
3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan kefarmasian, alkes dan PKRT	0	0	
9	**Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat**	**Cakupan rumah tangga ber-PHBS**	**65%**	**200,000,000**	**Dinas Kesehatan**
1	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan informasi sadar hidup sehat	260.000 Jiwa	100,000,000	
2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat (pencegahan penyakit, germas, lomba posyandu, lomba phbs)	260.000 Jiwa	100,000,000	
3	Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan	Jumlah sarana kesehatan sesuai standar (posyandu dan UKS)	0	0	
4	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	Jumlah kader kesehatan yang meningkat pengetahuannya tentang kesehatan	0	0	
10	**Program perbaikan gizi masyarakat**	**Persentase Peningkatan cakupan gizi perbaikan gizi masyarakat**	**100**	**225,000,000**	**Dinas Kesehatan**
1	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	Jumlah dokumen peta informasi masyarakat kurang gizi	1 Dokumen	75,000,000	
2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah bayi, balita, remaja, dan ibu hamil yang mendapatkan tambahan makanan dan vitamin	33.000 Orang	150,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
3	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Jumlah masyarakat rentan yang sadar gizi	0	0	
11	**Program pengembangan lingkungan sehat**	**Persentase terlaksananya lingkungan sehat**	**100**	**-**	**Dinas Kesehatan**
1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Persentase rumah yang dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan	30%	0	
12	**Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular**	**Cakupan desa/Kelurahan KLB yg dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam**	**100**	**460,840,000**	**Dinas Kesehatan**
1	Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk	Jumlah titik fogging fokus	90 Fokus	135,840,000	
2	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100,000,000	
		Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100,000,000	
		Persentase orang penderita malaria mendapatkan pelayanan malaria sesuai standar	100%	50,000,000	
		Persentase orang penderita kusta mendapatkan pelayanan kusta sesuai standar	100%	50,000,000	
3	Peningkatan Imunisasi	Jumlah bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap	4.600 jiwa	25,000,000	
13	**Program standarisasi pelayanan kesehatan**	**Persentase Puskesmas yang terakreditasi**	**100**	**220,000,000**	**Dinas Kesehatan**
1	Penyusunan standar kesehatan	Jumlah UPT yang diakreditasi	0	0	
2	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahatan	Jumlah UPT yang menerapkan BLUD	4 UPT	200,000,000	
		Jumlah puskesmas yang dilakukan penilaian performance puskesmas berprestasi	6 Puskesmas	20,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
3	Pengembangan sistem dan layanan informasi kesehatan terpadu	Jumlah platform sistem informasi kesehatan yang dikembangkan	0	0	
4	Regulasi dan manajemen mutu pelayanan kesehatan	Jumlah dokumen regulasi dan mutu pelayanan yang diimplementasikan	0	0	
14	**Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya**	**Persentase sarana prasaarana Puskesmas yang layak**	**100**	**500,000,000**	**Dinas Kesehatan**
1	Pembangunan puskesmas pembantu	Jumlah puskesmas pembantu yang dibangun sesuai standar	0	0	
2	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas	Jumlah puskesmas yang direhabilitasi sesuai dengan standar	1 Unit	300,000,000	
3	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu	1 Unit	200,000,000	
15	**Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan**	**Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan Kesehatan**	**100**	**7,495,948,000**	**Dinas Kesehatan**
1	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Jumlah penduduk miskin yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	29.998 Jiwa	7,395,948,000	
		Jumlah masyarakan miskin yang mendapatkan bantuan berobat rujukan	100 Orang		
2	kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	Jumlah dokumen kerjasama yang disepakati	5 Dokumen	100,000,000	
16	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**	**Persentase bayi dan balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar**	**100**	**100,000,000**	**Dinas Kesehatan**
1	Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase kunjungan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	100,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
17	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**	**Cakupan kunjungan lansia**	**7%**	**100,000,000**	**Dinas Kesehatan**
1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Persentase kunjungan warga negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100,000,000	
18	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**	**Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes yang berkompeten**	**90%**	**200,000,000**	**Dinas Kesehatan**
1	Pelayanan kesehatan dan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	200,000,000	
3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**341,721,691,307**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**
	Belanja Tidak Langsung				
	Belanja Langsung			**341,721,691,307**	
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100**	**12,169,023,200**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai	117 lembar	1,185,750	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 Bulan	9,356,748,084	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang pajak kendaraannya	40 Unit	39,596,760	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	13 Orang	186,096,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia Jumlah tenaga kebersihan	22 Jenis	18,861,938	
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang tersedia	36 Jenis	85,869,861	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Jumlah barang penggandaan	37500 Lembar, 2 jenis	61,622,503	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	6 Jenis	11,550,000	
9	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	3 Orang	44,322,400	
10	Pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Jumlah tenaga pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	111 Orang	2,237,169,904	
11	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS	Jumlah orang (non PNS) yang mendapatkan jaminan pemeliharaan	102 Orang	126,000,000	
2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**1,028,295,085**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**
1	Pembangunan gedung kantor	Pembangunan Kantor Kelurahan Karang Anyar	1		
2	Pembangunan gedung kantor	Pembangunan Kantor Kelurahan Gunung Lingkas	1		
3	Pembangunan gedung kantor	Pembangunan Kantor Kelurahan Juata Laut	1		
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan Jenis kendaraan operasional yang dipelihara (Unit)	22 Unit, 43.108 liter	978,295,085	
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	2 jenis, 10 Unit	50,000,000	
3	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Persentase ASN yang disiplin**	**100**	**-**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	pakaian waskat	110 orang	0	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
4	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu**	**100**		**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang akurat	2 Dokumen		
5	**Program pembangunan jalan dan jembatan**	**Rasio Panjang Jalan Perluas wilayah (km/km2)**	**1,121**	**-**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**
1	Pembangunan jalan	Panjang Jalan (Km)	0,26 Km	0	
2	Pembangunan jalan	Pembangunan Jalan	0.2	0	
3	Pembangunan jembatan	Pembangunan Jembatan Pasir Putih RT.45 Karang Anyar	1		
6	**Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong**	**Jumlah saluran yang terbangun dan terpelihara**	**10**	**1,000,000,000**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**
1	Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase	Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase se-Kota Tarakan (Swakelola)	10 titik	1,000,000,000	
2	Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase	Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase	4 Wilayah		
7	**Program pembangunan turap/talud/brojong**	**Persentase Lokasi yang akan Dibangun Turap/Talud/Bronjong**	**100**	**560,000,000**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**
1	Perencanaan turap/talud/brojong	Perencanaan Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	1 Dokumen		
2	Pembangunan turap/talud/bronjong	Pembangunan Turap/ Talud/Bronjong	2 Titik	560,000,000	
8	**Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan**	**Persentase jalan yang terpelihara**	**10**	**2,000,000,000**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**
1	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Ruas jalan yang terpelihara	10 Ruas	2,000,000,000	
2	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	10 lokasi		
3	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan	Sekota tarakan		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
9	**Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan**	**Prosentase titik LPJU yang berfungsi baik**	**100**	**5,750,000,000**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**
1	Pengadaan alat-alat berat	Pengadaan Excavator PC 130	1 Unit		
2	Pengadaan alat-alat berat	Pengadaan Excavator PC 45	1 Unit		
3	Pengadaan alat-alat berat	Tandem rollers	1 Unit		
4	Pengadaan alat-alat berat	Trailler Nissan	1 Unit		
5	Pengadaan alat-alat berat	Motor Grader	1 Unit		
6	Pengadaan alat-alat berat	Pengadaan Cutting Will	1 Unit		
7	Pengadaan alat-alat berat	Pengadaan Bomg BW FH	1 Unit		
8	Perawatan lampu penerangan jalan umum	Perawatan Lampu Penerangan Jalan Umum	31.42%	500,000,000	
9	Perawatan lampu penerangan jalan umum	1. Perencanaan Lampu Retrofit dan Pembuatan Database LPJU	1 dok		
10	Perawatan lampu penerangan jalan umum	2. Pemeliharaan LPJU Se- Kota Tara	1 tahun		
11	Perawatan lampu penerangan jalan umum	3. pengadaan kendaran operasional untuk perawatan LPJU	1 unit		
12	Perawatan lampu penerangan jalan umum	4. pengadaan material perawatan LPJU	1 ls		
13	Pemasangan KWH meter LPJU	Pemasangan Kwh Meter LPJU	1 Kwh		
14	Pemasangan KWH meter LPJU	Pemasangan Kwh Meter Se Kota Tarakan (MY)	71 Kwh	2,500,000,000	
15	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan Lampu Led Median Jalan (MY)	10 lampu LED, 12 titik PJU,	1,000,000,000	
16	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PENERANGAN JALAN UMUM (SOLAR CELL). Jl Belalung RT. 01 Kel Juata Permai	30 TITIK	50,000,000	
17	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PENERANGAN JALAN UMUM (SOLAR CELL)	3 TITIK LAMPU		
18	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PENERANGAN JALAN UMUM (SOLAR CELL)	10 TITIK LAMPU		
19	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Lampu Penerangan	10 unit		
20	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PEMASANGAN LAMPU JALAN PRIORITAS 3	PENERANGAN LINGKUNGAN SEKITAR		
21	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pengadaan Tiang Listrik dan Lampu RT. 01	5 Titik		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
22	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	2 tiang + kwh, 1 tanpa tiang. Kel. Kr. Anyar RT.1	3 titik	25,000,000	
23	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pengadaan Lampu Jalan. RT 1. Kel. Juata Kerikil	4 Titik Gang Swadaya dan 3 Titik Gang Sulawesi	50,000,000	
24	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pengadaan Tiang Listrik	5 Tiang		
25	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan Lingkungan	Penggantian Balon Lampu 3 Buah dan Penggantian tiang Listrik		
26	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PENERANGAN JALAN	2 TITIK		
27	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PENERANGAN JALAN	2 TITIK		
28	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan jalan lingkungan GG.Lopulalang	5 Titik		
29	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PENERANGAN JALAN	2 TITIK		
30	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PENERANGAN JALAN	1 TITIK		
31	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PENERANGAN JALAN UMUM (PJU). Jl. Sei Bengawan Kel Juata Permai RT.2	4 TITIK	50,000,000	
32	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)	4 TITIK		
33	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)	4 TITIK		
34	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Lampu Jalan. Kel. Juata Laut RT.2	3 Titik	50,000,000	
35	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan jalan	3 titik		
36	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PENERANGAN JALAN	1 UNIT		
37	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PEMASANGAN TIANG DAN LAMPU JALAN PRIORITAS 2	4 UNIT		
38	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PEMASANGAN LAMPU JALAN	4 TITIK		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Keterangan
		Keluaran Kegiatan			Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
39	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PENERANGAN JALAN	Tiang : 20 bh Kabel 400 M Lampu LED 20 Bh (50 Watt)		
40	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Perbaikan Penerangan lampu Penerangan RT. 05	10 Titik		
41	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pengadaan Tiang Listrik dan Lampu RT. 05	18 Titik		
42	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pengadaan Lampu Solar Cell di Agathis RT. 05	5 Titik		
43	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PERMINTAAN PENERANGAN JALAN UMUM	4 TITIK		
44	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Lampu Jalan	9 Titik		
45	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan jalan	3 titik		
46	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PENERANGAN JALAN	2 TITIK		
47	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	TIANG LAMPU JALAN	30 Buah		
48	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PEMASANGAN LAMPU JALAN PRIORITAS 3	4 BUAH LAMPU		
49	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PEMASANGAN TIANG DAN LAMPU JALAN UMUM PRIORITAS 4	2 UNIT		
50	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan (Tiang Sudah Ada) Jl. KH.Dewantara RT.06	3 Titik		
51	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PENERANGAN LAMPU JALAN	3 TITIK		
52	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Lampu Jalan	4 Titik		
53	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan jalan	3 titik		
54	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PENERANGAN JALAN	3 UNIT		
55	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan Umum Gang Jagung	4 Titik		
56	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan jalan Umum Gang Rambutan	4 Titik		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
57	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan Umum Gang Terong RT. 08	5 Titik		
58	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PENERANGAN JALAN	3 TITIK		
59	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Perbaikan Lampu Jalan RT. 09	6 Buah		
60	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penambahan 2 Tiang Listrik RT. 09	2 Tiang		
61	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PENERANGAN JALAN	6 TITIK		
62	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Gang Jati, Jl. Melati, Jl. aanggrek.Jl. Inbaya Taka	19 Titik		
63	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PENERANGAN JALAN	12 TITIK		
64	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PEMASANGAN LAMPU JALAN	5 TITIK		
65	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PEMASANGAN LAMPU JALAN (SOLAR CELL)	10 TITIK		
66	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PEMASANGAN TIANG DAN LAMPU JALAN PRIORITAS 1. Jl. Gn. Latimojong Rt. 12 Kel. Kp. Enam	5 UNIT	50,000,000	
67	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan	8 Pcs		
68	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PJU	2 Titik		
69	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PENERANGAN JALAN	3 TITIK		
70	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PENERANGAN JALAN	3 TITIK		
71	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PENERANGAN JALAN	1 TITIK		
72	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PENERANGAN JALAN	3 TITIK		
73	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PENERANGAN JALAN	3 TITIK		
74	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PENERANGAN JALAN	1 TITIK		
75	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PENERANGAN JALAN	1 TITIK		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
76	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan jalan	3 titik		
77	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PENERANGAN JALAN	3 TITIK		
78	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan lampu jalan	2 Unit		
79	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan. Jl. Jembatan Putih Kel. Juata Laut. RT.13	2 Titik	10,000,000	
80	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PENERANGAN LAMPU GANG Perum Pemkot Kel Kp. Satu RT.13	40 UNIT	50,000,000	
81	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan jalan belakang titi limiyanto dan ditempat made	2 Titik		
82	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PEMASANGAN LISTRIK JALAN	3 TITIK		
83	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan dekat SD Don Bosco	1 Titik		
84	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PEMASANGAN TIANG DAN LAMPU JALAN PRIORITAS 2	2 UNIT		
85	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan	1 Titik		
86	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PJU	1 Titik		
87	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PENERANGAN JALAN	8 TIANG		
88	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan Penerangan Lampu Jalan/Lingkungan Warga	6 Unit		
89	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan jalan	3 titik		
90	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PENERANGAN JALAN	2 TITIK		
91	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PENERANGAN JALAN	2 TITIK		
92	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PENERANGAN JALAN	3 TITIK		
93	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PENERANGAN LAMPU JALAN SOLAR CELL	10 TITIK		
94	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PJU	2 titik		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
95	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PENERANGAN JALAN	3 TITIK		
96	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PENERANGAN JALAN	10 TITIK		
97	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PENERANGAN JALAN	9 TITIK		
98	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penambahan lampu Jalan	12 TITIK		
99	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PJU. Dekat rumah Bp Abd.Gani, Bp Munir & Bp.Darmansyah Kel. Sebengkok. RT.5	3 titik	75,000,000	
100	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PENERANGAN JALAN	5 TITIK		
101	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan lampu PJU Jl. Seranai III (Tanjakan ke Kelurahan). Kel. Juata Permai RT 20	3 TITIK (SERING TERJADI KECELAKAAN)	50,000,000	
102	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Perbaikan PJU Jalur ke Puskesmas dan sekitaranya	20 TITIK		
103	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Lampu	2 Titik		
104	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Lampu Jalan	2 Titik		
105	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PENERANGAN JALAN. Ke pemakaman RT.20. Kel. Kampung Satu	4 UNIT	50,000,000	
106	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PEMBUATAN PJU	5 TITIK		
107	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan jalan lingkungan GG I Belakang Masjid Nur Islam	3 Titik		
108	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PENERANGAN JALAN	20 TITIK		
109	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan Lingkungan masuk gang Sekolah MBS	4 Titik		
110	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan Lingkungan dekat rumah bapak H.Amiruddin	1 Titik		
111	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan jalan lingkungan GG.kamboja,GG Anggrek,GG Mawar,GG Dahlia,samping gereja Toraja	6 Titik		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
112	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan jalan lingkungan pemasangan tiang baru GG merpati	3 Titik		
113	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	penggantian bola lampu dijalan arah GG merpati	3 Titik		
114	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Lampu Jalan	5 Tiang		
115	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PENGADAN LAMPU JALAN	15 TITIK		
116	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan	5 Titik		
117	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan Umum RT. 07	10 Titik		
118	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Sebelah Bengkel Kilat Gg.Masuk Belakang SMP 2 dan SMA I RT.07	4 Titik		
119	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pengadaan Tiang Penerangan Jalan (PJU)	3 Titik		
120	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Lampu penerang jalan umum	7 Titik Tiang		
121	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Perbaikan/Pemasangan Lampu Jalan GG Oval 1,3,4 dan 5	15 titik		
122	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penggantian Bola Lampu Penerangan Jalan Lingkungan	3 Titik		
123	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan jalan di jl.singosari dan jl.ronggolawe	4 titik		
124	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Gn. Daeng	3 titik		
125	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan jalan pertigaan Lap.P. Batur, belakang tribun dan jalan antara Mess Tamtama dan Bintara	3 Titik		
126	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PENERANGAN JALAN UMUM Jl. Angsa Rawa RT.17 Kel. Juata Permai	23 TITIK	50,000,000	
127	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan. RT.17 Kel. Juata Laut	10 Titik	50,000,000	
128	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Lampu Penerang Jalan. Kel. Kr. Anyar Pantai RT.2 gang tenggiri	5 Titik	50,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
129	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Lampu Penerang Jalan Sulawesi dan Jalan Pattimura	2 Titik		
130	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan Lingkungan	1 Titik		
131	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU	1 titik		
132	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PJU	5 Titik		
133	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Bolam Lampu di GG 3,GG 6, dan Kuburan Jepang	4 Titik		
134	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU	3 titik		
135	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Lampu Penerangan jalan GG Sukadi	2 Titik		
136	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PJU	4 titik		
137	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan GG Rajawali dan GG Merpati	3 titik		
138	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PJU	10 Titik		
139	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan / Penambahan Baru PJU	1 Titik		
140	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan Baru dan Penggantian Lampu. Jalan Kusuma Bangsa RT 27 Kel. Pamusian	2 Titik	10,000,000	
141	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PJU	5 titik		
142	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Lampu Penerangan Jalan Sukarlamfani	4 Titik		
143	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan Umum RT 30	23 titik		
144	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PJU	5 titik		
145	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan baru LPJU	1 Titik		
146	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	penerangan jalan menuju rusunawa	4 Titik		
147	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PJU	3 titik		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
148	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Lampu Jalan. RT 10 Kel. Juata Laut	10 Unit	10,000,000	
149	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan Umum (PJU)	3 Titik		
150	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PJU	1 titik tiang		
151	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PJU	1 titik tiang		
152	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PJU	1 titik tiang		
153	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PJU Belakang rumah Bidan Rahmi, Depan rumah Arhansyah Noer, Bayu dan Suardan. RT.31 Kel. Sebengkok	4 titik	100,000,000	
154	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PJU	1 titik		
155	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PJU	4 titik		
156	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PJU	3 titik		
157	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PJU	5 titik		
158	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan jalan	3 titik		
159	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Tiang lampu permanen pada setiap rumah atau tiap KK	120 unit		
160	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan dari RT.03 menuju RT.02 dengan Lampu Tenaga Surya	5 UNIT		
161	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan Umum RT.3 Kel. Kr. Anyar	2 titik	20,000,000	
162	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan	2 Tiang		
163	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Lampu Jalan Pemakaman	10 Titik		
164	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan jalan	3 titik		
165	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan jalan	3 titk		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
166	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Lampu penerang jalan umum RT.7 Prioritas ke 3	4 titik		
167	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Lampu jalan	10 titik		
168	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan Umum	2 titik		
169	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan jalan	3 titk		
170	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan Baru Lampu Penerang Jalan Lingkungan (P8). Jl Binalatung RT.8	4 Unit	50,000,000	
171	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Lampu penerang jalan umum di wilayah RT. 8 prioritas ke 15	19 Titik		
172	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan Lampu Penerang Jalan Lingkungan 11 titik	Meningkatnya penerang jalan lingkungan		
173	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Lampu jalan	2 titik		
174	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan Ibu Indrawati RT. 08	1 Titik		
175	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Lampu Jl Dr.Sutomo (2 Titik),KH Dewantara Gg.SMPN II, (1 Titik) Gg SMAN I-TK Tunas Kasih (1 Titik) RT.08	4 Titik		
176	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan jalan	3 titik		
177	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pengadaan Lampu Penerangan	Meningkatnya penerangan jalan		
178	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan Baru Lampu Penerangan Jalan Lingkungan (P9). Jl. Binalatung RT 9	4 Unit	50,000,000	
179	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Lampu penerang jalan umum RT.9 jalan Kelurahan Mamburungan Timur prioritas ke 18	5 titik		
180	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Lampu penerang jalan umum RT.9 gang celebes prioritas ke 19	3 titik		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Keterangan
		Keluaran Kegiatan			Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
181	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Lampu penerang jalan umum RT.9 Jalan kantor Kelurahan Mamburungan Timur prioritas ke 20	3 titik		
182	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Lampu penerang jalan umum RT.9 gang bombai prioritas ke 21	5 titik		
183	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan jalan	3 titik		
184	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan jalan	3 titik		
185	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan Lampu Jalanan Belum Ada	5 Titik		
186	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan jalan	3 titk		
187	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PEMASANGAN LAMPU JALAN	6 TITIK		
188	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	PJU gang Wana Tirta rt. 14	2 Tiang		
189	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Lampu Jalan Warga RT.14	4 Unit		
190	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan RT.14 Kel. Juata Laut	20 Titik	50,000,000	
191	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pengadaan Tiang Lampu Penerangan Jalan RT. 14 Selumit Pantai	4 Titik	50,000,000	
192	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerang jalan	3 titik		
193	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Lampu Penerangan Jalan	Meningkatnya lampu penerangan jalan umum		
194	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan KWH meter	Meningkatnya sarana penerangan pos kamling		
195	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Lampu jalan	4 titik		
196	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan Tiang dan lampu Jalan	5 Titik		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
197	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan Umum samping SDN 029 RT. 15	2 Unit		
198	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan jalan	3 titk		
199	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pembuatan Tiang PJU. RT.27 Kel. Selumit Pantai	4 Titik	50,000,000	
200	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Lampu penerang jalan umum RT.6 prioritas ke 2	2 Titik		
201	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan Lampu Penerang Jalan	Meningkatnya Penerangan Lingkungan		
202	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan Baru Lampu Penerang Jalan	Meningkatnya Penerangan Jalan Lingkungan		
203	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Lampu jalan	6 titik		
204	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Solar Cell gang Anggrek, Gang Aster, gang Melati, Gang Mawar, gang Dahlia, jalan Utama 1, Jalan Utama 2 RT. 06	7 Tiang		
205	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Lampu Jalan Lingkungan Wilayah RT.6	14 Unit		
206	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU	7 titik		
207	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU	2 titik		
208	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU dengan tiang	3 titik		
209	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	pemasangan penerangan jalan	Meningkatnya sarana prasarana Penerangan jalan		
210	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan lampu Surya Cell RT. 12	10 Titik		
211	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan PJU RT. 12	10 Titik		
212	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Lampu Penerangan Jalan Menggunakan Daya Solar Ceel/Tenaga Surya	1 Unit		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
213	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan Umum RT. 12	5 Titik		
214	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU Jl. Melati RT.23 Kel. Kr. Anyar	1 titik	10,000,000	
215	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan Penerangan Lampu Jalan. Kel. Kr. Rejo RT.15	5 Unit	100,000,000	
216	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan Baru	2 Titik		
217	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU Gg. Sakura RT.24 Kel. Kr. Anyar	3 titik	30,000,000	
218	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU	4 titik		
219	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan Umum RT. 20 Kel. Kr. Anyar Pantai	16 Titik	35,000,000	
220	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU	2 titik		
221	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU	2 titik		
222	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU	1titik		
223	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan Umum Jalan Poros dan Gang Damai RT. 21	4 Titik		
224	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU	5 titik		
225	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU	5 titik		
226	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan Umum Gang Arjuna RT. 26	3 Titik		
227	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU	2 tiitk		
228	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU	4 titik		
229	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan Umum RT. 32 Kel. Kr. Anyar Pantai	4 Titik	50,000,000	
230	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU RT.47 Kel. Kr. Anyar. Depan masuk jl. wijaya kusuma II, Jalan masuk Bpk. Suriansyah, Jl. Menuju Bpk. Nainggolan	3 titik	30,000,000	
231	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU	1 Titik		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
232	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU	1 titik		
233	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU	3 titik		
234	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU	1 titik		
235	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU	1 titik		
236	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU	11 titik		
237	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU	2 titik		
238	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU	1 titik		
239	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU	2 titik		
240	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU	6 titik		
241	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU	5 titik		
242	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU Pemasangan Baru	3 titik		
243	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU	3 titik		
244	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU	3 titik		
245	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU (1 dengan tiang, 7 tanpa tiang). Jl. Wr Supratman RT.51 Kel. Kr. Anyar	8 titik	50,000,000	
246	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU	2 titik		
247	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU (Gg. Salak tanpa tiang, Depan masjid dengan tiang). RT. 54 Kel. Kr. Anyar	4 titik	20,000,000	
248	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU RT.69 Kel. Kr. Anyar	5 titik	50,000,000	
249	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU	2titik		
250	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU	3 tiitk		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Keterangan
		Keluaran Kegiatan			Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
251	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU	3 titik		
252	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU	14 titik		
253	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU	5 titik		
254	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU	5 titik		
255	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU	3 titik		
256	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU	3 titik		
257	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU	4 titik		
258	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU	3 titik		
259	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU	1 titik		
260	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU	4 titik		
261	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU	2 titik		
262	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU (Jl. Rengas 3titik, Jl. Mega 3titik, Gg. Dahlia 1titik, Gg. Bapindo 2 titik)	9 titik		
263	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU	3 titik		
264	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU disetiap gang	4 titik baru, 4 titik lampu mati		
265	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	LPJU	5 titik		
266	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penambahan Penerangan Jalan RT.01	4 Titik		
267	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan Umum Gang Tenggiri RT. 02	5 Titik		
268	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan lampu penerang jalan (Prioritas 4)	meningkatnya Penerangan jalan dan kemanan lingkungan		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
269	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Lampu penerangan jalan umum gang mawar RT. 2. Prioritas ke 3	1 Titik		
270	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan Lampu Penerang Jalan Warga RT.02	2 Unit		
271	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Lampu Jalan RT.02	4 Titik		
272	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan lampu penerang Jalan (Prioritas 5)	Meningkatkan penerangan dan keamanan lingkungan		
273	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan Baru Lampu Penerangan Jalan Lingkungan Jl. Amal Baru RT. 04 Pantai Amal	4 Unit	50,000,000	
274	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Lampu penerang jalan umum RT.4 prioritas ke 3	5 Titik		
275	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Lampu jalan	2 titik		
276	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Lampu Jalan Lingkungan Warga RT.4	14 Unit		
277	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan Umum Jalan Cendrawasih dan Jalan Gajah Mada RT. 04. Kel. Kr Anyar Pantai	4 Titik	50,000,000	
278	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Lampu Jalanan RT.04	4 Titik		
279	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan Lampu Jalan (Prioritas 3)	Peerangan Lingkungan dan meningkatnya keamanan		
280	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Lampu penerang jalan umum RT. 5 Prioritas ke 1. Kel. Mamburungan Timur	3 Titik	50,000,000	
281	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan Umum Jalan Gajah Mada Gang Telkom RT. 05 Kel. Kr. Anyar Pantai	2 Titik	50,000,000	
282	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan Lingkungan di wilayah RT.5	7 Unit		
283	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Lampu Jalanan Baru RT.05	2 Titik		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Keterangan
		Keluaran Kegiatan			Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
284	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Lampu Penerangan Jalan	Meningkatnya Penerangan jalan lingkungan		
285	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Lampu jalan	2 titik		
286	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pengadaan Genset untuk Penerangan Listrik Pulau Sadau RT.13 Kel. Kr. Harapan	1 Paket	50,000,000	
287	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Lampu Penerangan Jalan Niaga I, II dan II RT.13	3 Titik		
288	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan Lampu Jalanan	Meningkatnya penerangan jalan		
289	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan Baru Lampu Penerangan Jalan Lingkungan (P6). Jl. Binalatung RT 14. Kel. Pantai Amal	4 Unit	50,000,000	
290	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan Tiang Listrik Baru Jl. Rimbun Sari/Delima II RT.14	2 Titik		
291	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan Umum di gang Kasmin, Gang Pinang, gang Keluarga, Gang Akasia,gang Baru RT. 16	5 Titik		
292	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Lampu Jalanan RT.16	3 Titik		
293	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan lampu jalan	Meneingkatnya penerangan jalan umum		
294	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan lampu jalan	Meningkatnya penerangan jalan umum		
295	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan lampu jalan	meningkatnya penerangan jalan umum		
296	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan lampu jalan	meningkatnya penerangan jalan umum		
297	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan Umum RT. 17	1 Titik		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
298	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Jembatan Putih Pada Tiang Listrik No.19IV.3A.3	1 Titik		
299	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan Lampu Penerang Jalan (Prioritas 5)	Meningkatnya penerangan dan keamanan lingkungan		
300	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan Baru Lampu Penerangan Jalan Lingkungan (P3) RT 03 Pantai Amal Jalan menuju Pesantren Miftahul Ulum	2 unit	25,000,000	
301	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Lampu penerangan jalan umum RT.3 prioritas ke 2	40 Titik		
302	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Perbaikan Lampu Jalan dan Pergeseran Tiang PLN	6 Unit		
303	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Lampu Jalan Lingkungan Wilayah RT.8	15 Unit		
304	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan Lampu Jalan/Penerangan Jalan Lingkungan	2 Unit		
305	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan Lampu Penerang Jalan	Meningkatnya Penerangan Lingkungan		
306	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Lampu penerang jalan umum dengan tiang RT. 10 jalan Pesantren Hidayatullah prioritas ke 14	7 titik		
307	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Lampu penerang jalan umum dengan tiang RT. 10 gang hidayah prioritas ke 15	3 titik		
308	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pengadaan Tiang Lampu RT. 10	5 Titik		
309	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan lampu jalan lingkungan wilayah RT.10	8 Unit		
310	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan Lampu Jalan	Meningkatnya kualitas penerangan jalan		
311	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan Lampu Penerang jalan	Meningkatnya Penerangan Lingkungan		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Keterangan
		Keluaran Kegiatan			Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
312	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Lampu penerang jalan umum dengan tiang RT. 11 jalan menuju Goa Maria prioritas ke 3	8 Titik		
313	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Lampu penerang jalan umum dengan tiang RT. 11 jalan utama Sei Mentogog prioritas ke 4	4 titik		
314	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Lampu jalan	1		
315	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan Lampu Jalan/Lingkungan wilayah RT.11	15 Unit		
316	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan lampu penerang jalan (Prioritas 3)	Penerangan lingkungan dan peningkatan keamanan		
317	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Lampu Penerangan Jalan Umum tanpa tiang Gang Bombay dan depan rumah pak RT. 1. Prioritas ke 2	2 Titik		
318	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Lampu jalan	6 titik		
319	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan Umum RT 01	4 titik		
320	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan jalan umum Jalan Mulawarman RT. 10	2 Titik		
321	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan Umum Gg. Borneo RT. 11	2 Titik		
322	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan Umum RT. 13	5 Titik		
323	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan Umum Gang Tambak RT. 14	4 Titik		
324	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan Lampu Penerang Jalan Lingkungan	Meningkatnya sarana penerang jalan lingkungan		
325	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan Umum RT. 18	4 Titik		
326	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan Umum Gang Mawar RT. 23	2 Titik		
327	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan Umum RT 25	15 titik		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
328	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan Umum Gang Tuing 3, 4 RT. 27	2 Titik		
329	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan Umum RT. 29	5 Titik		
330	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan Umum RT. 29	8 Lampu		
331	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan Umum RT. 30	7 Titik		
332	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan PJU RT. 2	6 Titik		
333	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Solar cell untuk PJU	7 Titik		
334	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan PJU RT. 03	23 Titik		
335	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Perbaikan PJU RT. 03	5 Titik		
336	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Penerangan Jalan Umum RT. 17	2 titik		
337	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan Baru Lampu Penerangan Jalan Umum	70 Pju		
338	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	Pemasangan Lampu Led Median Jalan	214 Pju		
339	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	a. Pemasangan Lampu LED di Median Jalan Gajah Mada, Yos Sudarso, Kusuma Bangsa	70 titik		
340	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	b. Pemasangan LPJU dan KWH Meter Se-Kota Tarakan	10 titik		
341	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	c. Pengadaan Lampu LED	1 ls		
342	Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum	d. Pemasangan Lampu Hias	1 ls		
10	**Program penyediaan dan pengolahan air baku**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kapasitas Produksi Air Bersih Kota**	**58.89**	**17,113,161,820**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**
1	Pembangunan sistem penyediaan air minum	kapasitas produksi air bersih	1500 M3, 1 dokumen	0	
2	Pembangunan sistem penyediaan air minum	Pembangunan IPA Indulung	0.3	0	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Keterangan
		Keluaran Kegiatan			Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
		Pemindahan IPA 60 l/det Persemaian ke Embung Bengawan dan Jaringan Distribusi (MY)		5,836,838,000	
		Pemindahan IPA 30 l/det Persemaian ke Embung Indulung dan Jaringan Distribusi (MY)		11,276,323,820	
11	**Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya**	**Pertumbuhan Volume Tampungan Air Baku**	**18.94**	**24,100,000,000**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**
1	Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	Pembangunan Long Storage	104 Km	0	
		Pembangunan Intake dan Long storage Sungai Mulawarman (MY)		7,700,000,000	
		Pembangunan Intake Sungai Semunti (MY)		7,700,000,000	
2	Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	Pembangunan Long Storage Sei. Persemaian	1,25 Ha		
3	Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	Pembangunan Long Storage Sei. Sesanip	1 Ha		
4	Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	Pengadaan Tanah Folder Karang Anyar	4,30 Ha		
		Pengadaan Tanah Embung Indulung	10 Ha	5,000,000,000	
		Pengadaan Tanah Embung Bengawan	6 Ha	3,000,000,000	
5	Perencanaan pemanfaatan sumber daya air	Master Plan Pemanfaatan SDA	1 Dokumen		
6	Perencanaan pemanfaatan sumber daya air	UKL/UPL Pembangunan Embung Maya	1 Dokumen		
7	Perencanaan pemanfaatan sumber daya air	SID dan DED Pembangunan Embung Maya	1 Dokumen		
8	Perencanaan pemanfaatan sumber daya air	SID dan DED Pembangunan Embung Mangatal	1 Dokumen		
9	Perencanaan pemanfaatan sumber daya air	Feasibility Study Pembangunan Embung Mentogok	1 Dokumen		
10	Perencanaan pemanfaatan sumber daya air	SID dan DED Pembangunan Embung Mentogok	1 Dokumen		
11	Perencanaan pemanfaatan sumber daya air	Feasibility Study Pembangunan Embung Juata	1 Dokumen	200,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
12	Perencanaan pemanfaatan sumber daya air	UKL/UPL Pembangunan Embung Juata	1 Dokumen		
13	Perencanaan pemanfaatan sumber daya air	SID dan DED Pembangunan Embung Juata	1 Dokumen	500,000,000	
12	**Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah**	**Cakupan Layanan Air Bersih (%)**	**74.38**	**14,043,147,048**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**
1	Pengembangan distribusi air minum	P/P Jaringan Distribusi Air Minum Zona Kampung Satu	36 ,00		
2	Pengembangan distribusi air minum	P/P Jaringan Distribusi Air Minum Zona Persemaian	44		
3	Pengembangan distribusi air minum	P/P Jaringan Distribusi Air Minum Zona Kampung Bugis	40		
4	Pengembangan distribusi air minum	P/P Jaringan Distribusi Air Minum Zona Juata Laut	0.24		
		P/P Jaringan Distribusi Air Minum Zona Pantai Amal		5,000,000,000	
5	Pengembangan distribusi air minum	Pengadaan Sambungan Rumah (SR)	1167 SR	0	
6	Pengembangan distribusi air minum	Pengadaan Sambungan Rumah (SR) (MY)	2000 SR	1,504,919,400	
7	Pengembangan distribusi air minum	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Distribusi Air Minum (MY)	7000	4,333,249,000	
8	Pengembangan distribusi air minum	Rehabilitasi Jaringan Distribusi Air Minum Zona Kp. Satu	0.32		
9	Pengembangan distribusi air minum	Rehabilitasi Jaringan Distribusi Air Minum Zona Persemaian	0.32		
10	Pengembangan distribusi air minum	Rehabilitasi Jaringan Distribusi Air Minum Zona Kampung Bugis	0.32		
11	Pengembangan distribusi air minum	Rehabilitasi Jaringan Distribusi Air Minum Zona Juata Laut	0.32		
12	Pengembangan sistem penyediaan air minum	Optimalisasi IPA Kampung Satu	0.482		
13	Pengembangan sistem penyediaan air minum	Optimalisasi IPA Kampung Bugis	0.608		
14	Pengembangan sistem penyediaan air minum	Optimalisasi IPA Persemaian	0.53		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
15	Pengembangan sistem penyediaan air minum	Optimalisasi IPA Juata Laut	0.982		
16	Pengembangan sistem penyediaan air minum	Pengadaan Tanah Reservoar	1 Titik		
17	Pengembangan sistem penyediaan air minum	Pembangunan Reservoar (MY)	1 Unit	3,204,978,648	
18	Pengembangan sistem penyediaan air minum	Pengadaan Booster Pump	2 Buah		
19	Pengembangan sistem penyediaan air minum	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum	1		
20	Pengembangan sistem penyediaan air minum	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1		
13	**Program pengendalian banjir**	**Prosentase Luas genangan yang tertangani**	**70.00**	**38,253,045,309**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**
1	Pengendalian banjir kawasan Sebengkok	Pembangunan Saluran Sebengkok (MY)	0,8 Km	6,582,537,620	
2	Pengendalian banjir kawasan Sebengkok	Pembangunan Saluran Sungai Sebengkok	650 Meter	400,000,000	
3	Pengendalian banjir kawasan Sebengkok	Pembangunan Saluran Sebengkok Tiram	200 Meter		
4	Pengendalian banjir kawasan Karang Anyar - Karang Anyar Pantai	Pembangunan Saluran Sungai Jalan celebes Pasir Putih Karang Anyar (MY)	4,4 Km	8,514,850,000	
		Pembangunan jembatan Mulawarman (MY)		4,460,222,000	
5	Pengendalian banjir kawasan Karang Anyar - Karang Anyar Pantai	Pembangunan Saluran Nunukan Sakti	141 Meter		
6	Pengendalian banjir kawasan Karang Anyar - Karang Anyar Pantai	Pembangunan Jembatam Darul Faizin dan Cendrawasih	2 Buah		
7	Pengendalian banjir kawasan Karang Anyar - Karang Anyar Pantai	Revitalisasi Saluran Jl. Gajah Mada	700 Meter		
8	Pengendalian banjir kawasan Karang Anyar - Karang Anyar Pantai	Pembangunan Drainase dan Normalisasi Jl.Paguntaka RT. 53 Kel. Karang Anyar	200 Meter		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
		Pembangunan Drainase dan Normalisasi saluran Mulawarman1,2,3,4 dan Saluran Sisi Kiri Kanan Jalan Mulawaarman Kel. Karang Anyar		2,000,000,000	
9	Pengendalian banjir kawasan Karang Anyar - Karang Anyar Pantai	Revitalisasi Jembatan dekat Penggilingan Bakso dan Darussalam Kr. Anyar	2 Buah		
10	Pengendalian banjir kawasan Karang Anyar - Karang Anyar Pantai	Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Saluran Pasir Putih (Kompleks Brimob)	0,50 Ha		
11	Pengendalian banjir kawasan Karang Anyar - Karang Anyar Pantai	Pembangunan Saluran Pasir Putih (Kompleks Brimob)	150 Meter	750,000,000	
12	Pengendalian banjir kawasan Karang Anyar - Karang Anyar Pantai	Pembangunan Saluran Sungai Sesanip	50 meter		
13	Perencanaan pengendalian banjir	Updating Kawasan Banjir Kota Tarakan	1 Dookumen		
14	Perencanaan pengendalian banjir	Updating Program GIS SDA	1 Dokumen		
15	Pengendalian banjir kawasan Pamusian	Pembangunan Saluran Kusuma Bangsa 1	300 Meter		
16	Pengendalian banjir kawasan Pamusian	Pembangunan Saluran Kusuma Bangsa 3	330 Meter		
17	Pengendalian banjir kawasan Kampung Satu/Skip	Pembangunan Saluran Kawasan Kampung Satu (Lumpuran)	200 Meter		
18	Pengendalian banjir kawasan Kampung Satu/Skip	Pelebaran Saluran Jl. Pulau Banda	800 Meter		
19	Pengendalian banjir kawasan Karang Harapan	Pembangunan Saluran Sungai Persemaian (MY)	1,5 Km	3,261,921,389	
20	Pengendalian banjir kawasan Karang Harapan	Pembangunan Saluran Rawasari Hulu	50 Meter		
21	Pengendalian banjir kawasan Juata Laut	Pembangunan Crossing Saluran Jl. Padat Karya Juata Laut	1 Buah		
22	Pengendalian banjir kawasan Juata Laut	Pembangunan Saluran Gang Salak Juata Laut	1000 Meter		
23	Pengendalian banjir kawasan Gunung Lingkas - Lingkas Ujung	Pembangunan Kanal Jembatan Kadir-Laut Jl. Kusuma Bangsa I	400 Meter		
24	Pengendalian banjir kawasan Gunung Lingkas - Lingkas Ujung	Pembangunan Kanal Jembatan Kadir-Laut Jl. Kusuma Bangsa II	400 Meter		
25	Pengendalian banjir kawasan Karang Balik - Selumit	Pembangunan Saluran Sungai Selumit (MY)	4,8 Km	6,283,514,300	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
26	Pengendalian banjir kawasan Karang Balik - Selumit	Pembangunan Saluran Sungai Selumit dan sekitarnya	1000 Meter		
27	Pengendalian banjir kawasan Karang Balik - Selumit	Review Desain Pembangunan Saluran Gang Penghulu Kr. Balik	1 Dokumen		
28	Pengendalian banjir kawasan Karang Balik - Selumit	Pembangunan Saluran Gang Penghulu Kr. Balik	185 Meter	6,000,000,000	
29	Pengendalian banjir kawasan Kampung Enam - Kampung Empat	Pembangunan Saluran BLK II	400 Meter		
30	Pengendalian banjir kawasan Kampung Enam - Kampung Empat	Pembangunan Saluran Simpang KPU	76 Meter		
31	Pengendalian banjir kawasan Mamburungan - Mamburungan timur	Pembangunan Saluran Sungai Mamburungan Timur	9,4 Km		
32	Pengendalian banjir kawasan Juata Kerikil - Juata Permai	Pembangunan Saluran Sungai Sebai	1000 Meter		
14	**Program peningkatan sarana dan prasarana ke PU an**	**Persentase Alat yang terkalibrasi dan terpelihara**	**100**	**175,000,000**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**
1	Akreditasi dan kalibrasi alat laboratorium	Jumlah Alat yang terkalibrasi dan terakreditasi	17 Unit	75,000,000	
2	Rehab/pemeliharaan alat- alat ukur dan bahan laboratorium	Jumlah alat yang terpelihara	17 Unit	100,000,000	
15	**Program pembangunan dan penyediaan fasilitas umum**	**Persentase fasilitas umum yang memadai**	**80**	**160,892,624,045**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**
1	Pengembangan sport centre dan pariwisata	Pembangunan Pagar Kawasan Sport Centre	1		
2	Pengembangan sport centre dan pariwisata	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Olah Raga (MY)	1	1,450,000,000	
3	Pengembangan sport centre dan pariwisata	Penataan Pantai Amal (MY)	1	35,089,113,000	
4	Pengembangan sport centre dan pariwisata	Penataan Pantai Amal Tahap II (MY)	1	59,727,360,000	
5	Pengembangan sport centre dan pariwisata	Penataan Pantai Amal Tahap III (MY)	1		
6	Pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum	Pembangunan Gedung Wanita Tahap II (MY)	100%	3,951,179,045	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
7	Pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum	Pembangunan Gedung MUI (MY)	100%	1,200,000,000	
8	Pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum	Pembangunan Gedung Wanita Tahap II (MY)	1		
9	Pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum	Pembangunan Gedung Kesenian dan TCC (MY)	100%	39,500,000,000	
10	Pembangunan sarana dan prasarana instansi vertikal	Pembangunan kantor polres	30%	1,000,000,000	
11	Pembangunan sarana dan prasarana instansi vertikal	Pembangunan LAPAS Kelas II A Tarakan (MY)	100%	3,474,972,000	
12	Rehabilitasi danpemeliharaan bangunan keciptakaryaan	Pemeliharaan Keciptakaryaan	6 Bangunan	1,000,000,000	
13	Rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan keciptakaryaan	Pemeliharaan Keciptakaryaan (MY) Rehab Gedung Gadis	1 Gedung	5,500,000,000	
14	Pembangunan sarana dan prasarana fasilitas sosial	Pembangunan Gedung Pertemuan Jemaat Kristiani (MY)	80%	9,000,000,000	
15	Pembangunan sarana dan prasarana fasilitas sosial	Pembangunan Gedung MUI (MY)	1		
16	Pengembangan masjid raya	Pemeliharaan Masjid Raya	1		
16	**Program Peningkatan Jalan dan Jembatan**	**Prosentase ruas jalan yang ditingkatkan**	**86**	**56,536,394,800**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**
1	Peningkatan jalan kota Tarakan Tengah	Panjang Jalan Berhotmix (Km)	0,19 km		
2	Peningkatan jalan kota Tarakan Tengah	Peningkatan Jalan Halmahera (MY)	0,43 Km	2,978,996,000	
3	Peningkatan jalan kota Tarakan Tengah	Peningkatan Jalan Diponegoro (MY)	1,26 Km	3,972,473,000	
4	Peningkatan jalan kota Tarakan Tengah	Peningkatan Jalan Purnabakti	1,41 Km		
5	Peningkatan jalan kota Tarakan Tengah	Peningkatan Jalan Kota Tarakan Tengah	3.29		
6	Peningkatan jalan kota Tarakan Tengah	Peningkatan jalan Sebengkok Tiram	1 Km		
7	Peningkatan jalan kota Tarakan Tengah	Peningkatan jalan Hangtuah	1 Km		
8	Peningkatan jalan kota Tarakan Tengah	Peningkatan jalan Dewi Sartika	1 Km		
9	Peningkatan jalan kota Tarakan Tengah	Peningkatan Jalan Halmahera	1 Km		
10	Peningkatan jalan kota Tarakan Tengah	Peningkatan Jalan Diponegoro	1 Km		
11	Peningkatan jalan kota Tarakan Tengah	Peningkatan Jalan Purnabakti	1 Km		
12	Peningkatan jalan kota Tarakan Tengah	Peningkatan Jalan Mangkudulis	1 Km		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
		Peningkatan Jalan Sebengkok AL (MY)	0,93 km	3,000,000,000	
13	Peningkatan Jalan kota Tarakan Barat	Peningkatan Jalan Kota Tarakan Barat	0,57 Km		
14	Peningkatan Jalan kota Tarakan Barat	Peningkatan Jalan Bhayangkara	1,86 Km		
15	Peningkatan Jalan kota Tarakan Barat	Peningkatan Jalan Sudirman	1,02 Km		
16	Peningkatan Jalan kota Tarakan Barat	Peningkatan Jalan Hasanudin	1,05 Km		
17	Peningkatan Jalan kota Tarakan Barat	Peningkatan Jalan Nipah	1,22 Km		
18	Peningkatan Jalan kota Tarakan Barat	Peningkatan Jalan Lili	1,82 Km		
19	Peningkatan Jalan kota Tarakan Barat	Peningkatan Jalan aki Balak	2,40 Km		
20	Peningkatan Jalan kota Tarakan Barat	Pengawasan Peningkatan Jalan aki Balak	1 Dok		
21	Peningkatan Jalan kota Tarakan Barat	Peningkatan Jalan Kota Tarakan Barat	1 Km		
22	Peningkatan Jalan kota Tarakan Barat	Peningkatan jalan Dr. Sutomo	1 Km		
23	Peningkatan Jalan kota Tarakan Barat	Peningkatan jalan Kamboja	1 Km		
24	Peningkatan Jalan kota Tarakan Barat	Peningkatan jalan Celebes	1 Km		
25	Peningkatan Jalan kota Tarakan Barat	Peningkatan jalan Kakatua	1 Km		
26	Peningkatan Jalan kota Tarakan Barat	Peningkatan jalan Rajawali	1 km		
27	Peningkatan Jalan kota Tarakan Barat	Peningkatan Jalan Bhayangkara (MY)	1 km	2,978,391,000	
28	Peningkatan Jalan kota Tarakan Barat	Peningkatan Jalan Sudirman(MY)	1 km	4,971,452,000	
29	Peningkatan Jalan kota Tarakan Barat	Peningkatan Jalan Hasanudin (MY)	1 km	1,475,510,000	
30	Peningkatan Jalan kota Tarakan Barat	Peningkatan Jalan Nipah (MY)	1 km	1,353,351,000	
31	Peningkatan Jalan kota Tarakan Barat	Peningkatan Jalan Lili (MY)	1 km	3,323,443,000	
32	Peningkatan Jalan kota Tarakan Barat	Peningkatan Jalan aki Balak (MY)	1 km	3,136,629,000	
33	Peningkatan Jalan kota Tarakan Barat	Pengawasan Peningkatan Jalan aki Balak	1 dokumen		
34	Peningkatan Jalan kota Tarakan Barat	Peningkatan Jalan Gang Bersama 1 dan 2 RT.45	1 km		
35	Peningkatan Jalan kota Tarakan Barat	Peningkatan Jalan Jembatan Bongkok Karang Anyar Pantai	1 km		
		Peningkatan Jalan Cahaya Baru (MY)	2 unit jembatan	1,518,480,000	
		Peningkatan Jalan Kawi Lapi Samping dan Belakang KKMB (MY)	0,5 km	5,004,720,000	
		Peningkatan Jalan Celebes-Cempaka-Teratai (MY)	0,538 km	1,608,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
		Peningkatan Jalan Rawasari Indah (MY)	0,875 km	2,839,804,800	
		Peningkatan Jembatan Swasembada	0,4 km	2,000,000,000	
36	Peningkatan jalan kota Tarakan Utara	Peningkatan Jalan Kota Tarakan Utara	0,57 Km		
37	Peningkatan jalan kota Tarakan Utara	Pengawasan Peningkatan Jalan Aji Iskandar (MY)	1,20 Km	3,970,482,000	
38	Peningkatan jalan kota Tarakan Utara	Peningkatan Jalan Kota Tarakan Utara	1 km		
39	Peningkatan jalan kota Tarakan Utara	Peningkatan jalan juata lembah	1 Km		
40	Peningkatan jalan kota Tarakan Utara	Peningkatan jalan Padat Karya	1 Km		
41	Peningkatan jalan kota Tarakan Utara	Peningkatan jalan Pemakaman Muslim dan Nasrani	1 Km		
42	Peningkatan jalan kota Tarakan Utara	Peningkatan jalan cahaya baru depan Pesantren	1 Km		
43	Peningkatan Jalan kota Tarakan Timur	Peningkatan Jalan Kota Tarakan Timur	0,16 Km		
44	Peningkatan Jalan kota Tarakan Timur	Peningkatan Jalan Ring Road (MY)	1,80 Km	6,591,178,000	
45	Peningkatan Jalan kota Tarakan Timur	Peningkatan Jalan Peningki Laid RT 14 (MY)	0,51 Km	1,841,418,000	
46	Peningkatan Jalan kota Tarakan Timur	Peningkatan Jalan Kusuma Bangsa (MY)	0,60 Km	3,972,067,000	
47	Peningkatan Jalan kota Tarakan Timur	Peningkatan Jalan Kota Tarakan Timur	1 km		
48	Peningkatan Jalan kota Tarakan Timur	Peningkatan jalan Mahoni	1 km		
49	Peningkatan Jalan kota Tarakan Timur	Peningkatan jalan S. Ngingitan	1 km		
50	Peningkatan Jalan kota Tarakan Timur	Peningkatan Jalan Ring Road	1 km		
51	Peningkatan Jalan kota Tarakan Timur	Peningkatan Jalan Peningki Laid RT 14	1 km		
52	Peningkatan Jalan kota Tarakan Timur	Peningkatan Jalan Kusuma Bangsa	1 km		
53	Peningkatan Jalan kota Tarakan Timur	Peningkatan Jalan Bombay	1 km		
54	Peningkatan Jalan kota Tarakan Timur	Peningkatan Jalan gang Kapah RT.3 dan RT.5 Kel.Pantai Amal	1 km		
55	Peningkatan Jalan kota Tarakan Timur	Peningkatan jalan Karungan	1 km		
56	Peningkatan Jalan kota Tarakan Timur	Peningkatan Jalan BBU	1 Km		
		Peningkatan Jalan menuju Pasar rakyat (depan Dishub) (MY)	0,38 km	3,952,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
		Peningkatan Jalan Lingkar Tanjung Batu (MY)	0,05 km dan siring badan jalan 0,15 km	4,500,000,000	
57	Penunjang Jalan dan Jembatan	Survey Jalan Kota Tarakan	1 dokumen	300,000,000	
		Survey Jembatan Kota Tarakan	2 dokumen	300,000,000	
17	**Program pembinaan jasa konstruksi**	**Persentase pembinaan jasa konstruksi**	**57.14**	**350,000,000**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**
1	Penyusunan norma, standart, pedoman, dan manual (NSPM) pembinaan jasa konstruksi	Jumlah Norma, standar, pedoman dan manual pembinaan jasa konstruksi	1 Dokumen	50,000,000	
2	Pembinaan dan pengawasan ijin usaha jasa konstruksi	Jumlah Sosialisasi	2 Kali	100,000,000	
3	Pendidikan dan pelatihan tenaga jasa konstruksi	Jumlah tenaga jasa konstruksi yang terlatih	150 Orang	100,000,000	
4	Penyelenggaraan siste informasi jasa konstruksi	Prosentase tersedianya layanan informasi jasa konstruksi	0.7	100,000,000	
18	**Program perencanaan tata ruang**	**Persentase dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan**	**30**	**650,000,000**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**
1	Penyusunan Rancangan Perda Tentang RTRW			250,000,000	
2	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	Penyelenggaran Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Lingkungan	10 Plang Informasi TR	50,000,000	
3	Penyusunan dan pembuatan sistem informasi tata ruang	Update Data Aplikasi Informasi Tata Ruang Publik Skala 1 : 5000	1	350,000,000	
4	Monitoring, evalusi dan pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Siwastek)	1	50,000,000	
19	**Program pemanfaatan ruang**	**Prosentase ketaatan terhadap tata ruang**	**63**	**-**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**
1	Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang	Sertifikasi Drone (Training Survey Mapping Using Drone)	1		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
19	**Program pengendalian pemanfaatan ruang**	**Prosentase pengawasan pemanfaatan ruang**	**100**	**50,000,000**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**
1	Pengawasan pemanfaatan ruang	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	100%	50,000,000	
2	Pengawasan pemanfaatan ruang	Pembentukan Tim Terpadu Lintas Sektor Pengawasan Zona Wilayah GSB, GSS	1		
3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Dokumen		
4	Pengawasan perizinan bangunan, tempat usaha dan rumah sewa	Pendataan Bangunan Gedung di Kota Tarakan	100 Bg		
20	**Program pengelolaan ruang terbuka hijau**	**Persentase Luas RTH**	**46.62**	**2,500,000,000**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**
1	Penataan RTH	PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU	20 taman		
2	Penataan RTH	a. Pengadaan Tanaman Rumput Gajah Mini Untuk Median	1 ls		
3	Penataan RTH	b. Pengadaan Tanaman Hias	1 ls		
4	Penataan RTH	c. Pengadaan tanah Humus	1 ls		
5	Penataan RTH	d. Rehab Kebun Bibit	1		
6	Penataan RTH	e. Pengadaan Pot Bunga	1		
7	Pemeliharaan RTH	PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU	20 Taman	530,000,000	
8	Pemeliharaan RTH	Pemeliharaan Taman Se- Kota Tarakan	1		
9	Pemeliharaan RTH	Belanja air untuk penyiraman tanaman dan penyiraman jalan	1	20,000,000	
10	Pemeliharaan RTH	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1		
11	Pemeliharaan RTH	Pengadaan Mesin Rumput	4	10,000,000	
12	Pemeliharaan RTH	Pengadaan Mesin Chainsaw	2 unit	20,000,000	
13	Pemeliharaan RTH	Pengadaan Baju kerja dan Celana Kerja petugas lapangan	1 ls	60,000,000	
14	Pemeliharaan RTH	Pengadaan Sepatu Kerja Petugas lapangan	1 ls	50,000,000	
15	Pemeliharaan RTH	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	1 ls	60,000,000	
16	Pemeliharaan RTH	Rehab Taman Berlabuh	1 lokasi		
17	Pemeliharaan RTH	Rehab Taman Oval Markoni	1		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
18	Pemeliharaan RTH	Rehab Taman Oval Malundung	1		
19	Pemeliharaan RTH	Rehab Taman Oval Ladang	1		
20	Pemeliharaan RTH	Pengadaan mobil pick up 2 unit untuk perawatan taman kota	2 unit		
21	Pengembangan taman rekreasi	Area Kuliner Taman Bertuah	5 taman, 3 dokumen	750,000,000	
22	Pengembangan taman rekreasi	a. Jogging Track Taman Bertuah	1		
23	Pengembangan taman rekreasi	b.pembangunan taman berlabuh 2	1		
24	Pengembangan taman rekreasi	c. Lanjutan Pembangunan RPTRA RT.16 Kel. Selumit Pantai	1	1,000,000,000	
25	Pengembangan taman rekreasi	d. Pembangunan taman kampung enam	1		
4	**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**			**33,892,991,975**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
	Belanja Tidak Langsung				
	Belanja Langsung			**33,892,991,975**	
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100**	**1,652,597,970**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya adminsitrasi perkantoran	12 bulan	3,888,450	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya sarana komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	173,489,600	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Lancarnya operasional kantor	12 bulan	7,733,145	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lancarnya pelayanan administrasi keuangan	12 bulan	100,000,000	
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya layanan kebersihan kantor	12 bulan	6,670,000	
6	Penyediaan alat tulis kantor	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran atk	12 bulan	16,501,695	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	3,774,750	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terwujudnya penerangan kantor rusunawa	12 bulan	4,098,930	
9	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi luar daerah	10 kali	35,000,000	
10	Pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Lancarnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan	12 bulan	1,274,931,000	
11	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS	Layanan jaminan asuransi jiwa tenaga honorer	12 bulan	26,510,400	
2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**200,602,005**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor/rusunawa	10 unit	154,602,005	
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah rusunawa yang terpelihara	2 TB	46,000,000	
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya sarana pemeliharaan kendaraan dinas operasional	12 bulan		
3	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Persentase ASN yang disiplin**	**100**	**11,700,000**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	40 stel	11,700,000	
2	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat dan Bimtek			
5	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu**	**100**		**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
4	**Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong**	**Pertumbuhan panjang drainase lingkungan**	**0.364**	**10,226,817,000**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
1	Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Meningkatnya pembangunan infrastruktur dasar	lokasi	70,000,000	
2	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Utara)	Drainase yang dibangun			
3	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Utara)	Pembuatan Siring (P1) RT.01 Kel. Juata Laut	P. 60 m x L. 1 m	50,000,000	
4	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Utara)	Drainase	100 m x 20 m x 40 m		
5	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Utara)	Drainase sepanjang jalan	300 M		
6	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Utara)	Drainase Jl. Aki Balak RT. 3 Gang Patriot Kel. Juata Kerikil	110 m	50,000,000	
7	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Utara)	DRAINASE/GORONG - GORONG BTN INTRACA RT.04 Kel. Juata Permai	60 CM x 60 CM x 150M	50,000,000	
8	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Utara)	Pembuatan Siring Gang RT.04 Kel. Juata Laut	P.500 m x L. 30 m x T.70 m	50,000,000	
9	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Utara)	Drainase Jl. Nuri Kel. Juata Kerikil	50 m	50,000,000	
10	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Utara)	DRAINASE DAN GORONG - GORONG RT. 5 BTN INTRACA BLOK C 2 Juata Permai	40 CM x 50 CM x 60 M	50,000,000	
11	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Utara)	Drainase	4 m x 400 m		
12	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Utara)	DRAINASE SAMPING PANGGUNG PERBATASAN RT.16 Kel. Juata Permai	15 M	50,000,000	
13	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Utara)	Drainase Jl. P. Aji Iskandar RT.6 Kel. Juata Laut	P. 20 m x L. 1 m	50,000,000	
14	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Utara)	Perbaikan Jalan/Drainase RT.7 Kel. Juata Laut	P. 50 m X L. 50 m	25,000,000	
15	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Utara)	DRAINASE	300 M		
16	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Utara)	Pembangunan Saluran Drainase RT.8 Kel. Juata Laut	P. 70 m x L. 0,5 m	50,000,000	
17	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Utara)	Drainase Jl. Merpati RT. 9 Kel. Juata Kerikil	160 m (T=70cm, La=70cm,Lb=30cm)	50,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
18	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Utara)	Drainase Jl. Mawar Harum I RT.8 Kel Juata Kerikil	80 m (T=80cm, La=70cm,Lb=30cm)	50,000,000	
19	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Utara)	PERBAIKAN PARET JALAN GG BETET	150 M x 0,5 M x 10 CM		
20	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Utara)	Normalisasi Drainase Jl. Pelijan RT.9 Kel. Juata Laut	P. 150 m	50,000,000	
21	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Utara)	PERBAIKAN DRAINASE RUSAK JL. ANTANG RT.10 KEL. JUATA PERMAI	123,9 M x 50 CM x 60 CM	50,000,000	
22	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Utara)	Drainase	P. 50 m x L. 50 m		
23	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Utara)	PEMBUATAN PARIT DI HALAMAN MASJID NURUL FALAH RT.11 Kel. Juata Permai	50 M x 50 CM x 50 CM	50,000,000	
24	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Utara)	PEMBUATAN PARIT TANJAKAN JOGLO INTARACA	50 M x 5 M		
25	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Utara)	Drainase Gang Pegadaian RT. 11 Kel. Juata Laut	P. 70 m x L. 2 m	50,000,000	
26	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Utara)	DRAINASE	120 M x 50 CM x 60 CM		
27	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Utara)	drainase	200 m x 2 m x 12 cm		
28	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Utara)	drainase kiri kanan jl. Bangau RT.15 Kel. Juata Permai	P = 200 L = 50 T = 50	50,000,000	
29	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Utara)	DRAINASE JLN POROS	1000 M		
30	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Utara)	Pemasangan Gorong - Gorong RT.15 Juata Laut	(kosong)	5,000,000	
31	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Utara)	PEMBUATAN DRAINASE GG 10	16 M		
32	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Utara)	DRAINASE	80 CM x 80 CM x 30 CM x 210 M		
33	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Utara)	Drainase	P. 50 m x L. 0,5 m		
34	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Utara)	Drainase	P. 20 m x L 1 m		
35	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Utara)	DRAINASE JALAN SEKOLAHAN SDN 051 JL. MUARA BENGAWAN RT.18 Kel. Juata Permai		50,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
36	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Utara)	Drainase	P. 20 m		
37	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Utara)	Normalisasi Drainase PERUM PNS RT.21 Kel. Juata Permai	400 M	50,000,000	
38	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Utara)	Drainase	P. 20 m x T.3 m		
39	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Utara)	Meningkatnya pembangunan infrastruktur dasar	lokasi		
40	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Normalisasi Drainase			
41	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Pembuatan dan Perbaikan Drainase Jl. Adityawarman Gang Manggis RT.01	80 Meter	50,000,000	
42	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase di Gang Keluarga RT.02	20 x 0,20 x 0,30 Meter		
43	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase di Gang Swadaya RT.02	20 x 0,30 x 0,50 Meter		
44	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase	P 700M		
45	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase	P 125M, L 60cm, t 50cm		
46	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase	P 30M, L 50M, t 50cm		
47	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase dan cor lantai parit	P 50M L 1,30M t 80cm		
48	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase di Gang Swakarsa RT.02	50 x 0,40 x 0,70 Meter		
49	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase gang 84 RT. 02 Kel. Kr. Harapan	148 m x 60 cm	50,000,000	
50	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase /Penyiringan Jalan Gereja Toraja RT. 04 Kel. Kr. Harapan	p= 132 m T= 1m L= 50 cm	50,000,000	
51	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Perbaikan Drainase Rusak Belakang Lapas Gang Seruni RT.04	60m x 40cm x 45cm		
52	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase Jalan Menuju RPH RT. 05 Kel. Kr. Harapan	4 m x 200 m	50,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
53	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Pembuatan Drainse Baru Warga Masih Ada Yang Menggunakan Pipa dan Sebagian Tidak Jl. KH.Dewantara Gang Melati RT.05 Karang Balik	45 x 0,5 Meter	50,000,000	
54	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Pembuatan Gorong-gorong dan Drainase jalan Menuju RPH RT. 05	100 meter		
55	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase Jalan Agathis RT. 05	2 m x 200 m		
56	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Perbaikan Drainase (Cor Lantai, Perbaikan Siring dan Plat Deker) RT.06	55 x 0,6 Meter		
57	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase 3titik RT.06 Kel. Karang Anyar	P 80M	50,000,000	
58	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Perbaikan dan Normalisasi Drainase (Cor Lantai Parit) Jl.Dr.Sutomo RT.06	170 m x 50 cm 30 m x 1,5 m		
59	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase / Siring Gang Anggrek RT. 06 Kel. Karang Harapan	p = 40 m T= 2 m v = 60 m	50,000,000	
60	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase Belakang SMPN II, dan SMAN I di RT.07	150 x 2 Meter		
61	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase Jalan Sarani RT. 09	350 m x 1 m x 70 cm		
62	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Pembuatan Drainase Jl. TMMD RT. 09	150 m x 3m x 70 cm		
63	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase (Dangkal dan Sering Banjir) Jl. Dr.Sutomo Gang Jambu RT.09	30 Meter		
64	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase Jl. Slamet Riyadi RT.09 Kel. Karang Anyar	P 15M	50,000,000	
65	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase dan siring samping Gg. Doremi RT. 11 Kel. Karang Anyar	P 33M, L 50cm, t 40cm	50,000,000	
66	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase Jl. Melati RT. 21 Kel. Karang Anyar	P 150M, Latas 30cm, Lbawah 70cm, t 100cm	50,000,000	
67	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase Lingkungan RT.6 dengan Volume P=10 (satuan meter) PRIORITAS 1 Kel. Karang Rejo	1 Kegiatan	50,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
68	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Pemasangan Gorong-gorong dan Semenisasi diatas Gorong-gorong dengan Volume P=75 L=1,50 T=1,20 (satuan meter/centimeter) PRIORITAS 1 RT.11 Kel. Karang Rejo	1 Kegiatan	50,000,000	
69	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Cor Beton dan Drainase untuk Jalan Beton dengan Volume P=30 x 3, T=20; Drainase P=30 L=20 T=30 (satuan meter/centi meter) PRIORITAS 1 RT.3 Kel. Karang Rejo	1 Kegiatan	50,000,000	
70	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Penutup Paret/Drainase Wilayah RT.8 dengan Volume P=300 (meter) PRIORITAS 1 Kel. Karang Rejo	1 Kegiatan	20,000,000	
71	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase Jalan Lingkungan Wilayah RT.4 Batas RT.4 dan RT.8 dengan Volume P=120, L=3 , T= 20 s.d 50 (satuan meter) PRIORITAS 1 Kel. Karang Rejo		50,000,000	
72	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase Jalan Rawasari Indah Depan Rumah Bapak Topik RT. 02	50 m x 60 m x 50 Cm		
73	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase Lingkungan di Wilayah Batas RT.4 dan RT.5 dengan Volume P=30 (satuan meter)	1 Kegiatan		
74	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Perbaikan Drainase Poros RT. 14	150 m x 3 m		
75	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase Gang Damai Rt. 16	85 m x 40 cm		
76	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase Utara Masjid Darul Hikmah RT. 17 Kel. Karang Anyar Pantai	50 m x 0,5 m	50,000,000	
77	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase RT. 24 Kel.Karang Anyar Pantai	1000 m x 2 m	50,000,000	
78	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Normalisasi Drainase Jalan Cendrawasih RT. 05	150 m X 50 cm X 50 cm		
79	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase	P 30M,L ,40M, t 1,10M		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
80	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Normalisasi Drainase	40M		
81	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase	P 35M, L 70cm		
82	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase JL.Niaga I ,Niaga II dan Niaga III RT.13 Kel. Karang Balik	100 Meter	50,000,000	
83	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase	P 35M, t 1,5M		
84	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase	P 57,5M, L 0,5M, t 0,7M		
85	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase Gang Tenguyun RT.11	350 Meter		
86	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Pembangunan Drainase Jalan Cendrawasih RT. 07 Kel. Karang Anyar Pantai	40 m x 50 cm x 50 cm	25,000,000	
87	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase Sering Terjadi Banjir Sebelah Baster PDAM Jl. Dr.Sutomo RT.07 Kel. Karang Balik	125,60 Meter	50,000,000	
88	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase Jl. Melati RT. 25 NO. 31 Kel. Karang Anyar	P 9,5M, L 0,7M, t 0,80M	50,000,000	
89	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase	P 80M, L 50cm		
90	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase (untuk mengatasi Longsor yang sudah terjadi beberapa kali)	P 200M, L 75, t 50		
91	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	drainase gg. merpati RT 19 Kel. Karang Anyar Pantai	126 m x 1 m	50,000,000	
92	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase Gang Bawal RT. 26 Kel. Karang Anyar Pantai	100 m x 0,5 m	50,000,000	
93	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase Belakang masjid dan depan masjid Al Ikhlas RT.43 Kel. Karang Anyar	P 150M, L 0,5M, t 0,7M	100,000,000	
94	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase	1 kegiatan		
95	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Normalisasi Drainase Jalan Gajah Mada RT. 05	300 m X 50 cm		
96	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Pembuatan Drainase	P 40M, L 0,60M, t 0,80M		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
97	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase (kanan Kiri)	50M		
98	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase Jalan Tembus RT.16 Ke 05	47 Meter		
99	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Siring Paret / Drainase Gang Markisa RT. 16	3 m x 100 m		
100	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase Gang Kenanga RT. 13 Kel. Karang Anyar Pantai	150 m	50,000,000	
101	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase Jalan Rukun RT. 29 Kel. Karang Anyar Pantai	50 m x 1 m	50,000,000	
102	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase RT. 28 Kel. Karang Anyar Pantai	300 m	50,000,000	
103	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase	125 M3		
104	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Pemasangan penutup drainase disamping SD.018 (volume P=45 L=50) dan pemasangan gorong gorong samping SD 018 (volume P=60 L=2) (satuan meter) RT. 10 Kel. Karang Rejo	1 Kegiatan	50,000,000	
105	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase Gang Yolo RT. 20	200 m x 2 m		
106	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase (rehab) Aspol Kampung Bugis RT. 04 Kel. Karang Anyar	P 50M	50,000,000	
107	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Normalisasi parit depan barak teratai	P 50M		
108	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase Jalan Cendrawasih RT. 14	70 m x 40 cm		
109	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase gang Cendana menuju gang Paguntaka RT. 03	P = 100 m L=1,5 m		
110	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase gang Cendana RT. 03	p = 100 m l= 1 m		
111	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase/Gorong-gorong Jalan Gajah Mada RT. 03	60 m		
112	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Meningkatnya pembangunan infrastruktur dasar	lokasi		
113	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Pembangunan Drainase RT. 08 Kel. Karang Anyar Pantai	100 m x 1,5 m x 0,5 m	200,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
114	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase dan Perbaikan Jembatan Gang. Tambak RT. 15 Kel. Karang Anyar Pantai	50 m	25,000,000	
115	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase Gang Tuing RT. 27 Kel. Karang Anyar Pantai	200 m x 50 cm	50,000,000	
116	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase RT 33 Kel. Karang Anyar Pantai	100 m x 1,5 m x 1 m	50,000,000	
117	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Parit dan penyiringan RT.17 Kel. Karang Anyar	P 200M	200,000,000	
118	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase RT.18 Kel. Karang Anyar	P 215M, L 40cm	100,000,000	
119	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase Gg. Alok RT.19 Kel. Karang Anyar	P 103M, L 0,70M, t 0,70M	100,000,000	
120	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase RT. 29 Rumah Bapak Hafiz Hanifar Kel. Karang Anyar	P 50M, L 1 M	50,000,000	
121	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Pembongkaran dan Membangun Kembali Menjadi lebih tinggi cor beton yang menghalangi aliran sungai setiap banjir Perbatasan wilayah RT. 30 dan RT. 32 Kel. Karang Anyar	P 7M, L 2,20M	50,000,000	
122	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase (Rehab) Gg. Perumahan Guru RT. 31 Kel. Karang Anyar	P 10M, L 0,70M, t 1M	50,000,000	
123	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase Kanan dan kiri Jl. Bhakti RT. 40 Kel. Karang Anyar	300M	100,000,000	
124	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase Gg. Jabal Kahfi Gg. Rahmat RT. 44 Kel. Karang Anyar	P 77M, 60cm, t 80cm	80,000,000	
125	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase Jl. Wijaya Kusuma VI Gg. Anggrek RT. 50 Kel. Karang Anyar	P 70M, L 80cm, t 1M	70,000,000	
126	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase Jl. Selebes RT. 53 Kel. Karang Anyar	P 70M, L 1M, t 8cm	120,000,000	
127	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase RT. 55 Kel. Karang Anyar	P 130M, L2M	200,000,000	
128	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Sambungan Drainase belakang Gereja GPSDI Imanuel I Tarakan RT. 56 Kel. Karang Anyar	P 100M, L 2M, t 1,5M	100,000,000	
129	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase RT. 58 Kel. Karang Anyar	P 300M	150,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Keterangan
		Keluaran Kegiatan			Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
130	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase RT. 59 Kel. Karang Anyar	P 150M	150,000,000	
131	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase Jalan Sesanip RT. 60 Kel. Karang Anyar	P 100M	100,000,000	
132	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase RT. 61 Kel. Karang Anyar	P 90M	50,000,000	
133	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Barat)	Drainase gang imbaya II RT. 03 Kel. Karang Harapan	3 m x 50 m x 1 m	50,000,000	
134	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase			
135	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	DRAINASE JL. TELAGA AIR GUNUNG RT.02 Kel. Kampung Satu	100Mx1M	50,000,000	
136	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Drainase Gg. Buntu (Belakang Rumah H. Syamsuddin) RT.07 Kel. Sebengkok	P : 70 L : 0,90 T : 0,90	60,000,000	
137	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Perbaikan drainase Jl. Kh.Agus Salim RT.08 Kel. Selumit	P : 90 L : 0,90 T : 0,90	50,000,000	
138	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Pembuatan Penutup Drainase RT.10 Kel. Selumit Pantai	P : 40 L : 0,90 T : 0,90	50,000,000	
139	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Pembuatan Penutup Drainase RT.08 Kel. Selumit Pantai	P : 80 L : 0,90 T : 0,90	50,000,000	
140	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Pembuatan Penutup Drainase RT.09 Kel. Selumit Pantai	P : 40 L : 0,90 T : 0,90	50,000,000	
141	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Drainase Parit Jl.Belanda GG Parit Jalan Ladang Dalam RT.10 Kel. Pamusian	P : 60 L : 0,90 T : 0,90	50,000,000	
142	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Drainase samping besi tua Bp Joko Waluyo RT. 10 Kel. Sebengkok	P : 200 L : 0,5 T : 0,70	50,000,000	
143	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	PEMBUATAN PARIT JALAN DEPAN RUMAH NUR PAIDA RT.10 Kel. Kampung Satu	100Mx1M	50,000,000	
144	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Pembuatan Drainase /Parit Gang Jati RT. 11 Kel. Karang Harapan	28Mx1M	50,000,000	
145	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Perbaikan Drainase JL.Jl. Hangtuah RT.11 Kel. Selumit	P : 20 L : 0,60 T : 0,60	200,000,000	
146	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	DRAINASE + DEKER GG. TESORO RT. 11 Kel. Kampung Satu	P : 30	50,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
147	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Perbaikan drainase JL. Hangtuah RT.12 Kel. Selumit	100Mx1,5M	50,000,000	
148	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Drainase Samping rumah Bp.Amansyah s/d rumah Bp. Ibnu Hajar RT.14 Kel. Sebengkok	P : 50 L : 0,60 T : 0,90	100,000,000	
149	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Drainase jl.Pattimura samping SDN Don Bosco RT.15 Kel. Pamusian	P : 160 L : 0,5 T : 0,5	30,000,000	
150	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Pembangunan Drainase Lanjutan menuju sungai Samping pangkalan ojek RT.15 Kel. Sebengkok	Panjang 40 meter Lebar 60 cm Tinggi 60 cm	50,000,000	
151	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Perbaikan drainase JL. Dewi Sartika RT.16 Kel. Selumit	Panjang 40 meter Lebar 60 cm Tinggi 60 cm	50,000,000	
152	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	DRAINASE JL. GN. BLANGKON RT.16 Kel. Kampung Satu	Panjang 50 meter Lebar 50 cm	50,000,000	
153	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	DRAINASE JL. P. NUNUKAN GG JAWA RT.17 Kel. Kampung Satu	30Mx1M	50,000,000	
154	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Penambahan Siring/Dinding Drainase Gang Mesjid Ar- Rahman RT.19 Kel. Sebengkok	Panjang 80 meter Lebar 1,5 meter	100,000,000	
155	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Drainase/Penutup Parit depan Pak Sahrun Jalan Pang. Antasari RT.20 Kel. Pamusian	Panjang 13 meter Tinggi 1 meter	50,000,000	
156	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	lanjutan jembatan dan siring kiri dan kanan dan semenisasi Jalan Imam Bonjol RT.21 Kel. Pamusian	50Mx1M	36,750,000	
157	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Pembuatan siring/drainase GG.Oval 1,3,4 dan 5 Jalan Ladang RT.07 Kel. Pamusian	40 x 40 x 30	200,000,000	
158	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Drainase jalan sumatera depan panti asuhan mawadah warahmah RT.14 Kel. Pamusian	+/- 30m	200,000,000	
159	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Drainase pinggir jalan depan asrama AL Jalan Danau Jempang RT.5 Kel. Pamusian	100 Meter	25,000,000	
160	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Drainase Gang Melati RT.25 Kel. Sebengkok	20 Meter	60,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
161	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Drainase depan Rumah Bapak Suliyanto GG Cakui I Jalan Sulawesi RT.18 Kel. Pamusian	30 M	35,000,000	
162	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	siring parit rusak Jalan Ladang Sawah Lunto RT.08 Kel. Pamusian	1 x 70	40,000,000	
163	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Pembuatan saluran air/Drainase Jalan Ladang Dalam RT.09 Kel. Pamusian	40 Meter	50,000,000	
164	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Siring Parit Jembatan depan rumah Pak H. Ngadino Jalan Kusuma Bangsa RT.24 Kel. Pamusian	1 Titik	60,000,000	
165	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	lanjutan siring jalan di GG Cendrawasih Jalan Kusuma Bangsa RT.25 Kel. Pamusian	Panjang 50 meter	50,000,000	
166	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Pembuatan Drainase Jalan Ladang Dalam RT.26 Kel. Pamusian	Panjang 30 meter	200,000,000	
167	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Drainase Jl.Singosari samping rumah Bpk Fikri Jalan Ronggolawe RT.12 Kel. Pamusian	30Mx20Cmx50Cm	15,067,000	
168	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Drainase/Gorong-gorong GG H.syamsudin Baso RT.31 Kel. Pamusian	Panjang 20 meter	100,000,000	
169	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Drainase Gang Pesut I dan II RT.06 Kel. Sebengkok	Panjang 20 meter	200,000,000	
170	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Pembuatan Tutup Drainase (Plat Dekker) Gang Muksin RT.09 Kel. Sebengkok	Panjang 50 meter	75,000,000	
171	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Drainase RT.13 Kel. Sebengkok	100 M	100,000,000	
172	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Drainase Dari rumah Ibu Sriatun sampai atas gunung RT.34 Kel. Sebengkok	2m x 100 m	75,000,000	
173	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	73Mx50Cmx60Cm		
174	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	50 meter		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
175	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	50 meter		
176	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	P : 6 L : 1,5		
177	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	P : 100 L : 1,5 T : 0,15		
178	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	---		
179	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	50Mx50Cmx50Cm		
180	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	P : 25 L : 1		
181	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	Panjang 80 meter Lebar 1 - 1,5 meter Tinggi/Dalam 40 cm		
182	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	Panjang 50 meter Lebar 1 meter Tinggi/dalam 80 cm		
183	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	Panjang 20 meter Lebar 1 meter Dalam 1 meter		
184	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	Panjang 20 meter Lebar 1 meter Tinggi / dalam 1 meter		
185	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	Panjang 60 meter Lebar 60 cm Tinggi / dalam 80 cm		
186	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	P : 20		
187	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	P : 60		
188	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	P : 15		
189	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	P : 75 Meter		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Keterangan
		Keluaran Kegiatan			Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
190	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	Panjang 30 meter Lebar 2 meter Tinggi 1,5 meter		
191	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	20 x 1		
192	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	100 x 1		
193	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	80Mx50Cmx40Cm		
194	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	800 M		
195	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	92 meter		
196	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	P : 100 L : 0,75		
197	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	60 x 0,7		
198	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	Panjang 135 meter Lebar 25 cm Tinggi 50 cm		
199	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	50 M		
200	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	30 M		
201	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	P : 100 L : 1,5		
202	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	P : 50 L : 1,5		
203	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	P : 100 L : 1,5		
204	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	Panjang 50 meter Lebar 5 meter Duiker Lebar 1 meter		
205	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	100 x 1,5		
206	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	P : 70 Meter L : 50		
207	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	Panjang 10 meter Lebar 75 cm		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
208	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	Stad : 22,50 Skala : 1.200		
209	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	3 Lokasi		
210	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	200 Meter		
211	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	P : 500 Meter L : 150		
212	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	P : 40 Meter L : 1,5		
213	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	150 Meter		
214	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	P : 100 Meter L : 70 T : 90		
215	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	P : 40 Meter L : 20 T : 40		
216	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	P : 60 Meter L : 0,5 Meter		
217	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	P : 50 Meter L : 1		
218	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	P : 30 Meter L : 0,6		
219	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	Panjang 50 meter Lebar 70 cm Tinggi 70 cm		
220	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	P : 17 Meter L : 1,5		
221	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	60 Meter		
222	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	P : 10 Meter L : 0,3		
223	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	P : 80 Meter L : 40 T : 50		
224	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	Volume 35 m3		
225	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	Panjang 50 meter		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Keterangan
		Keluaran Kegiatan			Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
226	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	P : 1,5 Meter L : 125		
227	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	Panjang 100 meter		
228	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	Panjang 50 meter		
229	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	Volume 15 M3		
230	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	Panjang 24 meter Lebar 70 cm		
231	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	lokasi		
232	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	P : 40 Meter L : 50 T : 60		
233	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	P : 100 Meter L : 1,5		
234	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	P kanan : 10 Meter P Kiri : 5 T : 3		
235	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	P : 13 Meter T : 0,5		
236	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	Lingkungan Wilayah RT.26		
237	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	100 x 0,80 meter		
238	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	Panjang 200 meter Lebar 50 cm Tinggi 75 cm		
239	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	Panjang 75 meter Lebar 2 meter		
240	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	Panjang 120 meter Lebar 40 cm		
241	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Tengah)	Normalisasi Drainase	Panjang 50 meter Lebar 50 cm Tinggi 75 cm		
242	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Normalisasi Drainase			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
243	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE PRIORITAS 1 JL.GUNUNG SENTAPE RT.01 Kel. Kampung Enam	MEMINIMALISIR LUAPAN AIR KEJALAN SAAT HUJAN	50,000,000	
244	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE PRIORITAS 2	MEMINIMALISIR POTENSI BANJIR		
245	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE PRIORITAS 3	MEMINIMALISIR POTENSI BANJIR SAAT HUJAN		
246	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	PEMBUATAN DRAINASE LINGKUNGAN JL. PADAT KARYA RT.03 Kel. Kampung Enam	80 M	50,000,000	
247	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	PEMBUATAN SALURAN DRAINASE PRIORITAS 1 RT.04 Kel. Kampung Enam	45 M	50,000,000	
248	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	PEMBUATAN SALURAN DRAINASE JL.PADAT KARYA RT.05 Kel. Kampung Enam	100 M	50,000,000	
249	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	PEMBUATAN SALURAN DRAINASE PRIORITAS 2	100 M		
250	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Cor Lantai parit (Drainase)	Panjang 50 meter Lebar 1,5 meter		
251	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	PEMBUATAN DRAINASE LINGKUNGAN RT.07 Kel. Kampung Enam	60 M	50,000,000	
252	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	PEMBUATAN DRAINASE LINGKUNGAN PRIORITAS 1 RT 9 Kelurahan Kampung Enam	100 M	50,000,000	
253	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	PEMBUATAN DRAINASE LINGKUNGAN PRIORITAS 2	100 M		
254	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	PENAMBAHAN / LANJUTAN SALURAN DRAINASE	15 M		
255	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	PENAMBAHAN DRAINASE PRIORITAS 1 JL.GN.AMAL RT.10 Kel. Kampung Enam	15 M	20,000,000	
256	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	PERBAIKAN DRAINASE PRIORITAS 3	15 M		
257	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	PERBAIKAN DRAINASE PRIORITAS 4	15 M		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
258	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	PERBAIKAN DRAINASE PRIORITAS 2	30 M		
259	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	PERBAIKAN DRAINASE PRIORITAS 5	15 M		
260	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	PERBAIKAN SALURAN DRAINASE PRIORITAS 6	15 M		
261	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	PERBAIKAN DRAINASE LINGKUNGAN PRIORITAS 1 JL. GN AMAL GANG CEMPAKA 1 RT.11 Kel. Kampung Enam	25 M	10,000,000	
262	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	PEMBUATAN DRAINASE DAN GORONG-GORONG PRIORITAS 1	20 M		
263	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Peningkatan Drainase (Prioritas 1) Jalan Palem RT.02 Kel. Lingkas Ujung	Mengatasi masalah air hujan dan limbah	200,000,000	
264	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Pemasangan Penutup Drainase / Plat Dekker (Prioritas 3)	Meningkatkan keamanan dan kesehatan warga		
265	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Drainase Lingkungan. Gang Taka 1 RT 9 Kel. Mamburungan	1 tahun	50,000,000	
266	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Drainase jl. Durian RT.02 Kel. Kampung Empat	P= 30 m	75,000,000	
267	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Drainase samping rumah Markis RT.2 prioritas ke 8	P: 50 m x L: 1 m x T: 1 m		
268	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Drainase Belakang rumah Suherman RT. 2 prioritas ke 9	P: 100 m x L: 1 m x T: 1 m		
269	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Lanjutan drainase gang padi RT.2 prioritas ke 10	P: 100 m x L: 1 m x T: 1 m		
270	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Drainase gang mawar RT. 2 prioritas ke 11	P: 650 m x L: 1 m x T: 1 m		
271	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Drainase gang salak RT.2 prioritas ke 12	P: 100 m x L: 1 m x T:1 m		
272	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Drainase Gang Tapik RT.2 prioritas ke 13	P: 30 m x L: 1 m x T: 1 m		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
273	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Drainase gang bambu RT. 2 prioritas ke 14	P: 100 m x L: 1 m x T: 1 m		
274	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Drainase gang jeruk RT.2 prioritas ke 15	P: 100 m x L: 1 m x T: 1 m		
275	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Drainase gang kelor RT. 2 prioritas ke 16	P: 50 m x L:1 m x T: 1 m		
276	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Drainase RT.8 Kel. Gunung Lingkas	1	50,000,000	
277	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Drainase RT.4 prioritas ke 2	P: 110 m x L: 50 cm x T: 50 cm		
278	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Peningkatan Drainase (Prioritas 1) Pemukiman warga RT. 5 Kel. Lingkas Ujung	Mengatasi masalah banjir dan luapan air limbah	50,000,000	
279	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Drainase RT.7 prioritas ke 2	P: 250 m x L: 50 cm		
280	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Drainase RT. 11 jalan sumur prioritas ke 2	P: 100 m x L: 50 cm x T: 50 cm		
281	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Pembangunan Drainase Lapangan volley (Prioritas 1) Gg. Pahlawan RT. 4 Kel. Lingkas Ujung	Mengatasi masalah luapan air hujan dan limbah	75,000,000	
282	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Drainase RT.12 Kel. Lingkas Ujung	Mengurangi luapan air terutama saat musim hujan	50,000,000	
283	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Drainase RT.13 Kel. Lingkas Ujung	100 M	50,000,000	
284	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	PEMBUATAN SALURAN DRAINASE PRIORITAS 1 JL. GANG LATIMOJONG RT 13 Kel. Kampung Enam	P: 150 m x L: 1 m	50,000,000	
285	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Drainase RT. 8 samping rumah P. Alma - P.Aco prioritas ke 1 Kel. Mamburungan Timur	P: 40 m x L: 40 cm x T: 70 cm	50,000,000	
286	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Drainase RT. 8 samping rumah P.Sam-N.Yuni prioritas ke 2	P: 40 m x L: 40 cm x T: 50 cm		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Keterangan
		Keluaran Kegiatan			Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
287	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Drainase RT.9 sebelah utara kantor Kelurahan Mamburungan Timur prioritas ke 1	P:50 m x L: 1 m x T:1 m	50,000,000	
288	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Drainase RT.9 dekat rumah bapak Irma dan bapak Musnia prioritas ke 2	P: 70 m x L: 0,7 m x T: 0,7 m		
289	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Pembangunan Drainase Lingkungan	Meningkatnya sarana pembuangan air		
290	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Drainase Lingkungan. Asrama Satradar RT 06 (komplek bawah) Kel. Mamburungan	1 tahun	50,000,000	
291	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Drainase RT.3 Kel. Gunung Lingkas	1	50,000,000	
292	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Drainase Lingkungan Jalan Gang Semangka RT 02 Mamburungan Samping Rumah pak rahman	1 tahun	50,000,000	
293	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Drainase lingkungan	1 tahun		
294	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Drainase RT 10 Kel. Gunung Lingkas	100 m	50,000,000	
295	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Drainase Jl. TMD RT 16 Kel. Gunung Lingkas	1	200,000,000	
296	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Drainase RT 2 Kel. Gunung Lingkas	lokasi	50,000,000	
297	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Drainase RT 5 Kel. Gunung Lingkas	1	75,000,000	
298	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Drainase. RT 13 Kelurahan Gunung Lingkas	1	200,000,000	
299	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Drainase RT 1 Jl. Kedondong Kel.Kampung Empat	204m	75,000,000	
300	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Drainase gg . nusa indah 1 RT.03 Kel. Kampung Empat	P= 35 m L= 3 m T= 4m	75,000,000	
301	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Drainase belakang rumah bapak harapan butar- butar RT.04 Kel. Kampung Empat	P= 57 m	85,000,000	
302	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Drainase jl. Nanas RT.05 Kel. Kampung Empat	P= 40 m	75,000,000	
303	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Drainase gg. Nipah RT.09 Kel. Kampung Empat	P= 7 m	90,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
304	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Drainase Gang Dekat Rumah Bapak Wahyu RT.10 Kel. Kampung Empat	0,5 x 0, 4 x 50 m	90,000,000	
305	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Drainase Jl. Tk. Nusa Indah RT.11 Kel. Kampung Empat	P=10 L=0,4 T=0,6	100,000,000	
306	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Drainase Jl. Belimbing/Perumahan Guru RT.13 Kel. Kampung Empat	P=200 m	80,000,000	
307	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Drainase RT.09 Kel. Lingkas Ujung	P=90 m L=0,5 m	200,000,000	
308	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Pembangunan dan Peningkatan Drainase dan pasang plat dekker RT.14 Kel. Lingkas Ujung	Meningkatnya Pembuangan limbah air	200,000,000	
309	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Pembangunan dan Peningkatan Drainase dan pasang plat dekker	Meningkatnya sarana drainase lingkungan		
310	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Pembuatan Drainase (P7) Jl. Binalatung RT.07 Kel. Pantai Amal	1 tahun	50,000,000	
311	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Wilayah Timur)	Pembuatan Drainase (P7)	100 m x 1,5 m		
5	**Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah**	**Jumlah penduduk yang terlayani ipal komunal**	**900**	**300,000,000**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
1	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Meningkatnya penduduk yang terlayani sistem air limbah	3 IPAL	150,000,000	
2	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah	Terpeiharanya sarana dan prasarana air limbah	3 IPAL	150,000,000	
6	**Program peningkatan sarana dan prasarana ke PU an**				**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
1	Operasional UPTD Rusunawa	Terpeliharanya rusunawa dengan baik	2 twin blok		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
7	**Program peningkatan jalan lingkungan perkotaan**	**Prosentase jalan lingkungan yang ditingkatkan**	**100**	**18,786,275,000**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
1	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Gang Jamu Panjang RT. 01 Kel. Kr. Harapan		50,000,000	
2	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	p= 100 m L = 2,5 m		
3	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P 10M, L 4,20M		
4	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	100 m		
5	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Jalanan Rusak Jl. Swarga Gang Keluarga RT.02 Kel. Karang Balik	100M x 3M	50,000,000	
6	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Gang Samping Sumbu Nusantara RT.02 Kel. Karang Anyar	75 x 2 x 0,20 Meter	50,000,000	
7	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi (Jalan/Jembatan dari Kayu) di Gang Swadaya RT 2 (Samping Rumah Ketua RT.2) dengan Volume L=1 P=30 T= 20 (satuan meter/centimeter) PRIORITAS 1 Kel. Karang Rejo	P 85M	50,000,000	
8	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Gg. Bulan RT.63 Kel. Karang Anyar	1 Kegiatan	50,000,000	
9	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Gg. Melati RT.64 Kel. Karang Anyar	1 Kegiatan	50,000,000	
10	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Jl. Bukit Indah RT.68 Kel. Karang Anyar	1 Kegiatan	50,000,000	
11	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi RT.67 Kel. Karang Anyar	P 147M, L 3M	50,000,000	
12	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P 40M		
13	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P 100M		
14	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Perbaikan Jalanan Rusak dan Jalanan Masih Tanah Gang Seruni RT.04 Kel. Karang Balik	P 105M, L 3M, t 15cm	50,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
15	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Jalan Rusak Jl. Dr.Sutomo RT.06	P 135M, L 2,5M. T 15cm	50,000,000	
16	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi jalan miring/rusak disamping rumah Pak Kasim dengan Volume P=31 x 2 (satuan meter) PRIORITAS 1 RT.13 Kel. Karang Rejo	P 100M, L 2M, t 10cm	200,000,000	
17	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Gg. Slamet Riyadi RT. 07 Kel. Karang Anyar	100 Meter	50,000,000	
18	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Gang Taruna RT. 08 Kel. Karang Harapan	3 m x 100	50,000,000	
19	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi RT. 08 samping SD Utama I Kel. Karang Anyar	60m x 3m x 10cm	50,000,000	
20	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	semenisasi Jalan Sarani RT. 09 Kel. Karang Harapan	3m x 80 m	50,000,000	
21	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Jalan Rusak Berat Jl.Dr.Sutomo Gang Jambu RT.09	3 m x 100 m	50,000,000	
22	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	semenisasi jl. Mandiri RT. 12 Kel. Karang Harapan	2 m x 400 m x 1 m	50,000,000	
23	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Gang. 3 RT.12 Kel. Karang Anyar	3 m x 80 m	50,000,000	
24	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Gang Wana Tirta RT. 14 Kel. Karang Harapan	3 m x 200 m	50,000,000	
25	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Gg. Bintang RT.14 Kel. Karang Anyar	35 x 1 Meter	50,000,000	
26	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Jalan dengan Volume P=138 L =2 (satuan meter) PRIORITAS 1 RT.14 Kel. Karang Rejo	1 Kegiatan	50,000,000	
27	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Drainase Jl Anggrek RT. 16 Kel. Karang Anyar	P 150M L 4M	150,000,000	
28	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Pembangunan Jembatan/Semenisasi Jalan Warga RT.16 (Jalan kayu) dengam Volume P=50 (satuan meter) Kel. Karang Rejo	3 m x 70 m	50,000,000	
29	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Jalan Sudirman RT.20 Kel. Karang Anyar	P 50M, L 2M, t 15cm	70,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
30	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Jalan Warga RT.5 dengan Volume P=65, L=4,5 (satuan meter/centimeter) PRIORITAS I Kel. Karang Rejo	200 m x 4 m x 25 cm	50,000,000	
31	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Perbaikan Jalan (Jalan dari kayu) Lingkungan/Semenisasi Wilayah Perbatasan RT.7 dan RT.6 Karang Rejo (PRIORITAS I) RT. 07 Kel. Karang Rejo	200m x 4 m x 20cm	155,480,000	
32	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Jalan Lingkungan Wilayah RT.12 dengan Volume P=63 L=1 (satuan meter) PRIORITAS 1 Kel. Karang Rejo	9000 meter	50,000,000	
33	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Jalan Lingkungan dengan Volume P=60 L=2,90 T= 15 (satuan meter/centimeter) PRIORITAS 1 RT. 9 Kel. Karang Rejo	9000 Meter	50,000,000	
34	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Jl. Anggrek 2 RT.15 Kel. Karang Anyar	100 Meter	100,000,000	
35	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Gang Citra Bangsa RT. 07 Kel. Karang Harapan	2 m x 150 m	50,000,000	
36	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Jalan Rusak dan berlubang Jl. Gang SMAN I - TK Tunas Kasih RT.08 Kel. Karang Balik	4 m x 100 m	50,000,000	
37	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Gang (samping pabrik es, badan jalan saat ini masih tanah) RT.70 Kel. Karang Anyar	P 40M, L 3M	100,000,000	
38	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Gang 8 RT 28 Kel. Karang Anyar	4 m x 100 m	50,000,000	
39	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Jalan Damai RT. 17 Kel. Karang Harapan	2 m x 100 m	50,000,000	
40	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	semenisasi depan SDN 019 RT. 22 Kel. Karang Anyar Pantai	30 m x 2,5 m	50,000,000	
41	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Jalan Samping TP Gang Agathis RT.12 Kel. Karang Balik	P 3M, L 100M	50,000,000	
42	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Gang Trenggalek RT. 12 Kel. Karang Anyar Pantai	1 Kegiatan	50,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
43	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Jalan Tembus RT.16 ke 15 Kel. Karang Balik	P 250M, t 1M	50,000,000	
44	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Gang Kepiting RT. 31 Kel. Karang Anyar Pantai	1 Kegiatan	50,000,000	
45	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Jalan Mulawarman RT. 10 Kel. Karang Anyar Pantai	P 80M, L 1,5M, t15cm	50,000,000	
46	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi RT.15 Kel. Karang Harapan	20 x 3	50,000,000	
47	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Gang Tambak RT. 14 Kel. Karang Anyar Pantai	50 x 2	50,000,000	
48	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Jalan Gajah Mada Gang Anggur RT. 03 Kel. Karang Anyar Pantai	200 m X 2 m	50,000,000	
49	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	semenisasi gang hiu RT 01 Kel. Karang Anyar Pantai	90 x1,50 x 0,20 Meter	50,000,000	
50	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Pembangunan Jembatan Jalan Cendrawasih Gang Malinau RT. 06 Kel. Karang Anyar Pantai	P 114M x 2M x 0,10M	200,000,000	
51	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi RT. 09 Kel. Karang Anyar Pantai	180 m x 3 m	50,000,000	
52	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Jalan Lingkungan Gang Borneo RT. 11 Kel. Karang Anyar Pantai	55 m x 3 m	50,000,000	
53	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Jalan Gang Amal RT. 16 Kel. Karang Anyar Pantai	1 Kegiatan	52,000,000	
54	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi jl. hasanuddin 1 rt 18 Kel. Karang Anyar Pantai	1 Kegiatan	50,000,000	
55	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Jalan Poros RT. 21 Kel. Karang Anyar Pantai	1 Kegiatan	80,000,000	
56	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi RT. 23 Kel. Karang Anyar Pantai	1 Kegiatan	150,000,000	
57	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Gang Udang RT. 25 Kel. Karang Anyar Pantai	1 Kegiatan	50,000,000	
58	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Rehab Jembatan Kayu Gg. Melati 2 RT. 30 Kel. Karang Anyar Pantai	1 Kegiatan	50,000,000	
59	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Gg. Depan Barak Dahlia RT.05 Kel. Karang Anyar	30 m x 3 m	50,000,000	
60	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Gg. Kelimutu RT.10 Kel. Karang Anyar	p= 90 m L= 1,5 m	100,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
61	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Gg. Jeruk Jl. Slamet Riyadi RT.13 Kel. Karang Anyar	P 150M, L 1,5M	50,000,000	
62	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi dan tangga Gg. Kenari RT.22 Kel. Karang Anyar	1 Kegiatan	80,000,000	
63	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Gg. Senangin RT.26 Kel. Karang Anyar	P 250M, L 2M	150,000,000	
64	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Gg. Raga RT.27 Kel. Karang Anyar	P 37M, L 2,5M	150,000,000	
65	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Jl. Flamboyan RT. 32 Kel. Karang Anyar	4 m x 100 m	80,000,000	
66	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi RT. 33 Perumahan Bandara Kel. Karang Anyar	1 kegiatan	100,000,000	
67	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Gg. Keminci II RT.34 Kel. Karang Anyar	50 M x 1,3 M	50,000,000	
68	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi di setiap titik yang rusak RT.35 Kel. Karang Anyar	150 x 2 Meter	150,000,000	
69	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Jl. Kenanga Depan Masjid Darussalam RT.36 Kel. Karang Anyar	4 m x 200 m	50,000,000	
70	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi (pelapisan jalan/gang daerah banjir) Jl. Seroja RT. 37 Kel. Karang Anyar	P 40M, L 2,5M	150,000,000	
71	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Jalan Umum Alternatif RT. 38 Kel. Karang Anyar	50 X 1,3 Meter	80,000,000	
72	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Gg. Jemb. Kuning RT.38 Kel. Karang Anyar	3 m x 100 m	50,000,000	
73	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Gg. Buntu Jl. Mulawarman RT.41 Kel. Karang Anyar	90 x 4 Meter	100,000,000	
74	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi RT. 42, Timur Gg. Anang Atjat Kel. Karang Anyar	P 250M, L 2,5M, t 10cm	50,000,000	
75	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Gg. Radiator RT.45 Jl. Bersama I Kel. Karang Anyar	P 50M, L 1M	100,000,000	
76	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi jalan yang putus arah Gg. Abo Jl.Wijaya Kusuma I RT.46 Kel. Karang Anyar	4 m x 80 m	150,000,000	
77	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Gg. Abo RT.48 Kel. Karang Anyar	150 m x 1,5 m	100,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
78	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi RT.49 Kel. Karang Anyar	150 m x 1,5 m	50,000,000	
79	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Perbaikan Jalan wijaya kusuma VII (peninggian jalan belokan ke Gang SD 041) RT.52 Kel. Karang Anyar	100 m x 1,5 m	50,000,000	
80	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Gg. Swakarya RT.57 Kel. Karang Anyar	P 40M, L 2,5M	50,000,000	
81	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Jl.Matahari Gg. 5 RT.62 Kel. Karang Anyar	P 200M, L 3M	50,000,000	
82	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Jl. Teratai (Depan Pak Badara) RT.65 Kel. Karang Anyar	P 250M, L 2,5M, t 0,15M	50,000,000	
83	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Gg. Mega RT.66 Kel. Karang Anyar	P 70M, L 1,5M	50,000,000	
84	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi dan Siring Jalan Swarga RT.03 Kel. Karang Balik	20 Meter	40,000,000	
85	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Jalan Gang Sentosa dan Gang Golkar RT.11 Kel. Karang Balik	170 m x 2 m	50,000,000	
86	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Gang Rimbun Sari Delima II RT.14 Kel. Karang Balik	P 60M, L 1M	50,000,000	
87	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Jalan RT.15 Kel. Karang Balik	200 M	50,000,000	
88	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Gang dari Samping Perusahaan J&T sampai dengan Kantor Pajak Tarakan Jl. Jembatan Putih nRT.17 Kel. Karang Balik	50M	50,000,000	
89	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi RT 10 Kel. Karang Harapan	70 m x 3 m	50,000,000	
90	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Semenisasi Gang Tiba Bija RT. 16 Kel. Karang Harapan	150 Meter	50,000,000	
91	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	200 m x 3 m		
92	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P 84M, L 2,5M, t 10cm		
93	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	4 m x 100 m		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
94	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	50 m x 2 m		
95	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	4 m x 2 m		
96	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	2 m x 70 m		
97	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	2 m x 120 m		
98	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P 50M, L1M		
99	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 Kegiatan		
100	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	200 m x 3 m		
101	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	3 m x 150 m		
102	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	150 m x 4 m		
103	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P= 90 m L= 1,5 m		
104	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	2 m x 100 m		
105	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	p= 50 m l= 3 m		
106	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	p= 50 m l= 3 m		
107	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	140 m x 4 m		
108	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	3 m x 50 m		
109	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	150 m X 1 m X 10 cm		
110	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	100 m		
111	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	lokasi		
112	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	200 m x 2 m		
113	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	100 m X 1,5 m X 1 m		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
114	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	150 m x 2 m x 10 cm		
115	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	150 m x 1,5 m		
116	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	185 m x 3 m		
117	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	70 m x 2m		
118	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	50 m x 4 m x 20 cm		
119	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	100 m x 4 m		
120	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	100 m x 2 m		
121	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	150 m x 2 m		
122	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P 55M, L 3M, t 0,15M		
123	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P 135M, L 2,5M, t 0,10M		
124	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P 90M, L 2,5M		
125	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 kegiatan		
126	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P 50M, L 1M		
127	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P 120M, L 1,5M		
128	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P 200M, L 1,5M		
129	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P 50M, L 1M		
130	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P 110M, L 1,5M		
131	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	183.825 M3		
132	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P 30, L 1,50M, t 0,10M		
133	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 kegiatan		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Keterangan
		Keluaran Kegiatan			Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
134	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P 50M, L 2M, t 7cm		
135	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P 200M, L 2M, t 10cm		
136	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P 100M, L 2,5M, t 10cm		
137	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P 50M, L 3M,		
138	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P 200M, L 2M, t 0,10M		
139	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P 30M, L 1M, t 0,12M		
140	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P 150M, L 3M		
141	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P 20M, L 5M		
142	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P 200M, L 2,5M, t 10cm		
143	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P 33M, L 3M, t 15cm		
144	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P 20M x 5M x 10cm		
145	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	50M3		
146	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P 64M, L 3M		
147	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P 45M, L 4M		
148	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P 50M, L 3M		
149	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	20,3 Meter		
150	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	100 Meter		
151	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	150M X 80Cm X 10Cm		
152	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	180 X 2 X 0,10 Meter		
153	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	132M x 2M x 5Cm		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
154	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	3 m x 150 m		
155	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Barat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	3 m x 200 m		
156	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	SEMENISASI JALAN LINGKUNGAN PRIORITAS 1 RT.02 Kel. Kampung Enam		50,000,000	
157	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	SEMENISASI JALAN LINGKUNGAN PROIRITAS 1 BELAKANG KLK JL.GUNUNG TEMBAK RT.06 Kel. Kampung Enam	MEMUDAHKAN MOBILITAS WARGA SEKITAR	50,000,000	
158	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	SEMENISASI JALAN LINGKUNGAN JL GN. SEPULUH RT.8 Kel. Kampung Enam	MEMUDAHKAN MOBILITAS WARGA SEKITAR	50,000,000	
159	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	SEMENISASI JALAN LINGKUNGAN Jl. Gunung STIE RT.14 Kel. Kampung Enam	100MX2M	50,000,000	
160	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	SEMENISASI JALAN LINGKUNGAN PRIORITAS 1 JL. MESJID ARROHIM RT.15 Kel. Kampung Enam	P: 100 m x L: 1 m	50,000,000	
161	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi Jalan Lingkungan (P2) Jalan Menuju Pekuburan RT. 02 Kel. Pantai Amal	145 M X 1.65 M	50,000,000	
162	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi jalan gang salak RT. 2. Prioritas ke 1 Kel. Mamburungan Timur	75 M	50,000,000	
163	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi jalan RT. 4 prioritas ke 1 Kel. Mamburungan Timur	50 M	50,000,000	
164	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi Jalan Lingkungan (Prioritas 1) Gang Melona RT.06 Kel. Lingkas Ujung	100 M	125,000,000	
165	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi jalan RT.7 Prioritas ke 1 Kel. Mamburungan Timur	30 M	50,000,000	
166	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi Jalan Setapak (Prioritas 1) RT.03 Kel. Lingkas Ujung	P : 100 L : 0,5 T : 0,70	50,000,000	
167	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi RT. 3 prioritas ke 1 Kel. Mamburungan Timur	100 M	50,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
168	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi jalan RT. 11 jalan utama Sei. Mentogog prioritas ke 1 Kel. Mamburungan Timur	50 M	50,000,000	
169	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi (siring dan timbun)(Prioritas I) RT.18 Kel. Lingkas Ujung	50 m x 3 m	200,000,000	
170	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi Jalan menuju kuburan. Prioritas 1 RT.01 Kel.Mamburungan Timur	Memudahkan mobilitas warga dan meningkatkan keamanan pengguna jalan	50,000,000	
171	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi Jalan Lingkungan (Prioritas 1) RT 01 Belakang Kantor Lurah Lingkas Ujung	P: 100 m x L: 4 m	150,000,000	
172	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Pembangunan Siring dan Penimbunan Jalan (Prioritas 1) RT.10 Kel. Lingkas Ujung	P: 50 m x L: 4 m	200,000,000	
173	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi jalan RT.10 depan rumah pak wiji prioritas ke 1 Kel. Mamburungan Timur	P: 650 m x L: 4 m	50,000,000	
174	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi Jalan Lingkungan (P1) Jl. Padat Karya RT.01 Kel. Pantai Amal	P: 100 m x L: 4 m	50,000,000	
175	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi jalan RT. 6 prioritas ke 1 Kel. Mamburungan Timur	P: 100 m x L: 4 m	50,000,000	
176	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi Jalan Lingkungan Jl. Binalatung RT.06 Kel. Pantai Amal	P: 30 m x L: 2 m	50,000,000	
177	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi jalan Depan rumah bapak Bahluan sampai depan rumah ibu Salamah RT 01 Kel. Mamburungan	P: 150 m x L: 2,5 m	50,000,000	
178	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Ulinisasi Jl. Tanjung Pasir RT 17 Kel. Mamburungan	Meningkatnya kualitas jalan dan keselamatan pengguna jalan	50,000,000	
179	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi Gang Alias RT.12 Kel. Kampung Empat	Meningkatnya kualitas Jalan	75,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
180	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi Wilayah RT.01 Kel. Gunung Lingkas	Meningkatnya sarana prasarana jalan umum	90,000,000	
181	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi jl. Delima RT.06 Kel. Kampung Empat	P: 250 m x L: 4 m	75,000,000	
182	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi Jalan Lingkungan Jl. Binalatung RT.13 Kel. Pantai Amal	Meningkatkan keamanan pengguna jalan	50,000,000	
183	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi jalan Jl. Tanjung Pasir RT 20 Kel. Mamburungan	Meningkatkan keamanan Jalan Lingkungan	50,000,000	
184	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi jalan. Jl, Gang Binjai RT 03 Kel. Mamburungan	P: 1.500 m x L: 3 m x T: 0,12 m	50,000,000	
185	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi jalan. Asrama Kompi C RT 04 Kel. Mamburungan	P: 150 m x L: 3 m	50,000,000	
186	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi jalan. Jl. Gang Usman RT 05. Kel. Mamburungan	Meningkatnya sarana jalan umum	50,000,000	
187	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi jalan. Jl. Gang Kebun Salak RT 07. Kel. Mamburungan	L: 2 m x P: 50 m	50,000,000	
188	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi jalan. Jl. Sei, Sembakung RT 08 samping rumah. Kel. Mamburungan bapak Muhammad	Meningkatkan kualitas jembatan dan keamanan pengguna	50,000,000	
189	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi Jalan Lingkungan Gang Polmas RT.05 Kel. Pantai Amal	Kelancaran mobilitas dan keamanan pengguna jalan	50,000,000	
190	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi jalan. Jl. Gang Talang - talang RT 10 Kel. Mamburungan samping rumah baak Dedi Abdullah	Meningkatnya kualitas jalan lingkungan	50,000,000	
191	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi. RT.9 Gang Masjid. Kelurahan Gunung Lingkas	P: 40 m x L: 1,5 m	50,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Keterangan
		Keluaran Kegiatan			
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
192	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi jalan. Jl. Gang Apon samping rumah bapak riswan sampai depan rumah abdul latif RT. 04 Kel. Mamburungan	P: 150 m x L: 1 m	50,000,000	
193	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi Jl. Bengkirai Gang 1 RT.04 Kel. Gunung Lingkas	60 m x 2 m	50,000,000	
194	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi. RT.6 Gang Bambu. Kelurahan Gunung Lingkas	P: 40 m x L: 2 m	105,000,000	
195	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi. RT.7 Gang Pancuran. Kelurahan Gunung Lingkas	60 m x 2,5 m	75,000,000	
196	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Siring RT 11 Kelurahan Gunung Lingkas	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Jalan	200,000,000	
197	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi. RT.12 Kelurahan Gunung Lingkas	1 tahun	200,000,000	
198	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi. RT.14 Kelurahan Gunung Lingkas	1 tahun	150,000,000	
199	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi. RT.15 Kelurahan Gunung Lingkas	1,5 x 100 m	75,000,000	
200	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi jl.belimbing RT.07 Kel. Kampung Empat	60 m3	100,000,000	
201	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi jl.sei sesayap belakang gedung KNPI RT.08 Kel. Kampung Empat	Meningkatnya Srapras Jalan Lingkungan	100,000,000	
202	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Peningkatan Jembatan 3 (Prioritas I) RT.07 Kel. Lingkas Ujung	P= 50 m L= 5 m Tebal + 10 cm	150,000,000	
203	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Jembatan Ulinasi Depan Rumah Aris RT.08 Kel. Lingkas Ujung	Meningkatnya sarana prasarana jalan	200,000,000	
204	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi Jalan Lingkungan Disamping panti Al Marahamah RT.11 Kel. Lingkas Ujung	40 m x 3,5 m	50,000,000	
205	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi RT.15 Kel. Lingkas Ujung	Meningkatnya sarana jalan	150,000,000	
206	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi Jalan menuju sungai RT.16 Kel. Lingkas Ujung	1 tahun	90,000,000	
207	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi Depan SD Al-Hilal RT.17 Kel. Lingkas Ujung	1 tahun	115,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
208	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi jalan. Jl. Gang Mandar RT 13 depan rumah ibu Hartati sampai depan rumah bapak Yakub. Kel. Mamburungan	1 tahun	50,000,000	
209	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Jalan lingkungan (ulinisasi) Jl. Gang Hj. Nuraini RT 12 Kel. Mamburungan	1 tahun	50,000,000	
210	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi jalan. Samping mesjid Baitul Makmur sampai depan rumah bapak Sukri RT 14. Kel. Mamburungan	1 tahun	25,000,000	
211	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi jembatan Jl. Muara Karungan RT 16 Kel. Mamburungan	1 tahun	50,000,000	
212	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Ulinisasi jembatan. Jl. Gang Mawar RT 22 Tanjung Batu. Mamburngan	1 tahun	50,000,000	
213	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi jalan. samping rumah bapak Hendrik samapi rumah bapak Salim RT 15. Kel. Mamburungan	50 m x 3 m	50,000,000	
214	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Ulinisasi jembatan Samping rumah bapak Baharuddin RT 18 Tanjung Pasir Kel. Mamburungan	1 tahun	50,000,000	
215	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi Jalan Lingkungan (P4) Jl. Binalatung RT.10 Kel. Pantai Amal	2002m	50,000,000	
216	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi Jalan Lingkungan (P5) Jl. Binalatung RT.12 Kel. Pantai Amal	1 tahun	50,000,000	
217	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi Jalan Arah mesjid Baitul Amin RT 21 Kel. Mamburungan	meningkatnya sarana prasarana jalan	50,000,000	
218	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi Jalan Depan rumah bapak Ismail Tanjung Batu RT 23 Kel. Mamburungan	lokasi	50,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
219	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Semenisasi Jalan Lingkungan (P10) Jl. Binalatung RT.15 Kel. Pantai Amal	44220m	50,000,000	
220	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Panjang Jalan yang ditingkatkan	2001,50,20m		
221	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Panjang Jalan yang ditingkatkan	2002,20m		
222	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1		
223	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Panjang Jalan yang ditingkatkan	2503,5m		
224	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Panjang Jalan yang ditingkatkan	602m		
225	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1002		
226	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P= 570 m		
227	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P= 160 m L= 5 m		
228	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Panjang Jalan yang ditingkatkan	Meningkatnya sarana prasarana jalan		
229	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Panjang Jalan yang ditingkatkan	Meningkatnya Sarana Jalan Lingkungan		
230	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Panjang Jalan yang ditingkatkan	Meningkatnya kualitas jalan lingkungan		
231	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Panjang Jalan yang ditingkatkan	Meningkatnya pembuangan limbah air		
232	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Panjang Jalan yang ditingkatkan	Meningkatnya sarana jalan umum		
233	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Panjang Jalan yang ditingkatkan	Meningkatnya sarana jalan		
234	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Panjang Jalan yang ditingkatkan	Peningkatan sarana jalan		
235	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 tahun		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
236	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 tahun		
237	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 tahun		
238	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 tahun		
239	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 tahun		
240	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 tahun		
241	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 tahun		
242	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Panjang Jalan yang ditingkatkan	75 m x 2 m		
243	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Panjang Jalan yang ditingkatkan	75 m x 2 m		
244	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Panjang Jalan yang ditingkatkan	75 m x 2 m		
245	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Panjang Jalan yang ditingkatkan	75 m x 2 m		
246	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Panjang Jalan yang ditingkatkan	75 m x 2 m		
247	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Panjang Jalan yang ditingkatkan	75 m x 2 m		
248	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Panjang Jalan yang ditingkatkan	75 m x 2 m		
249	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Panjang Jalan yang ditingkatkan	65 m x 2 m		
250	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Panjang Jalan yang ditingkatkan	65 m x 2 m		
251	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Panjang Jalan yang ditingkatkan	65 m x 2 m		
252	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Timur	Panjang Jalan yang ditingkatkan	65 m x 2 m		
253	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Perbaikan jalan lingkungan RT.01 Kel. Selumit Pantai		50,000,000	
254	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Semenisasi Depan rumah RT s/d rumah Hj. Nuru RT.1 Kel. Sebengkok	p= 44 m x L=2 m	15,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
255	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Semenisasi Gg. Jati RT.17 Kel. Sebengkok	Panjang 15 meter Lebar 1 meter	133,000,000	
256	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Semenisasi Jl. Gg. Kedondong, samping Hotel Tarakan Plaza RT.01 Kel. Selumit	60Mx2,5Mx10Cm	50,000,000	
257	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Semenisasi jalan GG lopulalang Jalan P.Diponegoro RT.01 Kel. Pamusian	Panjang 15 meter Lebar 1 meter	50,000,000	
258	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	SEMENISASI GG. MELATI RT.01 Kel. Kampung Satu	70Mx1,2Mx10Cm	50,000,000	
259	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.02 Kel. Selumit Pantai	25Mx1,5M	50,000,000	
260	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Semenisasi Jl. Adityawarman RT.02 Kel. Selumit	P : 200 L : 1,5 T : 0,10	100,000,000	
261	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Perbaikan Jalan Lingkungan RT.03 Kel. Selumit Pantai	75 Meter	50,000,000	
262	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Semenisasi Gg. Srikaya 1 RT.03 Kel. Selumit	P : 60 L : 1,5 T : 0,15	150,000,000	
263	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	SEMENISASI JL. P NIAS (GG. RUKUN) RT.03 Kel. Kampung Satu	67 x 2,5	50,000,000	
264	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Semenisasi Jl. Kh.Agus Salim RT.04 Kel. Selumit	200Mx1,2Mx10Cm	35,000,000	
265	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	SEMENISASI JALAN P. NIAS RT.04 Kel. Kampung Satu	1.5 x 70 m	50,000,000	
266	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Semenisasi Jl. Adityawarman RT.05 Kel. Selumit	112Mx3Mx10CM	100,000,000	
267	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	SEMENISASI GG. PAKUWAJA RT.05 Kel. Kampung Satu	2m x 30m	50,000,000	
268	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	perbaikan Jalan Lingkungan (Ulinisasi) RT.06 Kel. Selumit Pantai	50 m	50,000,000	
269	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Semenisasi Jl. Kh. Agus Salim RT.06 Kel. Selumit	320Mx3Mx10Cm	50,000,000	
270	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	SEMENISASI JL P FLORES (DEPAN RUMAH BPK ARIFIN) RT.06 Kel. Kampung Satu	P : 50 L : 3 T : 0,15	50,000,000	
271	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Perbaikan Jalan Lingkungan berupa Pelebaran Jalan RT.07 Kel. Selumit Pantai	60Mx2Mx10Cm	50,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
272	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Semenisasi Jl. Kh. Agus Salim RT.07 Kel. Selumit	P : 30 L : 2,5 T : 0,15	50,000,000	
273	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	SEMENISASI GG. DAMAI RT.07 Kel. Kampung Satu	94,10Mx3,20Mx10Cm	50,000,000	
274	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	SEMENISASI JL.P.FLORES RT 08 Kel. Kampung Satu	P : 40 L : 2 T : 0,12	50,000,000	
275	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Semenisasi Jl. Kh. Agus Salim RT.09 Kel. Selumit	P : 65 L : 2 T : 0,12	100,000,000	
276	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	SEMENISASI GN SALAK (JL. GN SLIPI RT 09) RT 09 Kel. Kampung Satu	P : 65 L : 2 T : 0,12	50,000,000	
277	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Semenisasi Jl. Hangtuah RT.10 Kel. Selumit	P : 65 L : 2 T : 0,12	200,000,000	
278	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Semenisasi jalan menuju kuburan RT. 11 Kel. Sebengkok	25m x3m	150,000,000	
279	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Perbaikan Jalan Lingkungan RT.11 Kel. Selumit Pantai	94,10Mx3,20Mx10Cm	50,000,000	
280	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Perbaikan Jalan Lingkungan RT.12 Kel. Selumit Pantai	P : 50 L : 1,5 T : 0,15	50,000,000	
281	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Semenisasi Gg. Jeruju RT.12 Kel. Sebengkok	P : 50 L : 3 T : 0,5	75,860,000	
282	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	SEMENISASI LANJUTAN GG ASOKA RT.12 Kel. Kampung Satu	P : 100 L : 1,5 T : 0,15	50,000,000	
283	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Semenisasi Gn. Daeng RT.14 Kel. Selumit	P : 100 L : 1,5 T : 0,15	60,000,000	
284	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Perbaikan Jalan Lingkungan RT.15 Kel. Selumit Pantai	P : 80 L : 3 T : 0,2	50,000,000	
285	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Semenisasi Jl. Kh. Agus Salim RT.15 Kel. Selumit	100mx3.5m	200,000,000	
286	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	SEMENISASI JALAN GN SLIPI RT.15 Kel. Kampung Satu	120mx1,20m	50,000,000	
287	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Pelebaran jalan/Gang Depan rumah Bp. Mustamin RT. 16 Kel. Sebengkok	67,80x2,30M	25,000,000	
288	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Perbaikan Jalan Lingkungan RT.17 Kel. Selumit Pantai	P : 200 L : 2 T : 0,15	50,000,000	
289	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Semenisasi Gang Gembira (Belakang) RT.18 Kel. Sebengkok	P : 200 L : 2 T : 0,15	10,000,000	
290	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	SEMENISASI GG. SYUKUR 1 RT.18 Kel. Kampung Satu	P : 250 L : 2 T : 0,15	50,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
291	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	SEMENISASI GG. ANGGUR RT.19 Kel. Kampung Satu	100Mx2,5M10Cm	50,000,000	
292	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Rehab Jalan Lingkungan RT.19 Kel. Selumit Pantai	P : 100 L : 2,5 T : 0,15	50,000,000	
293	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Pembuatan Jalan Lingkungan(Jembatan) RT.20 Kel. Selumit Pantai	600 Meter	50,000,000	
294	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Semenisasi Terusan jalan cendana dari arah samping pengadilan RT.20 Kel. Sebengkok	30 x 2	150,000,000	
295	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Pembuatan Jalan Lingkungan RT.21 Kel. Selumit Pantai	40 Meter	50,000,000	
296	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Perbaikan Jalan Lingkungan RT 04 Kel. Selumit Pantai	750 x 9	50,000,000	
297	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Perbaikan jalan semenisasi Gang Kabulatif dan Gang Camat RT.21 Kel. Sebengkok	190Mx4Mx10Cm	200,000,000	
298	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	SEMENISASI JL. P BANDA GG TIMOR RT.21 Kel. Kampung Satu	50 x 1,5	50,000,000	
299	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Semenisasi ulang jalan jembatan Pasar Sebengkok RT.02 Kel. Sebengkok	100 Meter	130,000,000	
300	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Jalan tembusan dengan RT.05 Jalan Danau Jempang RT.3 Kel. Pamusian	200m	200,000,000	
301	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Semenisasi jalan dekat rumah bapak H Amiruddin Jl. Jend Sudirman RT.4 Kel. Pamusian	35,50Mx1,5Mx10Cm	10,000,000	
302	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Perbaikan Jalan Lingkungan RT.05 Kel. Selumit Pantai	P : 160 L : 3 T : 0,15	50,000,000	
303	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Semenisasi GG. Bangsal 1-2 Jalan Pang. Antasari RT.11 Kel. Pamusian	P : 200 L : 3 T : 0,15	35,000,000	
304	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Semenisasi sepanjang jalan samping Diskes Jalan Panglima Batur RT.13 Kel. Pamusian	P : 100 L : 4 T : 0,15	70,000,000	
305	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Perbaikan jalan (semenisasi) Gang Anggrek (Bawah) RT.22 Kel. Sebengkok	P : 100 L : 4 T : 0,15	50,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
306	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Semenisasi jalan sukarlamfani RT.29 Kel. Pamusian	P : 50 L : 2 T : 0,15	30,000,000	
307	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Perbaikan Jalan Lingkungan RT.25 Kel. Selumit Pantai	200m	50,000,000	
308	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Pembuatan Jalan Ulinisasi RT.18 Kel. Selumit Pantai	126Mx150M	50,000,000	
309	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Semenisasi Gn. Daeng RT.13 Kel. Selumit	34,94 M3	25,000,000	
310	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Perbaikan Jalan Lingkungan RT.29 Kel. Selumit Pantai	P : 158 L : 4 T : 0,15	50,000,000	
311	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Semenisasi Panjang Gang 45 RT.32 Kel. Sebengkok	1 Unit 3.5 x12	100,000,000	
312	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Pengasapalan Ulang dari TK Hang Tuah dan Gapura Mess dan Jl danau Jempang s/d Gapura Samping Gudeg Bu Harman	97Mx2Mx10Cm	200,000,000	
313	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Semenisasi jalan GG merpati arah gunung Jalan Danau Jempang RT.06 Kel. Pamusian	Panjang 50 meter Lebar 3 meter	52,000,000	
314	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Semenisasi jalan gang etam 5 Jalan Pattimura RT.16 Kel. Pamusian	P : 100 L : 1,5 T : 10 cm	200,000,000	
315	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Semenisasi Jalan rusak Pasar Lama Jalan Pattimura RT.17 Kel. Pamusian	P= 200m L= 3.5 m L=	50,000,000	
316	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Semensasi Jalan Gang Jalan Pang. Antasari RT.19 Kel. Pamusian	600Mx3M	43,750,000	
317	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Lanjutan Semenisasi GG.4 Jalan Imam Bonjol RT.22 Kel. Pamusian	P : 300 L : 4 T : 0,15	50,000,000	
318	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Semenisasi Jalan GG Pasar Lama,Makam Jepang Jalan Imam Bonjol RT.23 Kel. Pamusian	P : 40 L : 3 T : 0,15	25,000,000	
319	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Semenisasi jalan Jalan Pang. Antasari RT.30 Kel. Pamusian	P : 50 L : 3 T : 0,15	30,000,000	
320	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Semenisasi Samping rumah penjual Gado- gado RT.04 Kel. Sebengkok	P : 300 L : 4 T : 0,15	15,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
321	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Semenisasi belakang rumah Bp Zakaria RT. 08 Kel. Sebengkok	P : 100 L : 3 T : 0,15	40,000,000	
322	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Perbaikan dan pengaspalan/Semenisasi Gang Meranti depan BPJS RT. 23 Kel. Sebengkok	Panjang 50 meter	150,000,000	
323	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Semenisasi Sekitar rumah Jumriah, Misdi dan Suwandi RT. 26 Kel. Sebengkok	100 M	21,685,000	
324	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Semenisasi Dari rumah bpk. misiran s/d rumah bpk. Fadli RT.27 Kel. Sebengkok	P= 20m L= 2m	50,000,000	
325	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Semenisasi Belakang rumah Bp. Junaidi RT.28 Kel. Sebengkok	P=5m L=2.5m	37,500,000	
326	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Semenisasi RT.29 Kel. Sebengkok	Panjang 42 meter Lebar 4 meter	100,000,000	
327	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Semenisasi RT.30 Jl. Samping Lap. Voley tembus SDN.001 Selumit Kel. Sebengkok	Panjang 35 meter Lebar 1 meter	100,000,000	
328	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Semenisasi akses jalan umum Perbatasan RT. 33 dan RT. 9 Kel. Sebengkok	P : 80 L : 3 T : 0,15	100,000,000	
329	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Perbaikan dan Pembuatan Jalan Lingkungan RT.13 Kel. Selumit Pantai	P : 50 L : 3 T : 0,15	50,000,000	
330	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Rehab Jalan Lingkungan berupa Jembatan RT.16 Kel. Selumit Pantai	P : 50 L : 3 T : 0,15	50,000,000	
331	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Perbaikan Jalan Lingkungan RT.22 Kel. Selumit Pantai	P : 400 L : 3 T : 0,15	50,000,000	
332	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Rehab Jalan Lingkungan(Jembatan) RT.23 Kel. Selumit Pantai	Panjang 50 meter Lebar 2,5 meter Tebal 15 cm	50,000,000	
333	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Perbaikan Jalan Lingkungan RT.24 Kel. Selumit Pantai	Panjang 60 meter Lebar 1 meter Tebal 15 cm	50,000,000	
334	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Perbaikan Jalan Lingkungan RT.26 Kel. Selumit Pantai	P=20m L=2	50,000,000	
335	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Perbaikan Jalan Lingkungan RT.28 Kel. Selumit Pantai	P : 50 L : 5 T : 0,15	50,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
336	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P=13m L=2m T=3m		
337	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P=13 L=2m T=3m		
338	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	50 Buah		
339	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	Panjang 136 meter lebar 3 meter		
340	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	Panjang 67 meter Lebar 3 meter		
341	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P : 100 L : 3 T : 0,15		
342	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P : 50 Meter L : 2		
343	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P : 100 Meter L : 2 T : 0,2		
344	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	30 x 1,5		
345	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P=50 L=2m		
346	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P=60m L=2m		
347	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	Panjang 260 meter		
348	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	Stad : 130,00 Skala : 1.200		
349	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P : 200 L : 3 T : 0,10		
350	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	Panjang 350 meter Lebar 3,75 meter		
351	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	336,5 meter		
352	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	150Mx2Mx10Cm		
353	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P : 237 Meter L : 4 Cm		
354	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P : 35 Meter L : 4 Cm		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
355	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P : 30 Meter L : 4 Cm		
356	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P : 30 Meter L : 4 Cm		
357	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P : 2,5 L : 50		
358	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P : 30,30 Meter L : 2,5		
359	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P : 50 Meter L : 4		
360	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P : 62,5 Meter L : 8,60		
361	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	32,30x2x10Cm		
362	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P = 200m L = 4m		
363	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	88,20Mx1,7M		
364	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P : 15 Meter L : 2,5		
365	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P : 250 L : 2		
366	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	100 Meter		
367	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	Panjang 150 meterLebar 3 meter Tebal 5 cm		
368	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P : 1,2 Meter L : 25		
369	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	Panjang 100 meter Lebar 1 meter		
370	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	100 Meter		
371	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P : 50 Meter L : 3		
372	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P : 75 Meter L : 2,5		
373	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P : 1,50 Meter L : 2,5		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
374	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P : 1,50 Meter L : 2,5		
375	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P : 40 Meter L : 3,5 T : 15		
376	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	Panjang 100 meter Lebar 1,5 meter		
377	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P= 40m L=2m		
378	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	Panjang 60 meter		
379	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	Panjang 200 meter Lebar 120 cm		
380	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P = 40 m L = 2 m		
381	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	Panjang 100 meter Lebar 3 meter		
382	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	Panjang 50 meter		
383	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	31Mx25Cmx10Cm		
384	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P=100m L=2m		
385	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	Panjang 166 meter Lebar 2,75 meter		
386	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	lokasi		
387	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P : 200 L : 2 T : 0,15		
388	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P : 200 L : 2 T : 0,15		
389	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P : 200 L : 2 T : 0,15		
390	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P : 200 L : 2 T : 0,15		
391	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P : 200 L : 2 T : 0,15		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
392	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P : 200 L : 2 T : 0,15		
393	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P : 200 L : 2 T : 0,15		
394	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P : 120 Meter L : 150 Cm		
395	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P : 17,60 Meter		
396	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P : 120 Meter L : 3,5		
397	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P : 110 Meter L : 2,30		
398	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P : 250 Meter L : 3 T : 10		
399	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P : 3 Meter L : 100		
400	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P : 30		
401	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	25 x 1,5		
402	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	Panjang 15 meter Lebar 1 meter Tebal 15 cm		
403	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	20 meter		
404	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	Panjang 150 meter Lebar 3 meter		
405	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	Panjang 45 meter Lebar 1,5 meter Tinggi 12 cm		
406	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	Panjang 50 meter Lebar 3 meter		
407	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	Panjang 55 meter		
408	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	Volume 30 M3		
409	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	Panjang 100 meter		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
410	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	Panjang 100 meter Lebar 1,5 meter		
411	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P = 90m L = 2m		
412	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P = 150m L = 2m		
413	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	26mx1.30		
414	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P = 60m L= 2m		
415	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P=100 L=2m		
416	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	50m		
417	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P=200m L=4m		
418	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P=100m L=4m		
419	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P=90m L=2m		
420				990,000,000	
421	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	Panjang Jalan yang ditingkatkan			
422	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	DRAINASE GG MASJID AL - MUTAQIN	100 M		
423	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	PENINGAKATAN JALAN SEMENISASI	100 M		
424	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	Semenisasi Jalan Gang Sungai Embung Bengawan RT. 2 Kel. Juata Kerikil	185 m x 1,5 m	50,000,000	
425	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	perbaikan jalan (Semenisasi) BTN INTRACA RT.03 Kel. Juata Permai	500 M	50,000,000	
426	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	Semenisasi Gang 2 RT.3 Kel. Juata Laut	P.60 m x L.2 m	50,000,000	
427	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	PERBAIKAN JALAN SEMENISASI	4 M x 50 M		
428	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	Semenisasi Gang Melati RT. 5 Kel. Juata Laut	P. 70 m x L. 2 m	50,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
429	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	Semenisasi Jalan Jl. Bukit Pasir RT. 6 Juata Kerikil	2 m x 200 m	50,000,000	
430	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	Semenisasi Jalan Jl. Nuri RT.7 Kel Juata Kerikil	100 m x 4 m	50,000,000	
431	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	SEMENISASI GANG 1 SAMPAI 5 BTN INTRACA RT.07 Kel. Juata Permai	5 M x 3 M x 6 M	50,000,000	
432	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	PERBAIKAN JALAN GANG RAWA 1 & 2	3 M x 150 M x 2 M		
433	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	PERBAIKAN JALAN LINGKUNGAN BTN INTRACA RT.08 Kel. Juata Permai	300 M	50,000,000	
434	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	PERBAIKAN SEMENISASI JALAN BETET BTN INTRACA RT.09 Kel. Juata Permai	166 m	50,000,000	
435	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	Semenisasi Gang Damai 2 RT 10 Kelurahan Juata Kerikil	25 M x 6 M x 20 CM	50,000,000	
436	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	Semenisasi (Lanjutan) Jl. Mangga Besar Gunung RT.11 Kel. Juata Kerikil	200 M x 0,5 M x 20 CM	50,000,000	
437	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	Semenisasi	100 m		
438	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	PERBAIKAN SEMENISASI JALAN LINGKUNGAN TIAP GANG RT.12 Jl. Hidayah Kel. Juata Permai	P=300m x L=2m	50,000,000	
439	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	Semenisasi Gg. Tamrin RT. 12 Kel. Juata Laut	P. 80 m x L. 2 m	50,000,000	
440	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	PERBAIKAN SEMENISASI JALAN LINGKUNGAN TIAP GANG RT.12	250 M x 3 M		
441	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	SEMENISASI JALAN JL. ANGSA RAWA RT.14 Kel. Juata Permai	P. 150 m x L. 2 m	50,000,000	
442	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	Semenisasi (Jembatan) Gang Abd.Rahman RT.16 Kel. Juata Laut	P.100 m x L. 2 m	50,000,000	
443	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	Pengerasan Jalan RT.18 Kel. Juata Laut	220 M x 2 M	50,000,000	
444	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	Semenisasi RT. 19 Kel. Juata Laut	P.60 x L. 3 m	50,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
445	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	Pengerasan dan pengecoran ulang jalan JL. MERANTI RT.19 Kel. Juata Permai	P. 40 m x L. 3 m	50,000,000	
446	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	Semenisasi Gang TK. Paud (Perwira) RT. 20 Kel. Juata Laut	P. 80 m	40,000,000	
447	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	SEMENISASI JALAN GG 6 - 9 BTN INTRACA RT.16 Kel. Juata Permai	P. 40 m	50,000,000	
448	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	SEMENISASI JEMBATAN LINGKUNGAN DARI KAYU MENJADI BETON	4 M x 10 M		
449	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	Pengerasan Jalan	P. 200 m x L. 4 m		
450	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	Semenisasi	P. 50 m x L. 3 m		
451	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	DRAINASE JALAN SEKOLAHAN SDN 051	300 M x 65 CM x 1 M		
452	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	SEMENISASI GG JAMIL	2 M x 125M x 20 CM		
453	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	Semenisasi	P. 40 m x L. 3 m		
454	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	Semenisasi	P. 40 m x L. 3 m		
455	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	Pengerasan dan pengecoran ulang jalan	350 M		
456	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	Penimbunan dan pengecoran jalan tembus RT. Ke RT. 20	80 M		
457	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	Semenisasi Jl. Seranai II Lorong 1 (Purwadi)	3 M x 100 M		
458	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	Semenisasi	P. 80 m		
459	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	PERBAIKAN JALAN BERLUBANG	10 TITIK		
460	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	Meningkatnya pembangunan infrastruktur dasar	lokasi		
461	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	Pembuatan Jembatan Semenisasi	P = 150 m		
462	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	Pembuatan Jembatan Semenisasi	P = 150 m		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
463	Peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Tarakan Utara	SEMENISASI JALAN GG 6 - 9	240 M		
464	Perencanaan jalan lingkungan pada kawasan pesisir	Perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur dasar	1 tahun	500,000,000	
8	**Program pengembangan perumahan**	**Persentase Fasilitasi Rumah MBR**	**100**	**505,000,000**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang program bidang perumahan dan pemukiman / Rusunawa	10 kali	5,000,000	
2	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Jumlah fasilitas rumah mbr yang terbangun	50 unit	500,000,000	
3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	tersedianya informasi data base perumahan se-Kota Tarakan	5 dokumen		
9	**Program lingkungan sehat perumahan**	**Persentase rumah yang terdata**	**0**		**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
1	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Tersedianya masterplan sanitasi lingkungan sehat perumahan	1 dokumen		
2	Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	Tersedianya informasi kualitas lingkungan sehat	3 kali		
3	Survey dan identifikasi perumahan	Tersedianya data backlog rumah di Tarakan	5 kelurahan		
10	**Program pemberdayaan komunitas perumahan**	**Persentase fasilitasi pengurangan kawasan kumuh**	**50**	**150,000,000**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
1	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat	Terwujudnya kota Tarakan bebas kumuh	lokasi	150,000,000	
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terdatanya kawasan kumuh Kota Tarakan	1 tahun		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
11	**Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial**	**Persentase Rumah akibat bencana yang direhabilitasi**	**100**	**200,000,000**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
1	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam atau sosial		11 unit	200,000,000	
12	**Program pengelolaan areal pemakaman**	**Persentase Makam yang terkelola dan terpelihara**	**100**	**200,000,000**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
1	Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal	Pendataan areal makam sekota Tarakan	32 makam		
2	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Meningkatnya presentase luas areal pemakaman	32 makam		
3	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Meningkatnya rasio persatuan penduduk	32 makam	200,000,000	
13	**Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	**Jumlah Pengadaan tanah dan bersertifikat**	**5**	**1,610,000,000**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
1	Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terlaksananya pengadaan tanah bagi kepentingan umum	25 lokasi	1,600,000,000	
2	Penyuluhan hukum pertanahan	Terlaksananya penyuluhan hukum pertanahan	2 penyuluhan	5,000,000	
3	Fasilitasi administrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Memberikan fasilitas surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah	100 rim	5,000,000	
4	Survey dan pemetaan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Inventarisir penataan pertanahan Pemerintah kota	10 lokasi		
14	**Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan**	**Persentase konflik pertanahan yang tertangani**	**100**	**50,000,000**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
1	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Terlaksananya kegiatan tim survey dan penanganan penyelesaian konflik-konflik pertanahan	10 kali	50,000,000	
5	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			**716,940,494**	**Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik**
	Belanja Tidak Langsung				
	Belanja Langsung			**716,940,494**	
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100**	**124,464,494**	**Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai yang bersedia Jumlah Paket Pengiriman	300 Lembar	1,102,500	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan waktu Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	28,956,324	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Oprasional yang pajak kendaraannya terbayarkan	Kendaraan Dinas 15 Unit, R4 2 Unit, R2 13 Unit	5,078,640	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan Tunjangan Administrasi Keuangan	3 Orang (12 bulan)	23,253,300	
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor yang tersedia	11 Jenis	2,357,250	
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	20 Jenis	13,765,500	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penggandaan yang tersedia	28.333 Lembar, 50 Jilid, 100 Cetak MAP	9,688,980	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia		3,000,000	
9	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	5 OP	20,000,000	
10	Pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Jumlah Tenaga Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	12 Bulan	17,262,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**17,476,000**	**Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik**
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	30 Buah Kursi		
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatab Gedung Kantor yang diadakan	3 Jenis	10,000,000	
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah BBM dan Pelumas yang diadakan	1.200 Liter BBM, 36 Liter Pelumas ,	6,263,250	
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Suku Cadang yang diadakan	10 Jenis		
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Jasa Service	2 Kali Service		
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	3 Jenis	1,212,750	
3	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Persentase ASN yang disiplin**			**Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik**
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	26 Stel		
2	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pengadaan Pakaian KORPRI	26 Stel		
4	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	**Persentase ormas yang aktif**	**100**	**100,000,000**	**Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik**
1	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Peserta Simulasi, Jumlah Peserta Sosialisasi, Jumlah Bahan / Alat	1 kegiatan		
2	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Sosialisasi dan Rapat Tim	6 Kegiatan	50,000,000	
3	Pendataan dan verifikasi ormas			50,000,000	
5	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	**Persentase konflik SARA yang tertangani**	**100**	**200,000,000**	**Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik**
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Menurunnya Jumlah Penyimpangan Ajaran Agama	1 Kegiatan	200,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
2	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap rasa nasionalisme	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Wawasan Kebangsaan	1 Kegiatan		
6	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	**Persentase meningkatnya kesadaran berwawasan kebangsaan**	**100**		**Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik**
1	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Tefasilitasinya Lomba- lomba Peningkatan Wawasan Kebangsaan	1 Kegiatan		
6	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**	**Persentase menurunnya konflik sosial**	**100**	**100,000,000**	**Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik**
1	Fasilitasi kewaspadaan dini didaerah	Jumlah Rapat Koordinasi dalam rangka Deteksi Dini dan Pembentukan Tim	10 Kegiatan	100,000,000	
2	Fasilitasi forum pembauran kebangsaan (FPK)	Berkurangnya Jumlah Konflik Sosial Antar Etnis	1 Kegiatan		
7	**Program pendidikan politik masyarakat**	**Persentase partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu**	**70**	**175,000,000**	**Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik**
1	Penyuluhan pendidikan politik masyarakat	Persentase tingkat Pemahaman dan Pengetahuan Masyarakat di Bidang Politik	1 Kegiatan		
2	Penyusunan data base partai politik	Jumlah Data Pengurus Partai Politik	1 Kegiatan		
3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kesadaran Ilmu Politik, Ekonomi Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan	12 Bulan		
4	Desk Pilkada Propinsi Kalimantan Utara			125,000,000	
5	Bimbingan teknis bantuan keungan parpol	Jumlah Partai Politik yang Menjadi Peserta Bimbingan Teknis	1 Kegiatan		
6	Verifikasi bantuan keuangan parpol	Jumlah Partai Politik yang mendapatkan bantuan Keuangan Partai Politik	1 Kegiatan	50,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
6	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA & PEMADAM KEBAKARAN**			**9,134,508,000**	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**
	Belanja Tidak Langsung				
	Belanja Langsung			**9,134,508,000**	
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100**	**5,432,933,000**	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaanperangko dan materai	750 lembar	1,500,000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, internet, gas dan TV kabel	1 Tahun	90,000,000	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional/STNK dan pajak kendaraan	39 Unit	25,000,000	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan	7 orang	75,000,000	
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan dan kebersihan kantor yang tersedia	15 jenis	2,000,000	
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	25 jenis	11,000,000	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan kerperluan kantor	12 Bulan	5,000,000	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah balon lampu	50 buah	2,000,000	
9	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralaan rumah tangga yang diadakan	3 unit		
10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai melaksanakan Perjalanan dinas luar dan dalam Daerah	14 orang	50,000,000	
11	Pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Jumlah banpol,satgas pemadam yang diberi honorarium	143 orang dan 29 kelompok, 2 cleaning service	5,171,433,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**432,875,000**	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**
1	Pembangunan gedung kantor	Jumlah pembangunan tandon air sektor utara	1 kegiatan	200,000,000	
2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	1 kendaran roda 4		
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	4 jenis		
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor PMK Mako, sektor barat, sektor utara	3 kegiatan	7,875,000	
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan operasional(BBM,oli,service dan suku cadang)	22 unit	225,000,000	
6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah unit pemeliharaan komputer/laptop/printer/AC	27 unit		
3	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Persentase ASN yang disiplin**	**100**	**300,000,000**	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaaan pakaian dinas berserta perlengkapannya	237 stel	300,000,000	
2	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian APD yang tersedia	2 Kegiatan		
3	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari- hari tertentu (Traning Olahraga +Sepatu)	237 stel		
4	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat dan Bimtek**	**100**		**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (4 PPNS, 2 Inspektur kebakaran kebakaran, 2 Penyuluh, 20 Pemadam 1)	28 orang		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
5	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu**	**100**		**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang akuntabel	1 dokumen		
6	**Program pencegahan dan pesiapsiagaan penanggulangan bencana**	**Persentase layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar) dalam tingkat waktu tanggap**	**100**	**160,000,000**	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**
1	Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pencegahan dan penanggulangan bencana	Jumlah Dokumen	1 Dokumen		
2	Pencegahan peringatan dini dan pengendalian bencana	Jumlah sosialisasi mitigasi kebakaran	6 kegiatan	100,000,000	
3	Penyuluhan dan pengembangan SDM dalam pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Jumlah Kegiatan Penyuluhan	12 Penyuluhan	40,000,000	
4	Monitoring mitigasi bencana	Jumlah kelompok BALAKAR yang mengikuti pelatihan penanggulangan kebakaran dan jumlah pemeriksaan alat pemadam kebakaran	2 jenis kegiatan	20,000,000	
7	**Program tanggap darurat logistik dan penanggulangan bencana**	**Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap**	**100**	**2,481,200,000**	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**
1	Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual tanggap darurat bencana	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	
2	Koordinasi pencegahan dan penanggulangan bencana	Jumlah pegawai melaksanakan Perjalanan dinas luar dan dalam Daerah	10 OP	10,000,000	
3	Pengadaan sarana dan prasarana tanggap darurat dan logistik penanggulangan bencana	Jumlah kasus kebakaran	2 Kegiatan	100,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
4	Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran	11 kegiatan	2,321,200,000	
8	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	**Persentase penurunan tingkat gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan (K3)**	**100**	**50,000,000**	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**
1	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah sidang tiping dilaksanakan	12 sidang	50,000,000	
2	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Pelatihan kelinmasan	2 Pelatihan		
9	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	**Persentase penegakan PERDA**	**100**	**257,500,000**	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**
1	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah Perda yang di razia	12 Perda	207,500,000	
2	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah pelaksanaan razia	8 kali razia	50,000,000	
10	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)**	**Persentase penyakit masyarakat (PEKAT) yang tertangani**	**100**	**20,000,000**	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**
1	Penyuluhan dan sosialisasi pemberantasan penyakit masyarakat	Jumlah sosialisasi pekat	20 sosialisasi	20,000,000	
7	**SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**			**2,655,270,530**	**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**
	Belanja Tidak Langsung				
	Belanja Langsung			**2,655,270,530**	
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100**	**497,799,930**	**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang tersedia	180 lbr	1,808,100	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cukupan waktu pembayaran jasa komunikasi,sumber daya air, dan listrik	12 bln	120,000,000	
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	0	0	
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlahkendaraan Dinas/Operasional yang pajak kendaraannya terbayarkan	22 Unit	7,743,330	
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	10 org	56,248,500	
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan den peralatan kebersihan kantor yang tersedia	485 jenis	26,000,000	
7	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah atk yang tersedia	373 jenis	55,000,000	
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetak yang tersedia	52 jenis cetakanan; 29743 lbr	26,000,000	
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang tersedia	51 jenis	5,000,000	
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	10 jenis	150,000,000	
11	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah penyediaan makan dan minum	0	0	
12	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10 OP	50,000,000	
2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**290,000,000**	**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional	2760 LTR	65,000,000	
2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	28 Unit	25,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
3	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	jumlah gedung kantor yang di rehab	4 unit	200,000,000	
3	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Persentase ASN yang disiplin**	**100**	**49,350,000**	**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**
1	Pengadaan mesin/kartu absensi	jumlah pengadaan mesin absensi	1 bh	15,000,000	
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas	30 org	26,250,000	
3	Pengadaan pakaian KORPRI	jumlah pengadaan pakaian korpri	0	0	
4	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	jumlah pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	30 org	8,100,000	
4	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu**	**100**	**5,000,000**	**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan kinerja	1 dok	5,000,000	
5	**Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (kat) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) lainnya**	**Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial**	**100%**	**488,120,600**	**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**
1	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	jumlah PMKS yang menerima bantuan sosial	10 klp	5,000,000	
2	Fasilitas pelaksanaan program keluarga harapan	jumlah KPM yang mendapatkan bantuan PKH	3.433 kpm	75,340,000	
3	Fasilitasi pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	jumlah KPM yang mendapatkan bantuan BPNT	7443 KPM	30,000,000	
4	Sistem layanan rujukan terpadu	Jumlah Pengaduan yang terlayani	2500 Orang	377,780,600	
		Jumlah Data fakir miskin yang di muktahirkan	12550 KPM		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
6	**Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial**	**Persentase Partisipasi PMKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan Pelatihan dalam menunjang pelaksanaan Kesejahteraan Sosial**	**7.46**	**155,000,000**	**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**
1	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	jumlah orang terlantar anak berhadapan hukum dan anak putus sekolah yang mendapatkan pembinaan	10 org	5,000,000	
2	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	jumlah peserta pelatihan keterampilan bagi anak jalanan,anak cacat dan anak nakal	15 org	50,000,000	
3	Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	jumlah rapat koordinasi nasional dan konsultasi bidang sosial penanganan PMKS	12 KALI	100,000,000	
7	**Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial**	**Persentase Partisipasi PSKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan Pelatihan dalam menunjang pelaksanaan Kesejahteraan Sosial**	**0**	**0**	**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**
1	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	jumlah peserta pelatihan	0	0	
2	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	jumlah peserta pelatihan KTS tksk tagana LK3 dan relawan sosial	0	0	
8	**Program pelestarian nilai nilai kepahlawanan**	**Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan**	**100%**	**100,000,000**	**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
1	Fasilitasi peningkatan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	cukupan waktu penyediaan sarana prasarana tmp	12 bln	100,000,000	
9	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah**	**100%**	**100,000,000**	**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100%	100,000,000	
2	Sosialisasi Siaga Bencana	jumlah peserta sosialisasi kampung siaga bencana di kelurahan dan sekolah	0	0	
10	**Program Rehabilitasi Sosial**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**100%**	**345,000,000**	**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**
1	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	persentase penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	50,000,000	
2	Rahabilitasi Sosial Bagi Lanjut Usia	persentase penyandang lansia terlantar di luar panti yang terpenihi kebutuhan dasarnya	100%	75,000,000	
3	Rahabilitasi Sosial Bagi Lanjut Usia	persentase penyandang lansia terlantar di luar panti yang terpenihi kebutuhan dasarnya	100%	35,000,000	
4	Rehabilitasi Sosial Anak	persentase anak di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	35,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
5	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	persentase gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	150,000,000	
12	**Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan**	**Persentase lembaga masyakat yang aktif**	**100**	**150,000,000**	**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**
1	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang dibina	228 lembaga masyarakat	150,000,000	
13	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**Prosentase kelurahan yang mengikuti lomba TTG**	**100**	**400,000,000**	**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**
1	Pemberian stimulan pembangunan desa	Jumlah Pos Yandu	3 Posyandu	300,000,000	
2	Lomba teknologi tepat guna	jumlah alat TTG yang dilombakan	4 alat	100,000,000	
14	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	**Predikat penilaian kelurahan**	**Baik**	**75,000,000**	**Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**
1	Pelaksanaan lomba kelurahan	jumlah kelurahan yang ikut lomba	4 kelurahan	75,000,000	
8	**PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**			**6,072,627,475**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
	Belanja Tidak Langsung				
	Belanja Langsung			**6,072,627,475**	
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100**	**758,353,840**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai dan Benda Pos Lainnya	250 unit	504,000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	12 bulan	113,660,000	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	pajak Kendaraan Dinas/Operasional	19 Unit Kendaraan Dinas/Operasional	24,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Keterangan
		Keluaran Kegiatan			
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan Tunjangan administrasi keuangan	11 org	61,416,800	
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bahan dan peralatan kebersihan kantor yg tersedia	40 jenis	15,766,800	
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	50 Jenis	12,000,000	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Catakan dan Pengandaan yang tersedia	8 Jenis	14,343,840	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	15 Jenis		
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	10 jenis		
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	120 eks		
12	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	1840 org		
8	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	15 org	30,000,000	
9	Pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Jumlah Tenaga Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	321 org / tahun	486,662,400	
2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**4,070,086,635**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
1	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung Yang dibangun	Pembangunan 1 Gedung Kantor Logistik	3,742,150,000	
2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional	6 unit roda 2 (dua)		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jasa Pembuatan Sistem Informasi Manajemen & Pembuatan Website, dan perlengkapan gedung kantor lainnya		
4	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5 set peralatan Rescue & 10 unit HandyTalky (HT), mebeleuer, AC dll	125,000,000	
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional	Jumlah BBM, Suku Cadang dan jasa service yang diadakan	21 unit Kendaraan Dinas/operasional	178,917,885	
7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara	pemeliharaan peralatan gedung kantor BPBD		
8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yng dipelihara	Mako BPBD Tarakan	24,018,750	
3	**Program peningkatan disiplin aparatur**			**100,000,000**	
1	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan	67 stell PDL BPBD	100,000,000	
4	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu**	**100**		**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja	2 dokumen		
5	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat dan Bimtek**	**65.65**	**0**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	24 orang		
4	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	7 orang		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Keterangan
		Keluaran Kegiatan			
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
5	**Program pencegahan dan pesiapsiagaan penanggulangan bencana**	**Kejadian Tanah Longsor**	**15 kejadian**	**364,160,000**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
1	Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pencegahan dan penanggulangan bencana	Jumlah Dokumen (Perda, Perwali, SOP, Kontijensi Plan, dan Peta Rawan Bencana)	1 Dokumen		
1	Pencegahan peringatan dini dan pengendalian bencana	Pembangunan Siring pada daerah rawan bencana longsor serta pengadaan sistem peringatan dini	Penyiringan daerah rawan longsor	314,160,000	
2	Penyuluhan dan pengembangan SDM dalam pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Jumlah penyuluhan dan sosialisasi pencegahan dan kesiap siagaan PB	5 kali kegiatan	50,000,000	
5	Monitoring mitigasi bencana	Jumlah kegiatan monitoring Mitigasi	24 kali		
6	**Program tanggap darurat logistik dan penanggulangan bencana**	**Persentase ketersediaan logistik untuk setiap kejadian bencana**	**100**	**366,827,000**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
1	Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual tanggap darurat bencana	Jumlah Dokunen SOP Tanggap Darurat	1 Dokumen	2,000,000	
2	Koordinasi pencegahan dan penanggulangan bencana	Frekuensi Rapat Koordinasi Tim Tanggap Darurat	12 kali Rapat		
3	Pengadaan sarana dan prasarana tanggap darurat dan logistik penanggulangan bencana	Pembangunan Shelter Pengungsi, Pemberian Logistik bagi korban bencana	1 Unit Tenda Pengungsi dan 1 unit Tenda Komando	364,827,000	
4	Pengadaan sarana dan prasarana tanggap darurat dan logistik penanggulangan bencana	Pembangunan Selter Pengungsi dan Pemberian Logistik bagi korban bencana	1 set peralatan penanggulangan bencana longsor		
5	Pengadaan sarana dan prasarana tanggap darurat dan logistik penanggulangan bencana	Pembangunan Shelter Pengungsi dan Pemberian Logistik bagi Korban Bencana	3 set perlengkapan survival & perbekalan		
6	Pengadaan sarana dan prasarana tanggap darurat dan logistik penanggulangan bencana	Pembangunan Shelter Pengungsi dan Pemberian Logistik bagi Korban Bencana	300 Paket Logistik Pembangunan Bencana		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
7	**Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana**	**Persentase kejadian bencana yang mendapatkan rehabilitasi dan rekonstruksi**	**100**	**413,200,000**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
1	Perbaikan sarana/prasarana umum dan lingkungan pasca bencana	Jumlah Fasum yang direhabilitasi/rekonstruksi	5 Fasum	250,000,000	
2	Bantuan stimulan pemulihan bencana	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat bantuan stimulan Bahan Baku Bangunan	46 Rumah Tangga	163,200,000	
9	**TENAGA KERJA & PERINDUSTRIAN**			**2,667,080,678**	**Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**
	Belanja Tidak Langsung				
	Belanja Langsung			**2,667,080,678**	
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**	**537,068,678**	**Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang tersedia	130 Lembar	630,000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	12 Bulan	210,000,000	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajak kendaraannya dibayarkan	17 unit (3 unit mobil, 14 sepeda motor)	5,493,765	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	12 orang	78,156,000	
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia	36 jenis	13,413,442	
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang tersedia	51 jenis	40,381,125	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	16 blanko, 18.069 lbr fotocopy,10jilid	8,494,346	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 jenis	5,000,000	
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	4 unit (2 Laptop, 2 printer)	25,500,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	14 OP (4 org PDL, 10 org PDD	150,000,000	
2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**177,022,000**	**Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan Dinas/operasional	1 unit roda 4	0	
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 paket gorden	0	
3	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mubeleur	30 kursi rapat, 2 set kursi 4 dudukan, 1 kursi roda, 5 unit filling cabinet	0	
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	35 unit	10,000,000	
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah BBM yang diadakan	120 Liter, 64 Botol	28,022,000	
3	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	2 unit (sekat ruangan bidang industri, ruang laktasi)	139,000,000	
3	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Persentase ASN yang disiplin**	**100%**	**15,000,000**	**Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**
1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah pengadaan mesin/kartu absensi	1 unit mesin absensi	15,000,000	
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	56 buah	0	
4	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat dan Bimtek**	**100%**	**0**	**Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan Teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	5 orang	0	
2	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Persentase dokumen laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun tepat waktu	5 orang	0	
4	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu**	100%	**5,000,000**	**Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Dokumen Laporan capaian/realisasi kinerja	5,000,000	
5	**Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja**	**Persentase pencari kerja yang kompeten**	53%	**1,491,210,000**	**Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**
1	Pembangunan balai latihan kerja	Jumlah Gedung Worshop Pelatihan yang dibangun	1 Unit Green house	0	
1	Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja	Jumlah perlengkapan dan peralatan pendidikan dan pelatihan BLK	20 unit	311,210,000	
3	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	Jumlah ASN yang mengikuti capacity Bulding, Upgrading dan Diklat Dasar Instruktur	16 Instruktur dan 4 staf	0	
2	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Jumlah Pelatihan dan Keterampilan Berbasis dan Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan Keterampilan	10 Paket Pelatihan 160 peserta.	750,000,000	
3	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK	Jumlah sarana dan prasarana (gedung Kantor BLK, workshop, rumah dinas instruktur) yang terawat	2 unit gedung LLK/workshop	240,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
4	Rehabilitasi sedang/ berat sarana dan prasarana BLK	Panjang pagar yang terbangun 200m, Pengaspalan jalan 358mx5m, pembuatan saluran drainase 584 m x 40m x 60m, pembuatan pagar beton 298mx2m di BLK (usulan Musrenbang)	200 Meter	190,000,000	
7	Pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam negeri	Peserta yang mengikuti pemagangan di perusahaan	50 0rang	0	
		Peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan	30 orang	0	
6	**Program peningkatan kesempatan kerja**	**Persentase Perusahaan yang menerima tenaga kerja**	**22%**	**250,000,000**	**Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**
1	Penempatan tenaga kerja dalam negeri	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	120 0rang pencari kerja	100,000,000	
		Monitoring dan pembinaan BKK/BKS	5 BKK	0	
2	Peningkatan pengembangan pasar kerja	Sosialisasi dan bimbingan jabatan	150 orang	0	
2	Pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja	Jumlah pelatihan kewirausahaan bagi tenaga kerja mandiri	40 orang	150,000,000	
		Padat karya infrastruktur	88 orang	0	
7	**Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan**	**Persentase perusahaan yang memiliki lembaga ketenagakerjaan**	**40%**	**41,780,000**	**Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**
1	Peningkatan penerapan jaminan sosial tenaga kerja	Jumlah pekerja/buruh peserta jamsostek aktif dengan jumlah pekerja/buruh	80	0	
1	Pengelolaan kelembagaan dan kerja sama hubungan industrial serta penerapan pengupahan	Jumlah perusahaan yang menerapkan standarisasi UMK	50 perusahaan	19,500,000	
2	Pengelolaan persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi	Jumlah perusahaan yang menerapkan persyaratan kerja	20 perusahaan	17,980,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
3	Konsolidasi pelaksanaan peningkatan intensitas pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Jumlah rapat pertemuan	8 kali	4,300,000	
9	**Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi**	**Persentase fasilitasi penerapan teknologi bagi IKM**	**90%**	**0**	**Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**
1	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Pemberian bantuan mesin peralatan produksi bagi IKM	10 Paket (IKM)	0	
8	**Program pengembangan industri kecil dan menengah**	**Persentase IKM yang terfasilitasi**	**40%**	**150,000,000**	**Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**
1	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Terlaksananya pelatihan Pengelolaan Sumber Daya Lokal (hasil laut /perikanan, pertanian, peternakan)	4 kegiatan/80 IKM	0	
2	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Terselenggaranya pertemuan antar pelaku IKM	3 Kegiatan/60 IKM	0	
1	Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah	Tersusunnya perda RPID Kota Tarakan	1 naskah akademik RPID	50,000,000	
2	Fasilitasi sertifikasi dan Haki produk industri	Terlaksananya Fasilitasi Sertifiasi (Haki Halal SNI) Produk IKM	15 IKM	100,000,000	
5	Koordinasi pengembangan bidang industri	Terkoordinasinya program dan kegiatan pengembangan IKM (Kota/Provinsi/Pusat)	4 Kegiatan	0	
6	Operasional UKM center dan rumah kemasan	Terlaksananya pelayanan kemasan kepada IKM	60 IKM	0	
9	**Program peningkatan kemampuan teknologi industri**	**Persentase Industri yang menerapkan sistem mutu**	**88%**	**0**	**Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**
1	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Terlaksananya pembinaan dan pendampingan penerapan sistem produksi yang baik	5 Kegiatan/ 5 IKM	0	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
2	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Terlaksananya pengembangan dan pelayanan teknologi bagi IKM	2 Kegiatan/ 2 IKM	0	
9	**Program penataan struktur industri**	**Persentase klaster yang terbangun**	**29**	**0**	**Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**
1	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	terlaksananya pembangunan dan pengembangan sarana maupun prasarana klaster IKM	2 Paket	0	
10	**Program pengembangan sentra-sentra industri potensial**	**Persentase industri potensial yang difasilitasi**	**4**	**0**	**Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian**
1	penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Tersedianya informasi (promosi) tentang IKM	12 Paket/50 IKM	0	
10	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA**			**797,703,669**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana**
	Belanja Tidak Langsung				
	Belanja Langsung			**797,703,669**	
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi perkantoran**	**100**	**215,827,169**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP & KB**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai	90 Lembar	945,000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 bulan	24,306,824	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajak kendaraannya terbayarkan	22 unit	11,681,045	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	8 orang	48,894,300	
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia	0	0	
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	278 jenis	40,000,000	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan yang tersedia, jumlah barang penggandaan yang tersedia	94 jenis, 9253 lembar	5,000,000	
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	5 jenis	35,000,000	
9	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinator dan konsultasi di luar daerah	6 orang/kegiatan	50,000,000	
2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**185,920,000**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP & KB**
1	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	0	0	
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah BBM yang diadakan, jumlah suku cadang , Jumlah jasa service	2.429 liter, 22 unit	25,920,000	
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan kantor yang di pelihara	29 unit	10,000,000	
4	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah gedung yang direhabilitasi	1 unit	150,000,000	
5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	0	0	
3	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Persentase ASN yang disiplin**	**100**	**23,000,000**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP & KB**
1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah pengadaan mesin/kartu absensi	1 unit	15,000,000	
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya	35 Stell	8,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Keterangan
		Keluaran Kegiatan			
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
4	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu**	**100**	**5,000,000**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP & KB**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen capaian kinerja	1 Dokumen	5,000,000	
5	**Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan**	**Cakupan kebijakan pelaksanaan peningkatan kualitas anak**	**50**	**46,300,000**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP & KB**
1	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembekalan kualitas perempuan dan anak	56 sekolah	46,300,000	
6	**Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak**	**Cakupan perlindungan PUG dan Anak yang di laksanakan**	**50**	**148,656,500**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP & KB**
1	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Jumlah kasus KDRT yang terlayani	40 kasus KDRT	78,656,500	
2	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah pokja PUG yang terbentuk dan dioperasionalkan	30 OPD	60,000,000	
3	Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Responsef Gender	1 dokumen	10,000,000	
7	**Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**	**Cakupan partisipasi perempuan dalam pembangunan**	**50**	**3,000,000**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP & KB**
1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	0	0	
2	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah peserta penyuluhan	60 orang	3,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
8	**Program keluarga berencana**	**Cakupan Peserta KB Baru dan Peserta KB Aktif**	**76.99**	**70,000,000**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP & KB**
1	Pelayanan KIE	Jumlah kegiatan pelayanan KIE	7 kegiatan	5,000,000	
2	Pembinaan keluarga berencana	Jumlah peserta yang dibina	0		
3	Pembinaan keluarga sejahtera (kegiatan pembinaan UPPKS)	Jumlah Kelompok UPPKS yang di Bina	0		
4	Pemutakhiran data keluarga sejahtera	Jumlah Keluarga yang didata	4.180 KK	65,000,000	
9	**Program pelayanan kontrasepsi**	**Persentase tingkat keberlangsungan pemakai kontrasepsi**	**34.35**	**100,000,000**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP & KB**
1	Pelayanan konseling KB	Jumlah Pasangan Usia Subur yang mendapatkan Konseling KB	0		
2	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Jumlah PUS yang mendapatkan alokon	420 orang	100,000,000	
3	Pelayanan KB medis operasi	Jumlah peserta KB medis	0		
10	**Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR**	**Persentase Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling**	**27.20%**	**0**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP & KB**
1	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Jumlah PIK-KRR yg terbentuk	0	0	
2	Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	jumlah pelayanan PIK- KRR diluar sekolah	0	0	
3	Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya jalur pendidikan	Jumlah pelayanan PIK- KRR dijalur Pendidikan	0	0	
10	**Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR**	**Persentase Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling**	**27.20%**	**0**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP & KB**
1	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Jumlah PIK-KRR yg terbentuk	0	0	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
2	Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	jumlah pelayanan PIK- KRR diluar sekolah	0	0	
3	Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya jalur pendidikan	Jumlah pelayanan PIK- KRR dijalur Pendidikan	0	0	
11	**Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga**	**Persentase Kelompok Tribina yang aktif**	**61.66%**	**0**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP & KB**
1	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Jumlah pelatihan/pembinaan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	0	0	
2	Pembinaan kelompok tiga bina keluarga (Tribina)	Jumlah Kelompok Tribina (BKB,BKR,BKL)	41 kelompok	0	
12	**Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KY yang madiri**	**Persentase Pembinaan Kampung KB**	**60.00%**	**0**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP & KB**
1	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Jumlah kelompok yang dibentuk	0	0	
2	Peningkatan Kualitas Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang ditingkatkan kualitasnya	0	0	
11	**LINGKUNGAN HIDUP**			**46,098,249,779**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	Belanja Tidak Langsung				
	Belanja Langsung			**46,098,249,779**	
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100**	**10,466,663,269**	**Dinas Lingkungan Hidup**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai Jumlah paket Pengiriman Jumlah paket Pengiriman	200 Lembar materai 10 Paket pengiriman	1,002,225	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 Bulan	190,289,555	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
3	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah orang (non PNS) yang mendapatkan jaminan pemeliharaan	404 orang	530,004,000	
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang pajak kendaraannya	Kendaraan Roda Enam (31 Unit), Kendaraan Roda Empat (16 Unit), Kendaraan Roda Tiga (2 Unit), Kendaraan Roda Dua (14 Unit)	124,152,310	
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	16 orang	135,040,440	
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia	30 Jenis Alat & Bahan Kebersihan	5,228,685	
7	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	70 Jenis Alat Tulis Kantor	21,290,125	
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan Jumlah barang penggandaan	10 Jenis Barang Cetak 30.000 Lembar Fotocopy dan jilid	25,000,000	
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	8 Jenis Komponen Listrik	5,000,000	
10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan minuman	1200 Kotak Snack dan 600 Nasi Kotak		
11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10 Kali		
12	Pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Jumlah tenaga pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	404 orang	9,429,655,929	
2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase ASN yang disiplin**	**100**	**3,964,572,010**	**Dinas Lingkungan Hidup**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Kendaraan Operasional Roda 2 (dua) 2 unit		
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Sound System 1 unit, Mic 3 unit , LCD 1 unit, AC 3 unit, Kursi 2 unit, Meja 2 unit, Lemari arsip besi 1 unit		
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Laptop 5 unit, Komputer PC 2 unit, Printer 5 unit, mesinfotocopy 1 unit dan CCTV 4 unit	29,365,500	
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah BBM, Suku cadang dan jasa servis yang	Kendaraan Roda Enam (28 Unit), Kendaraan Roda Empat (11 Unit), Kendaraan Roda Tiga (2 Unit) Buldozer TPA Sampah 3 Unit),Eksavator (2 Unit)	3,719,700,635	
3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Komputer (19 Unit),Printer (18 Unit), Laptop (6 Unit),AC (25 Unit)	15,505,875	
4	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Persentase bangunan yang terpelihara	100%	200,000,000	
3	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu**	**100**	**17,400,000,000**	**Dinas Lingkungan Hidup**
1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah pengadaan mesin/kartu absensi	1 unit pengadaan mesin atau kartu absensi		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	105 seragam PNS dan Non PNS dan penjaga keamanan		
3	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pengadaan pakaian KORPRI	61 pcs		
1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	61 pcs	17,400,000,000	
4	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu**	**100**	**0**	**Dinas Lingkungan Hidup**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja	2 dokumen	0	
4	**Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan**	**Persentase pengangkutan sampah**	**80**	**13,295,030,000**	**Dinas Lingkungan Hidup**
1	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah sarana dan prasarana pengoperasian TPA	1 kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana TPA, 1 kegiatan Rehabilitasi IPL, 1 kegiatan peralatan dan perlengkapan kerja, 1 kegiatan Pengerjaan penutupan TPA tahap I, 1 kegiatan uji laboratorium, 1 unit Bulldozer D6, pengadaan tanah TPA juata kerikil, 1 kegiatan pengadaan sarana dan prasarana UPT TPA	10,488,430,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Keterangan
		Keluaran Kegiatan			
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
2	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah sarana dan prasarana persampahan yang terbangun dan terpelihara	pengadaan 100 TPS/Tong Sampah Plastik (100 ltr), pengadaan 2 TPS Kontainer, Peralatan dan Perlengkapan kerja, 16 TPS Fiber(660 ltr), rehab 2 unit transfer depo, 2 unit dump truck, 1 unit arm roll, 1 unit truck tangki 5.000 liter, 1 unit mesin alkon, 1 unit road sweeper	2,156,600,000	
3	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Jumlah media pendukung sosialisasi dan kegiatan sosialisasi pengelolaan persampahan	3 Papan Reklame, 1 kegiatan pembuatan media sosialisasi (spanduk, stiker, standing banner), 20 kali sosialisasi pengelolaan persampahan	50,000,000	
4	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	jumlah sarana persampahan yang diadakan	20 Motor tiga roda, 2 unit bank sampah, 2 unit rumah kompos, pembebasan lahan dan bangunan depo 3R KSM ramah lingkungan kp6, operasional TPS 3R	450,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
5	Peningkatan/pemeliharaan kebersihan kota	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	19 Jenis Alat & Bahan Kebersihan	150,000,000	
5	**Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup**	**Persentase jumlah usaha atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pengendalian pencemaran air, udara dan lahan**	**40**	**721,984,500**	
1	Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura	Jumlah titik pemantauan lokasi penilaian Adipura Jumlah sekolah adiwiyata yang dibina	77 titik 67 sekolah adiwiyata yang dibina	100,000,000	
2	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah dokumen laporan hasil analisa uji kualitas air sungai dan udara Kota Tarakan	Tersedia 1 dokumen berisi data kualitas air sungai di 9 titik sebanyak 2 kali pemantauan, serta kualitas udara ambient di 4 titik sebanyak 2 kali pemantauan dalam kurun waktu 1 tahun, pemantauan tutupan lahan 1 kali dalam 1 tahun	150,000,000	
3	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	1. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 2.Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti.	1. 30 usaha 2. 100	100,000,000	
	Pengkajian dampak lingkungan	Jumlah Dokumen Peta Informasi Kerusakan lahan dan hutan/mangrove	1 Dokumen	25,000,000	
4	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah TPS Limbah B3 yang terbangun dan terpelihara	1 unit TPS Limbah B3, sosialisasi	75,000,000	
5	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)	jumlah perusahaan peserta proper	40 Perusahaan	71,984,500	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
6	Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih	Jumlah aksi bersih sungai di Sungai Karang Anyar, Sungai Pamusian dan Sungai Sebengkok	2 kali aksi bersih sungai	40,000,000	
7	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	1. Jumlah kader yang mendapatkan sosialisasi 2. Jumlah kegiatan peringatan hari-hari lingkungan yang dilaksanakan	1. 100 kader lingkungan 2. 4 kegiatan		
8	Pengembangan laboratorium lingkungan hidup	1. jumlah dan jenis bahan kimia yang diadakan 2.Jumlah orang yang memiliki sertifikat kompetensi	1. 19 item 2. 4 orang	160,000,000	
6	**Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam**	**Persentase jumlah usaha atau kegiatan dalam rangka perlindungan dan konservasi sumber daya alam**	**15**	**100,000,000**	**Dinas Lingkungan Hidup**
1	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	1. Luas Hutan Sawah Lunto yang terpelihara 2. Luas Kawasan Konservasi Mangrove dan Kepiting yang terpelihara (Ha)	1. 1 lokasi (6,5 Ha) 2. 1 lokasi (24 Ha)	90,000,000	
2	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air	Jumlah sumur resapan	5 sumur resapan		
2	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Jumlah Museum flora dan fauna yang beroperasi dg baik	Museum Flora dan Fauna beroperasi dengan baik	10,000,000	
7	**Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam**	**Persentase jumlah usaha atau kegiatan dalam rangka rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam**	**100**	**150,000,000**	**Dinas Lingkungan Hidup**
1	Rehabilitasi hutan dan lahan	1. Tersedia bibit pohon 2. Persentase kerusakan lahan yang direhabilitasi untuk produksi biomassa	1. Penyiapan 5000 bibit 2. 10 ha	100,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	1. Jumlah pohon mangrove yang ditanam 2. Jumlah aksi peduli lingkungan 3. Jumlah pelaksanaan aksi bersih pantai dan laut 4. Jumlah dokumen	1. 10.000 pohon 2. 5 kali pertahun 3. 2 kali pelaksanaan aksi bersih pantai dan laut 4. 1 dokumen	50,000,000	
8	**Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup**	**Persentase ketersediaan informasi SDA dan lingkungan**		**-**	**Dinas Lingkungan Hidup**
1	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup (DIKPLH)	2 dokumen (DIKPLH dan RPPLH)		
9	**Program peningkatan pengendalian polusi**			**-**	**Dinas Lingkungan Hidup**
1	Pengujian emisi kendaraan bermotor	Dokumen Pengujian setiap 3 bulan sekali	1 dokumen		
10	**Program pengelolaan ruang terbuka hijau**			**-**	**Dinas Lingkungan Hidup**
1	Pemeliharaan RTH	Jumlah pohon yang dipelihara dan diganti	500 pohon		
12	**KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**			**802,171,000**	**Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil**
	Belanja Tidak Langsung				
	Belanja Langsung			**802,171,000**	
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Persentase Layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**242,781,000**	**Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	60 Lembar	600,000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan Waktu Pembayaran Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	10,545,000	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Pajak Kendaraannya terbayarkan	8 Unit	6,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	8 Orang	50,586,000	
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bahan dan peralatan Kebersihan kantor yang tersedia	85 Jenis	5,000,000	
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	570 Jenis	100,000,000	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22774 Jenis	20,050,000	
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0		
9	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	6 Kali	50,000,000	
2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**131,700,000**	**Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil**
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	3 Unit	50,000,000	
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah BBM yang diadakan	7850 Liter	56,700,000	
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara	8 Jenis	25,000,000	
3	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Persentase ASN yang Disiplin**	**100%**	**23,700,000**	**Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil**
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	31 Stel	8,700,000	
2	Pengadaan Mesin Absensi	Jumlah Pengadaan mesin/kartu absensi	1 Unit	15,000,000	
4	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**5,000,000**	**Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	1 Dokumen	5,000,000	
5	**Program penataan administrasi kependudukan**	**Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan**	**79.61%**	**398,990,000**	**Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil**
1	Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Jumlah Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terselesaikan	118.214 Dokumen	148,990,000	
3	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah Dokumen Laporan Kependudukan yang tersedia	4 Dokumen	50,000,000	
4	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	500 Dokumen	150,000,000	
5	Penyusunan kebijakan kependudukan	Jumlah Dokumen IKM dan Standar pelayanan	2 Dokumen	50,000,000	
13	**PERHUBUNGAN**			**6,221,747,906**	**Dinas Perhubungan**
	Belanja Tidak Langsung				
	Belanja Langsung			**6,221,747,906**	
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100**	**3,910,178,056**	**Dinas Perhubungan**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Matrai dan benda pos lainnya	1 tahun	833,625	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Listri, Air, telpon dan internet	1 tahun	311,031,166	
3	Penyediaan jasapemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Pajak kendaraan dinas/operasional dan BRT	46 unit	21,852,515	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tunjangan pengelola keuangan	13 orang	83,556,000	
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Alat kebersihan dan bahan pembersih	14 jenis	5,555,000	
6	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	41 jenis	21,147,500	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cetak dan penggandaan	13 jenis dan 1 kegiatan	77,650,000	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Alat penerangan	5 jenis		
9	Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan minum rapat dan tamu	1 tahun		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat koordinasi dalam dan luar daerah	1 tahun	43,260,000	
11	Pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Gaji juru parkir dan awak BRT	116 orang	3,329,980,250	
12	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS	Asuransi juru parkir dan awak BRT	116 orang	15,312,000	
2	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**254,289,850**	**Dinas Perhubungan**
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	1 kantor dan 2 uptd	10,000,000	
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan BRT	38 unit	235,364,850	
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Komputer, laptop, AC, Genset dll	5 jenis	8,925,000	
3	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Persentase ASN yang disiplin**	**100**	**21,000,000**	**Dinas Perhubungan**
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian dinas beserta kelengkapannya	105 orang	21,000,000	
4	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat dan Bimtek**	**100**	**0**	**Dinas Perhubungan**
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Diklat bidang perhubungan	10 orang	0	
5	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu**	**100**	**0**	**Dinas Perhubungan**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja	2 dokumen	0	
4	**Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ**	**Persentase Fasilitas LLAJ yang baik**	**78.22**	**300,000,000**	**Dinas Perhubungan**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Kalibrasi dan pemeliharaan peralatan pengujian kendaraan bermotor	9 unit	100,000,000	
2	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Pemeliharaan terminal boompanjang	1 terminal		
3	Pemeliharaan fasilitas LLAJ	Suku cadang Traffic light,rambu lalu lintas dan fasilitas LLAJ lainnya	1 tahun	200,000,000	
5	**Program peningkatan pelayanan angkutan**	**Persentase angkutan umum yang layak**	**53**	**412,780,000**	**Dinas Perhubungan**
1	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Razia gabungan	3 kali	59,655,000	
2	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Pemeliharaan pelabuhan penyeberangan juata	1 kegiatan	150,000,000	
3	Penertiban parkir	Razia parkir inap dan jukir liar Serta sosialisasi parkir	3 kali dan 1 kegiatan	203,125,000	
4	Rakornis bidang perhubungan	Rapat teknis bidang perhubungan	1 tahun		
6	**Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas**	**Jumlah kecelakaan lalulintas**	**50**	**400,000,000**	**Dinas Perhubungan**
1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah rambu lalulintas yang diadakan	1 kegiatan	200,000,000	
2	Pengadaan marka jalan	Jumlah marka jalan	800 m2	200,000,000	
3	Pengadaan alat traffic light (APILL)	Jumlah Traffic light dan Warning light	4 unit warning light		
9	**Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor**	**Jumlah kendaraan yang melakukan wajib uji kendaraan bermotor**	**2665 kendaraan**	**923,500,000**	**Dinas Perhubungan**
1	Penggadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah Alat pengujian kendaraan bermotor	1 paket	923,500,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Keterangan
		Keluaran Kegiatan			
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
14	**KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**			**3,005,000,000**	**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian**
	Belanja Tidak Langsung				
	Belanja Langsung			**3,005,000,000**	
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100**	**640,000,000**	**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan paket pengiriman	100 lbr dan 15 kali pengiriman	5,000,000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan kebutuhan dasar energi,air dan telepon selama satu tahun	12 bulan	350,000,000	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengurusan perpanjangan Surat Tanda Kendaraan Bermotor	Kendaraan Roda empat 16 unit, Roda dua 13 unit	25,000,000	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah orang yang menerima tunjangan	10 org	80,000,000	
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis peralatan kebersihan dan bahan- bahan pembersih	25 jenis	15,000,000	
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang tersedia	25 jenis	30,000,000	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan/penggandaan dan penjilidan	5 jenis cetakan, 40000 lbr fotocopi dan 50 kali penjilidan	20,000,000	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat-alat listrik/ penyediaan instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	5 Jenis alat listrik	20,000,000	
9	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis alat rumah tangga	7 jenis alat-alat rumah tangga	10,000,000	
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah jenis bahan bacaan	5 jenis bahan bacaan	20,000,000	
11	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makan minum rapat dan tamu	60 kali (50 kali rapat, 10 kali tamu)	15,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
12	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat teknis/koordinasi/konsultasi dan informasi dengan Kaupaten/Kota di wilayah Kaltara dan diluar Propinsi Kaltara	30 kali	50,000,000	
2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**295,000,000**	**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian**
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	4 jenis		
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor	3 Jenis	10,000,000	
3	Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis mebeleur yang diperlukan	10 Jenis		
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 kali pengecatan gedung, perbaikan toilet, kelengkapan jaringan air, listrik, dll	15,000,000	
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah liter BBM/Oli yang diadakan, Jumlah jenis Suku cadang dan jumlah jenis service	25320 ltr, 10 jenis suku cadang dan 10 jenis service	255,000,000	
6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (AC, komputer,printer,alat elekronik,peralatan liputan, dll)	27 unit AC, 20 unit PC Komputer, 12 unit printer, 1 unit mesin fotocopy, dll	15,000,000	
3	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Persentase ASN yang disiplin**	**100**		**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian**
1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari tertentu	60 stel		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
4	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu**	**100**		**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dok LAKIP	1 dok		
2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan realisasi dan neraca keuangan	1 dok		
5	**Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi**	**Persentase pemanfaatan teknologi informasi terhadap layanan publik**	**100**	**300,000,000**	**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian**
1	Pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi terhadap layanan publik	Jumlah jenis layanan pengaduan publik	4 jenis	300,000,000	
6	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	**Persentase ketersediaan data statistik daerah**	**100**	**100,000,000**	**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian**
1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah jenis buku data dan statistik daerah	250 buku	50,000,000	
2	Penyusunan dan pengumpulan data PDRB	Jumlah jenis buku data PDRB	200 buku		
3	Forum komunikasi statistik daerah (FKSD)	Jumlah kegiatan dan rakor FKSD regional dan pusat	5 kali kegiatan rakor	50,000,000	
7	**Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi Bandwitch**	**65**	**1,150,000,000**	**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian**
1	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah kapasitas bandwith yang terkoneksi	200 Mbps (31 OPD)	1,100,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
2	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah workshop dan fasilitasi perijinan penyiaran, monev, dll	1 kali workshop, 2 fasilitasi perijinan		
3	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Jumlah sosialisasi kebijakan (Perda,Perwali) di bidang komunikasi informasi	1 kali		
4	Pengembangan informasi dan komunikasi	Jumlah jenis sarana sosialisasi dan publikasi	6 jenis (Backdrop, spanduk, lightbook, standing banner, buletin, leaflet)	50,000,000	
8	**Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi**	**Persentase ASN yang bersertifikat**	**40**		**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian**
1	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan	15 org		
9	**Program kerjasama informasi dan media massa**	**Persentase kerjasama pemkot dengan media massa**	**100**	**450,000,000**	**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian**
1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah jenis dokumentasi hasil pembangunan Kota Tarakan	4 jenis dokumentasi		
2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah advetorial di media cetak, elektronik, dan online	10 Adv media cetak, 2 media elektronik, 1 media online	250,000,000	
3	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Jumlah cover baleho dan spanduk yang menampilakn program pemerintah kota	4 cover baleho 4x16 , 2 cover baleho 5x10, 1 cover baleho 2.45x26, 30 cover baleho 4x6, dan 30 bh spanduk	150,000,000	
4	Penyelarasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Jumlah jenis iklan di media cetak dan elektronik	5 jenis	50,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
5	Komunikasi publik melalui dialog interaktif radio dan televisi	Jumlah dialog interaktif melalui radio dan TV	4 kali		
6	Pameran pembangunan	Jumlah pameran pembangunan yang diikuti	2 kali		
10	**Program Penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah**	**Persentase PD yang keamanan datanya terkelola dengan baik**	**100**	**70,000,000**	**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian**
1	Penyusunan kebijakan tata kelola keamananan informasi	Jumlah kebijakan tata kelola informasi	2 dok naskah akademis,1 dok perwali, 1 dok sosialisasi	20,000,000	
2	Peningkatan kapasitas SDM dan pengembangan tekhnologi keamanan informasi	Jumlah sosialisasi surat elektronik dan sandi	4 kali sosialisasi kegiatan dan aplikasi, 1 sandiman	50,000,000	
3	Monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang keamaman informasi	Jumlah bimtek kegiatan dan monev bidang keamanan informasi	2 keg bimtek		
11	**Program pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi**	**Persentase Jastip/cargo,menara komunikasi,LPB dan operator yang terdata dan memiliki identitas serta sosialisasi peraturan telekomunikasi**	**100**		**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian**
1	Pembinaan/penertiban perusahaan jasa titipan	Jumlah pembinaan dan pendataan perusahaan Jastip/cargo	1 kali		
2	Pembinaan/penertiban anggota ORARI/RAPI	Jumlah pembinaan/penertiban anggota ORARI/RAPI	1 kali		
3	Monitoring menara telekomunikasi	Jumlah menara telekomunkasi yang dimonitor	4 provide, 130 menara		
4	Pembinaan/penertiban penyelenggara televisi siaran berlangganan	Jumlah pembinaan penyelenggaraan TV berlangganan	2 LPB, 50 operator		
5	Sosialiasi peraturan telekomunikasi	Jumlah sosialisasi peraturan telekomunikasi dari pemerintah pusat/kemkominfo	1 kali		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
15	**PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM**			**4,527,408,260**	**Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Umkm**
	Belanja Tidak Langsung				
	Belanja Langsung			**4,527,408,260**	
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran**	**100%**	**399,405,460**	**Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Umkm**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah dokumen bermaterai	80 Lembar	529,200	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	12 bulan	142,155,615	
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	0	
4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah aparatur yang memperoleh jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	40 Orang	0	
5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Waktu penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	12 bulan	0	
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajak kendaraannya dibayarkan	R2: 17 unit, R4: 5 unit	5,031,390	
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	68,088,300	
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	15 jenis	7,431,375	
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	Laptop 15 unit komputer 20 unit mesin tik 5 unit	0	
10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	21 jenis	10,485,825	
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 jenis	3,778,005	
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	61 unit	1,905,750	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 bulan	0	
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	2 lusin piring makan, 2 lusin piring kecil (lepekan), 2 lusin sendok makan, 10 lbr keset	0	
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	12 bulan	0	
16	Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Kartu tera, kartu IUMK, kartu SKA, lambang negara, plakat, bendera, foto presiden & wakil presiden	0	
13	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	10,000,000	
14	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	15 OP	150,000,000	
15	Pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Jumlah tenaga pendukung teknis administrasi Pemerintahan	12 bulan	0	
2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**108,502,800**	**Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Umkm**
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasonal yang diadakan	R4: 1 unit	0	
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	5 unit lemari 10 unit kursi, 5 unit meja kerja	0	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	3 unit komputer PC, 2 unit Laptop, 2 unit Printer (print, scan, copy), 1 unit Kamera	0	
4	Pengadaan mebeleur	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	8 unit meja,10 unit kursi, 7 unit lemari	0	
5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 gedung	0	
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara rutin/berkala	12 Bulan	0	
7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	5 unit lemari 10 unit kursi, 5 unit meja kerja	0	
1	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	3 jenis servis komputer/ Laptop, printer, mesin fotocopy	4,793,250	
9	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah dan jenis mebeleur yang dipelihara rutin/berkala	8 unit meja, 10 unit kursi, 7 unit lemari	0	
2	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah atau luasan gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	1 paket rehab	103,709,550	
11	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang direhabilitasi sedang/berat	12 bulan	0	
3	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Persentase ASN yang disiplin**	**100%**	**16,000,000**	**Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Umkm**
	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	1 mesin kartu absensi	16,000,000	
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	43 Aparatur	0	
2	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	10 buah	0	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
3	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pakaian korpri yang diadakan	50 orang	0	
4	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat dan Bimtek**	**76%**	**0**	**Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Umkm**
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	12 Aparatur dan 2 org	0	
2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang undangan	2 kali	0	
3	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	2 kali	0	
5	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu**	**100**	**5,000,000**	**Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Umkm**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	5,000,000	
6	**Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif**	**Persentase UMKM produktif**	**5**	**157,000,000**	**Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Umkm**
1	Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Jumlah Peraturan tentang UMKM	1 Peraturan	0	
2	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Jumlah UKM Peserta sosialisasi	100 UKM, 4 kecamatan	0	
3	Pendirian unit penanganan pengaduan	Jumlah unit kotak layanan pengaduan ttg UKM	1 kotak dan layanan pengaduan	0	
4	Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah Koordinasi, konsultasi pusat, prov daerah	5 kali Koordinasi/konsultasi	0	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
1	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah UKM yang difasiitasi	1 Paket 5 lokasi (Kr.Anyar, Kr. Rejo, Kr. Balik, Kr.Anyar Pantai dan Kr. Harapan)	7,000,000	
2	Fasilitasi Permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah	Jumlah UKM yang mendapatkan layanan pemecahan masalah produksi	10 RT	150,000,000	
7	Pemberian Fasilitasi Pengamanan kawasan Usaha Kecil Menengah	Jumlah Layanan pengamanan kawasan usaha kecil menengah	100 UMKM	0	
7	**Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah**	**Persentase UKM yang unggul dan berdaya saing**	**13%**	**263,000,000**	**Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Umkm**
1	Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi Usaha Kecil Menengah dengan perusahaan asing	Jumlah UKM yang difasilitasi	20 UKM terfasilitasi	0	
2	Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi	Jumlah sarana promosi	1 sarana promosi	0	
1	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah UMKM Peserta pelatihan	20 UMKM	**126,000,000**	
2	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD	Jumlah koperasi yang mendapatkan Pelatihan RAT dan capacity biulding	60 koperasi	**137,000,000**	
5	Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah peserta Sosialisasi	150 peserta sosialisasi	0	
6	Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Kegiatan pelatihan	20 UMKM	0	
8	**Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah**	**Persentase system UKM yang dikembangkan**	**42%**	**1,328,750,000**	**Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Umkm**
1	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Jumlah Peserta sosialisi	3rakor	0	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
1	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah dana revolving yang disalurkan pemerintah bagi UMKM	50 peserta	1,328,750,000	
3	Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Sarana pemasaran secara elektronik dan fisik	1 tahun kegiatan	0	
4	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	Jumlah kerjasama koperasi	8 koperasi dan 2 aparatur	0	
9	**Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi**	**Persentase Koperasi Aktif**	**56**	**50,000,000**	**Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Umkm**
1	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Jumlah Rakor pusat, prov, daerah yang diikuti	3 rakor	0	
1	Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah koperasi yang terbina dan terawasi	60 kop yang dibinaan dan diawasi	50,000,000	
10	**Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan**	**Prosentase peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga**	**425 uttp tertera**	**110,000,000**	**Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Umkm**
1	operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	Jumlah UTTP terawasi	700 unit alat UTTP, Dok perenc. Ged UPT	100,000,000	
2	Monitoring harga sembilan bahan pokok dan stok barang	Jumlah data harga sembako dan stok barang	12 data sembako dan 1 bulan stok barang	10,000,000	
11	**Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional**	**Jumlah Negara Tujuan Ekspor**	**12 negara**	**0**	**Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Umkm**
1	Penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa	jumlah Data base kuato perdagangan	1 unit perangkat data base di dinas	0	
2	penyebarluasan informasi database kuota setiap jenis barang dan jasa	jumlah kegiatan penyebarluasan informasi DBP	1 kali kgt penyampaian informasi perdagangan	0	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
3	Penyusunan tim daerah dalam perundingan perdagangan internasional	Jumlah perundingan	1 surat keputusan Tim	0	
4	Fasilitasi penyelesaian sengketa dagang	jumlah Sengketa terfasilitas	1 sengketa terfasilitasi	0	
5	Koordinasi pengelolaan isu- isu perdagangan internasional	Jumlah Data Komoditi pesaing yang terdata	2 komoditi data pesaing sebagai bahan kebijakan	0	
12	**Program peningkatan dan pengembangan ekspor**	**Nilai Ekspor Kota Tarakan**	**US$ 781.756.541 (10 %)**	**0**	**Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Umkm**
1	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negri	Jumlah negara tujuan promosi	7 negara tujuan	0	
2	Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor	Jumlah peserta sosialisasi eksport import	40 peserta	0	
3	Kerjasama dengan lembaga internasional dalam rangka pengembangan produk	Jumlah Kerjasama dengan manca negara (MoU)	1 MoU	0	
4	Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait	Jumlah Rapat - rapat koordinasi pusat, provinsi dan daerah	3 kali rapat	0	
5	Pembangunan promosi perdagangan internasional	Jumlah pameran yang diikuti	1 bh Pra konstruksi	0	
13	**Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negri**	**Laju nilai perdagangan**	**7%**	**1,603,750,000**	**Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Umkm**
1	Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional	Regulasi tentang perdagangan,	1 perda terkait perdagang-an	0	
2	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	Jumlah Pasar yang direhab	1 pasar yg representatif (dok perencanaan DED)	1,400,000,000	
3		Progres pembangunan kawasan pergudangan	1 unit Pra konstruksi gudang	0	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
4	Pengambangan pasar lelang daerah	Memasarkan produk unggulan pada pasar lelang	1 dok. Perencanaan (DED)	0	
3	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negri	Jumlah Peserta solialisasi	20 orang	25,000,000	
4	Operasional UPT Pasar	Cakupan waktu pemungutan PAD	1 tahun operasional	100,000,000	
5	Fasilitasi kebijakan dalam rangka kenaikan harga sembako	Bantuan subsidi hari - hari tertentu	2 kali kgt pasar murah	48,750,000	
6	Fasilitasi kebijakan distribusi barang	jumlah Rapat/pertemuan tim teknis yang terkait	2 kali rapat	30,000,000	
14	**Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan**	**Persentase PKL dan Pedagang Asongan yang dibina**	**60%**	**486,000,000**	**Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Umkm**
1	Pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	Jumlah Organisasi PK5 yg terawasi	3 kelompok	0	
1	Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Lokasi tempat berjualan bagi PK5 dan asongan	100 pkl	161,000,000	
2	Bantuan peralatan bagi pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah Sarana dan Prasarana bagi PKL	60 gerobag dan 40 tenda	325,000,000	
16	**PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**			**1,875,936,000**	**Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
	Belanja Tidak Langsung				
	Belanja Langsung			**1,875,936,000**	
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran**	**100%**	**731,736,000**	**Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan perangko dan materai	750 Lembar	1,500,000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, internet dan TV kabel	12 Bulan	452,870,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Cakupan jasa sewa mesin foto copy dan sewa bandwith	2 jenis	43,000,000	
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional/STNK dan pajak kendaraannya	5 R4 dan 13 R2	10,000,000	
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan	7 Orang	48,366,000	
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia	15 Jenis	25,000,000	
7	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	40 jenis	78,000,000	
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan untuk keperluan kantor	6 jenis	3,000,000	
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik.	5 jenis	20,000,000	
10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai yang menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	7 Orang	50,000,000	
2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**120,000,000**	**Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	2 Jenis	50,000,000	
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (BBM, oli, service dan suku cadang)	3 R2, 3 R4	60,000,000	
3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis pemeliharaan komputer/note book/laptop/printer/AC	6 Jenis	10,000,000	
3	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**10,000,000**	**Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Keterangan
		Keluaran Kegiatan			
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jum;ah laporan keuangan SKPD yang benar dan akuntabel	1 Dokumen	5,000,000	
2	Penetapan kinerja	Jumlah dokumen Lakip dan PK, SPIP, Renstra	4 Dokumen	5,000,000	
4	**Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi**	**Meningkatnya fasilitasi pelayanan penanaman modal**	**2 kali sosialisasi, 2 kali bimtek dan 2 kali kajian investasi**	**282,000,000**	**Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
1	Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	Jumlah daya saing dan kerjasama antar usaha besar dan UMKM	40 UMKM	30,000,000	
2	Pengembangan potensi unggulan daerah	Jumlah media promosi potensi unggulan daerah akan lebih efektif dan efesien (dalam bentuk video visual, CD, baliho, leaflet dan lain-lain)	1 Paket bahan promosi	12,000,000	
4	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA	Jumlah konsultasi dan koordinasi dengan lembaga teknis yang terkait PMDN dan PMA	1 kali (50 Orang)	15,000,000	
5	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Jumlah rencana dan pengembangan kegiatan penanaman modal antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten / kota (KP3MN)	2 kali	0	
6	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Jumlah rakor penyesuaikan rencana dan pengembangan PM antar pem. pusat provinsi dan kab/kota	1 Kegiatan	0	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
8	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah peningkatan wawasan/pengetahuan aparatur / pengetahuan aparatur dan pelaku usaha dalam pelaksanaan, pengendalian penanaman modal	1 Kegiatan	125,000,000	
9	Peningkatan kualitas SDM guna pengingkatanpelayanan investasi	Jumlah peningkatan wawasan SDM pelayanan investasi	5 Orang	0	
10	Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah penyelenggaraan even promosi pameran peluang investasi daerah akan lebih terkenal baik	1 Kegiatan	100,000,000	
12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya laporan realisasi investasi penanaman modal	1 Kegiatan	0	
5	**Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi**	**Realisasi investasi**	**100%**	**295,200,000**	**Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
1	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	Jumlah koordinasi kerjasama pada dunia usaha di bidang investasi	1 Kali (60 orang)	75,000,000	
2	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal	Jumlah peta informasi peluang investasi	1 Dokumen	50,000,000	
3	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	Jumlah pengembangan kompetensi petugas sistem informasi penanaman modal	4 Orang	30,200,000	
4	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Jumlah kajian kebijakan peraturan penanaman modal, potensi daerah dan perundang- undangan	1 Dokumen (perda insentif / perda RUPM	40,000,000	
5	Kajian-kebijakan penanaman modal	Jumlah kebijakan peraturan penanaman modal, potensi daerah dan perundang-undangan	1 Dokumen (perda insentif / perda RUPM)	100,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
6	**Program peningkatan pelayanan dan administrasi perizinan**	**Persentase Penerbitan/Penolakan /penangguhan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SP- SOP**	**100**	**242,000,000**	**Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
1	Penertiban administrasi dan persyaratan perizinan	Jumlah penertiban / penolakan / penangguhan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SP-SOP	3000 Ijin	212,000,000	
2	Kompetisi pelayanan publik tingkat nasional	Kompetisi yang diikuti	2 Kegiatan	0	
3	Monitoring evaluasi administrasi pelayanan umum	Jumlah monev pelayanan perizinan yang akan dilaporkan ke Kemendagri	2 Dokumen	0	
4	Sosialisasi dan desiminasi peraturan-peraturan dan pelayanan perizinan dan non perizinan	Jumlah dokumen yang dilaporkan	2 orang	0	
6	Rapat koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi bersama OPD teknis	Jumlah rapat sinkronisasi bersama OPD teknis	2 Kegiatan	0	
2	Rapat koordinasi dan konsultasi bidang perizinan dan non perizinan	Jumlah pegawai yang mengikuti rakor, dan konsultasi bidang perizinan dan nonperizinan	5 Orang	30,000,000	
9	Pembinaan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan	Jumlah sosialisasi / pembinaan teknis pelayanan perizinan	2 Kegiatan	0	
8	**Penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana perizinan**	**Persentase SOP yang dilaksanakan**	**100%**	**95,000,000**	**Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
1	Pelatihan dan magang aparatur pelayanan perizinan	Jumlah aparatur yang mengikuti magang	4 Orang	0	
1	Pengembangan profesionalisme pelayanan perizinan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	4 Orang	50,000,000	
2	Penyusunan standar operasional preosedur dan standar pelayanan perizinan	Jumlah SOP yang di evaluasi	105 SOP	15,000,000	
3	Pengelolaan, pemeliharaan dan pendamping online single submission (OSS)	Jumlah aparatur / sapras pendukung informasi	4 Orang, 5 Jenis	30,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
10	**Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat**	**Prosentase penanganan pengaduan masyarakat**	**100%**	**6,000,000**	**Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
1	Sosialisasi pelayanan umum dan pengaduan	Jumlah sosialisasi pengaduan dan regulasi layanan pengaduan	1 Kegiatan	6,000,000	
11	**Program peningkatan pelayanan umum dan administrasi terhadap masyarakat**	**Persentase Penerbitan/Penolakan /penangguhan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SP- SOP**	**100%**	**50,000,000**	**Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
1	Penyusunan dan pembuatan sarana informasi publik	Persentase peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik perizinan dan nonperizinan	1 Dokumen	50,000,000	
12	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase dokumen arsip yg mempunyai nilai guna yg diselamatkan**	**100%**	**44,000,000**	**Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
1	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Cakupan penyediaan sarana / digitalisasi arsip perizinan dan nonperizinan	3 jenis	39,546,000	
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah penyusutan arsip perizinan dan nonperizinan	300 arsip perizinan dan nonperizinan	4,454,000	
17	**PEMUDA DAN OLAHRAGA**			**1,709,500,000**	**Dinas Pemuda Dan Olahraga**
	Belanja Tidak Langsung				
	Belanja Langsung			**1,709,500,000**	
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran**	**100**	**243,500,000**	**Dinas Pemuda Dan Olahraga**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	1500 Lembar	1,500,000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi,sumber daya Air dan Listrik	12 Bulan	19,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Keterangan
		Keluaran Kegiatan			
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/Operasional yaang pajak kendaraannya terbayarkan	Roda 2 : 5 Unit dan Roda 4 : 3 Unit	9,000,000	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan Administrasi Keuangan	10 Orang	65,000,000	
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia	10 Jenis	5,000,000	
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki	10 Jenis	24,000,000	
7	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	57 Jenis	25,000,000	
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	Barang cetakan : 6 Jenis , Penggandaan : 30.000 Copy	15,000,000	
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor yang tersedia	10 Jenis	5,000,000	
10	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	5 buah	10,000,000	
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang tersedia	Koran 60 Eks, Buku = 4 buah		
12	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	20 kali	10,000,000	
13	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	18 Kali	50,000,000	
14	Pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Jumlah tenaga pendukung penyelenggaraan dan administrasi pemerintahan	10 kali senam	5,000,000	
2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**20,000,000**	**Dinas Pemuda Dan Olahraga**
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	2 Unit AC	10,000,000	
2	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan peralatan kantor	2 unit Laptop	10,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
3	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Persentase ASN yang disiplin**	**100**	**25,000,000**	**Dinas Pemuda Dan Olahraga**
1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin Absensi elektronik	1 Unit	15,000,000	
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	35 Stel		
3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja Lapangan yang diadakan	35 Stell		
4	Pengadaan pakaian KORPRI	JUmlah pakaian KORPRI yang diadakan	35 stell		
5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari tertentu yang diadakan	35 Stell	10,000,000	
4	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**				
1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peraturan yang tersosialisasikan	1 kali		
2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mendapatkan Bimtek	5 Orang		
4	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu**	**100**	**5,000,000**	**Dinas Pemuda Dan Olahraga**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	
5	**Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda**	**Persentase kegiatan Kepemudaan yang berbasis pembinaan Karakter sesuai dengan Pedoman**	**85**	**196,000,000**	**Dinas Pemuda Dan Olahraga**
1	Pendataan potensi kepemudaan	Jumlah data potensi Kepemudaan	20 kelurahan	80,000,000	
2	Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda	Jumlah Raperda Kewirausahaan Muda	1 Dokumen	116,000,000	
6	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	**Prosentase Pemuda yang difasilitasi untuk mengikuti kegiatan Kepemudaan**	**85**	**370,000,000**	**Dinas Pemuda Dan Olahraga**
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina	40 OKP	120,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
2	Pelaksanaan paskibraka	Jumlah Pemuda yang mengikuti Seleksi Paskibraka	42 Orang	250,000,000	
7	**Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda**	**Persentase wirausaha muda yang berprestasi**	**20**	**50,000,000**	**Dinas Pemuda Dan Olahraga**
1	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Jumlah Pelatihan Kewirausahaan	40 Orang	50,000,000	
9	**Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba**	**Persentase pemuda yang telah mengikuti penyuluhan**	**20**		**Dinas Pemuda Dan Olahraga**
1	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti penyuluhan	50 Orang		
8	**Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga**	**Persentase cabor yang mempunyai manajemen yang baik**	**40**	**75,000,000**	**Dinas Pemuda Dan Olahraga**
1	Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi	Jumlah pelatihan sertifikasi pelatih	45 Orang	75,000,000	
9	**Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga**	**Cakupan Partisipasi Masyarakat dalam Even Keolahragaan**	**87%**	**400,000,000**	**Dinas Pemuda Dan Olahraga**
1	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	Jumlah Kategori Lomba	1 Kategori	150,000,000	
2	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah Kompetisi yang dipertandingkan	5 Cabang	250,000,000	
10	**Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga**	**Persentse Gedung Olahraga yang memadai**	**90**	**325,000,000**	**Dinas Pemuda Dan Olahraga**
1	Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga	Bola Volly dan Net Lapangan Volly	Bola 4 buah, Net 2 buah	5,000,000	
2	Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga	Net volly, Bola voly dan tiang net volly	1 paket	5,000,000	
3	Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga	Pengadaan alat Olah Raga Bola futsal 3 buah, Bola Kaki 3 Buah, Bola Volley 3 Buah, 1 Buah Net Volley dan 2 Gawang Futsal	1 paket	15,000,000	
4	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	Jumlah sarana olahraga yang terpelihara	1 sarana dan prasarana	300,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
18	**PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**			**636,176,000**	**Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah**
	Belanja Tidak Langsung				
	Belanja Langsung			**636,176,000**	
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100**	**249,046,000**	**Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang tersedia, jumlah paket pengiriman	150 lembar, 5 paket	520,000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	75,000,000	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajak kendaraannya terbayarkan	13 unit	4,000,000	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi	6 orang	25,626,000	
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia	20 jenis	4,000,000	
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	40 jenis	10,000,000	
7	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	43 jenis	20,000,000	
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	8 jenis	3,000,000	
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang tersedia	8 jenis	2,500,000	
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	6 jenis	40,000,000	
11	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	5 jenis	3,000,000	
12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	3 jenis	5,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
13	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	9 OP	42,000,000	
14	Pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Jumlah tenaga pendukung penyelenggara administrasi pemerintahan	2 orang	14,400,000	
2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**17,130,000**	**Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah**
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah BBM, jumlah pelumas/oli, jumlah suku cadang, jumlah jasa service	1500 liter, 48 liter, 1 jenis, 1 jenis	17,130,000	
3	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**				**Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah**
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	8 orang		
2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	6 orang		
4	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu**	**100**		**Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah**
1	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen keuangan yang akurat	1 dokumen		
2	Penyusunan standar operasional prosedur	Jumlah SOP OPD	2 SOP		
5	**Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan**	**Persentase Pengunjung perpustakaan**	**45.25**	**270,000,000**	**Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah**
1	Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah kegiatan yang diadakan	4 kegiatan	100,000,000	
2	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Jumlah peserta pelatihan/workshop pengelola perpustakaan	60 orang	20,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
3	Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan	Jumlah rapat koordinasi yang dihadiri	5 kali	50,000,000	
4	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Jumlah media yang dipakai untuk publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	6 Jenis	30,000,000	
5	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Jumlah penyediaan bahan pustaka	1500 eksemplar	50,000,000	
6	Pemeliharaan buku dan perlengkapan perpustakaan daerah	Jumlah bahan pustaka yang dipelihara (perbaikan buku)	5000 eksemplar	5,000,000	
7	Pembinaan perpustakaan daerah	Jumlah kegiatan pembinaan perpustakaan daerah yang dilaksanakan	3 kegiatan	15,000,000	
6	**Program perbaikan sistem administrasi kearsipan**	**Persentase arsip yang terintegrasi dalam sistem**	**84.58**	**55,000,000**	**Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah**
1	Kajian sistem administrasi kearsifan	Jumlah Pedoman/TND penyelenggaraan kearsipan	2 pedoman	30,000,000	
2	Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsifan	Jumlah kegiatan terpeliharanya peralatan jaringan informasi kearsipan	2 kegiatan	25,000,000	
7	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase dokumen arsip yang terjaga/terselamatkan**	**84.58**		**Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah**
1	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	1 gedung		
2	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Jumlah dokumen/arsip daerah yang di alihmedia	100 dokumen/arsip		
8	**Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan**	**Persentase sarana kearsipan yang terpelihara**			**Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah**
1	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	1 kegiatan		
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	Jumlah OPD yang di monitoring dan di evaluasi	6 OPD		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
9	**Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan**	**Persentase sarana kearsipan yang terpelihara**	**100**	**45,000,000**	**Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah**
1	Sosialisasi / penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	Jumlah kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan kearsipan	2 kegiatan	45,000,000	
19	**PARIWISATA**			**1,956,578,348**	**Dinas Pariwisata**
	Belanja Tidak Langsung				
	Belanja Langsung			**1,956,578,348**	
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**230,578,348**	**Dinas Pariwisata**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah materai dan jasa pengiriman	50 lembar	300,000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tagihan jasa komunikasi, listrik, air, dll	12 bulan	49,278,348	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	pembayaran pajak dan legalitas kendaraan	3 R4, 10R2	5,000,000	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	pembayaran honorarium pengelola keuangan	12 orang	100,000,000	
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Alat Kebersihan Kantor	20 jenis	1,000,000	
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	jumlah peralatan kerja	10 alat	10,000,000	
7	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah ATK	20 jenis	5,000,000	
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Jumlah Penggandaan	6 jenis	5,000,000	
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor	10 jenis	5,000,000	
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5 jenis	0	
11	Penyediaan makanan dan minuman	penyediaan makan minum rapat/tamu	10 kali	0	
10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rakor yang diikuti	4 kali	50,000,000	
2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**41,000,000**	**Dinas Pariwisata**
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yg terpelihara	3 RD2, 10 RD4	26,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
2	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	pemeliharaan perlengkapan kantor	7komputer, 10 laptop, 9 printer	15,000,000	
3	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**5,000,000**	**Dinas Pariwisata**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Capaian hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah	1 kali	5,000,000	
4	**Program peningkatan pelayanan dan administrasi perizinan**	**Persentase usaha pariwisata yang direview**	**100%**	**50,000,000**	**Dinas Pariwisata**
1	Penertiban administrasi dan persyaratan perizinan	Persentase kegiatan penertiban Administrasi dan Administrasi Teknis Usaha Pariwisata	80% (319 tempat usaha)	50,000,000	
5	**Program pengembangan pemasaran pariwisata**	**Persentase Destinasi wisata yang dipromosikan**	**100%**	**550,000,000**	**Dinas Pariwisata**
2	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Jumlah kerjasama/sinkronisasi kepariwisataan dengan dispar provinsi dan kementerian pariwisata ekonomi kreatif	4 kali	50,000,000	
5	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah event	6 event	500,000,000	
6	**Program pengembangan destinasi pariwisata**	**Persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan**	**100%**	**1,000,000,000**	**Dinas Pariwisata**
6	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (Embung Persemaian)	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (Embung Persemaian) fisik dan non fisik, operasional obyek dan pendampingan dana dak	1 obyek, operasional obyek, 2 kali koordinasi	500,000,000	
8	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (Agrowisata)	Jumlah sarana prasarana yang ter-pelihara dan ditingkatkan, operasional objek pendampingan kegiatan dana dak (fisik dan non fisik)	1 obyek, makan fauna, operasional obyek, 2 kali koordinasi	500,000,000	
3	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah objek wisata baru yang dibangun dan dikembangkan (wisata sejarah/budaya)	1 objek destinasi		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
4	Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan (Penataan Kawasan Pantai Amal)	Jumlah sarana dan prasarana yang ditingkatkan	Pembangunan Sapras dan Penataan Kawasan Pantai Amal		
7	**Program pengembangan Kemitraan**	**Cakupan binaan pelaku usaha**	**25%**	**80,000,000**	**Dinas Pariwisata**
1	Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama dengan Lembaga Lainnya	Jumlah SDM yang dilatih	75 orang	50,000,000	
2	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	Jumlah kelompok yang terfasilitasi	10 kelompok	30,000,000	
20	**PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN**			**6,639,953,166**	**Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan**
	Belanja Tidak Langsung				
	Belanja Langsung			**6,639,953,166**	
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran**	**100%**	**827,103,166**	**Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan**
1	Keg.Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	50 Lembar dan biaya kirim ekspedisi	630,000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	12 Bulan	400,000,000	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajak kendaraannya dibayarkan	76 unit (14 unit Roda 4, 62 Roda 2)	44,740,000	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	13 orang	95,983,200	
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia	23 jenis	23,458,050	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	4 jenis (20 unit AC, 10 unit printer, 10 unit laptop/komputer)	25,000,000	
7	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang tersedia	27 jenis	52,291,916	
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	5 Jenis cetak (200 Lembar map dinas, 20 kotak amplop kop, visi misi walikota, cetak struktur organisasi, lembar disposisi)	20,000,000	
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 jenis (lampu, baterai, kabel)	5,000,000	
10	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	10,000,000	
11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	15 OP	150,000,000	
2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**665,000,000**	**Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan**
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan Dinas/operasional	2 unit Roda 2	0	
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	3 jenis	35,000,000	
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah jenis pemeliharaan kendaraan yang diadakan	5 jenis (servis kendaraan roda 2, roda 4, speed; belanja suku cadang, belanja bbm dan oli)	430,000,000	
3	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang direhab	1 paket	200,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
3	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**5,000,000**	**Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Dokumen Laporan capaian/realisasi kinerja	5,000,000	
4	**Program Peningkatan Disiplin aparatur**	**Persentase ASN yang disiplin**	**100%**	**66,200,000**	**Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan**
1	Pengadaan Mesin/kartu absen	Jumlah pengadaan mesin/kartu absensi	1 unit mesin absensi	15,000,000	
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	64 buah	51,200,000	
3	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri	64 Steel	0	
5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase ASN yang disiplin**	**100%**	**0**	**Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan**
1	Pendiduikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	5 orang	0	
6	**Program peningkatan kesejahteraan petani**	**Persentase petani dan nelayan miskin yang dibina**	**100%**	**655,000,000**	**Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan**
1	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Jumlah Kelompok petani miskin yang dilatih	15 kelompok	330,000,000	
2	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah Lembaga Petani yang ditingkatkan statusnya (kelompok)	15 kelompok/ 26 orang	325,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
7	**Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan**	**Skor PPH , dan persentase Ketersediaan terhadap permintaan bahan makanan penyumbang inflasi (%)**	**85 skor PPH dan 113%**	**625,000,000**	**Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan**
1	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai Pangan	Jumlah dokumen PPH yang tersedia	1 dokumen	100,000,000	
2	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	Jumlah Sarana pendukung pengembangan padi, palawija dan hortik (Jalan usaha tani, sarana pengairan)(paket)	1 paket	50,000,000	
3	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah pembangunan lanjutan penggilingan daging di pasar bom panjang/ Jumlah Pengujian Pangan Segar	1 paket / 100 pengujian	225,000,000	
4	Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Pertanian Produk Perkebunan	Jumlah Sarana produksi pertanian (paket)	1 paket/2 unit	200,000,000	
5	Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan	Rekomendasi tentang penyediaan bahan pangan(rekomendasi)	3 rekomendasi	50,000,000	
8	**Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan**	**Produksi pertanian (ton)**	**70,704**	**637,300,000**	**Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan**
1	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah Kelompok yang dibina	20 kelompok	387,000,000	
2	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian	Jumlah kelompok yang menerima bantuan (mengakomodir usulan musrenbang)	20 kelompok	250,300,000	
9	**Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan**	**Persentasepetani yang menerapkan TTG Pertanian**	**33%**	**100,000,000**	**Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan**
1	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian / perkebunan tepat guna	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana TTG	15 kelompok	0	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
2	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah sarana dan prasarana TT yang dipelihara	2 paket	100,000,000	
3	Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam	Jumlah kelompok yang dilatih menerapkan TTG pertanian	16 kelompok	0	
10	**Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan**	**Persentase penyuluh yang diberdayakan**	**60%**	**162,000,000**	**Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan**
1	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/perkebunan	Jumlah Sarana dan prasarana penyuluhan	1 paket	0	
2	Peningkatan Kesejahteraan penyuluh pertanian/perkebunan	Jumlah PPL yang mendapatkan insentif (orang)	11 orang	162,000,000	
11	**Program Peningkatan Pemasaran Pertanian**	**Nilai pemasaran produksi pertanian/perkebunan (Ribu rupiah))**	**712.088**	**0**	**Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan**
1	Pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/pedesaan hasil pertanian/perkebunan	Bangunan tempat pemasaran hasil pertanian (unit)	3 unit	0	
2	Pembangunan pusat-pusat etalase/exibisi/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan	Jumlah pameran/promosi	3 kali	0	
3	Pemeliharaan rutin/berkala pusat-pusat etalase/exibisi/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan	Jumlah bangunan pemasaran yang dipelihara(unit)	1 unit	0	
2	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan	Jumlah pameran/promosi	2 kali	0	
12	**Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak**	**angka kematian sapi/kerbau karena kasus penyakit.**	**15%**	**125,000,000**	**Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan**
1	Pendataan masalah peternakan	Data masalah peternakan (dokumen)	1 dokumen	0	
2	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	jumlah Obat-obatan dan peralatan kesehatan hewan	1 paket	75,000,000	
3	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	cakupan waktu Pengawasan kesehatan lalu lintas ternak	1 tahun	5,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
4	Penjaminan mutu dan keamanan pangan asal hewan	jumlah Hasil uji bahan pangan asal hewan	1 paket	25,000,000	
5	Peningkatan Laboratorium	Jumlah Peralatan dan bahan uji laboratoriun keswan	1 paket	20,000,000	
6	Monitoring dan evaluasi serta pelaporan	Dokumen laporan kesehatan hewan	1 dokumen	0	
13	**Program peningkatan produksi hasil peternakan**	**Produksi peternakan (daging dan telur) (kg)**	**7.180.520 daging dan 775.389 telur**	**778,500,000**	**Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan**
1	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	Jumlah kandang ayam ras (unit)	7 unit	0	
1	Pembibitan dan Perawatan Ternak	Jumlah ternak yang dibibitkan dan dirawat (sapi Bakalan/aseptor dan ayam)	200 ekor (Ayam)	78,500,000	
3	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Jumlah ternak yang didistribusikan (ekor)	20 ekor	0	
2	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung Kawasan Pertanian Terpadu (paket)	1 paket	700,000,000	
5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dokumen pelaporan	1 dokumen	0	
14	**Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan**	**Nilai pemasaran produksi peternakan (ribu rupiah)**	**358.835**	**50,000,000**	**Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan**
1	Pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/pedesaan hasil peternakan	Jumlah sarana dan prasarana pasar hasil peternakan : RPH sapi, RPU,RPH babi, Outlet (paket)	2 paket	50,000,000	
5	Pembangunan pusat-pusat etalase/exibisi/promosi atas hasil produksi peternakan	Jumlah tempat penjualan yang dibangun	2 unit	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala pusat-pusat etalase/exibisi/promosi atas hasil produksi peternakan	Jumlah tempat penjualan yang diperbaiki	3 unit	0	
15	**Program pengembangan budidaya perikanan**	**Produksi perikanan budidaya (ikan, udang, rumput laut) (ton)**	**108,75 ikan dan udang 161.692,76 rumput laut**	**460,000,000**	**Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Keterangan
		Keluaran Kegiatan			
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
1	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Jumlah Pokdakan	96	160,000,000	
2	Peningkatan oprasional dan pengembangan Balai Benih Udang	Jumlah produksi benur	5,000,000	30,000,000	
3	Peningkatan dan Pengembangan Oprasional Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Jumlah laporan hasil uji	100 LHU	75,000,000	
4	Pengembangan sarana dan prasarana budidaya	Jumlah pokdakan yang dibantu (hasil musrenbang: bantuan bibit,mesin pembuat pakan,irigasi tambak/kolam partisipasif)	2 UPR	195,000,000	
16	**Program pengembangan perikanan tangkap**	**Produksi perikanan tangkap (juta rupiah)**	**21.101**	**783,850,000**	**Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan**
1	Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah KUB	134 kelompok	160,000,000	
2	Peningkatan Kualitas dan Rehabilitasi Alat Tangkap	Jumlah KUB	5 KUB	0	
3	Pendatan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan	3.000 pelaku usaha	60,000,000	
4	Pengembangan sarana dan prasarana tangkap dan pendampingan	Jumlah KUB	3 KUB	563,850,000	
17	**Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan**	**Nilai pemasaran produksi (ekspor) perikanan (ton)**	**13.030**	**700,000,000**	**Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan**
1	Peningkatan dan Pengembangan Pengolahan serta Pemasaran Produksi Hasil Usaha dan investasi perikanan	Jumlah Pameran/promosi produk Kelautan dan Perikanan	1 kali	175,000,000	
2	Peningkatan Operasional dan Pengembangan LPPMHP	Jumlah Pengujian	70 pengujian	250,000,000	
3	Pengembangan dan Penguatan Penanganan Sistem Pasca Panen dan Penanggulangan Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya	Jumlah penitipan ikan (ton), (rehab pasar ikan tradisional- hasil murenbang)	81 ton	175,000,000	
4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Kelompok pengolah hasil pertanian	3 kelompok	0	
5	Pengembangan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Jumlah petugas QC UPI (orang)	30 orang	100,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
21	**SEKRETARIAT DAERAH**			**15,651,363,148**	**SEKRETARIAT DAERAH**
	Belanja Tidak Langsung				
	Belanja Langsung			**15,651,363,148**	
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100**	**8,845,663,713**	**SEKRETARIAT DAERAH**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Barang Pos dan Paket Pengiriman	350 Lembar Materai dan Paket Pengiriman	3,950,000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan Waktu Pembayaran Belanja Listrik, Air, Telepon, Astinet, Gas dan sewa TV Kabel	12 bln Belanja Telepon, Air, Listrik, Astinet, Gas dan Sewa TV Kabel	1,100,000,000	
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	24 keg. Dekorasi, 45 keg Belanja Cetak, sewa mobilitas tamu, 40 sewa tenda dan 30 sewa sound system	450,500,000	
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional yang dibayar	2 Unit R2, 30 Unit R4 dan 6 Unit R6	60,223,170	
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah ASN yang mendapat Tunjangan Adm. Pengelola Keuangan	15 Honorarium PNS	128,760,450	
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan dan peralatan Kebersihan Kantor yg tersedia	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa,30 Item Peralatan dan Bahan Pembersih,2 Kegiatan Lelang dan Laundry serta SPPD	2,361,004,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Keterangan
		Keluaran Kegiatan			
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
7	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yg tersedia	175 item Alat Tulis Kantor	307,992,590	
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetaan dan Penggandaan yg tersedia	9 item Belanja Cetak dan 75.100 Lembar Penggandaan	136,103,900	
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik Ktr Setda, Rumjab Walikota/Wakil Walikota yg diadakan	5 item Belanja Komponen Listrik	86,321,235	
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	1000 Eksemplar Koran/Majalah	10,000,000	
11	Penyediaan makanan dan minuman	65 Kegiatan Rapat, 215 Kegiatan Tamu	65 Kegiatan Rapat, 215 Kegiatan Tamu	2,300,000,000	
12	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Terselenggaranya Rapat Koordinasi / Konsultasi Antar Lembaga	Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan luar Daerah	1,500,000,000	
13	Pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Jumlah Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	5 Honorarium PNS, 12 Bulan Kebutuhan Pokok Rumjab WK & WWK, 161 Org Petugas Kegiatan, 10 Org Tunjangan (Supir & LO), 2 Org Biaya Jasa Perawatan	243,400,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
14	Penunjang kantor penghubung	Cakupan waktu dan Penyediaan pengelolaan Kantor Penghubung	7 item peralatan kebersihan, 1.104 BBM, 12 liter Olie, 18 liter Olie Perseneling, 9 liter Olie Garden, 2 kali Filter Olie, Belanja Listrik, Air, 7 Item Belanja Makan/Minum, 1 sewa Tv kabel, 2 belanja Service, belanja suku cadabg belanja, dan sewa gedung.	157,408,368	
2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**1,891,677,600**	**SEKRETARIAT DAERAH**
1	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah Pengadaan Perlengkapan rumjab/Dinas	AC 6 Unit, Gorden 2 Paket dan 18 Peralatan RT lainnya	40,000,000	
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Ac 2 Unit, 2 Dispenser, 3 Pemanas Air, 6 Unit Komputer, 3 Unit Printer, 2 Unit Laptop, 24 set Taplak Meja, 100 unit kursi rapat, 1 paket mic Confrence system, 15 bh Kontainer box dan 1 paket penangkal petir	324,100,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Keterangan
		Keluaran Kegiatan			
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
3	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah Pemeliharaan berkala Rumah Jabatan	2 keg pemeliharaan listrik, 2 keg pemeliharaan instalasi air, 3 keg rehab rumjab, 1 pembuatan pendopo, 1 keg pengecetan rumah, rehab kamar mandi dan 1 kali rehab taman.	269,040,095	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor	15 Unit pengisian tabung pemadam, 2 keg pemasangan instalasi listrik, 2 keg instalasi air, 1 keg rehab WC, 1 keg pembuatan kanopi, 1 keg pengecetan gedung, 1 keg pengecetan siring, 1 keg pembuatan huruf timbul papan instansi, 1 keg 2 sumur bor, 1 keg pembuatan jaringan telepon PABX, 1 keg pembuatan Aquarium, 1 keg pembuatan Neon Box, 1 Keg.pembuatan Bartender lubung dan serbaguna, penambahan daya listrik Ktr Setda	414,754,603	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Keterangan
		Keluaran Kegiatan			
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah BBM yg diadakan Jumlah suku cadang yg diadakan Jumlah jasa servis Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	2 Kegiatan Belanja Servis, 3 Kegiatan Belanja Suku Cadang,18711 Liter Pertalite,17947 Liter Dexlite, 12 ltr olie samping, 12 liter olie gear, 252 liter olie samping, 92 liter olie perseneling, 84 liter olie gardan 48 pcs filter olie	618,207,652	
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas Sekretariat (Sewa Indovison, Sewa TV Kabel, AC dan ALat Elektronik. yang dipelihara	2 sambungan indihome, 7 sambungan TV Kabel, 32 unit AC dan Alat Elektronik Rumjab KDH, WKDH dan Sekda	65,500,000	
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor yg dipelihara	5.000 ltr BBM genset, 100 ltr Olie mesin genset, 1 keg suku cadang Generator set, 100 ltr olie mesin genset, 2 bh filter olie mesin genset, 60 unit AC, 25 Unit, 54 Unit komputer dan Printer, 10 Unit Mesin FC	160,075,250	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
3	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Persentase ASN yang disiplin**	**100**	**43,500,000**	**SEKRETARIAT DAERAH**
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Aparatur	150 Steel	43,500,000	
4	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat dan**	**100**	**150,000,000**	**SEKRETARIAT DAERAH**
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	20 orang	150,000,000	
5	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu**	**100**	**75,000,000**	**SEKRETARIAT DAERAH**
1	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah pelaporan keuangan	1 Dok. Lap. keuangan, 1 Dok. Lakip, dan 1 Dok Renstra	75,000,000	
2	Penetapan kinerja	Jumlah Perangkat Daerah yang membuat Lakip	32 Perangkat Daerah		
6	**Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan**				**SEKRETARIAT DAERAH**
1	Pembinaan lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP)	Jumlah rapat koordinasi pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah rapat koordinasi pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah		
7	**Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan**				**SEKRETARIAT DAERAH**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah rapat koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional	Jumlah rapat koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional		
8	**Program pengembangan data/informasi**				**SEKRETARIAT DAERAH**
1	Bank data perekonomian	Jumlah Dokumen dan ASN/Non ASN yang ikut pelatihan	1 dokumen & 13 kali Pelatihan		
9	**Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial**			**20,000,000**	**SEKRETARIAT DAERAH**
1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah rapat dan kegiatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah rapat dan kegiatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan		
2	Verifikasi bansos dan hibah	Jumlah rapat dan kegiatan pelaksanaan verifikasi bansos dan hibah	Jumlah rapat dan kegiatan pelaksanaan verifikasi bansos dan hibah	20,000,000	
10	**Program peningkatan kerjasama dan pengembangan potensi ekonomi daerah**	**Persentase Potensi Ekonomi Daerah yang di kembangkan**	**100**	**520,000,000**	**SEKRETARIAT DAERAH**
1	Pengembangan dan peningkatan potensi unggulan daerah	Jumlah mengikuti Pameran ICE	1 kali (Pameran ICE)	420,000,000	
2	Penyusunan kebijakan bidang ekonomi	Jumlah Dokumen Kebijakan Ekonomi	1 dokumen	100,000,000	
11	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	**Persentase penyelenggaraan PHBN**	**100**	**1,487,200,000**	**SEKRETARIAT DAERAH**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap rasa nasionalisme	Jumlah Upacara	9 Upacara	1,487,200,000	
12	**Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah**	**Persentase peningkatan layanan kedinasan KDH/WKDH**	**100**	**796,141,835**	**SEKRETARIAT DAERAH**
1	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Jumlah Terpenuhinya kegiatan Kunjungan Pejabatan Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah dan Non	90 Sandang Batik, 80Buah Plakat, 87 Kegiatan Jasa Pihak Ketiga Jasa Pihak Keiga dan 11 Kali Perjalanan Dinas,8 Bulan Honor Tim Penerimaan Kunjungan	304,141,835	
2	Fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah Buku	2 Buku	342,000,000	
3	Fasilitasi pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah Fasilitasi Pendampingan Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH		150,000,000	
13	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase kasus-kasus hukum yang tertangani**	**85**	**422,000,000**	**SEKRETARIAT DAERAH**
1	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah Mediasi Kasus Pengaduan	5 Mediasi	50,000,000	
2	Penyelesaian kasus-kasus hukum	Jumlah Kasus hukum yang diselesaikan	10 Perkara yang diselesaikan	372,000,000	
14	**Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah**	**Persentase fasilitasi dan kerjasama antar daerah dalam penyediaan layanan publik**	**100**	**400,000,000**	**SEKRETARIAT DAERAH**
1	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	Jumlah Dokumen MOU dan PKS	12 Dokumen MOU dan 30 PKS	400,000,000	
15	**Program penataan peraturan perundang-undangan**	**Persentase produk hukum yang difasilitasi**	**100**	**150,000,000**	**SEKRETARIAT DAERAH**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
1	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah Produk Hukum yang dilegislasi	250 Produk Hukum	150,000,000	
16	**Program pendukung koordinasi penyelenggaraan pemerintahan**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang terkoordinasi**	**100**	**110,000,000**	**SEKRETARIAT DAERAH**
1	Koordinasi bidang keprotokoleran	Jumlah ASN yang mengikuti Koordinasi	6 orang		
2	Koordinasi pengendalian kegiatan pembangunan	Terselenggaranya koordinasi pengendalian pembangunan daerah	12 Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	10,000,000	
3	Penguatan kelembagaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD)	Jumlah FKPD yang Mengikuti Penguatan Kelembagaan	6 FKPD	100,000,000	
17	**Program pembinaan keagamaan**	**Persentase pembinaan keagamaan**	**100**	**365,000,000**	**SEKRETARIAT DAERAH**
1	Pelaksanaan STQ/MTQ	Jumlah rapat dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan STQ/MTQ Tingkat Kota	Jumlah rapat dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan STQ/MTQ Tingkat Kota	50,000,000	
2	Pembinaan pengelola rumah ibadah	Jumlah pelaksanaan Pengelola Rumah Ibadah	Jumlah pelaksanaan Pengelola Rumah Ibadah	215,000,000	
3	Pembinaan dan bimbingan mental spiritual masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan bimbingan mental spiritual	Jumlah pelaksanaan kegiatan bimbingan mental spiritual	100,000,000	
18	**Program penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah**	**Persentase PD yang tertata baik secara kelembagaan**	**100**	**195,000,000**	**SEKRETARIAT DAERAH**
1	Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah disusun dalam Anjab, ABK dan EVJAB	32 Perangkat Daerah	50,000,000	
2	Penyelenggaraan layanan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Terselenggaranya layanan pengadaan barang/jasa	1	145,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
19	**Program pengembangan badan usaha milik daerah**	**Persentase BUMD yang sehat**	**100**	**50,000,000**	**SEKRETARIAT DAERAH**
1	Pembinaan dan pengembangan BUMD	Jumlah BUMD yang di bina dan dikembangkan	5 BUMD	50,000,000	
20	**Program pembinaan dan pengembangan aparatur**	**Persentase kecamatan dan kelurahan yang dibina**	**100**	**80,180,000**	**SEKRETARIAT DAERAH**
1	Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan	4 Kecamatan	80,180,000	
21	**Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi**				
1	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan	12 orang		
22	**Program kerjasama informasi dan media massa**				
1	Rapat kerja kehumasan	Jumlah ASN yang mengikuti Rapat Kerja Kehumasan	7 orang / 3 kali Rakor		
23	**Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan**			**50,000,000**	**SEKRETARIAT DAERAH**
1	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Cakupan waktu Pemeliharaan PIHPS	12 Bulan (pemeliharaan PIHPS)	50,000,000	
22	**SEKRETARIAT DPRD**			**15,222,225,145**	**SEKRETARIAT DPRD**
	Belanja Tidak Langsung				
	Belanja Langsung			**15,222,225,145**	
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100**	**1,790,590,555**	**SEKRETARIAT DPRD**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai yang tersedia dan Pengiriman Dokumen	820 Lembar	4,000,000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	375,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	6 Jenis	84,521,325	
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajak kendaraanya terbayarkan	38 unit (12 unit roda 4, 26 unit roda 2)	22,491,315	
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	17 orang	93,821,700	
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor tersedia	5 jenis (752 pcs)	27,577,500	
7	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah atk yang tersedia	47 jenis (1.772 pcs)	71,811,000	
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia jumlah penggandaan yang tersedia	9 jenis (765 pcs) barang cetak ,75.000 lembar penggandaan	71,811,836	
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 jenis (166 pcs)	17,336,025	
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	10 jenis	150,000,000	
11	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang diadakan	5 jenis	34,400,625	
12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	10800 exl, Iklan 3 kali	165,226,504	
13	Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan waktu penyediaan makan minum harian pimpinan dan anggota dewan	12 bulan	150,217,725	
14	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	4 OP	499,980,000	
15	Pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Jumlah tenaga pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	14 orang	22,395,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**467,634,590**	**SEKRETARIAT DPRD**
1	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan dinas	2 Jenis	78,270,090	
2	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	6 jenis	50,000,000	
3	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	1 unit	200,000,000	
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah BBM yang diadakan	7538 liter	139,364,500	
3	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Persentase ASN yang disiplin**	**100**		**SEKRETARIAT DPRD**
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	138 Stel DPRD dan 80 stel sekretariat		
4	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat dan Bimtek**	**100**	**50,000,000**	**SEKRETARIAT DPRD**
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah asn yang mengikuti bimbingan teknis implementasi perundang-undangan	10 orang	50,000,000	
5	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu**	**100**		**SEKRETARIAT DPRD**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	5 Dokumen		
6	**Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah**	**Persentase fasilitasi rapat kerja DPRD**	**100**	**12,824,000,000**	**SEKRETARIAT DPRD**
1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang diparipurnakan	8 Ranperda	1,775,750,000	
2	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama	Jumlah hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	100 kali	138,000,000	
3	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah rapat alat kelengkapan dewan	50 kali	1,244,750,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Keterangan
		Keluaran Kegiatan			
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
4	Rapat-rapat paripurna	Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan	25 kali	153,000,000	
5	Kegiatan Reses	Jumlah reses anggota DPRD	3 kali	1,200,000,000	
6	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	33 kali (11 kali dalam daerah, 21 kali luar daerah)	6,487,750,000	
7	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah Bimtek anggota Pimpinan dan anggota DPRD	2 kali Bimtek	478,500,000	
8	Rapat-rapat fasitasi penganggaran	Jumlah dokumen fasilitasi penganggaran yang dilaksanakan	5 Dokumen	785,100,000	
9	Rapat-rapat fasilitasi pengawasan	Jumlah dokumen fasilitasi Pengawasan yang di laksanakan	5 Dokumen	561,150,000	
10	Pembangunan dan pengembangan sistem informasi lembaga perwakilan rakyat daerah	Jumlah Aplikasi sistem informasi yang dibangun dan dipelihara	3 aplikasi		
7	**Program jaminan kesehatan publik**	**Cakupan jaminan kesehatan anggota DPRD**	**100**	**90,000,000**	**SEKRETARIAT DPRD**
1	Jaminan kesehatan	Jumlah pimpinan dan anggota dewan yang mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan	30 orang	90,000,000	
23	**KECAMATAN TARAKAN TENGAH**			**4,843,807,109**	**KECAMATAN TARAKAN TENGAH**
	Belanja Tidak Langsung				
	Belanja Langsung			**4,843,807,109**	
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100**	**694,591,409**	**KECAMATAN TARAKAN TENGAH**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai Yang Tersedia	1.320 Lembar	3,780,000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan Waktu Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,dan Listrik	12 Bulan	297,346,511	
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis		
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajak kendaraannya terbayarkan	67 unit	15,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tujuan administrasi keuangan	24 Orang	140,196,000	
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia	37 Jenis	20,000,000	
7	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	63 jenis	50,848,350	
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pemggandaan yg tersedia	5/100.000 Jenis/lembar	27,493,620	
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen isntalasi listrik/penerangan bangunan kantor yg tersedia	35 jenis/barang	3,000,000	
10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	6.000 kotak	47,980,000	
11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	37 op		
12	Pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Jumlah tenaga pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	18 orang	88,946,928	
2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**24,315,700**	**KECAMATAN TARAKAN TENGAH**
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah suku cadang yg diadaka dan jasa servis	14 Jenis Servis	14,315,700	
2	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	18 jenis	10,000,000	
3	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Persentase ASN yang disiplin**	**100**	**0**	**KECAMATAN TARAKAN TENGAH**
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	170 stel		
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu (pakaian adat, Training olah raga)	335 stel		
4	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase ASN yang telah mengikuti diklat dan bimtek**	**100**	**0**	**KECAMATAN TARAKAN TENGAH**
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	8 orang		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mendapatkan bimtek (5 kelurahan)	10 orang		
3	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	10 orang		
			Jumlah Rp.		
5	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu**	**100**	**0**	**KECAMATAN TARAKAN TENGAH**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja	3 dokumen		
			Jumlah Rp.		
6	**Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**			**0**	**KECAMATAN TARAKAN TENGAH**
1	Fasilitasi administrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah SKPBT yang di terbitkan	600 SKPBT		
			Jumlah Rp.		
7	**Program pembinaan keagamaan**	**Persentase keberhasilan kontingen lomba keagaaman di Tingkat Kota**	**100**	**211,400,000**	**KECAMATAN TARAKAN TENGAH**
1	Pelaksanaan STQ/MTQ	Jumlah Qori/Qoriah yang mewakili ke tingkat kota	1 tahun	201,400,000	
2	Penyelengaaraan lomba keagamaan	Jumlah pelaksaan lomba keluaraga sakinah	1 Tahun	10,000,000	
8	**Program fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan di wilayah kecamatan**	**Persentase konflik pertanahan yang tertangani di Wilayah Kecamatan**	**100**	**10,000,000**	**KECAMATAN TARAKAN TENGAH**
1	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan di wilayah kecamatan	Jumlah konflik-konflik yang tertangani	150 kasus	10,000,000	
9	**Program pelayanan administrasi kependudukan di wilayah kecamatan**	**Persentase kepemilikan KTP di wilayah Kecamatan**	**100**		**KECAMATAN TARAKAN TENGAH**
1	Pelayanan administrasi kependudukan di wilayah kecamatan	Jumlah masyarakat yang memiliki e-KTP	2 kali		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
10	**Program fasilitasi penerbitan ijin usaha mikro kecil (IUMK)**	**Persentase Usaha Mikro Kecil yang memiliki ijin usaha**	**100**		**KECAMATAN TARAKAN TENGAH**
1	Fasilitasi penerbitan ijin usaha mikro kecil	Jumlah IUMK yang di terbitkan	3895 UMKM		
11	**Program fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum wilayah kecamatan**	**Persentase masalah ketentraman dan ketertiban umum wilayah kecamatan yang di selesaikan**	**100**	**5,000,000**	**KECAMATAN TARAKAN TENGAH**
1	Sosialisasi ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Jumlah penyuluhan dan sosialisasi yang di laksanakan	2 kali penyuluhan	5,000,000	
			Jumlah Rp.		
12	**Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan**	**Persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang aktif**	**100**	**2,616,000,000**	**KECAMATAN TARAKAN TENGAH**
1	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah terbayarnya insentif RT,RW, dan kader dasawisma dan pemilihan & pelantikan RT & RW	661 Rt,RW, Dasawisma dan organisasi kepemudaan	2,091,000,000	
2	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Kampung Satu Skip	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	9 kegiatan	105,000,000	
3	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pamusian	Tenda Uk.6x5x3,5	2 Set	105,000,000	
4	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sebengkok	Pemberian Makanan Tambahan Posyandu	12 bulan x Rp. 150.000,-	105,000,000	
5	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Selumit	Penyuluhan PHBS	100 orang	105,000,000	
6	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Selumit Pantai	Pengerukan Drainase	P= 150m L = 1 m	105,000,000	
10	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**Persentase kelurahan dengan kategori "BAIK"**	**100**	**57,500,000**	**KECAMATAN TARAKAN TENGAH**
1	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Jumlah pelaksanaan MUSRENBANG	6 Tahun	35,000,000	
2	Pelaksanaan bulan bakti gotong royong	Jumlah pelaksanaan kegiatan bulan bakti gotong royong	6 tahun	12,500,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
3	Penyelengaraan lomba kegiatan kemasyarakatan	Lomba penyelenggaraan lomba kemasyarakatan	2 lomba	10,000,000	
11	**Program pembangunan kelurahan**	**Persentase sarana dan prsarana kelurahan yang terbangun**	**100**	**1,225,000,000**	**KECAMATAN TARAKAN TENGAH**
1	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kampung Satu Skip	SEMENISASI	P : 150 L : 1,5 T : 0,10	245,000,000	
2	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Pamusian	Penyiringan samping rumah ibu rusdianah	200 Meter	245,000,000	
3	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Sebengkok	Perbaikan WC Umum	Panjang 8 meter Lebar 3 meter	245,000,000	
4	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Selumit	Perbaikan drainase	100Mx1M	245,000,000	
5	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Selumit Pantai	Renovasi/Rehab Poskamling	1 Unit	245,000,000	
24	**KECAMATAN TARAKAN BARAT**			**5,011,260,097**	**KECAMATAN TARAKAN BARAT**
	Belanja Tidak Langsung				
	Belanja Langsung			**5,011,260,097**	
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100**	**613,759,797**	**KECAMATAN TARAKAN BARAT**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah dokumen bermaterai	800 lbr	1,578,000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	211,298,497	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	pembayaran pajak stnk kendaraan dinas operasiona	61 unit	15,500,000	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terbayarnya honorarium jasa administrsi keuangan	22 orang	135,996,000	
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya pealatan kebersihan kantor dan bahan pembersih	25 jenis	18,558,000	
6	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah ketersidiaan alat tulis kantor	25 jenis	60,000,000	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah keersiaan barang cetakan dan penggandaan	6 jenis	24,600,300	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah kegiatan instalasi listrik/ bangunan kantor	10 jenis	23,714,000	
9	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah penyediaan makan dan minum	3000 kotak	35,515,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
10	Pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	terbayarnya honorarium kapolsek, danramil, babinsa, babinkamtibmas dan petugas linmas	17 orang	87,000,000	
2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**55,000,000**	**KECAMATAN TARAKAN BARAT**
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	6 jenis	10,000,000	
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah bbm yang diadakan, jumlah suku cadang yang diakan jumlah jasa service	122 jasa service, 500 liter	30,000,000	
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peraltan gedung kantor yang dipelihara	24 jenis	15,000,000	
3	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Persentase ASN yang disiplin**	**100**		**KECAMATAN TARAKAN BARAT**
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	100 unit		
4	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat dan Bimtek**	**100**		**KECAMATAN TARAKAN BARAT**
1	Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah asn yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	8 orang		
2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	jumlah asn yang mengikuti sosialisasi perundang undangan	7 orang		
5	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu**	**100**		**KECAMATAN TARAKAN BARAT**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen	1		
6	**Program pembinaan keagamaan**	**Persentase keberhasilan kontingen lomba keagaaman di Tingkat Kota**	**100**	**225,000,000**	**KECAMATAN TARAKAN BARAT**
1	Pelaksanaan STQ/MTQ	Jumlah Qori/ Qoriah ke Tingkat Kota	50 Qori/ Qoriah	215,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
2	Penyelengaaraan lomba keagamaan	Jumlah pelaksanaan lomba keluarga sakinah	1 kali	10,000,000	
7	**Program fasilitasi pemanfaatan bidang tanah**	**Persentase SKPBT yang diterbitkan**	**100**		**KECAMATAN TARAKAN BARAT**
1	Fasilitasi administrasi pemanfaatan bidang tanah	prosentase SKPBT	0.75		
8	**Program fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan di wilayah kecamatan**	**Persentase konflik pertanahan yang tertangani di Wilayah Kecamatan**	**100**	**10,000,000**	**KECAMATAN TARAKAN BARAT**
1	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan di wilayah kecamatan	jumlah konflik-konflik yg tertangani	75 konflik	10,000,000	
9	**Program pelayanan administrasi kependudukan di wilayah kecamatan**	**Persentase kepemilikan e- KTP di wilayah Kecamatan**	**100**	**5,000,000**	**KECAMATAN TARAKAN BARAT**
1	Pelayanan administrasi kependudukan di wilayah kecamatan	jumlah masyarakat yang memiliki KTP	2 kali	5,000,000	
10	**Program fasilitasi penerbitan ijin usaha mikro kecil (IUMK)**	**Persentase Usaha Mikro Kecil yang memiliki ijin usaha**	**100**		**KECAMATAN TARAKAN BARAT**
1	Fasilitasi penerbitan ijin usaha mikro kecil	Jumlah IUMK yng di terbitkan	500 IUMK		
11	**Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan**	**Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Aktif**	**70**	**2,827,500,000**	**KECAMATAN TARAKAN BARAT**
1	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	terbayarnya insentif RT/RW kaderisasi dasawisma dan operasional organisasi kepemudaan kelurahan	638 orang	2,302,500,000	
2	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Karang Anyar	Senam Sehat dan skrinning kesehatan	4 kegiatan	105,000,000	
3	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Karang Balik	Pelatihan Membuat Amplang	Masyarakat Se-Kelurahan Karang Balik	105,000,000	
4	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Karang Rejo	Pelatihan dan Pembuatan Olahan Rumput Laut Kelurahan Karang Rejo	1 Kegiatan	105,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
5	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Karang Anyar Pantai	Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	se-Kelurahan Karang Anyar Pantai	105,000,000	
6	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Karang Harapan	Sosialisasi Narkoba Sekelurahan Karang Harapan	17 RT	105,000,000	
12	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**Persentase Kelurahan dengan Kategori "Baik"**	**100**	**50,000,300**	**KECAMATAN TARAKAN BARAT**
1	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	prosentase usulan yang terokomodir di renja RKPD	0.8	35,000,300	
2	Pelaksanaan bulan bakti gotong royong	jumlah pelaksanaan kegiatan bulan bhakti gotong royong di 5 kelurahan	5 kegiatan / kelurahan	15,000,000	
13	**Program pembangunan kelurahan**	**Persentase sarana dan prsarana kelurahan yang terbangun**	**100**	**1,225,000,000**	**KECAMATAN TARAKAN BARAT**
1	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Karang Anyar	Siring sungai beakang rumah Ibu In/ Bapak Talib	100 M	245,000,000	
2	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Karang Balik	Pengadaan Perlengkapan Alat Alat Kerja Bakti RT.11	1 Paket	245,000,000	
3	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Karang Rejo	Semenisasi Jalan samping toko emas RT.02 dengan volume P=30, L=1 (satuan meter/centimeter)	1 Kegiatan	245,000,000	
4	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Karang Anyar Pantai	Pengadaan Gerobak roda 2	5 unit	245,000,000	
5	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Karang Harapan	Normalisasi Drainase Jalan Lestari Depan Jainul Mart RT. 03	50 m x 1 m x 50 m	245,000,000	
25	**KECAMATAN TARAKAN TIMUR**			**5,106,280,113**	**KECAMATAN TARAKAN TIMUR**
	Belanja Tidak Langsung				
	Belanja Langsung			**5,106,280,113**	
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100**	**661,715,213**	**KECAMATAN TARAKAN TIMUR**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai	510 lembar	3,150,000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	12 bulan	212,227,213	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajak kendaraannya terbayarkan	85 unit	24,000,000	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	18 orang	165,000,000	
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia	20 jenis	30,000,000	
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	25 jenis	40,000,000	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	5 jenis	25,000,000	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 jenis	2,050,000	
9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	400 kotak	11,000,000	
10	Pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Jumlah tenaga pendukung penyelenggaraan administrasi perkantoran	32 orang	149,288,000	
2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**56,378,800**	**KECAMATAN TARAKAN TIMUR**
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah BBM,Suku Cadang dan Jasa service yang diadakan	3,516 Liter dan 12 Jenis	32,378,800	
2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	4 jenis	24,000,000	
3	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Persentase ASN yang disiplin**	**100**		**KECAMATAN TARAKAN TIMUR**
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	112 stel		
2	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pengadaan pakaian lapangan yang diadakan	12 stel		
3	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	112 stel		
4	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian batik yang diadakan	112 stel		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
4	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat dan Bimtek**	**100**		**KECAMATAN TARAKAN TIMUR**
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	8 orang		
2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	Jumlah pegawai yang mendapatkan bimtek	15 orang		
3	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi paket reguler tentang pengelolaan keuangan daerah	10 pegawai/Thn		
5	**Program pembinaan keagamaan**	**Persentase keberhasilan kontingen lomba keagaaman di Tingkat Kota**	**100**	**224,886,100**	**KECAMATAN TARAKAN TIMUR**
1	Pelaksanaan STQ/MTQ	Jumlah qori/qoriah yang mewakili ke tingkat kota	54 qori/qoriah	224,886,100	
6	**Program fasilitasi pemanfaatan bidang tanah**	**Persentase SKPBT yang diterbitkan**	**100**		**KECAMATAN TARAKAN TIMUR**
1	Fasilitasi administrasi pemanfaatan bidang tanah	Jumlah SKPBT yang di terbitkan	2000 SKPBT		
7	**Program fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan di wilayah kecamatan**	**Persentase konflik pertanahan yang tertangani di Wilayah Kecamatan**	**100**	**15,000,000**	**KECAMATAN TARAKAN TIMUR**
1	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan di wilayah kecamatan	Jumlah Konflik-konflik yang tertangani	35 konflik	15,000,000	
8	**Program pelayanan administrasi kependudukan di wilayah kecamatan**	**Persentase kepemilikan e- KTP di wilayah Kecamatan**	**100**	**5,000,000**	**KECAMATAN TARAKAN TIMUR**
1	Pelayanan administrasi kependudukan di wilayah kecamatan	Jumlah pelaksanaan razia KTP	2 kali/Thn	5,000,000	
9	**Program fasilitasi penerbitan ijin usaha mikro kecil (IUMK)**	**Persentase Usaha Mikro Kecil yang memiliki ijin usaha**	**100**		**KECAMATAN TARAKAN TIMUR**
1	Fasilitasi penerbitan ijin usaha mikro kecil	Jumlah IUMK yang diterbitkan	300 IUMK		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
10	**Program fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum wilayah kecamatan**	**Persentase masalah ketentraman dan ketertiban umum wilayah kecamatan yang di selesaikan**	**100**		**KECAMATAN TARAKAN TIMUR**
1	Pendataan deteksi dini permasalahan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Jumlah penyuluhan dan sosialisasi yang dilaksanakan	100 orang		
11	**Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan**	**Persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang aktif**	**100**	**2,358,300,000**	**KECAMATAN TARAKAN TIMUR**
1	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Terbayarnya insentif RT,RW dan Kader Dasawisma dan pemilihan dan pelantikan RT dan RW	RT 111,RW 9 dan Dasawisma 402	1,728,300,000	
2	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Kampung Enam	PENYEDIAAN BIBIT DURIAN UNGGUL	500 BUAH	105,000,000	
3	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Gunung Lingkas	Kursi dan tenda	1	105,000,000	
4	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Lingkas Ujung	Pelatihan Memasak Kue	Meningkatnya Keterampilan warga (kaum wanita)	105,000,000	
5	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Mamburungan	PMT Posyandu	1 tahun	105,000,000	
6	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Mamburungan Timur	Pembuatan Taman Pendidikan Al Quran RT.7 prioritas ke 4	20 x 8 meter	105,000,000	
7	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pantai Amal	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Pantai Amal	10 kegiatan	105,000,000	
12	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**			**70,000,000**	**KECAMATAN TARAKAN TIMUR**
1	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Jumlah pelaksanaan Musrenbang	1 tahun	50,000,000	
2	Pelaksanaan bulan bakti gotong royong	Jumlah pelaksanaan kegiatan bulan bakti gotong royong	1 kali/tahun	10,000,000	
3	Penyelengaraan lomba kegiatan kemasyarakatan	Jumlah penyelenggaraan lomba kegiatan kemasyarakatan	8 kegiatan	10,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
13	**Program pembangunan kelurahan**	**Persentase kelurahan dengan kategori "BAIK"**	**100**	**1,715,000,000**	**KECAMATAN TARAKAN TIMUR**
1	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kampung Empat	Drainase	P= 35 m L= 3 m T= 4 m	245,000,000	
2	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kampung Enam	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE LINGKUNGAN	MEMINIMALISIR LUAPAN AIR KE JALAN SAAT HUJAN	245,000,000	
3	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Gunung Lingkas	Semenisasi	2,52,5m	245,000,000	
4	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Lingkas Ujung	Pengadaan Gerobak Sampah	Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	245,000,000	
5	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Mamburungan	semenisasi jalan	1 tahun	245,000,000	
6	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Mamburungan Timur	Pengeboran air bersih RT. 1 prioritas ke 4	1 paket	245,000,000	
7	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Pantai Amal	Semenisasi Jalan Lingkungan	60 m x 2 m	245,000,000	
26	**KECAMATAN TARAKAN UTARA**			**1,984,356,709**	**KECAMATAN TARAKAN UTARA**
	Belanja Tidak Langsung				
	Belanja Langsung			**1,984,356,709**	
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**95**	**364,532,689**	**KECAMATAN TARAKAN UTARA**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai	560 lbr	3,000,000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	12 Bulan	139,128,269	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajak kendaraannya terbayarkan	12 bln	10,773,420	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	umlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	120 Orang/Bulan (10 Org)	102,636,000	
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia	84 item	9,284,000	
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	649 item	29,031,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	220 item	13,680,000	
8	Pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Jumlah tenaga pendukung penyelenggaraan administrasi perkantoran	132 org/bln	57,000,000	
2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**51,999,020**	**KECAMATAN TARAKAN UTARA**
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah BBM,Suku Cadang dan Jasa service yang diadakan	10 unit roda 2=8 roda 4=2	39,999,020	
2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	komputer = 29 unit Ac = 37 unit Laptop = 38 Unit Printer = 27 Unit	12,000,000	
3	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Persentase ASN yang disiplin**	**100**		**KECAMATAN TARAKAN UTARA**
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	40 Stell		
4	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat dan Bimtek**	**100**		**KECAMATAN TARAKAN UTARA**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	1 Dokumen		
5	**Program pembinaan keagamaan**	**Persentase keberhasilan kontingen lomba keagaaman di Tingkat Kota**	**100**	**175,325,000**	**KECAMATAN TARAKAN UTARA**
1	Pelaksanaan STQ/MTQ	Jumlah qori/qoriah yang mewakili ke tingkat kota	4 kegiatan	165,325,000	
2	Pembinaan dan bimbingan mental spiritual masyarakat	Pembinaan dan bimbingan mental spritual masyarakat	3 kegiatan	10,000,000	
6	**Program fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan di wilayah kecamatan**	**Persentase konflik pertanahan yang tertangani di Wilayah Kecamatan**	**100**	**10,000,000**	**KECAMATAN TARAKAN UTARA**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
1	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan di wilayah kecamatan	Jumlah Konflik Pertanahan yang tertangani	40 Kasus	10,000,000	
7	**Program pelayanan administrasi kependudukan di wilayah kecamatan**	**Persentase kepemilikan e- KTP di wilayah Kecamatan**	**100**		**KECAMATAN TARAKAN UTARA**
1	Pelayanan administrasi kependudukan di wilayah kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Razia KTP	2 kali/tahun		
8	**Program fasilitasi penerbitan ijin usaha mikro kecil (IUMK)**	**Persentase Usaha Mikro Kecil yang memiliki ijin usaha**	**100**		**KECAMATAN TARAKAN UTARA**
1	Fasilitasi penerbitan ijin usaha mikro kecil	Jumlah IUMK Yang Diterbitkan	300 IUMK		
9	**Program fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum wilayah kecamatan**	**Persentase masalah ketentraman dan ketertiban umum wilayah kecamatan yang di selesaikan**	**100**	**5,000,000**	**KECAMATAN TARAKAN UTARA**
1	Sosialisasi ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Jumlah warga yang disuluh	200 Orang	5,000,000	
10	**Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan**	**Persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang aktif**	**100**	**1,087,500,000**	**KECAMATAN TARAKAN UTARA**
1	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Terbayarnya insentif RT,RW dan Kader Dasawisma dan pemilihan dan pelantikan RT dan RW	217 Orang : 52 RT dan 165 Dasawisma	772,500,000	
2	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Juata Laut	Rehab Posyandu	6 m x 8 m	105,000,000	
3	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Juata Permai	PENYULUHAN TENTANG KESEHATAN	1 KEGIATAN	105,000,000	
4	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Juata Kerikil	Pengadaan Papan Data Posyandu RT 05	1 Buah	105,000,000	
11	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**Persentase kelurahan dengan kategori "BAIK"**	**100**	**45,000,000**	**KECAMATAN TARAKAN UTARA**
1	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	4 kegiatan	25,000,000	
2	Penyelenggaraan lomba kegiatan kemasyarakatn			10,000,000	
3	Pelaksanaan bulan bakti gotong royong			10,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
12	**Program pembangunan kelurahan**	**Persentase sarana dan prsarana kelurahan yang terbangun**	**100**	**245,000,000**	**KECAMATAN TARAKAN UTARA**
1	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Juata Permai	Semenisasi Jl. Seranai Gunung Lorong 3 (Jumri)	1.5 x 50	245,000,000	
27	**INSPEKTORAT**			**2,247,894,456**	**INSPEKTORAT**
	Belanja Tidak Langsung				
	Belanja Langsung			**2,247,894,456**	
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100**	**272,734,776**	**INSPEKTORAT**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah materai	450 lembar	1,543,500	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	cakupan waktu kebutuhan listrik, telpon, air dan internet	12 bulan	43,715,047	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajak kendaraannya terbayarkan	12 unit	6,848,250	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	96 OB	50,211,000	
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah alat dan bahan	15 jenis	5,000,000	
6	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah ATK yang tersedia	25 jenis	34,472,529	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah penggandaan yang tersedia jumlah barang cetakan yang tersedia	3000 lembar 5 jenis	7,350,000	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10 jenia	2,896,950	
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	10 jenis	10,208,000	
10	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah penyedian makanan dan minuman	10 kegiatan	10,489,500	
11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	15 orang	100,000,000	
2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**238,809,680**	**INSPEKTORAT**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	200,000,000	
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah BBM yang diadakan jumlah suku cadang yang diadakan jumlah jasa servis	3500 liter 10 jenis 2 jenis	28,309,680	
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	25 jenis	10,500,000	
3	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Persentase ASN yang disiplin**	**100**		**INSPEKTORAT**
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya	40 stel		
4	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase OPD yang diperiksa**	**100**	**1,355,000,000**	**INSPEKTORAT**
1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	jumlah laporan hasil pengawasan	30 LHP	1,000,000,000	
2	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	jumlah laporan hasil pemeriksaan khusus	1 laporan	20,000,000	
3	Inventarisasi temuan pengawasan	jumlah laporan pemutakhitran data	1 laporan	20,000,000	
4	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	jumlah laporan	30 laporan	50,000,000	
5	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	jumlah rapat	10 kali	265,000,000	
5	**Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan**	**Persentase aparatur pengawasan yang bersertifikat**	**85**	**100,000,000**	**INSPEKTORAT**
1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	jumlah aparatur yang mengikuti pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	15 orang	50,000,000	
2	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	jumlah auditor yang mengikuti pelatihan teknis pengawasan	50 orang	50,000,000	
6	**Program peningkatan sistem pengendalian internal pemerintah dan kesadaran penyelenggaraan negara**	**Persentase aparatur pengawasan yang bersertifikat**	**Level 3**	**281,350,000**	**INSPEKTORAT**
1	Review laporan keuangan	jumlah laporan hasil reviu	1 entitas	100,000,000	
2	Evaluasi reformasi birokrasi	jumlah laporan	1 laporan	51,350,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Keterangan
		Keluaran Kegiatan			
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
3	Monitoring evaluasi kegiatan pembangunan Kota Tarakan	jumlah laporan Monev	50 laporan	100,000,000	
4	Monitoring dan supervisi pelaksanaan SPIP	jumlah laporan	50 laporan	30,000,000	
28	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**			**3,779,040,757**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
	Belanja Tidak Langsung				
	Belanja Langsung			**3,779,040,757**	
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100**	**327,932,757**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai, Jumlah Paket pengiriman	500 lmbr, 20 paket	3,000,000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 Bulan	140,240,000	
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 Jenis	32,400,000	
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang pajak kendaraannya terbayarkan	15 Unit (7 R4, 8 R2)	11,000,000	
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	8 ASN (bendahara, pembantu bendahara, penatausahaan keuangan, 5 (PPKOM, SIMDA, Barang Jasa, PPHP, Pengurus Barang Pengguna)	25,806,000	
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia Jumlah tenaga kebersihan	20 Jenis	13,489,875	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
7	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	37 Jenis	54,612,500	
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan, Jumlah penggandaan yang tersedia	4 Jenis, 8000 lbr	12,675,000	
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 Jenis	3,896,000	
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	3 Jenis		
11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 OP		
12	Pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Jumlah tenaga pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	5 (PPKOM, SIMDA, Barang Jasa, PPHP, Pengurus Barang Pengguna)	30,813,382	
2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**226,108,000**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	3 Jenis	55,000,000	
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit gedung	100,000,000	
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah BBM yang diadakan, Jumlah Suku cadang kendaraan diadakan, Jumlah servis kendaraan yang diadakan	2.332 lt, 2 jenis, 2 jenis	47,288,000	
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	10 Jenis	10,000,000	
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	4 Jenis	13,820,000	
3	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Persentase ASN yang disiplin**	**100**	**0**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	40 stel	0	
2	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri	40 stel		
4	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat dan Bimtek**	**100**	**0**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bintek Peraturan perundang- undangan	15 ASN	0	
5	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu**	**100**	**0**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja	4 Dokumen	0	
6	**Program pengembangan data/informasi**	**Persentase data/informasi yang dikembangkan**	**50**	**275,000,000**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
1	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Data Makro Ekonomi, Data Aspek Kesejahteraan, Data Aspek Pelayanan Umum, Data Aspek Daya Saing	4 Dokumen		
2	Penyusunan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Jumlah sistem informasi yang dibuat dan dikembangkan	1 Dokumen	50,000,000	
3	Pengumpulan dan Pengelolaan Data SIPD	Jumlah dok SIPD	1 Dokumen	75,000,000	
4	Pembangunan jaringan informasi geospasial	Jaringan geospasial yang dibangun dan dikembangkan	1 jaringan geospasial	150,000,000	
7	**Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah**	**Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti**	**100**	**250,000,000**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
1	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	Jumlah bimtek yang dilakasanakan	1 Kegiatan	150,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
2	Koordinasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah koordinasi	15 Koordinasi	100,000,000	
8	**Program perencanaan pembangunan daerah**	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu**	**100**	**1,200,000,000**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
1	Penyusunan rancangan RPJMD	Jumlah Dokumen Rancangan RPJMD	1 Dokumen	300,000,000	
2	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Jumlah Kegiatan Musrenbang RPJMD	1 Dokumen	200,000,000	
3	Penetapan RPJMD	Jumlah Dokumen Rancangan Akhir dan Naskah Akademik Perda RPJMD	2 Kegiatan		
4	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah Dokumen Ranwal dab ranhir RKPD	8 Kegiatan	100,000,000	
5	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah Kegiatan Musrenbang RKPD	1 Dokumen	200,000,000	
6	Fasilitasi, evaluasi dokumen Renstra SKPD	Jumlah kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Renstra Perangkat Daerah	2 Kegiatan	50,000,000	
7	Penyusunan KLHS	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD	2 Dokumen	200,000,000	
8	Penyusunan RPJMD Teknokratik	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD	2 Kegiatan	100,000,000	
9	RAD TPB/SDGs 2030	Jumlah Dokumen RAD TPB/SDGs	2 Kegiatan	50,000,000	
10	Penyelenggaraan Konsultasi dan Evaluasi RPJMD	Jumlah kegiatan konsultasi dan Evaluasi RPJMD	2 Dokumen		
11	Rapat Kerja Perencanaan Pembangunan	Jumlah Rapat Kerja Perencanaan Pembangunan	1 Rakor Bappeda Se-Kaltara		
9	**Program perencanaan pembangunan ekonomi**	**Persentase rata-rata capaian renstra bidang ekonomi**	**100**	**100,000,000**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
1	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	25 koordinasi	100,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
10	**Program perencanaan sosial budaya**	**Persentase rata-rata capaian renstra bidang PKSDM**	**100**	**450,000,000**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
1	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah Koordinasi perencanaaan bidang PKSDM	25 koordinasi	100,000,000	
2	Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Perencanaan Kesejahteraan Masyarakat	3 Dokumen	250,000,000	
3	Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan	1 Laporan	100,000,000	
11	**Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam**	**Persentase rata-rata capaian renstra bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam**	**100**	**300,000,000**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
1	Koordinasi perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan SDA yang dilaksanakan	17 Koordinasi	50,000,000	
2	Penyusunan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan SDA	Masterplan Sanitasi Kota Tarakan	1 Dokumen	250,000,000	
12	**Program pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah**	**Persentase dokumen perencanaan yang dievaluasi tepat waktu**	**100**	**150,000,000**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
1	Evaluasi RKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi RKPD	1 Dokumen	50,000,000	
2	Evaluasi RPJMD	Jumlah Dokumen Evaluasi RPJMD	1 Dokumen	100,000,000	
13	**Program penelitian dan pengembangan inovasi daerah**	**Persentase penelitian inovasi daerah yang dikembangkan**	**100**	**350,000,000**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kelitbangan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kelitbangan	15 Koordinasi	100,000,000	
2	Fasilitasi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Jumlah Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah	15 Fasilitasi	150,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
3	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Jumlah Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Dokumen	100,000,000	
14	Program Pengembangan Perencanaan dan Anggaran	Persentase OPD yang terfasilitasi untuk mendapatkan bantuan keuangan daerah	100	**150,000,000**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
1	Fasilitasi bantuan keuangan daerah	Jumlah Fasilitasi Bantuan Keuangan Daerah	15 Kegiatan	150,000,000	
29	**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**			**8,638,610,080**	**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
	Belanja Tidak Langsung				
	Belanja Langsung			**8,638,610,080**	
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran**	**100%**	**3,822,536,115**	**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan paket pengiriman yang tersedia	300 lembar	2,500,000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan telepon, listrik air, astinet dan iuran tv kabel	12 bulan	1,479,360,400	
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jasa mesin Fotocopy	1 Tahun	30,000,000	
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pajak kendaraan dinas roda dua dan roda empat yang terbayarkan	9 unit roda empat dan 25 unit roda dua	13,022,415	
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honor pengelola keuangan dan jasa pihak ketiga	12 orang, 2 kegiatan	313,966,800	
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor	1 Tahun	1,065,100,000	
7	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	60 jenis	223,571,500	
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cetakan dan penggandaan	13 jenis	110,605,000	
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Alat listrik dan elektronik	5 jenis	4,410,000	
10	Penyediaan peralatan rumah tangga	Pengadaan piring, cangkir tamu, gelas dan sajadah	2 lusin dan 2 gulung	10,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
11	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	1 Tahun	40,000,000	
12	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	350,000,000	
13	Pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Honor operator	19 orang	180,000,000	
2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**692,451,000**	**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Lift dan suku cadang	1 Tahun	330,000,000	
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Service roda dua dan roda empat, penggantian suku cadang kendaraan operasional dan bahan bakar	1 Tahun	49,776,000	
3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan AC dan printer	2 jenis	47,500,000	
4	Pemeliharaan rutin/berkala aset pemerintah	Jasa sewa asrama	2 asrama	265,175,000	
3	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Persentase ASN yang disiplin**	**100%**	**0**	**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian dinas beserta perlengkapannya	60 stell	0	
4	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**			**0**	**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Bimtek implementasi peraturan perundang- undangan	1 Tahun	0	
5	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat dan Bimtek**	**100%**	**135,000,000**	**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja, laporan keuangan dan rencana strategis SKPD	20 buku	25,000,000	
2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	110,000,000	
6	**Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**	**Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**1,107,122,965**	**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
1	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Dokumen buku Perda dan penjabaran APBD	1 dokumen	109,376,000	
2	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	1 dokumen	109,376,000	
3	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	2 dokumen	131,851,000	
4	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Paket regulasi yang tersosialisaikan	3 paket	98,472,000	
5	Pengelolaan ketatausahaan penggajian	Dokumen ketatausahaan penggajian	1 dokumen	116,303,000	
6	Pengelolaan ketatausahaan penggajian	Dokumen ketatausahaan penggajian	1 dokumen	116,303,000	
7	Verifikasi penilaian dan pengadaan belanja modal SKPD	Realisasi belanja modal	32 SKPD	50,300,000	
8	Penataan Pertanggungjawaban keuangan SKPD	Pertanggungjawaban keuangan SKPD yang baik	1 dokumen	207,524,000	
9	Monitoring dan sosialisasi perhitungan dana perimbangan	Data perhitungan dana perimbangan	1 Tahun	73,000,000	
10	Pendampingan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah	Buku laporan keuangan Pemerintah Kota Tarakan	1 Laporan	94,617,965	
7	**Program peningkatan akuntabilitas pengelolaan aset daerah**	**Persentase pengelolaan aset daerah yang akuntabel**	**100%**	**920,600,000**	**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
1	Revaluasi /appraisal aset/barang daerah	Laporan barang daerah yang direvaluasi / appraisal	3 Laporan	275,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
2	Inventarisasi dan monitoring barang/aset daerah	Barang yang diinventarisasi dan dimonitoring	1 Tahun	74,700,000	
3	Penghapusan barang/aset daerah	Barang rusak berat	1000 barang	83,300,000	
4	Penyusunan buku standarisasi harga barang/jasa	Terbitnya HSU dan HSPK	2 dokumen	187,600,000	
5	Penyusunan RKBU/RTBU, RKPBU	Buku RKBMD	1 buku	150,000,000	
6	Pengendalian, pemanfaatan dan pengamanan aset	Terpasangnya patok seluruh aset-aset pemerintah yang belum terpatok	51 patok	150,000,000	
8	**Program Pengembangan Perencanaan dan Anggaran**	**Persentase Konsistensi perancanaan dan penganggaran (pagu anggaran)**	**100%**	**1,960,900,000**	**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
1	Penyusunan perubahan APBD Kota Tarakan	Dokumen perubahan APBD yang sesuai dengan kalender anggaran	10 dokumen	635,000,000	
2	Fasilitasi penyusunan rancangan kerja anggaran (RKA) dan (DPA) SKPD	Dokumen Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dan DPA SKPD	32 SKPD, 2 kegiatan	480,000,000	
3	Penyusunan kode rekening program kegiatan dan belanja	Buku kode rekening belanja sesuai SIMDA 2.7.0.6 yang berbasis akrual	1 buku	210,900,000	
4	Penyusunan APBD Kota Tarakan	Dokumen APBD	1 dokumen	635,000,000	
30	**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**			**2,249,769,295**	**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**
	Belanja Tidak Langsung				
	Belanja Langsung			**2,249,769,295**	
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran**	**100%**	**854,686,729**	**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	300 Lembar Materai & 1 Paket Pengiriman	1 Tahun	1,846,625	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Biaya Tagihan Tv Kabel dan Telpon	12 Bulan	7,642,750	
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan & Perlengkapan Kantor yang Tersedia	3 unit Mesin	68,164,240	
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang Pajak Kendaraannya Terbayarkan	21 unit	14,208,060	
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan Tunjangan Keuangan	19 Orang	113,166,000	
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang Tersedia	76 Jenis	133,500,000	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	175 Jenis	383,448,050	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	8 Jenis	1,051,700	
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan Kantor	10 Jenis	67,005,760	
10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dabn minuman	1000 kotak	5,000,000	
11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat- rapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	20 Kali	39,853,544	
12	Pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	penyediaan Administrasi Pemerintahan	12 Bulan	19,800,000	
2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**72,500,000**	**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Jasa Service,Suku Cadang dan BBM	10 unit	47,500,000	
2	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	26 unit	25,000,000	
3	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat dan Bimtek**	**100**	**97,300,000**	**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek/Diklat	10 Orang	97,300,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
4	**Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**	**Persentase wajib pajak baru terhadap yang ditargetkan**	**100**	**1,225,282,566**	**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**
1	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah Baliho/Spanduk,Pemflet/Stiker	360 Lembar	40,000,000	
2	Rapat Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Rapat Rekonsiliasi Pendapatan Daerah	36 Kali	14,000,000	
3	Pemantauan dan Pengawasan Reklame	Jumlah Reklame yang dipantau/diawasi	24 Kali	72,000,000	
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana PBB	Jumlah Sapras yang Tersedia	2 Jenis	344,066,000	
5	Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	Efektifitas intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	1000 WP	136,100,000	
6	Intensifikasi Penyampaian SPTPD/SPPT dan SKRD	Jumlah SPTPD yang diterima oleh WP	100 persen	0	
7	Peningkatan sistem kinerja aplikasi pemungutan pajak daerah	Jumlah Aplikasi Pengolah Pajak Daerah	3 Aplikasi	0	
8	Pendataan wajib pajak / wajib retribusi / SPOP	Jumlah Wajib Pajak Baru	100 persen	120,625,000	
9	Penagihan tunggakan pajak daerah / teguran wajib pajak / wajib retribusi	Persentase jumlah pajak/retribusi yang dapat ditagih	90 persen	173,850,000	
10	Penyuluhan wajib pajak daerah	Tersedianya Honorarium penyukuhan WP	18 orang	49,041,566	
11	Pekan panutan PBB	Jumlah WP yang menghadiri Pekan Panutan	250 WP	0	
12	Penyampaian SPPT PBB	Jumlah SPPT PBB yang disampaikan ke WP	56000 Lembar	275,600,000	
13	Pemutakhiran masal PBB	Jumlah WP yang dimutakhirkan Datanya	5000 WP	0	
14	Operasi sisir	Persentase Piutang PBB yang ditagih	100 Persen	0	
31	**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			**12,920,626,122**	**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**
	Belanja Tidak Langsung				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
	Belanja Langsung			**12,920,626,122**	
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi Perkantoran**	**100**	**11,337,650,222**	**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Cakupan waktu pembayaran jasa surat menyurat	250 lembar dan 144 paket	2,500,000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	18,000,000	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajak kendaraannya terbayarkan	14 unit	4,097,520	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	6 orang	48,096,000	
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah kebersihan kantor	5 jenis	5,000,000	
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	100 jenis	40,000,000	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	21400 lembar	10,000,000	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	84 jenis	3,000,000	
9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makan dan minum yang tersedia	5 kegiatan	10,000,000	
10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Rapat dan konsultasi ke luar daerah	6 orang	50,000,000	
11	Pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Jumlah tenaga pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintah	600 orang	11,146,956,702	
2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**38,175,900**	**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan unit kendaraan dinas/operasional	2 unit	21,444,150	
2	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	25 unit	16,731,750	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Keterangan
		Keluaran Kegiatan			
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
3	**Program peningkatan disiplin aparatur**			**27,300,000**	**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**
1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah pengadaan mesin kartu absensi	1 unit	15,000,000	
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	50 orang	12,300,000	
4	**Program fasilitas pindah/purna tugas PNS**	**Persentase ASN yang pindah/purna tugas**	**100**	**40,000,000**	**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**
1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah ASN yang memasuki masa purna tugas	100 orang	40,000,000	
5	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu**	**100**	**5,000,000**	**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**
1	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan	1 dokumen	5,000,000	
6	**Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi**	**Persentase Jumlah Data yang Akurat**	**95**	**50,000,000**	**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**
1	Penyusunan sistem informasi manajemen perkantoran	Cakupan jumlah data kepegawaian	3104 ASN	27,058,000	
2	Pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi manajemen perkantoran	Cakupan jumlah data kepegawaian	3104 ASN	22,942,000	
7	**Program pendidikan kedinasan**	**Persentase Jumlah Praja IPDN yang diterima**	**90**		**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**
1	Penyelenggaraan penerimaan praja IPDN	Jumlah peserta pelaksanaan seleksi praja IPDN	75 orang		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
8	**Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**	**Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**	**90**	**300,000,000**	**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**
1	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti diklat kepemimpinan	3 orang	150,000,000	
2	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi	5 orang	150,000,000	
9	**Program pembinaan dan pengembangan aparatur**	**Persentase Indeks Profesionalisme ASN**	**90**	**1,122,500,000**	**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**
1	Seleksi penerimaan calon PNS	Jumlah peserta seleksi penerimaan CPNS	2000 orang	50,000,000	
2	Penempatan PNS	Jumlah mutasi dan promosi jabatan ASN	3 kegiatan	400,000,000	
3	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Jumlah SK Kenaikan pangkat	1400 SK	105,000,000	
4	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Cakupan jumlah aplikasi dan jumlah pendampingan	2 aplikasi dan 4 orang	20,000,000	
5	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan	500 orang	50,000,000	
6	Proses penanganan kasus- kasus pelanggaran disiplin PNS	Cakupan jumlah penanganan kasus disiplin ASN	10 kasus	50,000,000	
7	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Jumlah peserta pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian ijazah	100 orang	40,000,000	
8	Penyelesaian proses administrasi kepegawaian	Jumlah SK Pensiun dan Jumlah Kartu	51 SK dan Kartu	100,000,000	
9	Penyusunan dan pengusulan formasi tambahan CPNSD/PNSD	Jumlah kebutuhan formasi CPNS	250 formasi	50,000,000	
10	Rapat Kerja Kepegawaian Kab/Kota dan Provinsi	Jumlah ASN yang mengikuti rapat kepegawaian	5 orang	50,000,000	
11	Penyelesaian Proses Mutasi Kepegawaian	Jumlah SK ASN yang masuk dan keluar	50 SK	50,000,000	
12	Penyesuaian Gelar PNS	Jumlah ASN yang mendapatkan gelar	50 orang	50,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
13	Evaluasi kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengerjakan PPK	3264 orang	50,000,000	
14	Penyusunan analisa kebijakan kinerja, kesejahteraan dan penghargaan pegawai	Jumlah regulasi jabatan yang memiliki pedoman standarisasi	2 regulasi	57,500,000	
32	**RUMAH SAKIT KOTA TARAKAN**			**28,645,526,640**	**Rumah Sakit Umum Kota Tarakan**
	Belanja Tidak Langsung				
	Belanja Langsung			**28,645,526,640**	
1	**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100**	**14,597,726,640**	**Rumah Sakit Umum Kota Tarakan**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang tersedia	350 lembar	4,985,950	
		Jumlah paket pengiriman	36 paket		
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	1,000,000,000	
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	7 jenis	30,000,000	
4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah ASN yang mendapatkan jasa pemeliharaan kesehatan	0	0	
5	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional yang pajaknya terbayarkan	25 unit	20,000,000	
6	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan jasa administrasi keuangan	24 orang	120,578,000	
7	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang tersedia	5000 jenis	544,970,000	
8	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki/dipelihara	0	0	
9	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	2500 jenis	90,000,000	
10	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	20000 lembar	106,656,550	
		Jumlah penggandaan yang tersedia	0	0	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
11	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	100 buah	60,000,000	
12	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	100 unit	100,000,000	
13	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	120 buah	200,000,000	
14	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	0	0	
15	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	5000 kotak	75,000,000	
16	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	42 kali	95,536,140	
17	Pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Jumlah tenaga pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan (non PNS) di RS	300 orang	12,000,000,000	
18	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS	Jumlah tenaga non PNS yang mendapatkan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	300 orang	150,000,000	
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**500,000,000**	**Rumah Sakit Umum Kota Tarakan**
1	Pembangunan rumah dinas	Jumlah Pembangunan Rumah Dinas	0	0	
2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	1 Unit	300,000,000	
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	15 Unit	120,000,000	
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10 Jenis	80,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Keterangan
		Keluaran Kegiatan			
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
3	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Persentase ASN yang disiplin**	**100**	**22,800,000**	**Rumah Sakit Umum Kota Tarakan**
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	76 pasang	22,800,000	
4	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat dan Bimtek**	**100%**	**200,000,000**	**Rumah Sakit Umum Kota Tarakan**
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	15 Unit	200,000,000	
2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	0	0	
3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0	0	
4	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	0	0	
5	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**5,000,000**	**Rumah Sakit Umum Kota Tarakan**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	1 dokumen	5,000,000	
2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 laporan	0	
6	**Program standarisasi pelayanan kesehatan**	**Status Akreditasi**	**Madya**	**320,000,000**	**Rumah Sakit Umum Kota Tarakan**
1	Penyusunan standar kesehatan	Jumlah penyusunan dokumen standar pelayanan kesehatan	15 dokumen	200,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Keterangan
		Tolok Ukur	Target		Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
2	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan	Jumlah standar pelayanan kesehatan yang dievaluasi dan dikembangkan	0	0	
3	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Jumlah kegiatan pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	0	0	
4	Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan	Jumlah naskah akademis standar pelayanan kesehatan yang disusun	0	0	
5	Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan	Jumlah standar analisis belanja pelayanan kesehatan	0	0	
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	0	0	
7	Pengembangan sistem dan layanan informasi kesehatan terpadu	Jumlah pengembangan sistem dan layanan informasi kesehatan terpadu (SIM RS)	1 kegiatan	120,000,000	
8	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah dokumen peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan	0	0	
9	Regulasi dan manajemen mutu pelayanan kesehatan	Jumlah dokumen regulasi dan manajemen mutu pelayanan kesehatan	0	0	
7	**Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata**	**Persentase sarana dan prasarana sesuai kebutuhan RS Tipe C**	**85**	**6,600,000,000**	**Rumah Sakit Umum Kota Tarakan**
1	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Jumlah obat-obatan, bahan medis pakai habis, gas medis, BHP radiologi, laboratorium dan laundy RS yang diadakan	615 jenis	2,500,000,000	
2	Pengadaan mebeleur rumah sakit	Jumlah pengadaan meubelair RS	100 unit	200,000,000	
3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung RS yang di bangun	1 Unit	100,000,000	
4	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Jumlah pengadaan bahan logistik RS	1 Kegiatan	800,000,000	
5	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah pengadaan alat kesehatan rumah sakit	140 Jenis	3,000,000,000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Keterangan
		Keluaran Kegiatan			Perangkat Daerah
		Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6
6	Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit	Jumlah pengadaan percetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit	0		
8	**Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata**	**Persentase Sarana dan prasarana RS Tipe C yang dipelihara**	**1**	**400,000,000**	**Rumah Sakit Umum Kota Tarakan**
1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Jumlah gedung rumah sakit yang dipelihara	0	0	
2	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat-alat kesehatan RS yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala	3000 unit	400,000,000	
9	**Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit**	**Persentase peningkatan pelayanan di RS**	**100%**	**6,000,000,000**	**Rumah Sakit Umum Kota Tarakan**
1	Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	Persentase capaian SPM RS	70%	6,000,000,000	

PEMETAAN RENJA PD

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TARAKAN

(B A P P E D A)

Jalan P. Irian No. 13 Tarakan Telp.(0551) 33910, Kota Tarakan – 77121

BERITA ACARA
VERIFIKASI PEMETAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
SESUAI NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di ruang rapat kantor Bappeda Kota Tarakan telah dilaksanakan verifikasi pemetaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2021 sesuai nomenklatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Setelah dilakukan diskusi dan penelaahan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan maka disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan dalam Renja yang relevan dengan sub kegiatan/kegiatan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berjumlah 85 sub kegiatan
2. Jumlah kegiatan yang diusulkan menjadi sub kegiatan baru berjumlah 8 sub kegiatan
3. Rincian kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk menjadi bahan masukan dalam rangka penyampaian usulan pemutakhiran nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah kepada Kementerian/Lembaga terkait.

Kepala Dinas Kesehatan

PEMERINTAH KOTA TARAKAN DINAS KESEHATAN

dr. Witoyo
Pembina
NIP. 196501112000121002

Tim Pembahas

1. Arbiati, SKM .....
2. Sanji Anugrah, SKM .....
3. Kartika Santoso, SKM .....
4. Hj. Kasbariah, SH,MH .....
5. Deny Puspita R, S.Sos .....

Kepala Bappeda Kota Tarakan,

PEMERINTAH KOTA TARAKAN BAPPEDA

H. SUPARLAN, ST,MT
Pembina Utama Muda
Nip. 19640212 199803 1 004

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan penunjang Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah					
						Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai 6000 yang tersedia		Jumlah Materai 6000 yang tersedia	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan penunjang Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah					
							Jumlah Materai 3000 yang tersedia		Jumlah Materai 3000 yang tersedia											
							Jumlah Perangko		Jumlah Perangko											
							Jumlah paket pengiriman		Jumlah paket pengiriman											
						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Pembayaran Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Pembayaran Listrik	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan penunjang Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah					
							Jumlah bulan Pembayaran Air		Jumlah bulan Pembayaran Air											
							Jumlah bulan pembayaran Telpon, internet,TV Kabel		Jumlah bulan pembayaran Telpon, internet,TV Kabel											
						Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Roda 2 (operasional)	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Roda 2 (operasional)	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan penunjang Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah					
							Jumlah Kendaraan Roda 4 (operasional)		Jumlah Kendaraan Roda 4 (operasional)											
						Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah ASN mendapat tunjangan Panitia Pelaksana Kegiatan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah ASN mendapat tunjangan Panitia Pelaksana Kegiatan	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan penunjang Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah					
							Jumlah ASN Tim Pengadaan Barang & Jasa		Jumlah ASN Tim Pengadaan Barang & Jasa											

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat & Bahan Kebersihan	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat & Bahan Kebersihan	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan penunjang Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah					
							Jumlah tenaga kontrak kebersihan		Jumlah tenaga kontrak kebersihan											
						Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan penunjang Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah					
						Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK tersedia	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK tersedia	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan penunjang Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah					
						Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang cetakan yang tersedia	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang cetakan yang tersedia	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan penunjang Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah					
							Jumlah penggandaan yang tersedia		Jumlah penggandaan yang tersedia											
						Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan penunjang Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah					
						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia(Mesin scanner,printer,Laptop)	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia(Mesin scanner,printer,Laptop)	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan penunjang Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah					
						Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan penunjang Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah					
							Dispenser Hot n Cold		Dispenser Hot n Cold											

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan penunjang Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah					
						Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan penunjang Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah					
						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan penunjang Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah					
						Pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Jumlah tenaga pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Penyediaan Gaji Pegawai Tidak Tetap	Jumlah tenaga pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Administrasi Keuangan	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan penunjang Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah					
						Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan & Ketenagakerjaan Non PNS	Jumlah orang (non PNS) yang mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Pegawai Tidak Tetap	Jumlah orang (non PNS) yang mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan penunjang Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah					
							Jumlah orang (non PNS) yang mendapatkan jaminan pemeliharaan ketenagakerjaan		Jumlah orang (non PNS) yang mendapatkan jaminan pemeliharaan ketenagakerjaan											
							Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur		Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur											
						Pembangunan rumah dinas	Jumlah Pembangunan rumah dinas	Pemeliharaan Rutin	Jumlah Pembangunan rumah dinas	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan penunjang Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah					

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
Jumlah Layanan Administrasi Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan penunjang Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pengadaan Kendara	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan penunjang Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah					
							Mobil Operasional(Mobil RMC,Mobil Promkes)		Mobil Operasional(Mobil RMC,Mobil Promkes)											
							Mobil Ambulance		Mobil Ambulance											
							Motor (Motor Operasional & Motor Promkes Puskesmas)		Motor (Motor Operasional & Motor Promkes Puskesmas)											
						Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan Peralata	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan penunjang Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah					
							Pembuatan Kanopi Parkir Motor		Pembuatan Kanopi Parkir Motor											
						Pengadaan mebeleur	Jumlah Pengadaan mebeleur	Pengadaan Meubel	Jumlah Pengadaan mebeleur	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan penunjang Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah					
							Pengadaan RAK untuk penyimpanan BHP		Pengadaan RAK untuk penyimpanan BHP											

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Pemeliharaan Rutin	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan penunjang Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah					
						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah BBM yang diadakan	Pemeliharaan Rutin	Jumlah BBM yang diadakan	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan penunjang Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah					
						Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Pemeliharaan Rutin	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan penunjang Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah					
						Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang direhab		Jumlah rumah dinas yang direhab	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan penunjang Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah					
						Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	Rehabilitasi Sedang	Jumlah gedung kantor yang direhab	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan penunjang Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah					
						Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang disiplin		Persentase ASN yang disiplin	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Disiplin Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan penunjang Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah					
						Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah Pengadaan mesin/kartu absensi	Pengadaan Mesin/k	Jumlah Pengadaan mesin/kartu absensi	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Disiplin Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan penunjang Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah					
						Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Disiplin Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan penunjang Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah					
						Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pengadaan pakaian kerja lapangan	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pengadaan pakaian kerja lapangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Disiplin Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan penunjang Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah					
						Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pengadaan pakaian KORPRI	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pengadaan pakaian KORPRI	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Disiplin Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan penunjang Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah					

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakain khusus hari-hari tertentu yang tersedia	Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakain khusus hari-hari tertentu yang tersedia	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Disiplin Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan penunjang Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah					
							Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat dan Bimtek		Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat dan Bimtek											
						Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Disiplin Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan penunjang Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah					
						sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Disiplin Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan penunjang Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah					
						Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Disiplin Aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan penunjang Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah					
						Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah		Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah											
							Persentase Dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu		Persentase Dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu											
						Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja	Administrasi Keuangan	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan penunjang Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah					

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	Penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	Administrasi Keuangan	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan penunjang Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah					
						Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran	Administrasi Keuangan	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan penunjang Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah					
						Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun	Administrasi Keuangan	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan penunjang Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah					
						Pendampingan penatausahaan keuangan	Jumlah Pendampingan penatausahaan keuangan	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Pendampingan penatausahaan keuangan	Administrasi Keuangan	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan penunjang Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah					
						Penetapan kinerja	Jumlah dokumen LKiP Kota	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKiP Kota	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daeerah									
						Penyusunan standar opearsional prosedur	Jumlah dokumen SOP		Jumlah dokumen SOP											
							Persentase ketersediaan obat dan vaksin esensial			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
						Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
							Persentase ketersediaan obat dan vaksin esensial	Pengadaan Bahan H	Persentase Bahan Habis Pakai	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
						Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas													
							Persentase Puskesmas, Jaringan, dan Jejaringnya Mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP													
						Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas dan Jaringannya	Jumlah UPT yang melaksanakan kalibrasi, maintenance, dan perbaikan alat kesehatan	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah UPT yang melaksanakan kalibrasi, maintenance, dan perbaikan alat kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
								Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan kesehatan	Jumlah Pengadaan Sarana Pelayanan Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
								Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Kesehatan	Jumlah Pengadaan Prasarana dan pendukung Pelayanan Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
								Pengadaan Alat Kesehatan /Alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Alkes/ Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
								Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
								Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasaran dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
								Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
						Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	Jumlah kelurahan yang mengalami KLB dilakukan PE < 24 jam	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	Jumlah Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa yang terlayani	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana yang terlayani	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
								Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
							Jumlah calon jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah calon jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
						Pelayanan kefarmasian dan perbekalan Kesehatan	Jumlah UPT yang tersedia alat kesehatan dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan Waktu Penyediaan Operasional Fasyankes lainnya	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
						Peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah pelayanan UKM yang dilaksanakan oleh Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Yang Terlayani	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Sekolah Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah UPT yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah UPT yang yang memberikan pelayanan kesehatan tradisional	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
								Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah kegiatan pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
								Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah pencapaian indikator Kab/Kota Sehat	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
								Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah layanan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
						Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Jumlah petugas layanan kegawatdaruratan yang mendapat pengetahuan BHD	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan pelatihan	Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan teknis	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar					

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Penyediaan Biaya Operasional dan pemeliharaan	Jumlah UPT yang dilayani dalam pelaksanaan penyimpanan, penerimaan dan pendistribusian obat, vaksin, alkes dan BHP	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan Waktu Penyediaan Operasional Fasyankes lainnya	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
						Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Jumlah TTU, DAM, dan Sampel Rumah dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah TTU, DAM, dan Sampel Rumah dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
							Jumlah JAGA yang memenuhi syarat		Jumlah JAGA yang memenuhi syarat											
						Pembinaan dan fasilitasi Posyandu	Jumlah kader posyandu yang dibina	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kader posyandu yang dibina	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pemberdayaan, kemitraan dan peningkatan peran serta masyarakat lintas sektor	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase lembaga masyarakat yang berperan aktif dalam bidang kesehatan							
						Pelayanan kesehatan masyarakat di Mamburungan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Mamburungan	Operasional Pelayanan Puskesmas Mamburungan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Mamburungan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
						Pelayanan kesehatan masyarakat di Juata	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Juata Permai	Operasional Pelayanan Puskesmas Juata	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Juata Permai	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
						Pelayanan kesehatan masyarakat di Gunung Lingkas	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Lingkas	Operasional Pelayanan Puskesmas Gunung Lingkas	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Lingkas	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Pelayanan Kesehatan masyarakat di Pantai Amal	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Pantai Amal	Operasional Pelayanan Puskesmas Pantai Amal	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Pantai Amal	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
						Pelayanan kesehatan masyarakat di Karang Rejo	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Karang Rejo	Operasional Pelayanan Puskesmas Karang Rejo	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Karang Rejo	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
						Pelayanan kesehatan masyarakat di Sebengkok	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Sebengkok	Operasional Pelayanan Puskesmas Sebengkok	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Sebengkok	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
						Operasional laboratorium kesehatan daerah	Jumlah sampel yang dilakukan pemeriksaan (kesmas dan klinik) laboratorium kesehatan	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan Waktu Penyediaan Operasional Fasyankes lainnya	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
						Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	Persentase orang usia produktif (15-59 tahun) yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia produktif (15-59 tahun) yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
							Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
							Persentase penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
							Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang dengan masalah kesehatan jiwa yang diskrining	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
							Jumlah kawasan tanpa rokok (KTR) yang dilakukan monitoring	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kawasan tanpa rokok (KTR) yang dilakukan monitoring	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
							Persentase pengawasan obat dan makanan pada masyarakat dan pelaku usaha yang dilakukan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase pengawasan obat dan makanan pada masyarakat dan pelaku usaha yang dilakukan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pengawasan obat dan makanan pada masyarakat dan pelaku usaha yang dilakukan							

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	Jumlah masyarakat dan pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi tentang obat dan makanan	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah	Jumlah masyarakat dan pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi tentang obat dan makanan	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah sertifikat P-IRT yang diterbitkan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pengawasan obat dan makanan pada masyarakat dan pelaku usaha yang dilakukan								
						Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Jumlah pengelola IRTP yang mendapatkan SPP-IRTP	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah	Jumlah masyarakat dan pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi tentang obat dan makanan	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah sertifikat P-IRT yang diterbitkan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pengawasan obat dan makanan pada masyarakat dan pelaku usaha yang dilakukan								

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan kefarmasian, alkes dan PKRT	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah	Jumlah masyarakat dan pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi tentang obat dan makanan	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah sertifikat P-IRT yang diterbitkan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pengawasan obat dan makanan pada masyarakat dan pelaku usaha yang dilakukan								
						Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat semua tatanan	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat semua tatanan	Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya preventif dan promotif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase lembaga masyarakat yang berperan aktif dalam bidang kesehatan							
						Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan informasi sadar hidup sehat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan informasi sadar hidup sehat	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pemberdayaan, kemitraan dan peningkatan peran serta masyarakat lintas sektor	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase lembaga masyarakat yang berperan aktif dalam bidang kesehatan							
						Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat (pencegahan penyakit, germas, lomba posyandu, lomba phbs)	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat (pencegahan penyakit, germas, lomba posyandu, lomba phbs)	Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya preventif dan promotif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase lembaga masyarakat yang berperan aktif dalam bidang kesehatan							

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan	Jumlah sarana kesehatan sesuai standar (posyandu dan UKS)	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan kesehatan	Jumlah Pengadaan Sarana Pelayanan Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
						Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	Jumlah kader kesehatan yang meningkat pengetahuannya tentang kesehatan	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan informasi sadar hidup sehat	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pemberdayaan, kemitraan dan peningkatan peran serta masyarakat lintas sektor	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase lembaga masyarakat yang berperan aktif dalam bidang kesehatan							
						Program perbaikan gizi masyarakat	Persentase balita gizi buruk mendapatkan PMT	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk mendapatkan PMT	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
						Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	Jumlah dokumen peta informasi masyarakat kurang gizi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk mendapatkan PMT	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
						Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah bayi, balita, remaja, dan ibu hamil yang mendapatkan tambahan makanan dan vitamin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk mendapatkan PMT	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
						Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Jumlah masyarakat rentan yang sadar gizi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk mendapatkan PMT	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
							Persentase penderita penyakit menular yang tertangani sesuai standar													
						Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Jumlah titik fogging fokus	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah titik fogging fokus	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
						Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	Jumlah alat fogging dan bahan-bahan fogging	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah titik fogging fokus	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
						Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
							Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
							Persentase orang penderita malaria mendapatkan pelayanan malaria sesuai standar	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase orang penderita malaria mendapatkan pelayanan malaria sesuai standar	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
							Persentase orang penderita kusta mendapatkan pelayanan kusta sesuai standar	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase orang penderita kusta mendapatkan pelayanan kusta sesuai standar	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
						Peningkatan Imunisasi	Jumlah bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
						Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Jumlah Kegiatan Surveilans Epidemiologi	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Kegiatan Surveilans Epidemiologi	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
							Persentase UPT yang terakreditasi													
						Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Jumlah UPT yang terakreditasi	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah UPT yang terakreditasi	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
						Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah UPT yang menerapkan BLUD	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah UPT yang menerapkan BLUD	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kot	Persentase UPT yang menerapkan BLUD	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
							Jumlah Puskesmas yang dilakukan penilaian Performance Puskesmas Berprestasi	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan penilaian Performance Puskesmas Berprestasi	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kot	Persentase UPT yang menerapkan BLUD	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan	Jumlah naskah akademis pengembangan unit RMC	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan penilaian Performance Puskesmas Berprestasi	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kot	Persentase UPT yang menerapkan BLUD	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
						Pengembangan sistem dan layanan informasi kesehatan terpadu	Jumlah platform sistem informasi kesehatan yang dikembangkan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah platform sistem informasi kesehatan yang dikembangkan	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah sistem informasi kesehatan yang terintegrasi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
								Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah sistem informasi kesehatan yang terintegrasi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
						Pembangunan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang dibangun sesuai standar	Pembangunan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang dibangun sesuai standar	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
						Pembangunan Puskesmas Pembantu	Jumlah puskesmas pembantu yang dibangun sesuai standar	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah puskesmas pembantu yang dibangun sesuai standar	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Jumlah UPT yang terpenuhi sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Pengembangan Puskesmas	Jumlah UPT yang terpenuhi sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
						Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas	Jumlah puskesmas yang direhabilitasi sesuai dengan standar	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang direhabilitasi sesuai dengan standar	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
						Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu	Jumlah puskesmas pembantu yang direhabilitasi sesuai dengan standar	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah puskesmas pembantu yang direhabilitasi sesuai dengan standar	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
						Pembangunan Fasilitasi Sarana Kesehatan Puskesmas dan Pendukungnya	Jumlah pembangunan Sarana Kesehatan Puskesmas dan pendukungnya sesuai standar	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah pembangunan Sarana Kesehatan Puskesmas dan pendukungnya sesuai standar	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
							Persentase Penduduk yang mendapatkan JKN													
						Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Jumlah penduduk miskin yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah penduduk miskin yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	Jumlah dokumen kerjasama yang disepakati	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen kerjasama yang disepakati	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah kerjasama yang disepakati	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar							
							Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
						Pelayanan kesehatan anak balita	Persentase kunjungan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase kunjungan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
							Persentase warga negara berusia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara berusia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
						Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	Jumlah lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
						Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase kunjungan warga negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase kunjungan warga negara berusia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
							Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar													
						Pelayanan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
							Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
							Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP	program oemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pesrentase Puskesmas jaringan dan Jejaringannya mengembangkan Pelayanan UKM dan UKP	Urusan Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TARAKAN

(B A P P E D A)

Jalan P. Irian No. 13 Tarakan Telp.(0551) 33910, Kota Tarakan – 77121

BERITA ACARA
VERIFIKASI PEMETAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
SESUAI NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di ruang rapat kantor Bappeda Kota Tarakan telah dilaksanakan verifikasi pemetaan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Kota Tarakan Tahun 2021 sesuai nomenklatur dalam Permendagri Nomo 90 Tahun 2019.

Setelah dilakukan diskusi dan penelaahan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan maka disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan dalam Renja yang relevan dengan sub kegiatan/kegiatan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berjumlah 69 kegiatan
2. Jumlah kegiatan yang diusulkan menjadi sub kegiatan baru berjumlah 2 kegiatan
3. Rincian kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk menjadi bahan masukan dalam rangka penyampaian usulan pemutakhiran nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah kepada Kementerian/Lembaga terkait.

Direktur
RS Umum Kota Tarakan

PEMERINTAH KOTA TARAKAN RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN

dr. Joko Haryanto
NIP. 197611112005021002

Tim Pembahas

1. Asmawati, SE .....
2. Denny Sukma Permana, S.STP .....
3. Nurfaisah, SKM .....
4. Hj. Kasbariah, SH,MH .....
5. Deny Puspita R, S.Sos .....

Kepala Bappeda Kota Tarakan,

PEMERINTAH KOTA TARAKAN BAPPEDA

H. SUPARLAN, ST,MT
Pembina Utama Muda
Nip.19640212 199803 1 004

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

TABEL KERJA
PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
RS UMUM KOTA TARAKAN

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran			Administrasi Umum	Jumlah layanan administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah			01	2.03	
						Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	Administrasi Umum	Jumlah layanan administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
							Jumlah paket pengiriman		Jumlah paket pengiriman	Administrasi Umum	Jumlah layanan administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Administrasi Umum	Jumlah layanan administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Administrasi Umum	Jumlah layanan administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah ASN yang mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah ASN yang mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan	Administrasi Umum	Jumlah layanan administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajak kendaraannya terbayarkan	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajak kendaraannya terbayarkan	Administrasi Umum	Jumlah layanan administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan		Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	Administrasi Umum	Jumlah layanan administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia	Administrasi Umum	Jumlah layanan administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
							Jumlah tenaga kebersihan		Jumlah tenaga kebersihan	Administrasi Umum	Jumlah layanan administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Administrasi Umum	Jumlah layanan administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Administrasi Umum	Jumlah layanan administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	Administrasi Umum	Jumlah layanan administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
							Jumlah penggandaan yang tersedia		Jumlah penggandaan yang tersedia	Administrasi Umum	Jumlah layanan administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Administrasi Umum	Jumlah layanan administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Administrasi Umum	Jumlah layanan administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	Administrasi Umum	Jumlah layanan administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Administrasi Umum	Jumlah layanan administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	Administrasi Umum	Jumlah layanan administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Administrasi Umum	Jumlah layanan administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Jumlah tenaga pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Penyediaan Gaji Pegawai Tidak Tetap	Cakupan Waktu Penyediaan Jasa Tenaga Non Medis	Administrasi Keuangan	Jumlah layanan administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS	Jumlah orang (Non PNS) yang mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Tidak Tetap	Cakupan Waktu Penyediaan Jasa Kesehatan Tenaga Non Medis	Administrasi Umum	Jumlah layanan administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur			Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah			01	2.03	
						Pengadaan mobil jabatan	Jumlah pengadaan mobil jabatan	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah pengadaan mobil jabatan	Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Pengadaan meubelair	Jumlah pengadaan meubelair	Pengadaan meubelair	Jumlah pengadaan meubelair	Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas	Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang disiplin			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah disiplin Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dispillin Aparatur	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah			01	2.04	
						Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah disiplin Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dispillin Aparatur	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah disiplin Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dispillin Aparatur	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pengadaan pakaian korpri	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pengadaan pakaian korpri	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah disiplin Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dispillin Aparatur	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah disiplin Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dispillin Aparatur	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu			Administrasi Keuangan	Terpenuhinya administrasi keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah			01	2.01	
						Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja	Penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen laporan kinerja, jumlah pendampingan penatausahaan keuangan dan jumlah dokumen SOP keuangan yang disusun	Administrasi Keuangan	Jumlah Administrasi Keuangan yang di susun tepat Waktu	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Pendampingan penatausahaan keuangan	Jumlah pendampingan penatausahaan keuangan			Administrasi Keuangan	Jumlah Administrasi Keuangan yang di susun tepat Waktu	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah dokumen SOP			Administrasi Keuangan	Jumlah Administrasi Keuangan yang di susun tepat Waktu	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	Penyusunan laporan keuangan bulanan/ semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan / semesteran yang disusun	Administrasi Keuangan	Jumlah Administrasi Keuangan yang di susun tepat Waktu	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran	Administrasi Keuangan	Jumlah Administrasi Keuangan yang di susun tepat Waktu	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	Administrasi Keuangan	Jumlah Administrasi Keuangan yang di susun tepat Waktu	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat dan Bimtek			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Bimtek	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat dan Bimtek	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah			01	2.04	
						Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Bimtek	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat dan Bimtek	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Bimtek	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat dan Bimtek	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Bimtek	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat dan Bimtek	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
						Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Bimtek	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat dan Bimtek	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah					
								Peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan	Jumlah sumber daya kesehatan yang mengikuti pendikan dan pelatihan formal	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan di RS			1	02	03	2.04	01
						Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata	Persentase pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana RS			Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana RS	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	02	02	2	01
						Pembangunan gudang obat/apotik	Jumlah pembangunan gudang obat/apotik	Pengembangan RS	Jumlah pembangunan gudang obat/apotik	Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana RS	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Penambahan ruang rawat inap RS (VVIP, VIP, Kelas I,II,III)	Jumlah penambahan ruang rawat inap rs (vvip, vip, kelas i,ii,iii)		Jumlah penambahan ruang rawat inap rs (vvip, vip, kelas i,ii,iii)	Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana RS	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
						Pengadaan ambulance/mobil jenazah	Jumlah pengadaan ambulance/mobil jenazah		Jumlah pengadaan ambulance/mobil jenazah	Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana RS	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
						Pengadaan meubelair RS	Jumlah pengadaan meubelair RS		Jumlah pengadaan meubelair RS	Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana RS	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
						Pembangunan gedung kantor	Jumlah pembangunan gedung kantor		Jumlah pembangunan gedung kantor	Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana RS	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
						Pengadaan perlengkapan rumah tangga RS(dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Jumlah pengadaan perlengkapan rumah tangga rs(dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)		Jumlah pengadaan perlengkapan rumah tangga rs(dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana RS	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
						Pengadaan percetakan administrasi dan surat menyurat RS	Jumlah pengadaan percetakan administrasi dan surat menyurat RS													
						Pengadaan bahan-bahan logistik RS	Jumlah pengadaan bahan-bahan logistik RS	Pengadaan bahan habis pakai	Jumlah pengadaan bahan habis pakai (bahan-bahan logistik RS untuk keperluan makan minum pasien)	Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana RS	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
								Pengadaan bahan habis pakai	Jumlah bahan habis pakai yang diadakan	Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana RS	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
						Rehabilitasi bangunan rumah sakit	Jumlah rehabilitasi bangunan rumah sakit	Rehabilitasi dan pemeliharaan RS	Jumlah bangunan RS yang direhabilitasi	Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana RS	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Pengadaan alat-alat kesehatan RS	Jumlah pengadaan alat-alat kesehatan rs	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas kesehatan	Jumlah pengadaan alat-alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas kesehatan	Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana RS	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
						Pengadaan obat-obatan RS	Jumlah pengadaan obat-obatan RS	Pengadaan obat, vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang diadakan	Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana RS	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
						Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana RS yang terpelihara			Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana RS yang terpelihara	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	02	02	2	01
						Pemeliharaan rutin/berkala RS	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala RS	Rehabilitasi dan pemeliharaan RS	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala RS	Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana RS yang terpelihara	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
						Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik		Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik	Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana RS yang terpelihara	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
						Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap RS (VVIP, VIP, Kelas I, II, III)	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap (VVIP, VIP, Kelas I, II,III)		Jumlah pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap (VVIP, VIP, Kelas I, II,III)	Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana RS yang terpelihara	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
						Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi		Jumlah pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi	Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana RS yang terpelihara	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
						Pemeliharaan rutin/berkala ruang bersalin	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala ruang bersalin		Jumlah pemeliharaan rutin/berkala ruang bersalin	Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana RS yang terpelihara	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
						Pemeliharaan rutin/berkala ruang rontgen	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala ruang rontgen		Jumlah pemeliharaan rutin/berkala ruang rontgen	Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana RS yang terpelihara	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Pemeliharaan rutin/berkala ruang laboratorium	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala ruang laboratorium		Jumlah pemeliharaan rutin/berkala ruang laboratorium	Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana RS yang terpelihara	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
						Pemeliharaan rutin/berkala kamar jenazah	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kamar jenazah		Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kamar jenazah	Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana RS yang terpelihara	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
						Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah RS	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rs		Jumlah pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rs	Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana RS yang terpelihara	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
						Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan RS	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rs	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rs											
						Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah		Jumlah pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah	Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana RS yang terpelihara	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
						Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan RS	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rs		Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rs	Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana RS yang terpelihara	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur			Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (UKM dan UKP)	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	02	02	2	01
						Pembangunan rumah jabatan	Jumlah pembangunan rumah jabatan	Pembangunan Rumah Dinas dan rumah jabatan Tenaga Kesehatan	Jumlah pembangunan rumah jabatan	Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (UKM dan UKP)	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
						Pembangunan rumah dinas	Jumlah pembangunan rumah dinas		Jumlah pembangunan rumah dinas	Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (UKM dan UKP)	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Pembangunan /rehabilitasi asrama	Jumlah pembangunan/rehab asrama		Jumlah pembangunan/rehab asrama	Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (UKM dan UKP)	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
						Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Status Akreditasi RS	Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di Kabupaten/Kota	Status akreditasi RS	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang terakreditasi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Status Akreditasi	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
						Penyusunan standar kesehatan	Jumlah dokumen standar pelayanan kesehatan		Jumlah dokumen standar pelayanan kesehatan											
						Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah standar pelayanan kesehatan yang di evaluasi dan dikembangkan		Jumlah standar pelayanan kesehatan yang di evaluasi dan dikembangkan											
					"	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan		Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan											
						Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Jumlah pembangunan dan pemutakhiran data dasar	Pengelolaan data dan informasi kesehatan	Jumlah data dan informasi kesehatan yang dikelola	Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	Jumlah pembangunan dan pemutakhiran data dasar (sistem informasi kesehatan terintegrasi)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Status Akreditasi	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
						Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan	Jumlah naskah akademis standar pelayanan kesehatan	Peningkatan tata kelola RS dan fasilitas pelayanan kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah akademis standar pelayanan kesehatan	Penerbitan izin RS kelas C dan D dan fasilitas kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Terbitnya izin RS kelas C dan D dan fasilitas kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	02	03	2.03	01
						Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan	Jumlah standar analisis belanja pelayanan kesehatan		Jumlah standar analisis belanja pelayanan kesehatan											
						Pengembangan sistem dan layanan informasi kesehatan terpadu	Jumlah pengembangan sistem dan layanan kesehatan terpadu	Pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet	Jumlah alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet yang diadakan	Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	Jumlah pengembangan sistem dan layanan kesehatan terpadu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (UKM dan UKP)	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	02	02	2	01
								Pengelolaan sistem informasi kesehatan	Jumlah sistem informasi kesehatan kesehatan yang dikelola	Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	Jumlah pengembangan sistem dan layanan kesehatan terpadu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (UKM dan UKP)	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
						Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah dokumen peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah dokumen peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan	Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	Jumlah pengembangan sistem dan layanan kesehatan terpadu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (UKM dan UKP)	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Regulasi dan manajemen mutu pelayanan kesehatan	Jumlah dokumen regulasi dan manajemen mutu pelayanan kesehatan	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Jumlah dokumen regulasi dan manajemen mutu pelayanan kesehatan	Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	Jumlah pengembangan sistem dan layanan kesehatan terpadu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (UKM dan UKP)	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
						Program Peningkatan Pelayanan (BLUD)	Persentase Capaian SPM													
						Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan (BLUD)	Persentase capaian SPM RS	Operasional Pelayanan RS	Persentase capaian SPM RS	Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase capaian SPM RS	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya program pemenuhan UKM dan UKP	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintahan	1	02	02	2.02	32

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TARAKAN
(B A P P E D A)
Jalan P. Irian No. 13 Tarakan Telp.(0551) 33910, Kota Tarakan – 77121

BERITA ACARA
VERIFIKASI PEMETAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
SESUAI NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di ruang rapat kantor Bappeda Kota Tarakan telah dilaksanakan verifikasi pemetaan Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2021 sesuai nomenklatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Setelah dilakukan diskusi dan penelaahan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan maka disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan dalam Renja yang relevan dengan sub kegiatan/kegiatan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berjumlah 44 (Empat puluh empat) kegiatan
2. Jumlah kegiatan yang diusulkan menjadi sub kegiatan baru berjumlah 3 (Tiga) kegiatan
3. Rincian kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk menjadi bahan masukan dalam rangka penyampaian usulan pemutakhiran nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah kepada Kementerian/Lembaga terkait.

Kepala Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat
Kota Tarakan

Drs. Hj. Mariyam, M.Si.
NIP. 19640315 199309 2 008

Tim Pembahas

1. Hj. Hadariniah, S.Sos. .....
2. Moh. Saleh, SE. .....
3. Eka Christin HS., S.AP. .....
4. Hj. Kasbariah, SH., MH. .....
5. Deny Puspita R., S.Sos. .....

Kepala Bappeda Kota Tarakan,

H. SUPARLAN, ST,MT
Pembina Utama Muda
Nip.19640212 199803 1 004

TABEL KERJA
PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYATAKAT

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1.06				Wajib Pelayanan Dasar Sosial																
1.06	01	01				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran							Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah					
1.06	01	01	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang Tersedia	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	X	XX	01	2.03	01
1.06	01	01	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Waktu Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	X	XX	01	2.03	02
1.06	01	01	06			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajak kendaraannya terbayarkan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Pajak Kendaraannya Terbayarkan	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	X	XX	01	2.03	06
1.06	01	01	07			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Aparatur yang Mendapatkan Tunjangan Administrasi Keuangan	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	X	XX	01	2.03	07
1.06	01	01	08			Penyediaan Jasa Kebersihaan Kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia	Penyediaan Jasa Kebersihaan Kantor	Jumlah Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor yang Tersedia	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	X	XX	01	2.03	08
1.06	01	01	10			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang Tersedia	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	X	XX	01	2.03	10
1.06	01	01	11			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	X	XX	01	2.03	11

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1.06	01	01	12			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	X	XX	01	2.03	12
1.06	01	01	13			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	X	XX	01	2.03	13
1.06	01	01	17			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	X	XX	01	2.03	17
1.07	01	01	18			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	X	XX	01	2.03	18
1.06	01	02				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur													
1.06	01	02	24			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah perbaikan kendaraan bermotor. Pembelian BBM, oli serta suku cadang	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Perbaikan Kendaraan Bermotor. Pembelian BBM, Oli serta Suku Cadang	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	X	XX	01	2.03	30
1.06	01	02	22			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	X	XX	01	2.03	28
1.06	01	02	28			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	X	XX	01	2.03	34
1.06	01	02	42			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang di rehab	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang di Rehabilitasi	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	X	XX	01	2.03	38
1.06	01	03				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang disiplin													

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1.06	01	03	01			Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah pengadaan mesin absensi	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Pengadaan Mesin Absensi	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Layanan untuk Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang Disiplin	Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	X	XX	01	2.04	01
1.06	01	03	02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Layanan untuk Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang Disiplin	Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	X	XX	01	2.04	02
1.06	01	03	04			Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah pengadaan pakaian KORPRI	Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah Pengadaan Pakaian KORPRI	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Layanan untuk Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang Disiplin	Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	X	XX	01	2.04	04
1.06	01	03	05			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Layanan untuk Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang Disiplin	Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	X	XX	01	2.04	05
1.06	01	06				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu													
1.06	01	06	01			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	Administrasi Keuangan	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	X	XX	01	2.02	06
1.06	01	15		Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Bidang Sosial	Program Pemberdayaan Fakir Miskin , Komunitasn Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial													

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1.06	01	15	01			Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah partisipasi PSKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksanaan kesejahteraan sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan Masyarakat	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Layanan Pemberdayaan Sosial	Urusan Bidang Sosial	Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	02	2.03	04
1.06	01	15	03			Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan sosial	Pendampingan Penyaluran Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBe)	Jumlah Kelompok Usaha Bersama yang menerima Bantuan Usaha	Kegiatan Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Layanan Fasilitasi Bantuan Sosial Daerah	Program Penanganan Fakir Miskin	Persentase Layanan Fasilitasi Bantuan Sosial Daerah	Urusan Bidang Sosial	Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06			
1.06	01	15	05			Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam kessos	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang Menerima Layanan Kedaruratan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Urusan Bidang Sosial	Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	04	2.02	01
1.06	01	15	06			Fasilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah KPM yang mendapatkan bantuan PKH	Pendampingan Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah KPM yang Menerima Bantuan PKH	Kegiatan Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Layanan Fasilitasi Bantuan Sosial Daerah	Program Penanganan Fakir Miskin	Persentase Layanan Fasilitasi Bantuan Sosial Daerah	Urusan Bidang Sosial	Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06			
1.06	01	15	09			Fasilitasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Jumlah KPM yang mendapatkan bantuan BPNT	Pendampingan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Sembako	Jumlah KPM yang menerima Bantuan BPNT Program Sembako	Kegiatan Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Layanan Fasilitasi Bantuan Sosial Daerah	Program Penanganan Fakir Miskin	Persentase Layanan Fasilitasi Bantuan Sosial Daerah	Urusan Bidang Sosial	Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06			

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1.06	01	15	10			Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	Jumlah pengaduan yang terlayani	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Data dan Pengaduan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang Diterima	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Urusan Bidang Sosial	Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	04	2.01	09
								Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Data dan Pengaduan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang Diterima	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Urusan Bidang Sosial	Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	04	2.02	01
								Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin yang Terdata	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kapubaten/Kota	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Urusan Bidang Sosial	Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	05	2.02	01
1.06	01	16				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase partisipasi PMKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksanaan kesejahteraan sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang Menerima Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Urusan Bidang Sosial	Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	04	2.02	07

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1.06	01	16	02			Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi Perdagangan Perempuan dan Anak	Jumlah orang terlantar, anak berhadapan hukum dan anak putus sekolah yang mendapatkan pembinaan	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang Menerima Layanan Rujukan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial	Urusan Bidang Sosial	Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	04	2.01	13
1.06	01	16	03			Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi PMKS	Jumlah PMKS yang mendapatkan sosialisasi program kesejahteraan sosial	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpelihara	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Layanan Anak-Anak Terlantar	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Urusan Bidang Sosial	Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	05	2.01	03
1.06	01	16	04			Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan bagi anak jalanan, anak cacat dan anak nakal	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang Menerima Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial	Urusan Bidang Sosial	Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	04	2.01	05
1.06	01	16	09			Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Singkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Jumlah rapat koordinasi nasional dan konsultasi bidang sosial penanganan PMKS	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi Nasional dan Konsultasi Bidang Sosial Pengelolaan Data Fakir Miskin	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang Dikelola	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Urusan Bidang Sosial	Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	05	2.02	02
1.06	01	16	10			Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Jumlah pembinaan, bimbingan dan pelatihan bagi anggota Tagana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana	Urusan Bidang Sosial	Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	06	2.02	01

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1.06	01	21				Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase partisipasi PSKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksanaan kesejahteraan sosial													
1.06	01	21	01			Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah peserta pelatihan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang	Jumlah Peserta yang Terlibat	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah yang terlaksana	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Layanan Pemberdayaan Sosial	Urusan Bidang Sosial	Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	02	2.02	01
1.06	01	21	03			Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah peserta pelatihan TKSM, TKSK, TAGANA, LK3 dan Relawan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)/Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kapubaten/Kota	Jumlah Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Terlaksana	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Layanan Pemberdayaan Sosial	Urusan Bidang Sosial	Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	02	2.03	01
								Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kapubaten/Kota	Jumlah Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Layanan Pemberdayaan Sosial	Urusan Bidang Sosial		1	06	02	2.03	02
								Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kapubaten/Kota	Jumlah Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Layanan Pemberdayaan Sosial	Urusan Bidang Sosial		1	06	02	2.03	03

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
								Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Peserta Pelatihan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kapubaten/Kota	Jumlah Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Layanan Pemberdayaan Sosial	Urusan Bidang Sosial		1	06	02	2.03	05
1.06	01	22				Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	Persentase pemeliharaan Taman Makam Pahlawan													
1.06	01	22	02			Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Makam Pahlawan	Cakupan waktu penyediaan sarana prasarana TMP	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kapubaten /Kota	Cakupan Waktu Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kapubaten /Kota	Jumlah Layanan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Urusan Bidang Sosial	Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	07	2.01	03
1.06	01	23				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani													
1.06	01	23	01			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana yang menerima penyediaan Makanan	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Bencana	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana	Urusan Bidang Sosial	Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	06	2.01	01
1.06	01	23	02			Sosialisasi Siaga Bencana	Jumlah peserta sosialisasi kampung siaga bencana di kelurahan dan sekolah	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana	Urusan Bidang Sosial	Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	06	2.02	01

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1.06	01	24				Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak telantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti yang terlayani													
1.06	01	24	01			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas	Persentase penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyadang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Diberikan Makanan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyadang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial	Urusan Bidang Sosial	Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	04	2.01	01
1.06	01	24	03			Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia	Persentase lansia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyadang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Diberikan Alat Bantu	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyadang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial	Urusan Bidang Sosial	Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	04	2.01	03
1.06	01	24	04			Rehabilitasi Sosial bagi Anak	Persentase anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti	Jumlah Perbekalan Kesehatan bagi Penyadang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyadang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial	Urusan Bidang Sosial	Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	04	2.01	04

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
								Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyadang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Keluarga Penyadang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Menerima Bimbingan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyadang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial	Urusan Bidang Sosial	Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	04	2.01	06
1.06	01	24	05			Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	Persentase gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Penyadang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Menerima Layanan Kedaruratan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyadang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial	Urusan Bidang Sosial	Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	04	2.01	10
								Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Penyadang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Menerima Layanan Penelusuran Keluarga	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyadang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial	Urusan Bidang Sosial	Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	04	2.01	11

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
								Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penyadang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Menerima Layanan Reunifikasi Keluarga	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyadang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial	Urusan Bidang Sosial	Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	04	2.01	12
								Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang Diberikan Makanan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial	Urusan Bidang Sosial	Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	04	2.02	03
								Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang Diberikan Alat Bantu	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial	Urusan Bidang Sosial	Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	04	2.02	05
								Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti	Jumlah Perbekalan Kesehatan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial	Urusan Bidang Sosial	Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	04	2.02	06

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
								Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyadang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang Menerima Bimbingan Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial	Urusan Bidang Sosial	Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	04	2.02	08
								Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang Menerima Layanan Penelusuran Keluarga	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial	Urusan Bidang Sosial	Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	04	2.02	11
								Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang Menerima Layanan Reunifikasi Keluarga	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial	Urusan Bidang Sosial	Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	04	2.02	12

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
								Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Mitra Kerjasama yang Terlibat	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial	Urusan Bidang Sosial	Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	04	2.02	14
1.06	01	15		Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Program Peningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase lembaga masyarakat yang aktif													
1.06	01	15	01			Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang dibina	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah Kelembagaan yang dibina	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2	13	05	2:01	03
1.06	01	17				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase Posyandu dan Posyantek yang aktif													

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1.06	01	17	03			Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Jumlah Posyandu yang ditingkatkan sarana dan prasarananya	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan	Jumlah Posyandu yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2	13	05	2:01	04
1.06	01	17	07			Lomba Teknologi Tepat Guna	Jumlah alat TTG yang dilombakan dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Binaan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2	13	05	2:01	06

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
								Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Binaan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2	13	05	2:01	05
1.06	01	18				Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Predikat penilaian Kelurahan													
1.06	01	18	05			Pelaksanaan Lomba Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang ikut lomba	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah Kelembagaan yang dibina	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2	13	05	2:01	03

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TARAKAN

(B A P P E D A)

Jalan P. Irian No. 13 Tarakan Telp.(0551) 33910, Kota Tarakan – 77121

BERITA ACARA
VERIFIKASI PEMETAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
SESUAI NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di ruang rapat kantor Bappeda Kota Tarakan telah dilaksanakan verifikasi pemetaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2021 sesuai nomenklatur dalam Permendagri Nomo 90 Tahun 2019.

Setelah dilakukan diskusi dan penelaahan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan maka disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan dalam Renja yang relevan dengan sub kegiatan/kegiatan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berjumlah 108/29 kegiatan
2. Jumlah kegiatan yang diusulkan menjadi sub kegiatan baru berjumlah ~~01~~ 02 kegiatan
3. Rincian kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk menjadi bahan masukan dalam rangka penyampaian usulan pemutakhiran nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah kepada Kementerian/Lembaga terkait.

An. Kepala Dinas DPPPAPPKB

Sekretaris

RIFHANIE HASANIE, S.Sos, M. Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 197010161998031009

Tim Pembahas

1. Dra. Jaharah .....
2. Eny Suryani, S.H .....
3. Nathalia V Hanye .....
4. Hj. Kasbariah, S.H, M.H .....
5. Deny Puspita R, S.Sos .....
6. Joko Prasetyo, S.KM

Kepala Bappeda Kota Tarakan,

PEMERINTAH KOTA TARAKAN BAPPEDA

H. SUPARLAN, ST,MT
Pembina Utama Muda
Nip. 19640212 199803 1 004

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

TABEL KERJA
PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TARAKAN

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Program Administrasi Perkantoran	persentase pemenuhan layanan adminstrasi perkantoran			Administrasi Umum	Jumlah layanan adminstrasi umum yang diberikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2	2	01.	2.03	
						Penyediaan jasa surat menyurat		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	Administrasi Umum	Jumlah layanan adminstrasi umum yang diberikan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2	2	01.	2.03	01
									Jumlah paket pengiriman											
						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Administrasi Umum	Jumlah layanan adminstrasi umum yang diberikan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2	2	01.	2.03	02
						Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajak kendaraannya terbayarkan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajak kendaraannya terbayarkan	Administrasi Umum	Jumlah layanan adminstrasi umum yang diberikan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2	2	01.	2.03	06
						Penyediaan jasa Administrasi keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	Administrasi Umum	Jumlah layanan adminstrasi umum yang diberikan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2	2	01.	2.03	07
						Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia	Administrasi Umum	Jumlah layanan adminstrasi umum yang diberikan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2	2	01.	2.03	08
						Penyediaan Alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Administrasi Umum	Jumlah layanan adminstrasi umum yang diberikan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2	2	01.	2.03	10
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	Administrasi Umum	Jumlah layanan adminstrasi umum yang diberikan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2	2	01.	2.03	11
							Jumlah barang penggandaan yang tersedia		Jumlah barang penggandaan yang tersedia	Administrasi Umum	Jumlah layanan adminstrasi umum yang diberikan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Administrasi Umum	Jumlah layanan adminstrasi umum yang diberikan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2	2	01.	2.03	13
						Rapat-rapat koordinator dan konsultasi di luar daerah	Jumlah rapat koordinator dan konsultasi di luar daerah	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinator dan konsultasi di luar daerah	Administrasi Umum	Jumlah layanan adminstrasi umum yang diberikan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2	2	01.	2.03	18
						Program peningkatan sarana dan prasarana	persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasasara aparatur													
						Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Administrasi Umum	Jumlah layanan adminstrasi umum yang diberikan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2	2	01.	2.03	20
						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah BBM yang diadakan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah BBM yang diadakan	Administrasi Umum	Jumlah layanan adminstrasi umum yang diberikan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2	2	01.	2.03	30
							Jumlah suku cadang		Jumlah suku cadang											
							Jumlah jasa service		Jumlah jasa service											

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang di pelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang di pelihara	Administrasi Umum	Jumlah layanan adminstrasi umum yang diberikan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2	2	01.	2.03	32
						Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang direhab	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang direhab	Administrasi Umum	Jumlah layanan adminstrasi umum yang diberikan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2	2	01.	2.03	38
						Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ASN yang disiplin			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang disiplin					2	2	01.	2.04	
						Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah pengadaan mesin/kartu absensi	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah pengadaan mesin/kartu absensi	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang disiplin	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2	2	01.	2.04	01
						Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapan	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang disiplin	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2	2	01.	2.04	02
								Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pengadaan pakaian Korpri	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang disiplin	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2	2	01.	2.04	04
								Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pengadaan pakaian hari-hari tertentu	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang disiplin	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2	2	01.	2.04	05
						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2	2	01.		
						Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen kinerj	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja	Administrasi Keuangan	Jumlah layanan adminstrasi keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2	2	01.	2.02	06
						Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan yang dibuat	Administrasi Keuangan	Jumlah layanan adminstrasi keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan program penunjang urusan pemerintah daerah	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2	2	01.	2.02	09
														URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2	08	02		
						Program Penguatan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Skor menuju Kota Layak Anak					PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2	08	02	2.01	
						Penguatan kelembangaan PUG dan anak	Jumlah Indikator KLA yang terpenuhi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Indikator KLA yang terpenuhi		Persentase OPD yang telah melaksanakan data Responsif Gender	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2	08	02	2.01	02

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
								Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah OPD yang melaksanakan PUG dan PPRG	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Indikator KLA yang terpenuhi			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	08	02	2.01	03
						Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah kasus KDRT yang terlayani	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus KDRT yang terlayani	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus KDRT	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus KDRT yang terlayani	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	08	03	2.02	01
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus KDRT	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus KDRT yang terlayani	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	08	03	2.02	02
								Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah advokasi dan pendampingan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus KDRT yang terlayani	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	08	03	2.03	01
								Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Jumlah advokasi dan pendampingan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus KDRT yang terlayani	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	08	03	2.03	02
								Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah barang kebutuhan yang disediakan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus KDRT yang terlayani	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	08	03	2.03	03
								Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus KDRT yang terlayani	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	08	03	2.03	04
								Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah advokasi dan pendampingan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus KDRT	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	08	07	2.01	01

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	08	07	2.01	02
								Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus KDRT yang terlayani	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus KDRT			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	08	07	2.02	01
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus KDRT			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	08	07	2.02	02
								Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah advokasi dan pendampingan	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus KDRT			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	08	07	2.02	03
								Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah advokasi dan pendampingan	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus KDRT			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	08	07	2.02	04
								Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasana layanan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	08	07	2.03	01
								Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	08	07	2.03	02

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
								Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	08	07	2.03	03
						Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Responsif Gender	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data Gender dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Responsif Gender	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data Gender dan Anak yang di kelola	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	08	05	2.01	01
								Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Responsif Gender	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data Gender dan Anak yang di kelola	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	08	05	2.01	02
														URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN					
						Program Keserasian Kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Persentase sekolah ramah anak					PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase sekolah ramah anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2	08	06		
						Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembekalan kualitas perempuan dan anak	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan dan advokasi	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembekalan kualitas perempuan dan anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase sekolah ramah anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	08	06	2.01	01
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi lembaga pemenuhan hak anak	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembekalan kualitas perempuan dan anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase sekolah ramah anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2	08	06	2.01	02
								Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyediaan layanan anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase sekolah ramah anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2	08	06	2.02	01

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyediaan layanan anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase sekolah ramah anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	08	06	2.02	02
								Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyediaan layanan anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase sekolah ramah anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	08	06	2.02	03
								Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyediaan layanan anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase sekolah ramah anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	08	06	2.02	04
														URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN					
						Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase organisasi Perempuan yang aktif					PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase organisasi Perempuan yang aktif	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	2	08	04		
						Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah kelompok usaha perempuan yang dibina	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang dibina	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok usaha perempuan yang dibina	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase organisasi Perempuan yang aktif	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	08	04	2.01	03
						Kegiatan Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah peserta penyuluhan	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta penyuluhan	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta penyuluhan	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase organisasi Perempuan yang aktif	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	08	04	2.01	02
						Pembinaan organisasi perempuan	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase organisasi Perempuan yang aktif			2	08	02	2.02	01

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
								Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah advokasi dan pendampingan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase organisasi Perempuan yang aktif	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	08	02	2.02	02
								Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang mendapat advokasi dan pendampingan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga atau organisasi perempuan yang didampingi	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase organisasi Perempuan yang aktif	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	08	02	2.03	01
								Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang kapasitasnya ditingkatkan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga atau organisasi perempuan yang didampingi	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase organisasi Perempuan yang aktif	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	08	02	2.03	02
								Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga atau organisasi perempuan yang didampingi	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase organisasi Perempuan yang aktif	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	08	02	2.03	03
						Program Keluarga Berencana	Cakupan aseptor KB							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	03		
						Pelayanan KIE	Jumlah kegiatan pelayanan KIE			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan	Jumlah kegiatan pelayanan KIE	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan aseptor KB	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	03	2.01	
								Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah peserta/mitra kerja	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan	Jumlah kegiatan pelayanan KIE	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan aseptor KB	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	03	2.01	01
								Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah peserta	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan	Jumlah kegiatan pelayanan KIE	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan aseptor KB	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	03	2.01	02
								Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Jumlah promosi KIE mel media elektronik	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan	Jumlah kegiatan pelayanan KIE	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan aseptor KB	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	03	2.01	04

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
								Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah media elektronik yang digunakan	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan	Jumlah kegiatan pelayanan KIE	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan aseptor KB	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	03	2.01	05
								Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah rapat koordinasi dan minlok yang dilaksanakan	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah kegiatan pelayanan KIE	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan aseptor KB	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	03	2.01	06
								Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	cakupan waktu pelaksanaan pengelolaan operasional dan sarana di balai	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan	Jumlah kegiatan pelayanan KIE	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan aseptor KB	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	03	2.01	07
						Kegiatan Pemutahiran Data KB - KS	Jumlah Keluarga yang didata	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen GDPK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Keluarga yang didata	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase data keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	02	2.01	02
								Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah regulasi yang ditetapkan	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Keluarga yang didata	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase data keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	02	2.01	03
								Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah data	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Keluarga yang didata	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase data keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	02	2.01	04

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
								Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah peserta	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Keluarga yang didata	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase data keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	02	2.01	05
								Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah peserta	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Keluarga yang didata	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase data keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	02	2.01	06
								Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Keluarga yang didata	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase data keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	02	2.01	07
								Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Keluarga yang didata	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase data keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	02	2.01	08
								Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah peserta	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Keluarga yang didata	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase data keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	02	2.01	09
								Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah peserta	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Keluarga yang didata	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase data keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	02	2.01	10

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
								Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah peserta	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Keluarga yang didata	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase data keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	02	2.01	11
								Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah peserta	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Keluarga yang didata	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase data keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	02	2.01	12
								Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah peserta	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Keluarga yang didata	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase data keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	02	2.01	13
								Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah peserta	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Keluarga yang didata	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase data keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	02	2.01	14
								Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah peserta	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Keluarga yang didata	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase data keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	02	2.01	15
								Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah dokumen	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen data keluarga	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase data keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	02	2.02	01
								Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah data	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen data keluarga	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase data keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	02	2.02	02

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
								Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen data keluarga	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase data keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	02	2.02	03
								Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah rumah data yang dibentuk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen data keluarga	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase data keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	02	2.02	08
								Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah peserta	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen data keluarga	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase data keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	02	2.02	09
								Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah peserta	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen data keluarga	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase data keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	02	2.02	10
								Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah data	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen data keluarga	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase data keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	02	2.02	11
								Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah data	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen data keluarga	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase data keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	02	2.02	12
								Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah data	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen data keluarga	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase data keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	02	2.02	13
								Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah pembinaan yang dilakukan	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen data keluarga	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase data keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	02	2.02	14
														URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
						Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Jumlah peserta yang dibina	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah pembinaan	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pembinaan Program Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	03	2.02	01
								Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah sarana pendukung operasional yang disediakan	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pembinaan Program Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	03	2.02	02

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
														URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
						Pembinaan Keluarga Sejahtera (Kegiatan Pembinaan UPPKS)	Jumlah Kelompok UPPKS yang di Bina	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah kelompok yang dibentuk	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok UPPKS yang di Bina	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	04	2.01	01
								Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah sarana yang diadakan	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok UPPKS yang di Bina	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	04	2.01	02
								Penyerasian Kebijakan Dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah kebijakan yang mendukung tercapainya IPK	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok UPPKS yang di Bina	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	04	2.01	09
								Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah materi IPK	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok UPPKS yang di Bina	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	04	2.01	10
								Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah peserta	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok UPPKS yang di Bina	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	04	2.01	11
								Sosialisasi IPK	Jumlah peserta	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok UPPKS yang di Bina	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	04	2.01	12
								Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah peserta	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok UPPKS yang di Bina	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	04	2.01	13

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
										Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	04	2.02	
								Pelaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Peran Organisasi Masyarakat dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	04	2.02	03
								Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah peserta	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Peran Organisasi Masyarakat dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	04	2.02	04
														URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
						Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Persentase Kelompok Tribina yang aktif							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	04	2.01	
						Kegiatan Pembinaan Kelompok Bina Keluarga (Tribina)	Jumlah Kelompok Tribina (BKB,BKR,BKL)	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah peserta	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Tribina yang aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	04	2.01	01

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
								Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah sarana yang diadakan	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Tribina yang aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	04	2.01	02
								Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Tribina yang aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	04	2.01	03
								Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Tribina yang aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	04	2.01	04
								Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader yang menerima biaya operasional	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Tribina yang aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	04	2.01	05
								Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok yang menerima biaya operasional	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Tribina yang aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	04	2.01	06
								Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Tribina yang aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	04	2.01	07

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
										Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	04	2.02	
								Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kebijakan daerah	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	04	2.02	01
								Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah mitra kerja dan ormas yang menggerakkan program ketahanan keluarga	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Peran serta masyarakat dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	04	2.02	02
								Pelaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Peran serta masyarakat dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	04	2.02	03
														URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
						Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling	Persentase PIK-KRR yang aktif					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	04		

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
						Pendirian pusat pelayan informasi dan konseling KRR	Jumlah PIK-KRR yg terbentuk	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terbentuk	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PIK-KRR yg terbentuk	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	04	2.01	01
						Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	jumlah pelayanan PIK-KRR diluar sekolah	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	jumlah pelayanan PIK-KRR diluar sekolah	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	04	2.01	07
							Jumlah pelayanan PIK-KRR dijalur Pendidikan	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah peserta	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah pelayanan PIK-KRR dijalur Pendidikan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	04	2.01	08
														URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
						Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase Pembinaan Kampung KB							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
						Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Jumlah Kampung KB yang dibentuk	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah mitra kerja yang ikut serta di kampung KB	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB yang dibentuk	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pembinaan Program Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	03	2.04	01

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Peningkatan Kualitas Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang ditingkatkan kualitasnya	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah linsek yang terlibat	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB yang ditingkatkan kualitasnya	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pembinaan Program Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	03	2.04	02
								Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah program KKBPK yang dilaksanakan di kamp KB	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB yang ditingkatkan kualitasnya	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pembinaan Program Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	03	2.04	03
								Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah kampung KB yg dibina	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB yang ditingkatkan kualitasnya	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pembinaan Program Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	03	2.04	04
														URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
						Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pasangan Usia Subur yang mendapatkan Konseling KB	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pembinaan Program Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	03	2.03	
						Pelayanan Konseling KB	Jumlah Pasangan Usia Subur yang mendapatkan Konseling KB	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah peserta	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pasangan Usia Subur yang mendapatkan Konseling KB	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pembinaan Program Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	03	2.03	09
								Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah peserta	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pasangan Usia Subur yang mendapatkan Konseling KB	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pembinaan Program Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	03	2.03	12

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Pelayanan KB Medis Operasi	Jumlah peserta KB medis	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah alat dan obat kontrasepsi yang didistribusikan	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta KB medis	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pembinaan Program Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	03	2.03	01
								Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah peserta	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta KB medis	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pembinaan Program Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	03	2.03	02
								Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta KB medis	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pembinaan Program Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	03	2.03	03
								Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana penunjang yang disediakan	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta KB medis	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pembinaan Program Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	03	2.03	06
								Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah peserta	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta KB medis	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pembinaan Program Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	03	2.03	08
								Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah peserta	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta KB medis	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pembinaan Program Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	03	2.03	10
								Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah peserta KB Pria	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta KB medis	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pembinaan Program Keluarga Berencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	2	14	03	2.03	13

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TARAKAN

(B A P P E D A)

Jalan P. Irian No. 13 Tarakan Telp.(0551) 33910, Kota Tarakan – 77121

BERITA ACARA
VERIFIKASI PEMETAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
SESUAI NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di ruang rapat kantor Bappeda Kota Tarakan telah dilaksanakan verifikasi pemetaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Tahun 2021 sesuai nomenklatur dalam Permendagri Nomo 90 Tahun 2019.

Setelah dilakukan diskusi dan penelaahan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan maka disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan dalam Renja yang relevan dengan sub kegiatan/kegiatan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berjumlah 23 (Dua Puluh Tiga) kegiatan
2. Jumlah kegiatan yang diusulkan menjadi sub kegiatan baru berjumlah 0 kegiatan.
3. Rincian kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk menjadi bahan masukan dalam rangka penyampaian usulan pemutakhiran nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah kepada Kementerian/Lembaga terkait.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

PEMERINTAH KOTA TARAKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

HAMSYAH, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 196606161998031006

1. Amir Hamsyah, ST,MT .....
2. Suhairul,S.AP .....
3. Mulyanto,SH,MH .....
4. Sugiarti,SH .....
5. Hj. Kasbariah, SH,MH .....
6. Deny Puspita R, S.Sos .....

Kepala Bappeda Kota Tarakan,

PEMERINTAH KOTA TARAKAN BAPPEDA

H. SUPARLAN, ST,MT
Pembina Utama Muda
Nip. 19640212 199803 1 004

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021

TABEL KERJA
PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
2	6	1		Urusan Pemerintahan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran			Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang di laksananakan	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah	01	2	03		
2	6	1	1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang di laksananakan	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah				01	2	03	01	
2	6	1	2			Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air, dan Listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air, dan Listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang di laksananakan	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah				01	2	03	02	
2	6	1	6			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajak kendaraannnya terbayarkan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajak kendaraannnya terbayarkan	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang di laksananakan	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah				01	2	03	06	
2	6	1	7			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi Keuangan	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang di laksananakan	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah				01	2	03	07	
2	6	1	8			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Bahan dan Peralatan kebersihan Kantor yang tersedia	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Bahan dan Peralatan kebersihan Kantor yang tersedia	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang di laksananakan	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah				01	2	03	;08	
2	6	1	10			Penyediaan ATK	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	Penyediaan ATK	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang di laksananakan	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah				01	2	03	10	
2	6	1	11			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan yang tersedia	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan yang tersedia	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang di laksananakan	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah				01	2	03	11	
2	6	1	13			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang di laksananakan	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah				01	2	03	13	
2	6	1	18			Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang di laksananakan	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah				01	2	03	18	
2	6	2				Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana			Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang di laksananakan	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan Pemerintahan	01	2	03		
2	6	2	15			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah BBM Yang diadakan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan berkala kendaraan dinas	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang di laksananakan	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran			01	2	03	28	
2	6	2	22			Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang di pelihara	Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung Kantor yang dipelihara	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang di laksananakan	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran			01	2	03	30	
2	6	2	26			Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan gedung Kantor yang dipelihara	Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Administrasi Umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang di laksananakan	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran			01	2	03	32	
2	6	3				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang Disiplin			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang Disiplin	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan Pemerintahan	01	2	04		
2	6	3				Pengadaan Mesin/Kartu Absen	Jumlah pengadaan mesin/kartu absensi	Pengadaan Mesin Kartu/Absensi	Jumlah Pengadaan Mesin Kartu Absen	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang Disiplin			01	2	04	01	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannnya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannnya	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang Disiplin			01	2	04	02	
						Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah Pakaian Korpri	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang Disiplin			01	2	04	04	
						Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari hari tertentu	Pengadaan Pakaian Khusus Hari Tertentu	Jumlahj Pengadaan Pakaian Khusus Hari Tertentu	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang Disiplin			01	2	04	05	
2	6	6				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu			Administrasi Keuangan	Jumlah Administrasi Keuangan yang disusun tepat waktu	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan Pemerintahan	01	2	02		
						Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	Administrasi Keuangan	Jumlah Administrasi Keuangan yang disusun tepat waktu	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran			01	2	02	06	
2	6	15				Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penerbitan Administrasi Kependudukan	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan Pemerintahan Wajib Yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	12	04	02	'02	
2	6	15	03			Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun,Updating,dan Pemeliharaan)	Jumlah Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terselesaikan	Pengadaan Blanko dokumen Kependudukan selain Blanko KTP el ,Formulir dan Buku untuk pelayanan pendaftaran pendudukan dan pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Pengadaan Blanko Kependudukan yang tersedia	Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Administrasi Kependudukan yang diselesaikan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penerbitan Administrasi Kependudukan			12	04	02	'02	02

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
								Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan luar daerah yang dilaksanakan	Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah Administrasi Kependudukan yang dikoordinasikan dan dikonsultasikan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penerbitan Administrasi Kependudukan yang dikoordinasikan dan dokonsultasikan	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan Pemerintahan Wajib Yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	12	02	02	04	
2	6	15	06			Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah Dokumen Laporan Kependudukan yang tersedia	Pengelolaaan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen laporan kependudukan yang tersedia dan pemeliharaan peralatan perangkat siak	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah data Kependudukan yang di kumpulkan dan disajiklan dalam database	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Administrasi Kependudukan yang tersedia	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan Pemerintahan Wajib Yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	12	04	02	01	04
2	6	15	07			Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Kependudukan yang diterbitkan	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan Pemerintahan Wajib Yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	12	04	02	01	04
								Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	Program Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan Pemerintahan Wajib Yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	12	04	02	'03	02
2	6	15	09			Penyusunan Kebijakan Kependudukan	Jumlah Dokumen IKM dan Standar Pelayanan	Komunikasi Informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	Jumlah Dokumen IKM	Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Admnistrasi Kependudukan	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan Pemerintahan Wajib Yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	12	04	02	'03	10

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TARAKAN

(B A P P E D A)

Jalan P. Irian No. 13 Tarakan Telp.(0551) 33910, Kota Tarakan – 77121

BERITA ACARA
VERIFIKASI PEMETAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
SESUAI NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di ruang rapat kantor Bappeda Kota Tarakan telah dilaksanakan verifikasi pemetaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Tarakan Tahun 2021 sesuai nomenklatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Setelah dilakukan diskusi dan penelaahan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan maka disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan dalam Renja yang relevan dengan sub kegiatan/kegiatan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berjumlah 38 sub kegiatan.
2. Jumlah kegiatan yang diusulkan menjadi sub kegiatan baru berjumlah tidak ada
3. Rincian kegiatan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk menjadi bahan masukan dalam rangka penyampaian usulan pemutakhiran nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah kepada Kementerian/Lembaga terkait.

Sekretaris DPRD Kota Tarakan,

Ir. EDDY SURIANSYAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196606251998031001

Tim Pembahas

1. ABDIANSYAH .....
2. Jakup Anwar .....
3. Hj. ERNI, S.IP .....
4. Hj. Kasbariah, SH,MH .....
5. Muhammadong S.S,M.Si .....

Kepala Bappeda Kota Tarakan,

H. SUPARLAN, ST,MT
Pembina Utama Muda
Nip.19640212 199803 1 004

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

TABEL KERJA
PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
SEKRETARIAT DPRD KOTA TARAKAN

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4					Urusan Pemerintahan											Urusan Pemerintahan	4					
4	01					Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan									Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD		4	02				
4	01	12											Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4	02	01			
4	01	12	01				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Administrasi Umum						4	02	01	2	03	
4	01	12	01	01			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai							4	02	01	2	03	01
4	01	12	01	02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik							4	02	01	2	03	02
4	01	12	01				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di adakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di adakan							4	02	01	2	03	03
4	01	12	01	06			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajak kendaraannya terbayarkan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajak kendaraannya terbayarkan							4	02	01	2	03	06
4	01	12	01	07			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan							4	02	01	2	03	07
4	01	12	01	08			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia							4	02	01	2	03	08
4	01	12	01	10			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia							4	02	01	2	03	10
4	01	12	01	11			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia							4	02	01	2	03	11
4	01	12	01	12			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia							4	02	01	2	03	12
4	01	12	01				Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan							4	02	01	2	03	13
							Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang diadakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang diadakan							4	02	01			
4	01	12	01	17			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman							4	02	01	2	03	17
4	01	12	01				Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah							4	02	01	2	03	18
							Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Jumlah tenaga pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan														
4	01	12	02				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Administrasi Umum						4	02	01	2	03	
4	01	12	02				Pembangunan gedung kantor	Jumlah pembangunan gedung kantor		Jumlah pembangunan gedung kantor							4	02	01	2		
							Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah pengadaan mobil jabatan	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah Pengadaan Mobil Jabatan							4	02	01	2	03	19
							Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas	Jumlah Perlengkapan rumah jabatan yang diadakan	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas	Jumlah Perlengkapan rumah jabatan yang diadakan							4	02	01	2	03	21

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
									Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga pimpinan DPRD	Jumlah kebutuhan rumha tangga yang terpelihara dan diadakan	Layanan Administrasi DPRD		Program Layanan administrasi DPRD				4	02	02	2	01	04
							Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan yang diadakan	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan	Jumlah Peralatan rumah jabatan yang diadakan	Administrasi Umum		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4	02	01	2	03	23
4	01	12	02				Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional							4	02	01	2	03	20
4	01	12	02				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor							4	02	01	2	03	22
4	01	12	02				Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur yang diadakan	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur yang diadakan							4	02	01	2	03	25
							Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara							4	02	01	2	03	26
4	01	12	02	24			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah BBM,Suku Cadang dan Jasa service yang diadakan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah BBM,Suku Cadang dan Jasa service yang diadakan							4	02	01	2	03	30
4	01	12	02				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara							4	02	01	2	03	32
4	01	12	02	28			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara							4	02	01	2	03	34
4	01	12	02				Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah gedung/rumah yang dipelihara	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah gedung/rumah yang dipelihara							4	02	01	2	03	38
																	4	02	01			
4	01	12	03				Program peningkatan disiplin aparatur				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						4	02	01	2	04	
4	01	12	03				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan							4	02	01	2	04	02
									Penyediaan Pakaian dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian dan atribut DPRD yang diadakan	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Program Layanan administrasi keuangan				4	02	02	2	02	2
4	01	12	03				Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pengadaan pakaian lapangan yang diadakan	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pengadaan pakaian lapangan yang diadakan							4	02	01	2	04	03
4	01	12	03				Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan							4	02	01	2	04	04
4	01	12	03	05			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian batik yang diadakan	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian batik yang diadakan							4	02	01	2	04	05
																	4	02	01			
4	01	12					Program peningkatan Sumber Daya Manusia				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						4	02	01	2	04	
4	01	12					Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal							4	02	01	2	04	09
4	01	12					Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mendapatkan bimtek	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mendapatkan bimtek							4	02	01	2	04	11
4	01	12					Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi paket reguler tentang pengelolaan keuangan daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi paket reguler tentang pengelolaan keuangan daerah							4	02	01	2	04	11
4	01	04	15				Program Peningkatan Kapasitan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah															

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	01	04	15	01			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang diparipurnakan	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD				4	02	03	2	01	01
									Pembahasan rancangan Perda								4	02	03	2	01	02
									Penyelenggaraan kajian Perundang-undangan								4	02	03	2	01	03
									Fasilitasi Penysunan Naskah akademik								4	02	03	2	01	04
									Penyusunan Tata Terib DPRD								4	02	03	2	01	05
									Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Peningkatan Kapasitas DPRD		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD				4	02	03	2	04	05
4	01	04	15	02			Hearing / Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama	Jumlah hearing / dialog yang dilaksanakan	Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD				4	02	03	2	05	02
4	01	04	15	03			Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Rapat Alat Kelengkapan Dewan yang dilaksanakan	Fasilitasi Rapat-rapat DPRD		Layanan Administrasi DPRD		Program Layanan dan Administrasi Keuangan				4	02	02	2	01	02
									Penyusunan Program Kerja DPRD		Peningkatan Kapasitas DPRD		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD				4	02	03	2	04	07
4	01	04	15	04			Rapat-rapat paripurna	Jumlah Rapat paripurna yang dilaksanakan	Fasilitasi Rapat-rapat DPRD		Layanan Administrasi DPRD		Program Layanan dan Administrasi Keuangan				4	02	02	2	01	02
4	01	04	15	05			Kegiatan reses	Jumlah kegiatan reses yang dilaksnakan	Pelaksanaan reses		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD				4	02	03	2	05	03
4	01	04	15	06			Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Kunjungan Kerja yang dilaksanakan	Orientasi DPRD		Peningkatan Kapasitas DPRD		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD				4	02	03	2	04	01
									Pelaksanaan Undangan DPRD		fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD				4	02	03	2	08	03
4	01	04	15	07			Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD	Bimbingan Teknis DPRD		Peningkatan Kapasitas DPRD		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD				4	02	03	2	04	02
4	01	04	15	09			Rapat-rapat Fasilitasi Pengganggaran	Jumlah Rapat Anggaran yang dilaksanakan dan Dokumen Anggaran yang dihasilkan	Pembahasan KUA dan PPAS		Pembahasan Kebijakan Anggaran		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD				4	02	03	2	02	01
									Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan								4	02	03	2	02	02
									Pembahasan APBD								4	02	03	2	02	03
									Pembahasan APBD Perubahan								4	02	03	2	02	04
									Pembahasan Laporan Semester								4	02	03	2	02	05
									Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban APBD								4	02	03	2	02	06
									Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Peningkatan Kapasitas DPRD		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD				4	02	03	2	04	04

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	01	04	15	10			Rapat-rapat Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rapat pelaksanaan pengawasan dan dokumen pengawasan yang dihasilkan	Pengawasan tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD				4	02	03	2	03	06
									Pengawasan Penggunaan Anggaran								4	02	03	2	03	07
									Kunjungan Kerja Dalam Daerah		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD				4	02	03	2	05	01
									Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD				4	02	03	2	08	01
4	01	04	15	11			Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi yang dibangun dan dipelihara	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Peningkatan Kapasitas DPRD		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD				4	02	03	2	04	03
									Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD				4	02	03	2	04	06
									Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi		Pembahasan Kerjasama Daerah		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD				4	02	03	2	07	02
4	01	04	36				Program Jaminan Pelaksanaan Kesehatan publik															
4	01	04	36	01			Pemberian Jaminan Kesehatan	Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan medical check up	Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan medical check up	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Program Layanan Dan Adminsitrasi Keuangan				4	02	02	2	02	03

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)
Jl. P. Irian No.12 Kel. Kampung Satu-Skip, Kec. Tarakan Tengah, Telp : (0551) 33910
TARAKAN - 77122

BERITA ACARA
VERIFIKASI PEMETAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
SESUAI NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

Pada hari ini, Senin tanggal 8 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di ruang rapat kantor Bappeda Kota Tarakan telah dilaksanakan verifikasi pemetaan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Tarakan Tahun 2021 sesuai nomenklatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Setelah dilakukan diskusi dan penelaahan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan maka disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan dalam Renja yang relevan dengan sub kegiatan/kegiatan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berjumlah 38 kegiatan
2. Jumlah kegiatan yang diusulkan menjadi sub kegiatan baru berjumlah 3 kegiatan
3. Rincian kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk menjadi bahan masukan dalam rangka penyampaian usulan pemutakhiran nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah kepada Kementerian/Lembaga terkait.

Kepala BPKAD,

Kustriansyah, SE.
Pembina Tk. I
NIP. 19640328 198503 1 011

Tim Pembahas

1. Amirullah, S.E. .....
2. Agus Susilo Rahayu, S.E. .....
3. Basriadi, S.STP. .....
4. Edy Sukwansyah, S.E .....
5. Ratna Kumalasari, ST. .....
6. Ririn Wahyu A., SE., M.Ak. .....

Kepala Bappeda Kota Tarakan

PEMERINTAH KOTA TARAKAN BAPPEDA

H. Suprian, ST, MT
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 196402121998031004

Scanned by TapScan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

Tabel
Program Kegiatan Pemetaan Permendagri No 90
BPKAD KOTA TARAKAN

NO	Kode	Urusan	Bidang Urusan	Program dan Kegiatan Permendagri 13	Indikator Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Program Permendagri 90	Indikator Program (*outcome*)	Kegiatan Permendagri 90	Indikator Kegiatan (*output*)	Sub Kegiatan Permendagri 90		Indikator Sub Kegiatan (*output*)	Bidang Urusan	Urusan	Kode				
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya Administrasi Umum				Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
1		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia danjumlah paket pegiriman					1	Penyedian materai, jasa pengiriman	Jumlah materai	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
2		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi, astinet, sumber daya air dan listrik					2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi, astinet, sumber daya air dan listrik	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
3		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia					3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
4		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasioanal yang pajak kendaraannya terbayarkan					4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasioanal yang pajak kendaraannya terbayarkan	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan					5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
6		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Cakupan waktu pembayaran jasa kebersihan dan jasa pengangkut sampah					6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Cakupan waktu pembayaran jasa kebersihan dan jasa pengangkut sampah	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
7		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan					7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
8		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan					8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
9		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Penyediaan kompenen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan yang tersedia					9	Penyediaan kompenen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan yang tersedia	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
10		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan					10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
11		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah makanan dan minuman yang di sediakan					11	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah makanan dan minuman yang di sediakan	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
12		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsltasi ke Luar dan dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsltasi ke Luar dan dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
13		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Pendukung penyelenggaraan administrasi / pemerintah	Jumlah tenaga pendukung penyelenggara administrasi pemerintah					13	Pendukung penyelenggaraan administrasi / pemerintah	Jumlah tenaga pendukung penyelenggara administrasi pemerintah	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur														
14		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara					1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
15		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperbaiki					2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperbaiki	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
16		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara					3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					

NO	Kode	Urusan	Bidang Urusan	Program dan Kegiatan Permendagri 13	Indikator Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Program Permendagri 90	Indikator Program (*outcome*)	Kegiatan Permendagri 90	Indikator Kegiatan (*output*)	Sub Kegiatan Permendagri 90		Indikator Sub Kegiatan (*output*)	Bidang Urusan	Urusan	Kode				
17		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Pemeliharaan rutin/berkala aset pemerintah	Jumlah aset pemerintah yang terpelihara					4	Pemeliharaan rutin/berkala aset pemerintah	Jumlah aset pemerintah yang terpelihara	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
18		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab					5	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang disiplin														
19		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya					1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat dan bimtek														
20		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal					1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dn keuangan	Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dn keuangan	Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu												
21		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Pemyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja			Administrasi Keuangan	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan	1	Pemyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
22		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun					2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase pengelolaan perencanaan keuangan daerah sesuai SAP	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase terlaksananya pengelolaan keuangan daerah	Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah										
23		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Jumlah dokumen rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD			Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah dokumen rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	1	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah dokumen rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
24		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah dokumen rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD			Penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah dokumen rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	2	Penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah dokumen rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
25		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen rancangan perda tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen rancangan perda tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen rancangan perda tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
								Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen rancangan perda tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi	Jumlah dokumen rancangan perda tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
								Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen rancangan perda tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rancangan perda tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
								Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen rancangan perda tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD	6	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah dokumen rancangan perda tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
26		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Verifikasi penilaian dan pengadaan belanja modal SKPD	Jumlah SKPD yang diverifikasi			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang diverifikasi	7	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah SKPD yang diverifikasi	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

NO	Kode	Urusan	Bidang Urusan	Program dan Kegiatan Permendagri 13	Indikator Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Program Permendagri 90	Indikator Program (*outcome*)	Kegiatan Permendagri 90	Indikator Kegiatan (*output*)	Sub Kegiatan Permendagri 90		Indikator Sub Kegiatan (*output*)	Bidang Urusan	Urusan	Kode				
27		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Penataan pertanggung-jawaban keuangan SKPD	Jumlah SKPD yang pertanggung-jawabannya keuangannya telah ditata			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah SKPD yang pertanggung-jawabannya keuangannya telah ditata	8	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah SKPD yang pertanggung-jawabannya keuangannya telah ditata	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
								Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah SKPD yang pertanggung-jawabannya keuangannya telah ditata	9	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah SKPD yang pertanggung-jawabannya keuangannya telah ditata	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
								Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah SKPD yang pertanggung-jawabannya keuangannya telah ditata	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah SKPD yang pertanggung-jawabannya keuangannya telah ditata	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
								Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah SKPD yang pertanggung-jawabannya keuangannya telah ditata	11	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah SKPD yang pertanggung-jawabannya keuangannya telah ditata	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
								Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah SKPD yang pertanggung-jawabannya keuangannya telah ditata	12	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah SKPD yang pertanggung-jawabannya keuangannya telah ditata	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
28		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Monitoring dan sosialisasi perhitungan dana perimbangan	jumlah data perhitungan dana perimbangan			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	jumlah data perhitungan dana perimbangan	13	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	jumlah data perhitungan dana perimbangan	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
								Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah SP2D yang diterbitkan	14	Pemprosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	Jumlah SP2D yang diterbitkan	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
								Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen SPP dan SPM	15	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	Jumlah dokumen SPP dan SPM	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
								Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen laporan realisasi keuangan daerah	16	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah dokumen laporan realisasi keuangan daerah	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
								Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah koordinasi pelaksanaan piutang dan utang	17	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan	Jumlah koordinasi pelaksanaan piutang dan utang	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
								Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	jumlah kali pertemuaan rekon dengan SKPD	18	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	jumlah kali pertemuaan rekon dengan SKPD	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
								Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen petunjuk teknis administrasi keuangan	19	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	Jumlah dokumen petunjuk teknis administrasi keuangan	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
								Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah SPD yang diterbitkan	20	Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah SPD yang diterbitkan	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
								Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan daerah	21	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah laporan keuangan daerah	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
29		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Pendampingan penyusunan LKPD	Persentase kemandirian SKPD dalam menyelesaikan laporan keuangan SKPD, sinkronisasi data keuangan SKPD			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	22	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase kemandirian SKPD dalam menyelesaikan laporan keuangan SKPD, sinkronisasi data keuangan SKPD	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					

NO	Kode	Urusan	Bidang Urusan	Program dan Kegiatan Permendagri 13	Indikator Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Program Permendagri 90	Indikator Program (*outcome*)	Kegiatan Permendagri 90	Indikator Kegiatan (*output*)	Sub Kegiatan Permendagri 90		Indikator Sub Kegiatan (*output*)	Bidang Urusan	Urusan	Kode				
								Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan	23	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan	Persentase kemandirian SKPD dalam menyelesaikan laporan keuangan SKPD, sinkronisasi data keuangan SKPD							
								Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	24	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase kemandirian SKPD dalam menyelesaikan laporan keuangan SKPD, sinkronisasi data keuangan SKPD							
								Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	25	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase kemandirian SKPD dalam menyelesaikan laporan keuangan SKPD, sinkronisasi data keuangan SKPD							
								Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	26	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase kemandirian SKPD dalam menyelesaikan laporan keuangan SKPD, sinkronisasi data keuangan SKPD							
								Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial	27	Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial	Persentase kemandirian SKPD dalam menyelesaikan laporan keuangan SKPD, sinkronisasi data keuangan SKPD							
								Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	28	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase kemandirian SKPD dalam menyelesaikan laporan keuangan SKPD, sinkronisasi data keuangan SKPD							
								Kegiatan Penunjang Urusan	Pelaksanaan Pinjaman Pada Pemerintah Daerah	29	Pelaksanaan Pinjaman Pada Pemerintah Daerah	Persentase kemandirian SKPD dalam menyelesaikan laporan keuangan SKPD, sinkronisasi data keuangan SKPD							
								Kegiatan Penunjang Urusan	Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan, Alokasi dan Pemberian Subsidi	30	Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan, Alokasi dan Pemberian Subsidi	Persentase kemandirian SKPD dalam menyelesaikan laporan keuangan SKPD, sinkronisasi data keuangan SKPD							
								Kegiatan Penunjang Urusan	Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	31	Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	Persentase kemandirian SKPD dalam menyelesaikan laporan keuangan SKPD, sinkronisasi data keuangan SKPD							
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Program pengembangan perencanaan dan anggaran	Persentase konsistensi perencanaan dan penganggaran (pagu anggaran)	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase konsistensi perencanaan dan penganggaran (pagu anggaran)			32				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
30		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Penyusunan perubahan APBD Kota Tarakan	Jumlah dokumen perubahan APBD			Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah dokumen/buku Perda	33	Penyusunan peraturan kepala daerah tentang teknis penyusunan anggaran SKPD	Jumlah dokumen/buku Perda	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
								Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah dokumen/buku Perda	34	penyusunan regulasi bidang anggaran	Jumlah dokumen/buku Perda	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
31		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Fasilitasi penyusunan rancangan kerja anggaran (RKA) dan (DPA) SKPD	Persentase SKPD yang mengikuti fasilitasi penyusunan RKA dan DPA			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase SKPD yang mengikuti fasilitasi penyusunan RKA dan DPA	35	Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase SKPD yang mengikuti fasilitasi penyusunan RKA dan DPA	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
								Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase SKPD yang mengikuti fasilitasi penyusunan RKA dan DPA	36	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase SKPD yang mengikuti fasilitasi penyusunan RKA dan DPA	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
								Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase SKPD yang mengikuti fasilitasi penyusunan RKA dan DPA	37	Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	Persentase SKPD yang mengikuti fasilitasi penyusunan RKA dan DPA	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

NO	Kode	Urusan	Bidang Urusan	Program dan Kegiatan Permendagri 13	Indikator Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Program Permendagri 90	Indikator Program (*outcome*)	Kegiatan Permendagri 90	Indikator Kegiatan (*output*)	Sub Kegiatan Permendagri 90		Indikator Sub Kegiatan (*output*)	Bidang Urusan	Urusan	Kode				
								Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase SKPD yang mengikuti fasilitasi penyusunan RKA dan DPA	38	Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	Persentase SKPD yang mengikuti fasilitasi penyusunan RKA dan DPA							
32		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Penyusunan APBD Kota Tarakan	Jumlah dokumen/buku Perda			Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah dokumen/buku Perda	39	Penyusunan peraturan kepala daerah tentang teknis penyusunan anggaran SKPD	Jumlah dokumen/buku Perda	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
								Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah dokumen/buku Perda	40	penyusunan regulasi bidang anggaran	Jumlah dokumen/buku Perda	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Program peningkatan akuntabilitas pengelolaan aset daerah	Persentase pengelolaan aset daerah yang akuntabel	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase terlaksananya pengelolaan aset daerah yang akuntabel	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase terlaksananya pengelolaan barang milik daerah yang dapat direvaluasi / appraisal										
33		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah	Jumlah barang daerah yang dapat direvaluasi / appraisal					1	Koordinasi hasil penilaian barang milik daerah	Jumlah barang daerah yang dapat direvaluasi / appraisal	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
34		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Inventarisasi dan monitoring barang/aset daerah	Jumlah barang inventarisasi dan monitoring barang/aset daerah					2	Inventarisasi barang milik daerah	Jumlah barang inventarisasi dan monitoring barang/aset daerah	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
35		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Penghapusan barang/aset daerah	Jumlah barang yang diusulkan dalam penghapusan barang/aset milik daerah					3	Koordinasi pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah	Jumlah barang inventarisasi dan monitoring barang/aset daerah	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
36		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Penyusunan buku standarisasi harga barang/jasa	Jumlah buku standarisasi harga barang/jasa					4	koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah barang yang diusulkan dalam penghapusan barang/aset milik daerah	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
										5	Koordinasi dan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang	Jumlah buku standarisasi harga barang/jasa	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
37		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Penyusunan RKBMD	Jumlah buku RKBU/RTBU dan RKPBU					6	Koordinasi dan penyusunan standar kebutuhan barang milik daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan penyusunan standar kebutuhan barang milik daerah	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
										7	Koordinasi dan penyusunan rencana kebutuhan barang malik daerah	Jumlah buku RKBU/RTBU dan RKPBU	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
38		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Pengendalian. Pemanfaatan dan pengamanan aset	Jumlah pengendalian pemanfaatan dan pengamanan aset					8	Koordinasi dan penyusunan rencana pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah	Jumlah buku RKBU/RTBU dan RKPBU	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
										9	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Jumlah pengendalian pemanfaatan dan pengamanan aset	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
										10	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah pengendalian pemanfaatan dan pengamanan aset	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
										11	Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD	Jumlah pengendalian pemanfaatan dan pengamanan aset	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
										12	Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah pengendalian pemanfaatan dan pengamanan aset	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
										13	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					

NO	Kode	Urusan	Bidang Urusan	Program dan Kegiatan Permendagri 13	Indikator Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Program Permendagri 90	Indikator Program (*outcome*)	Kegiatan Permendagri 90	Indikator Kegiatan (*output*)	Sub Kegiatan Permendagri 90		Indikator Sub Kegiatan (*output*)	Bidang Urusan	Urusan	Kode				
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN					Sosialisasi Paket Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah (tidak ada)	Jumlah paket regulasi yang telah tersosialisasikan	1	Sosialisasi Paket Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah paket regulasi yang telah tersosialisasikan	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN					Pengelolaan Ketatausahaan Penggajian (permendagri 13)	Jumlah dokumen ketatausahaan penggajian	2	Pengelolaan Ketatausahaan Penggajian	Jumlah dokumen ketatausahaan penggajian	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN					Penyusunan kode rekening program kegiatan dan belanja	Jumlah buku kode rekening program/kegiatan	3	Penyusunan kode rekening program kegiatan dan belanja	Jumlah buku kode rekening program/kegiatan	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)
Jl. P. Irian No.12 Kel. Kampung Satu-Skip, Kec. Tarakan Tengah,
Telp : (0551) 33910
TARAKAN - 77122

BERITA ACARA
VERIFIKASI PEMETAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
SESUAI NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

Pada hari ini, Senin tanggal 8 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di ruang rapat kantor Bappeda Kota Tarakan telah dilaksanakan verifikasi pemetaan Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) tahun 2021 sesuai nomenklatur dalam Permendagri Nomo 90 Tahun 2019.

Setelah dilakukan diskusi dan penelaahan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan maka disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan dalam Renja yang relevan dengan sub kegiatan/kegiatan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berjumlah 31 kegiatan
2. Jumlah kegiatan yang diusulkan menjadi sub kegiatan baru berjumlah ...-... kegiatan
3. Rincian kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk menjadi bahan masukan dalam rangka penyampaian usulan pemutakhiran nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah kepada Kementerian/Lembaga terkait.

Kepala BPPRD

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

BOB SYAHRUDDIN,SE.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196803141993031009

Tim Pembahas

1. Surya Bakti, SE .....
2. Martati, SE.M.Si .....
3. Agus Rahmansyah, SE .....
4. Lisa Susianti, SE .....
5. Ratna Kumalasasri, ST .....
6. Ririn Wahyu Ambarsari,SE.M.AK .....

Kepala Bappeda Kota Tarakan

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
BAPPEDA

H. Suparlan, ST, MT
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 196402121998031004

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

TABEL KERJA
PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
BPPRD KOTA TARAKAN

NO	PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
	KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penerimaan PAD dari sektor Retribusi Daerah,Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Penyusunan dan Evaluasi kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pencapaian target pajak daerah	Pekan Panutan Pajak Daerah	Meningkatnya jumlah Wajib Pajak yang taat membayar Pajak	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
2					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penerimaan PAD dari sektor Retribusi Daerah,Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang Berbasis teknologi Informasi	Peraturan Kepala Daerah untuk Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masa Pajak 1995 s/d 2012	Penghapusan Piutang Pajak daerah (Pajak PBB)	Perumusan Peraturan Kepala Daerah untuk Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masa Pajak 1995 s/d 2012	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
3					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penerimaan PAD dari sektor Retribusi Daerah,Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Data Tunggakan PBB tahun 1995 s/d 2012	Verifikasi Piutang Pajak Daerah	Penyajian Data Tunggakan PBB tahun 1995 s/d 2012	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
4					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penerimaan PAD dari sektor Retribusi Daerah,Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Pencapaian target pajak daerah	Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang diperiksa	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penerimaan PAD dari sektor Retribusi Daerah,Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	Pencapaian Target Nilai BPHTB	Peninjauan dan Validasi BPHTB	Meminimalisir ketidakwajaran nilai transaksi BPHTB	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
6					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penerimaan PAD dari sektor Retribusi Daerah,Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Pencapaian target pajak daerah	Penagihan Tunggakan Pajak Daerah /Teguran Wajib Pajak/wajib retribusi	Persentase piutang pajak yang dapat ditagih	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
7					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penerimaan PAD dari sektor Retribusi Daerah,Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Pencapaian target pajak daerah	Operasi Sisir	Berkurangnya jumlah tunggakan Pajak Daerah tahun berjalan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					

NO	PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019									
	KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE	
8					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penerimaan PAD dari sektor Retribusi Daerah,Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Pencapaian target pajak daerah	Pengawasan Wajib Pajak	Jumlah wajib pajak yang diawasi	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
9					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penerimaan PAD dari sektor Retribusi Daerah,Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Pengendalian Pendapatan Daerah	Verifikasi Lapangan Permohonan Pembetulan, Keberatan, Pembatalan dan Pengurangan Pajak Daerah	Jumlah Pemohon yang diverifikasi	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
10					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan peningkatan WP terhadap target	Penyusunan Kebiijakan Tentang Intensifikasi Pajak Dearah dan Retribusi Daerah	Jumlah Penerimaan Pajak	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Dearah	Jumlah capaian target Pendapatan Asli Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
11					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan penimngkatan WP terhadap target	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifiikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peraturan Kepala Daerah untuk Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masa Pajak 1995 s/d 2012	Injtensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	Perumusan Peraturan Kepala Daerah untuk Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masa Pajak 1995 s/d 2012	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
12					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan peningkatan WP terhadap target	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase peningkatan Pajak Daerah	Penyuluhan Wajib Pajak Daerah	Meningkatnya kesadaran bagi WP tentang Pajak Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
13					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan peningkatan WP terhadap target	Penyebarluasa Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masyarakat	Persentase peningkatan Pajak Daerah	Penyampaian SPPT PBB	Jumlah SPPT PBB yang diterima oleh Wajib Pajak	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
14					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan peningkatan WP terhadap target	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase peningkatan Pajak Daerah	Pendataan Wajib Pajak/Wajib Retribusi /SPOP	Jumlah Wajib Pajak/Wajib Retribusi/SPOP	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
15					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan peningkatan WP terhadap target	Perencanaan,Pengembangan,Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan Pajak Daerah	Intensifikasi penyampaian SPTPD/SPPT dan SKRD	Jumlah SPTP/SPPT dan SKRD yang diterima oleh Wajib Pajak	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
16					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan peningkatan WP terhadap target	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase peningkatan Pajak Daerah	Peningkatan Sistem Kinerja Aplikasi Pemungutan Pajak Daerah	Jumlah aplikasi Pengolah Pajak Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
17					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan peningkatan WP terhadap target	Perencanaan,Pengembangan,Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan Pajak Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana PBB	Jumlah SPTP/SPPT dan SKRD yang diterima oleh Wajib Pajak	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

NO	PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
	KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
18					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan peningkatan WP terhadap target	Pemliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase peningkatan Pajak Daerah	Pemutakhiran Massal PBB	Jumlah Wajib Pajak PBB yang dimutakhirkan datanya	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
19					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	KEUANGAN	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan peningkatan WP terhadap target	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase peningkatan Pajak Daerah	Rapat Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Daerah	Jumlah Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak	Keuangan	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)
Jl. P. Irian No.12 Kel. Kampung Satu-Skip, Kec. Tarakan Tengah, Telp : (0551) 33910
TARAKAN - 77122

BERITA ACARA
VERIFIKASI PEMETAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 SESUAI NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

Pada hari ini, Senin tanggal 8 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di ruang rapat kantor Bappeda Kota Tarakan telah dilaksanakan verifikasi pemetaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2021 sesuai nomenklatur dalam Permendagri Nomo 90 Tahun 2019.

Setelah dilakukan diskusi dan penelaahan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan maka disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan dalam Renja yang relevan dengan sub kegiatan/kegiatan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berjumlah 10 (Sepuluh) kegiatan
2. Jumlah kegiatan yang diusulkan menjadi sub kegiatan baru berjumlah - kegiatan
3. Rincian kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk menjadi bahan masukan dalam rangka penyampaian usulan pemutakhiran nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah kepada Kementerian/Lembaga terkait.

Kepala DPMPTSP,

Drs. Ardiansyah
Pembina Tk. I
NIP. 196707151086091001

Tim Pembahas

1. Arbain, S.Hut .....
2. Iwan Abdullah, S.E.,M.HP .....
3. Mariyati, S.E .....
4. Selawati, S.E .....
5. Ratna Kumalasari, ST .....
6. Ririn Wahyu Ambarsari,S.E.,M.AK .....

Kepala Bappeda Kota Tarakan

H. Suparlan, ST, MT
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 196402121998031004

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

TABEL KERJA
PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
DPMPTSP KOTA TARAKAN

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu													
						Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	umlah laporan keuangan SKPD yang benar & akuntabel	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD yang benar & akuntabel	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran	Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
						Penetapan Kinerja	Jumlah dokumen Perencanaan dan keuangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yng mengikuti Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan PD	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran	Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran													
						Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan perangko dan materai	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan perangko dan materai	Administrasi Umum	Persentase Administrasi umum yang dilaksanakan tepat waktu	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran	Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
						Penyediaan jasa komunikasai, sumber daya air dan listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, internet dan TV kabel	Penyediaan jasa komunikasai, sumber daya air dan listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, internet dan TV kabel	Administrasi Umum	Persentase Administrasi umum yang dilaksanakan tepat waktu	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran	Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
						Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Cakupan jasa sewa mesin foto copy dan sewa bandwith	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan jasa sewa mesin foto copy dan sewa bandwith	Administrasi Umum	Persentase Administrasi umum yang dilaksanakan tepat waktu	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran	Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
						Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaran dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional/ STNK dan pajak kendaraannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan operasional/ STNK dan pajak kendaraannya	Administrasi Umum	Persentase Administrasi umum yang dilaksanakan tepat waktu	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran	Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
						Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan	Administrasi Umum	Persentase Administrasi umum yang dilaksanakan tepat waktu	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran	Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
						Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan Kantor yg tersedia	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan Kantor yg tersedia	Administrasi Umum	Persentase Administrasi umum yang dilaksanakan tepat waktu	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran	Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
						Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yg tersdia	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yg tersdia	Administrasi Umum	Persentase Administrasi umum yang dilaksanakan tepat waktu	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran	Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan untuk keperluan kantor	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan untuk keperluan kantor	Administrasi Umum	Persentase Administrasi umum yang dilaksanakan tepat waktu	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran	Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Penyediaan Komponen instalasi listrik	Jumlah Komponen instalasi listrik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik	Administrasi Umum	Persentase Administrasi umum yang dilaksanakan tepat waktu	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran	Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
						Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/surat kabar harian	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/surat kabar harian	Administrasi Umum	Persentase Administrasi umum yang dilaksanakan tepat waktu	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran	Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
						Penyediaan makanan dan minuman	jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat/tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat/tamu	Administrasi Umum	Persentase Administrasi umum yang dilaksanakan tepat waktu	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran	Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
						Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	jumlah pegawai yang menghadiri rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah pegawai yang menghadiri rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	Administrasi Umum	Persentase Administrasi umum yang dilaksanakan tepat waktu	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran	Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
						Pendukung penyelenggaran administrasi pemerintahan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan	Pendukung penyelenggaran administrasi pemerintahan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan	Administrasi Umum	Persentase Administrasi umum yang dilaksanakan tepat waktu	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran	Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur													
						Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas Operasioana	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas Operasioana	Administrasi Umum	Persentase Administrasi umu yang dilaksanakan tepat waktu	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran	Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
						Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan lemari, meja dan kursi	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan lemari, meja dan kursi	Administrasi Umum	Persentase Administrasi umu yang dilaksanakan tepat waktu	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran	Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
						Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah penyediaan fasilitas perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah penyediaan fasilitas perlengkapan gedung kantor	Administrasi Umum	Persentase Administrasi umu yang dilaksanakan tepat waktu	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran	Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
						Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Persentase Administrasi umu yang dilaksanakan tepat waktu	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran	Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
						Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan lemari, meja dan kursi	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan lemari, meja dan kursi	Administrasi Umum	Persentase Administrasi umu yang dilaksanakan tepat waktu	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran	Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
						Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Persentase Administrasi umu yang dilaksanakan tepat waktu	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran	Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (BBM, oli, service dan suku cadang)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Administrasi Umum	Persentase Administrasi umu yang dilaksanakan tepat waktu	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran	Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis pemeliharaan komputer/ Note book/Laptop/printer/AC	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Persentase Administrasi umu yang dilaksanakan tepat waktu	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran	Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
						Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah pemeliharaan peralatan Mebeleur	Administrasi Umum	Persentase Administrasi umu yang dilaksanakan tepat waktu	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran	Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
						Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Persentase Administrasi umu yang dilaksanakan tepat waktu	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran	Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
						Rehabilitas sedang/berat rumah gedung kantor	jumlah rehab gedung kantor yang representatatif	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	jumlah rehab gedung kantor yang representatatif	Administrasi Umum	Persentase Administrasi umu yang dilaksanakan tepat waktu	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran	Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
						Program peningkatan disiplin Aparatur	Persentase Disiplin ASN													
						-	-	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran	Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
						Pengadaan Pakaian dinas beserta pelengkapan nya	jumlah pengadaan PSL,PDH, Pakaian khusu batik	Pengadaan Pakaian dinas beserta pelengkapannya	jumlah pengadaan PSL,PDH	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran	Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
						Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah SDM aparatur yang mendapatkan diklat/Bimtek/Magang (Keuangan,pengelola barang/PPBJ, Kepegawaian,Bidang Penanaman Modal, dan Bid Perizinan	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur yang terlatih/ mendapatkan diklat/Bimtek/Magang	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran	Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 1. Keg. Penyederhaan Prosedur Perizinandan peningkatan Pelayanan PM. 2. Keg. Memfasilitasi dan Koordinasi kerjasama di bid. Investasi	Persentase Realisasi investasi	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah fasilitas/insentif yang diberikan kepada pelaku usaha	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Failitas/Insentif yang menjadi kewenangan ~~PTSP~~ daerah-Kab/Kota	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase ~~Cakupan~~ promosi dan kerjasama investasi yang terbangun	Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	18	02	2.01	01
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. 1. Keg.Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase Realisasi investasi	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen evaluasi pemberian fasilitas/insentif yang diberikan kepada pelaku usaha	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Failitas/Insentif yang menjadi kewenangan ~~PTSP~~ daerah-Kab/Kota	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase ~~Cakupan~~ promosi dan kerjasama investasi yang terbangun	Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	18	02	2.01	02
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	1)Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.	Persentase Realisasi investasi	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman modal daerah	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peta investasi yang tersedia	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase ~~Cakupan~~ promosi dan kerjasama investasi yang terbangun	Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	18	02	2.02	01

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	1)Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.	Persentase Realisasi investasi	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan konsultasi ke Kab/Kota terkait penyediaan peta investasi	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peta investasi yang tersedia	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan promosi dan kerjasama investasi yang terbangun	Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	18	02	2.02	02
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	1)Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi.	persentase pelaku usaha yang melakukan kerjasama investasi	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah pameran promosi dan kerjasama dalam rangka pengembangan investasi daerah didalam provinsi maupun di luar provinsi dan luar negeri	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pameran promosi dan kerjasama dalam rangka pengembangan investasi daerah didalam provinsi maupun di luar provinsi dan luar negeri	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase ~~Cakupan~~ promosi dan kerjasama investasi yang terbangun	Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	18	03	2.01	01
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	persentase pelaku usaha yang melakukan kerjasama investasi	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pameran promosi dan kerjasama dalam rangka pengembangan investasi daerah didalam maupun di luar kota	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pameran promosi dan kerjasama dalam rangka pengembangan investasi daerah didalam maupun di luar kota	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase ~~Cakupan~~ promosi dan kerjasama investasi yang terbangun	Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	18	03	2.01	02
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana perizinan	Persentase Penerbitan/Penolakan /penangguhan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SP- SOP	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang terlatih	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non perizinan yang terlayani	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase ~~Cakupan~~ penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan	Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	18	04	2.01	01
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	1) Program peningkatan pelayanan dan administrasi perizinan.	Persentase Penerbitan/Penolakan /penangguhan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SP- SOP	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal sesuai pertek	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non perizinan yang terlayani	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase ~~Cakupan~~ penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan	Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	18	04	2.01	02
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	1)Program Peningkatan pelayanan umum dan administrasi terhadap masyarakat,	Persentase Penerbitan/Penolakan /penangguhan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SP- SOP	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah partisipasi responden dalam ~~meningkatkan~~ penyusunan indeks kepuasan masyarakat Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non perizinan yang terlayani	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase ~~Cakupan~~ penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan	Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	18	04	2.01	03
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Persentase Penerbitan/ Penolakan /penangguhan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SP- SOP	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non perizinan yang terlayani	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase ~~Cakupan~~ penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan	Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	18	04	2.01	04
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	1) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi.	persentase pelaku usaha yang melakukan kerjasama investasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	~~Jumlah perusahaan yang dipantau, dibina dan diawasi~~ Jumlah ASN yang melaksanakan Pemantauan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dengan kab/kota terkait pengolahan data Investasi PMDN/PMA	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase ~~Cakupan~~ peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	18	05	2.01	01

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	1) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi.	persentase pelaku usaha yang melakukan kerjasama investasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dipantau, dibina dan diawasi	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dengan kab/kota terkait pengolahan data Investasi PMDN/PMA	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase ~~Cakupan~~ peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	18	05	2.01	02
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	persentase pelaku usaha yang melakukan kerjasama investasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dipantau, dibina dan diawasi	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dengan kab/kota terkait pengolahan data Investasi PMDN/PMA	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase ~~Cakupan~~ peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	18	05	2.01	03
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	1) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.	Persentase Pengembangan Informasi	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Investasi PMDAN/PMA Perizinan dan Nonperizinan	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data Investasi PMDN/PMA yang terintegrasi dengan PTSP Kab/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ~~Cakupan~~ data perizinan dan non perizinan penanaman modal	Penanaman Modal	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	18	06	2.01	01

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)
Jl. P. Irian No.12 Kel. Kampung Satu-Skip, Kec. Tarakan Tengah, Telp : (0551) 33910
TARAKAN - 77122

BERITA ACARA
VERIFIKASI PEMETAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 SESUAI NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

Pada hari ini, Senin tanggal 8 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di ruang rapat kantor Bappeda Kota Tarakan telah dilaksanakan verifikasi pemetaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tarakan Tahun 2021 sesuai nomenklatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Setelah dilakukan diskusi dan penelaahan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan maka disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan dalam Renja yang relevan dengan sub kegiatan/kegiatan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berjumlah 86 kegiatan
2. Jumlah kegiatan yang diusulkan menjadi sub kegiatan baru berjumlah 5 kegiatan
3. Rincian kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk menjadi bahan masukan dalam rangka penyampaian usulan pemutakhiran nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah kepada Kementerian/Lembaga terkait.

Kepala Disdagkop dan UKM

Untung Prayitno, SE
Pembina
NIP . 196411191993031003

Tim Pembahas

1. Kabid Ekolitbang .....
2. Kasubid Pertanian Dan Dunia Usaha. .....
3. Sekretaris Disdagkop .....
4. Kabid Koperasi dan UKM .....
5. Kabid Perlindungan Konsumen . .....

Kepala Bappeda Kota Tarakan

H. Suparlan, ST, MT
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 196402121998031004

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

Tabel
Program Kegiatan Pemetaan Permendagri No 90
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM

Program dan Kegiatan Permendagri 13	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program Permendagri 90	Indikator Program (outcome)	Kegiatan Permendagri 90	Indikator Kegiatan (output)	Sub Kegiatan Permendagri 90	Indikator Sub Kegiatan (output)	Bidang Urusan	Urusan	Kode					Ket.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase Pemenuhan layanan administrasi perkantoran**														
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah dokumen bermaterai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan waktu Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah aparatur yang memperoleh jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah aparatur yang memperoleh jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Waktu penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas /operasional yg disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajak kendaraan dibayarkan	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan Administrasi Keuangan	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Penyediaan makanan dan minuman	Waktu penyediaan makanan dan minuman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Pendukung Penyelenggara administrasi Pemerintahan	Jumlah tenaga pendukung teknis administrasi Pemerintah-an	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13						di permendagri 13 : dst
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**														
Pembangunan rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dibangun	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13						
Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dibangun	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13						
Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13						
Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasonal yang diadakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasonal yang diadakan	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Pengadaan mebeleur	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Pengadaan Mebeleur	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						

Program dan Kegiatan Permendagri 13	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program Permendagri 90	Indikator Program (outcome)	Kegiatan Permendagri 90	Indikator Kegiatan (output)	Sub Kegiatan Permendagri 90	Indikator Sub Kegiatan (output)	Bidang Urusan	Urusan	Kode					Ket.
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara rutin/berkala	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara rutin/berkala	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah dan jenis mebeleur yang dipelihara rutin/berkala	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah dan jenis mebeleur yang dipelihara rutin/berkala	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah atau luasan gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah atau luasan gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang direhabilitasi sedang/berat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang direhabilitasi sedang/berat	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Persentase ASN yang disiplin**														
Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	prosentase ASN yang disiplin, telah mengikuti diklat dan bimtek	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan-nya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan-nya yang diadakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	prosentase ASN yang disiplin, telah mengikuti diklat dan bimtek	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan-nya yang diadakan	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	prosentase ASN yang disiplin, telah mengikuti diklat dan bimtek	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pakaian korpri yang diadakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	prosentase ASN yang disiplin, telah mengikuti diklat dan bimtek	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian korpri yang diadakan	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	prosentase ASN yang disiplin, telah mengikuti diklat dan bimtek	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat dan Bimtek**														
Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	prosentase ASN yang disiplin, telah mengikuti diklat dan bimtek	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	prosentase ASN yang disiplin, telah mengikuti diklat dan bimtek	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	prosentase ASN yang disiplin, telah mengikuti diklat dan bimtek	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu**														
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Keuangan	prosentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	**Jumlah Negara Tujuan Ekspor**														
Penyiapan data base kuota setiap jenis barang dan jasa	jumlah data base kuota perdagangan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor	Penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yh terdapat pada 1 daerah kab / kota	Jumlah promosi dan misi dagang	Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kab/kota	Jumlah produk unggulan	BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Penyebarluasan informasi database kuota setiap jenis barang dan jasa	jumlah kegiatan penyebarluasan informasi DBP	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor	Penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yh terdapat pada 1 daerah kab / kota	Jumlah promosi dan misi dagang	Pembinaan pelaku usaha ekspor	Jml pelaku usaha yg dibina	BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Penyusunan tim daerah dalam perundingan perdagangan internasional	Jumlah perundingan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor	Penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yh terdapat pada 1 daerah kab / kota	Jumlah promosi dan misi dagang	Peningkatan citra produk ekspor	Jumlah produk yg dipromosikan / dipamerkan	BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Fasilitasi penyelesaian sengketa dagang	jumlah Sengketa terfasilitas	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor	Penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yh terdapat pada 1 daerah kab / kota	Jumlah promosi dan misi dagang	Pembinaan pelaku usaha ekspor	Jml pelaku usaha yg dibina	BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan internasional	Jumlah Data Komoditi pesaing yang terdata	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Nilai Ekspor	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi daerah kabupaten/kota yg telah ditetapkan sebagai instansi penerbit SKA)	Jumlah promosi dan misi dagang	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah SKA yang diterbitkan	BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Program peningkatan dan pengembangan ekspor	**Nilai Ekspor**														
Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri.	Jumlah negara tujuan promosi	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor	Penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yh terdapat pada 1 daerah kab / kota	Jumlah promosi dan misi dagang	Misi dagang bagi produk ekspor unggulan	Jumlah pertemuan misis dagang	BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor.	Jumlah peserta sosialisasi eksport import	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor	Penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yh terdapat pada 1 daerah kab / kota	Jumlah promosi dan misi dagang	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah produk yng dipromosikan / dipamerkan	BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Pembangunan promosi perdagangan internasional	Jumlah pameran perdagangan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor	Penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yh terdapat pada 1 daerah kab / kota	Jumlah promosi dan misis dagang	Pameran dagang internasional	Jumlah pameran internasional yg diikuti	BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Kerjasama dengan lembaga internasional dalam rangka pengembangan produk	Jumlah kerjasama dagang	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor	Penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yh terdapat pada 1 daerah kab / kota	Jumlah promosi dan misis dagang	Misi dagang bagi produk unggulan ekspor	Jumlah pertemuan misi dagang	BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait	Jumlah koordinasi	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor	Penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yh terdapat pada 1 daerah kab / kota	Jumlah promosi dan misis dagang	Misi dagang bagi produk unggulan ekspor	Jumlah pertemuan misi dagang	BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Program Peningkatan Efisiensi Dalam Negeri	**Laju nilai perdagangan**														

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021

Program dan Kegiatan Permendagri 13	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program Permendagri 90	Indikator Program (outcome)	Kegiatan Permendagri 90	Indikator Kegiatan (output)	Sub Kegiatan Permendagri 90	Indikator Sub Kegiatan (output)	Bidang Urusan	Urusan	Kode					Ket.
Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional.	Regulasi tentang perdagangan dan pengembangan usaha dagang	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Kemudahan dan ketepatan waktu pengurusan izin dan pendaftaran perusahaan	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Kemudahan dan ketepatan waktu pengurusan izin dan pendaftaran perusahaan	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat	Jumlah Izin aha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat yang diterbitkan	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan	BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Kemudahan dan ketepatan waktu pengurusan izin dan pendaftaran perusahaan	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Kota	Pemeriksanaan Penyimpanan Bahan berbahaya	Jumlah tempat Penyimpanan Bahan berbahaya	BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Kemudahan dan ketepatan waktu pengurusan izin dan pendaftaran perusahaan	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Kota	Fasilitasi pemenuhan komitmen pemeriksaan distribusi bahan berbahaya Bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah pemeriksaan distribusi bahan berbahaya Bagi P-B2 dan PA-B3	BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Kemudahan dan ketepatan waktu pengurusan izin dan pendaftaran perusahaan	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Kota	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	jumlah Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk.	Jumlah Pasar yang direhab dan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kelancaran pendistribusia barang	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi yg dibagun dan dikelola	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana perdagangan yang dikelola	BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
	Progres pembangunan kawasan pergudangan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kelancaran pendistribusia barang	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi yg dibagun dan dikelola	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitasi	BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Pengembangan pasar lelang daerah.	Memasarkan produk unggulan pada pasar lelang	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Aktifitas penggunaan produk dalam negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah promosi dan pameran penggunaan peroduk dalam negeri	Peningkatan sistem dn jaringan informasi perdagangan	Jumlah sistem dan jaringan informasi perdagangan	BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri.	Jumlah Peserta sollialisasi	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Aktifitas penggunaan produk dalam negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah promosi dan pameran penggunaan peroduk dalam negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan promosi penggunaan produk Kota Taraka	BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Aktifitas penggunaan produk dalam negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah promosi dan pameran penggunaan peroduk dalam negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pameran penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kota Tarakan	BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Fasilitasi kebijakan dalam rangka kenaikan harga sembako.	Bantuan subsidi hari - hari tertentu	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Harga barang terkendali	Menjamin ketersediaan barang kebuthan pokok dan barang penting tingkat kab/ kota	Bapok tersedia	Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Jumlsah rapat rapat / pertemuan	BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Fasilitasi kebijakan distribusi barang.	jumlah Rapat/ pertemuan tim teknis yang terkait	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Harga barang terkendali	Menjamin ketersediaan barang kebuthan pokok dan barang penting tingkat kab/ kota	Bapok tersedia	Koordinasi dan sinkronisasi aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat agen dan pasar rakyat	Jumlsah rapat rapat / pertemuan	BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Operasional UPT Pasar	PAD	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	kelancaran pendistribusian barang	Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah sarana yang dibangun	Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagngan	Jumlah sarana yg dikelola	BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	**Persentase PKL dan pedagang asongan yang dibina**														
Pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah komoditi yang terawasi	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13						
Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan.	Jumlah Organisasi PK5 yg terawasi	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13						
Bantuan peralatan bagi pedagang kaki lima dan asongan.	Jumlah Sarana dan Prasarana bagi PKL	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGNGAN	Aktifitas penggunaan produk dalam negeri	Pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagngan	Jumlah pembinaan pengelolaan sarana distribusi barang	Fasilitasi pengeloaan Sarana distribusi perdagngan	Jumlah fasilitasi sarana	BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan.	Lokasi tempat berjualan bagi PK5 dan asongan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGNGAN	Aktifitas penggunaan produk dalam negeri	Pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagngan	Jumlah pembinaan pengelolaan sarana distribusi barang	Fasilitasi pengeloaan Sarana distribusi perdagngan	Jumlah Fasilitasi sarana	BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	**Prosentase peningkat-an pelaku usaha yang tertib alat ukur**														
Operasionalisasi dan pengembangan UPTD kemetrologian daerah	Jumlah UTTP terawasi	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pemenuhan Persyaratan Pengembangan UPTD Kemetrologian Daerah	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Kelengkapan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah atau Luasan Gedung kantor Pengembangan UPTD Kemetrologian Daerah	BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Monitoring harga sembilan bahan pokok dan stok barang	Jumlah data harga sembako dan stok barang	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pemantauan Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Kenaikan dan Penurunan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat Pasar Kabupaten/Kota yang terpantau	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Data Laporan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen.	Jumlah Rapat dan konsultasi	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Rapat dan Konsultasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Pusat, Pitovinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Agen dan Pasar Rakyat dan Luar Daerah Yang Terpantau	BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pelayanan UTTP Yang Terawasi	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Wilayah Yang Akan dilakukan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Pelaku Usaha Yang dilakukan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Sosialisasi perlindungan konsumen.	Jumlah peserta Sosialisasi, dan Pembentukan kawasan bisnis Juwata, operasi yustisi	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase pelaksanaan Sosialisasi Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Sosialisasi Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Peserta Sosialisasi Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Pengawasan barang dan jasa yang beredar di pasar	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase Peningkatan Pengawasan barang dan jasa yang beredar di pasar	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Rapat Koordinasidan Konsultasi Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang ke luar daerah	BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	**Persentase UMKM produktif**														
Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Jumlah Peraturan tentang UMKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase pelaku usaha yang mendapat peningkatan ketrampilan teknis produksi, manajemen usaha, sosialisasi HAKI dan terfasilitasi penggunaan dana dari pemerintah	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha difasilitasi pelatihan peningkatan ketrampilan teknis produksi dan manajemen usaha	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UKM produktif yang mendapat pelatihan peningkatan ketrampilan teknis dan manajemen usaha	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Jumlah UKM Peserta sosialisasi	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Prosentase UMKM produktif	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah pelaku usaha yang naik kelas	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Pendirian unit penanganan pengaduan	Jumlah unit kotak layanan pengaduan ttg UKM	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13						
Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah Koordinasi, konsultasi pusat, prov daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase pelaku usaha yang mendapat peningkatan ketrampilan teknis produksi, manajemen usaha, sosialisasi HAKI dan terfasilitasi penggunaan dana dari pemerintah	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah aparatur fasilitator UMKM	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah aparatur yang mengikuti rakor dan bimtek UMKM	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						

Program dan Kegiatan Permendagri 13	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program Permendagri 90	Indikator Program (outcome)	Kegiatan Permendagri 90	Indikator Kegiatan (output)	Sub Kegiatan Permendagri 90	Indikator Sub Kegiatan (output)	Bidang Urusan	Urusan	Kode					Ket.
Fasilitasi Permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah	Jumlah UKM yang mendapatkan layanan pemecahan masalah produksi	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Prosentase UMKM produktif	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha produktif	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah pelaku usaha produktif naik kelas	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Pemberian Fasilitasi Pengamanan kawasan Usaha Kecil Menengah	Jumlah Layanan pengamanan kawasan usaha kecil menengah	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13						
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah UKM yang difasilitasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase pelaku usaha yang mendapat peningkatan ketrampilan teknis produksi, manajemen usaha, sosialisasi HAKI dan terfasilitasi penggunaan dana dari pemerintah	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	jumlah pelaku usaha yang mendapat pelatihan keterampilan teknis dan manajerial	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil, menengah	**Terciptanya wirausaha yang unggul dan berdaya saing pada UKM**														
Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UKM yang difasilitasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase pelaku usaha yang mendapat peningkatan ketrampilan teknis produksi, manajemen usaha, sosialisasi HAKI dan terfasilitasi penggunaan dana dari pemerintah	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha yang mendapat sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi	Jumlah sarana promosi	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Prosentase UMKM produktif	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi untuk mengikuti pameran	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran produksi dan pemasaran	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah UMKM Peserta pelatihan	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase pelaku usaha yang mendapat peningkatan ketrampilan teknis produksi, manajemen usaha, sosialisasi HAKI dan terfasilitasi penggunaan dana dari pemerintah	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	jumlah pelaku usaha mikro yang naik kelas	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD	Jumlah koperasi yang mendapatkan Pelatihan RAT dan capacity biulding	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan dan sosialisasi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	jumlah pengurus koperasi yang mengikuti pelatihan	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah peserta Sosialisasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase pelaku usaha yang mendapat peningkatan ketrampilan teknis produksi, manajemen usaha, sosialisasi HAKI dan terfasilitasi penggunaan dana dari pemerintah	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi mengikuti sosialisasi HAKI	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Kegiatan pelatihan	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Prosentase UMKM produktif	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	jumlah pelaku usaha yang mendapat pelatihan keterampilan teknis dan manajerial	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	**Persentase system UKM yang dikembang-kan**														
Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Jumlah Peserta sosialisi	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase pelaku usaha yang mendapat peningkatan ketrampilan teknis produksi, manajemen usaha, sosialisasi HAKI dan terfasilitasi penggunaan dana dari pemerintah	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha yang mendapat sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah dana revolving yang disalurkan pemerintah bagi UMKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase pelaku usaha yang mendapat peningkatan ketrampilan teknis produksi, manajemen usaha, sosialisasi HAKI dan terfasilitasi penggunaan dana dari pemerintah	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah WUP mendapat dukungan dana dari pemerintah yang dibina	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Sarana pemasaran secara elektronik dan fisik	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Prosentase UMKM produktif	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi untuk mengikuti pameran	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran produksi dan pemasaran	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	Jumlah kerjasama koperasi	tidak terdapat dalam permendagil 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13	tidak terdapat dalam permendagri 13						
Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	**Persentase Meningkatnya Koperasi Aktif**														
Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Jumlah Rakor pusat, prov, daerah yang dikuti	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan Jumlah Aparatur Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan Jumlah Aparatur Koperasi yang mengikuti Rakor, Bimtek	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penatasan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti rakor dan Bimtek Perkoperasian	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Jumlah Sarana pendidikan pelatihan perkoperasi-an	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Sarana pendidikan pelatihan perkoperasi-an	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan Sarana pendidikan pelatihan perkoperasi-an	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Pengadaan Sarana Mebelair dan Perlengkapan Kantor	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian	Jumlah Data base bidang koperasi yang terintegrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Data base bidang koperasi yang terintegrasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data base bidang koperasi yang terintegrasi	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penatasan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif pada Data Base	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Jumlah peserta sosialisasi	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perkoperasian	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi KSP/KSPS dan USP/USPS yang memiliki Izin Usaha	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Koperasi KSP/KSPS dan USP/USPS yang mengurus izin usaha	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi Nasional dan Provinsi yang membuka Kantor Cabang di Kota Tarakan	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Provinsi dan Nasional di Kota Tarakan (yg terfasilitasi dan terdata)	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang dan Cabang Pembantu Koperasi (yang terdata)	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi KSP/KSPS dan USP/USPS yang terbina dan terawasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi KSP/KSPS dan USP/USPS yang diperiksa	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi ; KSP/KSPS dan USP/USPS (yg diperiksa dan dinilai)	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi KSP/KSPS dan USP/USPS yang terbina dan terawasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi KSP/KSPS dan USP/USPS yang diawasi	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi ; KSP/KSPS dan USP/USPS (yg diperiksa dan dibubarkan)	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021

Program dan Kegiatan Permendagri 13	Indikator Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Program Permendagri 90	Indikator Program (*outcome*)	Kegiatan Permendagri 90	Indikator Kegiatan (*output*)	Sub Kegiatan Permendagri 90	Indikator Sub Kegiatan (*output*)	Bidang Urusan	Urusan	Kode					Ket.
Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah koperasi yang terbina dan terawasi	PROGRAM PENLAAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi KSP/KSPS dan USP/USPS yang dinilai	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi KSP/KSPS dan USP/USPS yang dinilai	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi ; KSP/KSPS dan USP/USPS sehat	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
		PROGRAM PENLAAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi KSP/KSPS dan USP/USPS yang dinilai	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi KSP/KSPS dan USP/USPS yang diperiksa	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi ; KSP/KSPS dan USP/USPS berprestasi	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi KSP/KSPS dan USP/USPS yang terbina dan terawasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi koperasi	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penatasan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengurus Koperasi yang mengikuti pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Jumlah Realisasi kerjasama usaha koperasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan Jumlah Kerjasama Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang melakukan kerjasama	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penatasan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	Jumlah Anggota Koperasi yang mengikuti pembinaan dan sosialisasi Peningkatan jaringan kerjasama koperasi	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	Jumlah Percontohan pengembangan koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan Jumlah Koperasi Aktif (yg berkembang secara kelembagaan / usaha)	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi peserta Diklat perkoperasian (jumlah koperasi yg dikutsertakan sbg percontohan)	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Pengurus dan pengawas Koperasi yang mengikuti Diklat Manajemen Perkoperasian	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan Jumlah Koperasi Aktif (yg berkembang secara kelembagaan / usaha)	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi (jumlah koperasi yg dikutsertakan sbg percontohan)	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penatasan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	Jumlah Koperasi Aktif Berprestasi	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)
Jl. P. Irian No.12 Kel. Kampung Satu-Skip, Kec. Tarakan Tengah, Telp : (0551) 33910
TARAKAN - 77122

BERITA ACARA
VERIFIKASI PEMETAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 SESUAI NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

Pada hari ini, Senin tanggal 8 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di ruang rapat kantor Bappeda Kota Tarakan telah dilaksanakan verifikasi pemetaan Rencana Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan 2021 sesuai nomenklatur dalam Permendagri Nomo 90 Tahun 2019.

Setelah dilakukan diskusi dan penelaahan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan maka disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan dalam Renja yang relevan dengan sub kegiatan/kegiatan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berjumlah 66 kegiatan
2. Jumlah kegiatan yang diusulkan menjadi sub kegiatan baru berjumlah 66 kegiatan
3. Rincian kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk menjadi bahan masukan dalam rangka penyampaian usulan pemutakhiran nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah kepada Kementerian/Lembaga terkait.

Kepala Dinas Pangan, Pertanian
Dan Perikanan Kota Tarakan

Ir. Elang Buana, M. Si
NIP. 19660714 199403 1 014

Tim Pembahas

1. R ATNA KUNALASARI, ST .....
2. TAHMAD .....
3. Husni Ersmt.D .....
4. ....
5. Kartika Uli .....

Kepala Bappeda Kota Tarakan

H. Suparlan, ST, MT
Pembina Utama Muda / Ivc
NIP. 196402121998031004

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

Tabel

Program Kegiatan Pemetaan Permendagri No 90

DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan	Bidang Urusan	Program dan Kegiatan Permendagri 13	Indikator Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Program Permendagri 90	Indikator Program (*outcome*)	Kegiatan Permendagri 90	Indikator Kegiatan (*output*)	Sub Kegiatan Permendagri 90	Indikator Sub Kegiatan (*output*)	Bidang Urusan	Urusan	Kode				
	Pemerintahan Fungsi Penunjang		**Program pelayanan administrasi perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**													
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar dan surat masuk	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang pajak kendaraannya terbayarkan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang pajak kendaraannya terbayarkan	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia Jumlah tenaga kebersihan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia Jumlah tenaga kebersihan	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum yang tersedia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum yang tersedia	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
			Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
	Pemerintahan Fungsi Penunjang		**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**													

Kode	Urusan	Bidang Urusan	Program dan Kegiatan Permendagri 13	Indikator Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Program Permendagri 90	Indikator Program (*outcome*)	Kegiatan Permendagri 90	Indikator Kegiatan (*output*)	Sub Kegiatan Permendagri 90	Indikator Sub Kegiatan (*output*)	Bidang Urusan	Urusan	Kode				
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
			Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
	Pemerintahan Fungsi Penunjang		**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Persentase ASN yang disiplin**													
			Pengadaan Mesin /Kartu Absen	Pengadaan Mesin /Kartu Absen	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	prosentase ASN yang disiplin, telah mengikuti diklat dan bimtek	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	jumlah pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	prosentase ASN yang disiplin, telah mengikuti diklat dan bimtek	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
			Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Korpri	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	prosentase ASN yang disiplin, telah mengikuti diklat dan bimtek	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah Pakaian Korpri	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	prosentase ASN yang disiplin, telah mengikuti diklat dan bimtek	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	**Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat**													
			Pendidikan dan Pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	prosentase ASN yang disiplin, telah mengikuti diklat dan bimtek	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu**													
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Keuangan	prosentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja	Penunjang Pemerintah Daerah	URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
		PERTANIAN	**Program Peningkatan Ketahanan Pangan**	**Skor PPH dan persentase ketersediaan terhadap permintaan bahan makanan penyumbang inflasi**													
			Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai Pangan	Jumlah Dokumen PPH yang tersedia	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (skor PPH) dan Peningkatan jenis makanan pokok yang dikonsumsi	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Konsumsi ikan/kapita/thn	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Dokumen PPH yang tersedia	BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
			Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	Jumlah sarana pendukung pengembangan padi, palawija dan hortikultura (jalan usaha tani, sarana pengairan)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah produksi pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Presarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah sarana pendukung pengembangan padi, palawija dan hortikultura	BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
			Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah sarana (peralatan, bahan uji,sampel) penjaminan mutu pangan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Keamanan bahan pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jaminan keaman bahan pangan segar	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana (peralatan, bahan uji,sampel) penjaminan mutu pangan	BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
			Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian Produk Perkebunan, produk pertanian	Jumlah sarana produksi pertanian	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Keamanan bahan pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jaminan keaman bahan pangan segar	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana produksi pertanian	BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

Kode	Urusan	Bidang Urusan	Program dan Kegiatan Permendagri 13	Indikator Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Program Permendagri 90	Indikator Program (*outcome*)	Kegiatan Permendagri 90	Indikator Kegiatan (*output*)	Sub Kegiatan Permendagri 90	Indikator Sub Kegiatan (*output*)	Bidang Urusan	Urusan	Kode				
			Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan	Jumlah rekomendasi tentang penyediaan bahan pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (skor PPH) dan peningkatan jenis makanan pokok yang dikonsumsi	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan bahan pangan daerah	Pemantauan stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah rekomendasi tentang penyediaan bahan pangan	BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
		PERTANIAN	**Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**	**Rata-rata pendapatan petani miskin (Rp./Kap/bln)**													
			Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah kelompok yang dilatih	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Produksi	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kemampuan petani	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelompok yang diberikan pelatihan	BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
			Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah Lembaga Petani yang ditingkatkan statusnya	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Produksi	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kemampuan/kelas kelompok	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Lembaga Petani yang ditingkatkan status kelompok dan mengikuti penas	BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
		PERTANIAN	**Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan**	**Jumlah Produksi Pertanian**													
			Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian	Jumlah Kelompok yang dibina	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Produksi	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kemampuan petani	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelompok yang dibina	BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
			Penyediaan Sarana Produksi Pertanian	Jumlah kelompok yang menerima bantuan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Keamanan penggunaan sarana produksi pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah kelompok yang menerima bantuan	BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
		PERTANIAN	**Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan**	**Persentasepetani yang menerapkan TTG Pertanian**													
			Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana TTG	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Keamanan penggunaan sarana produksi pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana TTG	BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
			Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah sarana dan prasarana TT yang dipelihara	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Keamanan penggunaan sarana produksi pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi	Jumlah sarana dan prasarana TT yang dipelihara	BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
			Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam	Jumlah kelompok yang dilatih menerapkan TTG pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Keamanan penggunaan sarana produksi pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi	Jumlah kelompok yang dilatih menerapkan TTG pertanian	BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
		PERTANIAN	**Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan**	**Penyuluh yang diberdayakan(orang)**													
			Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/perkebunan	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kemampuan PPL	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Intensitas penyuluhan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan	BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
			Peningkatan Kesejahteraan penyuluh pertanian/perkebunan	Jumlah PPL yang mendapatkan insentif	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kemampuan PPL	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Intensitas penyuluhan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah PPL yang mendapatkan insentif	BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
		PERTANIAN	**Program Peningkatan Pemasaran Pertanian**	**Nilai pemasaran produksi pertanian/perkebunan**													
			Pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/pedesaan hasil pertanian/perkebunan	Jumlah bangunan tempat pemasaran hasil pertanian	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan bahan pangan daerah	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan sarana pendukung kemandirian pangan daerah	Penyediaan Infrastruktur pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah bangunan tempat pemasaran hasil pertanian	BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
			Pembangunan pusat-pusat etalase/exibisi/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan	Jumlah pameran/promosi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan bahan pangan daerah	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan sarana pendukung kemandirian pangan daerah	Penyediaan Infrastruktur pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah pameran/promosi	BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
			Pemeliharaan rutin/berkala pusat-pusat etalase/exibisi/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan	Jumlah bangunan pemasaran yang dipelihara	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan bahan pangan daerah	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana pendukung kemandirian pangan daerah	Penyediaan Infrastruktur pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah bangunan pemasaran yang dipelihara	BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
			Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Jumlah pameran/promosi	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90							

Kode	Urusan	Bidang Urusan	Program dan Kegiatan Permendagri 13	Indikator Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Program Permendagri 90	Indikator Program (*outcome*)	Kegiatan Permendagri 90	Indikator Kegiatan (*output*)	Sub Kegiatan Permendagri 90	Indikator Sub Kegiatan (*output*)	Bidang Urusan	Urusan	Kode				
		PERTANIAN	**Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan**	**Jumlah Produksi peternakan(daging) (kg)dan telur (kg)**													
			Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	Jumlah kandang ayam ras	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Tersedianya prasarana pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah kandang ayam ras	BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
			Pembibitan dan Perawatan Ternak	Jumlah Sapi bakalan/akseptor	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Tersedianya prasarana pertanian	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih /Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sapi bakalan/akseptor	BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
			Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Jumlah sapi yang didistribusikan	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90							
			Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Kawasan Pertanian Terpadu	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Pertanian	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya benih/bibit ternak, tanaman pakan ternak dan pakan	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Kawasan Pertanian Terpadu	BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen pelaporan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Pertanian	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya benih/bibit ternak, tanaman pakan ternak dan pakan	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah dokumen pelaporan	BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
		PERTANIAN	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak**	**Angka kematian sapi/kerbau karena kasus penyakit.**													
			Pendataan masalah peternakan	Jumlah dokumen data masalah peternakan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan kesehatan hewan yang akan keluar dan masuk daerah	Penilaian Resiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah dokumen data masalah peternakan	BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
			Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Jumlah obat-obatan dan peralatan kesehatan hewan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner	Penyediaan Jasa Laboratorium	Jumlah obat-obatan dan peralatan kesehatan hewan	BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
			Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	Pengawasan kesehatan lalu lintas ternak	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner	Penyediaan Jasa Laboratorium	Pengawasan kesehatan lalu lintas ternak	BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
			Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik	Jumlah ternak yang dimusnahkan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah ternak yang dimusnahkan	BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
			Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal	Hasil uji bahan pangan asal hewan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jaminan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan bahan pangan segar	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah bahan uji bahan pangan asal hewan	BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
			Peningkatan Laboratorium	Jumlah peralatan dan bahan uji laboratorun keswan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Hasil pemeriksaan laboratorium	BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
			Monitoring dan evaluasi serta pelaporan	Jumlah dokumen laporan kesehatan hewan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Melar Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penutupan/pembukaan daerah apabila terjadi wabah	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan zoonozis	Penutupan/pembukaan daerah apabila terjadi wabah	BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
		PERTANIAN	**Program Peningkatan Pemasaran Produksi Hasil Peternakan**	**Nilai pemasaran produksi peternakan**													
			Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan	Jumlah sarana dan prasarana pasar hasil petemakan (RPH sapi, RPU,RPH babi, Outlet)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Kemandirian pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana pendukung kemandirian pangan daerah	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pasar hasil petemakan (RPH sapi, RPU,RPH babi, Outlet)	BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
			Pembangunan pusat-pusat etalase/exibisi/promosi atas hasil produksi petemakan	Jumlah tempat penjualan yang dibangun	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Kemandirian pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana pendukung kemandirian pangan daerah	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah tempat penjualan yang dibangun	BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

Kode	Urusan	Bidang Urusan	Program dan Kegiatan Permendagri 13	Indikator Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Program Permendagri 90	Indikator Program (*outcome*)	Kegiatan Permendagri 90	Indikator Kegiatan (*output*)	Sub Kegiatan Permendagri 90	Indikator Sub Kegiatan (*output*)	Bidang Urusan	Urusan	Kode				
			Pemeliharaan rutin/berkala pusat-pusat etalase/exibisi/promosi atas hasil produksi peternakan	Jumlah tempat penjualan yang diperbaiki	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Kemandirian pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana pendukung kemandirian pangan daerah	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah tempat penjualan yang diperbaiki	BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
			Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	Jumlah pelaksanaan promosi	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90							
		KELAUTAN DAN PERIKANAN	**Program Pengembangan Budidaya Perikanan**	**Produksi perikanan budidaya (ikan, udang dan rumput laut)**													
			Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Jumlah Pokdakan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya (ikan, udang dan rumput laut)	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudi Daya Ikan	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pokdakan	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
			Peningkatan oprasional dan pengembangan Balai Benih Udang	Jumlah produksi benur	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya (ikan, udang dan rumput laut)	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembudidaya Ikan yang dibantu	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
			Peningkatan dan Pengembangan Oprasonal Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Jumlah laporan hasil uji	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya (ikan, udang dan rumput laut)	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil uji	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
			Pengembangan sarana dan prasarana budidaya	Jumlah pokdakan yang dibantu	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya (ikan, udang dan rumput laut)	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pokdakan yang dibantu	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
		KELAUTAN DAN PERIKANAN	**Program Pengembangan Perikanan Tangkap**	**Produksi perikanan tangkap**													
			Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah KUB	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah KUB yang Terbentuk	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
			Peningkatan Kualitas dan Rehabilitasi Alat Tangkap	Jumlah KUB	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan yang Dibina	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
			Pendatan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan yang Dibina	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
			Pengembangan sarana dan prasarana tangkap dan pendampingan	Jumlah KUB	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan yang Dibina	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
		KELAUTAN DAN PERIKANAN	**Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan**	**Jumlah ekspor perikanan**													
			Peningkatan dan Pengembangan Pengolahan serta Pemasaran Produksi Hasil Usaha dan investasi perikanan	Jumlah pameran/promosi produk Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah pemasaran produk perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha Skala Mikro dan Kecil yang Terdaftar	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Data dan Informasi Pelaku Usaha serta Jumlah keikutsertaan dalam pameran/promosi produk Kelautan dan Perikanan	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
			Peningkatan Oprasional dan Pengembangan LPPMHP	Jumlah Pengujian	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah pemasaran produk perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha Skala Mikro dan Kecil yang Terbina	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pengujian dan Jumlah pelaku usaha yang telah menerapkan GMP dan SSOP	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
			Pengembangan dan Penguatan Penanganan Sistem Pasca Panen dan Penanggulangan Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya	Jumlah penitipan ikan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah pemasaran produk perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha Skala Mikro dan Kecil yang Terbina	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pengujian dan Jumlah pelaku usaha yang telah menerapkan GMP dan SSOP	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Kelompok pengolah hasil pertanian	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah pemasaran produk perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah Bahan Baku	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angka Konsumsi Ikan (AKI) dan Jumlah jenis olah/produk nilai tambah berbasis ikan dan limbahnya	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
			Pengembangan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Jumlah petugas QC UPI	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah pemasaran produk perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha Skala Mikro dan Kecil yang Terbina	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pengujian dan Jumlah pelaku usaha yang telah menerapkan GMP dan SSOP	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)
Jl. P. Irian No.12 Kel. Kampung Satu-Skip, Kec. Tarakan Tengah, Telp : (0551) 33910
TARAKAN - 77122

BERITA ACARA
VERIFIKASI PEMETAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
SESUAI NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

Pada hari ini, Senin tanggal 8 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di ruang rapat kantor Bappeda Kota Tarakan telah dilaksanakan verifikasi pemetaan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian 2021 sesuai nomenklatur dalam Permendagri Nomo 90 Tahun 2019.

Setelah dilakukan diskusi dan penelaahan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan maka disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan dalam Renja yang relevan dengan sub kegiatan/kegiatan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berjumlah ...47..... kegiatan
2. Jumlah kegiatan yang diusulkan menjadi sub kegiatan baru berjumlah ...2..... kegiatan
3. Rincian kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk menjadi bahan masukan dalam rangka penyampaian usulan pemutakhiran nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah kepada Kementerian/Lembaga terkait.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian

H. Budiono, S.H.,M. Hum
NIP. 196212251993031004

Tim Pembahas

1. Sekretaris .....
2. Kabid Ketenagakerjaan .....
3. Kabid Ekolitbang Bappeda .....
4. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan .....
5. Kasubbid Pertanian dan Dunia Usaha Bappeda .....

Kepala Bappeda Kota Tarakan

PEMERINTAH KOTA TARAKAN BAPPEDA

H. Suparlan, ST, MT
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 196402121998031004

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

Tabel
Program Kegiatan Pemetaan Permendagri No 90
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Urusan	Bidang Urusan	Program dan Kegiatan Permendagri 13	Indikator Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Program Permendagri 90	Indikator Program (outcome)	Kegiatan Permendagri 90	Indikator Kegiatan (*output*)	Sub Kegiatan Permendagri 90	Indikator Sub Kegiatan (*output*)	Bidang Urusan	Urusan	Kode					Ket
	URUSAN WAJIB (NON PELAYANAN DASAR)		**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**														
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Cakupan waktu Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan waktu Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajak kendaraan dibayarkan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajak kendaraan dibayarkan	PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan Administrasi Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan Administrasi Keuangan	PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia	PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
			Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daeran dan luar Daerah	Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan luar Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan luar Daerah	PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**														
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah BBM yang diadakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah BBM yang diadakan	PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
			Pengadaan kendaraan Dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan Dinas/operasional	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan Dinas/operasional	PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
			Pengadaan mubeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Umum	prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran dan kebutuhan sarana prasarana aparatur	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan mubeleur	PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Persentase ASN yang Disiplin**														
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	prosentase ASN yang disiplin, telah mengikuti diklat dan bimtek	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
			Pengadaan mesin absensi	Jumlah pengadaan mesin/kartu absensi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	prosentase ASN yang disiplin, telah mengikuti diklat dan bimtek	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah pengadaan mesin/kartu absensi	PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat dan Bimtek**														
			Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	prosentase ASN yang disiplin, telah mengikuti diklat dan bimtek	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
			Bimbingan Teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan Teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90								
			Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dari Keuangan	**Persentase dokumen laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun tepat waktu**														
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Administrasi Keuangan	prosentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
			Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	**Persentase pencari kerja yang kompeten**														
			Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pelatihan dan Instruktur BLK	Jumlah ASN yang mengikuti capacity Bulding, Upgrading dan Diklat Dasar Instruktur	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90								
			Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pelatihan dan Keterampilan Berbasis dan Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan Keterampilan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang kompeten	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	jumlah pencari kerja yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan	BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
			Pembangunan BLK	Jumlah Gedung Worshop Pelatihan yang dibangun	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang kompeten	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja yang tersedia dan terpelihara	BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
			Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK	Jumlah sarana dan prasarana (gedung Kantor BLK, workshop, rumah dinas instruktur) yang terawat	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang kompeten	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja yang tersedia dan terpelihara	BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
			Rehabilitasi sedang, berat sarana/prasarana BLK	Panjang pagar yang terbangun	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang kompeten	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja yang tersedia dan terpelihara	BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
			Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja	Jumlah perlengkapan dan peralatan pendidikan dan pelatihan BLK	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang kompeten	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja yang tersedia dan terpelihara	BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						

Kode	Urusan	Bidang Urusan	Program dan Kegiatan Permendagri 13	Indikator Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Program Permendagri 90	Indikator Program (*outcome*)	Kegiatan Permendagri 90	Indikator Kegiatan (*output*)	Sub Kegiatan Permendagri 90	Indikator Sub Kegiatan (*output*)	Bidang Urusan	Urusan	Kode					Ket
			Penyusunan data base tenaga kerja daerah	Aplikasi sistem informasi ketenagakerjaan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	persentase pengelolaan informasi pasar kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	jumlah aplikasi sistem informasi ketenagakerjaan	BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
			Pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam negeri	Peserta yang mengikuti pemagangan di perusahaan	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90								nomenklatur permendagri 13 : dst
				Peningkatan prouktivitas tenaga kerja di perusahaan	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90								
			Program peningkatan kesempatan kerja	**Persentase perusahaan yang menerima tenaga kerja**														
			Penempatan tenaga kerja dalam negeri	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	persentase pengelolaan informasi pasar kerja	Job Fair/Bursa Kerja	jumlah job fair/bursa kerja yang dilaksanakan	BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
				Monitoring dan pembinaan BKK/BKS	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	persentase perlindungan PMI	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	jumlah pelaksanaan monitoring dan pembinaan BKK/BKS	BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
			Peningkatan pengembangan pasar kerja	Sosialisasi dan bimbingan jabatan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelayanan antar kerja	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	jumlah pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
			Pengembangan dan peningkatan perluasan kerja	Jumlah pelatihan kewirausahaan bagi tenaga kerja mandiri	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90								nomenklatur permendagri 13 : dst
				Padat karya infrastruktur	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90								
			Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	**Persentase perusahaan yang memiliki lembaga ketenagakerjaan**														
			Pengelolaan persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi	Jumlah perusahaan yang menerapkan persyaratan kerja	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menerapkan persyaratan kerja	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah data dan Informasi SHI dan Jaminan Sosial	BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
			Peningkatan penerapan jaminan sosial tenaga kerja	Jumlah pekerja/buruh peserta jamsostek aktif dengan jumlah pekerja/buruh	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perjanjian kerja bersama	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah pekerja/buruh peserta jamsostek aktif dengan jumlah pekerja/buruh	BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
			Pengelolaan kelembagaan kerjasama HI serta penerapan pengupahan	Jumlah perusahaan yang menerapkan standarisasi UMK	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rapat pertemuan konsolidasi pelaksanaan peningkatan intesitas pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
			Konsolidasi pelaksanaan peningkatan intesitas pencegahan dan penyelesaian perselisihan HI	Jumlah rapat pertemuan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rapat pertemuan konsolidasi pelaksanaan peningkatan intesitas pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
			Program pengembangan Industri kecil dan menengah	**Persentase IKM yang terfasilitasi**														
			Fasilitas bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Terfaksananya pelatihan Pengelolaan Sumber Daya Lokal (hasil laut /perikanan, pertanian, peternakan)	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan IKM	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	presentase IKM yang terfasilitasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM difasilitasi	BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
			Pembinaan Industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster Industri	Terselenggaranya pertemuan antar pelaku IKM	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan IKM	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	presentase IKM yang terfasilitasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM difasilitasi	BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
			Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah	Tersusunnya perda RPID Kota Tarakan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan IKM	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	presentase IKM yang terfasilitasi	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	jumlah dokumen perda RPID Kota Tarakan	BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
			Fasilitas Sertifikasi dan Haki Produk Industri	Terfaksananya Fasilitasi Sertifikasi (Haki Halal SNI) Produk IKM	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan IKM	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	presentase IKM yang terfasilitasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM difasilitasi	BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
			Operasional UKM Center dan Rumah Kemasan	Terfaksananya pelayanan kemasan kepada IKM	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90	tidak terdapat dalam Permendagri 90								di permendagri 13 nomenklatur : dst. Dan sudah dialihkan ke perumda
			Koordinasi pengembangan bidang industri	Terkoordinasinya program dan kegiatan pengembangan IKM (Kota/Provinsi/Pusat)	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan IKM	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	presentase IKM yang terfasilitasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
			Program peningkatan kemampuan teknologi industri	**Persentase Industri yang menerapkan sistem mutu**														
			Pembinaan kemampuan teknologi industri	Terfaksananya pembinaan dan pendampingan penerapan sistem produksi yang baik	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan IKM	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	presentase IKM yang terfasilitasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM difasilitasi	BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
			Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Terfaksananya pengembangan dan pelayanan teknologi bagi IKM	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan IKM	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	presentase IKM yang terfasilitasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM difasilitasi	BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
			Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	**Persentase fasilitasi penerangan teknologi bagi IKM**														
			Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Pemberian bantuan mesin peralatan produksi bagi IKM	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan IKM	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	presentase IKM yang terfasilitasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM difasilitasi	BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
			Program penataan struktur industri	**Persentase klaster yang terbangun**														
			Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	terfaksananya pembangunan dan pengembangan sarana maupun prasarana klaster IKM	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan IKM	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	presentase IKM yang terfasilitasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun	BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
			Program pengembangan sentra-sentra produksi potensial	**Persentase industri potensial yang di fasilitasi**														
			Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Tersedianya informasi (promosi) tentang IKM	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Terkelolanya data dan informasi industri	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Data dan Informasi industri IUI yang tersedia	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota	Jumlah informasi industri yang terpublikasi	BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TARAKAN

(B A P P E D A)

Jalan P. Irian No. 13 Tarakan Telp.(0551) 33910, Kota Tarakan – 77121

BERITA ACARA
VERIFIKASI PEMETAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
SESUAI NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di ruang rapat kantor Bappeda Kota Tarakan telah dilaksanakan verifikasi pemetaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tarakan Tahun 2021 sesuai nomenklatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Setelah dilakukan diskusi dan penelaahan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan maka disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan dalam Renja yang relevan dengan sub kegiatan/kegiatan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berjumlah 34 (tiga puluh empat) kegiatan
2. Jumlah kegiatan yang diusulkan menjadi sub kegiatan baru berjumlah 2 (dua) kegiatan
3. Rincian kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk menjadi bahan masukan dalam rangka penyampaian usulan pemutakhiran nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah kepada Kementerian/Lembaga terkait.

Kepala BKPP,

Drs. BUDI PRAYITNO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620306 198803 1 009

Tim Pemeriksa :

1. M. Sa'aduddin Hakim, S.Psi .....
2. Lisa Ariani, SE .....
3. Hj. Kasbariah, SH., MH .....
4. H. Wiranto, S.Pd., M.Pd .....

Kepala BAPPEDA,

H. SUPARLAN, ST., MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19640212 199803 1 004

BKPP - 1

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

TABEL KERJA
PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA TARAKAN

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
								URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							
				PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN	**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERITAHAN**	**KEPEGAWAIAN**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan**				
X	XX	XX	06			**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	X	XX	01	1.02					**Administrasi Keuangan**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan**		
X	XX	XX	06	04			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	X	XX	01	1.02	09						Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran
X	XX	XX	01			**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	X	XX	01	1.03					**Administrasi Umum**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum**		
X	XX	XX	01	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia, dan Jumlah Paket pengiriman	X	XX	01	1.03	01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia, dan Jumlah Paket pengiriman
X	XX	XX	01	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	X	XX	01	1.03	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
X	XX	XX	01	04			Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah ASN yang mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan	X	XX	01	1.03	04						Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah ASN yang mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan dan Jumlah Non PNS yang mendapatkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
X	XX	XX	01	06			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajak kendaraannya terbayarkan	X	XX	01	1.03	06						Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajak kendaraannya terbayarkan
X	XX	XX	01	07			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	X	XX	01	1.03	07						Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan,Gaji Tenaga Kontrak
X	XX	XX	01	19			Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan												
X	XX	XX	01	08			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia	X	XX	01	1.03	08						Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia
X	XX	XX	01	10			Penyediaan ATK	Jumlah ATK yang tersedia	X	XX	01	1.03	10						Penyediaan ATK	Jumlah ATK yang tersedia
X	XX	XX	01	11			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	X	XX	01	1.03	11						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
X	XX	XX	01	12			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	X	XX	01	1.03	12						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia
X	XX	XX	01	13			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapam kantor yang diadakan	X	XX	01	1.03	13						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapam kantor yang diadakan
X	XX	XX	01	15			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	X	XX	01	1.03	15						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia
X	XX	XX	01	17			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makan minum	X	XX	01	1.03	17						Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makan minum
X	XX	XX	01	18			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	X	XX	01	1.03	18						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan jumlah kegiatan untuk rapat kerja kepegawaian
1	21	XX	16	21			Rapat Kerja Kepegawaian Kab/Kota dan Provinsi	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	X	XX	01	1.03	18						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan jumlah kegiatan untuk rapat kerja kepegawaian
X	XX	XX	02			**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**												
X	XX	XX	02	24			Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/operasional	Jumlah BBM, Suku Cadang dan Jasa Service yang diadakan	X	XX	01	1.03	31						Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/operasional	Jumlah BBM, Suku Cadang dan Jasa Service yang diadakan
X	XX	XX	02	26			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	X	XX	01	1.03	33						Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
X	XX	XX	03			**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase ASN yang disiplin**	X	XX	01	1.04					**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Pemenuhan Peningkatan Disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur**		
X	XX	XX	03	01			Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah pengadaan Mesin/Kartu Absensi	X	XX	01	1.04	01						Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah pengadaan Mesin/Kartu Absensi
X	XX	XX	03	02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	X	XX	01	1.04	02						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019											
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
									URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN								
X	XX	XX	04				**Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS**	**Persentase ASN yang pindah/purna tugas**													
X	XX	XX	04	01			Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah ASN yang memasuki Purna Tugas	X	XX	01	1.04	06							Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah ASN yang memasuki Purna Tugas
X	XX	XX	05				**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat dan Bimtek													
X	XX	XX	05	01			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek implementasi	X	XX	01	1.04	11							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek implementasi
															KEPEGAWAIAN	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Pemenuhan Program Kepegawaian Daerah**				
1	20	XX	23				**Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknoloogi Informasi**	Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi	5	'03	02	1.01						**Pengelolaan Data dan Informasi ASN**	**Persentase Pemenuhan Pengelolaan Data dan Informasi ASN**		
1	20	XX	23	07			Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perkantoran	Jumlah Aplikasi yang dipelihara	5	'03	02	1.01	01							Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN	Jumlah Aplikasi yang dilakukan pengembangan dan Pemeliharaan
1	21	XX	17				**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur													
1	21	XX	17	05			Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Jumlah Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	5	'03	02	1.01	01							Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN	Jumlah Aplikasi yang dilakukan pengembangan dan Pemeliharaan
1	20	XX	23				**Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknoloogi Informasi**	Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi	5	'03	02	1.01						**Pengelolaan Data dan Informasi AsN**	**Persentase Pemenuhan Pengelolaan Data dan Informasi ASN**		
1	20	XX	23	03			Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Perkantoran	Jumlah Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	5	'03	02	1.01	'04							Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Data yang dikelola
1	21	XX	17				**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur													
1	21	XX	16	35			Pembuatan Profil Multimedia layanan	Jumlah Profil multimedia yang dibuat	5	'03	02	1.01	'04							Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data yang dikelola dan pelayanan inffomasi kepegawaian
1	21	XX	17				**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur	5	03	02	1.02						**Administrasi Kepegawaian**	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian		
1	21	XX	17	02			Seleksi Penerimaan CPNS	Jumlah orang yang mengikuti seleksi Penerimaan CPNS	5	03	02	1.02	01							Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah orang yang mengikuti seleksi CPNS dan melakukan usulan formasi tambahan CPNSD/pNSD
1	21	XX	17	20			Penyusunan dan Pengusulan Formasi Tambahan CPNSD/PNSD	Jumlah orang yang diusulkan untuk formasi tambahan CPNSD/PNSD													Jumlah orang yang mengikuti seleksi CPNS dan melakukan usulan formasi tambahan CPNSD/pNSD
1	21	XX	16	04			Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Jumlah PNS yang naik Pangkat	5	03	02	1.02	10							Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah PNS yang naik Pangkat
1	21	XX	16	19			Penyelesaian proses Administrasi Kepegawaian	Jumlah PNS yang Memasuki Masa pensiun	5	03	02	1.02	04							Pelaksanaan Proses Pemberhentian Pegawai	Jumlah PNS yang Memasuki Masa pensiun
1	21	XX	16	29			Pembekalan Purna bhakti PNS	Jumlah PNS yang mendapatkan pembekalan purna bakti PNS	5	03	02	1.02	04							Pelaksanaan Proses Pemberhentian Pegawai	Jumlah PNS yang mendapatkan pembekalan purna bakti PNS
1	21	XX	16	22			Penyelesaian Proses Mutasi Kepegawaian	Jumlah PNS yang Mutasi Keluar dan Masuk Kota Tarakan	5	03	02	1.02	07							Proses Mutasi ASN	Jumlah PNS yang Mutasi Keluar dan Masuk Kota Tarakan
									5	03	02	1.03						**Peningkatan Kapasitas ASN**	**Persentase pemenuhan peningkatan kapasitas ASN**		
1	21	XX	16	30			Evaluasi Kinerja ASN	Jumlah SKP yang dievaluasi	5	03	02	1.03	02							Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	Jumlah SKP yang dievaluasi dan penyusunan regulasi dan pembentukan TIM
1	21	XX	16	33			Penyusunan Analisa Kebijakan Kinerja, Kesejahteraan dan Penghargaan Pegawai	Jumlah Regulasi yang disusun	5	03	02	1.03	02								
1	21	XX	16	07			Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar	Jumlah PNS yang mengikuti Tugas Belajar	5	03	02	1.03	07							Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang mengikuti Tugas Belajar
1	21	XX	16	17			Pelaksanaan Ujian Dinas Dan Penyesuaian Ijazah	Jumlh PNS yang mengikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	5	03	02	1.03	07							Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlh PNS yang mengikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
1	21	XX	16	25			Penyesuaian Gelas PNS	Jumlah PNS yang penyesuain gelar	5	03	02	1.03	07							Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang penyesuain gelar
1	21	XX	16	15			Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	Jumlah diklat yang diikuti	5	03	02	1.03	08							Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah diklat yang diikuti
1	21	XX	16	16			Koordinasi Penyelenggaran Diklat	Jumlah koordinasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan diklat	5	03	02	1.03	08							Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah koordinasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan diklat

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
									URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN								
									5	03	02	1.04						**Pengembangan Karir ASN**	**Jumlah Pemenuhan Pengembangan Karir ASN**		
1	21	XX	17	03			Penempatan PNS	Jumlah kegiatan penempatan PNS	5	03	02	1.04	01							Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Jumlah Kegiatan Pengembangan karir dan promosi ASN
									5	03	02	1.05						**Pembinaan Disiplin ASN**	**Jumlah Pemenuhan Pembinaan Disiplin ASN**		
1	21	XX	16	09			Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran disiplin PNS	Jumlah Penanganan Kasus pelanggaran disiplin	5	03	02	1.05	02							Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran
									5	03	02	1.05	01							Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Pembinaan Disiplin PNS
1	21	XX	16	08			Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi	Jumlah Penghargaan yang diberikan untuk PNS yang berprestasi	5	03	02	1.05	03							Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	Jumlah Penghargaan yang diberikan untuk PNS yang berprestasi
															PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase Pemenuhan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**				
1	20	XX	16				**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	5	04	02	1.02						**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persentase Pemenuhan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan fungsional**		
1	20	XX	16	01			Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNSD	Jumlah PNS yang mengikuti Prajabatan CPNSD	5	04	02	1.02	07							Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, abatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah PNS yang mengikuti Prajabatan CPNSD
1	20	XX	16	02			Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yaang mengikuti diklat struktural	5	04	02	1.02	07							Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, abatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah PNS yaang mengikuti diklat struktural
1	20	XX	16				**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	5	03	02	1.03						**Peningkatan Kapasitas ASN**	**Persentase Pemenuhan Peningkatan Kapasitas ASN**		
1	20	XX	16	03			Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang mengikutiPelatihan Teknik tugas dan fungsi	5	'03	02	1.03	01							Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah PNS yang mengikutiPelatihan Teknik tugas dan fungsi

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TARAKAN
(B A P P E D A)
Jl. P. Irian No.12 Kel. Kampung Satu-Skip Telp. (0551) 33910 Fax. (0551) 32004 – Tarakan 77113

BERITA ACARA
VERIFIKASI PEMETAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
SESUAI NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di ruang rapat kantor Bidang Infrastruktur Kantor Bappeda Kota Tarakan telah dilaksanakan verifikasi pemetaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 sesuai nomenklatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Setelah dilakukan diskusi dan penelaahan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan maka disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan dalam Renja yang relevan dengan sub kegiatan/kegiatan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berjumlah 50 kegiatan;
2. Jumlah kegiatan yang diusulkan menjadi sub kegiatan baru berjumlah 2 kegiatan;
3. Rincian kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk menjadi bahan masukan dalam rangka penyampaian usulan pemutakhiran nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah kepada Kementerian/Lembaga terkait.

Kepala Bappeda

H. Suparlan, S.T., M.T.
Nip. 196402121998031004

Tim Pembahas

1. Zainuddin, S.T., M.T. .....
2. H. Saparudin, S.T. .....
3. A. Ridwan Mulyawan, S.T. .....
4. Arinda Yuniarsih, S.T. .....
5. Sutris, S.T. .....

Mengetahui,
Kepala Bappeda Kota Tarakan

H. Suparlan, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 196402121998031004

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

Tabel
Program Kegiatan Pemetaan Permendagri No 90
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PERMENDAGRI 90	Indikator program		KEGIATAN PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8	9		10	11	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	02	Program perencanaan pembangunan daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu	201	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase dokumen perencanaan yang tersusun	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rancangan RPJMD, Jumlah Dokumen Rancangan Akhir dan Naskah Akademik Perda RPJMD, Jumlah Dokumen Ranwal RKPD, Jumlah Dokumen Ranhir RKPD dan Perkada RKPD,
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		201	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah		02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tingkat Kecamatan	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	02	Program perencanaan pembangunan daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		201	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah		03	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Musrenbang RPJMD, Jumlah Kegiatan Musrenbang RKPD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	02	Program perencanaan pembangunan daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		201	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah		04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan konsultasi dan Evaluasi RPJMD, Penyelenggaraan Fasilitasi dan Konsultasi RKPD, Jumlah Rapat Kerja Perencanaan Pembangunan
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	02	Program perencanaan pembangunan daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		201	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah		05	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	Jumlah Dokumen RAD TPB/SDGs, Jumlah Dokumen KLHS RPJMD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	02	Program perencanaan pembangunan daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		201	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah		06	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Renstra Perangkat Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	02	Program pengembangan data/informasi	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		201	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah		07	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Data Makro Ekonomi, Data Aspek Kesejahteraan, Data Aspek Pelayanan Umum, Data Aspek Daya Saing
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	02	Program pengembangan data/informasi	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		201	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah		08	Pengamanan Data Informasi Pembangunan Daerah	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	02	Program pengembangan data/informasi	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		201	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah		09	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah sistem informasi yang dibuat dan dikembangkan
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		202	Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah		01	Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		202	Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		202	Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah		03	Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	02	Program pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		203	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	presentase dokumen perencanaan	01	Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi RKPD, Jumlah Dokumen Evaluasi RPJMD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	02	Program pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		203	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah		02	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM	Jumlah Dokumen Evaluasi RKPD, Jumlah Dokumen Evaluasi RPJMD

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PERMENDAGRI 90	Indikator program		KEGIATAN PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8	9		10	11	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	02	Program pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		203	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	yangterevaluasi	03	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi RKPD, Jumlah Dokumen Evaluasi RPJMD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	02	Program pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		203	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah		04	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi RKPD, Jumlah Dokumen Evaluasi RPJMD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	03	Program perencanaan sosial budaya	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Persentase rata-rata capaian renstra bidang PKSDM	201	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	Prosentase pencapaian penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan Jumlah (indikator awal Koordinasi perencanaaan bidang PKSDM)	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	03		PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		201	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan		02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	03		PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		201	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan		03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	03	Program perencanaan sosial budaya	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		202	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Prosentase pencapaian penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia (indikator awal Koordinasi perencanaaan bidang PKSDM)	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Koordinasi perencanaaan bidang PKSDM:
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	03		PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		202	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia		02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	03		PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		202	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia		03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	jumlah Renstra dan Renja
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	03	Program perencanaan sosial budaya	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		203	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Prosentase pencapaian penyusunan dokumen perencanaan bidang kesejahteraan masyarakat (indikator awal Koordinasi perencanaaan bidang PKSDM)	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Perencanaan Kesejahteraan Masyarakat
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	03		PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		203	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat		02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	03		PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		203	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat		03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	04	Program perencanaan pembangunan ekonomi	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		201	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	Prosentase pencapaian penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian (indikator awal Koordinasi perencanaaan bidang Ekolitbang)	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Jumlah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	04		PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		201	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian		02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	04		PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		201	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian		03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	04		PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		202	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif		01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PERMENDAGRI 90	Indikator program		KEGIATAN PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8	9		10	11	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	04		PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase rata-rata capaian renstra bidang ekonomi	202	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif	Prosentase pencapaian penyusunan dokumen perencanaan bidang ekonomi kreatif (indikator awal Koordinasi perencanaaan bidang Ekolitbang)	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	04		PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		202	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif		03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	04		PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		203	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam	Prosentase pencapaian penyusunan dokumen perencanaan bidang sumber daya alam (indikator awal Koordinasi perencanaaan bidang Ekolitbang)	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	04		PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		203	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam		02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	04		PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		203	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam		03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	05	Program perencanaan wilayah dan sumber daya alam	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Persentase rata-rata capaian renstra bidang infrastruktur dan kewilayahan	201	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Prosentase pencapaian penyusunan dokumen perencanaan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup (indikator awal Koordinasi perencanaaan bidang Infrastruktur dan SDA)	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan SDA yang dilaksanakan; Jumlah Laporan dokumen PPSP yang direview
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	05	Program perencanaan wilayah dan sumber daya alam	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		201	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup		02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	05	Program perencanaan wilayah dan sumber daya alam	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		201	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup		03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	05	Program perencanaan wilayah dan sumber daya alam	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		202	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Prosentase pencapaian penyusunan dokumen perencanaan bidang kebinamargaan dan perhubungan (indikator awal Koordinasi perencanaaan bidang Infrastruktur dan SDA)	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan SDA yang dilaksanakan
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	05	Program perencanaan wilayah dan sumber daya alam	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		202	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan		02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	05	Program perencanaan wilayah dan sumber daya alam	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		202	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan		03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	05	Program perencanaan wilayah dan sumber daya alam	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		203	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Prosentase pencapaian penyusunan dokumen perencanaan bidang keciptakaryaan dan kewilayahan (indikator awal Koordinasi perencanaaan bidang Infrastruktur dan SDA)	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan SDA yang dilaksanakan; Jumlah dokumen Renstra DAK Infrastruktur ; Review RPJM Kota Tarakan
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	05	Program perencanaan wilayah dan sumber daya alam	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		203	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan		02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	05	Program perencanaan wilayah dan sumber daya alam	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		203	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan		03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciptakaryaan dan Kewilayahan	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		201	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PERMENDAGRI 90	Indikator program		KEGIATAN PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8	9		10	11	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		201	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		201	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		201	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		201	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		201	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		201	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		07	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		201	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		201	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		09	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		201	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		10	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		201	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		201	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		201	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		201	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PERMENDAGRI 90	Indikator program		KEGIATAN PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8	9		10	11	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan kota (indikator baru)	201	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		15	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian Bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian Oleh Instansi yang Berwenang	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		202	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		202	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		202	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		202	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		202	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		202	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		202	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		202	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		202	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		202	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		202	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		203	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PERMENDAGRI 90	Indikator program		KEGIATAN PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8	9		10	11	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		203	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		203	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		203	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		203	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		203	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		203	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		203	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		203	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		203	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		203	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		203	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		203	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		204	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		204	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PERMENDAGRI 90	Indikator program		KEGIATAN PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8	9		10	11	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02	Program penelitian dan pengembangan inovasi daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		204	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi dan teknologi yang dilaksanakan	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02	Program penelitian dan pengembangan inovasi daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		204	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan pengembangan	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		204	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TARAKAN
(B A P P E D A)
Jl. P. Irian No.12 Kel. Kampung Satu-Skip Telp. (0551) 33910 Fax. (0551) 32004 – Tarakan 77113

BERITA ACARA
VERIFIKASI PEMETAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
SESUAI NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di ruang rapat kantor Bidang Infrastruktur Kantor Bappeda Kota Tarakan telah dilaksanakan verifikasi pemetaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 sesuai nomenklatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Setelah dilakukan diskusi dan penelaahan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan maka disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan dalam Renja yang relevan dengan sub kegiatan/kegiatan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berjumlah 25 kegiatan;
2. Jumlah kegiatan yang diusulkan menjadi sub kegiatan baru berjumlah 2 kegiatan;
3. Rincian kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk menjadi bahan masukan dalam rangka penyampaian usulan pemutakhiran nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah kepada Kementerian/Lembaga terkait.

Kepala BPBD

Ahmady Burhan, S.STP.,M.H.
Nip. 198009062000121001

Tim Pembahas

1. Zainuddin, S.T., M.T. .....
2. H. Saparudin, S.T. .....
3. A. Ridwan Mulyawan, S.T. .....
4. Arinda Yuniarsih, S.T. .....
5. Sutris, S.T. .....

Mengetahui,
Kepala Bappeda Kota Tarakan

H. Suparlan, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 196402121998031004

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

Tabel
Program Kegiatan Pemetaan Permendagri No 90
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PERMENDAGRI 90	Indikator program		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KEGIATAN PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	03	program pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Prosentase Penurunan Kejadian bencana (longsor)	201	Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Prosentase layanan informasi dalam wilayah rawan bencana (indikator baru)	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko bencana kabupaten/kota
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	03	Program pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		201	Peningkatan Disiplin dan Sumber Daya	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyuluhan dan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	03	Program tanggap darurat logistik dan penanggulangan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		202	Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Prosentase sarana prasarana kesiapsiagaan bencana yang tersedia (indikator baru)	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen (Perda, Perwali, SOP, Kontigensi Plan dan Peta Rawan Bencana)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		202	Penyuluhan dan Pengembangan SDM dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan		02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	03	Program tanggap darurat logistik dan penanggulangan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		202	Monitoring Mitigasi Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan		03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	jumlah Sarana prasaran kesiapsiagaan bencana
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		202	Pencegahan Peringatan Dini dan Pengendalian bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan		04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		202	Monitoring Mitigasi Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan		05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		202	Pencegahan Peringatan Dini dan Pengendalian bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan		06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		202	Perbaikan Sarana dan Prasarana Umum,Lingkungan Pasca Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan		07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Pembangunan siring pada daerah longsor
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		202	Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan		08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		203	Penyusunan Norma,standar Prosedur Manual Tanggap Darurat Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PERMENDAGRI 90	Indikator program		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KEGIATAN PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		203	Penyusunan Norma,standar Prosedur Manual Tanggap Darurat Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase ketepatan waktu, jenis bantuan dan kebutuhan korban pada masa tanggap darurat (indikator baru)	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		203	Penyusunan Norma,standar Prosedur Manual Tanggap Darurat Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	03	Program tanggap darurat logistik dan penanggulangan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		203	Pengadaan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Logistik bagi korban bencana
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		204	Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Presentase rekomendasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang ditindaklanjuti (indikator baru)	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		204	Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		204	Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TARAKAN
(B A P P E D A)
Jl. P. Irian No.12 Kel. Kampung Satu-Skip Telp. (0551) 33910 Fax. (0551) 32004 – Tarakan 77113

BERITA ACARA
VERIFIKASI PEMETAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
SESUAI NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di ruang rapat kantor Bidang Infrastruktur Kantor Bappeda Kota Tarakan telah dilaksanakan verifikasi pemetaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2021 sesuai nomenklatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Setelah dilakukan diskusi dan penelaahan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan maka disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan dalam Renja Tahun 2021 yang relevan dengan sub kegiatan/kegiatan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berjumlah 25 kegiatan;
2. Jumlah kegiatan yang diusulkan menjadi sub kegiatan baru berjumlah 2 kegiatan;
3. Rincian kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk menjadi bahan masukan dalam rangka penyampaian usulan pemutakhiran nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah kepada Kementerian/Lembaga terkait.

Kepala Dinas Perhubungan

Arbain, S.E.,M.AP.
Nip. 196803181994031007

Tim Pembahas

1. Zainuddin, S.T., M.T. .....
2. Zakaria Atarik, S.T. .....
3. Sonya Wijayanti, S.P., M.Sc .....
4. Wahyudi, S.T., M.P.W.K. .....
5. ....

Mengetahui,
Kepala Bappeda Kota Tarakan

H. Suparlan, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 196402121998031004

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

Tabel
Program Kegiatan Pemetaan Permendagri No 90
DINAS PERHUBUNGAN

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		201		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		201		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		201		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		201		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		201		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		202		Administrasi Keuangan	Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		202		Administrasi Keuangan		02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		202		Administrasi Keuangan		03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		202		Administrasi Keuangan		04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		202		Administrasi Keuangan		05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		202	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Administrasi Keuangan		06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		202		Administrasi Keuangan		07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		202		Administrasi Keuangan		08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		202	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Administrasi Keuangan		09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Administrasi Umum		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai, Jumlah paket Pengirman
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Administrasi Umum		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Umum		03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang pajak kendaraannya
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns	Administrasi Umum		04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Administrasi Umum		05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Administrasi Umum		06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang pajak kendaraannya terbayarkan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Administrasi Umum		07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Administrasi Umum		08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia Jumlah tenaga kebersihan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Administrasi Umum		09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Administrasi Umum		10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Administrasi Umum		11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan, Jumlah pengandaan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Administrasi Umum		12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Umum		13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Administrasi Umum		14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Administrasi Umum		15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Makanan dan Minuman	Administrasi Umum		17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan minuman
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Administrasi Umum		18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pengadaan Mobil Jabatan	Administrasi Umum		19	Pengadaan Mobil Jabatan	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Administrasi Umum		20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional yang diadakan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Administrasi Umum		21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Administrasi Umum		22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Administrasi Umum		23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Administrasi Umum		24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pengadaan Mebeleur	Administrasi Umum		25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Administrasi Umum		26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Administrasi Umum		27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Administrasi Umum		28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Administrasi Umum		29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Administrasi Umum		30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah BBM, Suku cadang dan jasa servis yang diadakan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Administrasi Umum		31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Administrasi Umum		32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Administrasi Umum		33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Administrasi Umum		34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Administrasi Umum		35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah mebeleur kantor yang dipelihara
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Administrasi Umum		36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Administrasi Umum		37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Administrasi Umum		38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang direhabilitasi
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Administrasi Umum		39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Administrasi Umum		40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	jumlah mesin absensi
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Pengadaan Pakaian Korpri	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pengadaan pakaian korpri
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Persentase ASN yang disiplin	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Pemindahan Tugas PNS	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		08	Pemindahan Tugas PNS	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		201		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan LLAJ	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		201		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		201		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Razia ketertiban kenderaan bermotor
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		202	pemeliharaan fasilitas LLAJ, Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal, Pembangunan Jembatan Penyeberangan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase kondisi fasilitas/pelengkap LLAJ yang baik	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terpeliharanya fasilitas LLAJ yang baik, Jumlah kawasan halte yg dibangun,
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		202	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas, Pengadaan Marka Jalan, Pengadaan Pagar Pengaman Jalan, Pengawasan dan Pengendalian LLAJ dan ASDP, Pengadaan Alat Traffic Light (APILL), Penerangan Jalan Umum	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah rambu lalulintas yang diadakan, Jumlah marka jalan, Panjang pagar pengaman jalan(Guard Rail), Jumlah petugas pengawasan dan pegendalian yang difasilitasi (hari libur reguler, dan hari libur nasional), Jumlah Traffic light dan Warning light tenaga surya yang diadakan, Jumlah PJU yang terpasang
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		202		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana jalan yang terpelihara
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		202		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan jalan yang terpelihara, Prosentase PJU yang terpelihara
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		203		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		01	Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		203		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Tersedianya Pemeliharaan Terminal sekota Tarakan	02	Pembangunan Gedung Terminal	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		203		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		203	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal yang dipelihara
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		203		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		204		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah razia gabungan parkir dan parkir inap, Jumlah Kawasan perparkiran yang dibangun	01	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Kawasan perparkiran yang dibangun
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		204	Penertiban Parkir	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah razia gabungan parkir dan parkir inap
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		205	Penggadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase kendaraan yang melakukan wajib uji kendaraan bermotor	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat pengujian kendaraan bermotor yang diadakan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		205		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		205		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		205		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		205		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		205		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		205		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Presentase ketersediaan prasarana dan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan	205		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah manajemen dan rekayasa jalan	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		205		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		205		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		206		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		206		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		206		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		206		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		207		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase penetapan analisis dampak lalu lintas	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		207		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		207		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		207		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		208		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		208		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Prosentase pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan jalan yang terlaksana	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		208		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		208		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		208		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		209	Revitalisasi angkutan umum	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase angkutan umum yang layak	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan umum yang direvitalisasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		209	Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan, Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah razia gabungan kendaraan laut
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		210		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		210		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		211	Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen dan data yang tersedia	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan trayek angkutan umum yang dibuat
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		211	Sosialisasi/penyuluhan keselamatan pelayaran, Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan, Sosialisasi zona kawasan koordinat operasional penerbangan	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		02	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosilisasi kepada nahkoda kapal dibawah GT 7,Sosialisasi Keselamatan Pelayanan AngkutanLaut, Jumlah Lomba Duta Lalu Lintas dan sosialisasi lalulintas, Jumlah sosilisasi kepada masyarakat di kawasan KKOP (kawasan koordinat operasional penerbangan)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		211		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		212		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		212		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		213		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		01	Perumusan kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		213		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		214		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		01	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		214		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		215		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		01	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		215		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		216		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		216		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		216		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		201		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/ Kota		01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		201		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/ Kota		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		202		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota		01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		202		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		203		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha		01	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		203		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		204		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek dalam 1 daerah Kabupaten/Kota		01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		204		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek dalam 1 daerah Kabupaten/Kota		02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		205		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha		01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		205		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		206		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan		01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		206		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan		02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		207		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota		01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		207		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota		02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		208		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal		01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		208		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		209		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		01	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		209		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		209		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		210		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal		01	Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		210		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal		02	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		210		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal		03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		211		Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau		01	Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		211		Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau		02	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		211		Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau		03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		212		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		212		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		212		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		212		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		213		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		213		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		213		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		213		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		214		Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal		01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		214		Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		215		Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal		01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		215		Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		216		Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal		01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		216		Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		217		Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal		01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		217		Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		218		Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal		01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		218		Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		219		Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal		01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		219		Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal		02	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN		201		Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter		01	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN		202		Penyelengaraan Kebandarudaraan		01	Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN		202		Penyelengaraan Kebandarudaraan		02	Penetapan Kebijakan Besaran Tarif, Personil, Sarana, dan Prasarana Penyelenggaraan Kebandarudaraan	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN		202		Penyelengaraan Kebandarudaraan		03	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan di Sekitar Bandar Udara	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN		202		Penyelengaraan Kebandarudaraan		04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Penyediaan Aksesibilitas dan Utilitas untuk Menunjang	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN		202		Penyelengaraan Kebandarudaraan		05	Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	05		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		201		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian		01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	05		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		201		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian		02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	05		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		201		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian		03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	05		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		202		Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	05		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		202		Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	05		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		203		Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		01	Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	05		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		203		Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	05		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		204		Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota		01	Perumusan kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	05		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		205		Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	05		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		205		Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	05		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		206		Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi		01	Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	05		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		206		Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi		02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	05		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		207		Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	05		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		207		Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TARAKAN
(B A P P E D A)
Jl. P. Irian No.12 Kel. Kampung Satu-Skip Telp. (0551) 33910 Fax. (0551) 32004 – Tarakan 77113

BERITA ACARA
VERIFIKASI PEMETAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
SESUAI NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di ruang rapat kantor Bidang Infrastruktur Kantor Bappeda Kota Tarakan telah dilaksanakan verifikasi pemetaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 sesuai nomenklatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Setelah dilakukan diskusi dan penelaahan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan maka disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan dalam Renja yang relevan dengan sub kegiatan/kegiatan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berjumlah 35 kegiatan;
2. Jumlah kegiatan yang diusulkan menjadi sub kegiatan baru berjumlah 2 kegiatan;
3. Rincian kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk menjadi bahan masukan dalam rangka penyampaian usulan pemutakhiran nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah kepada Kementerian/Lembaga terkait.

Kepala DLH

PEMERINTAH KOTA TARAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Hariyanto, S.Pt.,M.HP
Nip.196402231987091001

Tim Pembahas

1. Zainuddin, S.T., M.T. .....
2. H. Saparudin, S.T. .....
3. A. Ridwan Mulyawan, S.T. .....
4. Arinda Yuniarsih, S.T. .....
5. Sutris, S.T. .....

Mengetahui,
Kepala Bappeda Kota Tarakan

PEMERINTAH KOTA BAPPEDA

H. Suparlan, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 196402121998031004

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

Tabel
Program Kegiatan Pemetaan Permendagri No 90
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8	9		10	11	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		201	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		01	Penyusunan Renstra dan Rerja Perangkat Daerah	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		201	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		201	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		201	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		201	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		202	Administrasi Keuangan	Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		202	Administrasi Keuangan		02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		202	Administrasi Keuangan		03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		202	Administrasi Keuangan		04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		202	Administrasi Keuangan		05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		202	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Administrasi Keuangan	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		202	Administrasi Keuangan		07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		202	Administrasi Keuangan		08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		202	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Administrasi Keuangan	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Administrasi Umum	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai, Jumlah paket Pengiriman
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Administrasi Umum	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Umum	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns	Administrasi Umum	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Administrasi Umum	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Administrasi Umum	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang pajak kendaraannya terbayarkan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Administrasi Umum	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Administrasi Umum	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia Jumlah tenaga kebersihan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Administrasi Umum	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Administrasi Umum	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Administrasi Umum	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan, Jumlah pengandaan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Administrasi Umum	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen iristalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Umum	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Administrasi Umum	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Administrasi Umum	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Administrasi Umum	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Makanan dan Minuman	Administrasi Umum	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan minuman
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Administrasi Umum	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pengadaan Mobil Jabatan	Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	19	Pengadaan Mobil Jabatan	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Administrasi Umum		20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional yang diadakan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Administrasi Umum		21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Administrasi Umum		22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Administrasi Umum		23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Administrasi Umum		24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pengadaan Mebeleur	Administrasi Umum		25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Administrasi Umum		26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Administrasi Umum		27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Administrasi Umum		28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Administrasi Umum		29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Administrasi Umum		30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah BBM, Suku cadang dan jasa servis yang diadakan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Administrasi Umum		31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Administrasi Umum		32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Administrasi Umum		33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Administrasi Umum		34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Administrasi Umum		35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah mebeleur kantor yang dipelihara
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Administrasi Umum		36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Administrasi Umum		37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Administrasi Umum		38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang direhabilitasi
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Administrasi Umum		39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Administrasi Umum		40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Persentase ASN yang disiplin	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	jumlah mesin absensi
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Pengadaan Pakaian Korpri	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pengadaan pakaian korpri
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Pemindahan Tugas PNS	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		08	Pemindahan Tugas PNS	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	02	Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan informasi lingkungan hidup dan SDA	201	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH Kota Tarakan yang tersusun	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup (DIKPLH)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	02	Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		201	Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem informasi lingkungan hidup yang terpelihara
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		202		Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS yang tersusun	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		202		Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota		02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		202		Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota		03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		201	Pemantauan Kualitas Lingkungan, Identifikasi Pencemaran Lingkungan, Koordinasi Pengelolaan Prokasih /Superkasih, Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Koordinasi penyusunan AMDAL, Gerakan Pantai dan Laut Lestari	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah uji kualitas air udara yang dilaksanakan; jumlah kegiatan adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah dokumen laporan hasil analisa uji kualitas air sungai dan udara Kota Tarakan, Jumlah dokumen inventarisasi pencemaran lingkungan di kota tarakan, Jumlah aksi bersih sungai di Sungai Karang Anyar, Sungai Pamusian dan Sungai Sebengkok, Jumlah Perwali / Kep Wali dan Kep Kadis, jumlah dokumen AMDAL yang diajukan dan diproses, Jumlah pelaksanaan aksi bersih pantai dan laut, Jumlah kader yang mendapatkan sosialisasi,
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		201	Aksi Adaptasi Perubahan Iklim, pengujian emisi udara akibat aktivitas industri	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Kampung Iklim yang terbentuk dan terbina
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		202	pengembangan laboratorium LH : - Pengadaan peralatan laboratorium LH, sertifikasi dan akreditasi laboratorium LH	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Peringatan pencemaran yang tersedia (indikator baru)	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	jumlah alat laboratorium yang diadakan, jumlah dan jenis bahan kimia yang diadakan, Jumlah orang yang memiliki sertifikat kompetensi, Status akreditasi Lab LH
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		202		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	202		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		203		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		203		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		203		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		203		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		203		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	04	Program Perlindungan dan konservasi SDA	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		201		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		201		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		201		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		03	Pengelolaan Kebun Raya	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	04	Program Perlindungan dan konservasi SDA	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		201	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH yang terkelola

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Hutan kota dan mangrove yang terkelola	201	PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU; PENGEMBANGAN TAMAN REKREASI, Pemeliharaan Taman	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah hutan kota dan mangrove yang terkelola	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH yang tertanam
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		201		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah pohon mangrove yang ditanam,
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	04	Program Perlindungan dan konservasi SDA, Peningkatan Konservasi tangkapan air	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		201	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA / Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu, karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk ; Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan Mangrove ; Fasilitasi Aksi Kepedulian Masyarakat pada Lingkungan Hidup ; Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup; Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian Lingkungan Hidup (Sosialisasi Peningkatan kapasitas, peringatan hari - hari lingkungan hidup)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah aksi peduli lingkungan, Jumlah komunitas masyarakat yang tereduksi, Jumlah kegiatan peringatan hari-hari lingkungan yang dilaksanakan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	04	Program Perlindungan dan konservasi SDA	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		201	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem ; Rehabilitasi hutan dan lahan,	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	Jumlah Museum flora dan fauna yang beroperasi dg baik, Jumlah Dokumen buku Profil KEHATI yang tersusun,
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	05	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	persen pengurangan limbah B3	201	Pengelolaan B3 dan limbah B3	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin TPS B3 (indikator awal Jumlah TPS B3 yang terbangun dan tepelihara)	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Usaha kecil yang dilakukan pembinaan pengelolaan limbah B3
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		201		Penyimpanan Sementara Limbah B3		02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Inventarisasi lahan terkontaminasi limbah B3
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		202		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		202		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		201		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		201		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		201	Monitoring, Evaluasi dan pelapran,	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		201		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	07		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		201		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	07		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		202		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		02	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		201		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		201	Koordinasi penilaian kota sehat/ Adipura	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Sekolah adiwiyata yang dibina; Jumlah titik pemantauan adipura
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		201	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah perusahaan peserta proper
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		201		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		201		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	11	Program pengembangan kinerja pengelolaan sampah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	persentase pengolahan, persentase penanganan sampah	201		Pengelolaan Sampah	- Jumlah sapras dan sumber daya pelayanan kebersihan, - jumlah sapras, sumber daya pengolahan sampah (indikator baru)	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	11	Program pengembangan kinerja pengelolaan sampah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		201	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Pengelolaan Sampah		02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaduran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah sarana dan prasarana persampahan yang terbangun dan terpelihara
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	11	Program pengembangan kinerja pengelolaan sampah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		201	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan ; Peningkatan / Pemeliharaan Kebersihan Kota	Pengelolaan Sampah		03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana pengoperasian TPA dan Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang diadakan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	11	Program pengembangan kinerja pengelolaan sampah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		201	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan ; Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Pengelolaan Sampah		04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana prasarana sampah yang terpelihara, Jumlah kegiatan sosialisasi pengelolaan persampahan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		201		Pengelolaan Sampah		05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		201		Pengelolaan Sampah		06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		202		Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta		01	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		203		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta		01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		203		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta		02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		203		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta		03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TARAKAN
(B A P P E D A)
Jl. P. Irian No.12 Kel. Kampung Satu-Skip Telp. (0551) 33910 Fax. (0551) 32004 – Tarakan 77113

BERITA ACARA
VERIFIKASI PEMETAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
SESUAI NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di ruang rapat kantor Bidang Infrastruktur Kantor Bappeda Kota Tarakan telah dilaksanakan verifikasi pemetaan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pemakaman Tahun 2021 sesuai nomenklatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Setelah dilakukan diskusi dan penelaahan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan maka disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan dalam Renja yang relevan dengan sub kegiatan/kegiatan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berjumlah 29 kegiatan;
2. Jumlah kegiatan yang diusulkan menjadi sub kegiatan baru berjumlah 2 kegiatan;
3. Rincian kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk menjadi bahan masukan dalam rangka penyampaian usulan pemutakhiran nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah kepada Kementerian/Lembaga terkait.

Kepala DPKPP

Ir. H. Edy Susanto,M.Si
Nip.196608161998031005

Tim Pembahas

1. Zainuddin, S.T., M.T. .....
2. Zakaria Atarik, S.T. .....
3. Sonya Wijayanti, S.P., M.Sc .....
4. Wahyudi, S.T., M.P.W.K. .....
5. ....

Mengetahui,
Kepala Bappeda Kota Tarakan

H. Suparlan, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 196402121998031004

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

Tabel
Program Kegiatan Pemetaan Permendagri No 90
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		201		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		201		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		201		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		201		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		201		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		202		Administrasi Keuangan	Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		202		Administrasi Keuangan		02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		202		Administrasi Keuangan		03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		202		Administrasi Keuangan		04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		202		Administrasi Keuangan		05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		202	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Administrasi Keuangan		06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		202		Administrasi Keuangan		07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		202		Administrasi Keuangan		08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		202	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Administrasi Keuangan		09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Pensunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai, Jumlah paket Pengiriman
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Administrasi Umum		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Umum		03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang pajak kendaraannya
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns	Administrasi Umum		04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Administrasi Umum		05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Administrasi Umum		06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang pajak kendaraannya terbayarkan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Administrasi Umum		07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Administrasi Umum		08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia Jumlah tenaga kebersihan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Administrasi Umum		09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Administrasi Umum		10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Administrasi Umum		11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan, Jumlah pengandaan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Administrasi Umum		12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Umum		13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Administrasi Umum		14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Administrasi Umum		15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Administrasi Umum		16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Makanan dan Minuman	Administrasi Umum		17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan minuman
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Administrasi Umum		18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pengadaan Mobil Jabatan	Administrasi Umum		19	Pengadaan Mobil Jabatan	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Administrasi Umum		20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional yang diadakan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Administrasi Umum		21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Administrasi Umum		22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Administrasi Umum		23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Administrasi Umum		24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pengadaan Mebeleur	Administrasi Umum		25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Administrasi Umum		26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Administrasi Umum		27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Administrasi Umum		28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Administrasi Umum		29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Administrasi Umum		30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah BBM, Suku cadang dan jasa servis yang diadakan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Administrasi Umum		31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Administrasi Umum		32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Administrasi Umum		33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Administrasi Umum		34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Administrasi Umum		35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah mebeleur kantor yang dipelihara
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Administrasi Umum		36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Administrasi Umum		37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Administrasi Umum		38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang direhabilitasi
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Administrasi Umum		39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Administrasi Umum		40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Persentase ASN yang disiplin	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	jumlah mesin absensi
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Pengadaan Pakaian Korpri	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pengadaan pakaian korpri
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Pemindahan Tugas PNS	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		08	Pemindahan Tugas PNS	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	02	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		201		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Rumah akibat bencana yang direhabilitasi	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	02	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		201		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	02	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		201		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	02	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		201		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	02	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		201		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	02	Program lingkungan sehat perumahan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	201	Survey dan identifikasi Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		202		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah sosialisasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		202		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	02	Program lingkungan sehat perumahan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		202	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan, Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		202		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		202		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		05	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		202		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		06	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	02	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		203	Fasilitasi dan Stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam/sosial	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang tertangani	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		203	Fasilitasi dan Stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam/sosial	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		203	Fasilitasi dan Stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam/sosial	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		203	Fasilitasi dan Stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam/sosial	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana yang dibangun
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		203	Fasilitasi dan Stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam/sosial	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		203		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		204		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		204		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		205	Operasional RUSUNAWA	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah rusunawa yang terpelihara (indikator baru)	01	Fasilitasi Pengeblaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Pembuatan Pagar dan Landsekap Rusunawa (MY); Pengawasan Pembuatan Pagar dan Lansekap Rusunawa (MY)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		205		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		206		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		206		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		02	Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		206		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		206		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		04	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		207		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)		01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	03	Program pengembangan perumahan	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Fasilitasi Rumah MBR, Prosentase pengurangan kumuh	201		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi secara Elektronik	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH		201		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH		201		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH		202		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luasan kawasan kumuh yang tertangani	01	Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH		202		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		02	Penyusunan Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH		202		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH		202		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH		202		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH		202		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		06	Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH		202		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		07	Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	03	Program pengembangan perumahan	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH		203		Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Bagi MBR yang Terbangun, Jumlah bantuan stimulan perumahan swadaya, Jumlah Koordinasi perumahan MBR yang terlaksana
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	03	Program pengembangan perumahan	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH		203	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu, Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Bagi MBR yang Terbangun, Jumlah bantuan stimulan perumahan swadaya, Jumlah Koordinasi perumahan MBR yang terlaksana
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH		203		Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH		203	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Kegiatan : Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat (KOTAKU)	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Persentase fasilitasi pengurangan kawasan kumuh : Jumlah pengurangan luasan kawasan kumuh yang didampingi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH		203		Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		05	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	04	Program penyelesaian konflik konflik pertanahan	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase konflik pertanahan yang tertangani	201	Fasilitasi penyelesaian konflik konflik pertanahan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Fasilitasi penyelesaian konflik konflik pertanahan	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	04	Program penyelesaian konflik konflik pertanahan	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		201	Fasilitasi penyelesaian konflik konflik pertanahan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.		02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Fasilitasi penyelesaian konflik konflik pertanahan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	10	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunanaan dan pemanfaatan tanah	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		201	penyuluhan hukum pertanahan	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	jumlah penyuluhan hukum pertanahan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	10	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunanaan dan pemanfaatan tanah	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		201	survey dan pemetaan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		02	Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Survey dan pemetaan penguasaan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	10	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunanaan dan pemanfaatan tanah	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Prosentase Pengadaan tanah dan bersertifikat	201	fasilitasi administrasi penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah : Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pengunaan tanah kota (indikator baru)	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	jumlah fasilitasi surat pernyataan fisik bidang tanah ; jumlah pengadaan tanah bagi kepentingan umum

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TARAKAN
(B A P P E D A)
Jl. P. Irian No.12 Kel. Kampung Satu-Skip Telp. (0551) 33910 Fax. (0551) 32004 – Tarakan 77113

BERITA ACARA
VERIFIKASI PEMETAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
SESUAI NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di ruang rapat kantor Bidang Infrastruktur Kantor Bappeda Kota Tarakan telah dilaksanakan verifikasi pemetaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2021 sesuai nomenklatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Setelah dilakukan diskusi dan penelaahan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan maka disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan dalam Renja tahun 2021 yang relevan dengan sub kegiatan/kegiatan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berjumlah 47 kegiatan;
2. Jumlah kegiatan yang diusulkan menjadi sub kegiatan baru berjumlah 4 kegiatan;
3. Rincian kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk menjadi bahan masukan dalam rangka penyampaian usulan pemutakhiran nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah kepada Kementerian/Lembaga terkait.

Kepala DPUTR

Fandariansyah,S.T.,M.T.
Nip. 197105081998031005

Tim Pembahas

1. Zainuddin, S.T., M.T. .....
2. Zakaria Atarik, S.T. .....
3. Sonya Wijayanti, S.P., M.Sc .....
4. Wahyudi, S.T., M.P.W.K. .....
5. ....

Mengetahui,
Kepala Bappeda Kota Tarakan

H. Suparlan, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 196402121998031004

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

Tabel
Program Kegiatan Pemetaan Permendagri No 90
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI																
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		201		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		201		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		201		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		201		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		201		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		202		Administrasi Keuangan		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		202		Administrasi Keuangan		02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		202		Administrasi Keuangan		03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		202		Administrasi Keuangan		04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		202		Administrasi Keuangan	Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		202	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Administrasi Keuangan		06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		202		Administrasi Keuangan		07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		202		Administrasi Keuangan		08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		202	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Administrasi Keuangan		09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Administrasi Umum		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai, Jumlah paket Pengiriman
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Administrasi Umum		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Umum		03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang pajak kendaraannya
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns	Administrasi Umum		04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Administrasi Umum		05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Administrasi Umum		06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang pajak kendaraannya terbayarkan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Administrasi Umum		07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Administrasi Umum		08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia Jumlah tenaga kebersihan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Administrasi Umum		09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Administrasi Umum		10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Administrasi Umum		11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan, Jumlah pengandaan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Administrasi Umum		12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Umum		13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Administrasi Umum		14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Administrasi Umum		15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Administrasi Umum		16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Penyediaan Makanan dan Minuman	Administrasi Umum		17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan minuman
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pengadaan Mobil Jabatan	Administrasi Umum		19	Pengadaan Mobil Jabatan	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Administrasi Umum		20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional yang diadakan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Administrasi Umum		21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Administrasi Umum		22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program	———	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Administrasi Umum		23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Administrasi Umum		24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pengadaan Mebeleur	Administrasi Umum		25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Administrasi Umum		26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Administrasi Umum		27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Administrasi Umum		28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Administrasi Umum		29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Administrasi Umum		30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah BBM, Suku cadang dan jasa servis yang diadakan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Administrasi Umum		31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Administrasi Umum		32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Administrasi Umum		33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Administrasi Umum		34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Administrasi Umum		35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah mebeleur kantor yang dipelihara
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Administrasi Umum		36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Administrasi Umum		37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Administrasi Umum		38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang direhabilitasi
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Administrasi Umum		39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		203	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Administrasi Umum		40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	jumlah mesin absensi
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Pengadaan Pakaian Korpri	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pengadaan pakaian korpri
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Persentase ASN yang disiplin	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	Program peningkatan disiplin aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Pemindahan Tugas PNS	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		08	Pemindahan Tugas PNS	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	01	program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		204	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah dokumen
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah dokumen

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02	Program pengendalian banjir	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201	pengendalian banjir kawasan sebengkok : pembangunan banjir kawasan karang anyar - karang anyar pantai, pengendalian banjir kawsan karang balik - selumit - selumit pantai, pengendalian banjir kawasan kampung enam - kampung empat, pengendalian banjir kawasan pamusian, pengendalian banjir kawasan kampung satu skip, pengendalian banjir kawasan karang harapan, pengendalian banjir kawasan juata laut, pengendalian banjir kawasan gunung lingkas-lingkas ujung, penngendalian banjir kawasan mamburungan - mamburungan timur.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah dokumen, panjang saluran
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		05	Pembangunan Bendungan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Volume tampungan air baku (meter3)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		07	Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		08	Pembangunan Unit Air Baku	Kapasitas Produksi air bersih
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		09	Pembangunan Tanggul Sungai	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02	Program Pembangunan Turap/talud/Bronjong	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201	Pembangunan Turap/Talud/Beronjong, perencanaan teknis pembangunan turap/talud/bronjong	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Lokasi Pembangunan Turap/Talud / Bronjong
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02	Program Pembangunan Turap/talud/Bronjong	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201	Perencanaan pengendalian sedimen, pembangunan bendungan pengendalian sedimen	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pengendali sedimen (Buah)

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7			8		9		10	11	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02	Program pengendalian banjir	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201	pengendalian banjir kawasan sebengkok ; pembangunan banjir kawasan karang anyar - karang anyar pantai, pengendalian banjir kawsan karang balik - selumit - selumit pantai, pengendalian banjir kawasan kampung enam - kampung empat, pengendalian banjir kawasan pamusian, pengendalian banjir kawasan kampung satu skip, pengendalian banjir kawasan karang harapan, pengendalian banjir kawasan juata laut, pengendalian banjir kawasan gunung lingkas-lingkas ujung, penngendalian banjir kawasan mamburungan - mamburungan timur.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		12	Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Saluran (Meter)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02	Program pengendalian banjir	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		15	Pembangunan Bangunan Sabo	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		16	Pembangunan Check Dam	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		17	Pembangunan Breakwater	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02	Program pengendalian banjir	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201	pembangunan prasarana pengaman pantai, pembangunan bangunan penahan erosi dan abrasi pantai	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang bangunan penahan erosi dan abrasi pantai
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		19	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		20	Rehabilitasi Bendungan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		22	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Volume tampungan air baku : panjang saluran banjir yang terbangun : panjang pengaman sungai yang terbangun (indikator baru)	23	Rehabilitasi Unit Air Baku	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02	Program pengendalian banjir	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02	Program pengendalian banjir	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201	pengendalian banjir kawasan kampung enam - kampung empat	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		27	Rehabilitasi Kanal Banjir	Jumlah Saluran banjir yang terpelihara
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02	Program pengendalian banjir	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		29	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		30	Rehabilitasi Bangunan Sabo	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		31	Rehabilitasi Check Dam	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		32	Rehabilitasi Breakwater	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		33	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		34	Peningkatan Tanggul Sungai	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02	Program pengendalian banjir	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		36	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02	Program pengendalian banjir	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201	Pengendalian banjir kawasan pamusian, pengendalian banjir kawasan kampung 1 skip	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		37	Peningkatan Kanal Banjir	Panjang Saluran (Meter)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02	Program pengendalian banjir	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		38	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		39	Peningkatan Polder/Kolam Retensi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		40	Peningkatan Bangunan Sabo	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		41	Peningkatan Check Dam	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		42	Peningkatan Breakwater	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		43	Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		44	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	prosentase pemenuhan/ketersediaan air baku	201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		45	Revitalisasi dan Pemeliharaan Danau	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		46	Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		47	Pembangunan Infrastruktur untuk Perlindungan dan Pemeliharaan Mata Air	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		48	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		50	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		51	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		52	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02	Program pengendalian banjir	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02	Program pengendalian banjir	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		57	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		58	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		59	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7			8		9		10	11	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		202	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		202	Pembangunan jaringan irigasi	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Jaringan irigasi yang terbangun
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		202		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		03	Pembangunan Bendung Irigasi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		202		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		202		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		05	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		202		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		06	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		202		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		07	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		202		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		202		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		09	Peningkatan Bendung Irigasi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		202		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		202		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		11	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		202		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		12	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		202		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	luasan bendungan yang terbangun (hektar) (indikator baru)	13	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		202		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		202		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		202		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		202		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		17	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		202		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		18	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		202		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		19	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		202		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		20	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		202		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		202		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		202		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		202		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		24	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		202		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		25	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		202		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		26	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		202		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		202		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		202		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		29	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	03	Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Prosentase Cakupan layanan penyediaan jaringan air minum	201	Review RISPAM, Master Plan Dan Inventarisasi Jaringan SPAM, database SPAM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Perencanaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	03	Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		201	Pengawasan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaika n SPAM	Jumlah Dokumen
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	03	Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		201	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum, Pembangunan Prasarana dan Sarana Penunjang PDAM, Pembuatan Instalasi Air Bersih Sederhana, Pembangunan IPA (Sei Maya, Rawasari, bengawan, Indulung) , PIP Jaringan Distribusi Air minum (zona kampung satu, persemaian, kampung bugis, juata Laut), Pengadaan sambungan rumah, pengadaan dan pemasangan jaringan distribusi air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kapasitas Produksi (Liter /detik), panjang Pipa distribusi (meter) (indikator baru)	03	Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan	Kapasitas Produksi (Liter /detik), panjang Pipa distribusi (meter)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		201		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		04	Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	03	Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		201	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Optimalisasi IPA Kampung Satu, Optimalisasi Kampung Bugis, Optimalisasi IPA Persemaian, Optimalisasi Ipa Juata laut, Penambahan Jaringan listrik IPA Persemaian, juata laut, bengawan, Pantai Amal, rawasari) , Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		05	Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan	Panjang pipa distribusi yang terpasang (meter)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		201		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		06	Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI																
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	03	Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		201	Pengadaan tanah resevoar, pembangunan resevoar, Pengadaan booster Pump, Pengembangan Sistem Distribusi Air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		07	Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan	Luas Pengadaan Tanah (Meter2), Jumlah Titik ,
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		201		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		08	Perbaikan SPAM di Kawasan Perdesaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		201		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		201		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		201		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	prosentase fasilitas penanganan sampah yang tersedia (indikator baru)	201		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana persampahan yang terbangun (indikator baru)	04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		201		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		201		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		06	Penyediaan Sarana Persampahan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		201		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		201		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	05	Pogram Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		201		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pertumbuhan penduduk yang terlayani sanitasi	201		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan air limbah yang terbangun, Jumlah pengelolaan air limbah yang terpelihara,	02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	05	Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		201	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Jumlah IPAL yang terbangun
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	05	Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		201	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		04	Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		201		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		05	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		201		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		06	Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		201		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		201		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		201		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	05	Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		201	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah IPAL yang terpelihara
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	06	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pertumbuhan panjang drainase lingkungan	201	Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan drainase yang terbangun (m), Jumlah Saluran Drainase yang direhab	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		201		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		02	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		201		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		201		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		04	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	06	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		201	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong (Wilayah Utara), Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong (Wilayah Barat) , Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong (Wilayah Timur),	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Jumlah dokumen perencanaan drainase yang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		201		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	06	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		201	Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		201		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		201		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Saluran Drainase yang direhab
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	06	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		201	Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		201		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		02	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		201		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		201		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		04	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	06	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	prosentase drainase kota yang tersedia dan terpelihara	201	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Drainase skala kawasan dan kota (meter)	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	panjang drainase yang terbangun
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		201		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	panjang drainase yang ditingkatkan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		201		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	panjang drainase yang direhabilitasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		201		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		201		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	07		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Prosentase jalan lingkungan yang ditingkatkan	201	Perencanaan Jalan lingkungan, Peningkatan jalan Lingkungan kecamatan Tarakan Barat, Peningkatan jalan Lingkungan kecamatan Tarakan Timur, Peningkatan jalan Lingkungan kecamatan Tarakan Tengah, Peningkatan jalan Lingkungan kecamatan Tarakan Utara	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jalan lingkungan yang ditingkatkan (m)	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	panjang jalan Lingkungan yang terbangun (meter)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	07		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		201		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota		02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	07		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		201		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota		03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	07		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		201		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota		04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	08	Program perencanaan tata ruang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yang tertata	201	Penyelenggaran Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Lingkungan, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW, Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah masyarakat yang mengurus ijin mendirikan bangunan	01	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Pengendalian & Penertiban Bangunan yang belum ber-IMB dan ber-SLF (%), Jumlah Perda, Jumlah Rapat Koordinasi TKPRD
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	08	Program pembangunan dan penyediaan fasilitas umum	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		201	Pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum, pembangunan sarana dan prasarana instansi vertikal, rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan keciptakaryaan, Pengembangan masjid raya	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung yang terbangun dan terpelihara (indikator awal Persentase fasilitas umum yang memadai)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		201		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Tersedianya pedoman HSBGN (indikatorr baru)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		201		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		201		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		201		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		06	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		201		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		07	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan tingkat Kabupaten/Kota	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		201		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		08	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif Kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		201		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		09	Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		201		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		10	Pendaftaran Hurtuf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		201		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		11	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		201		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		201		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		201		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		201		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		201		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		05	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		201		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	Program pembangunan jalan dan jembatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		201	Perencanaan Pembangunan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	jumlah dokumen perencanaan (Dok)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		201		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		02	Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Panjang Jalan Perluas wilayah (km/km2) (indikator baru)	201		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang terbangun dan terpelihara (indikator awal panjang jalan terbangun dan panjang jalan yang terpelihara)	03	Pengelolaan Leger Jalan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	Program pembangunan jalan dan jembatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		201	Perencanaan Pembangunan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	jumlah dokumen perencanaan (Dok)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	Program pembangunan jalan dan jembatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		201	Pembangunan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan (Km)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		201	Peningkatan jalan Nasional; Peningkatan jalan kota Tarakan Tengah;Peningkatan jalan kota Tarakan Barat; Peningkatan jalan kota Tarakan Utara; Peningkatan jalan kota Tarakan Timur ; Penunjang jalan dan jembatan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan Berhotmix (Km)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		201		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan Berhotmix (Km)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		201		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		08	Rekonstruksi Jalan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		201	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		09	Rehabilitasi Jalan	Ruas jalan yang terpelihara
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		201	Peningkatan jalan Nasional; Peningkatan jalan kota Tarakan Tengah;Peningkatan jalan kota Tarakan Barat; Peningkatan jalan kota Tarakan Utara; Peningkatan jalan kota Tarakan Timur ; Penunjang jalan dan jembatan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan Berhotmix (Km)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		201		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan Berhotmix (Km)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	Program pembangunan jalan dan jembatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		201	Pembangunan Jembatan; Perencanaan pembangunan jembatan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		12	Pembangunan Jembatan	panjang jembatan yang terbangun (Buah)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		201		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		13	Pembangunan Flyover	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		201		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		14	Pembangunan Underpass	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		201		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		15	Pembangunan Terowongan/Tunnel	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		201		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		16	Penggantian Jembatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		201		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		17	Pelebaran Jembatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		201	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		18	Rehabilitasi Jembatan	Ruas jalan yang terpelihara
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		201	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Ruas jalan yang terpelihara
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		201	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Ruas jalan yang terpelihara
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		201		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		201	Pendidikan dan Pelatihan tenaga jasa konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah pelatihan jasa konstruksi yang dilaksanakan (indikator baru)	01	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) pelatihan tenaga terampil konstruksi	Jumlah tenaga jasa konstruksi yang terlatih
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		201		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		02	Penyiapan Intsruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		201		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		03	Penyiapan SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		201		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		201		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		05	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		201		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		201		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		201		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		202	Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Layanan informasi jasa konstruksi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		202	Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah perangkat pendukung
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		202	Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	jumlah peserta pelatihan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		202	Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		04	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		202	Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		05	Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pembinaan jasa konstruksi	202	Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase tersedianya layanan informasi jasa konstruksi (indikator baru)	06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		202	Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		202	Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		202	Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		09	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		202	Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		10	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		202	Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		11	Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		203	Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM) Pembinaan Jasa konstruksi	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Prosentase jasa konstruksi yang mendapat ijin ((indikator baru)	01	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		203		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)		02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah kegiatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		203		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)		03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	jumlah pembinaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		203		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)		04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait Iujk Nasional	jumlah pembinaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		203		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)		05	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah diterbitkan	Jumlah evaluasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		204		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan izin usaha jasa konstruksi yang terfaksana (indikator baru)	01	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	jumlah dokumen
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		204		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		02	Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	jumlah bimbingan teknis
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		204	Pembinaan dan pengawasan izin usaha jasa konstruksi	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Sosialisasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	program perencanaan tata ruang, Program Pemanfaatan ruang, Program pengendalian pemanfaatan ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		201	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah; Penetapan Kebijakan Tentang RTRW, RDTRK, dan RTRK	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota		01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	program perencanaan tata ruang, Program Pemanfaatan ruang, Program pengendalian pemanfaatan ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		201	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan; Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL, Monitoring evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang. Survey dan pemetaan	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota		02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	program perencanaan tata ruang, Program pengendalian pemanfaatan ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		201	Penetapan Perwali Tentang RTBL, penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota		03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	program perencanaan tata ruang,Program pengendalian pemanfaatan ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		201	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang, pengawasan pemanfaatan ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota		04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah sosialisasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
URUSAN		BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13		PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	Indikator program		KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	Indikator kegiatan	SUB KEGIATAN		Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	prosentase dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan, prosentase ketaan terhadap tata ruang, prosentase pengawasana pemanfaatan ruang	202		Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		202		Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		202		Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan	Ketaatan RTRW
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	program perencanaan tata ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		203	Penyusunan rencana teknis ruang kawasan, penyusunan Rencana Tata bangunan dan lingkungan (RTBL)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	program perencanaan tata ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		203	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		02	Sistem Informasi Penataan Ruang	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	program perencanaan tata ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		204	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	program perencanaan tata ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		204	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	program perencanaan tata ruang, Program pengendalian pemanfaatan ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		204	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		204		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH
(BA PP ED A)
Jl. P. Irian No.12 Ket. Kampung Satu-Skip, Kec. Tarakan Tengah, Telp : (05.51) 33910
TARAKAN - 77122

BERITA ACARA
VERIFIKASI PEMETAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 SESUAI NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

Pada hari ini, Senin tanggal 8 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di ruang rapat kantor Bappeda Kata Tarakan telah dilaksanakan verifikasi pemetaan Rencana Kerja Dinas Pariwisata tahun 2021 sesuai nomenklatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Setelah dilakukan diskusi dan penelaahan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan maka disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan dalam Renja yang relevan dengan sub kegiatarr/kegiatan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berjumlah 26 (Dua Puluh Enam) sub kegiatan
2. Jumlah kegiatan yang diusulkan menjadi sub kegiatan baru berjumlah 0 kegiatan
3. Rincian kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk menjadi bahan masukan dalam rangka penyampaian usulan pemutakhiran nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah kepada Kementerian/Lembaga terkait.

Kepala Dinas Pariwisata,

AGUSTINA. S.E. M.H.
PEMBINA TK. I
NIP. 196808181999032006

Tim Pembahas

1. Rusmiati, S.T .....
2. Azis Baderuddin, S.S .....
3. Fitriani. R, S.Kom .....
4. Ratna Kumalasari, S.T. .....
5. Ririn Wahyu Ambarsari,S.E.,M.AK .....

Kepala Bappeda Kata Tarakan

H. Suparlan, ST, MT
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 196402121998031004

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

Tabel
Program Kegiatan Pemetaan Permendagri No 90
Dinas Pariwisata

NO	Kode				Urusan	Bidang Urusan	Program dan Kegiatan Permendagri 13	Indikator Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Program Permendagri 90	Indikator Program (*outcome*)	Kegiatan Permendagri 90	Indikator Kegiatan (*output*)		Sub Kegiatan Permendagri 90	Indikator Sub Kegiatan (*output*)	Bidang Urusan	Urusan	Kode				
1	2	12	01		Pariwisata	Pilihan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya dokumen renstra dan renja yang disusun	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun	Pariwisata	Pilihan	2	18	01	1.01	01
2											Administrasi Umum	Persentase terlaksananya administrasi umum	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim dan SPJ dinas yang dikelola	Pariwisata	Pilihan	2	18	01	1.03	01
3	2	12	01	01	Pariwisata	Pilihan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim dan SPJ dinas yang dikelola					2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pariwisata	Pilihan	2	18	01	1.03	12
4	2	12	01	02	Pariwisata	Pilihan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Pariwisata	Pilihan	2	18	01	1.03	30
5	2	12	01	06	Pariwisata	Pilihan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan					4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	Pariwisata	Pilihan	2	18	01	1.02	01
6	2	12	01	07	Pariwisata	Pilihan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan					5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan administrasi gaji dan tunjangan ASN	Pariwisata	Pilihan	2	18	01	1.02	05
7													6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	Pariwisata	Pilihan	2	18	01	1.03	01
8	2	12	01	08	Pariwisata	Pilihan	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor					7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan kerja yang terpelihara	Pariwisata	Pilihan	2	18	01	1.03	09
9	2	12	01	09	Pariwisata	Pilihan	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan kerja yang terpelihara					8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	Pariwisata	Pilihan	2	18	01	1.03	10
10	2	12	01	10	Pariwisata	Pilihan	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan					9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	Pariwisata	Pilihan	2	12	01	1.03	11
11	2	12	01	11	Pariwisata	Pilihan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan					10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Pariwisata	Pilihan	2	12	01	1.03	13
12	2	12	01	13	Pariwisata	Pilihan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan					11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bacaan dan publikasi yang disediakan	Pariwisata	Pilihan	2	12	01	1.03	15
	2	12	01	15	Pariwisata	Pilihan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	jumlah bacaan dan publikasi yang disediakan					12	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah makanan dan minuman yang di sediakan	Pariwisata	Pilihan	2	12	01	1.03	17
	2	12	01	17	Pariwisata	Pilihan	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah makanan dan minuman yang di sediakan					13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsltasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pariwisata	Pilihan	2	18	01	1.03	18
	2	12	01	18	Pariwisata	Pilihan	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsltasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					14	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Negeri	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Negeri	Pariwisata	Pilihan	2	18	01	1.03	20
					Pariwisata	Pilihan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Unit Kerja Yang Mendapatkan Layanan Sarana dan Prasaran Aparatur										2	18	01	1.04	04
					Pariwisata	Pilihan	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase terlaksananya pakaian khusus hari-hari tertentu	1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	Pariwisata	Pilihan					
	2	12	05		Pariwisata	Pilihan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya										5	18	01	1.04	09
	2	12	05	01	Pariwisata	Pilihan	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase terlaksananya peserta pendidikan dan pelatihan formal	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	Pariwisata	Pilihan	3	26	02		
					Pariwisata	Pilihan	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase terlaksananya Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata								3	26	02	2.01	
					Pariwisata	Pilihan	Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan	Jumlah sarana prasarana ODTW yang terpelihara dan ditingkatkan			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase terpeliharanya Sarana dan Prasarana Objek dan Daya Tarik Wisata yang dikelola	1	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana ODTW yang terpelihara dan ditingkatkan	Pariwisata	Pilihan	3	26	02	2.01	03
					Pariwisata	Pilihan	Peningkatan Pembangunan sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah potensi obyek wisata baru yg dibangun & dikembangkan (wisata kuliner, w. buatan, w. alam, w. sejarah / budaya)					2	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah potensi obyek wisata baru yg dibangun & dikembangkan (wisata kuliner, w. buatan, w. alam, w. sejarah / budaya)	Pariwisata	Pilihan	3	26	02	2.04	01
					Pariwisata	Pilihan	Penertiban Administrasi dan Administrasi Teknis Usaha Pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yang direview			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	1	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Usaha Pariwisata yang dibina/ditertibkan	Pariwisata	Pilihan	3	26	02	2.02	04
					Pariwisata	Pilihan	Peningkatan Pembangunan sarana dan Prasarana Pariwisata (Embung Persemaian)	Jumlah sarana prasarana yang terpelihara dan ditingkatkan			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan sarana dan Prasarana Pariwisata	2	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah potensi obyek wisata baru yg dibangun & dikembangkan (wisata kuliner, w. buatan, w. alam, w. sejarah / budaya)	Pariwisata	Pilihan	3	26	02	2.02	04
					Pariwisata	Pilihan	Peningkatan Pembangunan sarana dan Prasarana Pariwisata (Agrowisata)	Jumlah sarana prasarana yang terpelihara dan ditingkatkan			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan sarana dan Prasarana Pariwisata		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah potensi obyek wisata baru yg dibangun & dikembangkan (wisata kuliner, w. buatan, w. alam, w. sejarah / budaya)	Pariwisata	Pilihan	3	26	03		
	2	12	15		Pariwisata	Pilihan	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dipromosikan	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Terlaksananya pemasaran pariwisata								3	26	03	2.01	03
					Pariwisata	Pilihan	Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Objek Pariwisata	Jumlah dokumen kajian terkait pemasaran dan promosi pariwisata			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen kajian terkait pemasaran dan promosi pariwisata	Pariwisata	Pilihan	3	26	03	2.01	03
					Pariwisata	Pilihan	Peningkatan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran	Jumlah jenis media promosi					2	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah jenis media promosi	Pariwisata	Pilihan	3	26	03	2.01	02
					Pariwisata	Pilihan	Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata	Jumlah kerjasama/sinkronisasi kepariwisataan dengan Dispar provinsi dan kementerian pariwisata					3	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama/sinkronisasi kepariwisataan dengan Dispar provinsi, kementerian pariwisata maupun stakeholder kepariwisataan yang lain	Pariwisata	Pilihan	3	26	03	2.01	
					Pariwisata	Pilihan	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	Jumlah partisipasi promosi						Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah jenis media promosi	Pariwisata	Pilihan	3	26	03	2.01	02
					Pariwisata	Pilihan	Pengembangan Statistik Kepariwisataan	Tersedianya Data Statistik Perkembangan Pariwisata						Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	Tersedianya Data Statistik Perkembangan Pariwisata	Pariwisata	Pilihan	3	26	05	2.01	01
									Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreati												

NO	Kode				Urusan	Bidang Urusan	Program dan Kegiatan Permendagri 13	Indikator Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Program Permendagri 90	Indikator Program (*outcome*)	Kegiatan Permendagri 90	Indikator Kegiatan (*output*)	Sub Kegiatan Permendagri 90		Indikator Sub Kegiatan (*output*)	Bidang Urusan	Urusan	Kode				
					Pariwisata	Pilihan	Pelatihan Pemandu	Jumlah Pelatihan			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Peserta Pelatihan	Pariwisata	Pilihan	3	26	05		
					Pariwisata	Pilihan	Program pengembangan Kemitraan	Cakupan binaan pelaku usaha pariwisata					2	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Peserta Pelatihan	Pariwisata	Pilihan	3	26	05	2.01	03
					Pariwisata	Pilihan	Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama dengan Lembaga Lainnya	Jumlah SDM yang dilatih					3	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Kelompok Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi	Pariwisata	Pilihan	3	26	05	2.01	05
					Pariwisata	Pilihan	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	Jumlah kelompok yang terfasilitasi						Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah tenaga kerja bidang pariwisata yang tersertifikasi	Pariwisata	Pilihan	3	26	05	2.01	01
					Pariwisata	Pilihan	Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Jumlah Pembinaan					4	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Ekonomi Kreatif yang terbina	Pariwisata	Pilihan	3	26	05	2.01	05
					Pariwisata	Pilihan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah kelompok yang terbina	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Terlaksananya pemasaran pariwisata	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah jenis media promosi	Pariwisata	Pilihan	3	26	03	2.01	02
					Pariwisata	Pilihan	Program Peningkatan Pelayanan dan Administrasi Perizinan	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Administrasi Perizinan										3	26	03	2.04	01
					Pariwisata	Pilihan	Penertiban Administrasi dan Persyaratan Perizinan	Jumlah usaha pariwisata yang direview	Tidak terakomodir di urusan pariwisata di Permendagri 90													

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TARAKAN

(B A P P E D A)

Jalan P. Irian No. 13 Tarakan Telp.(0551) 33910, Kota Tarakan – 77121

BERITA ACARA
VERIFIKASI PEMETAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
SESUAI NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di ruang rapat kantor Bappeda Kota Tarakan telah dilaksanakan verifikasi pemetaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 sesuai nomenklatur dalam Permendagri Nomo 90 Tahun 2019.

Setelah dilakukan diskusi dan penelaahan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan maka disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan dalam Renja yang relevan dengan sub kegiatan/kegiatan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berjumlah 19 Program dan 47 kegiatan.
2. Jumlah kegiatan yang diusulkan menjadi sub kegiatan baru berjumlah 8 Program 19 Kegiatan dan 55 Sub Kegiatan.
3. Rincian kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk menjadi bahan masukan dalam rangka penyampaian usulan pemutakhiran nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah kepada Kementerian/Lembaga terkait.

ASISTEN PEREKONOMIAN
DAN ADM. PEMBANGUNAN,

Ir. H. JAMALUDIN
Nip. 196604211995031004

TIM PEMBAHAS,

1. Wiwik Nuraini, SE .....
2. Try Handoko, S.Ikom .....
3. Hj. Kasbariah, SH, MH. .....
4. Muhammadong,S.S,M.Si .....

KEPALA BAPPEDA KOTA TARAKAN,

H. SUPARLAN, ST, MT
Pembina Utama Muda
Nip. 196421121998031004

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TARAKAN

PERMENDAGRI NOMO 13/RPJMD/RENSTRA/RKP/RENJA										PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URUSAN	BIDANG URUSAN	KODE					
4	01					Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan											**Unsur Pendukung Urusan Pemerintah**	4					
4	01	03					Sekretariat Daerah									**SEKRETARIAT DAERAH**		4	01				
4	01	03	01					Sekretariat Daerah						**Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah**	Persentase Urusan Pemerintah Daerah			4	01	01			
4	01	03	01	01				**Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**Administrasi Umum**	Persentase Adminitrasi Umum					4	01	01	2	03	
4	01	03	01	01	01			Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Jasa Surat menyurat	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Jasa Surat menyurat							4	01	01	2	03	01
4	01	03	01	01	02			Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik							4	01	01	2	03	02
4	01	03	01	01	03			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor							4	01	01	2	03	03
4	01	03	01	01	06			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan dinas / operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan dinas / operasional							4	01	01	2	03	06
4	01	03	01	01	07			Penyediaan jasa administasi keuangan	Jumlah Penyediaan Jasa Adm. Keuangan	Penyediaan jasa administasi keuangan	Jumlah Penyediaan Jasa Adm. Keuangan							4	01	01	2	03	07
4	01	03	01	01	08			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan							4	01	01	2	03	08
4	01	03	01	01	10			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor							4	01	01	2	03	10
4	01	03	01	01	11			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan barang catakan dan penggadaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan barang catakan dan penggadaan							4	01	01	2	03	11
4	01	03	01	01	12			Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor							4	01	01	2	03	12
4	01	03	01	01	15			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							4	01	01	2	03	15

PERMENDAGRI NOMO 13/RPJMD/RENSTRA/RKP/RENJA										PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019														
KODE							URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URUSAN	BIDANG URUSAN	KODE					
4	01	03	01	01	17				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman							4	01	01	2	03	17
4	01	03	01	01	18				Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Jumlah Rapat - rapat Kooridnasi dan konsultasi keluar daerah	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Jumlah Rapat - rapat Kooridnasi dan konsultasi keluar daerah							4	01	01	2	03	18
4	01	03	01	01	19				Pendukung Penyelenggaraan admnistrasi Pemerintahan	Jumlah pendukung penyelenggaraan adm. Pemerintahan	Pengelolaan Rumah Tangga	Jumlah Pengelolaan Rumah Tangga							4	01	04	2	01	03
4	01	03	01	01	21				Penunjang Kantor Penghubung	Jumlah Penunjang Kantor Penghubung														
4	01	03	01	02					**Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		Pengadaan perlengkapan rumah jabatan dinas	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumjab Dinas							4	01	01	2	03	21
4	01	03	01	02	06				Pengadaan perlengkapan rumah jabatan dinas	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumjab Dinas														
4	01	03	01	02	07				Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor							4	01	01	2	03	22
4	01	03	01	02	20				Pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan	Jumlah Pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan	Pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan	Jumlah Pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan							4	01	01	2	03	26
4	01	03	01	02	22				Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor							4	01	01	2	03	28
4	01	03	01	02	24				Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional							4	01	01	2	03	30
4	01	03	01	02	27				Pemeliharaan rutin / berkala peralatan rumah jabatan / dinas	Jumlah Pemeliharaan rutin / berkala peralatan rumah jabatan / dinas	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan rumah jabatan / dinas	Jumlah Pemeliharaan rutin / berkala peralatan rumah jabatan / dinas							4	01	01	2	03	33
4	01	03	01	02	28				Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor							4	01	01	2	03	34
4	01	03	01	03					**Peningkatan Disiplin Aparatur**				**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya**	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya					4	01	01	2	04	
4	01	03	01	03	02				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya							4	01	01	2	04	02
4	01	03	01	06					**Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**				**Penataan Organisasi**	Persentase Penataan Organisasi					4	01	04	2	02	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021

PERMENDAGRI NOMO 13/RPJMD/RENSTRA/RKP/RENJA										PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019														
KODE							URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URUSAN	BIDANG URUSAN	KODE					
4	01	03	01	06	06				Penetapan Kinerja	Jumlah dok. Lap. Kinerja, IKU, PK dan Rencana Aksi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Kinerja dan Laporan Reformasi Birokrasi							4	01	04	2	02	02
4	01	03	01	16					**Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH**				**Pelaksanaan Administrasi Umum**	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum					4	01	04	2	01	
4	01	03	01	16	02				Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat pejabat negara/ depatemen/ lembaga pemerintahan non departemen Luar Negeri	Jumlah Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Jumlah Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian							4	01	04	2	01	01
													Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Protokol dan Komunikasi Pimpinan					4	01	04	2	03	
4	01	03	01	16	07				Fasilitasi Pelayanan KDH/WKDH	Jumlah Fasilitasi Pelayanan KDH/WKDH	Fasilitasi keprotokolan	Jumlah Fasilitasi Keprotokolan							4	01	04	2	03	01
																		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5					
																	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		5	05				
															Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Penelitian dan Pengembangan Daerah			5	05	02			
													Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan					5	05	02	2	01	
4	01	03	01	16	08				Fasilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen LKPJ dan LPP	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah							5	05	02	2	01	01
																		Unsur Pendukung Urusan Pemerintah	4					
																	SEKRETARIAT DAERAH		4	01				
4	01	03	01	16					**Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**						**Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	Persentase Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			4	01	02			

PERMENDAGRI NOMO 13/RPJMD/RENSTRA/RKP/RENJA										PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019														
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URUSAN	BIDANG URUSAN	KODE					
												Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					4	01	02	2	02	
4	01	03	01	16	22			Verifikasi Monitoring dan Evaluasi Bansos dan Hibah	Jumlah Dokumen Verifikasi dan Monev	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Evaluasi Capaian Kinerja Kesejahteraan Sosial							4	01	02	2	02	02
														Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			4	01	03			
3	03	4	01	3	16			**Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)**				**Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	Persentase Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					4	01	03	2	04	
3	03	4	01	3	16	22		Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Pengendalian dan Distribusi Perekonomian							4	01	03	2	04	02
																	Unsur Kewilayahan	7					
																KECAMATAN		7	01				
														Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			7	01	05			
1	05	4	01	3	17			**Pengembangan Wawasan Kebangsaan**				**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah					7	01	05	2	01	
1	05	4	01	3	17	04		Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Rasa Nasionalisme	Jumlah Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Rasa Nasionalisme	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika Serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika Serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							7	01	05	2	01	01
																	Unsur Pendukung Urusan Pemerintah	4					
																SEKRETARIAT DAERAH		4	01				
														Administrasi Umum	Persentase Administrasi Umum			4	01	04			

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021

PERMENDAGRI NOMO 13/RPJMD/RENSTRA/RKP/RENJA										PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019														
KODE							URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URUSAN	BIDANG URUSAN	KODE					
2	10	4	01	3	18				**Kerjasama informasi dengan mas media**				**Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Persentase Protokol dan Komunikasi Pimpinan					4	01	04	2	03	
4	01	03	01	18	02				Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	jumlah penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Pendokumentasian Tugas Pimpinan							4	01	04	2	03	03
4	01	03	01	20					**Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**						**Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	Persentase Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			4	01	02			
													Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	Persentase Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah					4	01	02	2	03	
4	01	03	01	20	02				Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah	jumlah penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Fasilitasi Bantuan Hukum							4	01	02	2	03	02
4	01	03	01	20	16				Penyelesaian kasus - kasus hukum	Jumlah penyelesaian kasus - kasus hukum														
4	01	03	01	25					**Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah**				**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah					4	01	02	2	04	
4	01	03	01	25	01				Fasilitasi pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaaan Pelayanan Publik	Jumlah kesepakatan bersama dan Perjanjian Kerjasama (PKS)	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri							4	01	02	2	04	01
4	01	03	01	26					**Penataan Peraturan Perundang-undangan**				**Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah**	Persentase Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah					4	01	02	2	03	
4	01	03	01	26	03				Legislasi rancangan peraturan perundang - undangan	Jumlah Legislasi Rancangan Per UU	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum							4	01	02	2	03	01
															Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Perekonomian dan Pembangunan			4	01	03			
									Pendukung Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan				**Administrasi Pembangunan**	Persentase Administrasi Pembangunan					4	01	03	2	02	
4	01	03	01	28	02				Koordinasi pengendalian kegiatan pembangunan	Jumlah Dokumen laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan							4	01	03	2	02	02
															Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			4	01	02			

PERMENDAGRI NOMO 13/RPJMD/RENSTRA/RKP/RENJA										PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019														
KODE							URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URUSAN	BIDANG URUSAN	KODE					
													Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Administrasi Pemerintahan					4	01	02	2	01	
4	01	03	01	28	04				Penguatan Kelembagaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD)	Jumlah FKPD yang difasilitasi	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah							4	01	02	2	01	03
															Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			4	01	02			
4	01	03	01	28					**Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan**				**Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Persentase Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					4	01	02	2	02	
4	01	03	01	28	08				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monev dan Pelaporan	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyakat							4	01	02	2	02	03
4	01	03	01	30					**Pembinaan Keagamaan**															
4	01	03	01	30	01				Pelaksanaan STQ/MTQ	Jumlah kegiatan STQ / MTQ														
4	01	03	01	30	04				Pembinaan pengelolaan rumah ibadah	Jumlah Pembinaan Pengelolaan Rumah Ibadah	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual							4	01	02	2	02	01
4	01	03	01	30	06				Pembinaan dan bimbingan mental spritual masyarakat	Jumlah pembinaan dan Bimtal spritual masyarakat														
															Administrasi Umum	Persentase Administrasi Umum			4	01	04			
04	01	03	01	31					**Penguatan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah**				**Penataan Organisasi**	Persentase Penataan Organisasi					4	01	04	2	02	
4	01	03	01	31	04				Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan.	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan, ABK dan Evjab	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan, ABK dan Evjab							4	01	04	2	02	01
															Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Perekonomian dan Pembangunan			4	01	03			
													Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa					4	01	03	2	03	
									Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan	Jumlah Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaaan	Pengelolaan Layanan Barang dan Jasa	Jumlah Pengelolaan Layanan Barang dan Jasa							4	01	03	2	03	01
																		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5					
																	PERENCANAAN		5	01				

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021

PERMENDAGRI NOMO 13/RPJMD/RENSTRA/RKP/RENJA										PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URUSAN	BIDANG URUSAN	KODE					
														Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			5	01	02			
4	01	03	01	31	06							**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah**	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah					5	01	02	2	03	
4	01	03	01	31	08			Koordinasi & Fasilitasi Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah	Jumlah Koord dan Fasilitasi Penyus Lap. SPM Perangkat Daerah	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM	Jumlah Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM							5	01	02	2	03	02
																	Unsur Pendukung Urusan Pemerintah	4					
																SEKRETARIAT DAERAH		4	01				
														Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Perekonomian dan Pembangunan			4	01	03			
4	**01**	**03**	**01**	**37**				**Pengembangan Badan Usaha**				**Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	Persentase Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					4	01	03	2	01	
4	01	03	01	37	01			Pembinaan dan Pengembangan BUMD	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan BUMD	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD							4	01	03	2	01	01
																	Unsur Kewilayahan	7					
																KECAMATAN		7	01				
														Penyenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			7	01	02			
4	**01**	**03**	**01**	**40**				**Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**				**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					7	01	02	2	01	
4	01	03	01	40	28			Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kecamatan yang mengikuti Lomba Camat Berprestasi	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							7	01	02	2	01	02
																	Unsur Pendukung Urusan Pemerintah	4					

PERMENDAGRI NOMO 13/RPJMD/RENSTRA/RKP/RENJA										PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019														
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URUSAN	BIDANG URUSAN	KODE					
																SEKRETARIAT DAERAH		4	01				
														Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Perekonomian dan Pembangunan			4	01	03			
4	01	03	01	47				**Peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah**				**Pemantauan Kebijakan terkait Sumber Daya Alam**	Persentase Pemantauan Kebijakan terkait Sumber Daya Alam					4	01	03	2	04	
4	01	03	01	47	01			Pengembangan Peningkatan Potensi Unggulan Daerah	Jumlah keikutsertaan Pemerintah Kota Tarakan pada kegiatan Apeksi dan city Expo	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan							4	01	03	2	04	01
												Pemantauan Kebijakan terkait Sumber Daya Alam	Persentase Pemantauan Kebijakan terkait Sumber Daya Alam					4	01	03	2	04	
4	01	03	01	47	04			Penyusunan Kebijakan bidang Ekonomi	Jumlah dokumen kebijakan bidang ekonomi	Penyusunan Kebijakan Bidang Ekonomi	Jumlah Penyusunan Kebijakan Bidang Ekonomi							4	01	03	2	04	03

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TARAKAN
(B A P P E D A)
Jalan P. Irian No. 13 Tarakan Telp.(0551) 33910, Kota Tarakan – 77121

BERITA ACARA
VERIFIKASI PEMETAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
SESUAI NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

Pada hari ini, Rabu tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di ruang rapat kantor Bappeda Kota Tarakan telah dilaksanakan verifikasi pemetaan Rencana Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 sesuai nomenklatur dalam Permendagri Nomo 90 Tahun 2019.

Setelah dilakukan diskusi dan penelaahan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan maka disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan dalam Renja yang relevan dengan sub kegiatan/kegiatan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berjumlah 13 kegiatan
2. Jumlah kegiatan yang diusulkan menjadi sub kegiatan baru berjumlah 0 kegiatan
3. Rincian kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk menjadi bahan masukan dalam rangka penyampaian usulan pemutakhiran nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah kepada Kementerian/Lembaga terkait.

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah,

PEMERINTAH KOTA TARAKAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Hery Purwono, S.STP
Pembina TK.I
NIP.19791108 199810 1 003

Tim Pembahas

1. Sutini, S.IP .....
2. Sri Sumbawati, SH .....
3. Rinny Anggriany, SE .....
4. Hj. Kasbariah, SH,MH .....
5. H. Wiranto,S.Pd, M.Pd .....

Kepala Bappeda Kota Tarakan,

PEMERINTAH KOTA TARAKAN BAPPEDA

H. SUPARLAN, ST,MT
Pembina Utama Muda
NIP.196402[illegible]2 199803 1 004

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

TABEL KERJA

PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA TARAKAN

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	**01**	**21**		**Pemerintahan**	**Perpustakaan**	**Progran Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	**Persentase Pengunjung Perpustakaan Pertahun**					**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG DI BINA**	**PERPUSTAKAAN**	**PEMERINTAHAN**	**2**	**23**	**02**		
1	01	21	01			Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Jumlah pengunjung, jumlah aplikasi dan jumlah kegiatan yang diadakan			**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pembinaan yang Dilakukan**					**2**	**23**	**02**	**2.01**	
1	01	21	02			Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	Jumlah aplikasi yang diadakan							2	23	02	2.01	01
1	01	21	03			Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Jumlah peserta pelatihan/ workshop pengelolaan perpustakaan, jumlah perpustakaan yang di bina	Pengembangan perpustakaan di tingkat kabupaten/kota	Jumlah inovasi yang dilakukan							2	23	02	2.01	02
1	01	21	04			Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan	Jumlah rapat koordinasi yang dihadiri	Pengembangan kekhasan koleksi perpustakaan daerah tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah pengadaan koleksi daerah							2	23	02	2.01	03
1	01	21	05			Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah	Jumlah paket bantuan yang diadakan	Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kab/ kota sesuai standar nasional perpustakanan	Jumlah perpustakaan sekolah (SD dan SMP) yang di bina							2	23	02	2.01	04
1	01	21	06			Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca	Jumlah peserta rakor perpustakaan se kota Tarakan	Pembinaan perpustakaan khusus tingkat kabupaten/kota	Jumlah perpustakaan khusus yang di bina							2	23	02	2.01	05
1	01	21	07			Perencanaan dan penyusunan program budaya baca	Jumlah rakor pengelolaan perpustakaan	Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah pengelola perpustakaan yang mengikuti pelatihan							2	23	02	2.01	06

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	01	21	08			Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Jumlah media yang di pakai untuk sosialisasi dan publikasi	Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/kota	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan							2	23	02	2.01	07
1	01	21	09			Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Jumlah penyediaan bahan pustaka	Pengembangan bahan pustaka	Jumlah pengadaan bahan pustaka							2	23	02	2.01	08
1	01	21	10			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah perpustakaan / taman bacaan yang di monitoring dan di evaluasi	Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	Jumlah bahan pustaka yang dikelola							2	23	02	2.01	09
1	01	21	11			Pemeliharaan buku dan perlengkapan perpustakaan daerah	Jumlah bahan pustaka yang diperbaiki (perbaikan buku)	Penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan yang di buat							2	23	02	2.01	10
1	01	21	12			Pengamanan penunjang prasarana perpustakaan	Jumlah penunjang prasarana yang diamankan			**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan**					**2**	**23**	**02**	**2.02**	
1	01	21	13			Pembinaan perpustakaan daerah	Jumlah kegiatan pembinaan perpustakaan daerah yang dilaksanakan	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan							2	23	02	2.02	01
1	**24**	**15**				**Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan**	**Persentase Arsip yang Terintegrasi Sistem Informasi**	Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah taman bacaan yang di bangun dan di pelihara							2	23	02	2.02	02
1	24	15	01			Pembangunan database informasi kearsipan	Jumlah simpul/jaringan yang tersedia	Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca	Jumlah penghargaan yang diberikan							2	23	02	2.02	03
1	24	15	02			Pengumpulan data	Jumlah berkas yang di input	Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	Jumlah kegiatan inklusi sosial yang dilaksanakan							2	23	02	2.02	04
1	24	15	03			Pengklasifikasi data	Jumlah kegiatan pengklasifikasi data yang dilaksanakan	Pemilihan duta baca tingkat daerah provinsi	Jumlah kegiatan pemilihan duta baca yang dilaksanakan							2	23	02	2.02	05
1	24	15	04			Penyusunan sistem katalog data	Jumlah kegiatan penyusunan sistem katalog data yang dilaksanakan					**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**PERSENTASE NASKAH KUNO YANG DILESTARIKAN**			**2**	**23**	**03**		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	24	15	05			Pengadaan sarana penyimpanan	Jumlah sarana penyimpanan yang diadakan			**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Naskah Kuno yang Dilestarikan**					**2**	**23**	**03**	**2.01**	
1	24	15	06			Kajian sistem administrasi kearsipan	Jumlah pedoman/TND penyelenggaraan kearsipan yang di buat	Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno	Jumlah naskah kuno yang diserahkan oleh masyarakat							2	23	03	2.01	01
1	24	15	07			Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan	Jumlah kegiatan pemeliharaan peralatan jaringan informasi kersipan yang dilaksanakan	Pengembangan, pengolahan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah naskah kuno yang dialihmedia							2	23	03	2.01	02
1	**24**	**16**				**Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip**	**Persentase Dokumen Arsip yang Terjaga/ Terselamatkan**			**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota**	**Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan**					**2**	**23**	**03**	**2.02**	
1	24	16	01			Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Seleksi dan pengadaan koleksi budaya etnis nusantara	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang diadakan							2	23	03	2.02	01
1	24	16	02			Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah urusan JRA yang di buat	Pengolahan dan penyiangan koleksi budaya etnis nusantara	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang di olah							2	23	03	2.02	02
1	24	16	03			Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Jumlah dokumen/arsip daerah yang dialihmedia					**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**PERSENTASE PD YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN ARSIP SECARA BAKU**	**KEARSIPAN**	**PEMERINTAHAN**	**2**	**24**	**02**		
1	24	16	04			Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data	Jumlah program aplikasi penyimpanan data yg di buat			**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Arsip Dinamis Daerah yang Dikelola**					**2**	**24**	**02**	**2.01**	
1	**24**	**17**				**Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan**	**Persentase Sarana Kearsipan yang Terpelihara**	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Jumlah arsip dinamis yang diciptakan dan digunakan							2	24	02	2.01	01

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	24	17	01			Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah ruang/gedung yang di fumigasi	Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	Jumlah kegiatan pemeliharaan dan penyusutan arsip							2	24	02	2.01	02
1	24	17	02			Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah			**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Arsip Statis Daerah yang Dikelola**					**2**	**24**	**02**	**2.02**	
1	24	17	03			Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	Jumlah PD yang dimonitoring dan dievaluasi	Pengumpulan dan penyampaian salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada ANRI	Jumlah kegiatan pengumpulan dan penyampaian salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada ANRI							2	24	02	2.02	01
1	**24**	**18**				**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi**	**Persentase PD yang Mengelola Arsip Secara Baku**	Akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis	Jumlah kegiatan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis							2	24	02	2.02	02
1	24	18	01			Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Jumlah perundang-undangan yang disusun			**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah PD yang Masuk dalam Simpul Jaringan Informasi Kerasipan Nasional**					**2**	**24**	**02**	**2.03**	
1	24	18	02			Penyediaan sarana layanan infromasi arsip	Jumlah sarana layanan informasi yang tersedia	Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	Jumlah informasi, akses dan layanan kearsipan yang dilakukan melalui JIKN							2	24	02	2.03	01
1	24	18	03			Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintahan/swasta	Jumlah kegiatan sosialisasi/ workshop yang dilaksanakan	Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan pembinaan, pendampingan dan evaluasi yang dilakukan							2	24	02	2.03	02
												PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	**PERSENTASE ARSIP YANG TERLINDUNGI DAN TERSELAMATKAN**			**2**	**24**	**03**		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
										Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	**Jumlah Kegiatan Pemusnahan Arsip yang Dilakukan Dilingkungan Pemerintah Daerah Kab./Kota yang Memiliki Retensi Dibawah 10 Tahun**					**2**	**24**	**03**	**2.01**	
								Penilaian dan penetapan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun	Jumlah kegiatan penilaian dan penetapan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun							2	24	03	2.01	01
								Pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun	Jumlah kegiatan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun							2	24	03	2.01	02
										Perlindungsn dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	**Jumlah Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip yang Dilakukan Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**					**2**	**24**	**03**	**2.02**	
								Evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana	Jumlah arsip yang di evakuasi dan diidentifikasi akibat bencana							2	24	03	2.02	01
								Pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana	Jumlah kegiatan Pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana							2	24	03	2.02	02

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
										Penyelamatan Arsip PD Kab/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	**Jumlah Arsip PD yang Diselamatkan**					**2**	**24**	**03**	**2.03**	
								Pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan PD kabupaten/kota	Jumlah kegiatan pendataan, daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip yang dilakukan bagi penggabungan PD							2	24	03	2.03	01
								Pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi pembubaran PD kabupaten/kota	Jumlah kegiatan pendataan, daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip yang dilakukan bagi pembubaran PD							2	24	03	2.03	02
								Pendampingan penyelamatan arsip bagi pemekaran daerah kecamatan	Jumlah kegiatan pendampingan dan penyelamatan yang dilakukan bagi pemekaran daerah kecamatan							2	24	03	2.03	03
								Pendampingan penyelamatan arsip bagi pemekaran desa/kelurahan	Jumlah kegiatan pendampingan dan penyelamatan yang dilakukan bagi pemekaran desa/kelurahan							2	24	03	2.03	04
										Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	**Jumlah Arsip Statis yang Diautentikasi dan Dialih Media**					**2**	**24**	**03**	**2.04**	

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
								Penilaian dan penetapan autentisitas arsip statis sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	Jumlah arsip statis yang dinilai dan diberi penetapan autentisitas							2	24	03	2.04	01
								Penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	Jumlah arsip alih media yang dinilai dan diberi penetapan							2	24	03	2.04	02
										Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	**Jumlah Kegiatan Pencarian Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang**					**2**	**24**	**03**	**2.05**	
								Penilaian dan penetapan autentisitas arsip statis yang dinyatakan hilang	Jumlah kegiatan penilaian dan penetapan autentisitas arsip statis yang dinyatakan hilang							2	24	03	2.05	01
								Evaluasi dan penetapan hasil alih media yang dinyatakan hilang	Jumlah kegiatan evaluasi dan penetapan hasil alih media yang dinyatakan hilang							2	24	03	2.05	02
								Penetapan dan pengumuman daftar pencarian arsip	Jumlah kegiatan penetapan dan pengumuman daftar pencarian arsip							2	24	03	2.05	03
												PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP	**PERSENTASE PENGGUNAAN ARSIP/ LAYANAN INFORMASI ARSIP**			**2**	**24**	**04**		
										Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	**Jumlah Berkas Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup**					**2**	**24**	**04**	**2.01**	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
								Penyusunan dan penetapan SOP penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Jumlah SOP yang diterapkan untuk penggunaan arsip yang bersifat tertutup							2	24	04	2.01	01
								Penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Jumlah pengguna arsip yang bersifat tertutup							2	24	04	2.01	02

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TARAKAN
(B A P P E D A)

Jalan P. Irian No. 13 Tarakan Telp.(0551) 33910, Kota Tarakan – 77121

BERITA ACARA
VERIFIKASI PEMETAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
SESUAI NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di ruang rapat kantor Bappeda Kota Tarakan telah dilaksanakan verifikasi pemetaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Tarakan Tahun 2021 sesuai nomenklatur dalam Permendagri Nomo 90 Tahun 2019.

Setelah dilakukan diskusi dan penelaahan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan maka disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan dalam Renja yang relevan dengan sub kegiatan/kegiatan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berjumlah 50 kegiatan
2. Jumlah kegiatan yang diusulkan menjadi sub kegiatan baru berjumlah 50 kegiatan
3. Rincian kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk menjadi bahan masukan dalam rangka penyampaian usulan pemutakhiran nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah kepada Kementerian/Lembaga terkait.

Kepala Dinas,

Drs. TAJUDDIN

NIP. 196112311984031074

Tim Pembahas

H. Abdul Malik, S.IP .....

Ariyanto .....

TUT WURI HANDAYANI, A.Md .....

Hj. Kasbariah, SH,MH .....

H. Wiranto,S.Pd, M.Pd .....

Kepala Bappeda Kota Tarakan,

H. SUPARLAN, ST,MT
Pembina Utama Muda
Nip.19640212 199803 1 004

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

TABEL KERJA
PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
D I S D I K B U D

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE			
xx	xx	01				**Program pelayanan administrasi perkantoran**													
xx	xx	01	01			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai, benda-benda pos dan biaya pengiriman dokumen	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai, benda-benda pos dan biaya pengiriman dokumen	Administrasi Umum	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran, kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, kualitas SDM, serta dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	XX	X			01	2.03	01
xx	xx	01	02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Administrasi Umum	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		XX	X			01	2.03	02
xx	xx	01	06			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kendaraan dinas/operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		XX	X			01	2.03	06
xx	xx	01	07			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah ASN/Non ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		XX	X			01	2.03	07
xx	xx	01	08			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		XX	X			01	2.03	08
xx	xx	01	09			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		XX	X			01	2.03	09
xx	xx	01	10			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		XX	X			01	2.03	10
xx	xx	01	11			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penggandaan dan barang cetakan yang tersedia	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		XX	X			01	2.03	11
xx	xx	01	12			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		XX	X			01	2.03	12
xx	xx	01	13			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		XX	X			01	2.03	13
xx	xx	01	15			Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan Makan Minum Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		XX	X			01	2.03	17
xx	xx	01	18			Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		XX	X			01	2.03	18
xx	xx	01	19			Pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Jumlah pembayaran honorarium PNS dan Non PNS, pihak ke tiga, gaji honor, insentif PNS dan Non PNS													
xx	xx	01	19			Pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Jumlah guru PNS/non PNS yang mendapat Insentif													
xx	xx	01				Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS	Jumlah Pegawai non PNS yang menerima jasa jaminan kesehatan													
xx	xx	02				**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**													
xx	xx	02	07			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah penyediaan perlengkapan UPT Balai Adat	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan layanan administrasi perkantoran sesuai standar		Jumlah perlengkapan yang tersedia	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase ketersediaan layanan	XX	X			01	2.03	14
xx	xx	02	10			Pengadaan mebeleur	Jumlah set meja kursi yang diadakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		XX	X			01	2.03	14
xx	xx	02	22			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor Disdikbud Kota Tarakan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		XX	X			01	2.03	28
xx	xx	02	22			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan Gedung UPT Balai Adat	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		XX	X			01	2.03	28
xx	xx	02	24			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah BBM Solar/Minyak Pelumas yang diadakan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah BBM kendaraan yang tersedia	XX	X			01	2.03	30
xx	xx	02	24			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Suku cadang / Service 4 unit bus yang diadakan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Suku cadang kendaraan yang tersedia	XX	X			01	2.03	30
xx	xx	02	26			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan Kantor yang dipelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		XX	X			01	2.03	34
xx	xx	03				**Program peningkatan disiplin aparatur**													
xx	xx	03	02			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang terlaksana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat ketercapaian disiplin aparatur	XX	X			01	2.04	02
xx	xx	06				**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**													
						Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, capaian kinerja dan	Administrasi Keuangan	Dokumen SAKIP, LKIP, LPPD, SPIP yang telah di sususn	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dokumen SAKIP, LKIP, LPPD, SPIP yang telah di reviu					01	2.02	06

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
xx	xx	06	04			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	laporan keuangan	Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dokumen keuangan yang disusun					01	2.02	09
01	**xx**	**15**				**Program pendidikan anak usia dini**															
01	xx	15	07			Pembangunan sarana dan prasarana bermain	Pengadaan Kelengkapan Taman Bermain TK Pembina 3 (Paving)	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Tersedianya sarana prasarana sekolah yang layak	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah RKB yang di Bangun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	APS PAUD	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			01	2.03	09
01	xx	15	57			Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Jumlah tenaga Guru PAUD yang mendapat pelatihan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah tenaga pendidik yang dilatih	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	APS PAUD	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			01	2.03	16
01	xx	15	59			Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	jumlah lembaga yang mendapat dana operasional sekolah	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	jumlah sekolah yang mendapat belanja dana BOS	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	APS PAUD	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			01	2.03	11
01	xx	15	63			Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	jumlah koordinasi dan kerjasama yang diselenggarakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	APS PAUD	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			01	2.03	17
01	xx	15	65			Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	Jumlah koordinasi kerjasama bidang PAUD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	jumlah publikasi dan sosialisasi yang diselenggarakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	APS PAUD	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			01	2.03	17
01	xx	16				**Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun**															
01	xx	16	01			Pembangunan gedung sekolah	jumlah gedung sekolah yang di bangun	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang di bangun	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	01
01	xx	16	01			Pembangunan gedung sekolah	pembangunan gedung sekolah SDN 035	Penambahan Ruang Kelas Baru		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang di bangun	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	02
01	xx	16	01			Pembangunan gedung sekolah	Pembuatan pintu semua ruang kelas	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pintu kelas sekolah yang di buat	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	06
01	xx	16	01			Pembangunan gedung sekolah	Pembangunan Musholla dan Ruang Pertemuan SMP Negeri 2 Tarakan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah musholla yang di bangun	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	06
01	xx	16	01			Pembangunan gedung sekolah	Pembuatan WC 3 Pintu SDN 011 Tarakan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah sarana air bersih dan sanitary yang di bangun	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	06
01	xx	16	01			Pembangunan gedung sekolah	Pembuatan Pagar Samping Kanan SDN 011 Tarakan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pagar sekolah yang di bangun	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	06
01	xx	16	01			Pembangunan gedung sekolah	Panggung kegiatan siswa SD Al Irsyad	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	06
01	xx	16	01			Pembangunan gedung sekolah	Pemasangan paving lapangan SD Al Irsyad	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	06
01	xx	16	01			Pembangunan gedung sekolah	Pembangunan Ruang Pertemuan Sekolah SMPN 12 Tarakan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	06
01	xx	16	01			Pembangunan gedung sekolah	Pembangunan Ruang OSIS SMPN 12 Tarakan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	06
01	xx	16	01			Pembangunan gedung sekolah	Pembangunan Pos Satpam SMPN 12 Tarakan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	06
01	xx	16	01			Pembangunan gedung sekolah	Pembangunan Kantin Sekolah SMPN 12 Tarakan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	06
01	xx	16	01			Pembangunan gedung sekolah	Pembangunan Green House SMPN 12 Tarakan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	06
01	xx	16	01			Pembangunan gedung sekolah	Pembangunan Ruang Guru SMPN 12 Tarakan	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	03
01	xx	16	01			Pembangunan gedung sekolah	Pembangunan Koperasi Sekolah SMPN 12 Tarakan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	06
01	xx	16	01			Pembangunan gedung sekolah	Pembangunan Ruang Pramuka SMPN 12 Tarakan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	06
01	xx	16	01			Pembangunan gedung sekolah	Pembangunan Ruang PIK-R SMPN 12 Tarakan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	06
01	xx	16	01			Pembangunan gedung sekolah	Pembangunan Ruang Musik SMPN 12 Tarakan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	06
01	xx	16	01			Pembangunan gedung sekolah	Pembangunan Gedung SMP 9 Tarakan	Penambahan Ruang Kelas Baru		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	02
01	xx	16	03			Penambahan ruang kelas sekolah	Penambahan Ruang Kelas SMPN 12 Tarakan	Penambahan Ruang Kelas Baru		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	02
01	xx	16	03			Penambahan ruang kelas sekolah	penambahan ruang kelas SDN 019 Tarakan	Penambahan Ruang Kelas Baru		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	02
01	xx	16	03			Penambahan ruang kelas sekolah	Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap Ke2 SDN 043	Penambahan Ruang Kelas Baru		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	02
01	xx	16	03			Penambahan ruang kelas sekolah	Pembangunan kelanjutan ruang kelas baru	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	03
01	xx	16	06			Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Pembangunan Ruang Olah Raga SMPN 12 Tarakan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tersedianya sarana prasarana sekolah yang layak	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	06
01	xx	16	06			Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Perbaikan Sarana Olahraga Lapangan Sepak Bola SMPN 8 Tarakan	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah sarana olahraga yang di renovasi	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	12
01	xx	16	09			Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Pembuatan Green House dan Hidrponik Program Adiwiyata SMP Negeri 2 Tarakan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	06

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
01	xx	16 09			Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Pematangan Lahan SDN 043	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	12
01	xx	16 09			Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	REHAB PAGAR DAN HALAMAN DEPAN SEKOLAH TK PEMBINA	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pagar yang di rehabilitasi	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	19
01	xx	16 09			Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Renovasi drainase dan perbaikan paving halaman sekolah	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pagar dan halaman yang di rehabilitasi	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	19
01	xx	16 14			Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	pembangunan toilet siswa dan guru	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah toilet yang di rehabilitasi	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	06
01	xx	16 14			Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Tempat Penampungan air SMPN 12 Tarakan	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	19
01	xx	16 14			Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	PEMBUATAN DRAINASE DI LINGKUNGAN SEKOLAH	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	06
01	xx	16 14			Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	REHAB MCK SEKOLAH	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	19
01	xx	16 18			Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa	Pengadaan LCD Proyektor	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tersedianya sarana prasarana sekolah yang layak	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah perlengkapan sekolah yang diadakan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	22
01	xx	16 18			Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa	Kit IPA	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah perlengkapan sekolah yang diadakan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	22
01	xx	16 18			Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa	pengadaan komputer SMP N 12	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah perlengkapan sekolah yang diadakan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	22
01	xx	16 18			Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa	Pengadaan Peralatan Laboratorium	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah perlengkapan sekolah yang diadakan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	22
01	xx	16 19			Pengadaan mebeluer sekolah	Pengadaan kursi guru chitose	Pengadaan Mebeluer Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah meubelair sekolah yang diadakan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	14
01	xx	16 19			Pengadaan mebeluer sekolah	Pengadaan Laptop	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah perlengkapan sekolah yang diadakan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	22
01	xx	16 19			Pengadaan mebeluer sekolah	Pengadaan meja dan kursi siswa	Pengadaan Mebeluer Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah perlengkapan sekolah yang diadakan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	14
01	xx	16 19			Pengadaan mebeluer sekolah	Pengadaan Kursi Siswa (3 kelas) Pengadaan Meja Guru & meja satpam	Pengadaan Mebeluer Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah meubelair sekolah yang diadakan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	14
01	xx	16 19			Pengadaan mebeluer sekolah	Pengadaan Kursi dan Meja SDN 042	Pengadaan Mebeluer Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah perlengkapan sekolah yang diadakan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	14
01	xx	16 23			Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	Jumlah pemeliharaan bangunan sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	08
01	xx	16 41			Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Pengecatan gedung sekolah SDN 003 Tarakan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	08
01	xx	16 41			Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	renovasi pagar sekolah SDN 019 Tarakan	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	12
01	xx	16 41			Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Pengecatan gedung sekolah SDN 019 Tarakan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pagarsekolah yang direhab	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	08
01	xx	16 41			Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Rehap Pagar SEkolah SDN 043	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	12
01	xx	16 41			Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	PERBAIKAN GERBANG SEKOLAH	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Meningkatnya kualitas keamanan sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah gerbang sekolah yang di bangun jenjang SD	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	12
01	xx	16 41			Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	PEMASANGAN PLAT DEKER DRAINASE DEPAN SEKOLAH	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	12
01	xx	16 41			Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Rehab aula SMPN 5	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Meningkatnya kualitas ruang pertemuan sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah aula sekolah yang di rehab jenjang SMP	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	12
01	xx	16 41			Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Mushollah SDN 012	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Meningkatnya kualitas tempat ibadah dan kegiatan keagamaan sekolah	Meningkatnya kualitas tempat ibadah dan kegiatan keagamaan sekolah	Jumlah mushollasekolah yang di rehab jenjang SD	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	12
		16 63			Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan non-islam setara SD dan SMP	Terpenuhinya Layanan Manajemen Satuan Pendidikan Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Persentase sekolah yang memperoleh bantuan operasional sekolah		jumlah sekolah yang mendapat belanja dana BOS/BOP	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APS SD/SMP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	01	02	2.01	28
01	xx	16 70			Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Lomba Penelitian Siswa Nasional (LPSN)	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terseleksinya peserta didik yang akan mengikuti kompetisi	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	jumlah Lomba yang diselengarakan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase siswa yang mengikuti lomba	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	25
01	xx	16 70			Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah siswa yang megikuti lomba O2SN	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	25
01	xx	16 75			Penyediaan beasiswa transisi	Jumlah siswa yang mendapat KIP	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah beasiswa bagi siswa tidak mampu	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APS SD/SMP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	21
01	xx	16 79			Penyelenggaraan ujian akhir sekolah SD/MI	Jumlah sekolah yang mengikuti ujian sekolah dan nasional tingkat SD/MI, SMP/MTs	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	23

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
01	xx	16	80			Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa dan tenaga pendidik dibidang olahraga, seni dan budaya	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	jumlah Lomba SN, FLS2N, GSI (Gala Siswa Indonesia), PAI dan LPSN (Lomba Penelitian Siswa Nasional) yang diselengarakan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase siswa yang mengikuti OSN, O2SN, FLS2N, GSI (Gala Siswa Indonesia), PAI dan LPSN (Lomba Penelitian Siswa Nasional) jenjang SD/MI dan SMP/MTs	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.02	38
01	xx	16	80			Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa dan tenaga pendidik dibidang olahraga, seni dan budaya	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Gala Siswa Indonesia (GSI)	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	jumlah Lomba GSI yang diselengarakan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase siswa yang mengikuti GSI jenjang SD/MI dan SMP/MTs	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.02	38
01	xx	16	81			Pelaksanaan pendidikan berwawasan kesehatan dan lingkungan	Jumlah sekolah yang melaksanakan usaha kesehatan sekolah (UKS)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang mengikuti lomba sekolah sehat	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah yang mengikuti lomba sekolah sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.02	28
01	xx	16	82			Penyediaan beasiswa prestasi	Jumlah Siswa yang mendapat Beasiswa Prestasi Siswa	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah beasiswa bagi siswa yang berprestasi	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.02	32
01	xx	18				**Program pendidikan non formal**														
01	xx	18	01			Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	Jumlah tenaga pendidik non formal yang mengikuti pelatihan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.04	15
01	xx	18	01			Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat, pelatihan, Bimtek dan Sosialisasi di luar daerah	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah tenaga pendidik non formal pelatihan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik yang mengikuti pelatihan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentasi tenaga pendidik non formal pelatihan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.04	15
01	xx	18	02			Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal	Jumlah lembaga yang mendapat biaya operasional	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan non formal	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	jumlah SKB/PKBM yang mendapat belanja dana BOS	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APS SKB/PKBM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.04	10
						Penyelenggaraan ujian pendidikan non formal	Jumlah siswa yang mengikuti Ujian Nasional Berbasis Sekolah (UASBN) Paket A dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Paket A, B dan C	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka lulusan Paket A, B dan C	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah siswa yang mengikuti Ujian Nasional Berbasis Sekolah (UASBN) Paket A dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Paket A, B dan C	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase siswa yang mengikuti Ujian Nasional Paket A, B dan C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.04	13
01	xx	20				**Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan**														
01	xx	20	08			Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah Kepala sekolah yang mengikuti pelatihan (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Kepala SD/SMP)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pendidik yang mengikuti seleksi calon kepala sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase pendidik yang mengikuti Pembinaan Guru Pendidikan Dasar dan Menengah (PKB)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	27
01	xx	20	08			Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Pelatihan Budidaya Tanaman Hidroponik SMP Negeri 2 Tarakan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah tenaga pendidik yang dilatihan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentasi tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.02	40
01	xx	20	10			Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Jumlah angka kredit fungsional guru	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	01	02	2.01	27
01	xx	22				**Program manajemen pelayanan pendidikan**														
01	xx	22	07			Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Persentase Sekolah yang menerapkan PPDB Online		Jumlah sekolah yang menerapkan PPDB Online		Jumlah sekolah yang menerapkan PPDB Online		Persentase sekolah yang menerapkan PPDB Online							
17	xx	15				**Program pengembangan nilai budaya**														
17	xx	15	01			Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	jumlah gedung balai adat yang dilestarikan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah balai adat yang di kelola	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah balai adat yang dilestarikan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase sarana prasarana seni budaya yang dilestarikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	02	2.01	01
17	xx	15	01			Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah Tenaga Bidang Kesejarahan yang ditingkatkan kompetensinya	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Bidang Kesejarahan mengikuti pelatihan	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga bidang museum yang dilatih	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentasi tenaga bidang museum yang dilatih	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	04	2.01	01
17	xx	15	05			Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Jumlah seniman yang difasilitasi dalam program Gerakan Seniman masuk sekolah	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah peserta didik yang mengikuti gerakan seniman masuk sekolah	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta didik yang dilatih	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase perserta didik yang mengikuti gerakan seniman masuk sekolah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	04	2.01	01
17	xx	16				**Program pengelolaan kekayaan budaya**														
17	xx	16	01			Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	jumlah sanggar seni budaya yang aktif	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
17	xx	16	05			Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	jumlah museum yang terpelihara	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	06	2.01	01
17	xx	16	11			Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Jumlah Tenaga Bidang Kesejarahan yang ditingkatkan kompetensinya	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	07	2.02	02
17	xx	16	11			Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Pendayagunaan Cagar Budaya		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang di lestarikan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang di lestarikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	05	2.03	05
17	xx	17				**Program pengelolaan keragaman budaya**														
17	xx	17	01			Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah kegiatan seni rupa yang dipamerkan	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	03	2.01	01
17	xx	17	04			Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah penyelenggaraan festival yang diadakan	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah festival budaya daerah yang diselenggarakan	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase pagelaran festival budaya daerah yang diselenggarakan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	03	2.01	03
		08				Iraw tengkayu dan pesta rakyat Kota Tarakan	Jumlah kegiatan seni budaya daerah yang diselenggarakan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan seni budaya daerah yang diselenggarakan	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase pagelaran seni budaya dikuti	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	02	2.02	01

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
			10			Partisipasi event seni budaya nasional dan internasional	Jumlah kegiatan seni budaya yang dikuti	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pagelaran seni budaya yang dilaksanakan	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	pagelaran seni budaya dikuti	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	03	2.01	01

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TARAKAN
(B A P P E D A)
Jalan P. Irian No. 13 Tarakan Telp.(0551) 33910, Kota Tarakan – 77121

BERITA ACARA

VERIFIKASI PEMETAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

SESUAI NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di ruang rapat kantor Bappeda Kota Tarakan telah dilaksanakan verifikasi pemetaan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga. Kota Tarakan Tahun 2021 sesuai nomenklatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Setelah dilakukan diskusi dan penelaahan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan maka disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan dalam Renja yang relevan dengan sub kegiatan/kegiatan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berjumlah 11 (Sebelas kegiatan
2. Jumlah kegiatan yang diusulkan menjadi sub kegiatan baru berjumlah 8O (delapan Puluh kegiatan
3. Rincian kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk menjadi bahan masukan dalam rangka penyampaian usulan pemutakhiran nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah kepada Kementerian/Lembaga terkait.

Kepala Dinas Pemuda
dan Olahraga,

H.Agus Sutanto, S.Sos. M.Ap
Pembina Utama Muda
NIP. 196806041988031010

Tim Pembahas

1. David Rugian,S.Pi.M.Si .....
2. Drs. Arwin .....
3. H.Cariono, S.Ap .....
4. Yudhi, S.H .....
5. Hj. Kasbariah, SH,MH .....
6. H. Wiranto,S.Pd, M.Pd .....

Kepala Bappeda Kota Tarakan,

H. SUPARLAN, ST,MT
Pembina Utama Muda
Nip.19640212 199803 1 004

TABEL KERJA
PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA TARAKAN

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
								Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Jumlah dokumen yang selesai tepat waktu**	**Urusan Penunjang Pemerintah Daerah**	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
								Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen											
								Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen											
								Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen											
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen											
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan tunjangan	**Administrasi Keuangan**	**Jumlah Administrasi Keuangan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Pemenuhan Layanan administrasi Keuangan**	**Urusan Penunjang Pemerintah Daerah**	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang direkomendasikan											
								Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Jumlah Dokumen yang diverifikasi											
								Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen											
								Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen											
								Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen											
								Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Dokumen											
								Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen											
								Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen											
2	**4**	**2.04.01.1**	**1**	**2**	**4**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran**	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	**Administrasi Umum**	**Jumlah Pemenuhan administrasi Umum**		Persentase Pemenuhan Layanan administrasi perkantoran							
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi,sumber daya Air dan Listrik											
						Penyediaan Jaskom, SD Air & Listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/Operasional yang pajak kendaraannya terbayarkan											
						Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajak kendaraannya terbayarkan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan Administrasi Keuangan											
						Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia											

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki											
						Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia											
						Penyediaan ATK	Jumlah ATK yang tersedia	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia											
						Penyediaan Brng Cetakan & Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor yang tersedia											
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
						Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan											
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia											
						Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman											
						Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah											
						Pendukung Penyelenggaraan Pemerintah	Jumlah tenaga pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Jumlah tenaga pendukung penyelenggaraan dan administrasi pemerintahan											
2	4	2.04.01.1	2	2	4	**Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur**	**Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur**	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah Kendaraan Roda 4 Pejabat yang diadakan											
						Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang Dibangun	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional											
						Pengadaan Kendaraan Dinas/Opr	Jumlah kendaraan operasional	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor											
						Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	Pengadaan peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor											
						Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Julah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara											
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend. Dinas/Opr	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah berfungsinya perlengkapan kantor secara normal											
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Ktr	Cakupan Berfungsinya perlengkapan kantor secara normal	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin Absensi elektronik	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Jumlah Pelanggaran Disiplin Pegawai dan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya**									
2	4	2.04.01.1	3	2	4	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase pelanggaran disiplin pegawai**	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan											
						Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin absensi elektronik	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja Lapangan yang diadakan											
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Pengadaan pakaian KORPRI	JUmlah pakaian KORPRI yang diadakan											

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari tertentu yang diadakan											
						Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah pakaian korpri lapangan yang diadakan	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peraturan yang tersosialisasikan											
						Pengadaan Pakaian Khusus/Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari tertentu yang diadakan	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mendapatkan Bimtek											
						Pengadaan Atribut Pakaian Dinas	Jumlah pegawai mendapatkan atribut	Koordinasi,Sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas Daya saing Pemuda Pelopor	Jumlah orang yang diseleksi untuk mengikuti kegiatan Kepemudaan	**Penyadaran,pemberdayaan, dan pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupten/Kota**	**Jumlah Pemuda yang berprestasi**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Prosentase Pemuda yang Berprestasi**	**Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**4**	**2.04.01.1**	**5**	**2**	**4**	**Program Peningkatan Kapasitas SD Aparatur**	**Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya**	Koordinasi,Sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas Daya saing Wira Usaha Pemula	1. Jumlah Raperda Kewirausahaan Muda 2. Jumlah Pelatihan Kewirausahaan											
						Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peraturan yang tersosialisasi	Koordinasi,Sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas Daya saing Kader Kabupaten / Kota	Jumlah orang yang diseleksi untuk mengikuti kegiatan Kepemudaan tingkat kab / kota											
						Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mendapatkan bimtek	Pemenuhan Hak setiap Pemuda yang meliputi : Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses pengembangan diri,penggunaan prasarana dan sarana tanpa Diskiriminatif,partisipasi pemuda dalam proses perencanaan ,pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategi kepemudaan	Jumlah Raperda kepemudaan											
2	**4**	**2.04.01.1**	**6**	**2**	**4**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan**	**Jumlah dokumen yang selesai tepat waktu**	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana aksi Daerah / Rad Tingkat Kabupaten / kota bidang kepemudaan yang dilaksanakan											
						Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan yang diadakan, diawasi dan terpelihara											
						Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase kegiatan Kepemudaan yang berbasis pembinaan Karakter sesuai dengan Pedoman	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda dan Organisasi pemuda yang mendapat penghargaan											

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Pendataan Potensi Kepemudaan	Jumlah data potensi kepemudaan	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti seleksi Paskibraka											
1	17	2.04.01.1	17	1	17	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Pemuda	Jumlah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Pemuda	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah data potensi Kepemudaan	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengembangan Organisasi yang diberdayakan**									
						Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan	Jumlah Rapaerda Kepemudaan	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina											
						Pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-YOUTH	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan (E-Commerce Youth Community)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pembentukan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Olahraga yang berprestasi yang menjadi keweangan Kabupaten / Kota**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Prosentase Olahraga yang Berprestasi**	**Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
						Peningkatan keimanan dan ketakwaan kepemudaan	Jumlah OKP yang terlibat dalam kegiatan keagamaan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah penyelenggaraan Kompetisi Olahraga yang dilaksanakan oleh suatu perkumpulan satuan pendidikan dasar											
						Penyusunan pedoman komunikasi,informasi ,edukasi dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda	Jumlah Regulasi Kepemudaan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Olahraga yang terpelihara											
						Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat	Jumlah Rancangan Pedoman Penyusunan Pola Kemitraan antar pemuda dan Masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota **(Kel.Selumit)**	Pembuatan Lapangan Volly											
						Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang	Jumlah Rencana Aksi daerah bidang Kepemudaan yang dilaksanakan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota **(Kel.Selumit)**	Perbaikan Lapangan Rajawali, dan perlengkapan											
						Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda	Jumlah Raperda Kewirausahaan Muda	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota **(Kel.Selumit)**	Perbaikan lapangan bulutangkis											
						Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan peloporan terhadap kebijakan Program pengembangan Pemuda	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota **(Kel.Kr.Anyar)**	Net volly, Bola voly dan tiang net volly											

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	18	2.04.01.1	16	1	18	**Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**	Prosentase Pemuda yang difasilitasi untuk mengikuti kegiatan Kepemudaan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota **(Kel.Kr.Anyar)**	Bola Volly dan Net Lapangan Volly											
						Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota **(Kel.Kr.Anyar - Pantai)**	Pembangunan Lapangan volley RT 13											
						Pendidikan dan Pelatihan dasar kepemimpinan	Jumlah Pemuda yang mengikuti Diklat dasar Kepemimpinan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota **(Kel.Kr.Anyar - Pantai)**	pembangunan lapangan volley RT 19											
						Fasilitas Aksi Bakti Sosial Kepemudaan	Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam aksi bhakti sosial	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota **(Kel.Kr.Anyar - Pantai)**	Pembangunan lapangan volley RT 20											
						Fasilitas pekan temu wicara organisasi pemuda	1. Jumlah pekan temu wicara organisasi pemuda.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	lapangaan olahraga											
							2. Jumlah Pertukaran pemuda Antar Daerah (PPAD) / Perputaran Pemuda Antar Negara (PPAN)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota **(Kel.Kr.Harapan)**	Pengadaan alat Olah Raga Bola futsal 3 buah, Bola Kaki 3 Buah, Bola Volley 3 Buah, 1 Buah Net Volley dan 2 Gawang Futsal											
						Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Jumlah Pemuda yang mengikuti Penyuluhan Narkoba dan HIV / AIDS	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota **(Kel.Kr.Harapan)**	Pembuatan Lapangan Volly dan pengadaan perlengkapan RT.05											
						Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	1. Jumlah penyuluhan tentang bahaya narkoba dan HIV/AIDS di kalangan pemuda	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota **(Kel.Lks-Ujung)**	Peningkatan Lapangan volley											
							2. Jumlah pelatihan pendahuluan Bela Negara	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kompetisi yang dipertandingkan	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kejuaraan Olahraga yang selenggarakan**								
						Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda	1. Jumlah Lomba Vocal Grup (Lagu kebangsaan / mars dan Hyme Kota Tarakan	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Jumlah Kategori Lomba											
							2. Jumlah Lomba Cerdas Cermat	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang ikut dalam Kejuaraan											
						Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	Jumlah Orang yang diseleksi untuk mengikuti kegiatan kepemudaan tingkat kota	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlit yang diseleksi	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single yang diselenggarakan**								

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Pameran prestasi hasil Karya Pemuda	Jumlah Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pelatihan Sertifikasi Pelatih											
						Monitoring, Evaluasi dan Peloporan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Peloporan terhadap Kebijakan Program peran serta Kepemudaan	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Jumlah Atlit Berpestasi yang dibina dan dikembangkan											
						Jambore Pemuda Indonesia	Jumlah seleksi dan pengiriman Jambore Pemuda Indonesia	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Cabang Olahraga Kabupaten / Kota yang mendapat Penghargaan											
						Pelaksanaan Paskibraka	Jumlah pemuda yang mengikuti Seleksi Paskibraka	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Sistem Informasi Olahraga											
1	18	2.04.01.1	17	1	18	**Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda**	**Persentase Wirausaha Muda yang berprestasi**	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Keolahragaan	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Jumlah Organisasi Olahraga yang dikembangkandan dibina**									
						Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	jumlah pelatihan kewirausahaan	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang dikembangkan											
						Pelatihan keterampilan bagi Pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan	Peningkatan Kerja sama Organisasi Keolahragaan Provinsi Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Organisasi Keolahragaan Provinsi yang bekerja sama dengan Lembaga terkait											
						Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	**Prosentase Pemuda yang difasilitasi untuk mengikuti kegiatan Penyuluhan Narkoba**	Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang berprestasi											
						pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi Pemuda	Jumlah pemuda yang ikut penyuluhan	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Festival dan Olahraga Rekreasi yang diselenggarakan dan dikembangkan	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Jumlah Olahraga Rekreasi yang dibina dan kembangkan**									
1	18	2.04.01.1	19	1	18	**Pengembangan kebijakan dan manajemen Olahraga**	**Persentase cabor yang mempunyai manajemen yang baik**	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Olahraga Rekreasi yang diberdayakan											
						Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	Jumlah peserta pelatihan	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana Olahraga yang terpelihara											
						Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi	Jumlah pelatihan sertifikasi Pelatih	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Olahraga Wisata											
						Pembinaan perencanaan olah raga terpadu	Jumlah cabor olahraga yang memiliki prestasi tingkat nasional	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Olahraga Tradisional											
						Pembinaan manajemen organisasi olah raga	Jumlah orang pengelola cabor yang dibina	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Sistem Informasi Kepramukaan	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina dan dikembangkan**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase sumber daya Pemuda yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya**	**Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	18	2.04.01.1	20	1	18	**Pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga**	Tingkat partisipasi masyarakat dalam even keolahragaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Kegiatan monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan terhadap kebijakan Program Pengembangan Pemuda											
						Penyelenggaraan Seleksi Olahraga multi Even	Jumlah Atlit yang Berprestasi	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Kapasitas SDM Kepramukaan yang dikembangkan											
						Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	Jumlah kategori lomba	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Perlatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan yang disediakan											
						Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional dan internasional yang menerima bonus	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah yang diselenggarakan											
						Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga	Jumlah Kompetisi yang dipertandingkan	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan yang disediakan											
						Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Jumlah Insan olahraga yang mendapat penghargaan	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan yang pelihara,diawasi,dan diadakan											
						Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	Jumlah Olahraga yang diikuti bagi penyandang cacat (SOINA)	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Keikutsertaan dalam kegiatan Kepramukaan											
						Pengembangan olah raga rekreasi	Jumlah jenis olah raga t rekreasi yang dikembangkan													
						Pengembangan Olahraga Tradisional	Jumlah jenis olah raga rekreasi yang dipertandingkan													
1	18	2.04.01.1	21	1	18	**Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga**	Persentse Gedung Olahraga yang memadai													
							Jumlah sarana olah raga yang terbangun													
						Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Pembangunan Kantor KONI													
							Pembangunan Lapangan Golf Internasional													
							Pembangunan sirkuit grass track dan road race													
							Pembangunan atap/kanopi stadion Datu Adil													
							Pembangunan lapangan bola kecamatan													

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
							Pembangunan sarana dan prasarana olahraga tertentu di masing2 wilayah kelurahan / gelanggang olahraga mini													
							Pembangunan lapangan bola voli outdoor													
							Pengadaan peralatan perlengkapan cabor													
							Pembangunan sarana dan prasarana olahraga													
							Penataan Gedung Graha Pemuda													
						Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Jumlah sarana olah raga yang terpelihara													

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TARAKAN

(B A P P E D A)

Jalan P. Irian No. 13 Tarakan Telp.(0551) 33910, Kota Tarakan – 77121

BERITA ACARA
VERIFIKASI PEMETAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
SESUAI NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di ruang rapat kantor Bappeda Kota Tarakan telah dilaksanakan verifikasi pemetaan Rencana Kerja Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Tahun 2021 sesuai nomenklatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Setelah dilakukan diskusi dan penelaahan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan maka disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan dalam Renja yang relevan dengan sub kegiatan/kegiatan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berjumlah 60 (enam puluh)a kegiatan
2. Jumlah kegiatan yang diusulkan menjadi sub kegiatan baru berjumlah 0 (nol) kegiatan
3. Rincian kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk menjadi bahan masukan dalam rangka penyampaian usulan pemutakhiran nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah kepada Kementerian/Lembaga terkait.

Plt. Camat Tarakan Timur,

Hasman Parigi, S.E.

Tim Pembahas

1. Hj. Kasbariah, S.H., M.H. .....
2. Muhammadong S.S.,M.Si. .....
3. M. Rajiansyah, S.H. .....
4. M. Basori, S.E. .....
5. Zainal Fanani, S.E. .....

Kepala Bappeda Kota Tarakan,

H. SUPARLAN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP 19640212 199803 1 004

TABEL KERJA
PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
KECAMATAN TARAKAN TIMUR

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4					**Urusan Pemerintahan**											**Unsur Kewilayahan**	**7**					
4	**01**				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
4	**01**	**12**				**Kecamatan Tarakan Timur**							**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**7**	**01**	**01**			
4	**01**	**12**					**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan**				**Administrasi Keuangan**						**7**	**01**	**01**	**2**	**02**	
4	01	12					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja							7	01	01	2	02	06
4					**Urusan Pemerintahan**											**Unsur Kewilayahan**	**7**					
4	**01**				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
4	**01**	**12**				**Kecamatan Tarakan Timur**							**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**7**	**01**	**01**			
4	**01**	**12**	**01**				**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**Administrasi Umum**						**7**	**01**	**01**	**2**	**03**	
4	01	12	01	01			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai							7	01	01	2	03	01
4	01	12	01	02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik							7	01	01	2	03	02
4	01	12	01				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di adakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di adakan							7	01	01	2	03	03
4	01	12	01	06			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajak kendaraannya terbayarkan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajak kendaraannya terbayarkan							7	01	01	2	03	06
4	01	12	01	07			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan							7	01	01	2	03	07
4	01	12	01	08			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia							7	01	01	2	03	08
4	01	12	01	10			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia							7	01	01	2	03	10
4	01	12	01	11			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia							7	01	01	2	03	11
4	01	12	01	12			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia							7	01	01	2	03	12
4	01	12	01				Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah alat rumah tangga yang di adakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat rumah tangga yang di adakan							7	01	01	2	03	13
4	01	12	01				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia							7	01	01	2	03	15
4	01	12	01	17			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman							7	01	01	2	03	17
4	01	12	01				Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah							7	01	01	2	03	18

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4					**Urusan Pemerintahan**											**Unsur Kewilayahan**	**7**					
4	**01**				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
4	**01**	**12**				**Kecamatan Tarakan Timur**							**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**7**	**01**	**02**			
4	**01**	**12**	**01**				**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**						**7**	**01**	**02**	**2**		
4	01	12	01	19			Pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Jumlah tenaga pendukung penyelenggaraan administrasi perkantoran	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah tenaga pendukung penyelenggaraan administrasi perkantoran							7	01	02	2	01	01
4					**Urusan Pemerintahan**											**Unsur Kewilayahan**	**7**					
4	**01**				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
4	**01**	**12**				**Kecamatan Tarakan Timur**							**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**7**	**01**	**01**			
4	**01**	**12**	**02**				**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**Administrasi Umum**						**7**	**01**	**01**	**2**	**03**	
4	01	12	02				Pembangunan gedung kantor	Jumlah pembangunan gedung kantor		Jumlah pembangunan gedung kantor												
4	01	12	02				Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional							7	01	01	2	03	20
4	01	12	02				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor							7	01	01	2	03	22
4	01	12	02				Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur yang diadakan	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur yang diadakan							7	01	01	2	03	25
4	01	12	02	24			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah BBM,Suku Cadang dan Jasa service yang diadakan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah BBM,Suku Cadang dan Jasa service yang diadakan							7	01	01	2	03	30
4	01	12	02				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara							7	01	01	2	03	32
4	01	12	02	28			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara							7	01	01	2	03	34
4	01	12	02				Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang direhab	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang direhab							7	01	01	2	03	36
4	01	12	02				Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah gedung/rumah yang dipelihara	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah gedung/rumah yang dipelihara							7	01	01	2	03	38
4					**Urusan Pemerintahan**											**Unsur Kewilayahan**	**7**					

KECAMATAN TARAKAN TIMUR - 3

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	**01**				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
4	**01**	**12**				**Kecamatan Tarakan Timur**							**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**7**	**01**	**01**			
4	**01**	**12**	**03**				**Program peningkatan disiplin aparatur**				**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**						**7**	**01**	**01**	**2**	**04**	
4	01	12	03				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan							7	01	01	2	04	02
4	01	12	03				Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pengadaan pakaian lapangan yang diadakan	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pengadaan pakaian lapangan yang diadakan							7	01	01	2	04	03
4	01	12	03				Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan							7	01	01	2	04	04
4	01	12	03	05			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian batik yang diadakan	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian batik yang diadakan							7	01	01	2	04	05
4					**Urusan Pemerintahan**											**Unsur Kewilayahan**	**7**					
4	**01**				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
4	**01**	**12**				**Kecamatan Tarakan Timur**							**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**7**	**01**	**01**			
4	**01**	**12**					**Program peningkatan Sumber Daya Manusia**				**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**						**7**	**01**	**01**	**2**	**04**	
4	01	12					Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal							7	01	01	2	04	09
4	01	12					Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mendapatkan bimtek	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mendapatkan bimtek							7	01	01	2	04	11
4	01	12					Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi paket reguler tentang pengelolaan keuangan daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi paket reguler tentang pengelolaan keuangan daerah							7	01	01	2	04	11
4					**Urusan Pemerintahan**											**Unsur Kewilayahan**	**7**					
4	**06**				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
4	**06**	**12**				**Kecamatan Tarakan Timur**							**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**7**	**01**	**05**			
4	**06**	**12**	**30**				**Program Pembinaan Keagamaan**				**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**7**	**01**	**05**	**2**	**01**	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	06	12	30	01			Pelaksanaan STQ/MTQ	Jumlah qori/qoriah yang mewakili ke tingkat kota	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah qori/qoriah yang mewakili ke tingkat kota							7	01	05	2	01	04
4	06	12	30	06			Pembinaan lembaga keagamaan	Jumlah pelaksanaan lomba keluarga sakinah		Jumlah pelaksanaan lomba keluarga sakinah												
4					**Urusan Pemerintahan**											**Unsur Kewilayahan**	**7**					
4	**01**				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
4	**01**	**12**				**Kecamatan Tarakan Timur**							**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**7**	**01**	**02**			
4	**01**	**12**	**43**				**Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan di Wilayah Kecamatan**				**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**						**7**	**01**	**02**	**2**	**04**	
4	01	12	43				Fasilitasi administrasi pemanfaatan bidang tanah	Jumlah Fasilitasi pemanfaatan bidang tanah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah Fasilitasi pemanfaatan bidang tanah							7	01	02	2	04	01
4	**01**	**12**				**Kecamatan Tarakan Timur**							**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**7**	**01**	**05**			
4	**01**	**12**	**43**				**Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan di Wilayah Kecamatan**				**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**7**	**01**	**05**	**2**	**01**	
4	01	12	43	01			Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah Konflik-Konflik Pertanahan yang dimediasi di Wilayah Kecamatan	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Konflik-Konflik Pertanahan yang dimediasi di Wilayah Kecamatan							7	01	05	2	01	05
4					**Urusan Pemerintahan**											**Unsur Kewilayahan**	**7**					
4	**01**				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
4	**01**	**12**				**Kecamatan Tarakan Timur**							**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**7**	**01**	**06**			
4	**01**	**12**	**45**				**Program Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Kecamatan**				**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						**7**	**01**	**06**	**2**	**01**	

KECAMATAN TARAKAN TIMUR - 5

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	01	12	45	01			Pelayanan administrasi kependudukan di wilayah kecamatan	Jumlah masyarakat yang memiliki e-KTP	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah masyarakat yang memiliki e-KTP							7	01	06	2	01	11
4					**Urusan Pemerintahan**											**Unsur Kewilayahan**	**7**					
4	**01**				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
4	**01**	**12**				**Kecamatan Tarakan Timur**							**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**7**	**01**	**02**			
4	**01**	**12**	**44**				**Program Fasilitasi Penerbitan Ijin Usaha Mikro Kecil (UMK)**				**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**						**7**	**01**	**02**	**2**	**04**	
4	01	12	44	01			Fasilitasi penerbitan ijin usaha mikro kecil	Jumlah IUMK yang diterbitkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah IUMK yang diterbitkan							7	01	02	2	04	01
4					**Urusan Pemerintahan**											**Unsur Kewilayahan**	**7**					
4	**01**				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
4	**01**	**12**				**Kecamatan Tarakan Timur**							**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**7**	**01**	**06**			
4	**01**	**12**	**42**				**Program Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan**				**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						**7**	**01**	**06**	**2**	**01**	
4	**01**	**12**	**42**	**02**			Pendataan deteksi dini permasalahan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Jumlah data permasalahan K3 (Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban) di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah data permasalahan K3 (Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban) di Wilayah Kecamatan							7	01	06	2	01	11
4	**01**	**12**	**42**	**01**			Sosialisai Ketenteraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan	Jumlah penyuluhan dan sosialisasi yang dilaksanakan		Jumlah penyuluhan dan sosialisasi yang dilaksanakan												
2																**Unsur Kewilayahan**	**7**					
2	**07**				**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	**07**	**12**				**Kecamatan Tarakan Timur**							**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**7**	**01**	**03**			
2	**07**	**12**	**15**				**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**				**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**						**7**	**01**	**03**	**2**	**02**	
2	07	12	15	01			Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah insentif RT,RW dan Kader Dasawisma dan pemilihan dan pelantikan RT dan RW	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah insentif RT,RW dan Kader Dasawisma dan pemilihan dan pelantikan RT dan RW							7	01	03	2	02	03
2	07	12	15	14			Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Kampung Empat	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Kampung Empat		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Kampung Empat												
2	07	12	15	15			Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Kampung Enam	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Kampung Enam		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Kampung Enam												
2	07	12	15	16			Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Gunung Lingkas	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Gunung Lingkas		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Gunung Lingkas												
2	07	12	15	17			Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Lingkas Ujung	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Lingkas Ujung		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Lingkas Ujung												
2	07	12	15	18			Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Mamburungan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Mamburungan		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Mamburungan												
2	07	12	15	19			Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Mamburungan Timur	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Mamburungan Timur		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Mamburungan Timur												
2	07	12	15	20			Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pantai Amal	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Pantai Amal		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Pantai Amal												
2																**Unsur Kewilayahan**	**7**					
2	**07**				**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
2	**07**	**12**				**Kecamatan Tarakan Timur**							**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**7**	**01**	**03**			
2	**07**	**12**	**17**				**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**				**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**						**7**	**01**	**03**	**2**	**02**	
2	07	12	17	02			Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Jumlah pelaksanaan Musrenbang	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah pelaksanaan Musrenbang							7	01	03	2	02	01
2	07	12	17	10			Pelaksanaan bulan bakti gotong royong	Jumlah pelaksanaan kegiatan bulan bakti gotong royong	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pelaksanaan kegiatan bulan bakti gotong royong							7	01	03	2	02	03
2	07	12	17				Penyusunan Profil dan Monografi	Jumlah dokumen profil dan monografi	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen profil dan monografi							7	01	02	2	04	02
2	07	12	17				Lomba teknologi tepat guna	Jumlah pelaksanaan lomba TTG	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pelaksanaan lomba TTG							7	01	03	2	02	03
2	07	12	17				Fasilitasi pelaksanaan kegiatan mahasiswa	Jumlah kelurahan yang memfasilitasi kegiatan mahasiswa		Jumlah kelurahan yang memfasilitasi kegiatan mahasiswa												
2	07	12	17				Penyelengaraan lomba kegiatan kemasyarakatan	Jumlah penyelenggaraan lomba kegiatan kemasyarakatan		Jumlah penyelenggaraan lomba kegiatan kemasyarakatan												

KECAMATAN TARAKAN TIMUR - 7

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2																**Unsur Kewilayahan**	**7**					
2	**07**				**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
2	**07**	**12**				**Kecamatan Tarakan Timur**							**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**7**	**01**	**03**			
2	**07**	**12**	**20**				**Program Pembangunan Kelurahan**				**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**						**7**	**01**	**03**	**2**	**02**	
2	07	12	20	11			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kampung Empat	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Kampung Empat	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Kampung Empat							7	01	03	2	02	02
2	07	12	20	12			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kampung Enam	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Kampung Enam		Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Kampung Enam												
2	07	12	20	13			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Gunung Lingkas	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Gunung Lingkas		Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Gunung Lingkas												
2	07	12	20	14			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Lingkas Ujung	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Lingkas Ujung		Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Lingkas Ujung												
2	07	12	20	15			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Mamburungan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Mamburungan		Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Mamburungan												
2	07	12	20	16			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Mamburungan Timur	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Mamburungan Timur		Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Mamburungan Timur												
2	07	12	20	17			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Pantai Amal	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Pantai Amal		Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Pantai Amal												

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TARAKAN

(B A P P E D A)

Jalan P. Irian No. 13 Tarakan Telp.(0551) 33910, Kota Tarakan – 77121

BERITA ACARA
VERIFIKASI PEMETAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
SESUAI NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di ruang rapat kantor Bappeda Kota Tarakan telah dilaksanakan verifikasi pemetaan Rencana Kerja Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Tahun 2021 sesuai nomenklatur dalam Permendagri Nomo 90 Tahun 2019.

Setelah dilakukan diskusi dan penelaahan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan maka disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah 14 Program 56 Kegiatan pada Permendagri 13 yang tertuang dalam Renja kecamatan dikonversi ke Permendagri 90 Tahun 2019 yang relevan menjadi 5 Program, 12 Kegiatan dan 56 sub kegiatan.
2. Jumlah kegiatan yang diusulkan menjadi sub kegiatan baru berjumlah satu (1) kegiatan
3. Rincian kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk menjadi bahan masukan dalam rangka penyampaian usulan pemutakhiran nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah kepada Kementerian/Lembaga terkait.

CAMAT,

SOFYAN S.H., M.H

NIP. 197105021998031013

Tim Pembahas

1. Rudiah, SE .....
2. Masduki Syaiful Hadi.SE .....
3. Hj. Kasbariah, SH,MH .....
4. Muhammadong S.S,M.Si .....

Kepala Bappeda Kota Tarakan

H. SUPARLAN, ST,MT
Pembina Utama Muda
Nip 19640212 199803 1 004

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

TABEL KERJA
PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
KECAMATAN TARAKAN BARAT

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4				**Urusan Pemerintahan**											**Unsur Kewilayahan**	**7**					
4	**01**			**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
4	**01**	**12**			**Kecamatan Tarakan Barat**							**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**7**	**01**	**01**			
4	**01**	**12**	**01**			**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**Administrasi Umum**						**7**	**01**	**01**	**2**	**03**	
4	01	12	01	01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai							7	01	01	2	03	01
4	01	12	01	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik							7	01	01	2	03	02
4	01	12	01			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di adakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di adakan							7	01	01	2	03	03
4	01	12	01	06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajak kendaraannya terbayarkan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajak kendaraannya terbayarkan							7	01	01	2	03	06
4	01	12	01	07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan							7	01	01	2	03	07
4	01	12	01	08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia							7	01	01	2	03	08
4	01	12	01	10		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia							7	01	01	2	03	10
4	01	12	01	11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia							7	01	01	2	03	11
4	01	12	01	12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia							7	01	01	2	03	12
4	01	12	01			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah alat rumah tangga yang di adakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat rumah tangga yang di adakan							7	01	01	2	03	13
4	01	12	01			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia							7	01	01	2	03	15
4	01	12	01	17		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman							7	01	01	2	03	17
4	01	12	01			Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah							7	01	01	2	03	18
4				**Urusan Pemerintahan**											**Unsur Kewilayahan**	**7**					
4	**01**			**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
4	**01**	**12**			**Kecamatan Tarakan Barat**							**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**7**	**01**	**02**			

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	**01**	**12**	**01**				**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**						**7**	**01**	**02**	**2**		
4	01	12	01	19			Pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Jumlah tenaga pendukung penyelenggaraan administrasi perkantoran	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah tenaga pendukung penyelenggaraan administrasi perkantoran							7	01	02	2	01	01
4					**Urusan Pemerintahan**											**Unsur Kewilayahan**	**7**					
4	**01**				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
4	**01**	**12**				**Kecamatan Tarakan Barat**							**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**7**	**01**	**01**			
4	**01**	**12**	**02**				**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**Administrasi Umum**						**7**	**01**	**01**	**2**	**03**	
4	01	12	02				Pembangunan gedung kantor	Jumlah pembangunan gedung kantor		Jumlah pembangunan gedung kantor												
4	01	12	02				Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional							7	01	01	2	03	20
4	01	12	02				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor							7	01	01	2	03	22
4	01	12	02				Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur yang diadakan	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur yang diadakan							7	01	01	2	03	25
4	01	12	02	24			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah BBM,Suku Cadang dan Jasa service yang diadakan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah BBM,Suku Cadang dan Jasa service yang diadakan							7	01	01	2	03	30
4	01	12	02				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara							7	01	01	2	03	32
4	01	12	02	28			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara							7	01	01	2	03	34
4	01	12	02				Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah gedung/rumah yang dipelihara	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah gedung/rumah yang dipelihara							7	01	01	2	03	38
							Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor												
							Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Jumlah Mesin Yang Diadakan	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Jumlah Mesin Yang Diadakan												
4					**Urusan Pemerintahan**											**Unsur Kewilayahan**	**7**					
4	**01**				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
4	**01**	**12**				**Kecamatan Tarakan Barat**							**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**7**	**01**	**01**			

KECAMATAN TARAKAN BARAT - 3

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	**01**	**12**	**03**				**Program peningkatan disiplin aparatur**				**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**						**7**	**01**	**01**	**2**	**04**	
4	01	12	03				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan							7	01	01	2	04	02
4	01	12	03				Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pengadaan pakaian lapangan yang diadakan	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pengadaan pakaian lapangan yang diadakan							7	01	01	2	04	03
4	01	12	03				Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan							7	01	01	2	04	04
4	01	12	03	05			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian batik yang diadakan	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian batik yang diadakan							7	01	01	2	04	05
4					**Urusan Pemerintahan**											**Unsur Kewilayahan**	**7**					
4	**01**				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
4	**01**	**12**				**Kecamatan Tarakan Barat**							**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**7**	**01**	**01**			
4	**01**	**12**					**Program peningkatan Sumber Daya Manusia**				**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**						**7**	**01**	**01**	**2**	**04**	
4	01	12					Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal							7	01	01	2	04	09
4	01	12					Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mendapatkan bimtek	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mendapatkan bimtek							7	01	01	2	04	11
4					**Urusan Pemerintahan**											**Unsur Kewilayahan**	**7**					
4	**06**				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
4	**06**	**12**				**Kecamatan Tarakan Barat**							**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**7**	**01**	**05**			

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	**06**	**12**	**30**				**Program Pembinaan Keagamaan**				**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**7**	**01**	**05**	**2**	**01**	
4	06	12	30	01			Pelaksanaan STQ/MTQ	Jumlah qori/qoriah yang mewakili ke tingkat kota	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah qori/qoriah yang mewakili ke tingkat kota							7	01	05	2	01	04
4	06	12	30	06			Pembinaan dan Bimbingan Mental Spiritual/ Masyrakat	Jumlah pelaksanaan lomba keluarga sakinah	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan lomba keluarga sakinah							7	01	05	2	01	04
4					**Urusan Pemerintahan**											**Unsur Kewilayahan**	**7**					
4	**01**				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
4	**01**	**12**				**Kecamatan Tarakan Barat**							**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**7**	**01**	**02**			
4	**01**	**12**	**43**				**Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan di Wilayah Kecamatan**				**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**						**7**	**01**	**02**	**2**	**04**	
4	01	12	43				Fasilitasi administrasi pemanfaatan bidang tanah	Jumlah SKPBT yang di terbitkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah SKPBT yang di terbitkan							7	01	02	2	04	01
4	01	12	43	01			Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan							7	01	02	2	01	05
4					**Urusan Pemerintahan**											**Unsur Kewilayahan**	**7**					
4	**01**				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				

KECAMATAN TARAKAN BARAT - 5

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	**01**	**12**				**Kecamatan Tarakan Barat**							**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**7**	**01**	**06**			
4	**01**	**12**	**45**				**Program Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Kecamatan**				**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						**7**	**01**	**06**	**2**	**01**	
4	01	12	45	01			Pelayanan administrasi kependudukan di wilayah kecamatan	Jumlah pelaksanaan razia KTP	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan razia KTP							7	01	06	2	01	11
4					**Urusan Pemerintahan**											**Unsur Kewilayahan**	**7**					
4	**01**				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
4	**01**	**12**				**Kecamatan Tarakan Barat**							**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**7**	**01**	**02**			
4	**01**	**12**	**44**				**Program Fasilitasi Penerbitan Ijin Usaha Mikro Kecil (UMK)**				**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**						**7**	**01**	**02**	**2**	**04**	
4	01	12	44	01			Fasilitasi penerbitan ijin usaha mikro kecil	Jumlah IUMK yang diterbitkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah IUMK yang diterbitkan							7	01	02	2	04	01
4					**Urusan Pemerintahan**											**Unsur Kewilayahan**	**7**					
4	**01**				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	**01**	**12**				**Kecamatan Tarakan Barat**							**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**7**	**01**	**06**			
4	**01**	**12**	**42**				**Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan di Wilayah Kecamatan**				**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						**7**	**01**	**06**	**2**	**01**	
							Pendataan deteksi dini permasalahan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Jumlah penyuluhan dan sosialisasi yang dilaksanakan	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyuluhan dan sosialisasi yang dilaksanakan							7	01	06	2	01	11
2																**Unsur Kewilayahan**	**7**					
2	**07**				**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
2	**07**	**12**				**Kecamatan Tarakan Barat**							**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**7**	**01**	**03**			
2	**07**	**12**	**15**				**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**				**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**						**7**	**01**	**03**	**2**	**02**	
2	07	12	15	01			Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Terbayarnya insentif RT,RW dan Kader Dasawisma dan pemilihan dan pelantikan RT dan RW	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terbayarnya insentif RT,RW dan Kader Dasawisma dan pemilihan dan pelantikan RT dan RW							7	01	03	2	02	03
2	07	12	15	14			Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Karang Anyar	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Karang Anyar	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Karang Anyar							7	01	03	2	02	03
2	07	12	15	15			Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Karang Balik	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Karang Balik	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Karang Balik							7	01	03	2	02	03
2	07	12	15	16			Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Karang Anyar Pantai	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Karang Anyar Pantai	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Karang Anyar Pantai							7	01	03	2	02	03
2	07	12	15	17			Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Karang Rejo	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Karang Rejo	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Karang Rejo							7	01	03	2	02	03
2	07	12	15	18			Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Karang Harapan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Karang Harapan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Karang Harapan							7	01	03	2	02	03
2																**Unsur Kewilayahan**	**7**					

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	**07**				**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
2	**07**	**12**				**Kecamatan Tarakan Barat**							**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**7**	**01**	**03**			
2	**07**	**12**	**17**				**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**				**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**						**7**	**01**	**03**	**2**	**02**	
2	07	12	17	02			Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Jumlah pelaksanaan Musrenbang	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah pelaksanaan Musrenbang							7	01	03	2	02	01
2	07	12	17	10			Pelaksanaan bulan bakti gotong royong	Jumlah pelaksanaan kegiatan bulan bakti gotong royong	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pelaksanaan kegiatan bulan bakti gotong royong							7	01	03	2	02	03
2	07	12	17				Penyusunan Profil dan Monografi	Jumlah dokumen profil dan monografi	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen profil dan monografi							7	01	02	2	04	02
2	07	12	17				Lomba teknologi tepat guna	Jumlah pelaksanaan lomba TTG	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pelaksanaan lomba TTG							7	01	03	2	02	03
2	07	12	17				Fasilitasi pelaksanaan kegiatan mahasiswa	Jumlah kelurahan yang memfasilitasi kegiatan mahasiswa	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah kelurahan yang memfasilitasi kegiatan mahasiswa							7	01	05	2	01	07
2	07	12	17				Penyelengaraan lomba kegiatan kemasyarakatan	Jumlah penyelenggaraan lomba kegiatan kemasyarakatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah penyelenggaraan lomba kegiatan kemasyarakatan							7	01	03	2	02	03
2																**Unsur Kewilayahan**	**7**					
2	**07**				**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
2	**07**	**12**				**Kecamatan Tarakan Barat**							**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**7**	**01**	**03**			
2	**07**	**12**	**20**				**Program Pembangunan Kelurahan**				**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**						**7**	**01**	**03**	**2**	**02**	
2	07	12	20	11			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Karang Anyar	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Karang Anyar	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Karang Anyar							7	01	03	2	02	02
2	07	12	20	12			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Karang Balik	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Karang Balik	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Karang Balik							7	01	03	2	02	02

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	07	12	20	13			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Karang Anyar Pantai	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Karang Anyar Pantai	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Karang Anyar Pantai							7	01	03	2	02	02
2	07	12	20	14			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Karang Rejo	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Karang Rejo	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Karang Rejo							7	01	03	2	02	02
2	07	12	20	15			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Karang Harapan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Karang Harapan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Karang Harapan							7	01	03	2	02	02

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TARAKAN

(B A P P E D A)

Jalan P. Irian No. 13 Tarakan Telp.(0551) 33910, Kota Tarakan – 77121

BERITA ACARA
VERIFIKASI PEMETAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
SESUAI NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di ruang rapat kantor Bappeda Kota Tarakan telah dilaksanakan verifikasi pemetaan Rencana Kerja Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Tahun 2021 sesuai nomenklatur dalam Permendagri Nomo 90 Tahun 2019.

Setelah dilakukan diskusi dan penelaahan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan maka disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan dalam Renja yang relevan dengan sub kegiatan/kegiatan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berjumlah Sembilan (9) kegiatan
2. Jumlah kegiatan yang diusulkan menjadi sub kegiatan baru berjumlah Sebelas (11) kegiatan
3. Rincian kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk menjadi bahan masukan dalam rangka penyampaian usulan pemutakhiran nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah kepada Kementerian/Lembaga terkait.

CAMAT,

Drs. M. ZAINUDDIN MAS'UD, AH.

NIP. 19691011 1990031010

Tim Pembahas

1. Achmat Zaini .....
2. Deasy Handayani.SE .....
3. Ramlah, SE .....
4. Hj. Kasbariah, SH,MH .....
5. Muhammadong S.S,M.Si .....

Kepala Bappeda Kota Tarakan,

H. SUPARLAN, ST,MT
Pembina Utama Muda
Nip 19640212 199803 1 004

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

TABEL KERJA KECAMATAN TARAKAN TENGAH
PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
KECAMATAN TARAKAN TENGAH

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
01					Urusan wajib																	
01	13					Kecamatan Tarakan tengah									Wajib							
01	13	06					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERITAHAN DAERAH				01					
											Adminstrasi keuangan						01	2	01			
01	13	06	01				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikstisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikstisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja							01	2	02	06		
4					Urusan Pemerintahan											Unsur Kewilayahan	7					
4	01				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan										Kecamatan		7	01				
4	01	10				Kecamatan Tarakan Tengah							Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7	01	01			
4	01	10	01				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Administrasi Umum						7	01	01	2	03	
4	01	10	01	01			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai							7	01	01	2	03	01
4	01	10	01	02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik							7	01	01	2	03	02
4	01	10	01	03			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di adakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di adakan							7	01	01	2	03	03
4	01	10	01	06			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajak kendaraannya terbayarkan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajak kendaraannya terbayarkan							7	01	01	2	03	06
4	01	10	01	07			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan							7	01	01	2	03	07
4	01	10	01	08			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia							7	01	01	2	03	08
4	01	10	01	10			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia							7	01	01	2	03	10
4	01	10	01	11			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia							7	01	01	2	03	11
4	01	10	01	12			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia							7	01	01	2	03	12
4	01	10	01	14			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah alat rumah tangga yang di adakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat rumah tangga yang di adakan							7	01	01	2	03	13
4	01	10	01	15			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia							7	01	01	2	03	15
4	01	10	01	17			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman							7	01	01	2	03	17
4	01	10	01	18			Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah							7	01	01	2	03	18
4					Urusan Pemerintahan											Unsur Kewilayahan	7					

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	**01**				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
4	**01**	**10**				**Kecamatan Tarakan Tengah**							**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**7**	**01**	**02**			
4	**01**	**10**	**01**				**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**						**7**	**01**	**02**	**2**		
4	01	10	01	19			Pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Jumlah tenaga pendukung penyelenggaraan administrasi perkantoran	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah tenaga pendukung penyelenggaraan administrasi perkantoran							7	01	02	2	01	01
4					**Urusan Pemerintahan**											**Unsur Kewilayahan**	**7**					
4	**01**				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
4	**01**	**10**				**Kecamatan Tarakan Tengah**							**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**7**	**01**	**01**			
4	**01**	**10**	**02**				**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**Administrasi Umum**						**7**	**01**	**01**	**2**	**03**	
4	**01**	**10**	**02**	**02**			Pembangunan rumah dinas	Jumlah pembangunan rumah dinas		Jumlah pembangunan rumah dinas												
4	01	10	02	03			Pembangunan gedung kantor	Jumlah pembangunan gedung kantor		Jumlah pembangunan gedung kantor												
4	01	10	02	05			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional							7	01	01	2	03	20
4	01	10	02	09			Pengadaana peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor							7	01	01	2	03	22
4	01	10	02	08			Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan peralatan rumah jabatan	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan peralatan rumah jabatan							7	01	01	2	03	23
4	01	10	02	10			Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur yang diadakan	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur yang diadakan							7	01	01	2	03	25
4	01	10	02	20			Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang terpelihara	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang terpelihara							7	01	01	2	03	26
4	01	10	02	22			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara							7	01	01	2	03	28
4	01	10	02	24			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah BBM,Suku Cadang dan Jasa service yang diadakan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah BBM,Suku Cadang dan Jasa service yang diadakan							7	01	01	2	03	30
4	01	10	02	26			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara							7	01	01	2	03	32
4	01	10	02	27			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara							7	01	01	2	03	34
4	01	10	02	42			Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah gedung/rumah yang dipelihara	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah gedung/rumah yang dipelihara							7	01	01	2	03	38
4					**Urusan Pemerintahan**											**Unsur Kewilayahan**	**7**					

KECAMATAN TARAKAN TENGAH - 3

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	**01**				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
4	**01**	**10**				**Kecamatan Tarakan Tengah**							**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**7**	**01**	**01**			
4	**01**	**10**	**03**				**Program peningkatan disiplin aparatur**				**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**						**7**	**01**	**01**	**2**	**04**	
4	**01**	**10**	**03**	**01**	4.01.10.03.01		Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin Absensi	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin Absensi							7	01	01	2	04	01
4	01	10	03	02			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan							7	01	01	2	04	02
4	01	10	03	03			Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pengadaan pakaian lapangan yang diadakan	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pengadaan pakaian lapangan yang diadakan							7	01	01	2	04	03
4	01	10	03	04			Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan							7	01	01	2	04	04
4	01	10	03	05			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian batik yang diadakan	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian batik yang diadakan							7	01	01	2	04	05
4					**Urusan Pemerintahan**											**Unsur Kewilayahan**	**7**					
4	**01**				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
4	**01**	**10**				**Kecamatan Tarakan Tengah**							**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**7**	**01**	**01**			
4	**01**	**10**					**Program peningkatan Sumber Daya Manusia**				**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**						**7**	**01**	**01**	**2**	**04**	
4	01	10	05	01			Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal							7	01	01	2	04	09
4	01	10	05	03			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mendapatkan bimtek	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mendapatkan bimtek							7	01	01	2	04	11
4	01	10	05	04			Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi paket reguler tentang pengelolaan keuangan daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi paket reguler tentang pengelolaan keuangan daerah							7	01	01	2	04	11
4					**Urusan Pemerintahan**											**Unsur Kewilayahan**	**7**					
4	**01**				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	**01**	**10**				**Kecamatan Tarakan Tengah**							**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**7**	**01**	**05**			
4	**01**	**10**	**30**				**Program Pembinaan Keagamaan**				**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**7**	**01**	**05**	**2**	**01**	
4	01	10	30	01			Pelaksanaan STQ/MTQ	Jumlah qori/qoriah yang mewakili ke tingkat kota	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah qori/qoriah yang mewakili ke tingkat kota							7	01	05	2	01	04
4	01	10	30	06			Penyelenggaraan lomba keagamaan	Jumlah pelaksanaan lomba keluarga sakinah	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan lomba keluarga sakinah							7	01	05	2	01	04
4					**Urusan Pemerintahan**											**Unsur Kewilayahan**	**7**					
4	**01**				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
4	**01**	**10**				**Kecamatan Tarakan Tengah**							**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**7**	**01**	**02**			
							Program fasilitasi pemanfaatan bidang tanah				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat						**7**	**01**	**02**	2	04	
4	01	10	43	01			Fasilitasi pemanfaatan bidang tanah	Fasilitasi pemanfaatan bidang tanah	Pelaksanaan urusan pemerintahan Yang terkait Denagn Pelayanan perijinan	Fasilitasi pemanfaatan bidang tanah							7	01	02	2	04	01
													PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				**7**	**01**	**05**			
4	**01**	**10**	**43**				**Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan di Wilayah Kecamatan**				Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						**7**	**01**	**05**	**2**	**01**	
4	01	10	43	01			Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah Konflik-Klonflik pertanahan yang tertangani di wilayah kecamatan	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Konflik-Klonflik pertanahan yang tertangani di wilayah kecamatan							7	01	05	2	01	05

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4					**Urusan Pemerintahan**											**Unsur Kewilayahan**	**7**					
4	**01**				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
4	**01**	**10**				**Kecamatan Tarakan Tengah**							**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**7**	**01**	**06**			
4	**01**	**10**	**45**				**Program Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Kecamatan**				**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						**7**	**01**	**06**	**2**	**01**	
4	01	10	45	01			Pelayanan administrasi kependudukan di wilayah kecamatan	Jumlah masyarakat yang memiliki e-KTP	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah masyarakat yang memiliki e-KTP							7	01	06	2	01	11
4					**Urusan Pemerintahan**											**Unsur Kewilayahan**	**7**					
4	**01**				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
4	**01**	**10**				**Kecamatan Tarakan Tengah**							**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**7**	**01**	**02**			
4	**01**	**10**	**44**				**Program Fasilitasi Penerbitan Ijin Usaha Mikro Kecil (UMK)**				**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**						**7**	**01**	**02**	**2**	**04**	
4	01	10	44	01			Fasilitasi penerbitan ijin usaha mikro kecil	Jumlah IUMK yang diterbitkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan								7	01	02	2	04	01
4					**Urusan Pemerintahan**											**Unsur Kewilayahan**	**7**					
4	**01**				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
4	**01**	**10**				**Kecamatan Tarakan Tengah**							**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**7**	**01**	**06**			

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	**01**	**10**	**42**				**Program fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan**				**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						**7**	**01**	**06**	**2**	**01**	
4	**01**	**10**	**42**	**01**			Sosialisasi ketenraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Jumlah penyuluhan dan sosialisai yang dilaksanakan	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyuluhan dan sosialisai yang dilaksanakan							7	01	06	2	01	11
4	**01**	**10**	**42**	**02**			Pendataan deteksi dini permasalahan K3 di wilayah Kecamatan	Jumlah data permasalahan K3 di wilayah kecamatan		Jumlah data permasalahan K3 di wilayah kecamatan												
4	**01**															**Unsur Kewilayahan**	**7**					
4	**01**				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
4	**01**	**10**				**Kecamatan Tarakan Tengah**							**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**7**	**01**	**03**			
4	**01**	**10**	**15**				**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**				**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**						**7**	**01**	**03**	**2**	**02**	
4	**01**	**10**	**15**	04	4.01.10 . 15 . 04		Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Terbayarnya insentif RT,RW dan Kader Dasawisma dan pemilihan dan pelantikan RT dan RW	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terbayarnya insentif RT,RW dan Kader Dasawisma dan pemilihan dan pelantikan RT dan RW							7	01	03	2	02	03
4	**01**	**10**	**15**	04			Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pamusian	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Pamusian	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Pamusian							7	01	03	2	02	03
4	**01**	**10**	**15**	05			Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Kampung I Skip	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Kampung I Skip	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Kampung I Skip							7	01	03	2	02	03
4	**01**	**10**	**15**	06			Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sebengkok	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Sebengkok	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Sebengkok							7	01	03	2	02	03
4	**01**	**10**	**15**	07			Pemberdayaan masyarakat Kelurahan selumit	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Selumit	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan selumit							7	01	03	2	02	03
4	**01**	**10**	**15**	08			Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Selumit Pantai	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Selumit Pantai	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Selumit Pantai							7	01	03	2	02	03
4																**Unsur Kewilayahan**	**7**					
4	**1**				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa**	4.01									**Kecamatan**		**7**	**01**				
4	**01**	**10**				**Kecamatan Tarakan Tengah**							**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**7**	**01**	**03**			
4	**01**	**10**	**17**				**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**				**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**						**7**	**01**	**03**	**2**	**01**	

KECAMATAN TARAKAN TENGAH - 7

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	**01**	**10**	**17**	02			Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Jumlah pelaksanaan Musrenbang	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah pelaksanaan Musrenbang							7	01	03	2	02	01
4	**01**	**10**	**17**	10			Pelaksanaan bulan bakti gotong royong	Jumlah pelaksanaan kegiatan bulan bakti gotong royong	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pelaksanaan kegiatan bulan bakti gotong royong							7	01	03	2	02	03
4	**01**	**10**	**17**				Penyusunan Profil dan Monografi	Jumlah dokumen profil dan monografi	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah dokumen profil dan monografi							7	01	03	2	02	01
4	**01**	**10**	**17**				Lomba teknologi tepat guna	Jumlah pelaksanaan lomba TTG	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pelaksanaan lomba TTG							7	01	03	2	02	03
4	**01**	**10**	**17**				Fasilitasi pelaksanaan kegiatan mahasiswa	Jumlah kelurahan yang memfasilitasi kegiatan mahasiswa	Sinkronisasi program kerja & kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah &swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah kelurahan yang memfasilitasi kegiatan mahasiswa							7	01	03	2	01	02
4	**01**	**10**	**17**	09			Penyelengaraan lomba kegiatan kemasyarakatan	Jumlah penyelenggaraan lomba kegiatan kemasyarakatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah penyelenggaraan lomba kegiatan kemasyarakatan							7	01	03	2	02	03
4	**01**				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa**											**Unsur Kewilayahan**	**7**					
4	**01**	**10**			**Kecamatan Tarakan Tengah**	4.01.10									**Kecamatan**		**7**	**01**				
4	**01**	**10**	**20**			**Program Pembangunan Kelurahan**							**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**7**	**01**	**03**			
4	**01**	**10**	**20**				Pembangunan Sarana dan Prasarana				**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**						**7**	**01**	**03**	**2**	**02**	
4	**01**	**10**	**20**	01			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Pamusian	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Pamusian	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Pamusian							7	01	03	2	02	02
4	**01**	**10**	**20**	02			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kampung I Skip	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Kampung I Skip	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Kampung I Skip							7	01	03	2	02	02
4	**01**	**10**	**20**	03			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Sebengkok	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Sebengkok	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Sebengkok							7	01	03	2	02	02
4	**01**	**10**	**20**	04			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Selumit	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Selumit	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Selumit							7	01	03	2	02	02
4	**01**	**10**	**20**	05			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Selumit Pantai	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Selumit Pantai	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Selumit Pantai							7	01	03	2	02	02

PEMERINTAH KOTA TARAKAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TARAKAN
(B A P P E D A)
Jalan P. Irian No. 13 Tarakan Telp.(0551) 33910, Kota Tarakan – 77121

BERITA ACARA
VERIFIKASI PEMETAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
SESUAI NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di ruang rapat kantor Bappeda Kota Tarakan telah dilaksanakan verifikasi pemetaan Rencana Kerja Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan Tahun 2021 sesuai nomenklatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Setelah dilakukan diskusi dan penelaahan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan maka disepakati hal-hal sebagai berikut:

- Jumlah kegiatan dalam Renja yang relevan dengan sub kegiatan/kegiatan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berjumlah 52 (Lima Puluh Dua) kegiatan
- Jumlah kegiatan yang diusulkan menjadi sub kegiatan baru berjumlah 0 (nol) kegiatan
- Rincian kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk menjadi bahan masukan dalam rangka penyampaian usulan pemutakhiran nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah kepada Kementerian/Lembaga terkait.

Camat Tarakan Utara,

BADARUDIN ISHAK, SH
NIP. 19680505 199403 1 018

Tim Pembahas

- Erly Soffian, SE .....
- Rahmawaty, SE .....
- Hj. Kasbariah, S.H., M.H. .....
- Muhammadong S.S.,M.Si. .....

Kepala Bappeda Kota Tarakan,

H. SUPARLAN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP 19640212 199803 1 004

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

TABEL KERJA
PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
KECAMATAN TARAKAN UTARA

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4					**Urusan Pemerintahan**											**Unsur Kewilayahan**	**7**					
4	**01**				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
4	**01**	**12**				**Kecamatan Tarakan Utara**							**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**7**	**01**	**01**			
4	**01**	**12**					**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan**				**Administrasi Keuangan**						**7**	**01**	**01**	**2**	**02**	
4	01	12					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja							7	01	01	2	02	06
4					**Urusan Pemerintahan**											**Unsur Kewilayahan**	**7**					
4	**01**				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
4	**01**	**12**				**Kecamatan Tarakan Utara**							**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**7**	**01**	**01**			
4	**01**	**12**	**01**				**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**Administrasi Umum**						**7**	**01**	**01**	**2**	**03**	
4	01	12	01	01			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai							7	01	01	2	03	01
4	01	12	01	02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik							7	01	01	2	03	02
4	01	12	01				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di adakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di adakan							7	01	01	2	03	03
4	01	12	01	06			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajak kendaraannya terbayarkan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajak kendaraannya terbayarkan							7	01	01	2	03	06
4	01	12	01	07			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan							7	01	01	2	03	07
4	01	12	01	08			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia							7	01	01	2	03	08
4	01	12	01	10			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia							7	01	01	2	03	10
4	01	12	01	11			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia							7	01	01	2	03	11
4	01	12	01	12			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia							7	01	01	2	03	12
4	01	12	01				Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah alat rumah tangga yang di adakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat rumah tangga yang di adakan							7	01	01	2	03	13

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	01	12	01				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia							7	01	01	2	03	15
4	01	12	01	17			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman							7	01	01	2	03	17
4	01	12	01				Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah							7	01	01	2	03	18
4					**Urusan Pemerintahan**											**Unsur Kewilayahan**	**7**					
4	**01**				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
4	**01**	**12**				**Kecamatan Tarakan Utara**							**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**7**	**01**	**02**			
4	**01**	**12**	**01**				**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**						**7**	**01**	**02**	**2**		
4	01	12	01	19			Pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Jumlah tenaga pendukung penyelenggaraan administrasi perkantoran	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah tenaga pendukung penyelenggaraan administrasi perkantoran							7	01	02	2	01	01
4					**Urusan Pemerintahan**											**Unsur Kewilayahan**	**7**					
4	**01**				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
4	**01**	**12**				**Kecamatan Tarakan Utara**							**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**7**	**01**	**01**			
4	**01**	**12**	**02**				**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**Administrasi Umum**						**7**	**01**	**01**	**2**	**03**	
4	01	12	02				Pembangunan gedung kantor	Jumlah pembangunan gedung kantor		Jumlah pembangunan gedung kantor												
4	01	12	02				Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional							7	01	01	2	03	20
4	01	12	02				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor							7	01	01	2	03	22
4	01	12	02				Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur yang diadakan	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur yang diadakan							7	01	01	2	03	25

KECAMATAN TARAKAN UTARA - 3

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	01	12	02	24			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah BBM,Suku Cadang dan Jasa service yang diadakan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah BBM,Suku Cadang dan Jasa service yang diadakan							7	01	01	2	03	30
4	01	12	02				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara							7	01	01	2	03	32
4	01	12	02	28			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara							7	01	01	2	03	34
4	01	12	02				Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang direhab	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang direhab							7	01	01	2	03	36
4	01	12	02				Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah gedung/rumah yang dipelihara	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah gedung/rumah yang dipelihara							7	01	01	2	03	38
4					**Urusan Pemerintahan**											**Unsur Kewilayahan**	**7**					
4	**01**				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
4	**01**	**12**				**Kecamatan Tarakan Utara**							**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**7**	**01**	**01**			
4	**01**	**12**	**03**				**Program peningkatan disiplin aparatur**				**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**						**7**	**01**	**01**	**2**	**04**	
4	01	12	03				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan							7	01	01	2	04	02
4	01	12	03				Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pengadaan pakaian lapangan yang diadakan	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pengadaan pakaian lapangan yang diadakan							7	01	01	2	04	03
4	01	12	03				Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan							7	01	01	2	04	04
4	01	12	03	05			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian batik yang diadakan	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian batik yang diadakan							7	01	01	2	04	05
4					**Urusan Pemerintahan**											**Unsur Kewilayahan**	**7**					
4	**01**				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
4	**01**	**12**				**Kecamatan Tarakan Utara**							**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**7**	**01**	**01**			
4	**01**	**12**					**Program peningkatan Sumber Daya Manusia**				**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**						**7**	**01**	**01**	**2**	**04**	

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	01	12					Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal							7	01	01	2	04	09
4	01	12					Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mendapatkan bimtek	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mendapatkan bimtek							7	01	01	2	04	11
4	01	12					Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi paket reguler tentang pengelolaan keuangan daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi paket reguler tentang pengelolaan keuangan daerah							7	01	01	2	04	11
4					**Urusan Pemerintahan**											**Unsur Kewilayahan**	**7**					
4	**06**				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
4	**06**	**12**				**Kecamatan Tarakan Utara**							**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**7**	**01**	**05**			
4	**06**	**12**	**30**				**Program Pembinaan Keagamaan**				**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**7**	**01**	**05**	**2**	**01**	
4	06	12	30	01			Pelaksanaan STQ/MTQ	Jumlah qori/qoriah yang mewakili ke tingkat kota	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah qori/qoriah yang mewakili ke tingkat kota							7	01	05	2	01	04
4	06	12	30	06			Pembinaan lembaga keagamaan	Jumlah pelaksanaan lomba keluarga sakinah		Jumlah pelaksanaan lomba keluarga sakinah												
4					**Urusan Pemerintahan**											**Unsur Kewilayahan**	**7**					
4	**01**				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	**01**	**12**				**Kecamatan Tarakan Utara**							**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**7**	**01**	**02**			
4	**01**	**12**	**43**				**Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan di Wilayah Kecamatan**				**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**						**7**	**01**	**02**	**2**	**04**	
4	01	12	43				Fasilitasi administrasi pemanfaatan bidang tanah	Jumlah Fasilitasi pemanfaatan bidang tanah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah Fasilitasi pemanfaatan bidang tanah							7	01	02	2	04	01
4	**01**	**12**				**Kecamatan Tarakan Utara**							**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**7**	**01**	**05**			
4	**01**	**12**	**43**				**Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan di Wilayah Kecamatan**				**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**7**	**01**	**05**	**2**	**01**	
4	01	12	43	01			Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah Konflik-Konflik Pertanahan yang dimediasi di Wilayah Kecamatan	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Konflik-Konflik Pertanahan yang dimediasi di Wilayah Kecamatan							7	01	05	2	01	05
4					**Urusan Pemerintahan**											**Unsur Kewilayahan**	**7**					
4	**01**				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
4	**01**	**12**				**Kecamatan Tarakan Utara**							**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**7**	**01**	**06**			

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	**01**	**12**	**45**				**Program Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Kecamatan**				**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						**7**	**01**	**06**	**2**	**01**	
4	01	12	45	01			Pelayanan administrasi kependudukan di wilayah kecamatan	Jumlah masyarakat yang memiliki e-KTP	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah masyarakat yang memiliki e-KTP							7	01	06	2	01	11
4					**Urusan Pemerintahan**											**Unsur Kewilayahan**	**7**					
4	**01**				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
4	**01**	**12**				**Kecamatan Tarakan Utara**							**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**7**	**01**	**02**			
4	**01**	**12**	**44**				**Program Fasilitasi Penerbitan Ijin Usaha Mikro Kecil (UMK)**				**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**						**7**	**01**	**02**	**2**	**04**	
4	01	12	44	01			Fasilitasi penerbitan ijin usaha mikro kecil	Jumlah IUMK yang diterbitkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah IUMK yang diterbitkan							7	01	02	2	04	01
4					**Urusan Pemerintahan**											**Unsur Kewilayahan**	**7**					
4	**01**				**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
4	**01**	**12**				**Kecamatan Tarakan Utara**							**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**7**	**01**	**06**			

KECAMATAN TARAKAN UTARA - 7

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
4	**01**	**12**	**42**				**Program Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan**				**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						**7**	**01**	**06**	**2**	**01**	
4	**01**	**12**	**42**	**02**			Pendataan deteksi dini permasalahan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Jumlah data permasalahan K3 (Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban) di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah data permasalahan K3 (Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban) di Wilayah Kecamatan							7	01	06	2	01	11
4	**01**	**12**	**42**	**01**			Sosialisai Ketenteraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan	Jumlah penyuluhan dan sosialisasi yang dilaksanakan		Jumlah penyuluhan dan sosialisasi yang dilaksanakan												
2																**Unsur Kewilayahan**	**7**					
2	**07**				**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
2	**07**	**12**				**Kecamatan Tarakan Utara**							**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**7**	**01**	**03**			
2	**07**	**12**	**15**				**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**				**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**						**7**	**01**	**03**	**2**	**02**	
2	07	12	15	01			Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah insentif RT,RW dan Kader Dasawisma dan pemilihan dan pelantikan RT dan RW	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah insentif RT,RW dan Kader Dasawisma dan pemilihan dan pelantikan RT dan RW							7	01	03	2	02	03
2	07	12	15	14			Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Juata Laut	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Kampung Empat		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Kampung Empat												
2	07	12	15	15			Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Kampung Juata Permai	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Kampung Enam		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Kampung Enam												
2	07	12	15	16			Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Juata Kerikil	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Gunung Lingkas		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Gunung Lingkas												
2	07	12	15	17			Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Lingkas Ujung	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Lingkas Ujung		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Lingkas Ujung												
2	07	12	15	18			Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Mamburungan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Mamburungan		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Mamburungan												
2	07	12	15	19			Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Mamburungan Timur	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Mamburungan Timur		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Mamburungan Timur												
2	07	12	15	20			Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Pantai Amal	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Pantai Amal		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Pantai Amal												

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2																**Unsur Kewilayahan**	**7**					
2	**07**				**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
2	**07**	**12**				**Kecamatan Tarakan Utara**							**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**7**	**01**	**03**			
2	**07**	**12**	**17**				**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**				**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**						**7**	**01**	**03**	**2**	**02**	
2	07	12	17	02			Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Jumlah pelaksanaan Musrenbang	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah pelaksanaan Musrenbang							7	01	03	2	02	01
2	07	12	17	10			Pelaksanaan bulan bakti gotong royong	Jumlah pelaksanaan kegiatan bulan bakti gotong royong	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pelaksanaan kegiatan bulan bakti gotong royong							7	01	03	2	02	03
2	07	12	17				Penyusunan Profil dan Monografi	Jumlah dokumen profil dan monografi	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen profil dan monografi							7	01	02	2	04	02
2	07	12	17				Lomba teknologi tepat guna	Jumlah pelaksanaan lomba TTG	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pelaksanaan lomba TTG							7	01	03	2	02	03
2	07	12	17				Fasilitasi pelaksanaan kegiatan mahasiswa	Jumlah kelurahan yang memfasilitasi kegiatan mahasiswa		Jumlah kelurahan yang memfasilitasi kegiatan mahasiswa												
2	07	12	17				Penyelengaraan lomba kegiatan kemasyarakatan	Jumlah penyelenggaraan lomba kegiatan kemasyarakatan		Jumlah penyelenggaraan lomba kegiatan kemasyarakatan												
2																**Unsur Kewilayahan**	**7**					
2	**07**				**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**										**Kecamatan**		**7**	**01**				
2	**07**	**12**				**Kecamatan Tarakan Utara**							**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**7**	**01**	**03**			
2	**07**	**12**	**20**				**Program Pembangunan Kelurahan**				**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**						**7**	**01**	**03**	**2**	**02**	
2	07	12	20	11			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kampung Juata Laut	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Kampung Empat	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Kampung Empat							7	01	03	2	02	02
2	07	12	20	12			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kampung Permai	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Kampung Enam		Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Kampung Enam												

KECAMATAN TARAKAN UTARA - 9

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA									PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
2	07	12	20	13			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Juata Kerikil	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Gunung Lingkas		Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Gunung Lingkas												
2	07	12	20	14			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Lingkas Ujung	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Lingkas Ujung		Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Lingkas Ujung												
2	07	12	20	15			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Mamburungan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Mamburungan		Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Mamburungan												
2	07	12	20	16			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Mamburungan Timur	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Mamburungan Timur		Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Mamburungan Timur												
2	07	12	20	17			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Pantai Amal	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Pantai Amal		Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Pantai Amal												

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TARAKAN

(B A P P E D A)

Jalan P. Irian No. 13 Tarakan Telp.(0551) 33910, Kota Tarakan – 77121

BERITA ACARA
VERIFIKASI PEMETAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
SESUAI NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di ruang rapat kantor Bappeda Kota Tarakan telah dilaksanakan verifikasi pemetaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2021 sesuai nomenklatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Setelah dilakukan diskusi dan penelaahan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan maka disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan dalam Renja yang relevan dengan sub kegiatan/kegiatan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berjumlah 16 kegiatan
2. Jumlah kegiatan yang diusulkan menjadi sub kegiatan baru berjumlah 5 kegiatan karena tidak terakomodir dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
3. Rincian kegiatan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk menjadi bahan masukan dalam rangka penyampaian usulan pemutakhiran nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah kepada Kementerian/Lembaga terkait.

Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan
Persandian

Drs. TARMIJI, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19640406 199203 1 018

Tim Pembahas

1. Supriono, SE, M.Si .....
2. Prianda Karva Ananta, SE .....
3. Oqueen Veronica R .....
4. Hj. Kasbariah, SH,MH .....
5. Muhammadong S.S,M.Si .....

Kepala Bappeda Kota Tarakan,

H. SUPARLAN, ST,MT
Pembina Utama Muda
Nip. 19640212 199803 1 004

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

TABEL KERJA PEMETAAN PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019									
KODE					PROGRAM/KEGIATAN	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN	KODE					INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN
2	**10**					**WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**2**	**16**				
2	**10**	**2.10.01.1**	**23**		**Program Optimalisasi Pemanfaatan Tekhnologi Informasi**		**Program Informasi dan Komunikasi Publik**				2	16	02			**Persentase jumlah jenis layanan pengaduan yang ditindak lanjuti (call center 112)**
2	10	2.10.01.1	23	2	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik			Pengelolaan informasi dan komunikasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Pelayanan informasi publik		2	16	02	2.01	06	Jumlah jenis layanan pengaduan publik (call center 112)
2	**10**	**2.10.01.1**	**15**		**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**		**Program Aplikasi Informatika**				2	16	03			**Persentase OPD yang terkoneksi bandwidth**
2	10	2.10.01.1	15	02	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi			Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	Penyelenggaraan sistem informasi intra pemerintah daerah		2	16	03	2.02	04	Jumlah bandwith, jaringan antar OPD,pemeliharaan, NOC dll
2	10	2.10.01.1	15	03	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi		**Program Informasi dan Komunikasi Publik**	Pengelolaan informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan		2	16	02	2.01	12	Jumlah dialog interaktif, kegiatan PPID dll
2	10	2.10.01.1	18	05	Komunikasi Publik Melalui Dialog Interaktif Radio dan											
2	**10**	**2.10.01.1**	**17**		**Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi**		**Program Aplikasi Informatika**									**Persentase ASN yang bersertifikat**
2	10	2.10.01.1	17	01	Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi			Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya tekhnologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah		2	16	03	2.02	10	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan
2	**10**	**2.10.01.1**	**18**		**Program Kerjasama Informasi dan Media Massa**		**Program Informasi dan Komunikasi Publik**									**Persentase terselenggaranya kerjasama pemkot dengan mas media**
2	10	2.10.01.1	18	01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah			Pengelolaan informasi dan komunikasi	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik		2	16	02	2.01	04	Jumlah jenis dokumentasi hasil pembangunan Kota Tarakan
2	10	2.10.01.1	18	02	Pengembangan informasi dan komunikasi											Jumlah jenis sarana sosialisasi dan publikasi (Lightbox,backdrop,dll)
2	10	2.10.01.1	18	03	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah											

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019									
KODE					PROGRAM/KEGIATAN	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN	KODE					INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN
2	10	2.10.01.1	18	04	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat			pemerintah daerah kabupaten/kota	Pengelolaan media komunikasi publik		2	16	02	2.01	04	Jumlah cover baleho dan spanduk yang menampilkan program pemerintah kota
2	10	2.10.01.1	18	05	Penyelarasan informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				Layanan hubungan media		2	16	02	2.01	07	Jumlah jenis iklan di media cetak dan elektronik
2	10	2.10.01.1	18	08	Pameran Pembangunan											
2	**14**					**WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR STATISTIK**				**PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**2**	**20**				
2	**14**	**2.14.01.1**	**15**		**Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah**		**Program Penyelenggaraan statistik sektoral**				2	20	02			**Persentase data sektoral yang dipublikasikan**
2	14	2.14.01.1	15	2	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah			Penyelenggaraan statistik sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral		2	20	02	2.01	01	Jumlah jenis buku data dan statistik daerah (Buku data IKM,IPM,INKESRA,Analisis tinjauan perekonomian daerah , Kota Tarakan dalam angka)
2	14	2.14.01.1	15	3	Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB				Membangun metadata statistik sektoral		2	20	02	2.01	02	Jumlah jenis buku data PDRB (Buku data PDRB sektoral)
2	14	2.14.01.1	15	5	Forum Komunikasi Statistik Daerah (FKSD)				Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral		2	20	02	2.01	04	Jumlah kegiatan dan rakor FKSD regional dan pusat
2	**15**					**WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PERSANDIAN**				**PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**2**	**21**				
2	**15**	**2.15.01.1**	**15**		**Penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah**		**Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi**				2	21	02			Persentase terlaksananya penyusunan kebijakan tata kelola informasi, sosialisasi kegiatan dan aplikasi, serta bimtek kegiatan
2	15	2.15.01.1	15	01	Penyusunan kebijakan tata kelola keamananan informasi				Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kab/kota		2	21	02	2.01	01	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019									
KODE					PROGRAM/KEGIATAN	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN	KODE					INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN
2	15	2.15.01.1	15	02	Peningkatan kapasitas SDM dan pengembangan tekhnologi keamanan informasi			Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kab/kota	Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kab/kota		2	21	02	2.01	02	Jumlah sosialisasi surat elektronik dan sandi
2	15	2.15.01.1	15	03	Monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang keamaman informasi				Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kab/kota		2	21	02	2.01	02	Jumlah bimtek kegiatan dan monev bidang keamanan informasi
2	**10**	**2.10.01.1**	**21**		**Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi**											Belum ada dalam PERMENDAGRI 90 Tahun 2019
2	10	2.10.01.1	21	01	Pembinaan/Penertiban perusahaan jasa titipan											
2	10	2.10.01.1	21	02	Pembinaan/Penertiban Anggota ORARI/RAPI											
2	10	2.10.01.1	21	03	Monitoring Menara Telekomunikasi											
2	10	2.10.01.1	21	04	Pembinaan/Penertiban penyelenggara televisi siaran											
2	10	2.10.01.1	21	05	Sosialisasi Peraturan Telekomunikasi											

TABEL KERJA PEMETAAN PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019									
KODE					PROGRAM/KEGIATAN	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN	KODE					INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN
2	**10**										**2**	**16**				
2	**10**	**2.10.01.1**	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**				2	16	01			**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**
2	10	2.10.01.1	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2	16	01	2.03	01	Jumlah materai dan paket pengiriman
2	10	2.10.01.1	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		2	16	01	2.03	02	Jumlah bulan kebutuhan dasar energi dan air selama satu tahun
2	10	2.10.01.1	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		2	16	01	2.03	06	Jumlah pengurusan perpanjangan surat kendaraan bermotor
2	10	2.10.01.1	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		2	16	01	2.03	07	Jumlah orang yang menerima tunjangan
2	10	2.10.01.1	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		2	16	01	2.03	08	Jumlah jenis peralatan kebersihan dan bahan-bahan pembersih
2	10	2.10.01.1	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				Penyediaan Alat Tulis Kantor		2	16	01	2.03	10	Jumlah jenis ATK yang tersedia
2	10	2.10.01.1	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		2	16	01	2.03	11	Jumlah jenis barang cetakan/penggandaan dan penjilidan
2	10	2.10.01.1	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2	16	01	2.03	12	Jumlah alat-alat listrik/penyediaan instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor
2	10	2.10.01.1	01	13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		2	16	01	2.03	14	Jumlah jenis alat rumah tangga
2	10	2.10.01.1	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		2	16	01	2.03	15	Jumlah jenis bahan bacaan
2	10	2.10.01.1	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman				Penyediaan Makanan dan Minuman		2	16	01	2.03	17	Jumlah penyediaan makan minum rapat dan tamu
2	10	2.10.01.1	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		2	16	01	2.03	18	Jumlah rapat teknis/koordinasi/konsultasi dan informasi dengan kabupaten/kota di wilayah Kaltara dan di luar propinsi Kaltara
2	**10**	**2.10.01.1**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**				2	16	01			**Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**
2	10	2.10.01.1	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	**WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	**PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	2	16	01	2.03	20	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan
2	10	2.10.01.1	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		2	16	01	2.03	22	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor
2	10	2.10.01.1	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		2	16	01	2.03	24	Jumlah jenis peralatan gedung kantor
2	10	2.10.01.1	02	10	Pengadaan Mebeleur				Pengadaan Mebeleur		2	16	01	2.03	25	Jumlah jenis mebeleur yang diperlukan

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019									
KODE					PROGRAM/KEGIATAN	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN	KODE					INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN
2	10	2.10.01.1	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		2	16	01	2.03	28	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2	10	2.10.01.1	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		2	16	01	2.03	30	Jumlah Liter BBM / Oli yang diadakan, Jumlah jenis suku cadang,Jumlah jenis service
2	10	2.10.01.1	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		2	16	01	2.03	32	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (alat elektronik,ac,komputer,printer,mesin foto copy,gorden,peralatan liputan)
2	**10**	**2.10.01.1**	**03**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**				**2**	**16**	**01**			**Persentase ASN yang disiplin**
2	10	2.10.01.1	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		2	16	01	2.04	02	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Kemeja Putih & PDH)
2	10	2.10.01.1	03	04	Pengadaan Pakaian KORPRI				Pengadaan Pakaian KORPRI		2	16	01	2.04	04	Jumlah Pakaian KORPRI
2	10	2.10.01.1	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu				Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu		2	16	01	2.04	05	Jumlah pakaian khusus hari tertentu
2	**10**	**2.10.01.1**	**05**		**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**						**2**	**16**	**01**			**Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat dan Bimtek**
2	10	2.10.01.1	05	02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sosialisasi peraturan perundang-undangan		2	16	01	2.04	10	Jumlah sosialisasi UU Pers, UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dll
2	**10**	**2.10.01**	**06**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**				**2**	**16**	**01**			**Persentase dokumen laporan capaian kinerja dan keuanganyang disusun tepat waktu**
2	10	2.10.01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Administrasi Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2	16	01	2.02	06	Jumlah dokumen LAKIP
2	10	2.10.01	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		2	16	01	2.04	09	Jumlah dokumen laporan realisasi dan neraca keuangan

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TARAKAN

(B A P P E D A)

Jalan P. Irian No. 13 Tarakan Telp.(0551) 33910, Kota Tarakan – 77121

BERITA ACARA
VERIFIKASI PEMETAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
SESUAI NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di ruang rapat kantor Bappeda Kota Tarakan telah dilaksanakan verifikasi pemetaan Rencana Kerja Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2021 sesuai nomenklatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Setelah dilakukan diskusi dan penelaahan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan maka disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan dalam Renja yang relevan dengan sub kegiatan/kegiatan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berjumlah 12 kegiatan
2. Jumlah kegiatan yang diusulkan menjadi sub kegiatan baru berjumlah 2 kegiatan
3. Rincian kegiatan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk menjadi bahan masukan dalam rangka penyampaian usulan pemutakhiran nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah kepada Kementerian/Lembaga terkait.

Inspektur,

PEMERINTAH KOTA TARAKAN INSPEKTORAT

Abd. Azis Hasan, A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 197502121995011001

Tim Pembahas

1. H. Said, SE, MM .....
2. Hj. Kasbariah, SH,MH .....
3. Muhammadong S.S,M.Si .....
4. Aril, SE .....
5. Umratun .....

Kepala Bappeda Kota Tarakan,

PEMERINTAH KOTA TARAKAN BAPPEDA

H. SUPARLAN, ST,MT
Pembina Utama Muda
Nip. 19640212 199803 1 004

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

TABEL KERJA
PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
INSPEKTORAT WILAYAH KOTA TARAKAN

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH														
						Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah laporan hasil pengawasan			Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Program Penyelenggaraan Pengawasan								
						Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah	jumlah laporan hasil pemeriksaan khusus			Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu		Program Penyelenggaraan Pengawasan								
						Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah laporan pemutakhiran data													
						Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan	jumlah laporan	Pemantauan Kinerja dan keuangan		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Program Penyelenggaraan Pengawasan								
						Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	jumlah kegiatan/rapat koordinasi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan fasilitasi Pengawasan		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi								
						Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah rapat	Pemantauan Kinerja dan keuangan		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Program Penyelenggaraan Pengawasan								
						pelaksanaan pengendalian gratifikasi	Jumlah Laporan	Asistensi dan Pendampingan		Asistensi dan Pendampingan		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi								
						Prog ram Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan														
						Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan													
						Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Jumlah auditor yang mengikuti pelatihan teknis pengawasan													
						Program peningkatan sistem pengendalian internal pemerintah dan kesadaran penyelenggara negara														
						Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu	Review Kinerja dan Keuangan		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Program Penyelenggaraan Pengawasan								

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
						Monitoring evaluasi kegiatan pembangunan Kota Tarakan	Jumlah laporan Monev	Evaluasi Kinerja dan Keuangan		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Program Penyelenggaraan Pengawasan								
						Monitoring dan supervisi pelaksanaan SPIP	Jumlah laporan	Asistensi dan Pendampingan		Asistensi dan Pendampingan		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi								
						Evaluasi reformasi birokrasi	Jumlah laporan	Evaluasi Kinerja dan Keuangan		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Program Penyelenggaraan Pengawasan								
						Sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli)	Jumlah kegiatan	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat		Asistensi dan Pendampingan		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi								

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TARAKAN

(B A P P E D A)

Jalan P. Irian No. 13 Tarakan Telp.(0551) 33910, Kota Tarakan – 77121

BERITA ACARA
VERIFIKASI PEMETAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
SESUAI NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di ruang rapat kantor Bappeda Kota Tarakan telah dilaksanakan verifikasi pemetaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kota Tarakan Tahun 2021 sesuai nomenklatur dalam Permendagri Nomo 90 Tahun 2019.

Setelah dilakukan diskusi dan penelaahan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan maka disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan dalam Renja yang relevan dengan sub kegiatan/kegiatan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berjumlah 11 kegiatan
2. Jumlah kegiatan yang diusulkan menjadi sub kegiatan baru berjumlah 4 kegiatan
3. Rincian kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk menjadi bahan masukan dalam rangka penyampaian usulan pemutakhiran nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah kepada Kementerian/Lembaga terkait.

Kepala Satpol PP & PMK

HANIP,S.AP
Pembina Utama Muda
Nip.196305081986021006

Tim Pembahas

1. Dison,SH .....
2. Abdullah,SE,M.HP .....
3. Irwan,SE .....
4. Hj. Kasbariah, SH,MH .....
5. Muhammadong S.S,M.Si .....

Kepala Bappeda Kota Tarakan,

H. SUPARLAN, ST,MT
Pembina Utama Muda
Nip.19640212 199803 1 004

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

TABEL KERJA
PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
														URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		**1**	**05**			
1.05	1.05			Urusan wajib pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyrakat								PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**1**	**05**	**02**		
1.05	1.05.02				Satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran					Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						**1**	**05**	**02**	**1.01**	
1.05	1.05.02	16	01			Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja		Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum								1	05	02	1.01	01
1.05	1.05.02	16	02			Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota								1	05	02	1.01	03
						Pembinaan kelinmasan		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum								1	05	02	1.01	04
1.05	1.05.02	15	07			Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan keamanan dan kenyamanan lingkungan		Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia								1	05	02	1.01	05
1.05	1.05.02	15	02			Pembangunan pos jaga/ ronda		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum								1	05	02	1.01	08
										Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur						**1**	**05**	**02**	**1.02**	
1.05	1.05.02	20	09			Penyuluhan dan sosialisasi pemberantasan penyakit masyarakat		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota								1	05	02	1.02	01
1.05	1.05.02	15	05			Pengendalian keamanan lingkungan		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota								1	05	02	1.02	03
												PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN				**1**	**05**	**04**		
										Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						**1**	**05**	**04**	**2.01**	
1.04	1.05.02	21	02			Pencegahan peringatan dini dan pengendalian bencana (kebakaran)		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								1	05	04	2.01	01
1.04	1.05.02	21	01			Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pencegahan dan penanggulangan bencana (kebakaran)														
1.04	1.05.02	22	02			Koordinasi pencegahan dan penanggulangan bencana (kebakaran)														
1.04	1.05.02	22	05			Rekrutmen dan pembinaan tenaga khusus penanggulangan bencana (kebakaran)														
								Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran								1	05	04	2.01	03
								Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								1	05	04	2.01	04
1.04	1.05.02	22	03			Pengadaan sarana dan prasarana tanggap darurat dan logistik penanggulangan bencana (kebakaran)		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								1	05	04	2.01	02
1.04	1.05.02	22	04			Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran														
1.04	1.05.02	22	01			Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual tanggap darurat bencana kebakaran														
										Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						**1**	**05**	**04**	**2.02**	
1.04	1.05.02	21	04			Monitoring mitigasi bencana (kebakaran)		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran								1	05	04	2.02	01
								Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran								1	05	04	2.02	02
										Investigasi Kejadian Kebakaran						**1**	**05**	**04**	**2.03**	
								Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran								1	05	04	2.03	01
										Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						**1**	**05**	**04**	**2.04**	
1.04	1.05.02	21	03			Penyuluhan dan pengembangan SDM dalam pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana (kebakaran)		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat								1	05	04	2.04	01

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TARAKAN

(B A P P E D A)

Jalan P. Irian No. 13 Tarakan Telp.(0551) 33910, Kota Tarakan – 77121

BERITA ACARA
VERIFIKASI PEMETAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
SESUAI NOMENKLATUR PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di ruang rapat kantor Bappeda Kota Tarakan telah dilaksanakan verifikasi pemetaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan Tahun 2021 sesuai nomenklatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Setelah dilakukan diskusi dan penelaahan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan maka disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan dalam Renja yang relevan dengan sub kegiatan/kegiatan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berjumlah 5 Program dan 11 Kegiatan
2. Jumlah kegiatan yang diusulkan menjadi Sub Kegiatan baru berjumlah 5 Program 11 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan
3. Rincian kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk menjadi bahan masukan dalam rangka penyampaian usulan pemutakhiran nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah kepada Kementerian/Lembaga terkait.

K E P A L A
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

MOHAMMAD HARIS, SH,.M.Hum
NIP. 19661001 199803 1 001

TIM PEMBAHAS

1. SAID ABDULLAH, SE .....
2. Drs. DWI SANTOSO, M.Si .....
3. AMAS RAMADHAN, SE .....
4. Hj. KASBARIAH, SH,.MH .....
5. MUHAMMADONG, S.S,.M.Si .....

KEPALA BAPPEDA KOTA TARAKAN

H. SUPARLAN, ST,.MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640212 199803 1 004

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

TABEL KERJA
PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TARAKAN

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	19	17	03			Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah pelaksanaan kegiatan/sosialisasi	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa		Pelaksanaan Monitoring evaluasi dan pelaporan Bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah pelaksanan kegiatan/sosialisasi	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**			**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	8	01	02	2	01	03
1	19	17	04			Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap rasa nasionalisme	Jumlah sosialisasi dan outbond bagi masyarakat dan pelajar untuk peningkatan rasa nasionalisme	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap rasa nasionalisme		Pelaksanaan Monitoring evaluasi dan pelaporan Bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah sosialisasi dan outbond bagi masyarakat dan pelajar untuk peningkatan rasa nasionalisme										
1	19	18	01			Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan	Jumlah pelaksanaan kegiatan/sosialisasi	Fasilitasi pencapaian haloqah dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan		Penyusunan program kerja bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah pelaksanaan/kegiatan sosialisasi										
1	19	18	02			Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangasaan	Jumlah pelaksanaan kegiatan/sosialisasi	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan		Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah pelaksanaan kegiatan/sosialisasi										

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	19	21	02			Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik	Jumlah pelaksanaan kegiatan/sosialisasi	Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik		Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah pelaksanaan kegiatan/sosialisasi	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase penguatan kelembagaan demokrasi			8	01	03	2	01	03
1	19	21	03			koordinasi forum-forum diskusi politik	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait	Koordinasi forum-forum diskusi politik		Pelaksanaan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait								
1	19	23	01			Fasilitasi penyelenggaraan pemilu	Terlaksananya pemilu dengan jujur, adil, jelas dan rahasia serta sukses	Fasilitasi penyelenggaraan pemilu		Penyusunan program kerja bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan			Terlaksananya pemilu dengan jujur, adil, jelas dan rahasia serta sukses								

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	19	21	07			Verifikasi bantuan keuangan parpol	jumlah kegiatan lokakarya dan sarasehan bagi Parpol	Verifikasi bantuan keuangan parpol		Penyusunan program kerja bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan			jumlah kegiatan lokakarya dan sarasehan bagi Parpol									
1	19	21	08			Pembentukan desk pilkada gubernur dan wakil gubernur	Prosentase tingkat partisipasi masyarakat (pilgub)	Pembentukan desk pilkada gubernur dan wakil gubernur		Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah			Prosentase tingkat partisipasi masyarakat (pilgub)									
1	19	21	09			Pembentukan tim monitoring Pileg dan Pilpres	Prosentase tingkat partisipasi masyarakat (pilpres)	Pembentukan tim monitoring Pileg dan Pilpres					Prosentase tingkat partisipasi masyarakat (pilpres)									
1	19	21	10			Pembentukan desk pilkada walikota dan wakil walikota	Prosentase tingkat partisipasi masyarakat (pilwali)	Pembentukan desk pilkada walikota dan wakil walikota		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Prosentase tingkat partisipasi masyarakat (pilwali)									

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	19	21	01			Penyuluhan pendidikan politik masyarakat	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	Penyuluhan pendidikan politik		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Jumlah pelaksanaan sosialisasi									
1	19	21	03			koordinasi forum-forum diskusi politik	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait	Koordinasi forum-forum diskusi politik		Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah			Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait									

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	19	23	01			Fasilitasi penyelenggaraan pemilu	jumlah kegiatan lokakarya dan sarasehan bagi Parpol	Fasilitasi penyelenggaraan pemilu		Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah			jumlah kegiatan lokakarya dan sarasehan bagi Parpol								
1	19	15	08			Pendataan dan verifikasi ormas	Jumlah Ormas yang diverifikasi	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Jumlah Ormas yang diverifikasi			8	01	04	2	01	03
1	19	15	09			Fasilitasi bantuan hibah ormas	Jumlah Ormas yang terfasilitasi						Jumlah Ormas yang terfasilitasi								
1	19	21	04			Penyusunan data base partai politik	Jumlah partai politik yang terdata	Penyusunan data base partai politik		Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			Jumlah partai politik yang terdata								

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	19	21	05			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen laporan monev	Monitoring evaluasi dan pelaporan		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Jumlah dokumen laporan monev			8	01	04	2	01	04
1	19	19	05			Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah sosialisasi, rapat Tim, penyuluhan, Fokus Group Diskusi, pelatihan dan simulasi	1.Fasilitasi tim penanganan konflik sosial		Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah			Jumlah sosialisasi, rapat Tim, penyuluhan, Fokus Group Diskusi, pelatihan dan simulasi			8	01	06			
								2.Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan														
								3. Pencegahan dini potensi kerawanan konflik ekonomi, sosial dan SARA														

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
						Progrsm pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah sosialisasi, rapat Tim, penyuluhan, Fokus Group Diskusi, pelatihan dan monitoring	1. Fasilitasi Tim kewaspadaan dini di daerah		Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah		**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Jumlah sosialisasi, rapat Tim, penyuluhan, Fokus Group Diskusi, pelatihan dan monitoring								
								2. fasilitasi forum kewaspadaan dini di daerah (FKDM)													
								3. Pembinaan deteksi dini untuk mencegah gangguan kamtibmas bagi Aparat kecamatan dan kelurahan													
								4. Pembinaan deteksi dini masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di kelurahan													
								5. Pemantauan dan penyelesaian masalah perbatasan dan orang asing													
1	19	20	09			Penyuluhan dan sosialisasi pemberantasan penyakit masyarakat	jumlah penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat						jumlah penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat								

PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA								PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	19	17	01			Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah sosialisasi tentang pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan masyarakat dan pembentukan tim pembinaan kerukunan dalam kehidupan beragama						Jumlah sosialisasi tentang pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan masyarakat dan pembentukan tim pembinaan kerukunan dalam kehidupan beragama									
1	19	19	03			Fasilitasi Tim Kewaspadaan Dini di Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait			8	01	06	2	01	03
1	19	19	04			Fasilitasi forum pembauran kebangsaan (FPK)	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait	Fasilitasi forum pembauran kebangsaan (FPK)		Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah			Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait								